

SALINAN
NOMOR 24/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor E);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 56-I/2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RKPD Provinsi Jawa Timur.

- (2) RKPD Tahun 2021 merupakan pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RKPD tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2), akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, dapat dilakukan penambahan program/kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD.
- (2) Keadaan dikecualikan akibat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan

perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat *specific grant* atau dengan peruntukan khusus, yang peruntukannya memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang;
 - b. merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, atau dampak atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat *specific grant* atau dengan peruntukan khusus; dan/atau
 - c. merupakan instruksi atau permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan program/kegiatan baru pada KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu disusun berita acara kesepakatan Walikota dengan ketua DPRD.
- (4) Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini merupakan perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun berkenaan.
- (5) Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan.
- (6) Usulan lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini merupakan perkiraan, dan kepastian lokasi mengacu pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Juli 2020

WALIKOTA MALANG,

Ttd
SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Ttd
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,



TABRANI SH, M.Hum
Pembina Tk.I
19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TENTANG :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Pasal 1 ayat (22) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.”

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Regulasi mengenai RKPD salah satunya didasarkan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah. Pasal dan ayat tersebut membahas mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di tingkat Pemerintah Daerah dokumen perencanaan daerah antara lain, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 kepada pemerintah daerah setempat untuk

disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wilayah bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 8 ayat (1-4) menyebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun RKPD menggunakan 4 (empat) pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan politis, dimaksud dengan pendekatan politis adalah bagaimana menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya didasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RKPD.
2. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi, dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom up*), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Proses penyusunan RKPD tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan persiapan penyusunan RKPD

meliputi penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Artinya, Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dalam RPJMD dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah nasional.

Keterkaitan rencana kinerja perangkat daerah dengan eksistensi kondisi dan potensi daerah Kota Malang tahun 2021 yang dipadukan dengan permasalahan dan isu strategis terkini harus mampu diformulasikan melalui dokumen perencanaan yang aktual dan berkelanjutan. Analisis yang berkaitan dengan kondisi dan potensi Kota Malang perlu mempertimbangkan partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbang) sehingga menghasilkan isu dan program prioritas yang dibutuhkan masyarakat untuk disajikan dalam dokumen RKPD Kota Malang Tahun 2021.

Dari hasil Musrenbang RPJMD untuk menemukan program prioritas yang telah direncanakan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023, maka kedudukan RKPD Kota Malang Tahun 2021 dalam dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 terletak pada titik tekan arah pembangunan Kota Malang tahun 2021. Adapun rencana pembangunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 untuk mewujudkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya, menjaga daya beli dan perlindungan sosial, infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial, serta pemantapan industri kreatif masyarakat. Sebagaimana wujud dari implementasi tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023.

Indonesia sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19, dimana hampir seluruh wilayah di Indonesia ikut terdampak, salah satunya adalah Kota Malang, berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, oleh karena hal tersebut beberapa

kebijakan Kota Malang untuk menindaklanjuti hal tersebut adalah memfokuskan anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 - 22) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor E);
 - 23) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);

- 24) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
- 25) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 38).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Dalam perencanaan pembangunan tingkat pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

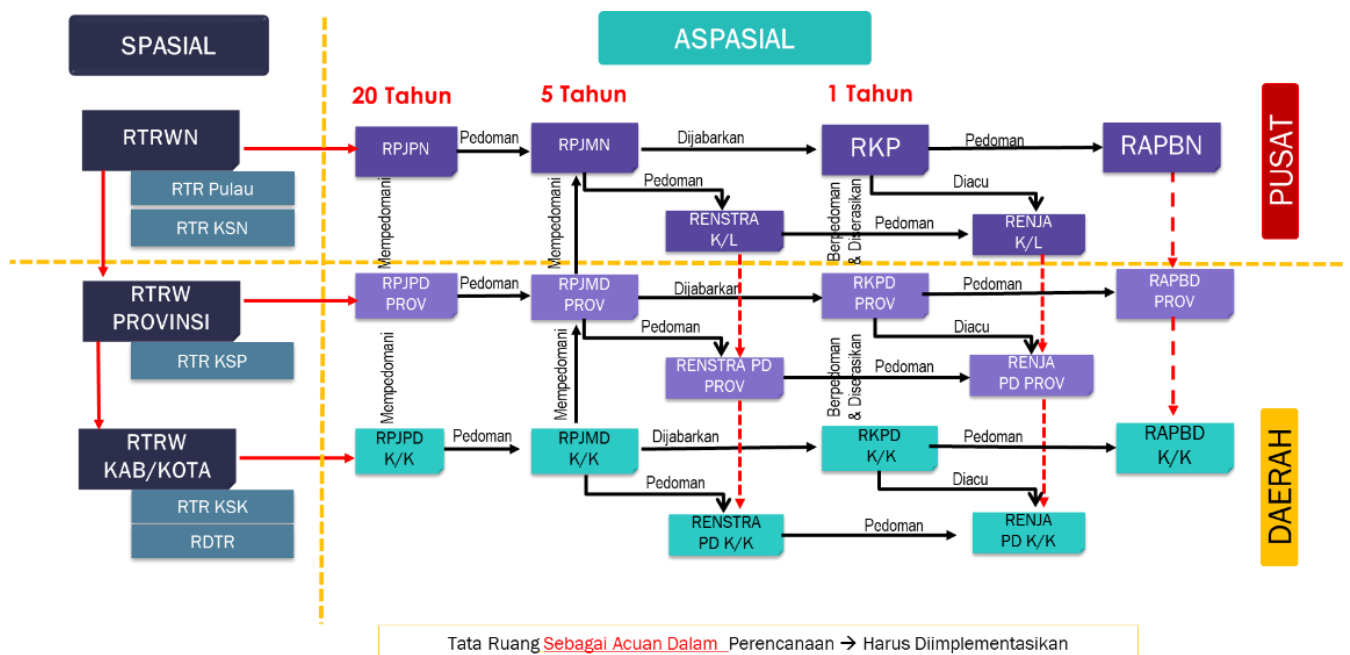
Kaitannya dengan payung hukum perencanaan pembangunan tingkat daerah maka Dokumen RKPD Kota Malang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang kemudian diacu kedalam RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 harus memperhatikan dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Arah kebijakan pada RKPD Kota Malang Tahun 2021 mengaju pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, terutama dalam menyesuaikan tema RKP

Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Nasional”. RKPD Kota Malang Tahun 2021 juga disusun mengikuti kebijakan yang tertera dalam RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah Kota Malang

RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Malang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) Pemerintah daerah Kota Malang. RPJMD Kota Malang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Pemerintah Daerah Kota Malang dalam rentang waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta program kegiatan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun oleh setiap Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang.

Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah disajikan secara terperinci pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk menerjemahkan arah kebijakan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 kedalam kebijakan tahunan. Selain itu, maksud penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD Kota Malang Tahun 2021 dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023;
- b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Malang Tahun 2021 dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023;
- c. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang;
- d. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam rangka:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021;
- b. Penyusunan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021;
- c. Pelaksanaan evaluasi RAPBD oleh Gubernur.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Adapun dokumen RKPD Kota Malang tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

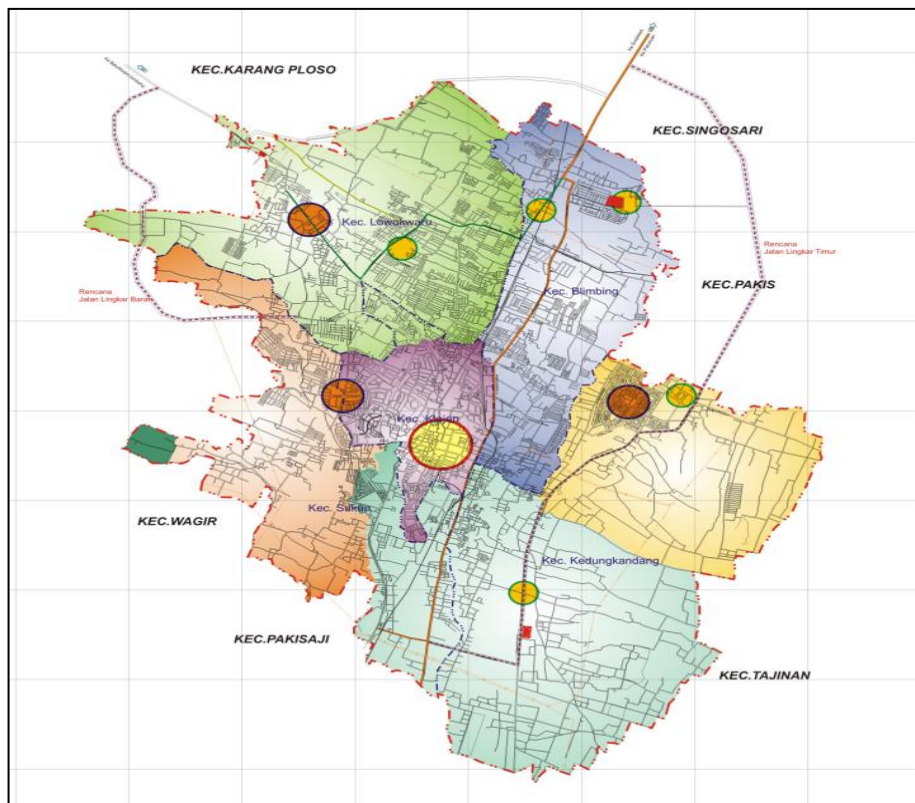
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Kondisi Geografi Daerah

1) Luas, Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kota Malang terletak pada $07^{\circ}46'48''$ LS - $08^{\circ}46'42''$ LS dan $112^{\circ}31'42''$ BT - $112^{\circ}48'48''$ BT. Sedangkan secara administratif Kota Malang merupakan salah satu kota dari 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
2. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang



Gambar 2.1 Peta Kota Malang
Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang

Adapun Kota Malang memiliki wilayah seluas 114,26 km². Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Berdasarkan ketentuan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. yang terbagi menjadi 546 Rukun Warga (RW) dan 4.157 Rukun Tetangga (RT).

2) Topografi

Secara topografis, Kota Malang sebagian besar dikelilingi daerah perbukitan. Secara garis besar, Kota Malang terletak pada ketinggian antara 445-526 m (dpl), dengan keadaan kemiringan tanah (topografi) Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kemiringan 0-8% tersebar diseluruh kecamatan di Kota Malang. Kelas kemiringan ini tergolong datar agak landai. Kondisi tanah yang berada pada kelas kemiringan ini sangat potensial untuk dijadikan permukiman, pertanian, dan perkebunan.
- b. Kemiringan 8-15% merupakan kelas kemiringan yang tergolong landai agak miring. Kelas kemiringan ini berada di seluruh kecamatan di Kota Malang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini cocok untuk dijadikan berbagai jenis usaha konservasi tanah dan air.
- c. Kemiringan 15-25% merupakan kelas kemiringan yang tergolong miring agak curam. Kelas kemiringan ini juga berada diseluruh kecamatan Kota Malang namun hanya pada lokasi-lokasi tertentu seperti sempadan sungai. Wilayah terluas pada kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.
- d. Kemiringan 25-45% merupakan kelas kemiringan yang tergolong curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada disekitar sempadan sungai. Namun wilayah terluas yang berada pada kelas kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru yang merupakan tempat tertinggi di Kota Malang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini kurang baik untuk dijadikan pertanian namun demikian perlu dikelola dengan memilih tanaman yang bisa digunakan untuk konservasi.
- e. Kemiringan >45% merupakan kelas kemiringan sangat curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di Kecamatan Kedungkandang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini sangat rentan terhadap erosi maka sebaiknya perlu upaya pelestarian hutan.

Tabel 2.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (dpl) Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2019

| No | Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Tinggi (meter) |
|----|---------------|--------------------|----------------|
| 1. | Kedungkandang | Buring | 445 |
| 2. | Sukun | Bandungrejosari | 445 |
| 3. | Klojen | Gadingkasri | 455 |
| 4. | Blimbing | Arjosari | 466 |
| 5. | Lowokwaru | Tulusrejo | 526 |

Sumber: Kota Malang dalam Angka, BPS Kota Malang

Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 bahwa salah satu lokasi yang paling tinggi berdasarkan klasifikasi topografinya adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diantara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi dalam sektor pariwisata. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah Utara adalah Gunung Arjuno, sebelah Timur adalah Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang.

3) Geologi

Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:44) bahwa keadaan geologis di Kota Malang termasuk kategori dataran tinggi. Sebab Kota Malang merupakan kota yang dikelilingi oleh pegunungan. Di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno; di sebelah timur terdapat Gunung Semeru; di sebelah barat terdapat Gunung Panderman; Gunung Kawi; dan Gunung Kelud. Keadaan tanah di bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, sehingga cocok untuk industri. Keadaan tanah di bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, sehingga cocok untuk pertanian. Keadaan tanah bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur. Sedangkan keadaan tanah bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan. Jenis tanah di wilayah Kota Malang terbagi menjadi 4 (empat) macam, antara lain:

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki

sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

4) Hidrologi

Dipandang dari aspek hidrologis, Kota Malang terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:42) bahwa di dalam CAT Brantas terkandung potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat bagus untuk bahan baku air minum. Wilayah CAT Brantas ini mempunyai wilayah cekungan yang terbesar di Propinsi Jawa Timur. Karena letak Kota Malang yang berada pada CAT Brantas ini, maka pemerintah daerah melalui PDAM saat ini menggunakannya sebagai bahan baku utama untuk air minum bagi masyarakat. Disamping itu, Kota Malang juga memiliki 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Metro yang berada di Jalan Raya Langsep, DAS Brantas yang berada di Jalan Gajayana sampai Jalan MT Haryono, DAS Bango yang berada di Jalan Sukarno Hatta, serta DAS Bango yang berada di Jalan Terusan Borobudur sampai Kawasan Pasar Blimbing.

Sementara itu, perairan permukaannya berupa aliran beberapa sungai yang berfungsi sebagai bahan baku pengairan maupun untuk saluran pembuangan akhir dari drainase kota. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:42) Di wilayah Kota Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek-Kalisari-Bango, dan Sungai Amprong. Sungai-sungai yang lain adalah merupakan sungai-sungai relatif kecil yang merupakan sungai pecahan, maupun sungai terusan dari keempat sungai besar tersebut. Kondisi Kota Malang berada pada daerah lereng gunung sehingga Kota Malang menjadi jalur aliran air bagi daerah dataran rendah dibawahnya.

5) Klimatologi

Iklim Kota Malang dipengaruhi oleh letak geologis yang berada di lokasi yang tinggi dan di antara wilayah pegunungan. Kota Malang beriklim muson tropis (pengelompokan iklim Köppen: Am) sehingga memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Sepanjang hampir sebagian besar bulan dalam setahun terdapat curah hujan signifikan di Kota Malang, sedangkan musim kemarau terjadi singkat. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:42), kondisi iklim (aspek klimatologi) di Kota Malang relatif nyaman dan tergolong daerah yang cukup sejuk. Pada beberapa tahun terakhir di Kota Malang mengalami peningkatan suhu, serta

musim hujan yang lebih lama dari biasanya. Rata-rata suhu udara pada tahun 2016 berkisar antara 22,2°C sampai 24,5°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3°C dan suhu minimum 17,8°C. Rata-rata kelembapan udara pada tahun 2016 berkisar 74% - 82%, dengan kelembapan maksimum 97% dan minimum mencapai 37%.

Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan Menurut Stasiun Klimatologi Kota Malang Tahun 2018

| Bulan | Jumlah Curah Hujan | | |
|-----------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | Stasiun Ciliwung | Stasiun Kedungkandang | Stasiun Sukun |
| Januari | 423 | 412 | 435 |
| Februari | 259 | 310 | 449 |
| Maret | 249 | 76 | 163 |
| April | 144 | 44 | 215 |
| Mei | 45 | 84 | 59 |
| Juni | 103 | - | 72 |
| Juli | - | - | - |
| Agustus | - | - | - |
| September | 5 | - | 8 |
| Oktober | 7 | 24 | - |
| November | 297 | 215 | 142 |
| Desember | 320 | 373 | 437 |

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso Kota Malang, 2018

Seperti pada umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan tabel diatas, dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan November curah hujan relatif rendah.

Tabel 2.4 Jumlah Hari Hujan Menurut Stasiun Klimatologi Kota Malang Tahun 2018

| Bulan | Jumlah Hari Hujan | | |
|-----------|-------------------|-----------------------|---------------|
| | Stasiun Ciliwung | Stasiun Kedungkandang | Stasiun Sukun |
| Januari | 20 | 15 | 21 |
| Februari | 13 | 16 | 17 |
| Maret | 10 | 10 | 12 |
| April | 7 | 6 | 6 |
| Mei | 4 | 4 | 4 |
| Juni | 3 | - | 2 |
| Juli | - | - | - |
| Agustus | - | - | - |
| September | 1 | - | 1 |
| Oktober | 2 | 1 | - |
| November | 15 | 18 | 10 |
| Desember | 19 | 26 | 19 |

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso, Kota Malang, 2018

6) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Malang terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan tersebut telah ditetapkan fungsi utama keberadaan dan kemanfaatannya. Adapun penggunaan lahan di Kota Malang diantaranya:

- a) Kawasan Lindung, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Malang terdiri dari:
 - a. Kawasan Lindung Setempat, yang meliputi daerah sekitar sungai atau sempadan sungai dan sempadan irigasi
 - b. Kawasan Rawan Bencana, merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor meliputi:
 - 1) Kelurahan Mergosono,
 - 2) Kelurahan Madyopuro,
 - 3) Kelurahan Lesanpuro,
 - 4) Kelurahan Kedungkandang, dan
 - 5) Kelurahan Kotalama
 - c. Kawasan Cagar Budaya, terdiri dari:
 - (a) Lingkungan Cagar Budaya, yang meliputi:
 - (a) Lingkungan Candi Badut,
 - (b) Lingkungan Candi Tidar,

- (c) Lingkungan Gunung Buring,
 - (d) Situs Tlogomas, dan
 - (e) Lingkungan Polowijen
- (b) Bangunan Cagar Budaya, yang meliputi:
- (a) Balai Kota Malang,
 - (b) Stasiun Kereta Api,
 - (c) Bank Indonesia,
 - (d) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,
 - (e) Gereja Kathedral Hati Kudus,
 - (f) Sekolah Cor-Jessu,
 - (g) Gedung PLN,
 - (h) Perumahan yang ada di sepanjang Jalan Besar Ijen,
 - (i) Toko Oen, dan
 - (j) Masjid Agung Jami'
- d. Kawasan RTH Kota, terdiri dari:
- (a) RTH Publik
 - (a) RTH Jalur Jalan
 - (b) RTH Taman, monumen dan gerbang kota
 - (c) RTH Lapangan Olahraga dan makam
 - (d) RTH Hutan Kota dan Taman Bibit
 - (e) RTH Pengaman Jalur Kereta Api (KA), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Sungai dan *Buffer Zone*
 - (b) RTH Privat
 - (a) Lingkungan permukiman
 - (b) Taman kantor
 - (c) Taman gedung komersil
- b) Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Malang terdiri dari:
- a. Kawasan Perumahan
 - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa
 - c. Kawasan Perkantoran
 - d. Kawasan Industri dan Pergudangan
 - e. Kawasan Pariwisata
 - f. Ruang Evakuasi Bencana
 - g. Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal

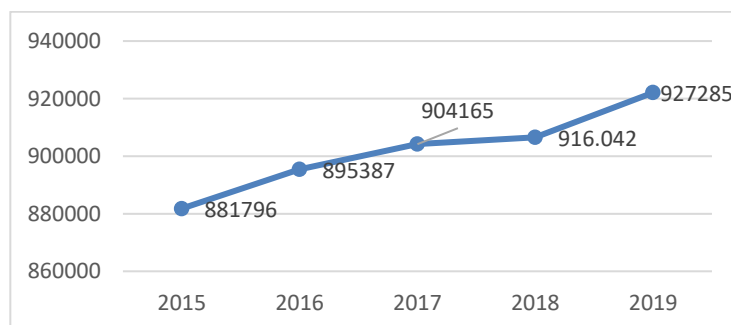
h. Kawasan Peruntukan Lain, yang meliputi:

- 1) Kawasan Pelayanan Umum Pendidikan
- 2) Kawasan Pelayanan Umum Kesehatan
- 3) Kawasan Pelayanan Umum Peribadatan
- 4) Kawasan Pelayanan Umum Rekreasi dan Olahraga

Hingga saat ini kondisi yang ada atas struktur penggunaan lahan di Kota Malang telah mengalami perambahan kawasan terbangun (konversi lahan terbangun) semakin luas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural maupun terencana. Semakin tinggi jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Malang yang disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Sehingga hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerusakan lingkungan. Bahkan tidak jarang sempadan sungai maupun kawasan RTH menjadi alternatif konversi lahan terbangun sebagai ruang untuk tempat tinggal maupun konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

7) Demografi

Faktor terpenting dalam sebuah perencanaan pembangunan yakni kondisi dan perkembangan demografi suatu daerah. Sebab penduduk merupakan sasaran dan objek pembangunan. Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu daerah. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada. Dengan demikian, informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pada suatu daerah.

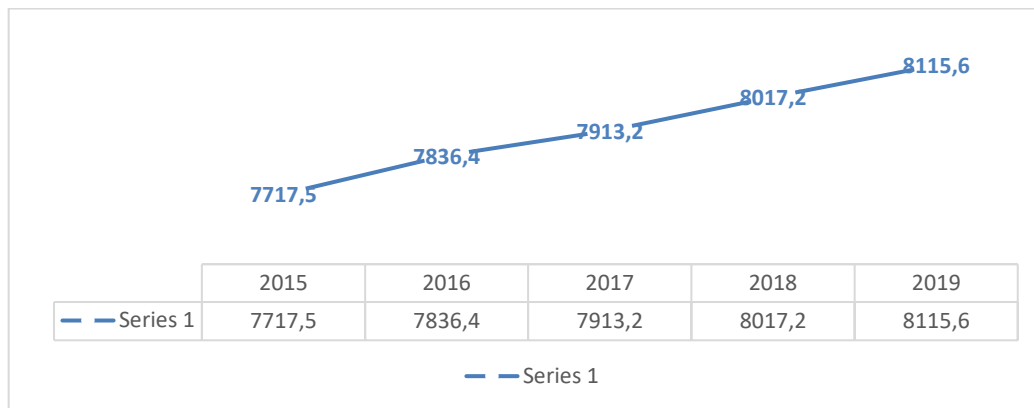


Gambar 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2019

Jumlah penduduk Kota Malang menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2014 hingga tahun 2018. tahun 2015 menjadi 881.796 jiwa. Mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2016 yakni 895.387 jiwa, tahun 2017 yakni 904.165 jiwa, tahun 2018 yakni 916.042 jiwa, dan tahun 2019 adalah

927.285 jiwa. Apabila melihat gambar perkembangan jumlah penduduk menunjukkan pada setiap tahunnya jumlah penduduk Kota Malang selalu mengalami peningkatan yang signifikan.



Gambar 2.5 Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Malang Tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2020

Apabila melihat perkembangan jumlah penduduk di Kota Malang menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tahun 2015 dengan kepadatan penduduk 8.012 jiwa/km², tahun 2016 dengan kepadatan penduduk 8.136 jiwa/km², tahun 2017 dengan kepadatan penduduk 8.215 jiwa/km², tahun 2018 dengan kepadatan penduduk 8.323 jiwa/km², dan tahun 2019 dengan kepadatan penduduk 8.425 jiwa/km². Kepadatan penduduk tersebut tentunya tersebar pada masing-masing kecamatan. Kepadatan penduduk terbesar pada tahun 2015-2019 ada di Kecamatan Klojen dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 mencapai 24.921 jiwa/km² sedangkan Kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Kedungkandang yakni 5.077 jiwa/km². Untuk perkembangan kepadatan penduduk menurut kecamatan pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

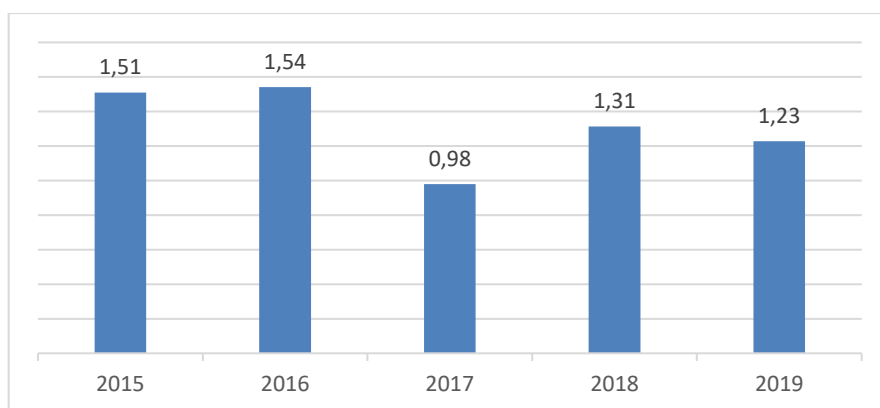
Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang

Tahun 2015-2019 (jiwa/km²)

| Kecamatan | Kepadatan Penduduk (jiwa) | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Blimbing | 10.950 | 11.077 | 11.166 | 12.425 | 13.291 |
| Klojen | 12.436 | 12.473 | 12.466 | 12.505 | 24.921 |
| Kedungkandang | 5.124 | 5.239 | 5.326 | 5.420 | 5.077 |
| Sukun | 9.677 | 9.853 | 9.969 | 10.120 | 5.296 |
| Lowokwaru | 7.524 | 7.647 | 7.706 | 8.598 | 8.720 |
| Total | 8.012 | 8.136 | 8.215 | 8.323 | 8.425 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2020

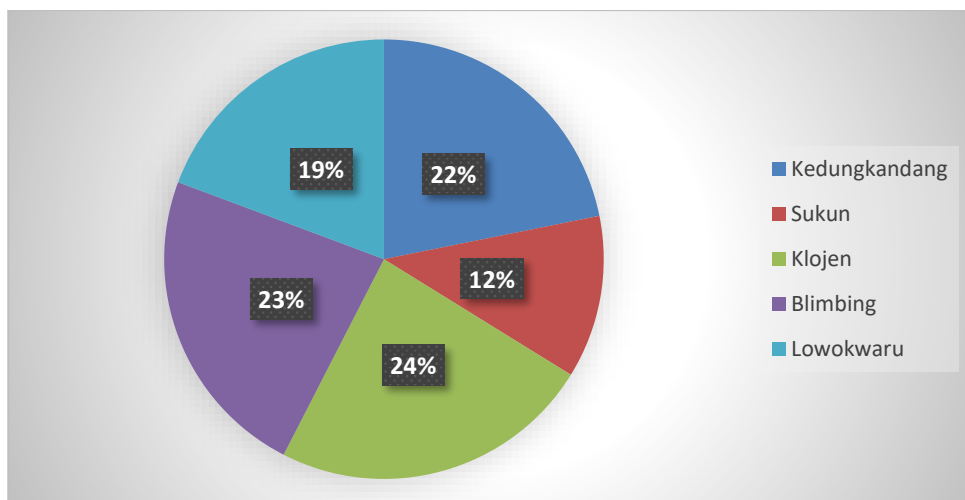
Penyumbang utama pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kota Malang yakni dari faktor migrasi. Faktor migrasi ini berpengaruh signifikan pada pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kota Malang, dibandingkan dengan penambahan penduduk dari faktor kelahiran. Hal ini dikarenakan Kota Malang merupakan perkotaan, pusat perekonomian dan pusat pendidikan. Namun apabila melihat laju pertumbuhan penduduk Kota Malang pada lima tahun terakhir sejak tahun 2015-2019 menunjukkan angka pertumbuhan penduduk mulai melambat. Pada tahun 2015 menjadi 1,51%. Pada tahun 2016 pertumbuhan penduduk sebesar 1,54% dan menurun di tahun 2017 yakni tumbuh sebesar 0,98%, hingga tahun 2018 tumbuh sebesar 1,31% dan di tahun 2019 diangka 2,23%.



Gambar 2.6 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Malang Tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, 2020

Apabila dilihat dari persebaran penduduk di Kota Malang pada setiap tahunnya yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Klojen. Pada tahun 2019 di Kecamatan Klojen terdapat 24% (220.055 jiwa) dari seluruh jumlah penduduk Kota Malang. Diikuti oleh Kecamatan Blimbing yaitu 23% (214.650 jiwa), Kecamatan Kedungkandang yaitu 22% (202.514 jiwa), Kecamatan Lowokwaru yaitu 19% (179.013 jiwa) dan Kecamatan Sukun yaitu 12% (111.053 jiwa).



Gambar 2.7 Distribusi Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Kota Malang Tahun 2019

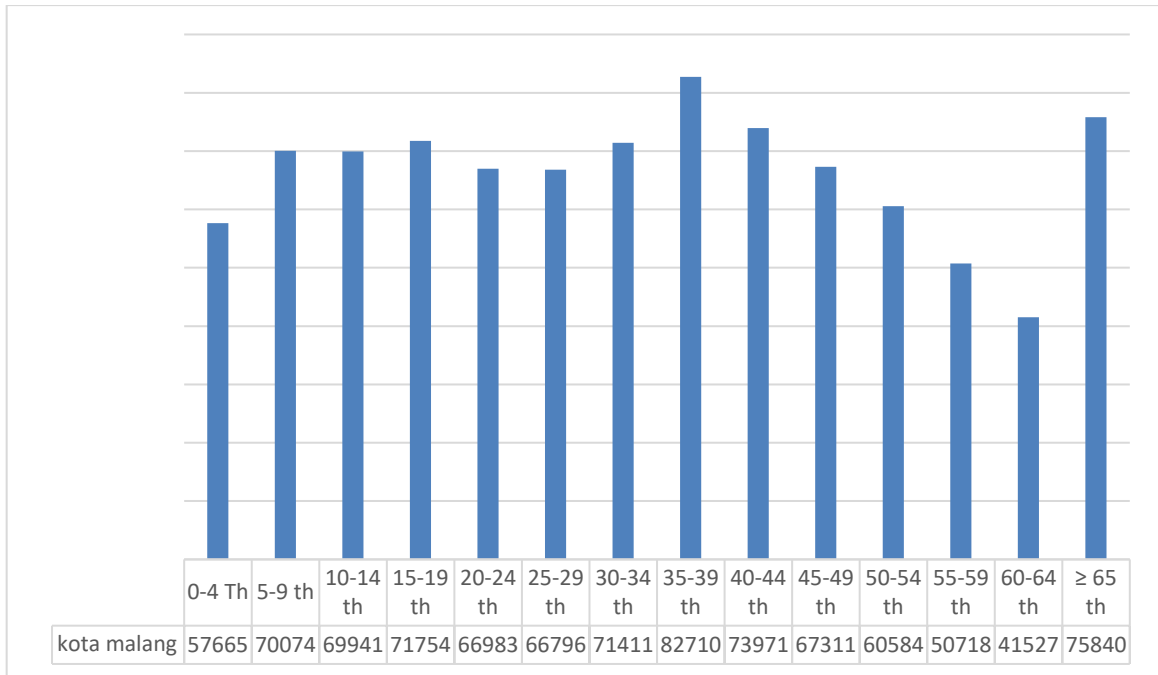
Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Malang diolah

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2015-2019

| Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | |
|---------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Blimbing | 194.591 | 196.847 | 198.428 | 200.663 | 214.650 |
| Klojen | 109.817 | 110.136 | 110.073 | 110.421 | 220.055 |
| Kedungkandang | 204.405 | 208.979 | 212.459 | 216.222 | 202.514 |
| Sukun | 202.928 | 206.612 | 209.053 | 212.222 | 111.053 |
| Lowokwaru | 170.053 | 172.813 | 174.152 | 176.514 | 179.013 |
| Total | 881.794 | 895.387 | 904.165 | 916.042 | 927.285 |

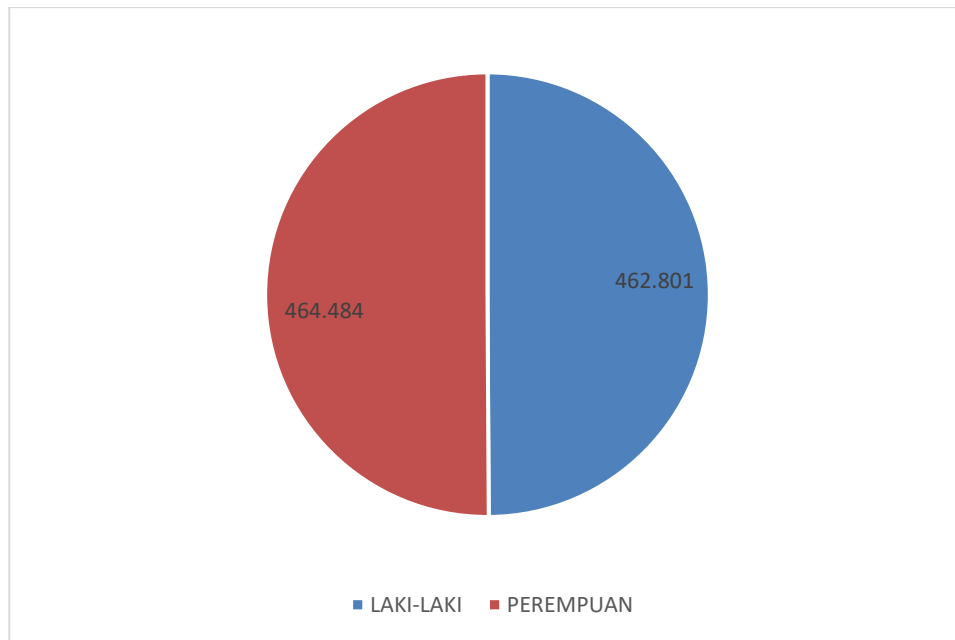
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pusat Statistik Kota Malang

Apabila dilihat dari aspek usia, pada tahun 2019 sebagian besar penduduk di Kota Malang terkategori sebagai penduduk usia produktif, yakni pada rentang usia 15-64 tahun sebesar 653.765 jiwa atau 70,50% dari total jumlah penduduk, sedangkan jumlah penduduk yang termasuk ke dalam kategori penduduk usia tidak produktif sebanyak 273.520 jiwa atau 29,50% dari total penduduk. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Kota Malang seimbang relatif seimbang. Berikut ini masing - masing adalah grafik gambaran jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan usia dan grafik penduduk berdasarkan jenis kelamin.



Gambar 2.8 Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Di Kota Malang Tahun 2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2019



Gambar 2.8.i Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kota Malang Tahun 2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2019

B. Potensi Pengembangan Wilayah :

Kawasan wilayah Kota Malang terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan

tersebut telah ditetapkan fungsi utama keberadaan dan kemanfaatannya. Adapun penggunaan lahan di Kota Malang diantaranya :

a) Kawasan Lindung, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Malang terdiri dari :

(1) Kawasan Lindung Setempat, yang meliputi daerah sekitar sungai atau sempadan sungai dan sempadan irigasi;

(2) Kawasan Rawan Bencana, merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor meliputi :

(a) Kelurahan Mergosono;

(b) Kelurahan Madyopuro;

(c) Kelurahan Lesanpuro;

(d) Kelurahan Kedungkandang; dan

(e) Kelurahan Kotalama.

(3) Kawasan Cagar Budaya, terdiri dari :

(c) Lingkungan Cagar Budaya, yang meliputi :

- Lingkungan Candi Badut;

- Lingkungan Candi Tidar;

- Lingkungan Gunung Buring;

- Situs Tlogomas; dan

- Lingkungan Polowijen.

(d) Bangunan Cagar Budaya, yang meliputi:

- Balai Kota Malang;

- Stasiun Kereta Api;

- Bank Indonesia;

- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;

- Gereja Kathedral Hati Kudus;

- Sekolah Cor-Jessu;

- Gedung PLN;

- Perumahan yang ada di sepanjang Jalan Besar Ijen;

- Toko Oen; dan

- Masjid Agung Jami'.

(4) Kawasan RTH Kota, terdiri dari:

(c) RTH Publik

- RTH Jalur Jalan;

- RTH Taman, monumen dan gerbang kota;

- RTH Lapangan Olahraga dan makam;

- RTH Hutan Kota dan Taman Bibit;
- RTH Pengaman Jalur Kereta Api (KA), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Sungai dan Buffer Zone.

(d) RTH Privat

- Lingkungan permukiman
- Taman kantor
- Taman gedung komersil

b) Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Malang terdiri dari :

- (1) Kawasan Perumahan;
- (2) Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- (3) Kawasan Perkantoran;
- (4) Kawasan Industri dan Pergudangan;
- (5) Kawasan Pariwisata;
- (6) Ruang Evakuasi Bencana;
- (7) Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal;
- (8) Kawasan Peruntukan Lain, yang meliputi :
 - (a) Kawasan Pelayanan Umum Pendidikan;
 - (b) Kawasan Pelayanan Umum Kesehatan;
 - (c) Kawasan Pelayanan Umum Peribadatan;
 - (d) Kawasan Pelayanan Umum Rekreasi dan Olahraga.

Hingga saat ini kondisi yang ada atas struktur penggunaan lahan di Kota Malang telah mengalami perambahan kawasan terbangun (konversi lahan terbangun) semakin luas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural maupun terencana. Semakin tinggi jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Malang yang disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan.

C. Wilayah Rawan Bencana :

Pengembangan potensi sumberdaya dan infrastruktur di Kota Malang berdampak pada perubahan ekosistem dan akhirnya menyebabkan degradasi lingkungan sehingga terjadi bencana. Kondisi lingkungan yang menggejala diuraikan dalam data per kecamatan berikut ini :

a) Kecamatan Kedungkandang

Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan terluas di Kota Malang. Penggunaan lahan terluas di Kecamatan Kedungkandang adalah lahan kosong yang bisa berindikasi berupa lahan pertanian atau perkebunan. Gangguan atau bencana yang sering terjadi di Kecamatan Kedungkandang terbesar adalah banjir dan tanah longsor kemudian kebakaran serta kekeringan. Banjir terjadi pada zona banjir di sepanjang aliran sungai begitu juga dengan tanah longsor pada daerah sempadan sungai. Kejadian kebakaran dominan terjadi pada wilayah penggunaan lahan permukiman disebelah utara, sedangkan kekeringan berada pada topografi tertinggi di Kota Malang yaitu perbukitan buring dibelah tenggara Kota Malang.

b) Kecamatan Sukun

Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang berada di sebelah barat Kota Malang. Gangguan atau bencana yang dominan sering terjadi adalah banjir, tanah longsor, dan kemudian kebakaran. Hampir sebagian wilayah selatan Kecamatan Sukun menjadi kawasan yang sering banjir karena merupakan salah satu ordo sungai besar yang mengalirkan air ke arah Kabuapten Malang dan berada pada zona banjir (kemiringan 0-3%). Kejadian tanah longsor di Kecamatan Sukun juga berada pada daerah igir atau sempadan sungai di daerah sekitar zona banjir. Kejadian kebakaran di Kecamatan Sukun tidak seluas kecamatan-kecamatan yang lain di Kota Malang, daerah yang sering terjadi kebakaran adalah Kecamatan Sukun bagian selatan.

c) Kecamatan Klojen

Kecamatan Klojen adalah kecamatan terkecil di Kota Malang dengan tingkat kepadatan pemukiman tertinggi. Gangguan atau bencana yang lebih sering terjadi di Kecamatan Klojen adalah kebakaran dan kemudian banjir. Dengan tingkat kepadatan permukiman yang tinggi menyebabkan tingkat terjadinya kebakaran di Kecamatan Klojen lebih banyak daripada kecamatan lain di Kota Malang. Untuk gangguan atau bencana banjir, lebih sering terjadi pada Kecamatan Klojen bagian selatan dimana berada pada zona banjir kemiringan 0-3% dan merupakan salah satu ordo yang mengalirkan air dari sub-sub ordo.

d) Kecamatan Blimbing

Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan yang memiliki penggunaan lahan pemukiman yang luas. Gangguan atau bencana yang sering terjadi

di Kecamatan Blimbing adalah kebakaran, banjir, dan tanah longsor. Tingkat kepadatan pemukiman yang tinggi dapat menyebabkan kebakaran meluas. Banjir yang terjadi di Kecamatan Blimbing berada pada zona banjir di kemiringan 0-3% di sekitar aliran sungai di Kecamatan Blimbing, begitu juga dengan longsor yang terjadi di Kecamatan Blimbing berada pada daerah igir-igir sungai yang memiliki volume atau debit yang tinggi.

e) Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru merupakan kecamatan yang memiliki topografi bergelombang hampir sama dengan Kecamatan Kedungkandang yang sebagian memiliki topografi tinggi. Gangguan atau bencana yang sering terjadi di Kecamatan Lowokwaru adalah banjir, tanah longsor, dan kemudian kebakaran. Banjir dan tanah longsor lebih dominan karena sungai-sungai yang mengalir berasal dari topografi agak tinggi dan masuk pada zona banjir (kemiringan 0-3%) di Kecamatan Klojen sehingga menimbulkan banjir di beberapa titik. Untuk tanah longsor, hampir sama dengan kecamatan-kecamatan lain yaitu berada pada daerah igir-igir sungai atau sempadan-sempadan sungai. Bencana kebakaran yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru tidak terlalu dominan karena sebagian wilayahnya berupa lahan kosong dan RTH, yang sering terjadi kebakaran adalah Kecamatan Lowokwaru bagian timur yang memiliki tingkat kepadatan pemukiman yang tinggi.

Kawasan Rawan Bencana, merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor meliputi :

- 1) Kelurahan Mergosono;
- 2) Kelurahan Madyopuro;
- 3) Kelurahan Lesanpuro;
- 4) Kelurahan Kedungkandang; dan
- 5) Kelurahan Kotalama.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta kondisi seni budaya dan olah raga di Kota Malang. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah

indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Malang.

A. Pertumbuhan PDRB

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kota Malang dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Bruto (PDB), atau dalam cakupan yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi. Secara sederhana, PDRB Kota Malang memberikan gambaran mengenai ukuran ekonomi di Kota Malang.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun tertentu. Tahun yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan adalah Tahun 2010. Data struktur ekonomi menunjukkan aktivitas dan perkembangan mengenai kontribusi setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Kontribusi setiap lapangan usaha memberikan informasi mengenai lapangan usaha utama penggerak ekonomi daerah. Berdasarkan Tabel 2.9 mengenai data kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang tahun 2015-2019, diketahui bahwa lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Malang merupakan penyumbang tertinggi bagi PDRB Kota Malang, dengan kontribusi rata rata pertahun adalah sebesar 29%.

Kontribusi kedua terbesar ditunjukkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 25% terhadap PDRB Kota Malang. Kemudian ketiga diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi yang kontribusi mencapai rata-rata 13% pertahunnya selama periode 2015-2019 terhadap PDRB Kota Malang. Sementara lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah 8%. Secara umum, jika melihat data kontribusi setiap lapangan usaha dan dalam kurun waktu tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih belum tergeser oleh lapangan usaha lainnya.

Penyumbang terkecil pada struktur ekonomi Kota Malang di Tahun 2019 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi sebesar 0,07% selanjutnya diikuti oleh pengadaan listrik dan gas dengan

kontribusi sebesar 0,03% serta sektor lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan kontribusi sebesar 0,18%.

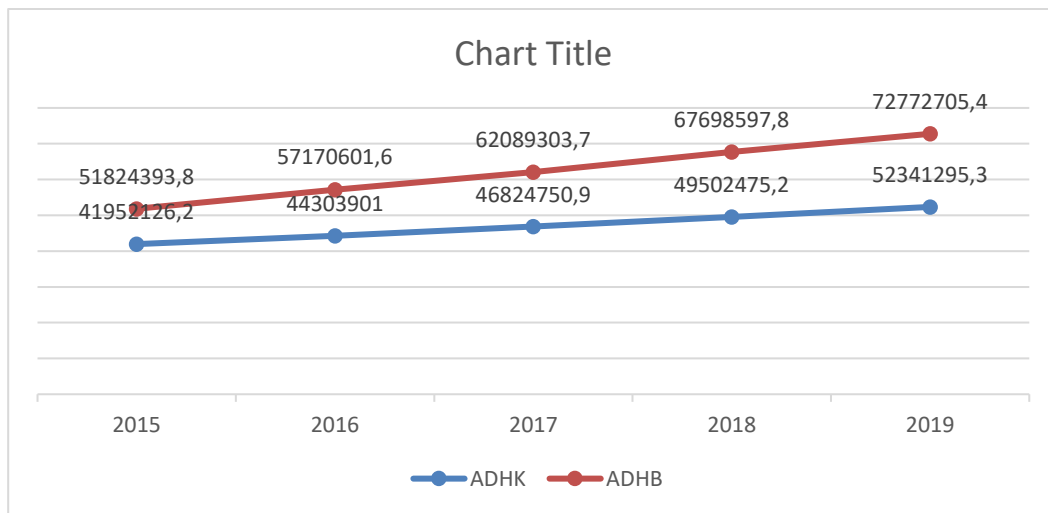
Tabel 2.8
Kontribusi Lapangan Usaha di Kota Malang Tahun 2015-2019 (%)

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,27 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| 3 | Industri Pengolahan | 26,51 | 25,40 | 25,23 | 25,47 | 25,73 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| 6 | Konstruksi | 12,52 | 12,92 | 13,07 | 12,78 | 12,61 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 28,90 | 29,54 | 29,29 | 29,61 | 29,46 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 2,41 | 2,45 | 2,57 | 2,56 | 2,61 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,79 | 4,90 | 5,02 | 5,00 | 5,17 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 3,97 | 3,98 | 4,03 | 3,94 | 3,89 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,97 | 3,04 | 2,99 | 2,95 | 2,84 |
| 12 | Real Estate | 1,41 | 1,41 | 1,39 | 1,43 | 1,45 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 0,82 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,52 | 1,48 | 1,46 | 1,48 | 1,48 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 8,15 | 8,13 | 8,23 | 8,13 | 8,06 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,49 | 2,50 | 2,57 | 2,53 | 2,59 |
| 17 | Jasa Lainnya | 2,97 | 2,87 | 2,79 | 2,76 | 2,73 |
| PDRB | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS Kota Malang

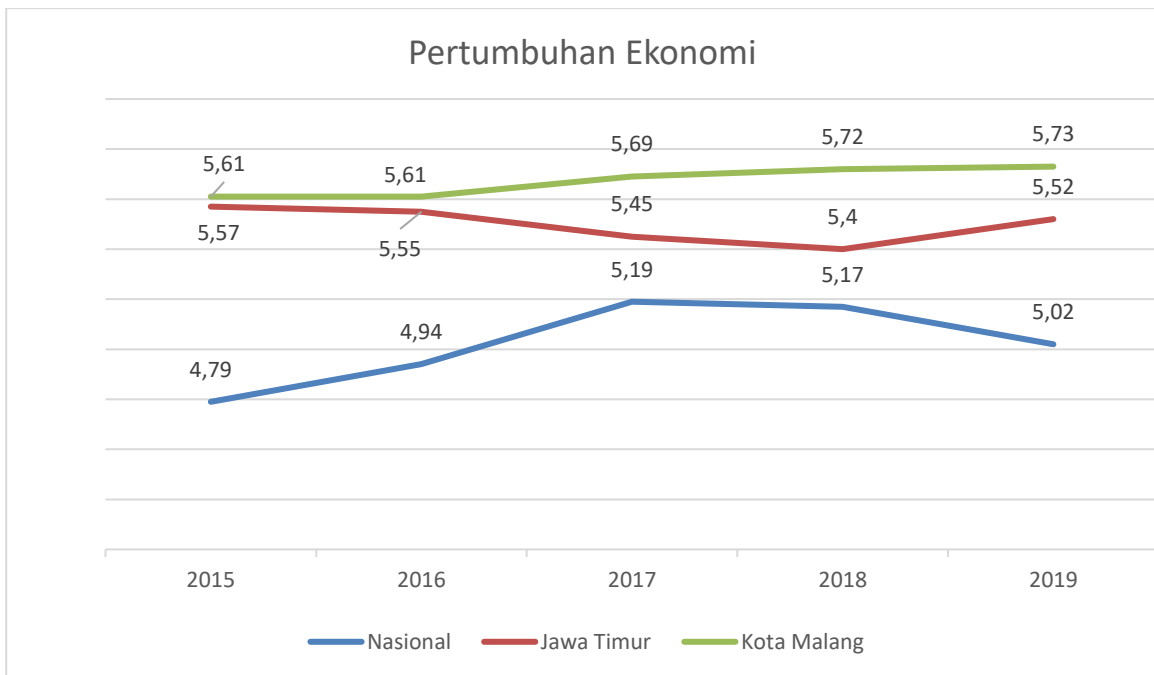
Kegiatan pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki kontribusi paling tinggi dalam srtruktur PDRB Kota Malang, yaitu sebesar 29% pada tahun 2019 . Pada urutan kedua sebagai penyumbang tertinggi adalah industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 25,73% pada tahun 2019. Sejak tahun 2015 ada kecenderungan laju pertumbuhan pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor semakin meningkat kontribusinya. Tingkat resiko dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan merupakan pilihan masyarakat dalam menentukan pilihan mata pencahariannya. Begitu pula halnya dengan lapangan usaha industri pengolahan yang memiliki kontribusi cukup besar di Kota Malang. Geliat pariwisata di Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten dan Kota Batu memberikan dorongan yang positif bagi berkembangnya kedua sektor usaha tersebut. Ditambah lagi kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi kreatif banyak melahirkan lapangan kerja baru.

Kebutuhan yang besar akan aksesibilitas transportasi maupun bangunan di Kota Malang dapat menjadi penyebab kebutuhan akan sektor lapangan usaha Konstruksi akan semakin meningkat pula. Walaupun secara pertumbuhan didalam sektor ini kecenderungan fluktuatif akan tetapi sektor ini masih menjadi penyumbang kontribusi terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan. Dapat dilihat dalam gambar bahwa sektor lapangan usaha Konstruksi menyumbang kontribusi sebesar 12,61% didalam struktur PDRB Kota Malang pada tahun 2019.



Gambar 2.9 Pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB Kota Malang Tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kota Malang

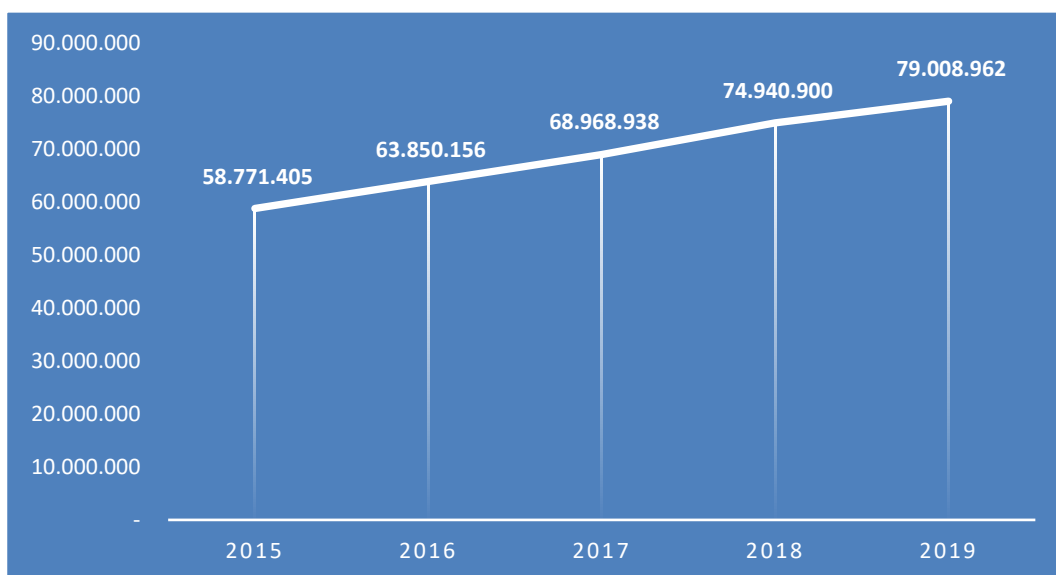
Pertumbuhan ekonomi Kota Malang menunjukkan tren yang positif selama lima tahun terakhir. berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Malang tercatat di angka 5.61% dan terus meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2019 ekonomi Kota Malang tumbuh 5.73%. Dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan Nasional, Kota Malang memiliki kontribusi positif dimana angka pertumbuhan ekonomi berada di atas angka pertumbuhan Jawa Timur yang di tahun 2019 sebesar 5.52% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5.02%



Gambar 2.10 Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kota Malang

B. PDRB Per Kapita

Pengertian dari PDRB per kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berdasarkan data perkembangan lapangan usaha dan pertambahan jumlah penduduk, diperoleh data PDRB per Kapita Kota Malang yang menunjukkan perkembangan dengan tren dan tendensi meningkat setiap tahunnya. Perkembangan capaian indikator PDRB per Kapita Kota Malang Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.12 Laju Perkembangan PDRB per Kapita Kota Malang Tahun 2015-2019 (dalam Rp)

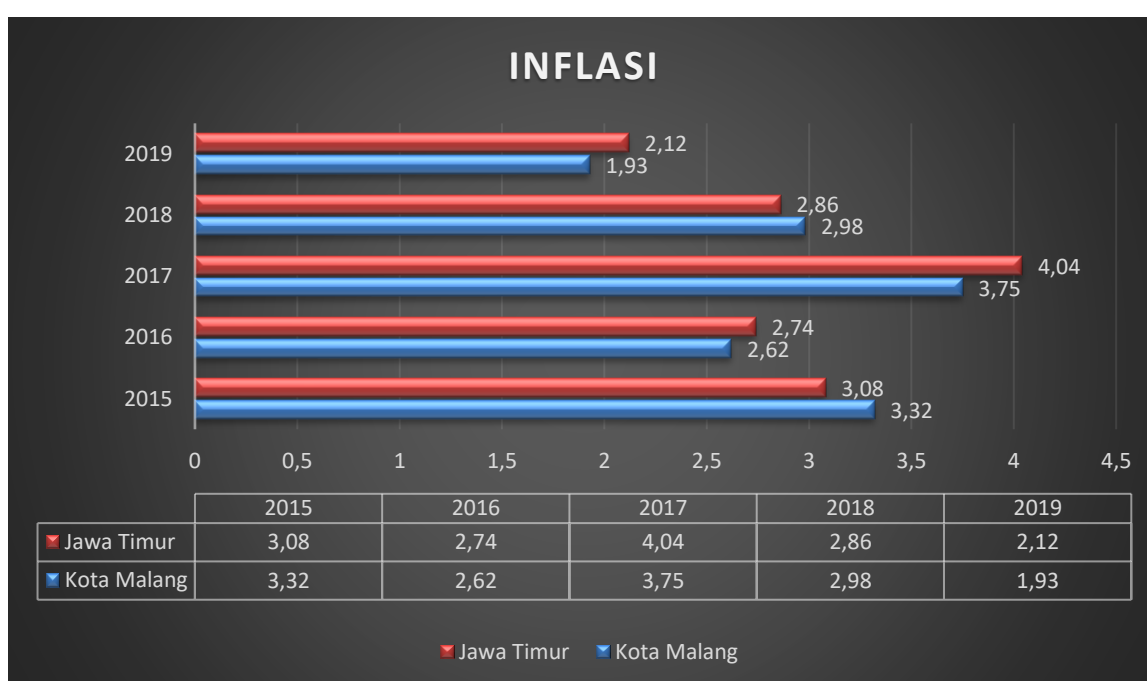
Sumber: BPS Kota Malang, data diolah

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa PDRB per Kapita di Kota Malang pada tahun 2015 s/d tahun 2019 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

C. Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Faktor dominan yang mempengaruhi inflasi pada tahun-tahun tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya harga-harga untuk pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menempati kedudukan paling atas, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pada bidang tersebut bagi masyarakat Kota Malang semakin banyak yang memicu kenaikan harga dari tahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang sangat membutuhkan sarana pendidikan yang memadai. Lebih dari itu semua, tiga kelompok besar penyumbang inflasi tertinggi di Kota Malang secara tidak langsung telah memicu peningkatan kebutuhan pada kelompok-kelompok lain yang terkait. Perkembangan capaian indikator laju inflasi Kota Malang Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



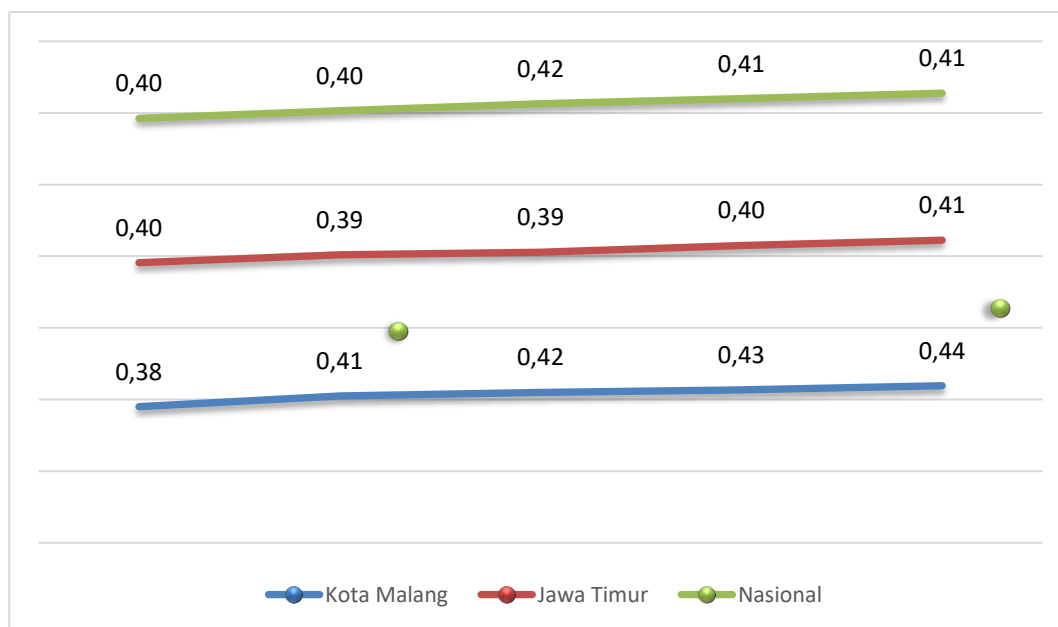
Gambar 2.11 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
Sumber: BPS Kota Malang

D. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Perbandingan capaian gini ratio Kota Malang dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.14 Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Malang Tahun 2015-2019

**) Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang, 2019

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa gini ratio Kota Malang pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan. Gini ratio Kota Malang pada tahun 2019 terkategori ketimpangan sedang, yang artinya memiliki

ketimpangan pendapatan yang sedang. Meskipun demikian indeks gini atau gini ratio Kota Malang linier dengan kenaikan gini ratio Provinsi Jawa Timur ataupun Nasional. Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Gini Ratio Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2019 selalu mengalami kenaikan.

Apabila mengacu pada standar penilaian ketimpangan Gini Ratio, maka Kota Malang termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang sedang. Meskipun demikian, capaian yang menunjukkan tren meningkat pada Gini Ratio di Kota Malang menjadi tantangan tersendiri yang harus di jawab dalam pelaksanaan program 5 (lima) tahun ke depan. Pembukaan akses pendidikan dan lapangan kerja di daerah-daerah yang selama ini tertinggal, baik pada level kelurahan maupun kecamatan, perlu diidentifikasi secara lebih detail dan dirumuskan program yang tepat sasaran guna memperkecil ketimpangan yang ada.

E. Tenaga Kerja

Berdasarkan definisi pada Badan Pusat Statitik, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok mereka. Angka Tingkat Partisipasi Kerja pada suatu daerah menggambarkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di daerah tersebut.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Malang secara rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat partisipasi Angkatan kerja sebesar 60.56% dan pada tahun 2016 data tidak tersedia karena Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak dilaksanakan. Pada tahun 2017 tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kota Malang tercatat sebesar 64.77% dan di tahun 2018 sebesar 65.94%. Namun pada tahun 2019, tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kota Malang mengalami penurunan menjadi sebesar 65.89%. Berdasarkan data, di tahun 2019 penurunan terjadi pada tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, yang pada tahun 2018 sebesar 53.91% dan tahun 2019 menjadi 52.98%.

Partisipasi Angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingkan angkatan kerja perempuan di Kota Malang. Tingkat partisipasi Angkatan kerja laki-laki

rata-rata berada di atas angka 75%, sedangkan partisipasi angkatan kerja perempuan rata-rata sebesar 50%.

Tabel 2.8.1

| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2015-2019 (%) | | | | | |
|--|-------|------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 60.56 | - | 64.77 | 65.94 | 65.89 |
| <i>Laki-Laki</i> | 72.91 | - | 78.38 | 78.51 | 79.39 |
| <i>Perempuan</i> | 48.78 | - | 51.76 | 53.91 | 52.98 |

Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang masih merupakan penyumbang tertinggi di Jawa Timur walaupun dari tahun ke tahunnya angka ini menunjukkan penurunan. Pada tahun 2015 TPT Kota Malang sebesar 7.28% dan pada tahun 2016 data tidak tersedia karena Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak dilaksanakan. Pada tahun 2017, tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 TPT Kota Malang selalu mengalami penurunan masing-masing adalah 7.22%, 6.79% dan 6.04%. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Kota Malang adalah karena sebagai Kota Pendidikan, Kota Malang menjadi rujukan bagi pencari tenaga kerja melalui job fair di beberapa instansi Pendidikan seperti kampus. Dengan banyaknya job fair yang sering dilaksanakan di Kota Malang menyebabkan pelajar dan mahasiswa yang dari luar kota Malang tetap berada di Malang untuk mencari pekerjaan. Selain itu kelompok masyarakat dengan pendidikan SMA ke atas itu cenderung selektif dalam mencari pekerjaan dan memilih menunggu sampai didapatkan pekerjaan yang diinginkan. Upaya untuk mengurangi pengangguran telah dilakukan salah satunya adalah dengan menggerakkan dan memberikan stimulus bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang.

Tabel 2.8.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2019 (%)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 7.28 | - | 7.22 | 6.79 | 6.04 |
| <i>Laki-Laki</i> | 8.13 | - | 8.06 | 6.98 | 6.44 |
| <i>Perempuan</i> | 6.06 | - | 6.01 | 6.53 | 5.45 |

F. Kemiskinan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan suatu daerah adalah batas minimum pengeluaran perkapita yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi.

| Tahun | Garis Kemiskinan (<i>Poverty Line</i>) Rp | Penduduk Miskin | |
|-------|---|-----------------|----------------|
| | | Jumlah Jiwa | Persentase (%) |
| 2015 | 411.709 | 39.100 | 4,60 |
| 2016 | 426.527 | 37.030 | 4,33 |
| 2017 | 454.061 | 35.880 | 4,17 |
| 2018 | 507.144 | 35.490 | 4,10 |
| 2019 | 543.966 | 35.390 | 4,07 |

Tabel 2.9 Indikator Kemiskinan Kota Malang Tahun 2015-2019

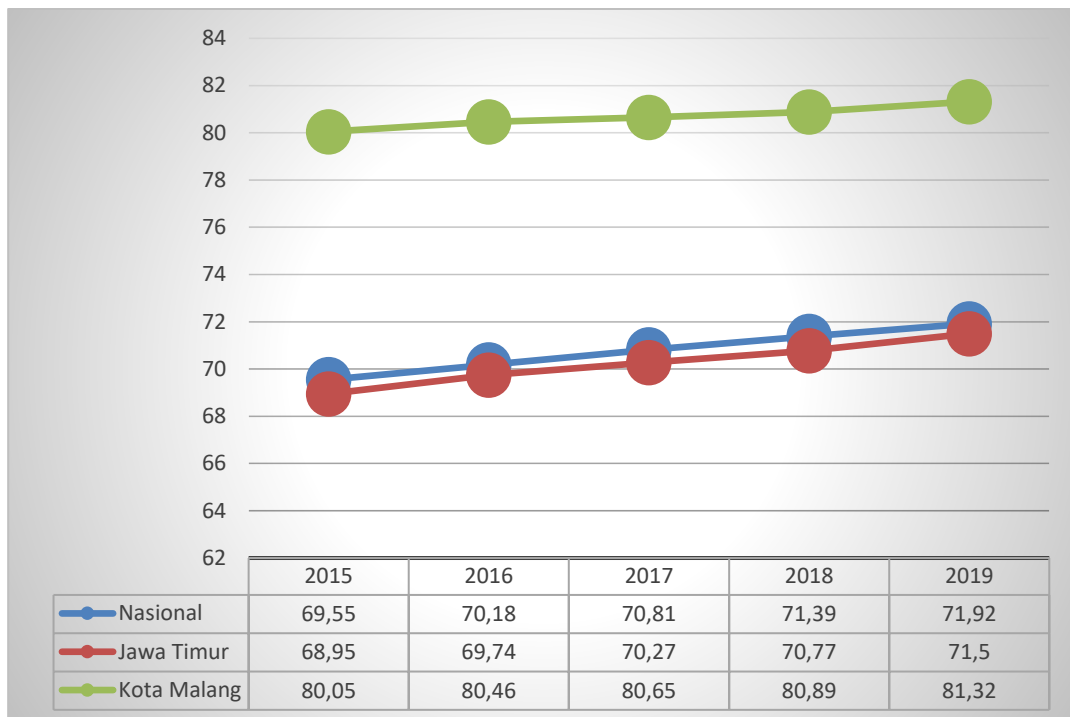
Sumber: BPS Kota Malang

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kota Malang selama tahun 2015-2019 menunjukkan tren yang positif, dimana pada setiap tahunnya telah mengalami penurunan berdasarkan jumlah jiwa dan persentasenya.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah proses pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan sumberdaya manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan

manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Hal ini dikarenakan pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia.



Gambar 2.17 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019
 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Provinsi dan Nasional 2020

Di Kota Malang, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum IPM Kota Malang mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 IPM Kota Malang sebesar 80,05. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2016 IPM Kota Malang juga mengalami peningkatan kembali yakni menjadi 80,46. Selanjutnya pada tahun 2017 IPM Kota Malang juga mengalami peningkatan kembali yakni menjadi 80,65. Hingga tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat masing-masing dia angka 80,89 dan 81,32. Angka IPM Kota Malang juga diimbangi dengan angka IPM di level Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data Statistik IPM Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang hanya sebesar 68,95 meningkat di tahun

2019 menjadi 71,50. Begitupun dengan IPM Nasional yang memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 IPM Nasional berada pada angka 69,55, lalu pada tahun 2019 meningkat menjadi 71,92.

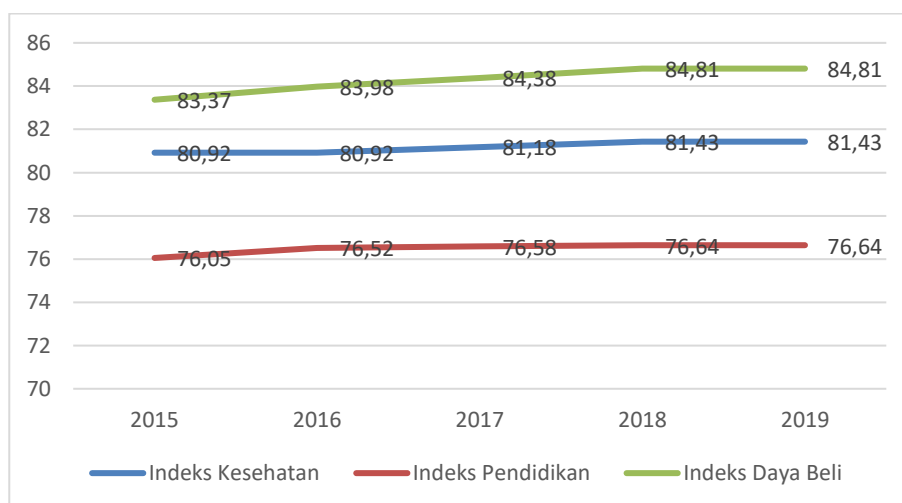
Pada Tahun 2014 Metodologi penghitungan IPM dapat dilihat dari 4 indikator yakni umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Begitu pula penyajian data komponen IPM menggunakan keempat komponen tersebut di atas. Adapun besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
 Nilai IPM Kota Malang dan Komponennya di Kota Malang
 Tahun 2015 – 2019

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | IPM | 80,05 | 80,46 | 80,65 | 80,89 | 80,88 |
| a | Umur Harapan Hidup | 80,92 | 80,92 | 81,18 | 81,43 | 81,43 |
| b | Harapan Lama Sekolah | 76,05 | 76,52 | 76,58 | 76,64 | 76,64 |
| c | Rata rata lama sekolah | 83,37 | 83,98 | 84,38 | 84,81 | 84,81 |
| d | Pengeluaran Per Kapita | 15.420.000 | 15.732.000 | 15.939.000 | 16.158.000 | 16.666.000 |

Sumber : BPS Kota Malang, 2020

Peningkatan nilai IPM Kota Malang terjadi karena adanya peningkatan pada semua komponen pembentuk IPM, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Masing-masing komponen tersebut pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup bagus. Sehingga IPM Kota Malang mengalami kenaikan secara signifikan.



Gambar 2.18 Capaian Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli di Kota Malang Tahun 2015-2019

Sumber: Bappeda Kota Malang, 2019

Berdasarkan indeks penyusun IPM, secara grafik data indeks kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks daya beli Kota Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya, secara detail dapat dilihat pada grafik di atas.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang berikut Perangkat Daerah pelaksana urusan tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Urusan Wajib dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana |
|----|---|--|
| 1. | Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2. | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 4. | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5. | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana |
|-----|--|---|
| 6. | Sosial | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 7. | Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 8. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 9. | Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 10. | Pertanahan | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 11. | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 12. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 13. | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 14. | Perhubungan | Dinas Perhubungan |
| 15. | Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 16. | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 17. | Penanaman Modal | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 18. | Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| 19. | Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 20. | Persandian | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 21. | Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 22. | Perpustakaan | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah |
| 23. | Kearsipan | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah |

Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang

1) Pendidikan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019**

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|------------|---|--------|-----------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pendidikan | | | | | | | |
| 1. | APK PAUD | % | 84,28 | 84,28 | 86,09 | 86,09 | 86,09 |
| 2. | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | |
| a. | APK SD/MI/Paket A | % | 95,99 | 95,86 | 105,89 | 102,596 | 104,042 |
| b. | APK SMP/MTs/Paket B | % | 76,83 | 85,13 | 100,22 | 91,707 | 92,406 |
| c. | APK SMA/SMK/MA/Paket C | % | 117,39 | 84,67 | 103,035 | 106,594 | 110,153 |
| 3. | Angka partisipasi murni | | | | | | |
| a. | APM SD/MI/Paket A | % | 85,87 | 82,79 | 95,81 | 91,403 | 92,814 |
| b. | APM SMP/MTs/Paket B | % | 58,52 | 62,99 | 81,51 | 74,689 | 76,986 |
| c. | APM SMA/SMK/MA/Paket C | % | 90,89 | 58,66 | 74,725 | 76,785 | 78,845 |
| 4. | Angka Partisipasi sekolah | | | | | | |
| a. | APS SD/MI/Paket A | % | 104,2 | 105,36 | 72,87 | 76,215 | 67,192 |
| b. | APS SMP/MTs/Paket B | % | 104,37 | 106,35 | 104,87 | 112,656 | 115,554 |
| c. | APS SMA/SMK/MA/Paket C | % | 58,66 | 74,725 | 76,785 | 78,845 | |
| 5. | Angka Putus Sekolah | | | | | | |
| a. | APS SD/MI | % | 0,66 | 0,06 | 0,04 | 0,168 | 0,166 |
| b. | APS SMP/MTs | % | 0,22 | 0,18 | 0,09 | 0,088 | 0,044 |
| 6. | Angka Kelulusan | | | | | | |
| a. | AK SD/MI | % | 99 | 100 | 99,35 | 99,607 | 99,646 |
| b. | AK SMP/MTs | % | 99 | 100 | 99,79 | 100,073 | 100,398 |
| 7. | Angka Melanjutkan | | | | | | |
| a. | AM dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 104,61 | 115,15 | 112 | 116,513 | 119,944 |
| b. | AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 157,29 | 106,55 | 103,48 | 100,803 | 93,802 |
| 8. | Fasilitas Pendidikan | | | | | | |
| a. | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | % | 86,29 | 87,92 | 88,92 | 103,533 | 112,664 |
| b. | Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | % | 91,85 | 92,93 | 93,83 | 104,775 | 111,532 |
| c. | Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | % | 93,35 | 94,83 | 95,83 | 114,135 | 125,282 |
| 9. | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | | | | | | |
| a. | Rasio guru terhadap murid per kelas SD/MI | | 0,023 | 0,022 | 0,021 | 0,0076 | 0,0004 |
| b. | Rasio guru terhadap murid per kelas SMP/MTs | | 0,06 | 0,055 | 0,51 | 0,4114 | 0,4974 |
| c. | Rasio guru terhadap murid per kelas SMA/MA | | 0,081 | 0,078 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---|--------|-----------------|-------|-------|--------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 10. | Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik | % | 42,45 | 81,47 | 86,59 | 104,58 | 121,688 |

**) Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

2) Kesehatan

kesehatan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-------|--------|--------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kesehatan | | | | | | | |
| 1. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | per 1000/KH | 9,9 | 9,54 | 6,28 | 3,94 | 4,5 |
| 2. | Angka kelangsungan hidup bayi | | 990,1 | 990,4 | 993,72 | 996,05 | 998,542 |
| 3. | Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | per 1000/KH | 0,77 | 10,62 | 6,78 | 9,119 | 5,5 |
| 4. | Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup | per 1000/KH | 8,61 | 6,86 | 5,41 | 2,361 | 3,3 |
| 5. | Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | per 100.000/KH | 68,24 | 75,29 | 120,43 | 77,94 | 75,1 |
| 6. | Rasio posyandu per satuan balita | per 100 balita | 0,106 | 0,118 | 0,106 | 0,110 | 1,1 |
| 7. | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk (tiap 1.000 penduduk) | per 1.000 penduduk | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 8. | Rasio Rumah sakit terhdap penduduk (tiap 10.000 penduduk) | per 10.000 penduduk | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| a. | Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk | per 100.000 penduduk | 30,07 | 31,99 | 56,19 | 17,768 | 85,34 |
| b. | Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk | per 100.000 penduduk | 82,93 | 91,08 | 63,04 | 86,61 | 48,58 |
| c. | Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk | per 100.000 penduduk | 6,07 | 7,36 | 12,65 | 12,65 | 42,73 |
| 10. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | per 1.000 penduduk | 1,57 | 1,36 | 1,38 | 1,954 | 42,7 |
| 11. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | 82,89 | 84,36 | 93,18 | 86,363 | 96,7 |
| 12. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | % | 90,73 | 93,58 | 91,65 | 92,201 | 95,6 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|--|----------------------|-----------------|-------|-------|---------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 13. | Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) | % | 66,67 | 71,93 | 82,46 | 71,233 | 93 |
| 14. | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Cakupan imunisasi campak bayi | % | 89,7 | 95,9 | 97,4 | 94,772 | 95,6 |
| 16. | AFP Rate (Non Polio) Per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun | per 100.000 penduduk | 0 | 1 | 2 | 0,864 | 0,6 |
| 17. | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Cakupan penemuan pasien Baru TBC BTA Positif | % | 54,2 | 62,1 | 64,7 | 60,486 | 60,094 |
| 19. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | % | 100 | 100 | 98,1 | 98,48 | 100 |
| 20. | Penderita diare yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 114,164 | 100 |
| 22. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | orang | 46 | 6,33 | 0,67 | 0,67 | 19,9 |
| 23. | Cakupan kunjungan Bayi | % | 78,98 | 87,53 | 93,9 | 87,738 | 99,3 |
| 24. | Cakupan Puskesmas | Puskesmas | 300 | 300 | 320 | 316 | 320 |
| 25. | Cakupan puskesmas pembantu | % | 57,89 | 57,89 | 57,89 | 57,89 | 57,89 |
| 26. | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | % | 87,67 | 88,59 | 89,98 | 88,833 | 95,6 |
| 27. | Cakupan pelayanan nifas | % | 85,61 | 91,18 | 91,6 | 91,242 | 95,3 |
| 28. | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | % | 71,69 | 83,42 | 92,52 | 100,45 | 93,8 |
| 29. | Cakupan pelayanan anak balita | % | 63,06 | 68,1 | 74,3 | 76,42 | 82,7 |
| 30. | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat | % | 100 | 99,68 | 99,98 | 99,83 | 99,5 |
| 31. | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | % | 77,92 | 11,39 | 20,43 | 20,43 | 20,43 |
| 32. | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,2 |
| 33. | Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**) Tahun 2019 Data belum validasi*

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2020

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2014-2018

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|--|--|--------|-----------------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | |
| A. Pekerjaan Umum | | | | | | | |
| 1. | IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur) | % | N/A | N/A | N/A | 3,90 | 4,05 |
| 2. | Persentase jalan kota dalam kondisi baik | % | 135,1 | 993,6 | 448,5 | 511,1 | 511,1 |
| 3. | Persentase Kawasan Pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | 70 | 72 | 83,98 | 81,18 | 83,78 |
| 5. | Persentase drainase kota dalam kondisi baik | % | 68,6 | 72,77 | 81,49 | 70,61 | 68,91 |
| 6. | Persentase irigasi kota dalam kondisi baik | % | | | | | |
| 7. | Persentase Jembatan dalam kondisi baik | % | 85 | 87,5 | 90,19 | 86,40 | 86,09 |
| 8. | Jumlah pelanggan HIPPAM | Jiwa | 29956 | 32807 | 52410 | 50595 | 56084 |
| 9. | Prosentase Keluarga yang memiliki air minum layak | % | 86 | 87 | 92 | 92,2 | 94 |
| B. Penataan Ruang | | | | | | | |
| 1. | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | % | 10,93 | 12,38 | 12,38 | 10,673 | 9,964 |
| 2. | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | % | 90 | 100 | 100 | 103,7 | 107,4 |
| 3. | Prosentase Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | % | 7 | 12 | 14,66 | 18,428 | 21,86 |

*) Tahun 2019 Angka Proyeksi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, 2018

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.24
Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman Tahun 2014-2018

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | | 2019 |
|----|--|--------|-----------------|-------|-------|--------|--------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Rasio rumah layak huni | % | N/A | N/A | N/A | 80 | >80 | |
| 2. | Rasio permukiman layak huni | % | N/A | N/A | N/A | 70 | >70 | |
| 6. | Luasan kawasan kumuh | ha | N/A | 550,1 | 541,9 | 479,85 | 298,81 | |
| 7. | Tingkat hunian rumah susun sederhana | % | N/A | N/A | N/A | 80,73 | >80,73 | |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14 Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2014-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|------|------|--------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | |
| 1. | Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | Per 10.000 penduduk | 1362 | 1296 | 1263 | 1118,3 | 1016,8 |
| 2. | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | % | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,32 | 2,46 |
| 3. | Persentase pelanggaran Perda yang ditindak | % | 92,9 | 94 | 92 | 94,18 | 94,98 |
| 4. | Rasio Pos Kamling per 100 KK | | 0,6 | 0,6 | 0,59 | 0,6457 | 0,6762 |
| 5. | Rasio petugas linmas per RT | | 0,63 | 0,67 | 0,67 | 0,697 | 0,724 |
| 6. | Jumlah konflik yg termediasi (konflik/perkelahian antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, antar kampung | kejadian | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 7. | Jumlah penanganan kerusuhan/konflik/ kekerasan bermotif SARA yang diselesaikan | kejadian | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

*) Tahun 2019 Angka Proyeksi

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 2018

6) Sosial

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15 Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|--------|--|--------|-----------------|-------|-------|--------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sosial | | | | | | | |
| 1 | Indeks Modal Sosial | | N/A | N/A | 79,20 | 79,20 | 81,36 |
| 2 | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | | N/A | N/A | 82,86 | 84,63 | 85,53 |
| 3. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial | % | 0,39 | 0,35 | 83,77 | 42,821 | 47,386 |
| 4. | Persentase PMKS yang mendapat Pelatihan Ketrampilan | % | 1,85 | 0,78 | 0,43 | 0,828 | 0,826 |
| 5. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan | % | 23,45 | 1,35 | 83,77 | 61,132 | 71,224 |
| 6. | Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | % | 53 | 2,1 | 60,54 | 33,982 | 30,6 |
| 7. | Persentase PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | % | 3,42 | 2,1 | 60,54 | 19,578 | 13,528 |
| 8. | Persentase PMKS yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana Sosial | % | 3,42 | 0,54 | 60,54 | 49,03 | 60,978 |
| 9. | Persentase PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan sosial | % | 0,21 | 0,72 | 41,67 | 33,487 | 41,742 |
| 10. | Persentase PMKS Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma yang ditangani di Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun dan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) | % | 95 | 100 | 100 | 100,5 | 101,6 |
| 11. | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 1,35 | 1,35 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 12. | Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina | % | 35,94 | 1,35 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Persentase jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif melakukan kemitraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | % | 66,53 | 66,8 | 66,9 | 66,961 | 67,062 |
| 15. | Persentase PSKS yang memperoleh pembinaan, sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 77,07 | 77,5 | 77,71 | 77,797 | 77,968 |
| 16. | Persentase masyarakat yang memanfaatkan LBK Pandanwangi | % | 13,06 | 13,06 | 0 | 9,142 | 10,448 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|--|--------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | dari PMKS Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. | | | | | | |
| 17. | Persentase Organisasi Sosial yang dibina | % | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 18. | Persentase masyarakat yang memanfaatkan Barak Sukun | % | 90 | 100 | 0 | 23 | 6 |
| 19. | Persentase masyarakat korban bencana alam skala kota tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) kejadian kebakaran | % | 60 | 60 | 60 | 54 | 51 |
| 22. | Jumlah sosialisasi tentang kebencanaan | kali | 1 | 7 | 9 | 10,4 | 12,6 |
| 23. | Jumlah Kelurahan Tanggap Bencana yang Terlatih | % | 0 | 3 | 5 | 5,5 | 6,8 |
| 24. | Persentase Perawatan dan Pemeliharaan Taman Makam pahlawan Veteran dan Taman Makam Pahlawan TRIP. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**) Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2018

7) Tenaga Kerja

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan tenaga kerja Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16 Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|---------------------|---|--------|-----------------|------|------|------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tenaga Kerja | | | | | | | |
| 1. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | % | 3,33 | 4,71 | 4,4 | 5,01 | 5,45 |
| 2. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 71,88 | 88,3 | 70,4 | 82,6 | 86,278 |
| 3. | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 41,46 | 67,2 | 66,6 | 79,1 | 88,786 |
| 4. | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | % | 99,68 | 97,3 | 66,9 | 83,5 | 83,008 |
| 5. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 60 | 42,8 | 59,0 | 43,2 | 36,962 |
| 6. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | % | 86,49 | 72,9 | 59,0 | 64,5 | 61,48 |

**) Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, 2018

8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.17 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|--|---|--------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | |
| 1. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | 72,9 9 | 96,2 6 | 96,7 6 | 104,6 81 | 112, 368 |
| 2. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | 72,9 9 | 74,8 7 | 74,8 7 | 76,4 39 | 77,5 74 |
| 3. | Persentase penanganan kasus tindakan KDRT | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 8 | 7,69 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| 8. | cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Persentase organisasi perempuan yang difasilitasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Persentase Forum Anak yang Difasilitasi | % | 83,3 3 | 83,3 3 | 100 | 100 | 100 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2018

9) Pangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.19 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|--------|--|--------|-----------------|-------|------|-------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pangan | | | | | | | |
| 1. | Ketersediaan pangan utama (<i>food availability</i>) | % | 10,18 | 10,18 | 11,3 | 11,04 | 11,228 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

10) Pertanahan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanahan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.19 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|------------|---|--------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanahan | | | | | | | |
| 1. | Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah | Rp | 3.250.451.895 | 3.127.796.858 | 3.283.372.938,92 | 3.209.641.969,64 | 3.201.051.053,72 |
| 2. | Persentase Bidang Lahan Aset Daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah | % | 58,95 | 58,95 | 59,82 | 62,774 | 64,512 |
| 3. | Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat | % | 10,49 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 4. | Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah | % | 66,66 | 46,66 | 45,82 | 26,652 | 13,816 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2018

11) Lingkungan Hidup

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.20 Hasil Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|--------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Pemenuhan PERDA/ Kajian Bidang Lingkungan Hidup | Perda | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|--|------------|-----------------|------|-------|--------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2. | Sekolah peduli dan berbudaya Lingkungan (Adiwiyata). | sekolah | 80 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 3. | Industri yang memiliki AMDAL, UKL/UPL/ Izin Lingkungan | kegiatan | 200 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 4. | Jumlah Perumahan yang memiliki AMDAL,UKL/UPL dan Izin Lingkungan | perumahan | 71 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| 5. | Ketaatan kegiatan usaha terhadap upaya pencegahan dan pengendalian lingkungan | perusahaan | 90 | 95 | 98 | 98 | 98 |
| 6. | Kegiatan ekonomi yang memiliki dokumen lingkungan | Presentase | 76,91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan limbah cair. | % | 32 | 30 | 20 | 21,7 | 19,4 |
| 8. | Persentase Perusahaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). | % | 4,82 | 4,76 | 4,58 | 4,512 | 4,37 |
| 9. | Persentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan udara emisi dari sumber tidak bergerak. | % | 29 | 30 | 30 | 31,2 | 32 |
| 10. | Persentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). | % | 14 | 15 | 30 | 28,2 | 32 |
| 11. | Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA | % | 97 | 80 | 67,73 | 65,584 | 58,33 |
| 12. | Persentase pengoperasian TPA | % | 65 | 55 | 60 | 64,8 | 68,2 |
| 13. | Persentase menurunnya pelanggaran dibidang lingkungan hidup | % | 11 | 10 | 10 | 10,6 | 10,8 |
| 14. | Persentase tingkat kepedulian masyarakat. terhadap upaya pelstarian lingkungan hidup | % | 19 | 20 | 20 | 20,7 | 21,2 |
| 15. | persentase kendaraan operasional persampahan yang layak jalan | % | 78 | 80 | 85 | 88,5 | 92,4 |
| 16. | Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | konservasi dan rehabilitasi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (lahan kritis, sumber air, keanekaragaman hayati, dan ekosistem). | kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Jumlah sumur resapan dan biopori di Kota Malang. | unit | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19. | Upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. | kegiatan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 20. | jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya | jumlah | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| 21. | jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. | kasus | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 22. | Pengembangan data dan informasi lingkungan (Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Malang) | paket | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 23. | jumlah titik pantau udara ambient dalam rangka pencegahan pencemaran udara. | titik | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 24. | Jumlah titik pantau Air Badan Air (ABA) dalam rangka pencemaran air | Titik | 18titik x2kali | 18titik X3kali | 18titik X3kali | 18titik X3kali | 18titik X3kali |
| 25. | Jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor dalam rangka pencegahan pencemaran udara. | paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kota Malang, Tahun 2018

12) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.21 Hasil Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|--|--------|-----------------|---------|---------|--------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Jiwa | 619,31 | 631,263 | 623,696 | 654,55 | 671,01 |
| 2. | Rasio bayi berakte kelahiran | % | 59,24 | 72,93 | 74,48 | 44,358 | 30,496 |
| 3. | Rasio pasangan berakte nikah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Lembar | 58801 | 59.912 | 39.500 | 44.808 | 41.558 |
| 7. | Cakupan penerbitan akta kelahiran | Lembar | 17198 | 19.675 | 19.617 | 18.229 | 17.741 |
| 8. | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga . | Lembar | 78100 | 69.172 | 65.000 | 69.816 | 69.963 |
| 9. | Cakupan Penerbitan KTP – elektronik. | Lembar | 58801 | 97824 | 39500 | 64.367 | 65.296 |
| 10. | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian | Lembar | 2388 | 4,379 | 5,835 | 5,835 | 5,835 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

13) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---|--------|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 Taun) | | 1,7 | 1,78 | 1,78 | 1,76 | 1,75 |
| 2. | Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) | | 76,89 | 77,21 | 77,47 | 77,905 | 78,244 |
| 3. | Angka kelahiran pada remaja (ASFR) 15-19 tahun | | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,61 | 6,74 |
| 4. | Persentase Laju pertumbuhan penduduk | | 1,51 | 1,26 | 1 | 1,35 | 1,396 |
| 5. | Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif | | 76,68 | 77,36 | 78,8 | 80,02 | 81,13 |
| 6. | Rata-rata jumlah anak perkeluarga | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,322 | 0,318 |
| 7. | Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun | | 0,36 | 0,38 | 0,5 | 0,128 | 0,128 |
| 8. | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>) | | 12,72 | 12,33 | 11,7 | 11,555 | 11,262 |
| 9. | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB | | 83,83 | 74,73 | 75,89 | 77,853 | 77,562 |
| 10. | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | | 73,95 | 73,88 | 73,9 | 91,63 | 100,57 |
| 11. | Ratio petugas Lapangan (PLKB/PKB) di setiap Kelurahan | | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,80 | 0,75 |
| 12. | Ratio petugas pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) di setiap kelurahan | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,098 | 1,096 |
| 13. | Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap kelurahan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) | | 84,83 | 100 | 100 | 104,526 | 108,472 |
| 15. | Jumlah penyandang penyakit reproduksi remaja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---|--------|-----------------|-------|-------|--------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 16. | jumlah kegiatan pembinaan keluarga | | 17 | 14 | 18 | 15 | 14 |
| 17. | Presentase PUS anggota BKB, BKR, BKL, UPPKS yang mendapatkan pembinaan kesertaan ber-KB | | 76,62 | 77,09 | 75,49 | 78,057 | 79,024 |
| 18. | Jumlah keluarga sejahtera dan keluarga pra sejahtera anggota UPPKS | | 1190 | 1200 | 1209 | 1211 | 1217 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

14) Perhubungan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perhubungan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Jumlah arus penumpang angkutan umum | orang | 3.485.717 | 3.485.717 | 2.448.000 | 1.550.660 | 1.550.660 |
| 2. | Jumlah uji kir angkutan umum | Kenda- raan | 16.149 | 16.385 | 13.744 | 14.717 | 14.474 |
| 3. | Persentase layanan angkutan darat | % | 51,7 | 50,2 | 48 | 46,6 | 44,94 |
| 4. | Pemasangan Rambu-rambu | buah | 31 | 1243 | 76 | 613 | 708 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang, 2018

15) Komunikasi dan Informatika

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26 Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---|---------|-----------------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | KIM | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | 92,5 | 93,3 | 93,8 | 95,07 | 96,02 |
| 3. | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | % | 73 | 76 | 78 | 88,9 | 95,7 |
| 4. | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | % | 82,6 | 85,3 | 88,5 | 90,62 | 93,16 |
| 5. | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | % | 79,8 | 82,5 | 83,1 | 85,73 | 87,76 |
| 6. | Persentase penyelesaian pengaduan materi SMS pengguna nomor telekomunikasi dalam rangka perlindungan masyarakat | % | 31 | 32 | 36,29 | 38,332 | 40,89 |
| 7. | Persentase meningkatnya rata-rata pengunjung website per tahun | % | 14,14 | 15,14 | 15,1 | 15,617 | 16,02 |
| 8. | Persentase luas area blank spot | % | 7,5 | 6,7 | 6,2 | 5,33 | 4,58 |
| 9. | Persentase informasi yang di sebarakan melalui KIM | % | 6,44 | 7,44 | 7,44 | 8,403 | 9,074 |
| 10. | Persentase informasi yang memanfaatkan masyarakat | % | 78 | 79 | 79 | 82 | 83,8 |
| 11. | Jumlah pengguna informasi publik yang terlayani | % | 94,65 | 95,65 | 95,54 | 93,187 | 91,86 |
| 12. | Jumlah website yang dimiliki pemerintah | Website | 108 | 109 | 129 | 129 | 129 |
| 13. | pelaksanaan deseminasi dan pendistribusian informasi melalui media pentura | % | 42 | 42 | 42 | 54 | 60 |
| 14. | pelaksanaan deseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal | % | 70 | 92 | 92 | 92 | 92 |

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang,2018

16) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28 Hasil Kinerja Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| 1. | Persentase jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi | % | 74,39 | 76,44 | 78,94 | 83,24 | 86,57 |
| 2. | Presentase Ekonomi Kreatif | % | | | | | 6 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3. | Jumlah UKM Non BPR/KSP/USP | unit | 2931 | 2945 | 2978 | 2978 | 2978 |
| 4. | Jumlah KUMKM yang telah mendapat pembinaan dalam prosedur mengakses permodalan | KUMKM | 226 | 227 | 229 | 229 | 229 |
| 5. | Jumlah UMKM yang memiliki legalitas | UMKM | 90 | 125 | 130 | 130 | 130 |
| 6. | Persentase UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha | % | 75,78 | 77,79 | 78,87 | 81,13 | 83,00 |
| 7. | Persentase UKM yang mengakses sistem pendukung usaha | % | 59,76 | 70,59 | 72,45 | 77,19 | 81,88 |
| 8. | Persentase wirausaha mikro binaan yang berkembang | % | 4,63 | 4,65 | 4,67 | 4,88 | 5,00 |
| 9. | Persentase Pertumbuhan Wirausaha Mikro Baru Binaan | % | 5,11 | 5,2 | 5,25 | 5,67 | 5,91 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2018

17) Penanaman Modal

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan penanaman modal Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27 Hasil Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----------------|---|--------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Penanaman Modal | | | | | | | |
| 1. | Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah | % | 2,9 | 2,45 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

18) Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | |
| 1. | Persentase organisasi pemuda yang aktif | % | 32,32 | 34,15 | 33,54 | 34,59 | 35,17 |
| 2. | Persentase wirausaha muda | % | 0,31 | 0,42 | 0,67 | 0,606 | 0,66 |
| 3. | Cakupan pembinaan olahraga | Pembinaan | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 4. | Cakupan pelatih yang bersertifikasi | Pelatihan | 73 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| 5. | Cakupan pembinaan atlet muda | Pembinaan | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| 6. | Jumlah atlet berprestasi | orang | 208 | 319 | 376 | 376 | 376 |
| 7. | Jumlah prestasi olahraga | Prestasi | 8 | 15 | 11 | 11 | 11 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, 2018

19) Statistik

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan statistik Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.29 Hasil Kinerja Bidang Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|-----------------|-------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Tidak | Tidak | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Buku "kota dalam angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3. | Buku "PDRB" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang pertama yakni tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di Kota Malang baru tersedia sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang kedua yakni Terdapatnya buku "Kota dalam Angka" di Kota Malang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah memilikinya. Begitu juga pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang ketiga, yakni terdapatnya buku "PDRB" di Kota Malang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga telah memilikinya.

20) Persandian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan persandian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30 Hasil Kinerja Bidang Urusan Persandian Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|------------|--|---------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persandian | | | | | | | |
| 1. | Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan | Dokumen | 39 | 45 | 50 | 50 | 50 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

21) Kebudayaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|------------|---|--------|-----------------|------|------|-------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kebudayaan | | | | | | | |
| 1. | Persentase budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang | % | 24 | 25 | 31 | 31,9 | 34,4 |
| 2. | Persentase Cagar Budaya yang terjaga | % | 39,92 | 81 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Persentase tradisi dan adat istiadat budaya yang terjaga | % | 100 | 73 | 80 | 70,5 | 63,8 |
| 4. | Persentase kelompok kebudayaan yang masih aktif yang dibina | % | 100 | 73 | 76 | 93,47 | 93,47 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2018

22) Perpustakaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.32 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Perpustakaan | | | | | | | |
| 1. | Jumlah pengunjung perpustakaan kota | orang | 227.132 | 226.073 | 269.396 | 252.467 | 255.450 |
| 2. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Eksemplar | 164.579 | 175.095 | 179.486 | 191.433 | 200.716 |
| 3. | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | orang | 18.928 | 18.839 | 20.407 | 19.405 | 19.245 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4. | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | judul | 101.250 | 105.038 | 107.452 | 112.870 | 117.023 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang,

23) Kearsipan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kearsipan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.33 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----------|--|--------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kearsipan | | | | | | | |
| 1. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 18 | 40 | 40 | 52,1 | 62 |
| 2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Kali | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang,

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang berikut Perangkat Daerah pelaksana urusan tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.27
Urusan Pilihan dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana |
|----|------------------------|---|
| 1. | Kelautan dan Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 2. | Pariwisata | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| 3. | Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 4. | Perdagangan | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 5. | Perindustrian | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |

Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang

1) Pariwisata

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pariwisata Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.35 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pariwisata | | | | | | | |
| 1. | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Malang | % | 36 | 21 | 24 | 25,3 | 25,2 |
| 2. | Kunjungan wisatawan di obyek daya tarik wisata | Juta Orang | 3,3 | 4 | 4,7 | 5,4 | 6,1 |
| 3. | Meningkatnya PAD dan PDRB Kota Malang dari sektor pariwisata | % | 43 | 45 | 50 | 50,17 | 52,11 |
| 4. | Meningkatnya kegiatan pariwisata yang berskala Regional, Nasional dan Internasional | Kegiatan | 16 | 18 | 20 | 22,9 | 25,4 |
| 5. | Jumlah taman kota dan hutan kota sebagai lokasi rekreasi murah masyarakat | Taman | 12 | 12 | 12 | 13,8 | 14,8 |
| 6. | Meningkatnya rumah makan dan restouran | Rumah Makan | 298 | 301 | 315 | 315 | 315 |
| 7. | Meningkatnya sarana Akomodasi dan Hotel | Unit | 105 | 107 | 108 | 108 | 108 |
| 8. | PDRB sector perdagangan, hotel, dan restouran | Milliar Rupiah | 1.712 | 1.826 | 1.826 | 1.987 | 2.093 |
| 9. | Persentase sektor hotel dan restoran terhadap Total PDRB | % | 41,4 | 4,41 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

2) Pertanian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.36 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----------|---|--------|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanian | | | | | | | |
| 1. | Jumlah nilai produksi hasil pertanian | % | 106,2 | 136,0 | 105,25 | 124,00 | 128,92 |
| 2. | Jumlah nilai produksi hasil perkebunan (ton) | % | 93,77 | 93,77 | 95,31 | 93,551 | 92,822 |
| 3. | Jumlah nilai produksi hasil peternakan | % | 94,47 | 85,82 | 131,08 | 119,33 | 125,75 |
| 4. | Rata-rata peningkatan produktifitas hasil pertanian | % | 106,2 | 136,0 | 105,25 | 124,00 | 128,92 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 5. | Terjalinnnya kemitraan antara pengusaha kecil | % | 93,77 | 93,77 | 95,31 | 93,551 | 92,822 |
| 6. | Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Kw/ha | 94,47 | 85,82 | 131,08 | 119,33 | 125,75 |

**)Tahun 2019 Angka Proyeksi*

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang,

3) Perdagangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perdagangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.37 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-------------|--|---------------------|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Perdagangan | | | | | | | |
| 1. | Jumlah peningkatan pasar yang dikelola masyarakat menjadi pasar daerah | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Volume sampah pasar yang ditangani | m3 | N/A | 20036 | 20300 | 21436,5 | 22075,8 |
| 3. | Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah pasar | Unit gerobak sampah | N/A | 24 | 26 | 31,2 | 34,8 |
| 4. | Jumlah PKL yang dibina | PKL | N/A | 5,98 | 13,53 | 12,902 | 15,294 |
| 5. | Prosentase PKL yang ditata dan direlokasi sesuai komoditas | % | 2,67 | 14,28 | 17,86 | 18,034 | 18,48 |
| 6. | Prosentase Revitalisasi Pasar | % | 21,43 | 2,67 | 2,98 | 3,15 | 3,35 |
| 7. | Cakupan PKL yang mendapat pendataan, pengendalian, penataan, pemetaan dan pengawasan | % | 2,67 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Cakupan Pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar | % | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Perdagangan | | | | | | | |
| 9. | Jumlah Pasar Tradisional | Pasar Tradisional | 28 | 25 | 26 | 29,4 | 33,2 |
| 10. | Jumlah Pemeliharaan Pasar Tradisional | Pasar Tradisional | 13 | 6,6 | 7 | 7,05 | 7,26 |
| 11. | Prosentase peningkatan nilai ekspor perdagangan | % | N/A | 8423 | 8442 | 8538,1 | 8611,4 |
| 12. | Prosentase alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah. | UTIP | N/A | 20036 | 20300 | 21436,5 | 22075,8 |

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang, 2018

4) Perindustrian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.38 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|---------------|---|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Perindustrian | | | | | | | |
| 1. | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | % | 28,24 | 27,14 | 25,4 | 25,202 | 24,396 |
| 2. | PDRB Sektor Industri | Triliun Rupiah | 12.637 | 13.734 | 14.521 | 15.364 | 16.213 |
| 3. | Persentase PDRB sektor Agro, Kimia, makanan dan Minuman terhadap total PDRB | % | 25,22 | 24,63 | 23,63 | 23,018 | 22,272 |
| 4. | Kontribusi PDRB untuk sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka | % | 1,93 | 1,86 | 1,77 | 1,698 | 1,622 |
| 5. | Persentase produk industri yang berstandarisasi | % | 6,2 | 20,6 | 5 | 12,99 | 14,5 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|------------|-----------------|------|------|--------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 6. | Persentase industri yang menguasai teknologi | % | 59,97 | 33,8 | 35 | 37,119 | 34,724 |
| 7. | Jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi | IKM | 8 | 47 | 41 | 38,5 | 40,2 |
| 8. | Persentase jumlah IKM yang melakukan inovasi produk | % | 45,12 | 45 | 30 | 39,024 | 39,024 |
| 9. | Jumlah jenis data industri yang dimutakhirkan | Jenis data | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin | | 2780 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang, 2018

C. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

Analisis kinerja atas layanan penunjang urusan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kota Malang, yaitu bidang urusan:

1) Perencanaan Pembangunan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Perencanaan Pembangunan | | | | | | | |
| 1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4. | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---|--------|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 6. | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | N/A | 100 | 100 | 102,289 | 108,17 |
| | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | % | 49,34 | 60,57 | 80,64 | 82,629 | 91,508 |
| 5. | Persentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi. | % | 50 | 60,76 | 70,64 | 75,229 | 82,318 |
| 7. | Persentase SKPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras | % | 40,54 | 100 | 80,34 | 93,476 | 102,574 |
| 8. | Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan renja/RKT berkualitas baik | % | 40,54 | 100 | 80,34 | 93,046 | 101,908 |
| 9. | Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Persentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi | % | 52,5 | 62 | 53,41 | 60,876 | 63,556 |

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang, Tahun 2018

2) Keuangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.40 Hasil Kinerja Bidang Urusan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2. | Besaran SILPA | Rp | 316.838.899.177,40 | 322.985.750.377,67 | 316.838.899.177,40 | 305.005.705.627,07 | 400.598.440.985,66 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|--|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3. | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 14,86 | 17,22 | 14,86 | 15,45 | 19,07 |
| 4. | Realisasi belanja pendidikan (20%) terhadap APBD | Rp | 626.517. 216.602, 00 | 625.098. 112.422, 96 | 530.615. 997.438, 37 | 5,49242E+11 | 5,29753E +11 |
| 5. | Realisasi belanja kesehatan (10%) terhadap APBD | Rp | 139.946. 146.155, 14 | 142.819. 682.440, 48 | 159.362. 377.552, 68 | 1,76318E+11 | 1,93134E +11 |
| 6. | Realisasi Belanja Langsung | Rp | 893.714. 312.491, 77 | 921.030. 657.951, 21 | 778.379. 835.897, 26 | 8,77759E+11 | 8,91181E +11 |
| 7. | Realisasi Belanja Tidak Langsung | Rp | 909.706. 228.426, 52 | 789.046. 786.308, 76 | 1.035.54 4.086.40 4,28 | 1,03426E+12 | 1,09705E +12 |
| 8. | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | Rp | 75.036.6 00,00 | 78.766.2 00,00 | 6.484.05 0,00 | 22418820 | 9096300 |
| 9. | Penetapan APBD | Rp | 1.803.42 0.540.91 8,29 | 1.710.07 7.444.25 9,97 | 1.813.92 3.922.30 1,54 | 1,91201E+12 | 1,98823E +12 |
| 10. | Persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 hari | % | 72,65 | 81,17 | 90 | 77,115 | 73,232 |
| 11. | Persentase Data Aset Daerah Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya | % | 35 | 48,25 | 62,69 | 68,527 | 78,14 |
| 12. | Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai | 78,575 | 76,37 | 78,575 | 78,82 | 79,054 |
| 13. | Persentase Belanja Tidak Langsung (BTL) APBD ≤ 50% | % | N/A | 46 | 46,44 | 47,606 | 48,488 |
| 14. | Persentase Realisasi Belanja Langsung SKPD ≥ 90% | % | N/A | 77,45 | 83,98 | 85,514 | 88,99 |
| 15. | Persentase Penyajian Laporan Barang Milik | % | 73,96 | 100 | 100 | 109,986 | 119,076 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---|--------|-----------------|-------|------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Daerah (LBMD) Secara Benar | | | | | | |
| 16. | Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrua | % | 0 | 94,12 | 93,5 | 100,851 | 107,348 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2018

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.42

Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----------|---|--------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Keuangan | | | | | | | |
| 1. | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | JP | 38 | 40 | 45 | 51 | 56,2 |
| 2. | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 60 | 63 | 65 | 67,7 | 70,2 |
| 3. | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang, 2018

4) Pengawasan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengawasan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.41 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----------|--|---------------|-----------------|------|------|------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Keuangan | | | | | | | |
| 1. | Jumlah tindak lanjut temuan | Tindak lanjut | 504 | 555 | 556 | 612 | 647,8 |

Sumber: Inspektorat Kota Malang, 2018

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah menggambarkan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pada aspek daya saing ini terklasifikasi menjadi 4 (empat) fokus yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

Kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya terhadap barang dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok makanan dan non makanan. Pada batas tertentu kebutuhan akan makanan bisa mencapai titik maksimal, namun untuk kebutuhan non makanan tidak terbatas.

Tabel 2.42 Rata-Rata Konsumsi per Kapita Menurut Kelompok Konsumsi Di Kota Malang Tahun 2015-2019 (Rupiah per bulan)

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Makan | 494.076 | 523.578 | 632.530 | 597.020 | 616.123 |
| 2. | Non Makanan | 766.110 | 831.897 | 1.038.695 | 1.022.372 | 992.783 |
| Total | | 1.260.186 | 1.355.475 | 1.671.225 | 1.619.392 | 1.608.906 |

Sumber: BPS Kota Malang, 2020

Apabila dilihat dari rata-rata konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok konsumsi di Kota Malang tahun 2015-2019 lebih banyak konsumsi non makanan. Pada tahun 2015 rata-rata konsumsi makanan per kapita di Kota Malang mencapai Rp. 494.076 per kapita sebulan (39,21%). Pada tahun 2016 rata-rata konsumsi makanan per kapita di Kota Malang meningkat menjadi Rp.523.578 per kapita sebulan (38,63%).

Sedangkan pada tahun 2015 untuk rata-rata konsumsi non makanan per kapita di Kota Malang sebesar Rp. 766.110 per kapita sebulan (60,79%). Pada tahun 2016 untuk rata-rata konsumsi non makanan per kapita di Kota Malang sebesar Rp.831.897 per kapita sebulan (61,37%).

Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita ini, karena belum tentu menjadi gambaran peningkatan kesejahteraan. Mengingat terjadinya peningkatan konsumsi bisa dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan harga yang terukur melalui inflasi, bukan karena pendapatan yang meningkat.

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (*Hukum Engel/Engel law*).

Tabel 2.43 Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Dirinci Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Malang

| No | Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Makan | % | 39,21 | 38,63 | 37,85 | 36,87 | 38,29 |
| 2. | Non Makanan | % | 60,79 | 61,37 | 62,15 | 63,13 | 61,71 |
| Total | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS Kota Malang, 2020

Kecenderungan pola konsumsi masyarakat Kota Malang pada kurun waktu 2015-2019 lebih banyak pada konsumsi non makanan. Pada tahun 2015 persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Malang sebesar 60,79% dan terus meningkat sampai tahun 2018, yaitu pada tahun 2016 sebesar 61,37%, tahun 2017 adalah 62,15 dan tahun 2018 sebesar 63,13%. Sedangkan pada tahun 2019 secara persentase konsumsi non makanan menurun menjadi 61,71%.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu daerah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup,

image, dan budaya masyarakat. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan dan efisiensi usaha. Analisa kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun
4. Ketaatan terhadap RTRW
5. Luas wilayah produktif
6. Luas wilayah industri
7. Luas wilayah perkotaan
8. Jenis dan jumlah bank dan cabang
9. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
10. Jenis, kelas dan jumlah restoran
11. Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel
12. Persentase layanan air bersih
13. Rasio ketersediaan daya listrik
14. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
15. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Berikut adalah sajian seluruh indikator dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur di Kota Malang Tahun 2015-2019.

Tabel 2.47 Hasil Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-2019

| No | Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 1. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | | N/A | 0,85 | 0,9 | 0,5335 | 0,367 |
| 2. | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | Orang | 3.485.717 | 3.485.717 | 2.448 | 1373413,3 | 1081346,4 |
| 3. | Persentase layanan air bersih | % | 64 | 65,64 | 66,11 | 68,308 | 69,894 |
| 4. | Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon | % | 73 | 76 | 78 | 88,9 | 95,7 |

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat

diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Besarnya investasi di Kota Malang tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi keamanan, ketentraman, ketertiban, kecepatan perijinan dan kepastian hukum dalam berusaha. Untuk itu, dalam analisis kinerja atas fokus iklim berinvestasi dilakukan terhadap 5 (lima) indikator, yaitu angka kriminalitas, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, serta jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim investasi.

D. Fokus Sumber Daya Manusia

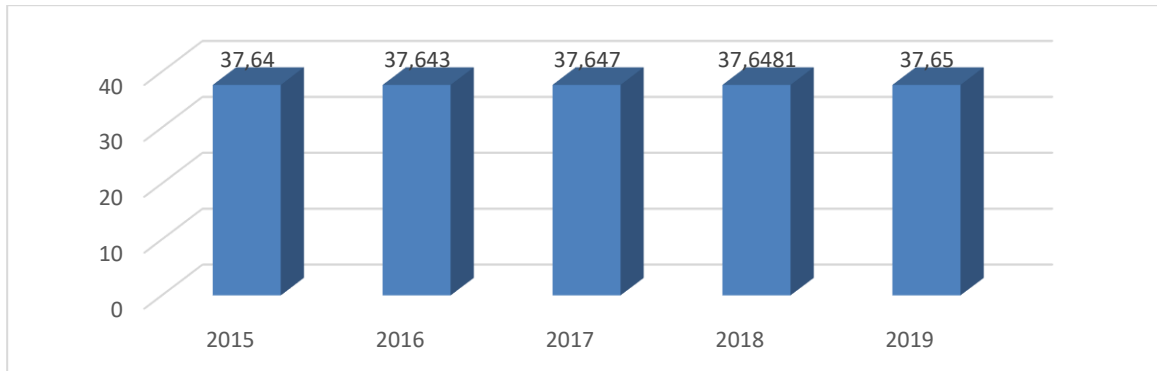
Analisis kinerja atas fokus sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio ketergantungan di Kota Malang pada Tahun 2015-2019.

Salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia. Sebab semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang ada. Kualitas tenaga kerja di Kota Malang dapat dilihat dari rasio lulusan S1/S2/S3. Capaian kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3) di Kota Malang pada tahun 2013 yakni realisasi sebesar 11,93 lulusan per 10.000 penduduk dari target 8,08 lulusan per 10.000 penduduk, sehingga capain dari indikator ini sebesar 148%.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umumnya sudah melewati masa pensiun).

Rasio ketergantungan atau Dependency ratio (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan hasil analisis rasio keterantungan Kota Malang pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Gambar 2.118 Rasio Ketergantungan Tahun 2015-2019 Kota Malang

Sumber: BPS Kota Malang Tahun 2018

Pada tahun 2015 rasio ketergantungan di Kota Malang sebesar 37,64. Namun pada tahun 2016 rasio ketergantungan di Kota Malang berhasil diturunkan menjadi 41,18. Akan tetapi, pada tahun 2017 rasio ketergantungan di Kota Malang kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 41,28. Pada tahun 2018 rasio ketergantungan di Kota Malang kembali mengalami penurunan menjadi 37,6481. Pada tahun 2019 rasio ketergantungan di Kota Malang mencapai 37,65.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2019 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2018. Dalam RKPD tersebut telah tercantum program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah yang dimaksudkan untuk dianggarkan pada APBD Tahun 2019. Bab ini mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2019. Evaluasi meliputi seluruh program/kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diuraikan capaian program untuk setiap sasaran pembangunan Kota Malang sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan capaian kinerja 91,91%, Program Pendidikan Non Formal dengan capaian kinerja 85,84%, Program Sarana dan Prasarana SKB dengan capaian kinerja 70,76%, Program Pendidikan Sekolah Dasar dengan capaian kinerja 66,49%, Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan capaian kinerja 77,14%, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan capaian kinerja 88,30%, Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya dengan capaian kinerja 96,68%, Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan capaian kinerja 97,84%, Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dengan capaian kinerja 83,33%, Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dengan capaian kinerja 117,76%, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan capaian kinerja 100%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

2. Sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pengawasan obat dan makanan 92,12%, Program Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dengan capaian kinerja 88,00%, Program Obat dan perbekalan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan alat kesehatan dengan capaian kinerja 87,04%, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat dengan capaian kinerja 97,62%, Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan capaian kinerja 100%, Program Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga dengan capaian kinerja 96,02%, Program Kesehatan Kerja Dan Olahraga dengan capaian kinerja 98,69%, Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dengan capaian kinerja 98,01%, Program Pelayanan Kesehatan Dasar dengan capaian kinerja 98,54%, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan capaian kinerja 100%, Program Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan capaian kinerja 100%, Program Pencegahan dan pengendalian penyakit dengan capaian kinerja 96,33%, Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD dengan capaian kinerja 81,25%, Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan capaian kinerja 80,71%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi dengan capaian kinerja 74,13%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi dengan capaian kinerja 11,69%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan capaian kinerja 87,39%, Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian kinerja 100%, Program Keluarga Berencana dengan capaian kinerja 71,94%, Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dengan capaian kinerja 100%, Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia dengan capaian kinerja 100%, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga dengan capaian kinerja 85,50%, Program Peningkatan prestasi olahraga dengan capaian kinerja 66,67%, Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan capaian kinerja 80%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

3. Sasaran meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Peningkatan Produksi Tanaman dengan capaian kinerja 104,17%, Program Peningkatan Produksi Peternakan dengan capaian kinerja 100%, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan capaian kinerja 104%, Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan capaian kinerja 100%, Program Pengembangan Panganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan dengan capaian kinerja 85,71%, Program Pengembangan Potensi Perikanan dengan capaian kinerja 100%, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan capaian kinerja 100%, Program Pengembangan Usaha Perdagangan dengan capaian kinerja 101,49%, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrollogian dengan capaian kinerja 103,26%, Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai) dengan capaian kinerja 100%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

4. Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program pengembangan usaha mikro dengan capaian kinerja 101,13%, Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha Mikro (Cukai) dengan capaian kinerja 100%, Program Pengembangan Koperasi dengan capaian kinerja 97,46%, Program Pengawasan Koperasi dengan capaian kinerja 100%, Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka dengan capaian kinerja 105,56%, Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dengan capaian kinerja 101,76%, Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka dengan capaian kinerja 104,44%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka (Cukai) dengan capaian kinerja 100%, Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dengan capaian kinerja 108%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai) dengan capaian kinerja 109,44%, Program Pembinaan Industri (Cukai) dengan capaian kinerja 113,75%, Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui forum tatap muka (Cukai) dengan capaian kinerja 93,75%, Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar dengan capaian kinerja 88,87%, Program Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar dengan capaian kinerja 75,27%, Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal dengan capaian kinerja 77,10%, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capaian kinerja 98,71%, Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan capaian kinerja 99,57%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas dengan capaian kinerja 100%, Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan capaian kinerja 81,13%, Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata dengan capaian kinerja 82,63%.

5. Sasaran meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan dengan capaian kinerja 85,33%, Program Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong dengan capaian kinerja 100%, Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase dengan capaian kinerja 90,64%, Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian dengan capaian kinerja 109,50%, Program Pengembangan/Rehabilitasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan capaian kinerja 96,44%, Program Pengelolaan Penerangan Jalan dengan capaian kinerja 100%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Jalan dengan capaian kinerja 100%, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum dengan capaian kinerja 83,48%, Program Bina Jasa Kontruksi dengan capaian kinerja 86,46%, Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat dengan capaian kinerja 92,12%, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang dengan capaian kinerja 82,14%, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang dengan capaian kinerja 95.48%, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang dengan capaian kinerja 100%, Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum dengan capaian kinerja 16,67%, Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman dengan capaian kinerja 85,47%, Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dengan capaian kinerja 100%, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan capaian kinerja 100%, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas dengan capaian kinerja 100%, Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan capaian kinerja 100%, Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor dengan capaian kinerja 113,82%, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan capaian kinerja 99,85%, Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik dengan capaian kinerja 98,49%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

6. Sasaran meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 100,00%, Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 80%, Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan dengan capaian kinerja 100%, Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 100%, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 100%, Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan dengan capaian kinerja 105%, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan capaian kinerja 99,78%, Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah dengan capaian kinerja 111,07%, Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan capaian kinerja 84,77%, Program Pengurangan dan Penanganan Sampah dengan capaian kinerja 100%, Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan dengan capaian kinerja 71,15%, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan capaian kinerja 100%, Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan capaian kinerja 100%, Program Perencanaan Ruang dengan capaian kinerja 100%, Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dengan capaian kinerja 84,97%, Program Pemanfaatan Tata Ruang dengan capaian kinerja 90,83%, Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan capaian kinerja 1,82%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

7. Sasaran meningkatnya kualitas perlindungan sosial

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan capaian kinerja 100%, Program Peningkatan Kesempatan Kerja

dengan capaian kinerja 75%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan capaian kinerja 100%, Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dengan capaian kinerja 108,44%, Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dengan capaian kinerja 100%, Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian kinerja 88,52%, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan capaian kinerja 103,40%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

8. Sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas dengan capaian kinerja 90,64%, Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan capaian kinerja 77,95%, Program Pemberdayaan Perempuan dengan capaian kinerja 100%, Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan capaian kinerja 93,57%, Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan capaian kinerja 97,19%, Program Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian kinerja 84,74%, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dengan capaian kinerja 100%, Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan capaian kinerja 82,13%, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana dengan capaian kinerja 100%, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan capaian kinerja 102,43%, Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan capaian kinerja 97,44%, Program Pemberdayaan Ormas dan LSM dengan capaian kinerja 71,67%, Program Kewaspadaan Daerah dengan capaian kinerja 91,25%. Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

9. Sasaran meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan

capaian kinerja 92,55%, Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah dengan capaian kinerja 79,81%, Program Pembinaan Polisi Pamong Praja dengan capaian kinerja 78,37%, Program Penerapan dan Penegakan Hukum dengan capaian kinerja 94,24%, Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian kinerja 104,45%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

10. Sasaran meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan capaian kinerja 100%, Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja 99,84%, Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran dengan capaian kinerja 92,42%, Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan dengan capaian kinerja 93,64%, Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dengan capaian kinerja 87,40%, Program Pengelolaan Arsip Daerah dengan capaian kinerja 110%, Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja 98,46%, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam dengan capaian kinerja 99,18%, Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya dengan capaian kinerja 94,76%, Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah dengan capaian kinerja 94,13%, Program Penyusunan Anggaran Daerah dengan capaian kinerja 115,84%, Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah dengan capaian kinerja 94,21%, Program Pelaporan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100%, Program Penatausahaan Aset Daerah dengan capaian kinerja 92,65%, Program Pemanfaatan Aset Daerah dengan capaian kinerja 90,70%, Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah dengan capaian kinerja 87,03%, Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dengan capaian kinerja 81,73%, Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah dengan capaian kinerja 98,28%, Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan dengan capaian kinerja 104,95%, Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian dengan capaian kinerja 96,30%, Program Pengembangan Kebijakan SDA dan

Infrastruktur dengan capaian kinerja 89,70, Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan dengan capaian kinerja 84,65%, Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga dengan capaian kinerja 98,08%, Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dengan capaian kinerja 95,78%, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 99,14%, Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I dengan capaian kinerja 82,91%, Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II dengan capaian kinerja 81,70%, Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III dengan capaian kinerja 73,30%, Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV dengan capaian kinerja 89,47%, Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan/Anggota DPRD dengan capaian kinerja 100%, Program Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan capaian kinerja 81,40%, Program Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan capaian kinerja 89,39%, Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum dengan capaian kinerja 96,42%, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan capaian kinerja 83,84%, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja 84,11%, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan capaian kinerja 80,73%, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan capaian kinerja 89,62%, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan dengan capaian kinerja 80,45%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

11. Sasaran meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian dengan capaian kinerja 92,39%, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dengan capaian kinerja 96,57%, Program Fasilitasi

Pemberhentian Pegawai dengan capaian kinerja 100%, Program Pembinaan Kepegawaian dengan capaian kinerja 99,93%, Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian dengan capaian kinerja 100%, Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja 93,08%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

12. Sasaran meningkatnya integrasi teknologi informasi

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik dengan capaian kinerja 94,74%, Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik dengan capaian kinerja 96,46%, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan capaian kinerja 94,53%, Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik dengan capaian kinerja 98,97%, Program Pengelolaan Persandian dengan capaian kinerja 100%, Program Pengolahan Data dan Informasi dengan capaian kinerja 96,81%, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan capaian kinerja 99,16%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

Tabel 2.55

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kota Malang

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|--|------|----|----|---|--|---|----|--|------------------|--|----|--|--------------------|---|----------------------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | 12 | 13 |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | Bidang Urusan Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | - Persentase peningkatan Angka Partisipasi Kasar PAUD - Prosentasi peningkatan Lembaga PAUD terakreditasi | | | 91,91% | 3.173.171.791,00 | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | |
| | 1 | 1 | 18 | Program Pendidikan Non Formal | - Persentase penduduk 15-24 tahun yang buta aksara - Prosentase Program Kesetaraan terakreditasi - Prosentase Program Kursus terakreditasi | | | 85,84% | 2.865.238.164,00 | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | |
| | 1 | 1 | 25 | Program Sarana dan Prasarana SKB | | | | 70,76% | 809.550.000,00 | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | | Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal | - APK PAUD - APM PAUD - Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD - Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF | | | | | 90,38 81,4 20% 20% | | 7.411.341.000,00 | 0 0 0% 0% | 538.769.265,00 | 0% 0% 0% 0% | 7,27% | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | | | | |
|----|------|----|---|--|--|--|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|----|--|----|---|------------------|-----------------------------------|------|-------------|----|--------|----|----|----|
| | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | |
| | | | | | | | K | Rp | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 1 | 1 | 23 | Program Pendidikan Sekolah Dasar | - Angka rata-rata lama sekolah - Persentase jumlah siswa melanjutkan dari SD ke SMP/MTS - Persentase peningkatan jumlah satuan pendidikan SD berakreditasi A - Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi SPM - Presentase peningkatan angka partisipasi kasar - Presentase penurunan angka putus sekolah | | | 66,49% | 81.701.556.602,60 | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 16 | Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - Angka rata-rata lama sekolah - Persentase jumlah siswa melanjutkan dari SD ke SMP/MTS - Persentase peningkatan jumlah satuan pendidikan SMP berakreditasi A - Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan yang Memenuhi SPM - Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar | | | 77,14% | 52.130.312.641,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | | |
|----|------|----|----|--|---|--|---|----|--|------------------|--|--------------------|--|-------------------|---|-------|--|----|---|------------------|--|------|--------|----|----|----|
| | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | | | 10=6+8 | | 11 | |
| | | | | | | | K | Rp | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | Program Pembinaan Pendidikan Dasar | - APK SD - APM SD - Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SD - APK SMP - APM SMP - Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP | | | | | 109,81 104,55 20% 104,15 84,67 20% | 185.758.238.540,00 | - - - - - | 14.325.981.260,00 | 0% 0% 0% 0% 0% | 7,50% | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | |
| | 1 | 1 | 20 | | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - Nilai UKG - Prosentase Satuan Pendidikan dengan jumlah guru sesuai SPM | | | 88,30% | 2.928.891.895,00 | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | | | | | | |
| | | | | | Program Pembinaan Ketenagaan | - Persentase Guru tersertifikasi - Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 - Rasio profesionalitas dan keahlian Teknis Tenaga Pendidikan | | | | | 91,35 80 35 | 2.639.937.000,00 | - - - | 163.374.000,00 | 0% 0% 0% | 6,19% | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | |
| | 1 | 22 | | | Bidang Urusan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 22 | 15 | | Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | | | 96,68% | 2.247.099.577,73 | 45% | 5.446.960.000,00 | - | 70.560.000,00 | 0% | 1,30% | | | | | Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | |
| | 1 | 19 | | | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 19 | 15 | | Program peningkatan peran serta kepemudaan | | | | 97,84% | 1.628.897.804,00 | | | | | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | | | | |
| | 1 | 19 | 16 | | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan | | | | 83,33% | 456.622.500,00 | | | | | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | | | | |

| No | Kode | | | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|--|------|----|----|---|--|---|----|--|------------------|--|------------------|--|---------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | kecakapan hidup pemuda | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Pembinaan Kepemudaan | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | | | | | 1% | 1.961.250.850,00 | - | 63.582.500,00 | 0% | 3,24% | | | | | | Disporapar |
| | 1 | 23 | | Bidang Usuran Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 23 | 16 | Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan | Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi | | | 117,76% | 673.712.840,00 | 12% | 607.292.000,00 | 83,50% | 12.825.000,00 | 0% | 2,11% | | | | | | Dinas Perpustakaan dan AD |
| | 1 | 23 | 17 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan | | | 100,00% | 1.146.780.400,00 | 80% | 375.747.000,00 | - | 24.170.000,00 | 0% | 6,43% | | | | | | Dinas Perpustakaan dan AD |
| Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : <i>Meningkatnya kualitas layanan kesehatan</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Usuran Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 17 | Program Pengawasan obat dan makanan | | | | 92,12% | 692.759.900,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 2 | 40 | Program Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan | | | | 88,00% | 827.880.100,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 2 | 41 | Program Obat dan perbekalan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan alat kesehatan | | | | 87,04% | 3.512.148.160,80 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|----|------|---|----|--|---|---|---|---------|--|-------------------|--|------------------|--|------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|---|----|
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan | - Persentase Tenaga Medis yang berkompeten - Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar | | | 85% 100% | 18.879.345.275,00 | " 24 % 98, 24 %" | 159.927.600,00 | "28, 24% 98,24 %" | 0,88% | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 2 | 19 | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | | | 97,62% | 32.952.265.795,86 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 2 | 20 | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | 100,00% | 9.860.521.916,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 2 | 39 | | Program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga | | | 96,02% | 1.816.796.106,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 2 | 37 | | Program Kesehatan Kerja Dan Olahraga | | | 98,69% | 1.196.014.010,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 2 | 38 | | Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan | | | 98,01% | 1.704.051.391,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | | | | | Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase balita stunting | | | 60,22 6,02 <24% | 39.502.039.520,00 | 0 7,6 6 16, 83 | 4.858.487.342,00 | 0% 141,5 9% % | 12,30 % | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 2 | 33 | | Program Pelayanan Kesehatan Dasar | | | 98,54% | 25.950.244.756,42 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 2 | 34 | | Program Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | 100,00% | 543.125.583,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 2 | 35 | | Program Pelayanan Kesehatan Tradisional | | | 100,00% | 157.562.000,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|---|----|--|---|--|---|--------|--|--------------------|--|-------------------|--|--------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| | | | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan | - % unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM - Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat | | | 100% 100% | 102.689.651.475,00 | - - | 11.416.492.685,00 | 0% 0% | 11,12% | | | | | | | Dinas Kesehatan | | |
| | 1 | 2 | 36 | | Program Pencegahan dan pengendalian penyakit | | | 96,33% | 3.704.617.957,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | |
| | | | | | Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) - Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat - Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) - Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Prosentase Keluarahan UCI | | | 100% 100% 100% 100% 100% 93% | 5.496.971.282,00 | 7,9% 6,7% 32,7% 7% 23,8% 22% 14% 2% 64,9% | 501.793.460,00 | 7,9% 6,7% 32,7% 23,8% 21,99% 14,16% 69,80% | 9,13% | | | | | | | | Dinas Kesehatan | |
| | 1 | 2 | 42 | | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | | | 81,25% | 1.589.841.963,14 | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | |
| | | | | | Program BLUD Puskesmas | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | 100% | 23.114.356.500,00 | 100% | 3.094.048.990,00 | 100% | 13,39% | | | | | | | | Dinas Kesehatan | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|----|------|----|----|--|--|---|----|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|---|---------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|---|----|
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 43 | Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah | NDR (Net Death rate) | | | 80,71% | 25.573.538.636,00 | <2% | 33.099.454.000,00 | - | 1.911.575.015,00 | 0% | 5,78% | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | | | | Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah | BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD | | | | | 30% | 10.000.000.000,00 | - | 1.610.681.931,00 | 0% | 16,11 % | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 2 | 44 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi | | | | 74,13% | 11.518.842.497,00 | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | | | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan | Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar | | | | | 100% | 3.635.756.000,00 | 98,24 % | 2.747.278,00 | 98,24 % | 0,08% | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 2 | 45 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi | | | | 11,69% | 821.283.540,00 | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 2 | 48 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | 87,39% | 4.128.812.950,95 | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | | | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan | - Persentase gedung fasilitas pelayanan kesehatan dalam kondisi baik - Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat | | | | | 100% 100% | 13.364.244.000,00 | 0 - | - | 0% 0% | 0,00% | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
| | 1 | 14 | | Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 14 | 15 | Program Pengendalian Laju | | | | 100,00% | 417.432.000,00 | | | | | | | | | | | DP3AP2KB | | | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|--|---|--|---|---------|--|------------------|--|----|--|----------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | Pertumbuhan Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 14 | 16 | | Program Keluarga Berencana | | | 71,94% | 2.901.234.475,00 | | | | | | | | | | | | | DP3AP2KB |
| | 1 | 14 | 17 | | Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga | | | 100,00% | 1.593.302.349,00 | | | | | | | | | | | | | DP3AP2KB |
| | 1 | 14 | 18 | | Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia | | | 100,00% | 453.658.400,00 | | | | | | | | | | | | | DP3AP2KB |
| | | | | | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) - Cakupan peserta KB Aktif - Prosentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif - % kelompok UPPKS Aktif | | | 1,67 75,4 67,5% 94,64% | 4.950.419.500,00 | | | - - - - | 324.337.700,00 | 12% 0% 0% 0% | 6,55% | | | | | | Dinas Sosial P3AP2KB |
| | 1 | 19 | | | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 19 | 17 | | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | | | 85,50% | 1.071.235.813,00 | | | | | | | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| | 1 | 19 | 18 | | Program Peningkatan prestasi olahraga | | | 66,67% | 771.310.200,00 | | | | | | | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| | 1 | 19 | 19 | | Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga | | | 80,00% | 2.573.682.854,45 | | | | | | | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | | | Program Pembinaan Keolahragaan | persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga | | | 0,12% | 6.376.732.250,00 | | | - | 85.786.550,00 | 0% | 1,35% | | | | | | Disporapar |

Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : *Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan*

| No | Kode | | | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|---|----|--|---|---|----|--|----------------|--|----------------|--|---------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | 2 | | | Usuran Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | | Bidang Usuran Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 51 | Program Peningkatan Produksi Tanaman | Persentase peningkatan rata rata produktivias hasil pertanian dari tahun sebelumnya | | | 104,17% | 730.642.200,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | Program Peningkatan Pertanian | Persentase peningkatan produksi pertanian | | | | | 2,00% | 504.126.200,00 | 0,52% | 26.625.000,00 | 0,52% | 5,28% | | | | | | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | 2 | 3 | 17 | Program Peningkatan Produksi Peternakan | Persentase peningkatan produksi hasil peternakan | | | 100,00% | 218.328.980,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | 2 | 3 | 18 | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase peningkatan produksi hasil peternakan | | | 104,00% | 380.126.000,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | Program Peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan | - Persentase peningkatan produksi peternakan - Persentase peningkatan pemeriksaan contoh pangan asal hewan - Persentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan | | | | | 2% 15% 2% | 418.378.000,00 | - - - | 24.950.000,00 | 0,00% | 5,96% | | | | | | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | 1 | | | Usuran Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 9 | | Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | | | | |
|----|------|---|----|--|---|--|---|---------|--|-------|--|-------|--|-------|---|----|--|----|---|---|-----------------------------------|------|-------------|----|--------|----|----|----|
| | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | |
| | | | | | | | K | Rp | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 1 | 9 | 15 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Persentase peningkatan ketersediaan pangan utama | | | 100,00% | 417.041.457,00 | 2% | 914.961.100,00 | 1,71% | 29.752.500,00 | 1,71% | 3,25% | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | | | | | | | | |
| | 1 | 9 | 16 | Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan | Skor pola pangan harapan | | | 85,71% | 492.152.000,00 | | | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | | | | | | | | |
| | 2 | | | Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 18 | Program Pengembangan Potensi Perikanan | Persentase peningkatan produksi hasil perikanan | | | 100,00% | 905.080.500,00 | | | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | | | | | | | | |
| | | | | Program Peningkatan Perikanan | Persentase peningkatan produksi perikanan | | | | | 5% | 1.043.843.000,00 | - | 79.210.000,00 | 0% | 7,59% | | | | | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | | | | | | | | |
| | 2 | | | Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 6 | | Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 6 | 15 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Jumlah pedagang yang memiliki UTTP yang sesuai dengan standar | | | 100,00% | 421.200.000,00 | | | | | | | | | | | Dinas Perdagangan | | | | | | | | |
| | 2 | 6 | 21 | Program Pengembangan Usaha Perdagangan | Persentase pedagang yang dibina | | | 101,49% | 1.289.728.980,00 | | | | | | | | | | | Dinas Perdagangan | | | | | | | | |
| | | | | Program bina perdagangan | Persentase pertumbuhan UKM | | | | | 0,50% | 2.415.340.000,00 | 21% | 274.973.635 | 21% | 11,38% | | | | | Diskopindag | | | | | | | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|--|------|----|----|---|---|---|----|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 6 | 22 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrolgian | Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera | | | 103,26% | 528.214.301,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perdagangan | | |
| | 2 | 6 | 24 | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai) | Jumlah pengawasan barang yang kena cukai ilegal | | | 100,00% | 256.446.500,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perdagangan | | |
| | | | | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal | Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal | | | | | 100,00% | 100.000.000,00 | - | - | 0% | 0% | | | | | | Diskopindag | | |
| Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 17 | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 17 | Program pengembangan usaha mikro | % Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil | | | 101,13% | 1.562.544.084,00 | 40,79% | 1.404.876.000,00 | 0,32% | 87.510.000,00 | 0,78% | 6,23% | | | | | | Dinas Koperasi dan UM/Diskopindag | | |
| | 1 | 17 | 18 | Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha Mikro (Cukai) | % WUB Mikro yang tumbuh | | | 100,00% | 1.092.067.900,00 | 22,91% | 700.000.000,00 | 0% | - | 0% | 0% | | | | | | Dinas Koperasi dan UM/Diskopindag | | |
| | 1 | 17 | 15 | Program Pengembangan Koperasi | | | | 97,46% | 1.558.354.294,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Koperasi dan UM | | |
| | 1 | 17 | 16 | Program Pengawasan Koperasi | Persentase Koperasi yang dinilai sehat | | | 100,00% | 464.660.400,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Koperasi dan UM | | |
| | | | | Program Pembinaan Koperasi | Persentase koperasi aktif | | | | | 79,85% | 1.721.570.000,00 | 3,85% | 111.421.850,00 | 4,82% | 6,47% | | | | | | Diskopindag | | |
| | 2 | | | Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 7 | | Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|---|----|--|---|---|----|--|------------------|--|------------------|--|------------|---|-------|--|----|--|----|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| | 2 | 7 | 20 | Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka | Laju pertumbuhan ILMATETTA atas dasar harga konstan | | | 105,56% | 2.622.553.920,91 | | | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian | |
| | 2 | 7 | 21 | Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dan Minuman | Laju pertumbuhan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman atas dasar harga konstan | | | 101,76% | 749.403.679,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian | |
| | | | | Program pengembangan industri | Persentase peningkatan jumlah IKM | | | | | 2% | 6.684.720.000,00 | 0,23% | 72.012.000 | 11,50% | 1,08% | | | | | | Diskopindag | |
| | 2 | 7 | 22 | Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka | Pertumbuhan Industri Kreatif Unggulan ILMATETTA | | | 104,44% | 2.224.111.000,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian | |
| | 2 | 7 | 23 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka (Cukai) | Jumlah wira usaha industri baru sektor ILMATETTA | | | 100,00% | 691.258.000,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian | |
| | 2 | 7 | 24 | Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman | Pertumbuhan Industri Kreatif Unggulan Agro, Kimia, Makanan dan Minuman | | | 108,00% | 640.429.396,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|----|------|----|----|---|---|---|----|--|-------------------|--|-------------------|--|----------------|---|--------|--|----|---|----|-----------------------------------|------------------------------------|---|----|
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 7 | 25 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai) | Jumlah wira usaha industri baru sektor agro, kimia, makanan dan minuman | | | 109,44% | 589.011.242,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian | | |
| | 2 | 7 | 26 | Program Pembinaan Industri (Cukai) | Persentase PDRB IHT terhadap PDRB | | | 113,75% | 156.712.400,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian | | |
| | 2 | 7 | 27 | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui forum tatap muka (Cukai) | Persentase IHT yang memahami peraturan terbaru di bidang cukai | | | 93,75% | 59.967.000,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian | | |
| | | | | Program Pembinaan Industri Perdagangan | Persentase IHT yang dibina | | | | | 30% | 100.000.000,00 | - | - | 0% | 0% | | | | | | Diskopindag | | |
| | 2 | 6 | 20 | Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar | Persentase pemeliharaan pasar rakyat | | | 88,87% | 19.686.688.056,85 | | | | | | | | | | | | Dinas Perdagangan | | |
| | 2 | 6 | 23 | Program Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar | Persentase peningkatan jumlah pasar yang bersih, tertib, indah, nyaman, dan terpelihara | | | 75,27% | 421.527.693,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perdagangan | | |
| | | | | Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar | Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal | | | | | 8% | 28.830.961.230,00 | 1% | 662.619.447 | 12,50% | 2,30% | | | | | | Diskopindag | | |
| | 1 | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 18 | | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 18 | 16 | Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal | | | | 77,10% | 299.443.654,00 | | | | | | | | | | | | DPMPPTSP | | |
| | 1 | 18 | 20 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase peningkatan jumlah minat investor | | | 98,71% | 457.486.832,00 | 30% | 821.715.000,00 | 0% | 169.275.000,00 | 0% | 20,60% | | | | | | DPMPPTSP/Dinas Tenaga Kerja PMPTSP | | |

| No | Kode | | | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|---|------|---|----|--|---|---|----|--|------------------|--|------------------|--|---------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| | 1 | 7 | | Bidang Usuran Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 7 | 15 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | | | 99,57% | 575.478.450,00 | 1% | 327.175.000,00 | 0,00% | 900.000,00 | 0,00% | 0,28% | | | | | | Dinas Tenaga Kerja/Dinas Tenaga Kerja PMPTSP | |
| | 1 | 7 | 18 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas | Persentase peserta pelatihan keterampilan kerja | | | 100,00% | 445.954.636,00 | 55% | 450.000.000,00 | 0% | - | 0% | 0,00% | | | | | | Dinas Tenaga Kerja/Dinas Tenaga Kerja PMPTSP | |
| | 2 | | | Usuran Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | 15 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | | | | 81,13% | 1.370.558.009,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | | | Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | - persentase pemasaran Pariwisata - persentase pengembangan ekonomi kreatif | | | | | 45% 25% | 2.105.802.000,00 | - - | 10.315.500,00 | 0% 0% | 0,49% | | | | | | | Disporapar |
| | 2 | 2 | 16 | Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata | | | | 82,63% | 2.247.522.757,00 | | | | | | | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | | Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata | - Persentase destinasi wisata yang dibina - persentase industri pariwisata yang dibina | | | | | 25% 30% | 6.731.994.000,00 | - - | 48.734.434,00 | 0% 0% | 0,72% | | | | | | | Disporapar |
| Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Usuran Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|---|----|---|--|---|----|--|-------------------|--|----|--|----|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | 1 | 3 | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 9 | Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | persentase jembatan Kota dalam kondisi baik | | | 85,33% | 6.931.786.000,00 | | | | | | | | | | | | DPUPR |
| | 1 | 3 | 23 | Program Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | | | 100,00% | 1.069.460.000,00 | | | | | | | | | | | | DPUPR |
| | 1 | 3 | 38 | Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase | Persentase drainase Kota dalam kondisi baik | | | 90,64% | 16.051.723.495,00 | | | | | | | | | | | | DPUPR |
| | 1 | 3 | 7 | Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | | | 109,50% | 55.987.587.663,86 | | | | | | | | | | | | DPUPR |
| | 1 | 3 | 11 | Program Pengembangan/Rehabilitasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik | | | 96,44% | 746.912.000,00 | | | | | | | | | | | | DPUPR |
| | 1 | 4 | 9 | Program Pengelolaan Penerangan Jalan | Persentase Penerangan Jalan Terkelola | | | 100,00% | 8.584.096.543,00 | | | | | | | | | | | | DPUPR |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|---|----|--|--|---|---|----|--|------------------|--|--------------------|--|------------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | Program Bina Marga | - Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Persentase jembatan kota dalam kondisi baik - Persentase fasilitas penerangan jalan - Persentase drainase kota dalam kondisi baik - Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik - Persentase jalan yang memiliki jalur pekaln kaki | | | | | 91,18% 96,09% 67,23% 83% 90% 89,93% | 268.024.303.000,00 | - - - - - | 6.459.084.814,00 | 0% 0% 0% 0% 0% | 2,21% | | | | | DPUPRPERKIM | |
| | 1 | 3 | 8 | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Jalan | persentase jalan dalam kondisi baik | | | 100,00% | 5.074.131.000,00 | 91,18% | 11.957.556.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0% | 0,01% | | | | | DPUPR/DPUPRPERKIM | |
| | 1 | 3 | 12 | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum | persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Proses Sertifikasi Laik Kungsi Bangunan Gedung | | | 83,48% | 587.890.500,00 | | | | | | | | | | | DPUPR | |
| | 1 | 3 | 13 | | Program Bina Jasa Kontruksi | persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan inKormasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem InKormasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | | | 86,46% | 1.158.643.900,00 | | | | | | | | | | | DPUPR | |
| | 1 | 3 | 58 | | Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat | Persentase Jumlah pengujian yang diproses sesuai SOP | | | 92,12% | 628.236.600,00 | | | | | | | | | | | DPUPR | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|----|------|---|----|--|--|---|----|--|-------------------|--|--------------------|--|----------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|-------|-------------|----|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | 1 | 3 | 47 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang | persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada kawasan prioritas di kota malang | | | 82,14% | 2.697.551.200,00 | | | | | | | | | | | | DPUPR | | |
| | 1 | 3 | 14 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang | Persentase Rumah Tinggal berakses air minum | | | 95,48% | 4.551.512.860,00 | | | | | | | | | | | | | DPUPR | |
| | 1 | 3 | 26 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang | | | | 100,00% | 11.211.451.052,00 | | | | | | | | | | | | | DPUPR | |
| | 1 | 3 | 37 | Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum | persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dalam kondisi baik | | | 16,67% | 5.968.612.466,83 | | | | | | | | | | | | | DPUPR | |
| | | | | Program Cipta Karya | - Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung - Persentase pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL - Persentase rumah tinggal berakses air bersih - Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | | | | | 100% 5% 93,71% 85,02% | 279.320.633.000,00 | - - - - | 337.260.725,00 | 0% 0% 0% 0% 0% | 0,12% | | | | | | | DPUPRPERKIM | |
| | 1 | 4 | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|----|------|----|--|--|--|---|----|--|-------------------|--|-------------------|--|----------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|-------------------|---|----|
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 7 | | Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman | PPersentase Luasan Kawasan Kumuh | | | 85,47% | 6.413.426.325,00 | | | | | | | | | | | | Disperkim | | |
| | | | | Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman | - Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau - Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU - Persentase Rumah Tidak Layak Huni | | | | | 55% 55% 0,19% | 13.717.738.000,00 | - - - | 394.865.607,00 | 0% 0% 0% | 2,88% | | | | | | DPUPRPERKIM | | |
| | | | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah | Persentase infrastruktur air limbah dalam kondisi baik | | | | | 85,02% | 1.150.000.000,00 | - | - | 0% | 0% | | | | | | DPUPRPERKIM | | |
| 1 | 4 | 8 | | Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) | Pringkat Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa | | | 100,00% | 2.276.209.248,00 | | | | | | | | | | | | Disperkim | | |
| | 15 | | | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | 8 | | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kota | | | 100,00% | 1.458.031.629,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perhubungan | | |
| 1 | 15 | 21 | | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas | | | 100,00% | 7.467.329.562,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perhubungan | | |
| 1 | 15 | 19 | | Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang | | | 100,00% | 1.604.763.000,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perhubungan | | |
| | | | | Program Pengendalian Lalu Lintas | % penurunan titik kemacetan | | | 68% | 14.453.082.500,00 | | | - | 319.039.866,00 | 0% | 2,07% | | | | | | Dinas Perhubungan | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|--|------|----|--|---|--|---|----|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 15 | 9 | | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Persentase angkutan umum yang laik jalan | | | 113,82% | 2.059.812.324,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perhubungan | |
| 1 | 15 | 10 | | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota | | | 99,85% | 885.498.600,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Program Pelayanan Angkutan Darat | - Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat) - Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | | | 65% 13% | 3.421.691.250,00 | - - | 522.351.276,00 | 0% 0% | 15,27% % | | | | | | | | Dinas Perhubungan | |
| 4 | | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | | | Pemerintahan Administrasi Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 06 | 17 | | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik | - Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan - Persentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir | | | 98,49% | 39.122.840.154,00 | 0,35 3,89 | 44.096.228.349,00 | 2.721.331.800,00 | 6,17% | | | | | | | | Kec-Kel | |
| Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : <i>Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | | | | |
|----|------|----|----|--|--|---|----|--|------------------|--|------------------|--|---------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----|--------|----|----|----|
| | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | |
| | | | | | | K | Rp | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 1 | 11 | 15 | Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup | - Prosentase Kajian yang dilaksanakan - Prosentase dokumen lingkungan yang disetujui | | | 100,00% | 509.916.300,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| | | | | Program Penataan Lingkungan Hidup | Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standart | | | | | 85% | 1.880.269.000,00 | - | 49.710.000,00 | 22,98 | 2,64% | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| | 1 | 11 | 16 | Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup | Prosentase Kemitraan/Kerjasama yang terjalin dengan Dinas Lingkungan Hidup | | | 80,00% | 426.817.030,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| | 1 | 11 | 18 | Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan. | Prosentase menurunnya pelanggaran di bidang lingkungan hidup | | | 100,00% | 511.007.000,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| | 1 | 11 | 19 | Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Prosentase masyarakat yang peduli lingkungan | | | 100,00% | 306.094.500,00 | | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | 1 | 11 | 20 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | - Prosentase kegiatan pengendalian lingkungan yang terlaksana - Persentase kegiatan / Usaha yang melaksanakan pengendalian air dan B3 | | | 100,00% | 592.442.100,00 | | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | 1 | 11 | 21 | Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan | Meningkatkan Kepuasan pelanggan terhadap hasil uji Lab | | | 105,00% | 1.799.351.011,37 | | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | | | | |
|----|------|----|----|--|--|--|---|----|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|-------------|----|--------|----|----|----|
| | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | |
| | | | | | | | K | Rp | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | Program Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | - Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan - Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang | | | | | 12% 30% | 727.029.500,00 | - | 28.730.000,00 | 2,97 % 0,31 % | 3,95% | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| | 1 | 11 | 17 | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Prosentase Penduduk yang dilayani pengangkutan sampah | | | 99,78% | 17.507.196.740,00 | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| | 1 | 11 | 22 | | Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah | Prosentase Pengurangan dan Penanganan Sampah di TPS dan PKD | | | 111,07% | 2.056.493.650,00 | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| | | | | | Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 | - Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif) - Persentase Penanganan Sampah | | | | | 22% 75% | 20.402.722.000,00 | - | 1.739.155.750,00 | 0,99 % 9,39 %" | 8,52% | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| | 1 | 11 | 23 | | Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | Prosentase sampah yang terolah di TPA | | | 84,77% | 4.818.666.600,00 | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| | 1 | 11 | 25 | | Program Pengurangan dan Penanganan Sampah | Prosentase Masyarakat/Lembaga yang melakukan Pengolahan Sampah | | | 100,00% | 514.730.900,00 | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| | 1 | 11 | 26 | | Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan | Prosentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan | | | 71,15% | 900.514.852,00 | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|--|---|--|---|----|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan | - Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif) - Persentase Penanganan Sampah | | | | | 22% 75% | 1.500.000.000,00 | - | - | 0% 0% | 0% | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 1 | 4 | | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4 | 10 | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Persentase luas RTH Publik yang dikelola dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan | | | 100,00% | 15.259.521.150,00 | 8,23 | 17.234.011.850,00 | - | 1.138.691.050,00 | 0% | 6,61% | | | | | Disperkim/DP UPRPERKIM | |
| | 1 | 4 | 11 | | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | Persentase luasan makam terkelola | | | 100,00% | 1.024.446.000,00 | | | | | | | | | | | Disperkim | |
| | 1 | 3 | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 32 | | Program Perencanaan Ruang | Persentase Dokumen Perencanaan dan sistem inKormasi Tata Ruang | | | 100,00% | 318.076.000,00 | | | | | | | | | | | DPUPR | |
| | 1 | 3 | 56 | | Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | | | 84,97% | 133.385.000,00 | | | | | | | | | | | DPUPR | |
| | 1 | 3 | 57 | | Program Pemanfaatan Tata Ruang | Persentase Pelayanan Keterangan Rencana Kota sesuai SOP | | | 90,83% | 186.377.850,00 | | | | | | | | | | | DPUPR | |
| | 1 | 10 | | | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 10 | 21 | | Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah | Prosentase Rekomendasi Ijin Lokasi | | | 1,82% | 110.953.000,00 | | | | | | | | | | | Disperkim | |
| | | | | | Program Penataan Ruang dan pertanahan | - Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani - Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang | | | | | 100% 7% | 2.260.000.000,00 | - | 31.840.000,00 | 0% 0% | 1,41% | | | | | DPUPRPERKIM | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|--|------|----|--|--|--|---|----|--|-------------------|--|----------------|--|--------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|--|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : <i>Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | | | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 16 | | Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan | Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | | | 100,00% | 825.887.600,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| 1 | 7 | 17 | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | | | 75,00% | 425.255.350,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial | - persentase pencari kerja yang ditempatkan - persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Berjasa (PB) | | | | | 75% 62% | 904.357.200,00 | 64% 36% % | 2.870.925,00 | 85,75% 58,65% % | 0,32% | | | | | | Dinas Tenaga Kerja PMPTSP |
| 1 | 7 | 19 | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Sosial | Persentase peningkatan lapangan kerja | | | 100,00% | 671.501.067,00 | 6,50% | 250.000.000,00 | - | - | 0% | 0% | | | | | | Dinas Tenaga Kerja/Dinas Tenaga Kerja PMPTSP |
| 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 15 | | Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial | | | | 108,44% | 12.510.121.767,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 16 | | Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial | | | | 100,00% | 407.409.438,13 | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|---|------|---|----|--|---|--|---|---------|--|----|--|------------------|--|----------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|---|----|
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | - Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial - Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial - Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik | | | | | 51,19 13,28 100 | 4.240.115.900,00 | - - - | 328.861.604,00 | 8% 0% 0% | 7,76% | | | | | Dinas Sosial P3AP2KB | | | |
| | 1 | 6 | 18 | | Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | 88,52% | 1.782.405.808,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial | | | |
| | 1 | 6 | 17 | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | 103,40% | 4.071.585.430,00 | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial | | | |
| | | | | | Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial | - Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya - Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | | | | | 14,24 100% | 4.686.042.900,00 | - - | 199.605.107,00 | 10% 0% | 4,26% | | | | | Dinas Sosial P3AP2KB | | | |
| Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : <i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|---|---|---|---------|--|------------------|--|----------------|--|-----------|---|----|--|----|---|--|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | 8 | | | | | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | | | |
| | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 1 | 5 | | | Ketentrangan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 5 | 18 | | Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas | | | 90,64% | 4.952.895.915,00 | | | | | | | | | | | | Satpol PP | |
| | 1 | 5 | 19 | | Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | | | 77,95% | 2.374.371.885,00 | | | | | | | | | | | | Satpol PP | |
| | | | | | Program Perlindungan Masyarakat | - Rasio Linmas per RT - Persentase kejadian kebakaran yang ditangani | | | 100% 100% | 7.085.200.000,00 | - - | 246.874.808,00 | 0% 0% | 3,48% | | | | | | | Satpol PP | |
| | 1 | 8 | | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 8 | 15 | | Program Pemberdayaan Perempuan | - Prosentase organisasi perempuan yang aktif - % Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) | | 100,00% | 1.410.453.819,00 | 93% 75% | 1.326.339.100,00 | - - | 86.419.500,00 | 23% 0% | 6,52% | | | | | | DP3AP2KB/Dinas Sosial P3AP2KB | |
| | 1 | 8 | 16 | | Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak | | | 93,57% | 794.351.113,00 | | | | | | | | | | | | DP3AP2KB | |
| | | | | | Program Perlindungan Perempuan dan Anak | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | | | | 100% | 1.151.725.000,00 | - | 128.109.650,00 | 0% | 11,12 % | | | | | | Dinas Sosial P3AP2KB | |
| | 4 | | | | Usuran Pemerintahan Umum Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|---|----|--|---|---|----|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|---|---------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | 4 | 1 | | Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 17 | Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan | Jumlah fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat | | | 97,19% | 34.275.987.000,00 | | | | | | | | | | | Setda-Bag. Kesra | |
| | | | | Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan | Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti (ditindaklanjuti : draft rekomendasi, telaah staf, surat, laporan) | | | | | 100% | 3.214.028.100,00 | 24 % | 94.342.000,00 | 24% | 2,94% | | | | | Setda-Bag. Kesra | |
| | 4 | 6 | | Pemerintahan Administrasi Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 6 | 16 | Program Pemberdayaan Masyarakat | - Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (---> mendukung indeks gotong royong dan toleransi) - Rasio Linmas per RT (--> mendukung indeks rasa aman--> data kota 0,5--> target kota 2023 --> rasio 1) | | | 84,74% | 14.909.534.876,00 | 4,18 0,65 | 50.031.453.150,00 | | 6.171.838.000,00 | | 12,34 % | | | | | Kec-Kel | |
| | 4 | 5 | | Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|---|--|---|---|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---|--------|--|---|---|---|-----------------------------------|------|
| | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | |
| | K | Rp | K | | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | |
| 1 | 4 | 5 | 15 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | - Persentase Kejadian Bencana Pada Titik Pantau - Persentase masyarakat tangguh bencana | | | 100,00% | 1.089.325.240,00 | - 10% | 1.075.934.000,00 | - | 173.804.500,00 | 0% 0% | 16,15% | | | | | BPBD | |
| | 4 | 5 | 16 | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | - Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana - Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik | | | 82,13% | 2.194.178.910,00 | < 1 Jam 100% | 1.753.810.000,00 | - | 118.600.000,00 | 0% 0% | 6,76% | | | | | BPBD | |
| | 4 | 5 | 17 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana | | | 100,00% | 1.867.784.375,00 | 30% | 1.468.300.000,00 | - | 57.452.500,00 | 0% | 3,91% | | | | | BPBD | |
| | 4 | 4 | | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | 15 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | prosentase penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi | | | 102,43% | 752.904.258,00 | | | | | | | | | | | Bakesbangpol | |
| | | | | Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama | - Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa - Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan agama | | | | | 10% 67,5% | 1.078.609.400,00 | 0% 0% | 63.505.000,00 | 0% 0% | 5,89% | | | | | Bakesbangpol | |
| | 4 | 4 | 16 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | prosentase hak pilih yang digunakan dalam Pemilu | | | 97,44% | 1.105.636.152,00 | | | | | | | | | | | Bakesbangpol | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | | | | |
|---|------|---|----|---|--|---|----|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---|--------|--|----|---|----|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|
| | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | |
| | | | | | | K | Rp | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | 4 | 4 | 17 | Program Pemberdayaan Ormas dan LSM | Prosentase LSM/Ormas yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan definisi partisipasi aktif | | | 71,67% | 89.168.600,00 | | | | | | | | | | | | Bakesbangpol | | | | | | |
| | | | | Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | - Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat - Persentase peran serta ormas dalam pembangunan | | | | | 52,5% 27,5% | 744.651.600,00 | 0% 0% | 67.260.100,00 | 0% 0% | 9,03% | | | | | | | Bakesbangpol | | | | | |
| | 4 | 4 | 18 | Program Kewaspadaan Daerah | prosentase konflik yang berpotensi disintegrasi bangsa yang terselesaikan | | | 91,25% | 2.064.261.400,00 | | | | | | | | | | | | | Bakesbangpol | | | | | |
| | | | | Program Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik | Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan | | | | | 67,50% | 2.158.710.000,00 | 0% | 24.783.556,00 | 0% | 1,15% | | | | | | | | Bakesbangpol | | | | |
| Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : <i>Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 5 | | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 5 | 15 | Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | | | 92,55% | 5.528.041.723,00 | | | | | | | | | | | | | | Satpol PP | | | | |
| | | | | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | | | | | 95% | 4.404.040.000,00 | - | 567.068.500,00 | 0% | 12,88% | | | | | | | | | Satpol PP | | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|---|------|---|----|--|---|---|--------|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|-----------|-----------------|----|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| 1 | 1 | 5 | 16 | Program Pengawasan Perundang-Undangan Daerah | | | 79,81% | 1.546.997.500,00 | | | | | | | | | | | | | Satpol PP | | |
| | | | | Program Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Daerah | Persentase penanganan pelanggaran Perda | | | | | 100% | 1.460.000.000,00 | - | 108.780.000,00 | 0% | 7,45% | | | | | | | | |
| | 1 | 5 | 17 | Program Pembinaan Polisi Pamong Praja | | | 78,37% | 673.940.650,00 | | | | | | | | | | | | | | Satpol PP | |
| | 4 | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | | Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 22 | Program Penerapan dan Penegakan Hukum | Persentase sidang penegakan hukum daerah | | | 94,24% | 2.908.536.500,00 | | | | | | | | | | | | | Setda-Bag.Hukum | |
| | 4 | 1 | 21 | Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan | Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan | | | 104,45% | 1.207.813.412,00 | | | | | | | | | | | | | Setda-Bag.Hukum | |
| | | | | Program Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | | | 100,00% | 3.233.799.600,00 | 100,00% | 299.529.990,00 | 100,00% | 9,26% | | | | | | | Setda-Bag.Hukum | |
| Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatkan Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|---|---|---|----|--|------------------|--|------------------|--|---------------|---|--------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | | |
| | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 1 | 12 | 15 | | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | % penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan | | | 100,00% | 2.741.038.627,00 | 95,5% | 2.899.175.300,00 | 23,87% | 170.090.000 | 24,99% | 5,87% | | | | | Dispendukcapil | |
| | 1 | 12 | 16 | | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | % penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil | | | 99,84% | 2.401.671.783,00 | 91% | 2.889.827.000,00 | 22,75% | 276.555.000 | 25,00% | 9,57% | | | | | Dispendukcapil | |
| | 1 | 15 | | | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 15 | 27 | | Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran | Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib | | | 92,42% | 1.043.672.500,00 | | | | | | | | | | | Dinas Perhubungan | |
| | | | | | Program Pengelolaan perparkiran | Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD | | | | | 10,1 M | 1.859.870.000,00 | - | 38.220.000,00 | 0% | 2,05% | | | | | Dinas Perhubungan | |
| | 1 | 18 | | | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 18 | 18 | | Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan | Nilai SKM Non Perizinan | | | 93,64% | 275.160.000,00 | | | | | | | | | | | DPMPSTSP | |
| | | | | | Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya | persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya | | | | | 82,50% | 72.280.000,00 | 0% | 11.760.000,00 | 0% | 16,27% | | | | | Dinas Tenaga Kerja PMPTSP | |
| | 1 | 18 | 19 | | Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | Nilai SKM Perizinan | | | 87,40% | 807.215.000,00 | | | | | | | | | | | DPMPSTSP | |
| | | | | | Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum | - Persentase penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum - Persentase realisasi target retribusi IMB | | | | | 82,5% 100% | 757.766.000,00 | - - | 72.002.500,00 | 0% 0% | 9,50% | | | | | Dinas Tenaga Kerja PMPTSP | |
| | 1 | 24 | | | Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 24 | 15 | | Program Pengelolaan Arsip Daerah | Persentase peningkatan dokumen arsip yang dikelola sesuai kaidah kearsipan | | | 110,00% | 387.179.409,00 | 11,50% | 585.778.000,00 | - | 26.647.162,00 | 0% | 4,55% | | | | | Dinas Perpustakaan dan AD | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|---|----|--|--|--|---|----|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | 3 | | | | Urusan Penunjang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | | | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | 15 | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD | | | 98,46% | 3.837.814.662,00 | | | | | | | | | | | Barenlitbang | |
| | | | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | - Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD. - Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD | | | | | 100% 90% | 2.425.000.000,00 | - - | 238.903.050,00 | 8,85% 0% | 9,85% | | | | | BAPPEDA | |
| | 3 | 1 | 16 | | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam | | | | 99,18% | 2.228.831.500,00 | | | | | | | | | | | Barenlitbang | |
| | | | | | Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | - Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara. - Prosentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design Sektor Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang mendukung perencanaan. | | | | | 85% 85% | 2.045.000.000,00 | - 0% | 144.144.300,00 | 6,41% 0% | 7,05% | | | | | BAPPEDA | |
| | 3 | 1 | 17 | | Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya | | | | 94,76% | 1.427.826.942,00 | | | | | | | | | | | Barenlitbang | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|---|----|--|---|---|---|--------|--|------------------|--|----------------|--|------------|---|----|--|----|---|--------------|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara. - Prosentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti. | | | 85% 85% | 1.835.689.000,00 | - 0% | 256.040.000,00 | 0% 0% | 13,95 % | | | | | | BAPPEDA | | |
| | 3 | 1 | 18 | | Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah | | | 94,13% | 1.992.064.910,00 | | | | | | | | | | | Barenlitbang | | |
| | | | | | Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara. - Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW - Prosentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan. | | | 85% 70% 85% | 1.433.580.000,00 | 0 % - - | 3.170.000,00 | 0,24 % 0% 0% | 0,22 % | | | | | | BAPPEDA | | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | | | | |
|----|------|---|----|--|---|---|---|---------|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---|---------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|-------------|----|--------|----|----|----|
| | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | |
| | | | | | | | K | Rp | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | 3 | 2 | | | Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 15 | | Program Penyusunan Anggaran Daerah | | | 115,84% | 2.641.571.825,00 | | | | | | | | | | | | BPKAD | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 16 | | Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah | | | 94,21% | 2.076.271.580,00 | | | | | | | | | | | | BPKAD | | | | | | | |
| | | | | | Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | | 40% | 5.259.423.300,00 | 100 % | 1.423.464.508,00 | 100 % | 27,07 % | | | | | | BKAD | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 17 | | Program Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | | | 100,00% | 966.757.286,00 | 100% | 2.368.295.800,00 | 25 % | 128.577.800,00 | 25% | 5,43% | | | | | BPKAD/BKAD | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 18 | | Program Penatausahaan Aset Daerah | | | 92,65% | 1.993.780.701,00 | | | | | | | | | | | | BPKAD | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 19 | | Program Pemanfaatan Aset Daerah | Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD | | | 90,70% | 1.857.531.680,00 | 2,703 M | 2.793.006.500,00 | 78 6.6 19. 765 | 592.526.648,00 | 29,1 0% | 21,21 % | | | | | BPKAD/BKAD | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 20 | | Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah | | | 87,03% | 5.122.666.650,00 | | | | | | | | | | | | BPPD | | | | | | | |
| | | | | | Program Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah | persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | | | | | 37,04% | 2.600.000.000,00 | - | 3.080.000,00 | 0% | 0,12% | | | | | Bapenda | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 21 | | Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah | | | 81,73% | 2.088.830.500,00 | | | | | | | | | | | | BPPD | | | | | | | |
| | | | | | Program Pelayanan Pajak Daerah | kontribusi pajak daerah terhadap PAD | | | | | 82,08% | 4.694.514.000,00 | - | 353.870.000,00 | 0% | 7,54% | | | | | Bapenda | | | | | | | |

| No | Kode | | | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|----|------|---|----|--|---|---|---------|--|----------------|--|------------------|--|----------------|---|--------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|-------------------------------------|----|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | 3 | 2 | 22 | Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah | | | 98,28% | 2.636.869.800,00 | | | | | | | | | | | | | BPPD | | |
| | | | | Program Pengendalian Pajak Daerah | persentase penurunan piutang pajak daerah | | | | | 1,81% | 3.806.110.000,50 | - | 11.263.000,00 | 0% | 0,30% | | | | | | | Bapenda | |
| | 3 | 4 | | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 4 | 19 | Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan | | | 104,95% | 3.070.064.428,00 | | | | | | | | | | | | | | Barenlitbang | |
| | | | | Program Penelitian dan Pengembangan | - Persentase implementasi rencana kelitbang - Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | | | | | 50% 3,5% | 2.775.000.000,00 | 0% 0% | 160.525.720,00 | 8,52% 0,96% % | 5,78% | | | | | | | BAPPEDA | |
| | 4 | | | Usuran Pemerintahan Umum Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | | Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 18 | Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian | | | 96,30% | 803.982.123,00 | | | | | | | | | | | | | Setda-Bag.Pengembangan Perekonomian | |
| | | | | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka | Persentase hasil evaluasi ditindaklanjuti | | | | | 100% | 200.000.000,00 | 100% | 75.541.830,00 | 100% | 37,77% | | | | | | | Setda-Bag.PISDA | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|---|----|--|--|---|---|----|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---|---------|--|----|---|----|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | Pemantauan dan Evaluasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 19 | | Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur | Persentase kebijakan bidang SDA dan PI yang difasilitasi | | | 89,70% | 429.762.637,00 | | | | | | | | | | | | Setda-Bag.SDAPI |
| | | | | | Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA | Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti | | | | | 100% | 750.848.100,00 | 87 % | 52.526.481,00 | 87% | 7,00% | | | | | | Setda-Bag.PISDA |
| | 4 | 1 | 15 | | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan | Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang | | | 84,65% | 3.322.614.588,00 | | | | | | | | | | | | Setda-Bag.Pemerintahan |
| | | | | | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang | | | | | 3,5760 | 2.921.551.000,00 | - | 366.408.143,00 | 0% | 12,54 % | | | | | | Setda-Bag.Pemerintahan |
| | 4 | 1 | 16 | | Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga | Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga | | | 98,08% | 9.983.491.580,00 | 100% | 6.150.000.000,00 | 20 % | 612.648.834,00 | 20% | 9,96% | | | | | | Setda-Bag.Humas |
| | | | | | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Penyampaian Informasi melalui Media | Persentase kegiatan bidang cukai yang dipublikasikan | | | | | 100% | 500.000.000,00 | 0% | - | 0% | 0% | | | | | | Setda-Bag.Humas |
| | 4 | 1 | 20 | | Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan | | | 95,78% | 2.015.416.654,24 | | | | | | | | | | | | Setda-Bag.LPBJ |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|---|----|--|--|---|----|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---|---------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan | | | | | 100% | 1.841.964.600,00 | - | 326.233.880,00 | 0% | 17,71 % | | | | | Setda-Bag.LPBJ | |
| | 4 | 1 | 23 | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Persentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang difasilitasi | | | 99,14% | 1.296.361.036,00 | | | | | | | | | | | Setda-Bag.Organisasi | |
| | | | | Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja | Nilai kapasitas organisasi | | | | | 3 | 1.739.364.000,00 | - | 376.612.355 | 0% | 21,65 % | | | | | Setda-Bag.Organisasi | |
| | 4 | 2 | | Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 2 | 15 | Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I | Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | 82,91% | 1.727.045.937,00 | | | | | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan | - Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan reviu - Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah dilakukan reviu | | | | | 100%(10/10) 100%(2/2) | 2.713.133.000,00 | - | 498.609.207,00 | 0% 0% | 18,38 % | | | | | Inspektorat | |
| | 4 | 2 | 16 | Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II | Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | 81,70% | 990.427.478,00 | | | | | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ekonomi dan sumber daya alam | Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | | | 100% | 337.258.500,00 | - | 750.000 | 0% | 0,22% | | | | | Inspektorat | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|----|------|---|----|--|--|---|----|--|------------------|--|-------------------|--|----------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|-------------|---|----|
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 2 | 17 | Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III | Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | 73,30% | 687.079.250,00 | | | | | | | | | | | | Inspektorat | | |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | | | 100% | 422.182.000,00 | - | 900.000 | 0% | 0,21% | | | | | | Inspektorat | | |
| | 4 | 2 | 19 | Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV | Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | 89,47% | 671.905.600,00 | | | | | | | | | | | | Inspektorat | | |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | | | 100% | 425.771.500,00 | - | 21.895.163 | 0% | 5,14% | | | | | | Inspektorat | | |
| | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan DPRD | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | | | | | 100% | 19.031.065.000,00 | 2,18% | 668.215.657,00 | 2,18% | 3,51% | | | | | | Set.DPRD | | |
| | 4 | 3 | | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 3 | 15 | Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi | | | | 100,00% | 2.340.387.200,00 | | | | | | | | | | | | Set.DPRD | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | | | | |
|----|------|---|----|---|--|---|----|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|---|------------|--|----|---|----|-----------------------------------|----------|-------------|----|--------|----|----|----|
| | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | |
| | | | | | | K | Rp | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | Pimpinan/Anggota DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Perencanaan dan Keuangan | - Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Persentase Promperda yang menjadi Perda | | | | | 100% 57% | 673.653.000,00 | - - | 27.110.000,00 | 0% 0% | 4,02% | | | | | Set.DPRD | | | | | | | |
| | 4 | 3 | 16 | Program Fasilitas Penyelenggaraan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | | | | 81,40% | 12.162.676.229,00 | | | | | | | | | | | | Set.DPRD | | | | | | |
| | | | | Program Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | | | | 100,00% | 44.580.588.000,00 | 34 % | 7.248.212.988,00 | 34% | 16,26 % | | | | | | Set.DPRD | | | | | | |
| | 4 | 3 | 17 | Program Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | | | | 89,39% | 13.779.756.468,00 | | | | | | | | | | | | Set.DPRD | | | | | | |
| | | | | Program Penyelenggaraan Kehumasan | Persentase publikasi kegiatan DPRD | | | | | 75,00% | 1.461.444.000,00 | 0% | 33.000.000,00 | 0% | 2,26% | | | | | | Set.DPRD | | | | | | |
| | 4 | 6 | | Pemerintahan Administrasi Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 6 | 15 | Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum | | | | 96,42% | 45.182.971.797,00 | | | | | | | | | | | | Kec-Kel | | | | | | |
| | | | | Program Pemerintahan Umum | IKM Perangkat Daerah | | | | | 80,1 | 51.083.084.401,00 | | 7.900.630.613,00 | | 15,47 % | | | | | | Kec-Kel | | | | | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|---|------|----|----|--|---|---|----|--|-------------------|--|--------------------|--|----|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | 4 | 1 | 25 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan | | | 83,84% | 3.606.782.877,00 | | | | | | | | | | | | Setda-Bag.Keuangan dan Perlengkapan | | |
| | 5 | | | Urusan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 84,11% | 83.628.108.122,00 | | | | | | | | | | | | | Kesekretariatan | |
| | 5 | xx | 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | 80,73% | 64.660.025.820,67 | | | | | | | | | | | | | Kesekretariatan | |
| | 5 | xx | 5 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | 89,62% | 9.041.950.761,00 | | | | | | | | | | | | | Kesekretariatan | |
| | 5 | xx | 6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan | | | | 80,45% | 11.983.788.955,00 | | | | | | | | | | | | | Kesekretariatan | |
| | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | presentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | 100% | 163.021.866.692,90 | 17.347.191.774 | | 10,56% | | | | | | | | Kesekretariatan | |
| Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | Urusan Penunjang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | 15 | Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian | | | | 92,39% | 2.087.888.417,00 | | | | | | | | | | | | | BKD | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|---|----|---|--|---|---------|--|----|--|------------------|--|----------------|---|--------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian | - Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu - Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana | | | | | 83,70% 62% | 5.221.660.000,00 | 92% 91% | 557.418.986,00 | 109,84% 146,7% | 10,68% | | | | | BKPSDM | |
| | 3 | 3 | 17 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara | | | 96,57% | 7.683.588.505,00 | | | | | | | | | | | | BKD | |
| | | | | Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi | - Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal - Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | | | | | 63,44% 91% | 4.681.013.500,00 | 58,5% 84,1% | 134.612.276,00 | 92,2% 92,2% | 2,88% | | | | | BKPSDM | |
| | 3 | 3 | 16 | Program Fasilitasi Pemberhentian Pegawai | | | 100,00% | 162.759.557,00 | | | | | | | | | | | | BKD | |
| | 3 | 3 | 18 | Program Pembinaan Kepegawaian | | | 99,93% | 1.089.055.850,00 | | | | | | | | | | | | BKD | |
| | 3 | 3 | 19 | Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian | | | 100,00% | 406.417.750,00 | | | | | | | | | | | | BKD | |
| | | | | Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan | - Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar - Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti | | | | | 0 100% | 1.270.685.000,00 | 0 100% | 22.871.900,00 | 0 100% | 1,80% | | | | | BKPSDM | |
| | 4 | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | | Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|--|------|----|----|--|---|---|---|----|--|-------------------|--|-------------------|--|----------------|---|-------|--|----|---|----|-----------------------------------|----------------------|---|----|
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 24 | | Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti | | | 93,08% | 644.549.293,00 | | | | | | | | | | | | Setda-Bag.Organisasi | | |
| | | | | | Program Pengembangan Standar Kompetensi | Persentase standar kompetensi perangkat daerah yang ditetapkan | | | | | 70% | 234.283.000,00 | - | - | 0% | 0% | | | | | | Setda-Bag.Organisasi | | |
| Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 16 | | | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 16 | 15 | | Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik | Prosentase pengaduan yang di tidak lanjuti | | | 94,74% | 3.117.064.751,00 | | | | | | | | | | | | Diskominfo | | |
| | 1 | 16 | 17 | | Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik | Prosentase luas area blank spot | | | 96,46% | 1.358.689.598,00 | | | | | | | | | | | | Diskominfo | | |
| | | | | | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | - Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | | | | | 81% 55,65% | 3.756.435.500,00 | - - | 79.344.599,00 | 0% 0% | 2,11% | | | | | | Diskominfo | | |
| | 1 | 16 | 16 | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi | | | 94,53% | 13.527.340.892,00 | 12,24% | 11.124.386.500,00 | - | 345.114.414,00 | 0% | 3,10% | | | | | | Diskominfo | | |
| | 1 | 20 | | | Statistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | 15 | | Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik | Prosentase pengelolaan data Statistik sektoral yang dipublikasikan | | | 98,97% | 948.228.800,00 | | | | | | | | | | | | Diskominfo | | |
| | | | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase keterisian e-database SIPD | | | | | 82% | 1.504.800.000,00 | - | 123.304.444,00 | 0% | 8,19% | | | | | | Diskominfo | | |

| No | Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|--|---|---|----|--|----------------|--|----------------|--|----------------|---|---------|--|----|---|----|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x100% | | 10=6+8 | | 11 | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | 1 | 21 | | Persandian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 21 | 15 | Program Pengelolaan Persandian | Prosentase Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan | | | 100,00% | 232.113.500,00 | | | | | | | | | | | | Diskominfo |
| | | | | Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Persentase jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan | | | | | 74% | 492.336.500,00 | - | 45.138.447,00 | 0% | 9,17% | | | | | | Diskominfo |
| | 1 | 18 | | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 18 | 17 | Program Pengolahan Data dan Informasi | Nilai SKM Layanan Informasi | | | 96,81% | 400.308.750,00 | | | | | | | | | | | | DPMPPTSP |
| | | | | Program Pengendalian, Data dan Informasi | persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat | | | | | 15% | 424.380.000,00 | 0% | 140.870.000,00 | 0% | 33,19 % | | | | | | DPMPPTSP |
| | 1 | 12 | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 12 | 17 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | % penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan. | | | 99,16% | 830.711.800,00 | 90% | 377.883.000,00 | 22,75 % | 29.400.000 | 25% | 7,78% | | | | | | Dispendukcap ii |

2.2.2 Realisasi RPJMD

Misi 1 : Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga

Tujuan 1: Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Tabel 2.56
Perbandingan Capaian Misi 1 dengan Target RPJMD

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Realisasi Tahun 2019 | Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan |
|---|---|----------------------|--------------------------------|--|
| Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter | Indeks Pendidikan | 0,77 | 0,87 | 89% |
| Meningkatnya kualitas layanan kesehatan | Indeks Kesehatan | 0,81 | 0,825 | 98.18% |
| Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan | Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i> | 0,85 | 0,852 | 99.77% |

Misi 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Tujuan 1 : Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan

Tabel 2.57
Perbandingan Capaian Misi 2 dengan Target RPJMD

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Realisasi Tahun 2019 | Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan |
|---|---|----------------------|--------------------------------|--|
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif | Presentase pertumbuhan ekonomi kreatif | 8.10% | 6,45% | 126% |
| Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras Kota secara terpadu | IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur) | 4,06 | 4,50 | 90,22% |
| Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) | 65,27 | 86 | 75,90% |

Misi 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berdasarkan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kerukunan sosial

Tabel 2.58
Perbandingan Capaian Misi 3 dengan Target RPJMD

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Realisasi Tahun 2019 | Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan |
|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Meningkatnya kualitas perlindungan sosial | Persentase penurunan PMKS | 6,81% | 5% | 136,20% |
| Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | 84,63 | 90 | 94,03% |
| | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 94,71 | 97,20 | 97,43% |

Misi 4 : Pemerintahan yang Tertib Hukum, Profesional dan Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Akuntabel

Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel

Tabel 2.59
Perbandingan Capaian Misi 4 dengan Target RPJMD

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Realisasi Tahun 2019 | Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan |
|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum | Presentase perda yang ditegakkan | 26,37% | 100% | 26,37% |
| Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif | Nilai SAKIP | 75 | 84,9 | 88,34% |
| | Opini BPK | WTP | WTP | 100% |
| | Maturitas SPIP | 3,04 | 4,3 | 70,70% |
| | Rasio PAD | 0,3 | 0,33 | 90,01% |
| Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN | Indeks Profesionalitas ASN | 66,61 | 77,10 | 86,47% |
| Meningkatnya integrasi teknologi informasi | Indeks Kematangan SPBE | 2,85 | 4,54 | 62,78% |

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah maupun capaian sasaran/kinerja pembangunan daerah. Beberapa permasalahan dalam pembangunan daerah, meliputi :

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

1. Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif perlu ditingkatkan;
2. Perlu upaya peningkatan SDM terdidik dan berkarakter;
3. Pemerataan kualitas pelayanan pendidikan di seluruh wilayah perlu ditingkatkan;
4. Aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama jaminan pelayanan kesehatan, perlu ditingkatkan;
5. Aksesibilitas dan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan perlu ditingkatkan;
6. Perlindungan social dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk peningkatan kesejahteraan;
7. Implementasi nilai-nilai agama dan ideologi pancasila dalam kehidupan sehari-hari perlu dilakukan pembinaan;
8. Pembangunan masyarakat berbudaya perlu ditingkatkan;
9. Kualitas infrastruktur pelayanan dasar perlu ditingkatkan;
10. Keselarasan antara penyelenggaraan pembangunan dengan kualitas lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
11. Adaptasi dan Mitigasi perubahan Iklim yang perlu pengawasan dan rencana aksi;
12. Profesionalisme aparatur pemerintahan dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang semakin bersih, profesional dan inovatif;
13. Penyederhanaan birokrasi dalam pelayanan perlu dilaksanakan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - 1.1 Pendidikan
 - a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Belum Merata Akses Pendidikan.
 - 1.2 Kesehatan
 - a. Belum optimalnya pemberian layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat;
 - b. Belum optimalnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat dan menjaga kesehatan lingkungan;
 - c. Manajemen pelayanan fasilitas kesehatan dasar (puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (RSUD) perlu ditingkatkan;
 - d. Belum Maksimalnya Penanganan Kualitas Hidup Pasien Terminal Melalui Peran Aktif Dokter Keluarga.
 - 1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan sehingga perlu perbaikan dan pemeliharaan;
 - b. Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. Belum maksimalnya pengelolaan IPAL berbasis komunal;
 - d. Belum Optimalnya Kerjasama Malang Raya Pengelolaan Sungai, Dan Air Minum;
 - e. Belum Optimalnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Kota Dalam Kondisi Baik (Ramah Dan Nyaman);
 - f. Pengawasan kesesuaian Tata Ruang yang perlu ditingkatkan.
 - 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Luasan kawasan/permukiman kumuh yang perlu segera mendapatkan penanganan;
 - b. Penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pengembang kawasan permukiman yang masih belum optimal.

- c. Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Pemukiman Daerah Aliran Sungai;
- 1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Belum adanya pengembangan sistem pengamanan lingkungan *online*;
 - b. Koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana alam dan non bencana alam perlu ditingkatkan khususnya akibat curah hujan yang tinggi maupun penyebaran virus COVID-19
- 1.6 Sosial
 - a. Belum maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan PMKS;
 - b. Masih Terbatasnya Tempat Penampungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Khususnya Rumah Lansia);
 - c. Masih Minimnya Penanganan Dan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas.
- 2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - 2.1 Tenaga Kerja
 - a. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang yang masih lebih tinggi dari angka TPT Propinsi Jawa Timur;
 - 2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Perlunya mendorong Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan;
 - b. Perlunya meningkatkan upaya perlindungan anak dari kejadian kekerasan, termasuk terhadap anak jalanan;
 - C. Kurang Optimalnya Penguatan Karakter Berbasis Keluarga.
 - 2.3 Pangan
 - a. Perlu memastikan kecukupan ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi pangan;
 - b. Perlu terus menjaga stabilitas harga bahan pokok.
 - 2.4 Pertanahan

- a. Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Malang belum dilaksanakan secara optimal.
- 2.5 Lingkungan Hidup
- a. Produksi/timbulan sampah yang semakin meningkat, sementara kapasitas instalasi pengolahan sampah atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) semakin terbatas;
 - b. Penanganan limbah B3 yang belum optimal;
 - c. Ruang Terbuka Hijau Publik yang perlu mendapatkan penanganan.
- 2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Jumlah penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih cukup signifikan;
 - b. Kurang Maksimalnya Sistem Layanan Publik Yang Cepat, Mudah Dan Terintegrasi**
- 2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi yang berkorelasi dengan tingkat partisipasi KB yang masih rendah.
- 2.8 Perhubungan
- a. Kemacetan di berbagai ruas jalan dan wilayah Kota Malang, baik di pusat kota maupun di wilayah pinggiran, yang cenderung semakin meningkat;
 - b. Belum optimalnya rekayasa lalu lintas penanggulangan kemacetan;
 - c. Konektivitas antar wilayah Kota Malang yang perlu ditingkatkan, termasuk kualitas penyelenggaraan transportasi umum.
- 2.9 Komunikasi dan Informatika
- a. Cakupan wilayah/ruang publik terkoneksi internet di Kota Malang masih perlu diperluas.
 - b. Sistem informasi manajemen pemerintahan belum terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan;
 - c. Belum tersedianya *Big Data* dan pola pemanfaatan secara *geo spasial*;

- d. Masih belum optimalnya Ngalam Command Center (NCC) sebagai Sistem Respon Cepat Dan Monitoring Pembangunan.
- 2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Masih belum optimalnya pembinaan kelembagaan dan manajemen koperasi;
 - b. Produktivitas, daya saing dan kemandirian Usaha Mikro perlu ditingkatkan, termasuk melalui penyediaan *co-working space* dan bantuan pemasaran produk;
 - c. Perlu membangun ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru di sektor usaha mikro.
 - 2.11 Penanaman Modal
 - a. Perlu meningkatkan kemudahan mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
 - 2.12 Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Perlunya peningkatan partisipasi dan peranserta pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - b. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
 - 2.13 Statistik
 - a. Ketersediaan data statistik yang relatif belum memadai dan valid.
 - 2.14 Persandian
 - a. Sistem pengamanan persandian yang belum optimal.
 - 2.15 Kebudayaan
 - a. Belum maksimalnya pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya, termasuk seni tradisional.
 - 2.16 Perpustakaan
 - a. Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan
 - 2.17 Kearsipan
 - a. Sarana, prasarana, sumberdaya manusia dan manajemen pengelolaan arsip daerah yang kurang optimal.
- 3. Urusan Pilihan
 - 3.1 Pariwisata

- a. Potensi sektor pariwisata berbasis ekonomi kreatif perlu dikembangkan;
- b. Pengembangan kawasan pariwisata tematik berbasis pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan;
- c. Even-even pariwisata perlu diperbanyak, khususnya even pariwisata berskala nasional dan internasional;
- d. Potensi jasa akomodasi wisata perlu dikembangkan;

3.2 Pertanian

- a. Penanganan hasil produksi pertanian pasca panen perlu ditingkatkan dalam rangka menambah nilai produksi petani.

3.3 Perdagangan

- a. Sejumlah pasar tradisional di Kota Malang perlu direvitalisasi dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional;
- b. Belum optimalnya distribusi dan pemasaran produk lokal;
- c. Upaya perlindungan konsumen perlu ditingkatkan.

3.4 Perindustrian

- a. Produktivitas, daya saing dan kemandirian Industri Kecil dan Menengah perlu ditingkatkan;
- b. Perlu optimalisasi pembinaan dan pengembangan potensi industri kreatif, termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan ekosistem industri kreatif.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Bab ini menyajikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2021.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Malang disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Malang, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan untuk 2019 mengalami kenaikan proyeksinya 0,2 poin menjadi 3,9%. Pertumbuhan ekonomi global telah naik sejak 2016. Ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan terus menguat, namun jika melihat adanya jumlah kasus dan kematian akibat virus korona (Covid-19) yang bermula dari Tiongkok kemudian menyebar di Eropa dan Amerika Serikat (AS) serta menyebar ke

penjuru dunia lainnya, lembaga keuangan dunia (World Bank) memperingatkan dampak ekonomi yang luar biasa akan melanda.

Krisis ekonomi yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 tidak akan seperti 'krisis seperti pada umumnya'. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban jiwa akibat infeksi Covid-19 di Eropa dan AS terus meningkat. Hingga kini, secara global belum ada penyebaran pandemi Covid-19 menurun. Kendati kasus Covid-19 berkurang drastis di Tiongkok, namun kasus baru tetap masih ada. Kondisi darurat kesehatan dunia akan menyebabkan 'resesi global yang besar'. Resesi ekonomi terutama akan menghantam negara-negara miskin dan negara yang ekonominya rentan. Arah Kebijakan Ekonomi perlu menyesuaikan di tengah resesi ekonomi seiring dengan penyebaran pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan mulai menurun.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri dalam 5 tahun terakhir (2013-2017), stabil dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,1%. Tingkat pertumbuhan sejak tahun 2013 hingga 2017 hampir selalu di atas 5% dengan pengecualian pada tahun 2015 (4,88%), dan mulai naik di tahun 2016 5,02% dan tahun 2017 sebesar 5,06%. Perekonomian Indonesia tumbuh 5,06% yoy, stabil dan masih berada di atas tren global. Perekonomian domestik juga didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan terjaga di kisaran target pemerintah dan Bank Indonesia $4\pm 1\%$. Transaksi berjalan mencatatkan penurunan defisit menjadi (negatif) US\$4,3miliar (Q3-17) dari sebelumnya (negatif) US\$5,0 miliar (Q2-17). Rupiah mengalami apresiasi pada awal 2018 meski sempat mengalami tekanan yang bersumber dari eksternal pada triwulan IV 2017. Rasio utang terhadap GDP meningkat disebabkan pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.



Gambar 3.3 Neraca Perdagangan Tahun 2013-2017

Sumber : BPS Indonesia 2018

Akhir 2016, ekspor Impor Indonesia mulai mengalami perbaikan. Neraca perdagangan tahun 2017 (Jan-Des) surplus 11,8 miliar USD (tertinggi dalam 6 tahun terakhir). Hingga Desember 2017, aliran dana asing saham mencapai -2,96 miliar USD sedangkan aliran dana asing obligasi mencapai 12,06 miliar USD. Namun total aliran dana asing yang masuk (*capital inflow* ke Indonesia) dari Januari hingga Desember 2017 mencapai 9,1 miliar USD atau setara dengan Rp123,5 triliun.



Gambar 3.4 Global Competitiveness Index Tahun 2009-2017

Sumber : Bloomberg

Peringkat GCI Indonesia naik dari 41 di 2016/2017 menjadi 36 di 2017/2018. Perbaikan tersebut dapat dilihat di semua pilar daya saing, meskipun kesiapan teknologi, individu, dan perusahaan masih rendah dimana mencerminkan penyebaran inovasi yang belum merata. Ranking Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia meningkat secara signifikan dalam kurun 2 tahun terakhir, naik dari 106 di 2016 ke 72 di 2018 (meningkat 34 peringkat).

Akibat adanya pandemi Covid-19, Pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, menyebutkan bahwa sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4- 7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Kondisi perekonomian Nasional tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Secara nasional Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mempunyai berkontribusi 14,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku nasional 2017 sebesar Rp 13.064,5 triliun. Sementara jumlah atas dasar harga berlaku sebesar Rp 2.019,2 triliun mengalami kenaikan Rp 164,16 triliun dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 1,855,04 triliun dan atas harga konstan sebesar Rp 1.482, 1 triliun mengalami kenaikan Rp 76,91 triliun dibandingkan PDRB atas dasar harga konstan pada 2016 sebesar Rp 1.405,24 triliun. PDRB Jawa Timur atas dasar harga konstan juga mempunyai kontribusi 17,43 persen terhadap PDB harga konstan nasional 2017 sebesar Rp 9.530,30 triliun. Dari data tersebut Jatim berada di urutan kedua, setelah DKI sebesar 17%. Sementara angka perkapita mencapai Jawa Timur dari 39 juta jiwa penduduk Jawa Timur Pendapatan Domestik Perkapita (PDP) Jawa Timur mencapai Rp 51,39 juta perkapita. Sedangkan PDP secara nasional sebesar Rp 51,89 juta.

Sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2017 sebesar 5,45 persen dilihat sisi produksi, pertumbuhan PDRB didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,91 persen, diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 7,47 persen, dan informasi komunikasi sebesar 6,92 persen. Berdasarkan pertumbuhan perekonomian Jawa Timur yang

mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional, menunjukkan kegiatan ekonominya merupakan penyangga perekonomian nasional. Sektor industri dan perdagangan mempunyai peran cukup besar, sehingga memberikan sumbangan pertumbuhan nasional. Diharapkan, pada 2018 dan 2019 yang merupakan tahun politik pertumbuhan perekonomian Jawa Timur akan terus meningkat lagi.

Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2018 yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,73 persen. Diikuti perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 18,19 persen dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,90 persen, Konstruksi sebesar 9,71%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,79%, Informasi dan Komunikasi sebesar 4,53%, Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,28%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,43%, Jasa Keuangan sebesar 2,71%, Jasa Pendidikan sebesar 2,59%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,31%, Real Estate sebesar 1,62%, Jasa Perusahaan sebesar 0,83%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,62%, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,31%, Pengadaan Air sebesar 0,09%, Jasa Lainnya sebesar 1,36%.



Gambar 3.5. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Propinsi Jawa Timur (Persen), 2014-2018

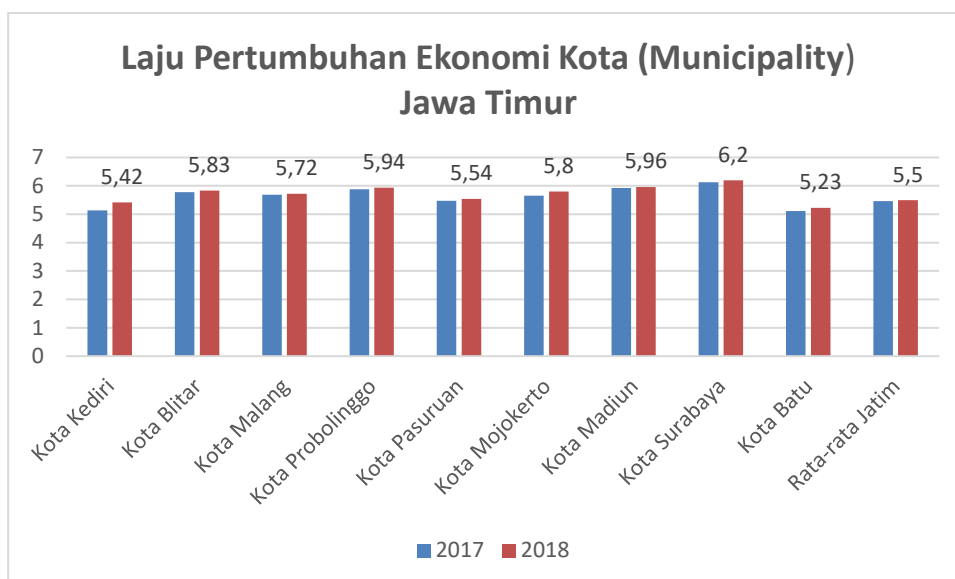
Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019

Angka PDRB Jawa Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah masing-masing 1.537.947,63

Miliar rupiah (2014), 1.691.477,06 miliar rupiah (2015), 1.855.738,43 miliar rupiah (2016), 2.012.917,99 miliar rupiah (2017), dan 2.189.783,70 miliar rupiah (2018). Sementara angka PDRB Jawa Timur atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun lima tahun terakhir adalah masing-masing 1.262.684,50 miliar rupiah (2014), 1.331.376,10 miliar rupiah (2015), 1.405.563,51 miliar rupiah (2016), 1.482.299,58 miliar rupiah (2017), dan 1.563.756,37 miliar rupiah (2018).

Distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2018, terbesar pada kategori industri pengolahan 29,73 persen, perdagangan besar dan eceran 18,19 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan 11,90 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2018 terutama didukung oleh pertumbuhan pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,63 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,61 persen, serta jasa perusahaan 7,15 persen.

Berdasarkan hasil pemantauan selama bulan Januari-Desember 2018, Jawa Timur tercatat mengalami inflasi sebesar 2,86 persen (IHK 133,81; 2012=100). Untuk Inflasi bulanan di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2018 terjadi inflasi terus menerus. Inflasi tertinggi tercatat pada bulan Desember sebesar 2,86 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 0,46 persen. Selama tahun 2018, seluruh kelompok komoditas tercatat mengalami inflasi, masing-masing: kelompok bahan makanan 2,6 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 2,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 2,49 persen; kelompok sandang 2,50 persen; kelompok kesehatan 2,91 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 3,52 persen; serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 2,86 persen (Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019).



Gambar 3.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang

Sumber : BPS Provinsi Jatim, 2019 (diolah)

Dari gambar 3.5. tersebut terlihat bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kota Malang menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,72% atau diatas dari rata-rata provinsi Jatim yang sebesar 5,5% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5,69% (diatas rata-rata provinsi Jawa Timur 5,46%). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah, ada 3 komponen yang harus diperhatikan diantaranya adalah adanya masyarakat, pemerintah dan swasta, dari masing-masing ini memegang peranan penting, untuk itu kedepannya pemerintah daerah Kota Malang akan terus mengintegrasikan setiap faktor tersebut untuk terus berusaha meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui program-program pemberdayaan yang terkonsep dan saling terintegrasi.

Arah kebijakan ekonomi daerah juga harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, perlu dipahami prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, diantaranya:

1. Pembangunan Manusia melalui peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan;
2. Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan;

3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.

Kelima Prioritas tersebut merupakan landasan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Lima Prioritas Nasional. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menjadi arah bagi kebijakan ekonomi terdapat pada Prioritas Jawa Timur ketiga, yaitu “Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja”.

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus dalam meningkatkan pemulihan ekonomi. Penyebaran pandemi virus COVID-19 di Jawa Timur memerlukan perhatian yang cukup serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jawa Timur.

Sektor yang paling terkena imbas adalah sektor jasa seperti pariwisata. Imbas lain COVID-19 terhadap perekonomian antara lain adalah penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi (terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur), serta penurunan aliran modal. Melihat dampak-dampak tersebut, Pemprov Jawa Timur berupaya untuk mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi. Di antaranya adalah mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai (cash for work) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak, dan jaring pengaman sosial (social safety net).

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Malang

Dalam rangka meningkatkan pemulihan ekonomi akibat pandemi virus COVID-19 di Kota Malang, arah kebijakan ekonomi makro daerah Kota Malang pada tahun 2021 diantaranya:

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi;
2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing;
3. Modernisasi infrastruktur dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
4. Mendorong investasi.

Keempat arah kebijakan ekonomi Kota Malang tersebut dilakukan melalui strategi umum sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Strategi umum tersebut yang kemudian menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Kota Malang pada tahun 2021 pula. Adapun strategi umum pada arah kebijakan ekonomi Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023, diantaranya:

- a) Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UM
- b) Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas transportasi, perumahan dan pemukiman serta ruang terbuka.
- c) Penerapan konservasi energi, pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kebijakan sektor pertanian dalam merespon COVID-19 dalam menjaga ketersediaan pangan dan harga pangan yang terjangkau di Kota Malang dengan memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki logistic pangan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, mengurangi kelangkaan stock pangan dan disparitas bahan pokok pangan.

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2021 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021 untuk sektor pertanian dan pangan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemic COVID-19

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari *public private partnership* (PPP). Bentuk PPP antara lain : Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak *Build-Operate-Transfer*/BOT, dan Kontrak Konsesi.

Kebijakan keuangan Kota Malang Tahun 2021 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun kedua, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ pada tanggal 27 Januari 2020, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Arah kebijakan belanja daerah untuk mendukung tujuan pembangunan daerah dan penanganan dan recovery atas pandemic COVID-19 dengan memperhatikan:

- 1) Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
- 2) Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2021;
- 3) Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
- 4) Belanja daerah dalam rangka recovery dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang, dengan prediksi pandemi COVID-19 belum berakhir sampai akhir tahun 2020, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas maupun non prioritas yang telah direncanakan, dapat difocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID-19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

khususnya dalam bidang keuangan daerah. Untuk itu, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Sebab kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2018-2019 dan target pendapatan daerah Kota Malang pada kurun waktu Tahun 2020-2022, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Malang Tahun 2018 s.d Tahun 2022

| No. | Uraian | Jumlah (Rp.) | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| | | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | Tahun Berjalan 2020 | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2021 | Proyeksi/Target pada Tahun 2022 |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | | | | | |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 556.888.383.143,67 | 581.304.874.551,94 | 731.100.229.507,00 | 641.411.037.175,21 | 989.295.561.013,25 |
| 1.1.1. | Pajak daerah | 434.678.309.679,54 | 460.047.450.664,60 | 621.053.137.049,00 | 511.310.472.903,11 | 849.802.246.876,75 |
| 1.1.2. | Retribusi daerah | 50.505.712.055,51 | 46.152.286.763,00 | 45.724.817.200,00 | 45.566.084.400,00 | 53.009.261.960,00 |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 24.792.410.715,90 | 28.559.431.165,39 | 30.130.277.258,00 | 36.611.744.952,10 | 36.959.535.256,50 |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah | 46.911.950.692,72 | 46.545.705.958,95 | 34.191.998.000,00 | 47.922.734.920,00 | 49.524.516.920,00 |
| 1.2. | Pendapatan Transfer | 1.414.488.577.763,00 | 1.532.844.037.635,00 | 1.461.475.262.510,09 | 1.139.472.609.510,09 | 1.058.105.299.710,09 |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 1.206.789.819.588,00 | 1.277.116.974.321,00 | 1.275.092.137.000,00 | 956.547.843.000,00 | 875.180.533.200,00 |
| 1.2.1.1 | Dana Perimbangan | 1.181.289.819.588,00 | 1.203.245.896.321,00 | 1.224.050.117.000,00 | 956.547.843.000,00 | 875.180.533.200,00 |
| 1.2.1.2 | Dana Insentif Daerah | 25.500.000.000,00 | 73.871.078.000,00 | 51.042.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Transfer Antar Daerah | 207.698.758.175,00 | 255.727.063.314,00 | 186.383.125.510,09 | 182.924.766.510,09 | 182.924.766.510,09 |
| 1.2.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil | 204.361.428.175,00 | 252.268.704.314,00 | 182.924.766.510,09 | 182.924.766.510,09 | 182.924.766.510,09 |
| 1.2.2.2 | Bantuan Keuangan | 3.337.330.000,00 | 3.458.359.000,00 | 3.458.359.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 68.817.280.000,00 | 38.993.720.000,00 | 96.746.600.000,00 | 93.168.760.000,00 | 93.168.760.000,00 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | 68.817.280.000,00 | 38.993.720.000,00 | 96.746.600.000,00 | 93.168.760.000,00 | 93.168.760.000,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | | 2.040.194.240.906,67 | 2.153.142.632.186,94 | 2.289.322.092.017,09 | 1.874.052.406.685,30 | 2.047.400.860.723,34 |

Mengacu pada tabel diatas, maka kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah, baik pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, dengan cara:
 - a. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
 - b. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - c. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Mengembangkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
 - e. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
 - f. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan memperhatikan:
 - a. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
 - b. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau

perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;

- c. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- d. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021;
- e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Belanja Operasi meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Untuk belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi biaya daerah Tahun 2018-2019 dan target pendapatan daerah Kota Malang pada kurun waktu Tahun 2020-2022, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2018 s.d Tahun 2022

| No | Uraian | Jumlah (Rp.) | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| | | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | Tahun Berjalan 2020 | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2021 | Proyeksi/Target pada Tahun 2022 |
| 2. | BELANJA DAERAH | | | | | |
| 2.1 | Belanja Operasi | 1.255.648.752.536,37 | 1.247.652.372.398,39 | 2.102.126.259.134,44 | 944.879.175.883,66 | 1.658.550.372.201,90 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 593.344.761.790,26 | 598.662.070.136,38 | 947.081.464.452,54 | 826.899.525.883,66 | 838.392.372.315,75 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 589.365.005.412,84 | 575.279.922.662,01 | 1.027.082.568.681,90 | 389.539.056.000,00 | 701.128.349.886,15 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 72.938.985.333,27 | 73.710.379.600,00 | 115.142.466.000,00 | 104.522.290.000,00 | 105.572.290.000,00 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 12.819.760.000,00 | 13.457.360.000,00 | 13.457.360.000,00 |
| 2.2 | Belanja Modal | 351.203.268.896,86 | 231.021.051.941,66 | 628.037.295.081,50 | 580.053.561.000,00 | 628.037.295.081,50 |
| 2.3 | Belanja Tidak Terduga | 34.080.542,00 | 1.357.371.065,00 | 2.639.022.846,15 | 37.580.664.282,44 | 6.777.284.147,75 |
| 2.4 | Belanja Transfer | 635.263.795,00 | 662.694.733,00 | 1.307.146.951,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 635.263.795,00 | 662.694.733,00 | 1.307.146.951,60 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | | 1.607.521.365.770,23 | 1.480.693.490.138,05 | 2.734.109.724.013,69 | 1.952.052.457.166,10 | 2.327.005.013.565,84 |

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2021 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2021, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Kondisi Pembiayaan daerah di Kota Malang dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, dan besarnya SiLPA hingga tahun 2018 yakni sebesar Rp 400.598.440.985,66, dimana pada lima tahun sebelumnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Malang belum cukup baik. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal, hal ini untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam dua (2) tahun, proyeksi/target tahun rencana serta satu (1) tahun rencana dalam rangka perumusan

arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Malang Tahun 2018 s.d Tahun 2022

| No | Uraian | Jumlah (Rp.) | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| | | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | Tahun Berjalan 2020 | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2021 | Proyeksi/Target pada Tahun 2022 |
| | PEMBIAYAAN | | | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 400.598.440.985,66 | 489.523.033.616,78 | 484.625.295.873,60 | 103.000.050.480,80 | 100.000.000.000,00 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 400.598.440.985,66 | 489.523.033.616,78 | 484.625.295.873,60 | 103.000.050.480,80 | 100.000.000.000,00 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 26.198.996.407,00 | 24.805.327.859,00 | 39.837.663.877,00 | 25.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 |
| 3.2.1 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 26.198.996.407,00 | 24.475.000.000,00 | 39.837.663.877,00 | 25.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 |
| 3.2.3 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 330.327.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH | 374.399.444.578,66 | 464.717.705.757,78 | 444.787.631.996,60 | 78.000.050.480,80 | 160.000.000.000,00 |

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kota Malang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
2. SiLPA tahun 2018-2023 diproyeksikan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 8,56% dengan tahun dasar 2017, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 7% - 8% dari total APBD.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber

pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Malang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah, maka berikut ini disajikan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2021 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-tiga RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya Visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2021 berpedoman pada Misi pembangunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 pada tahun ketiga.

Tema RKPD Kota Malang Tahun 2021 harus selaras dengan tema rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi di tahun berkenaan. Tema RKPD Kota Malang Tahun 2021 yang merupakan landasan kebijakan pembangunan Kota Malang adalah “**Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat**”, dengan fokus pada Industri Kreatif, Pariwisata, kemudahan Investasi melalui penguatan SDM, penyederhanaan birokrasi dan pemerataan infrastruktur.

TEMA NASIONAL:

“Mempercepat pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan fokus pembangunan **pemulihan industri, pariwisata dan investasi**, reformasi sistem **kesehatan** nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

TEMA PROV JAWA TIMUR:

“Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat”, dengan fokus pada **Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan** dan **Infrastruktur** di Jawa Timur.

TEMA KOTA MALANG:

“Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat”, dengan fokus pada **Industri Kreatif, Pariwisata, kemudahan Investasi**, melalui penguatan **SDM**, penyederhanaan birokrasi dan pemerataan **infrastruktur**.

Visi pembangunan Pemerintah Kota Malang sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah “**Kota Malang Bermartabat**”. Istilah “martabat” menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantangan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT). Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah “kota bermartabat”, adalah sebuah profil Kota Malang yang memiliki masyarakat yang paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh kesadaran positif. Dalam arti yang lebih luas adalah Kota yang aman dari segala bentuk ancaman, senantiasa tertib, terlihat bersih dan asri. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kota Malang yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Guna mewujudkan visi pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kota Malang yang terdiri dari :

Misi 1. Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan

dasar lainnya bagi semua warga

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

Misi 2. Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi 3. Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4. Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Adapun uraian misi berikut strategi dan arah kebijakan pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan sesuai dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Misi 1

| Misi 1: Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya bagi Semua Warga | | | |
|---|---|--|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya | Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter | Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar | Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Dasar Lainnya |
| | Meningkatnya kualitas layanan kesehatan | Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan | Akses dan Kualitas Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya |
| | Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan | Optimalisasi daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan | Menjaga daya beli dan perlindungan sosial |

Tabel 4.2

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Misi 2

| Misi 2: Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan | | | |
|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif | Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UM. Yang diantaranya membentuk BUMD Kota Malang. | Pemantapan industri kreatif masyarakat |

| Misi 2: Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan | | | |
|--|---|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| | Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu | Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas transportasi, perumahan dan pemukiman serta ruang terbuka. | Infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial |
| | Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup | Penerapan konservasi energi, pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup | |

Tabel 4.3

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Misi 3

| Misi 3 Mewujudkan Kota Yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan Terhadap Masyarakat Rentan dan Gender | | | |
|--|--|---|----------------------------|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender | Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial | Optimalisasi pendampingan pembinaan serta pemberdayaan PMKS secara berkelanjutan | Kemandirian Sosial Ekonomi |
| | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan | Menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan. | |

Tabel 4.4

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Misi 4

| Misi 4: Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel | Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum | Meningkatkan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | Suprastruktur Kelembagaan |
| | Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif | Peningkatan layanan publik melalui penataan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan publik efektif, efisien dan proporsional | |
| | Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN | Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya | |
| | Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi | Pengembangan Big Data Informasi yang terintegrasi | |

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Kota Malang Tahun 2021 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Malang (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi), serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kota Malang Tahun 2021 meliputi :

Tabel 4.5

Permasalahan, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

| Permasalahan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan Daerah | Program Prioritas Pembangunan Daerah |
|--|--|--|---|
| a. Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif perlu ditingkatkan | <p>a. Pengembangan industri kreatif potensial Kota Malang</p> <p>b. Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas Kota Malang sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan</p> | Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Program Pengembangan Usaha Mikro 4. Program Pengembangan Industri 5. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar 6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja |
| <p>a. SDM terdidik dan berkarakter</p> <p>b. Pemerataan kualitas pendidikan di wilayah Kota Malang</p> <p>c. Aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama jaminan pelayanan kesehatan</p> <p>d. Aksesibilitas dan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan perlu ditingkatkan</p> <p>e. Perlindungan sosial dan pemberdayaan</p> | <p>a. Peningkatan pendidikan karakter sejak dini</p> <p>b. Pemerataan pelayanan pendidikan formal</p> <p>c. Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu</p> | Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal 2. Program Pembinaan Pendidikan Dasar 3. Program Pendidikan Ketenagaan 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5. Program BLUD Puskesmas 6. Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 7. Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah 8. Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 9. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 10. Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan 11. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12. Program Bina Perdagangan 13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan |

| Permasalahan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan Daerah | Program Prioritas Pembangunan Daerah |
|--|--|--|--|
| masyarakat perlu ditingkatkan untuk peningkatan kesejahteraan | d. Stabilitas harga bahan pokok e. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan Masyarakat | | 14. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial 15. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 16. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial 17. Program Pemberdayaan Perempuan 18. Program Perlindungan Perempuan dan Anak 19. Program Pemberdayaan Masyarakat |
| a. Implementasi nilai-nilai agama dan ideologi pancasila dalam kehidupan sehari-hari perlu dilakukan pembinaan b. Pembangunan masyarakat berbudaya perlu ditingkatkan | a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan | Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat | 1. Program penguatan ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama 2. Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 3. Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya |
| a. Kualitas infrastruktur pelayanan dasar perlu ditingkatkan | a. Pemeliharaan infrastruktur jalan terutama di sekitar pusat perekonomian b. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing c. Transformasi digital | Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota; | 1. Program Bina Marga 2. Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Program Cipta Karya 4. Program Pengendalian Lalu Lintas 5. Program Pelayanan Angkutan Darat 6. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 7. Program Penataan Ruang dan Pertanahan 8. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 9. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| a. Keselarasan antara penyelenggaraan pembangunan dengan | a. Pembangunan berkelanjutan b. Peran serta | Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana | 1. Program Penataan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 |

| Permasalahan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan Daerah | Program Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|--|---|
| <p>kualitas lingkungan hidup</p> <p>b. Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim</p> <p>c. Pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam</p> | <p>masyarakat dalam mitigasi Perubahan Iklim</p> <p>c. Peran serta masyarakat dalam menghadapi bencana non-alam</p> | | <p>3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</p> <p>4. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</p> <p>5. Program Perlindungan Masyarakat</p> |
| <p>a. Profesionalisme aparatur pemerintahan dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang semakin bersih, profesional dan inovatif</p> <p>b. Penyederhanaan birokrasi dalam pelayanan</p> | <p>a. Pembaharuan manajemen sistem kepegawaian secara profesional guna mendukung gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima</p> <p>b. Penyederhanaan birokrasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat</p> | <p>Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;</p> | <p>1. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah</p> <p>2. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya</p> <p>3. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum</p> <p>4. Program Pengelolaan perparkiran</p> <p>5. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>6. Program Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>7. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi</p> <p>8. Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam</p> <p>9. Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>10. Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>11. Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah</p> <p>12. Program Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p>13. Program Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>14. Program Pelayanan Pajak Daerah</p> <p>15. Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>16. Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja</p> |

| Permasalahan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan Daerah | Program Prioritas Pembangunan Daerah |
|--------------|---------------|------------------------------|--|
| | | | 17. Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan 18. Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian 19. Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi 20. Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja 21. Program Pengembangan Standar Kompetensi |

Tabel 4.6

Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Malang

| Prioritas Pembangunan | | Prioritas Pembangunan Daerah | ISU STRATEGIS |
|--|---|--|---|
| Nasional | Jawa Timur | | |
| Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata | Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif | a. Pengembangan industri kreatif potensial Kota Malang b. Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas Kota Malang sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan |
| SDM berkualitas dan berdaya saing | Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi | Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera | a. Peningkatan pendidikan karakter sejak dini b. Pemerataan pelayanan pendidikan formal c. Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan |

| Prioritas Pembangunan | | Prioritas Pembangunan Daerah | ISU STRATEGIS |
|--|--|--|---|
| Nasional | Jawa Timur | | |
| | Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) | | <p>rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu</p> <p>d. Stabilitas harga bahan pokok</p> <p>e. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan Masyarakat</p> |
| Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal | Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat | <p>a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi</p> <p>b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan</p> |
| Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar | Peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan energi baru terbarukan | Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota; | <p>a. Pemeliharaan infrastruktur jalan terutama di sekitar pusat perekonomian</p> <p>b. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing</p> <p>c. Transformasi digital</p> |
| Lingkungan Hidup. Ketahanan bencana dan perubahan iklim | Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana | <p>a. Pembangunan berkelanjutan</p> <p>b. Peran serta masyarakat dalam mitigasi Perubahan Iklim</p> <p>c. Peran serta masyarakat dalam menghadapi bencana non-alam</p> |
| Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas | Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli | <p>a. Pembaharuan manajemen sistem kepegawaian secara profesional guna</p> |

| Prioritas Pembangunan | | Prioritas Pembangunan Daerah | ISU STRATEGIS |
|-----------------------|---|------------------------------|---|
| Nasional | Jawa Timur | | |
| | <p>pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur</p> | <p>daerah;</p> | <p>mendukung gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima</p> <p>b. Penyederhanaan birokrasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat</p> |

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, dirumuskan program daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai berikut :

5.1.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal
2. Program Pembinaan Pendidikan
3. Program Pendidikan Ketenagaan

b. Kesehatan

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan
3. Program BLUD Puskesmas
4. Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
5. Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
6. Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
8. Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan
9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Bina Marga
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Infrastruktur Jalan
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah
4. Program Cipta Karya
5. Program Penataan Ruang dan pertanahan

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

- 3. Program Perlindungan Masyarakat
 - f. Sosial
 - 1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - 2. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
- 5.1.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- a. Tenaga Kerja
 - 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - 2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas
 - 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial
 - 4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1. Program Pemberdayaan Perempuan
 - 2. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
 - c. Pangan
 - 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - d. Lingkungan Hidup
 - 1. Program Penataan Lingkungan Hidup
 - 2. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
 - 3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan
 - 4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 5. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - g. Perhubungan
 - 1. Program Pengendalian Lalu Lintas
 - 2. Program Pengelolaan Perpustakaan
 - 3. Program Pelayanan Angkutan Darat
 - h. Komunikasi dan Informatika
 - 1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - i. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1. Program Pembinaan Koperasi
 - 2. Program Pengembangan Usaha Mikro
 - 3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro
 - j. Penanaman Modal
 - 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2. Program Pengendalian, Data dan Informasi
 - 3. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
 - 4. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum
 - k. Kepemudaan dan Olahraga
 - 1. Program Pembinaan Kepemudaan
 - 2. Program Pembinaan Keolahragaan
 - l. Statistik
 - 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
 - m. Persandian
 - 1. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
 - n. Kebudayaan
 - 1. Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya
 - o. Perpustakaan
 - 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - 2. Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
 - p. Kearsipan
 - 1. Program Pengelolaan Arsip Daerah
- 5.1.3 Urusan Pilihan
- a. Kelautan dan Perikanan
 - 1. Program Peningkatan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - 1. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
 - 2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - c. Pertanian
 - 1. Program Peningkatan Pertanian
 - 2. Program Peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan

- d. Perdagangan
 - 1. Program Bina Perdagangan
 - 2. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
 - 3. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar
- e. Perindustrian
 - 1. Program pengembangan industri
 - 2. Program Pembinaan Industri

5.1.4 Urusan Penunjang Pemerintah

- a. Perencanaan Pembangunan
 - 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
 - 2. Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - 3. Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 4. Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- b. Keuangan
 - 1. Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah
 - 2. Program Pelaporan Keuangan Daerah
 - 3. Program Pemanfaatan Aset Daerah
 - 4. Program Perencanaan dan pengembangan PAD
 - 5. Program Pelayanan Pajak Daerah
 - 6. Program Pengendalian Pajak Daerah
- c. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
 - 1. Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian
 - 2. Program Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi
 - 3. Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan
- d. Penelitian dan Pengembangan
 - 1. Program Penelitian dan Pengembangan

5.1.5 Urusan Pemerintahan Umum Lainnya

- a. Pengawasan
 - 1. Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 2. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang ekonomi dan sumber daya alam
 - 3. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 4. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

- b. Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
 - 2. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
 - 3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
- c. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - 1. Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - 2. Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
 - 3. Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Pendukung DPRD
 - 1. Program Pelayanan Kesekretariatan DPRD
 - 2. Program Perencanaan dan Keuangan
 - 3. Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - 4. Program Penyelenggaraan Kehumasan
- e. Pemerintahan Administrasi Kecamatan
 - 1. Program Pemerintahan Umum
 - 2. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik
 - 3. Program Pemberdayaan Masyarakat
- f. Fungsi Sekretariat Daerah
 - 1. Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga
 - 2. Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan
 - 3. Program Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum
 - 4. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Penyampaian Informasi melalui Media
 - 6. Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA
 - 7. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi
 - 8. Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa
 - 9. Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja
 - 10. Program Pengembangan Standar Kompetensi
- g. Kesekretariatan
 - 1. Program Pelayanan Kesekretariatan

5.2 Program Prioritas

5.2.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- a. Pendidikan
 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal
 2. Program Pembinaan Pendidikan Dasar
 3. Program Pendidikan Ketenagaan
- b. Kesehatan
 1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 2. Program BLUD Puskesmas
 3. Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
 4. Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
 5. Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 6. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 7. Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Program Bina Marga
 2. Program Cipta Karya
 3. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 1. Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 1. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
 2. Program Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial
 1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 2. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

5.2.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- a. Tenaga Kerja
 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 1. Program Pemberdayaan Perempuan
 2. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. Pangan
 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- d. Lingkungan Hidup
 1. Program Penataan Lingkungan Hidup

- 2. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
- 3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
- f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- g. Perhubungan
 - 1. Program Pengendalian Lalu Lintas
 - 2. Program Pelayanan Angkutan Darat
 - 3. Program Pengelolaan perparkiran
- h. Komunikasi dan Informatika
 - 1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- i. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - 1. Program Pengembangan Usaha Mikro
- j. Penanaman Modal
 - 1. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
 - 2. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum

5.2.3 Urusan Pilihan

- a. Pariwisata
 - 1. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
 - 2. Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- b. Perdagangan
 - 1. Program Bina Perdagangan
 - 2. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar
- c. Perindustrian
 - 1. Program Pengembangan Industri

5.2.4 Urusan Penunjang Pemerintah

- a. Perencanaan Pembangunan
 - 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
 - 2. Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - 3. Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 4. Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- b. Keuangan
 - 1. Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah
 - 2. Program Pemanfaatan Aset Daerah
 - 3. Program Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah
 - 4. Program Pelayanan Pajak Daerah
- c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
 - 1. Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian
 - 2. Program Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi

5.2.5 Urusan Pemerintahan Umum Lainnya

- a. Pengawasan
 - 1. Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- c. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - 1. Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- d. Pemerintahan Administrasi Kecamatan
 - 1. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik
 - 2. Program Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kesekretariatan
 - 1. Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa
 - 2. Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Akuntabilitas Kinerja
 - 3. Program Pengembangan Standar Kompetensi

5.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang Berorientasi pada sasaran pembangunan daerah sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Rencana Kerja

| Sasaran Strategis | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|--|-------------------|---|---|
| Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter | Indeks Pendidikan | Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Program Pembinaan Pendidikan Dasar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Program Pembinaan Ketenagaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah |
| | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah |
| | | Program Pembinaan Kepemudaan | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| Meningkatnya kualitas layanan kesehatan | Indeks Kesehatan | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Program BLUD Puskesmas | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah | Dinas Kesehatan |
| | | Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah | Dinas Kesehatan |
| | | Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Dinas Kesehatan |
| | | Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Dinas Kesehatan |

| Sasaran Strategis | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|--|--|
| | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| | | Program Pembinaan Keolahragaan | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan | Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i> | Program bina perdagangan | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | Program Peningkatan Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | Program Peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | Program Peningkatan Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif | Presentase pertumbuhan ekonomi kreatif | Program pengembangan usaha mikro | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |

| Sasaran Strategis | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|-------------------|-----------|--|--|
| | | Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Program Pengembangan Industri | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Program Pembinaan Koperasi | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Program Pembinaan Industri | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata | Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja | Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas | Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| Sasaran Strategis | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|--|--|
| Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) | Program Cipta Karya | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Program Bina Marga | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Infrastruktur Jalan | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Program Pengendalian Lalu Lintas | Dinas Perhubungan |
| | | Program Pelayanan Angkutan Darat | Dinas Perhubungan |
| | | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik | Kecamatan |
| Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) | Program Penataan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup |

| Sasaran Strategis | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|--|--|---|--|
| | | Program Penataan Ruang dan Pertanahan | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial | Persentase penurunan PMKS | Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial | Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| | | Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan | Indeks Pembangunan Masy (IPMas), Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Program Pemberdayaan Perempuan | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |

| Sasaran Strategis | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|--|---|---|--|
| | | Program Perlindungan Perempuan dan Anak | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat | Kecamatan |
| | | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Program Perlindungan Masyarakat | Satpol PP |
| Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum | Presentase perda yang ditegakkan | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Satpol PP |
| | | Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah | Satpol PP |
| | | Program Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum | Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif | Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP, Rasio PAD | Program Pengelolaan perparkiran | Dinas Perhubungan |
| | | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Bappeda |

| Sasaran Strategis | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|-------------------|-----------|--|--------------------------------|
| | | Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Bappeda |
| | | Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bappeda |
| | | Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bappeda |
| | | Program Penelitian dan Pengembangan | Bappeda |
| | | Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Program Pemanfaatan Aset Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Program Pelaporan Keuangan Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Program Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah | Badan Pendapatan Daerah |
| | | Program Pelayanan Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah |
| | | Program Pengendalian Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah |
| | | Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Sekretariat Daerah |
| | | Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja | Sekretariat Daerah |
| | | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Sekretariat Daerah |
| | | Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA | Sekretariat Daerah |
| | | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi | Sekretariat Daerah |
| | | Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga | Sekretariat Daerah |
| | | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Penyampaian Informasi melalui Media | Sekretariat Daerah |
| | | Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan | Sekretariat Daerah |

| Sasaran Strategis | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|---|----------------------------|---|--|
| | | Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan | Inspektorat |
| | | Program Pembinaan dan Pengawasan bidang ekonomi dan sumber daya alam | Inspektorat |
| | | Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Inspektorat |
| | | Program Pembinaan dan Pengawasan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | Inspektorat |
| | | Program Pengelolaan Arsip Daerah | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah |
| | | Program Pelayanan Kesekretariatan DPRD | Sekretariat DPRD |
| | | Program Perencanaan dan Keuangan | Sekretariat DPRD |
| | | Program Penyelenggaraan Kehumasan | Sekretariat DPRD |
| | | Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Sekretariat DPRD |
| | | Program Pemerintahan Umum | Kecamatan |
| | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | Program Pengembangan Standar Kompetensi | Sekretariat Daerah |

| Sasaran Strategis | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|--|------------------------|--|--|
| Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi | Indeks Kematangan SPBE | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Program Pengendalian, Data dan Informasi | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | |

5.4 Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Daerah

Rekapitulasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif berdasarkan perangkat daerah pelaksana sebagaimana Matrik berikut :

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan Pagu Indikatif Daerah

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|---|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 144.131.434.000,00 | | | | 170.958.971.398,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 142.671.240.551,00 | | | | 165.139.176.398,00 |
| 1 | 01 | | | Pendidikan | | | | 142.390.740.551,00 | | | | 163.868.676.398,00 |
| 1 | 01 | 26 | | Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal | APK PAUD | | 90,88 % | 476.544.551,00 | | | | 819.444.485,00 |
| 1 | 01 | 26 | 002 | Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian PAUD PNF menuju SNP | Jumlah Lembaga yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 605,00 lembnaga | 21.000.000,00 | Block Grant | | 605,00 lembnaga | 21.000.000,00 |
| 1 | 01 | 26 | 003 | Pemetaan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF | Jumlah dokumen hasil Kajian Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF | Jl. Veteran 19 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 21.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 21.000.000,00 |
| 1 | 01 | 26 | 004 | Fasilitasi kegiatan satuan pendidikan SKB | Jumlah warga belajar yang memperoleh fasilitasi pendidikan | Jl. LA Sucipto Gg. Makam 30 Kalisari Blimbing Malang, Kota Malang; | 711,00 peserta didik | 11.311.374,00 | Block Grant | | 711,00 peserta didik | 11.311.374,00 |
| 1 | 01 | 26 | 005 | Fasilitasi kegiatan PLA | Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 57,00 peserta didik | 58.031.114,00 | Block Grant | | 57,00 peserta didik | 58.031.114,00 |
| 1 | 01 | 26 | 006 | Pembinaan peningkatan mutu kelembagaan PAUD PNF | Jumlah lembaga yang memperoleh pembinaan | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 60,00 peserta | 21.000.000,00 | Block Grant | | 60,00 peserta | 21.000.000,00 |
| 1 | 01 | 26 | 007 | Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF sesuai SPM menuju SNP | Jumlah pengajuan sarana prasarana PAUD dan PNF | TK Pembina 1, TK Pembina 2, TK Pembina 3 dan TK Pembina 5, Kota Malang; | 161,00 lembnaga | 20.000.000,00 | Block Grant | | 4 TK Pembina | 20.000.000,00 |
| 1 | 01 | 26 | 008 | Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan PAUD dan PNF sesuai SPM Menuju SNP | Jumlah unit bangunan PAUD dan PNF yang dibangun/ direhabilitasi | TK Dharmawanita Persatuan 01 Dinoyo, TK Muslimat NU 45, Kota Malang; | 9,00 lembnaga | 258.750.000,00 | Block Grant | | 2 Lembaga PAUD | 258.750.000,00 |
| 1 | 01 | 26 | 009 | Penguatan Ekosistem Pendidikan bagi Pembangunan Karakter PAUD dan PNF | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terhadap ekosistem pendidikan | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 175,00 lembaga PAUD PNF | 21.000.000,00 | Block Grant | | 175,00 lembaga PAUD PNF | 21.000.000,00 |
| 1 | 01 | 26 | 010 | penyusunan bahan perumusan, kordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan bakat dan minat prestasi dan pembangunan karakter | Jumlah dokumen bahan perumusan yang dihasilkan | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 21.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 21.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 26 | 012 | Fasilitasi BOP PAUD dan PNF | Jumlah peserta didik PAUD dan Warga belajar PNF yang mendapatkan BOP | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 580,00 lembnaga | 7.200.000,00 | Block Grant | | 580,00 lembnaga | 7.200.000,00 |
| 1 | 01 | 26 | 013 | Penyediaan Operasional TK Pembina 1 | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | Jl. Cibogo 1, Kota Malang; | 214,00 peserta didik | 6.343.027,00 | Block Grant | | 214 Peserta Didik | 132.718.600,00 |
| 1 | 01 | 26 | 014 | Penyediaan Operasional TK Pembina 2 | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | Jl. LA Sucipto Gg. Makam Kalisari Blimbing Malang, Kota Malang; | 151,00 peserta didik | 3.995.630,00 | Block Grant | | 151 Peserta Didik | 92.720.650,00 |
| 1 | 01 | 26 | 015 | Penyediaan Operasional TK Pembinaan 3 | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | Jl. Pelanuhan Ketapang Bakalan Krajan, Kota Malang; | 74,00 peserta didik | 2.861.506,00 | Block Grant | | 74,00 peserta didik | 66.367.600,00 |
| 1 | 01 | 26 | 016 | Penyediaan Operasional TK Pembinaan 5 | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | Jl. Raya Cemorokandang , Kota Malang; | 81,00 peserta didik | 3.051.900,00 | Block Grant | | 81 Peserta Didik | 67.345.147,00 |
| 1 | 01 | 27 | | Program Pembinaan Pendidikan Dasar | APK SD | | 110,41 % | 141.740.996.000,00 | | | | 162.160.633.913,00 |
| 1 | 01 | 27 | 446 | Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar menuju SNP | Jumlah Pembinaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 425,00 Satuan pendidikan | 21.000.000,00 | Block Grant | | 222 Lembaga Pendidikan Dasar | 21.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 447 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 7.200.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 7.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 448 | Pemetaan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar | Jumlah Kajian Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1,00 Dokumen Kajian | 21.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen Kajian | 21.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 449 | Pembinaan peningkatan mutu kelembagaan | Jumlah pembinaan peningkatan mutu kelembagaan | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 245,00 lembnaga | 21.000.000,00 | Block Grant | | 245,00 lembnaga | 21.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 450 | Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP | Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 222,00 Satuan pendidikan | 20.000.000,00 | Block Grant | | 222 Lembaga Pendidikan | 1.979.587.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 451 | Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Pendidikan Dasar sesuai SPM Menui SNP | Jumlah unit bangunan Pendidikan Dasar yang dibangun/ direhabilitasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Malang; | 80,00 lembnaga | 12.500.000,00 | Block Grant | | 80 Sekolah | 19.150.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 452 | Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera Pendidikan Dasar | Jumlah siswa prasejahtera Pendidikan Dasar yang mendapatkan bantuan sarana sekolah | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1.180,00 peserta didik | 10.000.000,00 | Block Grant | | 1.180,00 peserta didik | 10.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 453 | Penguatan Ekosistem Pendidikan bagi Pembangunan Karater Pendidikan Dasar | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terhadap ekosistem pendidikan | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 425,00 lembnaga | 21.000.000,00 | Block Grant | | 425,00 lembnaga | 21.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 454 | Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan bakat dan minat prestasi dan pembangunan karakter | Jumlah dokumen bahan perumusan yang dihasilkan | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 21.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 21.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 455 | Peningkatan Mutu Pendidikan Inklusif Pendidikan Dasar | Jumlah pembinaan dalam meningkatkan mutu pendidikan Inklusi | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 75,00 lembnaga | 21.000.000,00 | Block Grant | | 75,00 lembnaga | 21.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 456 | Pembinaan minat, bakat, prestasi akademis dan non akademis dan pembangunan pendidikan karakter Pendidikan Dasar | Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional | Kota Malang, Kota Malang; | 102,00 Prestasi | 31.420.000,00 | Block Grant | | 102,00 Prestasi | 31.420.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 457 | Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Pendidikan Dasar | Jumlah Siswa Baru SD dan SMP | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 29.150,00 Peserta Didik Pendidikan Dasar | 250.000.000,00 | Block Grant | | 29.150,00 Peserta Didik Pendidikan Dasar | 250.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 461 | Fasilitasi Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan | Jumlah Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1,00 Inovasi | 40.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Inovasi | 40.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 464 | Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar | Jumlah siswa yang menerima bantuan | Dinas Pendidikan Kota Malang, Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 222,00 Satuan pendidikan | 64.681.400.000,00 | Block Grant | | 222 Lembaga Pendidikan | 64.681.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 001 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KLOJEN | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI KLOJEN Jl. PATTIMURA No. 1, Kota Malang; | 476,00 Orang | 428.400.000,00 | BOS | | 476,00 Orang | 424.800.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 002 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | jalan tretes selatan No 26, Kota Malang; | 353,00 Orang | 318.600.000,00 | BOS | | 353,00 Orang | 317.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 003 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. WR. Supratman No 11A, Kota Malang; | 323,00 Orang | 296.100.000,00 | BOS | | 323,00 Orang | 290.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 196 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Lawu 12 Kota Malang, Kota Malang; | 757,00 Orang | 953.820.000,00 | BOS | | 757 siswa | 953.820.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 005 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI KIDUL DALEM 02, Jl. Embong Brantas Gang SD No. 26 Kec. Klojen Kota Malang, Kota Malang; | 169,00 Orang | 153.000.000,00 | BOS | | 169,00 Orang | 152.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 006 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Sukoharjo 01 , Jalan Laks.Martadinata IV/2 Kota Malang, Kota Malang; | 317,00 Orang | 285.300.000,00 | BOS | | 317,00 Orang | 285.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 007 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Prof. Moh. Yamin V / 25 Malang, Kota Malang; | 177,00 Orang | 159.300.000,00 | BOS | | 177,00 Orang | 159.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 008 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KASIN | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI KASIN, Jl. Yulius Usman No. 58-60 , Kota Malang; | 508,00 Orang | 457.200.000,00 | BOS | | 508,00 Orang | 450.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 009 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Kauman No 1, Kota Malang; | 560,00 Orang | 840.000.000,00 | BOS | | 560,00 Orang | 840.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 010 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Kauman 02, Jl. Kawi No, 24/D Kota Malang, Kota Malang; | 321,00 Orang | 288.900.000,00 | BOS | | 321,00 Orang | 284.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 011 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Kota Malang; | 238,00 Orang | 214.200.000,00 | BOS | | 238 | 214.200.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 012 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ORO-ORO DOWO | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI ORO-ORO DOWO KOTA MALANG, Jl. B.S Riadi Gg 8 No 224, Kota Malang; | 139,00 Orang | 124.200.000,00 | BOS | | 139,00 Orang | 125.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 013 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI BARENG 01, JL. KELUD NO 10 A KEC. KLOJEN, KOTA MALANG, Kota Malang; | 313,00 Orang | 281.700.000,00 | BOS | | 313,00 Orang | 276.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 014 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Bareng Raya II / 5, Kota Malang; | 400,00 Orang | 363.600.000,00 | BOS | | 400 Siswa | 360.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 015 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI BARENG 03, JL. KAWI SELATAN NO. 20 KEC. KLOJEN KOTA MALANG, Kota Malang; | 507,00 Orang | 456.300.000,00 | BOS | | 507,00 Orang | 449.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 016 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Simpang KAWI 11, Kota Malang; | 126,00 Orang | 113.400.000,00 | BOS | | 100 | 110.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 017 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Bareng 05, Jalan Bareng Tenes 4b, Kota Malang; | 76,00 Orang | 108.000.000,00 | BOS | | 76,00 Orang | 108.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 018 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADING KASRI | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Galunggung VII/1 Kota Malang, Kota Malang; | 164,00 Orang | 147.600.000,00 | BOS | | 164,00 Orang | 149.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 019 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PENANGGUNGAN | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Penanggungan Jl. Cimanggis no. 2, Kota Malang; | 335,00 Orang | 301.500.000,00 | BOS | | 335,00 Orang | 297.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 020 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Laksda Adi Sucipto No.77 Kota Malang, Kota Malang; | 389,00 Orang | 351.900.000,00 | BOS | | 389,00 Orang | 351.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 021 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl LA Sucipto Gang SD No 12 Malang, Kota Malang; | 185,00 Orang | 166.500.000,00 | BOS | | 185,00 Orang | 166.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 022 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Blimbing 03, Jl. Candi Kidal No. 3, Kota Malang; | 402,00 Orang | 361.800.000,00 | BOS | | 402,00 Orang | 356.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 023 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan LA. Sucipto No. 202, Kota Malang; | 312,00 Orang | 280.800.000,00 | BOS | | 312,00 Orang | 280.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 024 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Blimbing 5, Jl. Borobudur X/32, Blimbing-Kota Malang, Kota Malang; | 189,00 Orang | 170.100.000,00 | BOS | | 189,00 Orang | 170.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 025 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. A. YANI UTARA NO.22 KECAMATAN BLIMBING , Kota Malang; | 161,00 Orang | 144.900.000,00 | BOS | | 161,00 Orang | 144.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 026 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Cakalang no.172 A Polowijen Kec. Blimbing, Kota Malang; | 150,00 Orang | 134.100.000,00 | BOS | | 150,00 Orang | 135.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 027 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Sembilang 7 RT 05 RW 01 Kelurahan Polowijen Blimbing Malang, Kota Malang; | 171,00 Orang | 157.500.000,00 | BOS | | 171,00 Orang | 153.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 028 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No.5 Kecamatan Blimbing, Kota Malang; | 368,00 Orang | 331.200.000,00 | BOS | | 368 | 331.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 029 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No. 40, Kota Malang; | 182,00 Orang | 163.800.000,00 | BOS | | 182,00 Orang | 163.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 030 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Arjosari 03 Jl. Teluk Perigi 01 Arjosari - Blimbing - Kota Malang, Kota Malang; | 172,00 Orang | 154.800.000,00 | BOS | | 172,00 Orang | 156.600.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 031 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI PURWODADI 01, Jl. A. Yani No.165 A, Kota Malang; | 335,00 Orang | 304.200.000,00 | BOS | | 335,00 Orang | 301.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 032 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Plaosan No. 57 Purwodadi, Kota Malang; | 159.300.000,00 Orang | 159.300.000,00 | BOS | | 159.300.000,00 Orang | 159.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 033 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI PURWODADI 03, Jl. Plaosan Barat 71B, Kota Malang; | 135,00 Orang | 121.500.000,00 | BOS | | 135,00 Orang | 121.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 034 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Purwodadi 04, Jalan Ikan Piranha K/66, Kota Malang; | 193,00 Orang | 173.700.000,00 | BOS | | 193,00 Orang | 173.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 035 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. L.A Sucipto 330 Malang, Kota Malang; | 502,00 Orang | 451.800.000,00 | BOS | | 502,00 Orang | 451.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 036 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Pandanwangi 02, Jl. Simpang Sulfat Utara No. 30 Malang, Kota Malang; | 188,00 Orang | 169.200.000,00 | BOS | | 188,00 Orang | 168.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 037 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Pandanwangi 3 Malang, Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 32, Kota Malang; | 464,00 Orang | 417.600.000,00 | BOS | | 464,00 Orang | 414.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 038 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Batu Amarel No. 1, Kota Malang; | 181,00 Orang | 162.900.000,00 | BOS | | 181,00 Orang | 162.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 039 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN PANDANWANGI 05, Perum Pondok Indah Estate Blok D/1B, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Kota Malang; | 183,00 Orang | 164.700.000,00 | BOS | | 183,00 Orang | 164.700.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 040 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | PEMERINTAH KOTA MALANG SD NEGERI PURWANTORO 01 , JL. LETJEN S. PARMAN NO 67 MALANG, Kota Malang; | 504,00 Orang | 453.600.000,00 | BOS | | 504,00 Orang | 449.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 041 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | PEMERINTAH KOTA MALANG SD NEGERI PURWANTORO 02, JL. CIPUNEGARA NO. 58, Kota Malang; | 345,00 Orang | 310.500.000,00 | BOS | | 345,00 Orang | 310.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 042 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Purwantoro 3 Jl. Natrium No. 2, Kota Malang; | 152,00 Orang | 136.800.000,00 | BOS | | 152,00 Orang | 136.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 043 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN PURWANTORO 04 KOTA MALANG, Kota Malang; | 173,00 Orang | 155.700.000,00 | BOS | | 173,00 Orang | 155.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 044 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | pemerintah kota malang; SDN Purwantoro 05; Jl. Sanan 75 , Kota Malang; | 93,00 Orang | 108.000.000,00 | Block Grant | | 93,00 Orang | 108.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 045 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 06 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN PURWANTORO 6 Jl. Karya Timur 4 No 61, Kota Malang; | 167,00 Orang | 150.300.000,00 | Block Grant | | 167,00 Orang | 143.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 046 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 07 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Cibuni II No.20, Kota Malang; | 108,00 Orang | 108.000.000,00 | BOS | | 108,00 Orang | 108.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 047 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 08 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Nikel No. 2, Kota Malang; | 464,00 Orang | 276.300.000,00 | Block Grant | | 464,00 Orang | 276.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 048 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl.Hamid Rusdi Timur 455a Kecamatan Blimbing, Kota Malang; | 464,00 Orang | 417.600.000,00 | BOS | | 464,00 Orang | 413,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 049 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Bedadung No. 3, Kota Malang; | 545,00 Orang | 490.500.000,00 | BOS | | 545,00 Orang | 490.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 050 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Sebuku 14, Kota Malang; | 250,00 Orang | 225.000.000,00 | BOS | | 250,00 Orang | 225.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 051 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Warinoi No. 20, Kota Malang; | 331,00 Orang | 297.900.000,00 | BOS | | 331,00 Orang | 297.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 052 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Hamid Rusdi III/9 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing, Kota Malang; | 170,00 Orang | 153.000.000,00 | BOS | | 170,00 Orang | 153.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 053 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 06 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | jl. Warinoi No 54, Kota Malang; | 286,00 Orang | 257.400.000,00 | BOS | | 286,00 Orang | 257.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 054 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Untung Suropati Selatan No 16 Malang, Kota Malang; | 650,00 Orang | 585.000.000,00 | BOS | | 650,00 Orang | 585.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 055 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Kesatrian 2. Jl. Kesatrian Dalam No. 60, Kota Malang; | 195,00 Orang | 175.500.000,00 | BOS | | 195,00 Orang | 168.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 056 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Puntodewo No.6, Kota Malang; | 168,00 Orang | 151.200.000,00 | BOS | | 168,00 Orang | 151.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 057 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 02 | Jumlah Pembinaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian | JL. SADEWO NO 39, Kota Malang; | 425,00 Satuan pendidikan | 363.600.000,00 | BOS | | 425,00 Satuan pendidikan | 363.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 058 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN POLEHAN 03 Jalan Raya Puntadewa No 3 Polehan, Kota Malang; | 448,00 Orang | 403.200.000,00 | BOS | | 448,00 Orang | 403.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 059 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN POLEHAN 04 JALAN WERKUDORO 437 KEL.POLEHAN KEC.BLIMBING , Kota Malang; | 196,00 Orang | 176.400.000,00 | BOS | | 196,00 Orang | 176.400.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 060 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Nakula No.34, Kota Malang; | 140,00 Orang | 126.000.000,00 | BOS | | 140 | 126.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 061 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JODIPAN | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan .Jr.H.Juanda No.32 Malang, Kota Malang; | 548,00 Orang | 493.200.000,00 | BOS | | 548,00 Orang | 493.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 062 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Raya Balearjosari no.11 Blimbing Malang, Kota Malang; | 305,00 Orang | 274.500.000,00 | BOS | | 305,00 Orang | 273.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 063 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Pahlawan No. 375 B, Balearjosari, Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang; | 129,00 Orang | 116.100.000,00 | BOS | | 129,00 Orang | 115.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 064 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEDUNGKANDANG 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Ki Ageng Gribig No. 394 Kec. Kedungkandang, Kota Malang; | 243,00 Orang | 218.700.000,00 | BOS | | 243,00 Orang | 220.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 065 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEDUNGKANDANG 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Kedungkandang 2, Jl. KH Sofyan Yusuf No.43 Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 367,00 Orang | 330.300.000,00 | BOS | | 367,00 Orang | 326.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 066 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN KOTALAMA 1, Jl. Laks. Martadinata V/36 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang, Kota Malang; | 500,00 Orang | 450.000.000,00 | BOS | | 500,00 Orang | 405.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 067 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JALAN MUHARTO VII/73, Kota Malang; | 377,00 Orang | 339.300.000,00 | BOS | | 377,00 Orang | 339.300.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 068 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL Muharto VII No 52 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 286,00 Orang | 257.400.000,00 | BOS | | 286,00 Orang | 257.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 069 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Muharto V/1B Malang, Kota Malang; | 189,00 Orang | 170.100.000,00 | BOS | | 189,00 Orang | 170.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 070 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Muharto No. 54 Gang VII Malang, Kota Malang; | 283,00 Orang | 254.700.000,00 | BOS | | 283,00 Orang | 254.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 071 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 06 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl.Muharto Gg.VII Rt.7 Rw.7 No.82, Kota Malang; | 189,00 Orang | 170.100.000,00 | BOS | | 189,00 Orang | 170.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 072 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Kolonel Sugiono 189 Kota Malang , Kota Malang; | 370,00 Orang | 333.000.000,00 | BOS | | 370,00 Orang | 328.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 073 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl.Kol.Sugiono IIIB/25 , Kota Malang; | 289,00 Orang | 260.100.000,00 | BOS | | 289,00 Orang | 260.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 074 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. KOLONEL SUGIONO 3B/88 Kota Malang, Kota Malang; | 173,00 Orang | 155.700.000,00 | BOS | | 173,00 Orang | 153.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 076 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Kol. Sugiono 9D / 80 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 170,00 Orang | 153.000.000,00 | BOS | | 170,00 Orang | 153.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 075 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Kolonel Sugiono I/34 Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 161,00 Orang | 144.900.000,00 | BOS | | 161,00 Orang | 142.200.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 077 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Bumiayu 1, Jl. Kyai Parseh Jaya No. 26 Malang, Kota Malang; | 251,00 Orang | 225.900.000,00 | BOS | | 251 anak peserta didik | 225.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 078 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN BUMIAYU 02, Jalan Lembayung VII No. 1 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Malang 65135, Kota Malang; | 272,00 Orang | 244.800.000,00 | BOS | | 244800000 | 244.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 079 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Bumiayu 3, Kota Malang; | 318,00 Orang | 287.100.000,00 | BOS | | 318,00 Orang | 287.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 080 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jln. Kyai Parseh Jaya No.08 Kota Malang, Kota Malang; | 196,00 Orang | 176.400.000,00 | BOS | | 196 siswa | 176.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 081 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Wonokoyo 01, Jalan Kalisari No 2 Wonokoyo, Kota Malang; | 167,00 Orang | 150.300.000,00 | BOS | | 167,00 Orang | 150.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 082 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN WONOKOYO 2, Jl. Baran Wonokoyo kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 51,00 Orang | 108.000.000,00 | BOS | | 51,00 Orang | 108.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 083 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BURING | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Mayjen Sungkono No 1 Buring, Kedungkandang, Kota Maalang, Kota Malang; | 599,00 Orang | 539.100.000,00 | BOS | | 599,00 Orang | 539.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 084 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD LESANPURO 1 JALAN KI AGENG GRIBIG NO. 109 MALANG, Kota Malang; | 211,00 Orang | 189.900.000,00 | BOS | | 211,00 Orang | 176.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 085 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Ki Ageng Gribig Gg.12 No.248 , Kota Malang; | 178,00 Orang | 160.200.000,00 | BOS | | 178,00 Orang | 160.200.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 086 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. KI AGENG GRIBIG IE NO.24, Kota Malang; | 361,00 Orang | 324.900.000,00 | BOS | | 361 siswa | 324.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 087 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Danau Singkarak E2A, Kota Malang; | 476,00 Orang | 428.400.000,00 | BOS | | 476,00 Orang | 428.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 088 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Pemerintah Kota Malang, Kota Malang; | 548,00 Orang | 493.200.000,00 | BOS | | 547 Siswa | 492.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 089 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN SAWOJAJAR 2, Jl Raya Sawojajar no 29, Kota Malang; | 187,00 Orang | 168.300.000,00 | BOS | | 187,00 Orang | 166.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 090 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Sawojajar 03 Jl. Simp. Ranugrati No. 57A, Kota Malang; | 201,00 Orang | 180.900.000,00 | BOS | | 201,00 Orang | 179.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 091 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN SAWOJAJAR 4 Jl. Simpang Ranu Grati Selatan III/17, Kota Malang; | 185,00 Orang | 166.500.000,00 | BOS | | 185,00 Orang | 165.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 092 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | jalan Danau Towuti Nomer 22 Malang, Kota Malang; | 390,00 Orang | 351.000.000,00 | BOS | | 390,00 Orang | 274.930.500,00 |
| 1 | 01 | 27 | 093 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 06 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Sawojajar 06, Jl. Danau Ngebel No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 377,00 Orang | 339.300.000,00 | BOS | | 377,00 Orang | 339.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 094 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Raya Madyopuro 46 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 365,00 Orang | 328.500.000,00 | BOS | | 365,00 Orang | 328.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 095 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Danau Jonge , Kota Malang; | 187,00 Orang | 264.100.000,00 | BOS | | 187,00 Orang | 264.100.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 096 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. DANAU SENTANI DALAM XI/12 KOTA MALANG, Kota Malang; | 232,00 Orang | 208.800.000,00 | BOS | | 232,00 Orang | 208.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 097 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Raya Madyopuro No. 33 Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang, Kota Malang; | 366,00 Orang | 329.400.000,00 | BOS | | 365 | 329.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 098 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Madyopuro 5 , Jl. Ki Ageng Gribig No. 47 Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang, Kota Malang; | 385,00 Orang | 346.500.000,00 | BOS | | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA - 381 | 346.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 099 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 06 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl.baran gribig no.32 kelurahan madyopuro kecamatan kedungkandang, Kota Malang; | 173,00 Orang | 155.700.000,00 | BOS | | 173 | 155.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 100 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Cemorokandang 1, Jl. Sampurna No. 25 Cemorokandang Kedungkandang, Kota Malang; | 195,00 Orang | 175.500.000,00 | BOS | | 195,00 Orang | 175.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 101 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Cemorokandang 02 Jl. Raya Cemorokandang no 75 Kota Malang, Kota Malang; | 221,00 Orang | 198.900.000,00 | BOS | | 221,00 Orang | 198.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 102 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Cemorokandang 03, Jalan Baran Tempuran Nomor 1, Kota Malang; | 42,00 Orang | 108.000.000,00 | BOS | | 42,00 Orang | 108.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 103 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Kemayoran III No:1 , Kota Malang; | 172,00 Orang | 158.400.000,00 | BOS | | 172,00 Orang | 154.800.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 104 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL.TUTUT GANG III NO.46 ARJOWINANGUN 1.(SDN ARJOWINANGUN 1), Kota Malang; | 218,00 Orang | 196.200.000,00 | Block Grant | | 218,00 Orang | 196.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 105 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. RAYA ARJOWINANGUN NO.7 KOTA MALANG, Kota Malang; | 440,00 Orang | 396.000.000,00 | BOS | | 440,00 Orang | 396.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 106 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI TLOGOWARU 01 KOTA MALANG, Jl. Sekarsari Indah No.02, Kota Malang; | 204,00 Orang | 183.600.000,00 | BOS | | 204,00 Orang | 183.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 107 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Tlogowaru 2 Jl. JabalNur No 26 Kel. Tlogowaru. Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 117,00 Orang | 108.000.000,00 | BOS | | 117,00 Orang | 105.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 108 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MODEL KOTA MALANG | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Model Kota Malang, Jl. Raya Tlogowaru No. 03, Kota Malang; | 864,00 Orang | 1.582.200.000,00 | BOS | | 864,00 Orang | 1.555.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 109 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Lowokwaru 1 Kota Malang, Kota Malang; | 263,00 Orang | 236.700.000,00 | BOS | | 263,00 Orang | 236.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 110 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Lowokwaru 02 Malang; Jl. Tretes No. 3 Malang, Kota Malang; | 602,00 Orang | 541.800.000,00 | BOS | | 602,00 Orang | 541.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 111 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Lowokwaru 03 , Jl. Sarangan No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 596,00 Orang | 536.400.000,00 | BOS | | 596 | 536.400.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 112 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Setaman No.02 , Kota Malang; | 333,00 Orang | 299.700.000,00 | BOS | | 333,00 Orang | 299.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 113 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN LOWOKWARU 5 KOTA MALANG Jl. Gilimanuk No. 66 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 176,00 Orang | 158.400.000,00 | BOS | | 176 siswa | 158.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 114 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Magelang No.4, Kota Malang; | 409,00 Orang | 368.100.000,00 | BOS | | 409,00 Orang | 368.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 115 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl Mt Haryono No.213 , kelurahan Dinoyo , Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 217,00 Orang | 195.300.000,00 | BOS | | 217,00 Orang | 195.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 116 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. MT. Haryono IX/326 Malang, Kota Malang; | 533,00 Orang | 479.700.000,00 | BOS | | 533,00 Orang | 479.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 117 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN DINOYO 3, JL. MT. HARYONO XIII/139 A, Kota Malang; | 188,00 Orang | 185.976.000,00 | BOS | | 188,00 Orang | 185.976.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 118 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Dinoyo 4 Jl. MT Haryono XIII/50, Kota Malang; | 190,00 Orang | 171.000.000,00 | BOS | | 190,00 Orang | 171.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 119 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Sumbersari 01 (Jl. Bendungan Sigura-gura I/11), Kota Malang; | 204,00 Orang | 183.600.000,00 | BOS | | 204,00 Orang | 183.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 120 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Sumbersari 02 (Jl. Bendungan Sutami 1, No. 24, Telp: 0341-574944), Kota Malang; | 131,00 Orang | 117.900.000,00 | BOS | | 131,00 Orang | 117.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 121 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Terusan Ambarawa No. 61, Kota Malang; | 173,00 Orang | 155.700.000,00 | BOS | | 173,00 Orang | 155.700.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 122 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KETAWANGGEDE | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Ketawanggede Jalan Kertoleksono 93 D Ketawanggede, Kota Malang; | 415,00 Orang | 373.500.000,00 | BOS | | 415,00 Orang | 373.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 123 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Pisang Kipas No. 36 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 145,00 Orang | 130.500.000,00 | BOS | | 145,00 Orang | 130.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 124 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Jatimulyo 02 - Jl Kenanga Indah No.2 Telp(0341) 485 180, Kota Malang; | 183,00 Orang | 164.700.000,00 | BOS | | 183,00 Orang | 164.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 125 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Jatimulyo 3, Jalan Bunga Srigading No. 29, Kota Malang; | 189,00 Orang | 170.100.000,00 | BOS | | 189,00 Orang | 170.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 126 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Simbar Menjangan No. 28, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Kota Malang; | 73,00 Orang | 108.000.000,00 | BOS | | 73,00 Orang | 108.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 127 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Jatimulyo 05 Jl. Kuping Gajah No. 45 Malang Telp. (0341) 476445, Kota Malang; | 125,00 Orang | 112.500.000,00 | BOS | | 125,00 Orang | 112.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 128 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl Ikan Piranha Atas No 187 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 529,00 Orang | 476.100.000,00 | BOS | | 529,00 Orang | 476.100.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 129 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. Ikan Tombro No. 1, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 158,00 Orang | 142.200.000,00 | BOS | | 158,00 Orang | 142.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 130 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 03, Jl. Terusan Piranha Atas No. 2 , Kota Malang; | 284,00 Orang | 255.600.000,00 | BOS | | 284,00 Orang | 255.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 131 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL.Ikan Gurami No.4, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 133,00 Orang | 119.700.000,00 | BOS | | 133,00 Orang | 119.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 132 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri TUNJUNGSEKAR 05, Jalan Ikan Mas 1 No. 18, Kota Malang; | 258,00 Orang | 232.200.000,00 | BOS | | 258,00 Orang | 232.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 133 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Mojolangu 01, Jl. Sudimoro 15, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang., Kota Malang; | 136,00 Orang | 122.400.000,00 | BOS | | 136,00 Orang | 122.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 134 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Candi Panggung No. 52 Malang , Kota Malang; | 179,00 Orang | 161.100.000,00 | BOS | | 179,00 Orang | 161.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 135 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Candi Mendut 25 Kota Malang, Kota Malang; | 192,00 Orang | 172.800.000,00 | BOS | | 192,00 Orang | 172.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 136 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL.Taman borobudur 7 kelurahan mojolangu kecamatan lowokwaru, Kota Malang; | 135,00 Orang | 121.500.000,00 | BOS | | 135,00 Orang | 121.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 137 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Terusan Sudimoro Rt.09 Rw.07 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 169,00 Orang | 152.100.000,00 | BOS | | 169,00 Orang | 152.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 138 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. Kedawung 72 Telpon : 0341-414383 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Kota Malang; | 158,00 Orang | 142.200.000,00 | BOS | | 158,00 Orang | 142.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 139 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Kendalsari 36, Kota Malang; | 155,00 Orang | 139.500.000,00 | BOS | | 155,00 Orang | 139.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 140 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Tulusrejo 03 Jalan Bantaran V/17 Telp.(0341) 411 547, Kota Malang; | 177,00 Orang | 159.300.000,00 | BOS | | 177,00 Orang | 159.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 141 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. KEDAWUNG X/B NO 28, Kota Malang; | 96,00 Orang | 108.000.000,00 | BOS | | 96,00 Orang | 108.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 142 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Tasikmadu 01 Jl. Golf 71, Kota Malang; | 317,00 Orang | 286.200.000,00 | BOS | | 317,00 Orang | 286.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 143 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Tasikmadu 2 Jl. Atletik No. 123-124 Tasikmadu, Lowokwaru, Kota Malang; | 355,00 Orang | 319.500.000,00 | BOS | | 355,00 Orang | 319.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 144 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Tungguulwulung 1 Malang, Jl. Akordion Timur No 1 * Telp (0341) 484405, Kota Malang; | 168.300.000,00 Orang | 168.300.000,00 | BOS | | 168.300.000,00 Orang | 168.300.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 145 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, SD Negeri Tunggulwulung 02, Kota Malang; | 190,00 Orang | 171.000.000,00 | BOS | | 190,00 Orang | 171.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 146 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jln Arumba No. 2 Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Kota Malang; | 161,00 Orang | 144.900.000,00 | BOS | | 161,00 Orang | 144.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 147 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jln Raya Tlogomas VIII/51 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 154,00 Orang | 138.600.000,00 | BOS | | 154,00 Orang | 143.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 148 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Tlogomas 2, JL. Raya Tlogomas No. 1 Lowokwaru Malang, Kota Malang; | 497,00 Orang | 447.300.000,00 | BOS | | 497,00 Orang | 447.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 149 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Merjosari 01. Jl. Joyo Utomo No.02 Merjosari Kota Malang, Kota Malang; | 182,00 Orang | 163.800.000,00 | BOS | | 182 | 163.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 150 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI MERJOSARI 02, JL. JOYO UTOMO GG. I , Kota Malang; | 191,00 Orang | 172.800.000,00 | BOS | | 191,00 Orang | 172.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 151 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI Merjosari 03 Jalan Joyo Tamansari 1, Kota Malang; | 183,00 Orang | 164.700.000,00 | BOS | | 183 | 164.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 152 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Merjosari 04. Jl. Tirtomulyo No.38 Merjosari , Kota Malang; | 158,00 Orang | 142.200.000,00 | BOS | | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA 158 | 142.200.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 153 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Merjosari 05 Perum Joyo Asri Blok B2 No. 7b, Kota Malang; | 203,00 Orang | 182.700.000,00 | BOS | | 203 | 182.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 154 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl.S.Supriadi No. 16 Malang, Kota Malang; | 532,00 Orang | 478.800.000,00 | BOS | | Jumlah siswa yang mendapat Bosda 532 siswa | 474.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 155 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Kepodang No 17 Kota Malang, SDN SUKUN 02, Kota Malang; | 379,00 Orang | 346.500.000,00 | BOS | | 379,00 Orang | 341.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 156 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. RAJAWALI NO. 1 MALANG, Kota Malang; | 374,00 Orang | 336.600.000,00 | BOS | | 374,00 Orang | 336.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 157 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Percobaan 02, Jl. Galunggung No. 1 Pisangcandi, Kota Malang; | 688,00 Orang | 619.200.000,00 | BOS | | 688,00 Orang | 619.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 158 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Ciptomulyo 1, Jl. Sartono SH No. 4 Kota Malang, Kota Malang; | 512,00 Orang | 460.800.000,00 | BOS | | 512,00 Orang | 450.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 159 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Ciptomulyo 02 Jl. Kolonel Sugiono VIII No. 54 Kec. Sukun Kota Malang , Kota Malang; | 249,00 Orang | 224.100.000,00 | BOS | | 249,00 Orang | 223.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 160 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Pemerintah Kota Malang, Kota Malang; | 214,00 Orang | 192.600.000,00 | Block Grant | | 214,00 Orang | 192.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 161 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota Malang, Kota Malang; | 538,00 Orang | 484.200.000,00 | BOS | | 518 | 466.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 162 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG, Kota Malang; | 157,00 Orang | 141.300.000,00 | BOS | | 166 | 149.400.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 163 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. RAYA GADANG XIIA, SDN GADANG 3, Kota Malang; | 256,00 Orang | 232.200.000,00 | BOS | | 256,00 Orang | 232.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 164 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN GADANG 4, Jl. Kolonel Sugiono Gg XI No 24 Malang, Kota Malang; | 362,00 Orang | 325.800.000,00 | BOS | | 362,00 Orang | 325.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 165 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Satsui Tubun 178 Kebonsari Sukun Kota Malang, Kota Malang; | 193,00 Orang | 173.700.000,00 | BOS | | 193,00 Orang | 173.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 166 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. S. Supriadi No. 7 Kebonsari, Kota Malang; | 198,00 Orang | 475.200.000,00 | BOS | | 198,00 Orang | 475.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 167 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Kolonel Sugiono No 555 Kebonsari Kec.Sukun Kota Malang, Kota Malang; | 306,00 Orang | 275.400.000,00 | BOS | | 306,00 Orang | 266.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 168 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. Satsui Tubun IV No 210 , Kota Malang; | 199,00 Orang | 179.100.000,00 | BOS | | 199,00 Orang | 179.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 169 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. S.Supriadi No.179, Kota Malang; | 567,00 Orang | 510.300.000,00 | BOS | | 567,00 Orang | 510.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 170 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. KLAYATAN II NO. 176 KEC. SUKUN KOTA MALANG, Kota Malang; | 380,00 Orang | 342.000.000,00 | BOS | | 380 | 342.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 171 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Bandungrejosari 3, Jl. Janti Selatan No 69, Kota Malang; | 367,00 Orang | 330.300.000,00 | BOS | | 367 | 330.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 172 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN BANDUNGREJOSARI 4, JL. DANURI NO. 18 MALANG, Kota Malang; | 215,00 Orang | 193.500.000,00 | BOS | | 215,00 Orang | 193.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 173 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI TANJUNGREJO 1, JL. MORGAN SEKOLAHAN NO 1 SUKUN KOTA MALANG, Kota Malang; | 194,00 Orang | 174.600.000,00 | BOS | | 194,00 Orang | 174.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 174 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Mergan Musholla No. 1, Kota Malang; | 427,00 Orang | 384.300.000,00 | BOS | | 427,00 Orang | 384.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 175 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Terusan Mergan Raya No. 18, Kota Malang; | 198,00 Orang | 178.200.000,00 | BOS | | 198,00 Orang | 176.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 176 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri TANJUNGREJO 4 Malang, Jl. Gempol No. 18, Kota Malang; | 190,00 Orang | 171.000.000,00 | BOS | | 190,00 Orang | 171.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 177 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Mergan Lori III / 1 a Kecamatan Sukun, Kota Malang; | 276,00 Orang | 248.400.000,00 | BOS | | 276 | 248.400.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 178 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI PISANGCANDI 1 JL.SIMPANG RAYA LANGSEP NO 14 MALANG, Kota Malang; | 250,00 Orang | 225.000.000,00 | BOS | | 250,00 Orang | 225.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 179 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN PISANGCANDI 02, Jl. Pisang Agung III/8 Malang, Kota Malang; | 214,00 Orang | 192.600.000,00 | BOS | | 214,00 Orang | 191.700.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 180 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri PISANGCANDI 03, JL. GUNUNG AGUNG NO 2 KEC. SUKUN KOTA MALANG, Kota Malang; | 101,00 Orang | 108.000.000,00 | BOS | | 101,00 Orang | 108.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 181 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Pisangcandi 04, Jl. Simpang Leuser No 7, Kota Malang; | 106,00 Orang | 108.000.000,00 | BOS | | 106,00 Orang | 94.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 182 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Raya Candi III No. 1 Kec. Sukun, Kota Malang; | 182,00 Orang | 163.800.000,00 | BOS | | 182,00 Orang | 161.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 183 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Candi V A No. 389 Karangbesuki Kec. Sukun, Kota Malang; | 175,00 Orang | 157.500.000,00 | BOS | | 175,00 Orang | 156.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 184 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Candi VI No. 110 Karangbesuki Kec. Sukun, Kota Malang; | 222,00 Orang | 199.800.000,00 | BOS | | 222,00 Orang | 197.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 185 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. CANDI III F / NO.256 KARANGBESUKI, KEC. SUKUN, Kota Malang; | 156,00 Orang | 140.400.000,00 | BOS | | 156,00 Orang | 139.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 186 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN BANDULAN 1, Jln. Bandulan IC / 07 Kelurahan Bandulan Kec. Sukun, Kota Malang, Kota Malang; | 194,00 Orang | 174.600.000,00 | BOS | | 194 | 174.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 187 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN BANDULAN 2, Jl. Raya Bandulan No.198, no. tlp. (0341) 581373, Kota Malang; | 285,00 Orang | 256.500.000,00 | BOS | | 284 | 256.500.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 188 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD Negeri Bandulan 03, Jl. Bandulan IX/ 593 Malang, Kota Malang; | 252,00 Orang | 226.800.000,00 | BOS | | 252,00 Orang | 225.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 189 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Bandulan Gg VIII BII / 31, Kota Malang; | 212,00 Orang | 190.800.000,00 | BOS | | 212 | 190.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 190 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | JL. Bandulan baru no. 251a Bandulan, Sukun, Kota Malang; | 183,00 Orang | 164.700.000,00 | BOS | | 194 | 164.700.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 191 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOUREJO 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Pahlawan No. 15, Mulyorejo, Sukun Kota Malang, Kota Malang; | 301,00 Orang | 270.900.000,00 | BOS | | 301,00 Orang | 270.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 192 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOUREJO 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Malang; | 360,00 Orang | 324.000.000,00 | BOS | | 360,00 Orang | 324.000.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 193 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOUREJO 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl.Raya Mulyorejo No.25 Mulyorejo Sukun Kota Malang, Kota Malang; | 433,00 Orang | 390.600.000,00 | BOS | | 433,00 Orang | 390.600.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 194 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Pelabuhan Bakahuni No. 199 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang , Kota Malang; | 491,00 Orang | 441.900.000,00 | BOS | | 491 | 441.900.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 195 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 02, Jl. Pelabuhan Ketapang No. 1, Kota Malang; | 357,00 Orang | 321.300.000,00 | BOS | | 357,00 Orang | 316.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 197 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMPN 2 MALANG, Jl. Prof. Moch. Yamin No. 60 Malang, Kota Malang; | 1.074,00 Orang | 1.372.140.000,00 | BOS | | 1.074,00 Orang | 1.353.240.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 202 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Lembayung Bumiayu Kota Malang, Kota Malang; | 797,00 Orang | 1.004.220.000,00 | BOS | | 797,00 Orang | 1.004.220.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 216 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMP NEgeri 21 Malang, Jalan Danau Tigi Sawojajar Malang, Kota Malang; | 817,00 Orang | 1.029.420.000,00 | BOS | | 817,00 Orang | 1.029.420.000,00 |
| | | | | | APM SD | | 106,15 % | | | | | |
| 1 | 01 | 27 | 004 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 01 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SDN Kiduldalem 1, Kota Malang; | 167,00 Orang | 150.300.000,00 | BOS | | 167,00 Orang | 150.300.000,00 |
| | | | | | APK SMP | | 105,25 % | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 198 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Dr. Cipto 20 Malang, Kota Malang; | 830,00 Orang | 1.045.800.000,00 | BOS | | 830,00 Orang | 1.045.800.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 199 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMP Negeri 4 Malang, Jalan Veteran 37 Malang, Kota Malang; | 891,00 Orang | 1.122.660.000,00 | BOS | | 891 siswa | 1.122.660.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 200 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. WR. Supratman No.12 Kota Malang, Kota Malang; | 863,00 Orang | 1.087.380.000,00 | Block Grant | | 869 | 1.087.380.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 201 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 06 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl Kawi 15 A Malang, Kota Malang; | 770,00 Orang | 970.200.000,00 | BOS | | 768 siswa | 970.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 203 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 08 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMP N 8 JL. Arjuno no. 19, Kota Malang; | 793,00 Orang | 999.180.000,00 | BOS | | 793,00 Orang | 999.180.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 204 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 09 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMPN 9 MALANG , JL. PROF. MOCH. YAMIN. VI/26 MALANG, Kota Malang; | 794,00 Orang | 1.000.440.000,00 | BOS | | 794 | 1.000.440.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 205 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMPN 10 MALANG, Jl. Mayjend Sungkono 57 Malang, Kota Malang; | 903,00 Orang | 1.137.780.000,00 | BOS | | 903 siswa | 1.137.780.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 206 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl Ikan Piranha Atas No. 185, Kota Malang; | 784,00 Orang | 987.840.000,00 | BOS | | 785 Siswa | 987.840.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 207 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMP NEGERI 12 MALANG, Jln. S. Supriyadi No. 49, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Kota Malang; | 721,00 Orang | 908.460.000,00 | Block Grant | | Jumlah Siswa 721 siswa | 908.460.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 208 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMP NEGERI 13 KOTA MALANG, Kota Malang; | 814,00 Orang | 1.025.640.000,00 | BOS | | 814 siswa | 1.025.640.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 209 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Teluk Bayur No. 2 Pandanwangi Kec. Blimbing Malang, Kota Malang; | 805,00 Orang | 1.014.300.000,00 | Block Grant | | 805,00 Orang | 1.014.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 210 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Bukit Dieng T/8 Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang; | 857,00 Orang | 1.079.820.000,00 | Block Grant | | 857,00 Orang | 1.160.460.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 211 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMPN 16 Malang, Jl. , Kota Malang; | 771,00 Orang | 971.460.000,00 | BOS | | 771 Peserta Didik | 971.460.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 212 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMP Negeri 17 Malang, Jl. Pelabuhan Tanjung Priok 170, Kota Malang; | 881,00 Orang | 1.110.060.000,00 | BOS | | 881 Siswa | 1.110.060.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 213 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMP NEGERI 18 KOTA MALANG, Kota Malang; | 838,00 Orang | 1.055.880.000,00 | BOS | | 838 siswa | 1.055.880.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 214 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Belitung No. 1 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang, Kota Malang; | 905,00 Orang | 1.140.300.000,00 | BOS | | Jumlah siswa 905 | 1.140.300.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 215 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | 1. Jl. R Tumenggung Suryo No. 38 Malang, Kota Malang; | 870,00 Orang | 1.096.200.000,00 | BOS | | 870,00 Orang | 1.096.200.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 217 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMP Negeri 22 Malang Jl. Eltari Villa Gunung Buring Kota Malang, Kota Malang; | 621,00 Orang | 782.460.000,00 | BOS | | 621,00 Orang | 782.460.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 218 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl Raya Tlogowaru Kedung Kandang, Kota Malang; | 693,00 Orang | 873.180.000,00 | BOS | | 693 siswa | 873.180.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 27 | 219 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMPN 24 Malang (Jl. Simpang LA Sucipto Gg Makam Pandanwangi Kota Malang), Kota Malang; | 687,00 Orang | 865.620.000,00 | BOS | | 687,00 Orang | 865.620.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 220 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP MERJOSARI | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | SMPN Satu Atap Merjosari, Kota Malang; | 384,00 Orang | 483.840.000,00 | Block Grant | | 384,00 Orang | 483.840.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 221 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jl. Ikan Gurami No. 36 Malang, Kota Malang; | 585,00 Orang | 737.100.000,00 | BOS | | 585,00 Orang | 737.100.000,00 |
| 1 | 01 | 27 | 222 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | Jalan Lesanpuro XII Nomor 248 Malang, Kota Malang; | 420,00 Orang | 529.200.000,00 | Block Grant | | 420,00 Orang | 532.980.000,00 |
| 1 | 01 | 28 | | Program Pembinaan Ketenagaan | Presentase Guru Tsertifikasi | | 91,55 % | 173.200.000,00 | | | | 888.598.000,00 |
| 1 | 01 | 28 | 001 | Fasilitasi pengembangan keprofesian Guru berbasis Komunitas (PKG) | Jumlah kajian yang dilakukan (kajian sebagai dasar penentuan rotasi) | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 5,00 Komunitas | 7.200.000,00 | Block Grant | | 5,00 Komunitas | 66.063.000,00 |
| 1 | 01 | 28 | 002 | Pembinaan dan fasilitasi pengembangan Karakter Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD | Jumlah Komunitas yang memperoleh fasilitasi pengembangan keprofesian guru | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 250,00 peserta | 15.000.000,00 | Block Grant | | 250,00 peserta | 15.000.000,00 |
| 1 | 01 | 28 | 006 | Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar berdasarkan kualifikasi dan kompetensi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 30.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 1 | 01 | 28 | 011 | Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pendidikan dasar | Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 50,00 peserta | 15.000.000,00 | Block Grant | | 50,00 peserta | 146.620.000,00 |
| | | | | | Presentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 | | 80,00 % | | | | | |
| 1 | 01 | 28 | 003 | Pembinaan lomba Penilik, tutor dan tenaga kependidikan beprestasi PAUD PNF | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD PNF yang memperoleh peningkatan kompetensi dan profesionalitas | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 3,00 peserta | 15.000.000,00 | Block Grant | | 3,00 peserta | 50.233.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01 | 28 | 005 | Fasilitasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD PNF | Jumlah Lembaga Madin | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 100,00 peserta | 11.000.000,00 | Block Grant | | 100,00 peserta | 105.370.000,00 |
| 1 | 01 | 28 | 007 | Fasilitasi pengembangan keprofesian Guru berbasis Komunitas (KKG dan MGMP) | Jumlah kajian yang dilakukan (kajian sebagai dasar penentuan rotasi) | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 20,00 Komunitas | 15.000.000,00 | Block Grant | | 20,00 Komunitas | 15.000.000,00 |
| 1 | 01 | 28 | 008 | Fasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar | Jumlah Komunitas yang memperoleh fasilitasi pengembangan keprofesian guru | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 45,00 peserta | 30.000.000,00 | Block Grant | | 45,00 peserta | 134.370.000,00 |
| 1 | 01 | 28 | 009 | Fasilitasi Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar memperoleh peningkatan kompetensi dan profesionalitas | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 100,00 peserta | 15.000.000,00 | Block Grant | | 100,00 peserta | 104.345.000,00 |
| 1 | 01 | 28 | 010 | Pembinaan Lomba Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 6,00 Prestasi | 20.000.000,00 | Block Grant | | 6,00 Prestasi | 231.597.000,00 |
| 1 | 22 | | | Kebudayaan | | | | 280.500.000,00 | | | | 1.270.500.000,00 |
| 1 | 22 | 15 | | Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | | 51,00 % | 280.500.000,00 | | | | 1.270.500.000,00 |
| 1 | 22 | 15 | 001 | Pengelolaan Sejarah dan Nilai Tradisi | Jumlah Kegiatan Sejarah dan Nilai Tradisi yang dikelola | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 14,00 Sejarah dan Nilai Tradisi | 3.500.000,00 | Block Grant | | 14,00 Sejarah dan Nilai Tradisi | 200.000.000,00 |
| 1 | 22 | 15 | 002 | Pembinaan dan pemberdayaan pelaku sejarah dan nilai tradisi | Jumlah Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dibina dan diberdayakan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Jl. Veteran No. 19, Kota Malang; | 50,00 Sejarawan dan Nilai Tradisi | 3.500.000,00 | Block Grant | | 50,00 Sejarawan dan Nilai Tradisi | 150.000.000,00 |
| 1 | 22 | 15 | 003 | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Veteran No. 19, Kota Malang; | 35,00 BCB | 5.000.000,00 | Block Grant | | 35,00 BCB | 400.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 22 | 15 | 004 | Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan museum | Jumlah pengunjung yang memanfaatkan museum | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Veteran No.19, Kota Malang; | 3.800,00 Pengunjung | 5.000.000,00 | Block Grant | | 3.800,00 Pengunjung | 200.000.000,00 |
| 1 | 22 | 15 | 006 | Penyediaan Sarana Prasarana Kebudayaan | Jumlah sarana prasarana yang difasilitasi/disediakan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Veteran No.19, Kota Malang; | 10,00 Komunitas Budaya | 200.000.000,00 | Block Grant | | 10,00 Komunitas Budaya | 67.000.000,00 |
| 1 | 22 | 15 | 007 | Diplomasi dan Promosi Budaya | Jumlah Seniman yang mengikuti diplomasi dan promosi budaya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Veteran No. 19, Kota Malang; | 150,00 Seniman | 15.000.000,00 | Block Grant | | 150,00 Seniman | 100.000.000,00 |
| 1 | 22 | 15 | 008 | Fasilitasi partisipasi masyarakat, seniman dan budayawan | Jumlah kegiatan masyarakat, seniman dan budayawan yang difasilitasi | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 10,00 Fasilitasi | 3.500.000,00 | Block Grant | | 10,00 Fasilitasi | 3.500.000,00 |
| 1 | 22 | 15 | 009 | Pembinaan, Pemberdayaan dan Apresiasi Pelaku Seni Budaya | Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dibina , diberdayakan dan diapresiasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Veteran No. 19, Kota Malang; | 50,00 Seniman | 15.000.000,00 | Block Grant | | 50,00 Seniman | 50.000.000,00 |
| 1 | 22 | 15 | 010 | Pergelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru | Jumlah Pergelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Veteran No.19, Kota Malang; | 3,00 Pergelaran | 30.000.000,00 | Block Grant | | 3,00 Pergelaran | 100.000.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 1.460.193.449,00 | | | | 5.819.795.000,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 1.460.193.449,00 | | | | 5.819.795.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 1.460.193.449,00 | | | | 5.819.795.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 001 | Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi | Jumlah sistem informasi/aplikasi | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 4,00 Aplikasi | 10.000.000,00 | Block Grant | | 4,00 Aplikasi | 10.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 002 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Kota Malang; | 30,00 Dokumen | 7.200.000,00 | Block Grant | | 30,00 Dokumen | 7.200.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 7.200.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 7.200.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Jl. Veteran 19 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 95.670.000,00 | Block Grant | | 2,00 Dokumen | 290.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 005 | Penyusunan bahan Anjab/ABK | Jumlah bahan anjab/abk skpd | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 7.200.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 7.200.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 006 | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 5.000.000,00 | Block Grant | | 3,00 kegiatan | 5.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 008 | Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) | Jumlah ZI | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 7.200.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 7.200.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 7.200.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 7.200.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 20.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 20.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 014 | Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI) | Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI) | Jl. Veteran 19, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 50.000.000,00 | Block Grant | | 2,00 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 015 | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Kota Malang; | 1.000,00 Dokumen | 5.000.000,00 | Block Grant | | 1.000,00 Dokumen | 5.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 gedung | 10.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 gedung | 10.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 019 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | Jl. Vetaran 19 Malang, Kota Malang; | 2,00 Unit | 25.000.000,00 | Block Grant | | 2,00 Unit | 25.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Veteran No. 19, Kota Malang; | 67,00 Unit | 20.000.000,00 | Block Grant | | 67,00 Unit | 280.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Veteran No. 19, Kota Malang; | 11,00 Perlatan | 20.000.000,00 | Block Grant | | 11,00 Perlatan | 80.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 028 | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi | Jumlah jaringan telekomunikasi | Jl. Veteran no. 19, Kota Malang; | 4,00 Unit | 10.000.000,00 | Block Grant | | 4,00 Unit | 50.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 029 | Pemeliharaan taman perkantoran | Jumlah taman yang dipelihara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Taman | 1.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Taman | 1.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Veteran No. 19, Kota Malang; | 175.668,00 Surat | 2.500.000,00 | Block Grant | | 175.668,00 Surat | 2.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. Veteran No. 19, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 350.000.000,00 | Block Grant | | 12,00 Bulan | 920.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 034 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Jl. Veteran No. 19, Kota Malang; | 19,00 Aset | 25.000.000,00 | Block Grant | | 19,00 Aset | 165.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 035 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jl. Veteran No. 19, Kota Malang; | 69,00 Unit | 65.000.000,00 | Block Grant | | 69,00 Unit | 65.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Veteran No. 19, Kota Malang; | 5,00 lokasi | 75.000.000,00 | Block Grant | | 5,00 lokasi | 563.590.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Kota Malang; | 111,00 ATK | 50.000.000,00 | Block Grant | | 111,00 ATK | 50.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Kota Malang; | 57.845,00 Cetakan | 10.000.000,00 | Block Grant | | 57.845,00 Cetakan | 10.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. veteran no. 19, Kota Malang; | 12,00 Komponen | 2.000.000,00 | Block Grant | | 12,00 Komponen | 2.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 041 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Kota Malang; | 10,00 Perlatan | 500.000,00 | Block Grant | | 10,00 Perlatan | 500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl veteran no 19, Kota Malang; | 300,00 eksemplar | 5.000.000,00 | Block Grant | | 300,00 eksemplar | 33.550.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | jl veteran no 19, Kota Malang; | 95.883,00 Kotak | 188.000.000,00 | Block Grant | | 95.883,00 Kotak | 188.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | jl veteran no 19, Kota Malang; | 795,00 Perjalanan Dinas | 50.000.000,00 | Block Grant | | 795,00 Perjalanan Dinas | 1.008.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 045 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | jl veteran no 19, Kota Malang; | 12,00 Orang | 144.000.000,00 | Block Grant | | 12,00 Orang | 288.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 047 | Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi | Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 74,00 Publikasi | 5.000.000,00 | Block Grant | | 74,00 Publikasi | 5.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 048 | Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas | Jumlah tamu-tamu dinas | Jl. Veteran no 19 , Kota Malang; | 1.250,00 tamu | 5.000.000,00 | Block Grant | | 1.250,00 tamu | 150.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 5.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 kegiatan | 5.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 051 | Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 15.000.000,00 | Block Grant | | 3,00 kegiatan | 15.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 053 | Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas | Jumlah pengemudi/supir dinas | jl veteran no 19, Kota Malang; | 22,00 Pengemudi | 35.280.000,00 | Block Grant | | 22,00 Pengemudi | 705.155.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 058 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jl. Vetaran 19, Kota Malang; | 1,00 gedung | 0,00 | Block Grant | | 1,00 gedung | 0,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jl. Veteran No. 19 Malang, Kota Malang; | 45,00 Unit | 20.000.000,00 | Block Grant | | 45,00 Unit | 20.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 066 | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Jl. Veteran no 19 , Kota Malang; | 94.662,00 Liter | 75.000.000,00 | Block Grant | | 94.662,00 Liter | 725.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. Veteran no 19 , Kota Malang; | 109,00 Aparatur | 5.243.449,00 | Block Grant | | 109,00 Aparatur | 16.500.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 182.109.752.000,00 | | | | 237.560.870.112,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 182.109.752.000,00 | | | | 237.560.870.112,00 |
| 1 | 02 | | | Kesehatan | | | | 177.242.982.550,00 | | | | 231.602.812.562,00 |
| 1 | 02 | 49 | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Presentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM | | 100,00 % | 94.258.380.000,00 | | | | 124.819.358.250,00 |
| 1 | 02 | 49 | 001 | Penguatan manajemen Puskesmas | Jumlah puskesmas yang mengikuti kegiatan penguatan manajemen puskesmas | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 16,00 Puskesmas | 130.910.000,00 | Block Grant | - | 16 puskesmas | 153.250.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 003 | Reakreditasi puskesmas | Jumlah puskesmas yang mengikuti reaktreditasi puskesmas | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Puskesmas | 22.280.000,00 | Block Grant | - | 4 puskesmas | 89.120.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 005 | Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Kota Malang (Pajak Rokok) | Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 15.255,00 Orang | 7.688.520.000,00 | Pajak Rokok | - | 15.255 orang | 7.688.520.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 007 | Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan | Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan primer kepada peserta jaminan kesehatan nasional | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 16,00 FKTP | 91.568.000,00 | Block Grant | - | 16 FKTP | 96.482.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 011 | Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 25,00 Fasyankes | 177.582.000,00 | Block Grant | - | 26 RS | 198.882.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 013 | Penguatan dan Operasional Publik Safety Center | Jumlah pelayanan PSC yang diberikan pada masyarakat | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 96,00 Kali | 1.427.980.000,00 | Block Grant | - | 96 pelayanan | 851.869.200,00 |
| 1 | 02 | 49 | 014 | Pembinaan dan Penilaian Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Ketrampilan | Jumlah peserta pemanfaatan tanaman obat keluarga dan ketrampilan | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 48,00 Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA | 22.440.000,00 | Block Grant | - | 50 orang | 22.440.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 015 | Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional | Jumlah penyehat tradisional yang dibina, diawasi dan dievaluasi. | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 200,00 Penyehat Tradisional | 11.100.000,00 | Block Grant | - | 141 orang | 11.100.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 02 | 49 | 016 | Operasional Puskesmas Kedungkandang | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Kedungkandang , Jl. Ki Ageng Gribig No.142,242 Malang., Kota Malang; | 12,00 Bulan | 376.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 50.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 017 | Operasional Puskesmas Kendalsari | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Kendalsari, Jl. CenggerAyam 1/8 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 376.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 75.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 018 | Operasional Puskesmas Arjuno | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Arjuno , Jl Simpang Arjuno No. 17 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 168.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 019 | Operasional Puskesmas Bareng | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Bareng , Jl Bareng Tenes IV A /639 Malang., Kota Malang; | 12,00 Bulan | 168.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 020 | Operasional Puskesmas Pandanwangi | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Pandanwangi, Jl. L.A Sucipto No. 315 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 168.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 75.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 021 | Operasional Puskesmas Cisadea | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Pusat Kesehatan Masyarakat Cisadea, Jalan Cisadea No. 19 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 168.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 022 | Operasional Puskesmas Kendalkerep | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Kendalkerep , Jl Sulfat No.100 Malang., Kota Malang; | 12,00 Bulan | 376.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 50.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 023 | Operasional Puskesmas Mojolangu | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PuskesmasMojolangu; jl.Sudimoro no 17 A Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 168.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 168.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 02 | 49 | 024 | Operasional Puskesmas Dinoyo | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Dinoyo , Jl. MT Haryono IX / 13 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 376.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 50.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 025 | Operasional Puskesmas Janti | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Janti Jl. Janti Barat No. 88 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 168.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 50.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 026 | Operasional Puskesmas Ciptomulyo | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Ciptomulyo, Jl Kol. Sugiono VIII/54 Malang. , Kota Malang; | 12,00 Bulan | 168.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 027 | Operasional Puskesmas Mulyorejo | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Mulyorejo , Jl Budi Utomo 11 A Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 376.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 028 | Operasional Puskesmas Arjowinangun | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Arjowinangun , Jl Raya Arjowinangun No.2., Kota Malang; | 12,00 Bulan | 168.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 75.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 029 | Operasional Puskesmas Gribig | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Gribig , Jl. Ki Ageng Gribig No. 97 Madyopuro Malang , Kota Malang; | 12,00 Bulan | 168.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 49 | 030 | Operasional Puskesmas Polowijen | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Polowijen , jl.Panji Suroso no.09 Malang , Kota Malang; | 12,00 Bulan | 626.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 164.999.050,00 |
| 1 | 02 | 49 | 031 | Operasional Puskesmas Rampal Celaket | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Rampal Celaket Jl Rampal Celaket No.19 Malang., Kota Malang; | 12,00 Bulan | 168.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 100.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Cakupan Penduduk yang Terjamin Asuransi Kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat | | 100,00 % | | | | | |
| 1 | 02 | 49 | 006 | Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Kota Malang | Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 226.674,00 Orang | 80.500.000.000,00 | Block Grant | - | 230000orang | 114.249.696.000,00 |
| 1 | 02 | 51 | | Program BLUD Puskesmas | Persentase Puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | 100,00 % | 22.956.487.250,00 | | - | | 34.020.363.362,00 |
| 1 | 02 | 51 | 001 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kendal Kerep | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Kendalkerep , Jln. Sulfat No. 100 Malang., Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.726.138.100,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 1.727.000.000,00 |
| 1 | 02 | 51 | 002 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Pandanwangi | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Pandanwangi, Jl. L.ASucipto No. 315 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.514.111.550,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 1.589.817.127,00 |
| 1 | 02 | 51 | 003 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kedung kandang | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Kedungkandang , Jl.Ki Ageng Gribig No.142,242 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 2.215.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 2.215.000.000,00 |
| 1 | 02 | 51 | 004 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Gribig | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Gribig , Jl. Ki Ageng Gribig No. 97 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.054.669.800,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 1.069.726.100,00 |
| 1 | 02 | 51 | 005 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Arjowinangun | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Arjowinangun , Jl Raya Arjowinangun No.2, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.769.120.900,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 2.034.489.035,00 |
| 1 | 02 | 51 | 006 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Janti | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Janti Jl. Janti Barat No. 88 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 2.100.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 2.200.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 02 | 51 | 007 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Ciptomulyo | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Ciptomulyo Jln. Kolonel Sugiono Gang VIII/54 Malang. , Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.421.662.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 1.563.828.200,00 |
| 1 | 02 | 51 | 008 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Mulyorejo | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Mulyorejo Jl. Budi Utomo 11A Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.471.349.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 11.912.753.000,00 |
| 1 | 02 | 51 | 009 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Dinoyo | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Dinoyo , Jl. MT Haryono IX / 13 Malang , Kota Malang; | 12,00 Bulan | 2.000.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 2.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 51 | 010 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Mojolangu | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Mojolangu; jl.Sudimoro no 17 A Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.026.299.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 1.026.299.000,00 |
| 1 | 02 | 51 | 011 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Arjuno | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Arjuno , Jl Simpang Arjuno No. 17 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.172.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 1.172.000.000,00 |
| 1 | 02 | 51 | 012 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Bareng | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Bareng , Jln. Bareng Tenes IV A/639 Malang. , Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.124.716.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 1.148.000.000,00 |
| 1 | 02 | 51 | 013 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Rampal Celaket | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Rampal Celaket Jln. Rampal Celaket No. 19 Malang., Kota Malang; | 12,00 Bulan | 839.124.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 839.124.000,00 |
| 1 | 02 | 51 | 014 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Cisadea | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Cisadea, Jl. Cisadea No. 19 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.024.148.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 1.024.178.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 02 | 51 | 015 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kendalsari | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Puskesmas Kendalsari Jl. Cengger Ayam 1/8 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.551.148.900,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 1.551.148.900,00 |
| 1 | 02 | 51 | 016 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Polowijen | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PuskesmasPolowijen , jl.Panji Suroso no.09 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 947.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 947.000.000,00 |
| 1 | 02 | 43 | | Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah | NDR (Net Death Ret) | | 2,00 % | 21.628.708.000,00 | | - | | 26.172.487.950,00 |
| 1 | 02 | 43 | 001 | Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan | Jumlah pengadaan pelayanan kesehatan | RSUD Kota Malang, Jl. Rajasa, Kota Malang; | 7,00 Akreditasi NSARS | 1.407.408.000,00 | Block Grant | - | 30 jenis alkes | 3.253.728.500,00 |
| 1 | 02 | 43 | 002 | Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan | Jumlah pengadaan sarana penunjang pelayanan kesehatan | RSUD Kota Malang, jl. Rajasa, Kota Malang; | 10,00 Jenis | 6.250.000.000,00 | Block Grant | - | 8 jenis | 8.443.574.700,00 |
| 1 | 02 | 43 | 003 | Operasional Rumah Sakit | Operasional RSUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD | RSUD Kota Malang, Jl. Rajasa, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 13.971.300.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 12.975.184.750,00 |
| 1 | 02 | 43 | 004 | Rehabilitasi sedang/berat rumah sakit | Jumlah gedung yang terehabilitasi | RSUD Kota Malang, Jl. Rajasa, Kota Malang; | 1,00 gedung | 0,00 | Block Grant | - | 1 gedung | 1.500.000.000,00 |
| 1 | 02 | 52 | | Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah | BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD | | 35,00 % | 10.000.000.000,00 | | - | | 17.500.000.000,00 |
| 1 | 02 | 52 | 001 | Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD RSUD | Operasional RSUD BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD | RSUD Kota Malang, Jl. Rajasa, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 10.000.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 17.500.000.000,00 |
| 1 | 02 | 50 | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan | Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat | | 100,00 % | 12.696.032.000,00 | | - | | 13.364.244.000,00 |
| | | | | | Persentase gedung fasilitas pelayanan kesehatan dalam kondisi baik | | 100,00 % | | | - | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 02 | 50 | 002 | Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja | - | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 26.516,00 Orang | 12.696.032.000,00 | DBH CHT | - | 26.516 orang | 13.364.244.000,00 |
| 1 | 02 | 53 | | Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | 100,00 % | 1.368.160.000,00 | | - | | 1.395.870.000,00 |
| 1 | 02 | 53 | 004 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Jumlah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat yang dilayani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 382,00 Orang | 129.380.000,00 | Pajak Rokok | - | 382 orang | 129.380.000,00 |
| 1 | 02 | 53 | 005 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) | Jumlah Orang dengan Tuberkulosis (TB) yang dilayani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 2.660,00 Orang | 210.950.000,00 | Pajak Rokok | - | 2660 orang | 214.315.000,00 |
| 1 | 02 | 53 | 006 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang dilayani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 1.833,00 Orang | 181.110.000,00 | Pajak Rokok | - | 1833 orang | 201.935.000,00 |
| 1 | 02 | 53 | 001 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah usia produktif yang dilayani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 478,00 Orang | 107.320.000,00 | Pajak Rokok | - | 478 orang | 107.320.000,00 |
| 1 | 02 | 53 | 007 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | Jumlah Orang dengan resiko penyakit manular | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 15.168,00 Orang | 82.740.000,00 | Pajak Rokok | - | 15168 orang | 86.260.000,00 |
| 1 | 02 | 53 | 008 | Pelayanan imunisasi | Jumlah sasaran vaksinasi balita dan anak sekolah | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 70.213,00 Bayi | 201.500.000,00 | Pajak Rokok | - | 70213 bayi/anak | 201.500.000,00 |
| 1 | 02 | 53 | 009 | Pelayanan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah | Jumlah KLB yang ditangani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 24,00 kasus | 219.830.000,00 | Pajak Rokok | - | 24 kasus | 219.830.000,00 |
| | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | 100,00 % | | | - | | |
| 1 | 02 | 53 | 002 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah penderita hipertensi yang dilayani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 311,00 Orang | 121.560.000,00 | Pajak Rokok | - | 311 orang | 121.560.000,00 |
| | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | | 100,00 % | | | - | | |
| 1 | 02 | 53 | 003 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) yang dilayani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 197,00 Orang | 113.770.000,00 | Pajak Rokok | - | 197 orang | 113.770.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 02 | 54 | | Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Angka Kematian Ibu | | 51,61 | 10.999.597.300,00 | | - | | 10.788.613.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 001 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu hamil yang dilayani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 13.209,00 Orang | 185.190.000,00 | Pajak Rokok | - | 13.209 orang | 47.000.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 002 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Bersalin yang dilayani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 12.432,00 Orang | 39.390.000,00 | Pajak Rokok | - | 12.608 orang | 40.880.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 004 | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang dilayani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 46.569,00 Balita | 66.250.000,00 | Pajak Rokok | - | 59.322 balita | 66.250.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 006 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Usia lanjut yang dilayani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 85.904,00 Orang | 87.995.000,00 | Pajak Rokok | - | 85.904 orang | 92.250.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 008 | Fasilitasi pelaksanaan program kota sehat | Jumlah peserta pertemuan pokja kecamatan dan kelurahan sehat | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 300,00 Orang | 50.760.000,00 | Pajak Rokok | - | 100 orang | 28.280.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 009 | Pengembangan lingkungan sehat | Jumlah penjamah makanan pada tempat pengelolaan makanan (TPM) ; Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat : | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 240,00 Orang Penjamah Makanan | 101.260.000,00 | Block Grant | - | 160 orang penjamah makanan | 72.240.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 010 | Pembentukan, pemantapan dan fasilitasi tim K3 puskesmas | Jumlah peserta pembinaan Tim K3 puskesmas dan bimtek kelompok industri RT | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 30,00 Orang | 32.135.000,00 | Block Grant | - | 30 orang | 29.335.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 011 | Promosi kesehatan | Jumlah promosi kesehatan melalui media untuk pemberdayaan masyarakat | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 40,00 Media | 182.580.000,00 | Pajak Rokok | - | 40 media | 211.508.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 012 | Pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan siaga | Jumlah kelurahan siaga aktif | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 57,00 Kelurahan | 18.200.000,00 | Block Grant | - | 57 kelurahan | 78.600.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 013 | Pemberdayaan Masyarakat dengan Posyandu | Jumlah Posyandu strata purnama mandiri | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 378,00 Posyandu | 53.180.000,00 | Block Grant | - | 378 posyandu | 70.540.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 02 | 54 | 014 | Pemberdayaan masyarakat dengan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya | Jumlah Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Posyandu Lansia dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) mandiri | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 57,00 SBH | 45.200.000,00 | Block Grant | - | 1 SBH, 15 poskestren, 57 posyandu lansia, 16 pos UKK | 76.900.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 015 | Pengukuran kebugaran jasmani | Jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 405,00 Orang | 171.760.000,00 | Block Grant | - | 500 orang | 186.410.000,00 |
| | | | | | Angka Kematian Bayi | | 6,02 | | | - | | |
| 1 | 02 | 54 | 003 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi baru lahir yang dilayani | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 11.840,00 Bayi | 22.995.000,00 | Pajak Rokok | - | 12.008 bayi | 31.230.000,00 |
| 1 | 02 | 54 | 016 | Operasional Laboratorium Kesehatan | Operasional Laboratorium Kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat | UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Jl. Karya Timur No. 10 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 650.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 750.000.000,00 |
| | | | | | Persentase Balita Stunting | | 24,00 % | | | - | | |
| 1 | 02 | 54 | 007 | Pelayan Kesehatan dan Gizi | Jumlah Pengadaan PMT | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 3.600,00 Posyandu | 9.292.702.300,00 | Block Grant | - | 3600 kotak PMT | 9.007.190.000,00 |
| 1 | 02 | 55 | | Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Persentase Tenaga Medis Yang Berkompeten | | 87,00 % | 831.650.000,00 | | - | | 906.120.000,00 |
| 1 | 02 | 55 | 006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang yang ditingkatkan kemampuannya | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 90,00 Orang | 308.040.000,00 | Block Grant | - | 90 orang | 288.030.000,00 |
| 1 | 02 | 55 | 009 | Peningkatan Kapasitas Petugas Alkes Puskesmas dan Tenaga Aspak | Jumlah petugas pengelola alkes dan petugas ASPAK yang dilatih | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 29.820.000,00 | Block Grant | - | 100 orang | 95.020.000,00 |
| | | | | | Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan Dan Obat-Obatan Sesuai Standar | | 100,00 % | | | - | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 02 | 55 | 001 | Perencanaan, pengadaan, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan | Jumlah peserta bimtek pemakaian obat rasional dan bimtek pengelolaan obat | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 110,00 Orang | 70.560.000,00 | Block Grant | - | 100 orang | 86.400.000,00 |
| 1 | 02 | 55 | 002 | Pengawasan, Pembinaan Kefarmasian | Jumlah sarana farmasi, sarana obat tradisional, pengelola jamu yang dibina dan diawasi. | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Sarana Farmasi | 182.080.000,00 | Block Grant | - | 100 sarana farmasi, 20 sarana obat tradisional | 182.080.000,00 |
| 1 | 02 | 55 | 003 | Pengawasan, Pembinaan Keamanan Pangan | Jumlah sarana pangan yang dibina dan diawasi | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 300,00 Sarana IRTP | 241.150.000,00 | Block Grant | - | 300 sarana pangan | 254.590.000,00 |
| 1 | 02 | 56 | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan | Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar | | 100,00 % | 2.503.968.000,00 | | - | | 2.635.756.000,00 |
| 1 | 02 | 56 | 002 | Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan serta kalibrasi alat kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu | Pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu ; kalibrasi alat kesehatan | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Jenis | 470.935.000,00 | DBH CHT | - | 2 paket | 472.385.000,00 |
| 1 | 02 | 56 | 003 | Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas | Jumlah Obat obatan, reagen, dan bahan medis habis pakai (BMHP) Puskesmas | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 Item | 2.033.033.000,00 | DBH CHT | - | 3 paket | 2.163.371.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 4.866.769.450,00 | | - | | 5.958.057.550,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 4.866.769.450,00 | | - | | 5.958.057.550,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 4.866.769.450,00 | | - | | 5.958.057.550,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 330.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 330.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 1.100,00 m2 | 419.710.000,00 | Block Grant | - | 1.100 m2 | 409.310.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 40,00 Item | 23.000.000,00 | Block Grant | - | 40 jenis | 23.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Surat Kabar | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 2 surat kabar | 5.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Item | 30.900.000,00 | Block Grant | - | 36 item | 308.506.167,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 167,00 Orang | 120.420.000,00 | Block Grant | - | 167 orang | 128.300.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 001 | Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi | Jumlah sistem informasi/aplikasi | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Aplikasi | 68.876.000,00 | Block Grant | - | 1 aplikasi | 68.876.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 laporan | 278.960.000,00 | Block Grant | - | 5 dokumen | 278.960.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 53.750.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 53.750.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 51,00 Unit | 78.500.000,00 | Block Grant | - | 51 jenis | 56.250.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 002 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 293.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 293.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 034 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 kendaraan | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 2 kendaraan | 15.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 035 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 94,00 kendaraan | 66.000.000,00 | Block Grant | - | 94 kendaraan | 66.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 041 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 21,00 Item | 28.684.000,00 | Block Grant | - | 21 jenis | 38.800.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | 100,00 % | | | - | | |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 500,00 gedung | 299.700.000,00 | Block Grant | - | 500m2 | 199.700.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 28,00 Unit | 351.404.000,00 | Block Grant | - | 28 kendaraan | 331.474.000,00 |
| | | | | | Nilai survey kepuasan internal | | 80,00 | | | - | | |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 29,00 Item | 337.928.400,00 | Block Grant | - | 29 item | 509.213.883,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 8,00 Item | 468.906.050,00 | Block Grant | - | 120 jenis | 495.338.900,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 34.136,00 Kotak | 449.249.000,00 | Block Grant | - | 34.136 nasi kotak/air mineral/snack | 439.020.400,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Dinas Kesehatan Kota Malang, Kota Malang; | 142,00 Kali | 1.147.782.000,00 | Block Grant | - | 142 kali | 1.908.558.200,00 |
| | | | | | | | | | | - | | |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|------|------|------|------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | Belanja Langsung | | | 197.225.185.000,00 | | | | 420.547.261.021,25 | |
| 1 | | | | | Urusan Wajib | | | 187.676.850.800,00 | | | | 407.191.361.021,25 | |
| 1 | 03 | | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 175.234.900.800,00 | | | | 387.286.751.021,25 | |
| 1 | 03 | 59 | | | Program Bina Marga | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | | 130.584.537.000,00 | | | | 173.359.210.000,00 | |
| 1 | 03 | 59 | 001 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jalan di Kota Malang | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap | -, Kota Malang; | 10,00 Km | 26.646.187.000,00 | Block Grant | - | 25 km | 41.250.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 002 | | Pembangunan/ Rehabilitasi jalan Paving Kota Malang | Panjang Jalan Paving yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | Kota Malang, Kota Malang; | 8,00 Km | 2.753.280.000,00 | Block Grant | - | 10 km | 5.500.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 003 | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin | -, Kota Malang; | 10,00 Km | 5.234.340.000,00 | Block Grant | - | 20 km | 6.600.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 004 | | Pemeliharaan Insidentil Jalan | Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Insidentil | -, Kota Malang; | 20,00 Km | 2.903.800.000,00 | Block Grant | - | 28 km | 5.500.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 005 | | Perencanaan Infrastruktur Jalan dan Pedestrian di Kota Malang | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jalan dan pedestrian | -, Kota Malang; | 22,00 Dokumen | 828.210.000,00 | Block Grant | - | 44 dokumen | 2.400.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 020 | | Peningkatan Pelayanan Persewaan Alat Berat | Jumlah Pelayanan Persewaan Alat Berat | -, Kota Malang; | 20,00 Kali | 421.570.000,00 | Block Grant | - | 22 kali | 400.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 021 | | Peningkatan Pelayanan Laboratorium Uji Mutu Bahan | Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi | Kota Malang dan sekitarnya, Kota Malang; | 80,00 Kali | 146.070.000,00 | Block Grant | - | 80 kali | 100.000.000,00 |
| | | | | | Persentase Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik | | | 97,27 % | | | | | |
| 1 | 03 | 59 | 008 | | Pembangunan/ Rehabilitasi/Pengembangan Jembatan di Kota Malang | Persentase jembatan kota dalam kondisi baik | -, Kota Malang; | 2,00 lokasi | 3.000.000.000,00 | Block Grant | - | 3 lokasi | 11.000.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 009 | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan | -, Kota Malang; | 12,00 lokasi | 2.148.660.000,00 | Block Grant | - | 10 lokasi | 2.200.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 010 | | Pemeliharaan Insidentil jembatan | Jumlah lokasi Pemeliharaan Insidentil jembatan | -, Kota Malang; | 10,00 lokasi | 1.500.000.000,00 | Block Grant | - | 5 lokasi | 1.650.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 03 | 59 | 011 | Perencanaan Infrastruktur Jembatan di Kota Malang | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jembatan | -, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 101.020.000,00 | Block Grant | - | 4 dokumen | 550.000.000,00 |
| | | | | | Persentase Fasilitas Penerangan Jalan | | 78,15 % | | | | | |
| 1 | 03 | 59 | 022 | Perencanaan Penerangan jalan | Dokumen perencanaan yang tersusun | Pemerintah Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 126.730.000,00 | Block Grant | - | 5 Dokumen | 152.269.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 023 | Pembangunan Penerangan Jalan | Titik penerangan jalan Kota Malang yang terbangun | Pemerintah Kota Malang, Kota Malang; | 2.500,00 Titik | 17.219.650.000,00 | Block Grant | - | 4.200 titik | 17.065.804.910,00 |
| 1 | 03 | 59 | 024 | Pemeliharaan Penerangan Jalan | Titik Penerangan Jalan yang terpelihara | Pemerintah Kota Malang, Kota Malang; | 1.808,00 Titik | 36.296.720.000,00 | Block Grant | - | 27.600 Titik | 42.345.195.090,00 |
| | | | | | Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik | | 83,51 % | | | | | |
| 1 | 03 | 59 | 012 | Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Malang | Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang direhabilitasi/ dikembangkan | Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 Km | 7.420.580.000,00 | Block Grant | - | 9 km | 9.500.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 013 | Pemeliharaan Rutin Drainase | Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang di lakukan Pemeliharaan Rutin | Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Km | 4.036.820.000,00 | Block Grant | - | 3 km | 4.763.325.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 014 | Pemeliharaan Insidental Drainase | Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang di lakukan Pemeliharaan Insidental | -, Kota Malang; | 4,00 Km | 2.935.420.000,00 | Block Grant | - | 4 km | 5.287.616.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 015 | Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase di Kota Malang | Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 691.040.000,00 | Block Grant | - | 20 dokumen | 1.430.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 016 | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Titik Genangan air yang tertangani | Kota Malang, Kota Malang; | 7,00 Titik | 4.411.370.000,00 | Block Grant | - | 6 titik | 5.000.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 017 | Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang | Titik Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong | Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Titik | 881.690.000,00 | Block Grant | - | 3 titik | 1.650.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|---|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 03 | 59 | 018 | Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang | Titik Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/ Bronjong | Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Titik | 527.310.000,00 | Block Grant | - | 3 titik | 1.100.000.000,00 |
| | | | | | Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik | | 100,00 % | | | | | |
| 1 | 03 | 59 | 019 | Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya | Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 lokasi | 2.944.080.000,00 | Block Grant | - | 2 lokasi | 115.000.000,00 |
| | | | | | Persentase Jalan Yang Memiliki Jalur Pejalan Kaki | | 91,53 % | | | | | |
| 1 | 03 | 59 | 006 | Pembangunan Pedestrian di Kota Malang | Panjang Pedestrian yang direhabilitasi/ dikembangkan | -, Kota Malang; | 2,00 lokasi | 5.129.320.000,00 | Block Grant | - | 2 lokasi | 3.300.000.000,00 |
| 1 | 03 | 59 | 007 | Rehabilitasi/Pengembangan Pedestrian di Kota Malang | Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki | -, Kota Malang; | 1,85 % | 2.280.670.000,00 | Block Grant | - | 2 lokasi | 4.500.000.000,00 |
| 1 | 03 | 60 | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur Jalan | Persentase jalan dalam kondisi baik | | 92,41 % | 10.112.897.000,00 | | | | 11.957.556.000,00 |
| 1 | 03 | 60 | 001 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DBHCHT) | Panjang Jalan yang direhabilitasi/ dilakukan Pengembangan | -, Kota Malang; | 5,00 Km | 10.112.897.000,00 | Block Grant | - | 5 km | 11.957.556.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | | Program Cipta Karya | Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | 100,00 % | 31.167.500.000,00 | | | | 197.857.834.921,25 |
| 1 | 03 | 61 | 020 | Sosialisasi SLF | Jumlah peserta kegiatan sosialisasi SLF | -, Kota Malang; | 150,00 Orang | 148.936.000,00 | Block Grant | - | 150 orang | 173.643.750,00 |
| 1 | 03 | 61 | 022 | Pendataan Bangunan Gedung | Jumlah Data Bangunan Gedung | -, Kota Malang; | 4.000,00 data | 210.000.000,00 | Block Grant | - | 4000 data | 231.525.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 023 | Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Rekomendasi IMB | Jumlah pelaksanaan fasilitasi TABG | -, Kota Malang; | 6,00 Pelaksanaan | 273.120.000,00 | Block Grant | - | 6 Pelaksanaan | 174.998.171,25 |
| 1 | 03 | 61 | 024 | Pemberdayaan Bina Jasa Kontruksi | Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | -, Kota Malang; | 200,00 Orang | 135.840.000,00 | Block Grant | - | 200 orang | 34.864.192.125,00 |
| 1 | 03 | 61 | 026 | Penyusunan HSPK Dinas PUPR | Jumlah Dokumen HSPK | -, Kota Malang; | 3,00 Dokumen | 250.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 231.525.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 03 | 61 | 027 | Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota | Jumlah data Badan Usaha yang terfasilitasi | -, Kota Malang; | 25,00 Badan Usaha | 186.270.000,00 | Block Grant | - | 50 badan usaha | 260.465.625,00 |
| 1 | 03 | 61 | 028 | Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi | -, Kota Malang; | 60,00 Orang | 342.335.000,00 | Block Grant | - | 60 orang | 416.745.000,00 |
| | | | | | Persentase Pembangunan Kawasan Prioritas Sesuai RTBL | | 10,00 % | | | | | |
| 1 | 03 | 61 | 030 | Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Dokumen Perencanaan PBL | Kawasan Koridor Gadang-Rajasa, Kota Malang;Kawasan Koridor Mayjend Sungkono, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 709.730.000,00 | Block Grant | - | 3 dokumen | 716.625.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 031 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Prioritas | Luasan kawasan penataan bangunan | Kawasan Raya Langsep , Kota Malang; | 200,00 ha | 506.950.000,00 | Block Grant | - | 2 ha | 716.625.000,00 |
| | | | | | Persentase rumah tinggal berakses air bersihbersih | | 94,01 % | | | | | |
| 1 | 03 | 61 | 012 | Pembangunan, Pengembangan/ Rehabilitasi instalasi Pengolahan Air Minum | Jumlah SR yang di bangun,dikembangkan dan direhabilitasi | Kelurahan Purwodadi, Kota Malang;Kelurahan Tunggulwulung, Kota Malang;Kelurahan Sawojajar, Kota Malang; | 700,00 SR | 3.548.700.000,00 | Block Grant | - | 700 SR | 8.500.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 03 | 61 | 013 | Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum | Jumlah SR yang dipelihara secara rutin | -Hippam Sumber Tlogo, Kota Malang;Hippam Hidayatul Muhtadin, Kota Malang;Hippam Tirta Sari, Kota Malang;Hippam Tanjungrejo, Kota Malang;Hippam Rizkuna, Kota Malang;Tirta Buana, Kota Malang;Karang Asri, Kota Malang;Tirta Mulyo Bermartabat, Kota Malang;Sumber Makmur, Kota Malang; | 1.000,00 SR | 1.997.600.000,00 | Block Grant | - | 1000 SR | 2.000.000.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 014 | Perencanaan Infrastruktur Air Minum | Jumlah Dokumen Perencanaan | -, Kota Malang; | 5,00 Dokumen | 208.080.000,00 | Block Grant | - | 5 dokumen | 250.000.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 015 | Pembinaan rutin Hippam | Jumlah pelaksanaan pembinaan rutin | -, Kota Malang; | 2,00 Kali | 249.450.000,00 | Block Grant | - | 2 kali | 450.000.000,00 |
| | | | | | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | | 85,17 % | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 03 | 61 | 001 | Pembangunan instalasi Air Limbah | Jumlah Saluran Rumah (SR) yang dibangun | -Kelurahan Merjosari, Kota Malang;Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang;Kelurahan Rampal Claket , Kota Malang;Kelurahan Arjowinangun, Kota Malang;Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang;Kelurahan Kotalama, Kota Malang;Kelurahan Mergosono, Kota Malang;Kelurahan Purwantoro, Kota Malang;Kelurahan Purwodadi, Kota Malang;IPLT Mekanis Kota Malang, Kota Malang;Pengadaan Mesin IPLT Kota | 700,00 SR | 4.959.890.000,00 | Block Grant | - | 700 SR | 8.500.000.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 002 | Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Air Limbah | Jumlah saluran rumah (SR) yang yang direhabilitasi/dikembangkan | -Kel. Balarjosari, Kota Malang;Kel. Bandungrejosari, Kota Malang;Kel. Mulyorejo, Kota Malang;Kel. Sukun, Kota Malang;Kel. Kotalama, Kota Malang; Kel. Ketawanggedhe, Kota Malang;Kel. Samaan, Kota Malang; | 700,00 SR | 1.292.580.000,00 | Block Grant | - | 700 SR | 8.500.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 03 | 61 | 003 | Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah | Jumlah Saluran Rumah (SR) yang dipelihara | - Kelurahan Mergosono , Kota Malang;Kelurahan Tanjungrejo, Kota Malang;Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang;Kelurahan Wonokoyo, Kota Malang;Kelurahan Bunulrejo, Kota Malang;Kelurahan Tunggulwulung, Kota Malang; | 1.000,00 SR | 1.123.650.000,00 | Block Grant | - | 1000 SR | 2.000.000.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 004 | Perencanaan Infrastruktur Air Limbah | Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur air limbah | -, Kota Malang; | 5,00 Dokumen | 166.460.000,00 | Block Grant | - | 5 dokumen | 250.000.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 005 | Monitoring dan peningkatan kapasitas, kinerja serta pelaporan pengelola IPAL Komunal | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan peningkatan kinerja Pengolahan air Minum | -, Kota Malang; | 2,00 Kali | 200.000.000,00 | Block Grant | - | 1 kali | 220.000.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 006 | Sosialisasi air limbah domestik | Jumlah lokasi sosialisasi air limbah domestik | -, Kota Malang; | 5,00 Kecamatan | 200.000.000,00 | Block Grant | - | 5 kecamatan | 200.000.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 007 | Fasilitasi SPAL Skala Kota | Jumlah SR yang tersambung | -, Kota Malang; | 1,00 lokasi | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 1 lokasi | 4.000.000.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 008 | Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS) | Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara | -, Kota Malang; | 2,00 lokasi | 382.340.000,00 | Block Grant | - | 2 lokasi | 500.000.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 009 | Fasilitasi Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT | -, Kota Malang; | 3.000,00 Kali | 585.310.000,00 | Block Grant | - | 3500 kali | 600.000.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 010 | Fasilitasi Operasional Layanan Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah layanan penyedotan lumpur tinja | -, Kota Malang; | 300,00 Kali | 421.610.000,00 | Block Grant | - | 390 kali | 550.000.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 011 | Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja | Jumlah rumah tinggal yang melakukan pembuangan air limbah domestik ke IPLT | -, Kota Malang; | 3.000,00 Rumah Tinggal | 2.454.180.000,00 | Block Grant | - | 3500 rumah tinggal | 2.500.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik | | 89,87 % | | | | | |
| 1 | 03 | 61 | 016 | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum | Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi | Aula Lantai 2 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; Ruang Rapat dan area Parkir Kecamatan Klojen, Kota Malang; Gedung PKK Kelurahan Arjosari, Kota Malang; Gedung Kantor Kelurahan Bunulrejo, Kota Malang; Kantor Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; Gedung Kantor Kelurahan Bandulan, Kota Malang; | 3,00 gedung | 7.568.040.000,00 | Block Grant | - | 6 gedung | 115.499.551.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 03 | 61 | 017 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum | Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara rutin | Ruang Rapat Kelurahan Bareng, Kota Malang; Kantor Kelurahan Tlogomas, Kota Malang; Gedung Serbaguna Karyabakti Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang; Gedung LPMK/BKM Kelurahan Mulyorejo, Kota Malang; Gedung Serba Guna Manunggal Kelurahan Dinoyo, Kota Malang; | 5,00 gedung | 1.280.329.000,00 | Block Grant | - | 10 gedung | 3.165.554.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 018 | Pemeliharaan Insidentil Gedung /Bangunan Kantor | Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara insidentil | -, Kota Malang; | 8,00 gedung | 1.200.000.000,00 | Block Grant | - | 10 gedung | 2.328.504.000,00 |
| 1 | 03 | 61 | 019 | Perencanaan Infrastruktur gedung/bangunan kantor dan fasilitas Umum | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum | -, Kota Malang; | 9,00 Dokumen | 466.100.000,00 | Block Grant | - | 11 dokumen | 57.881.250,00 |
| 1 | 03 | 62 | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah | Persentase infrastruktur air limbah dalam kondisi baik | | 85,17 % | 1.092.500.000,00 | | | | 1.150.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 03 | 62 | 001 | Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah (DBHCHT) | Jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dibangun | -Kelurahan Ksatrian, Kota Malang;Kelurahan Bunulrejo, Kota Malang;Kelurahan Jodipan, Kota Malang | 150,00 SR | 1.092.500.000,00 | Block Grant | - | 150 SR | 1.150.000.000,00 |
| 1 | 03 | 63 | | Program Penataan Ruang dan pertanahan | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | | 100,00 % | 2.277.466.800,00 | | | | 2.962.150.100,00 |
| 1 | 03 | 63 | 002 | Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang/ Bangunan | Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan | -, Kota Malang; | 6,00 lokasi | 659.430.000,00 | Block Grant | - | 4 lokasi | 312.150.000,00 |
| 1 | 03 | 63 | 003 | Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota | Jumlah keterangan rencana kota yang diproses sesuai SOP | -, Kota Malang; | 0,00 berkas | 0,00 | Block Grant | - | - | 0,00 |
| 1 | 03 | 63 | 004 | Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | Jumlah Aplikasi Informasi pertanahan | -, Kota Malang; | 1,00 Aplikasi | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 1 aplikasi | 100,00 |
| | | | | | Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang | | 10,00 % | | | | | |
| 1 | 03 | 63 | 006 | Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang | Jumlah Dokumen Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang | -, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 332.930.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 400.000.000,00 |
| 1 | 03 | 63 | 007 | Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang | Jumlah Aplikasi Sistem Informasi tata ruang | -, Kota Malang; | 1,00 Aplikasi | 497.510.000,00 | Block Grant | - | 1 Aplikasi | 100.000.000,00 |
| 1 | 03 | 63 | 008 | Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang | Jumlah dokumen rencana tata ruang | -, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 120.000.000,00 | Block Grant | - | 3 dokumen | 1.250.000.000,00 |
| 1 | 03 | 63 | 009 | Penelitian dan Kajian Penataan Ruang | Jumlah Dokumen penelitian dan kajian Kawasan Strategis Kota Malang | -, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 210.000.000,00 | Block Grant | - | 3 dokumen | 300.000.000,00 |
| 1 | 03 | 63 | 010 | Sosialisasi Rencana Tata Ruang | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi | -, Kota Malang; | 3,00 Sosialisasi | 207.596.800,00 | Block Grant | - | 6 sosialisasi | 300.000.000,00 |
| 1 | 03 | 63 | 011 | Koordinasi Penataan Ruang Daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen TKPRD | -, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 150.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 300.000.000,00 |
| 1 | 04 | | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | 12.441.950.000,00 | | | | 19.904.610.000,00 |
| 1 | 04 | 12 | | Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman | Persentase Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau | | 65,00 % | 12.441.950.000,00 | | | | 19.904.610.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 04 | 12 | 002 | Perencanaan Kawasan Permukiman | Jumlah Permukiman yang berhasil direncanakan sesuai peraturan yang berlaku | Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 585.530.000,00 | Block Grant | - | 3 Dokumen | 1.089.000.000,00 |
| 1 | 04 | 12 | 003 | Penataan Kawasan Permukiman | Jumlah Kawasan Permukiman yang berhasil ditata secara layak dan nyaman | Kota Malang, Kota Malang; | 18,00 Kawasan | 2.220.080.000,00 | Block Grant | - | 1 Kawasan | 181.500.000,00 |
| 1 | 04 | 12 | 005 | Pemeliharaan Insidentil Kawasan Permukiman | Jumlah titik permukiman yang terpelihara dengan baik | Kota Malang (Pemeliharaan Insidentil Infrastruktur), Kota Malang; | 2,00 Titik | 500.000.000,00 | Block Grant | - | 6 Titik | 3.630.000.000,00 |
| 1 | 04 | 12 | 008 | Pengelolaan RUSUNAWA | Jumlah Unit Hunian yang dihuni | Rusunawa 1 - Gang Makam Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang , Kota Malang;Rusunawa 2 Jalan Citra Garden City Boulevard No. 1 Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Kota Malang; | 288,00 Unit | 2.812.600.000,00 | Block Grant | - | 294 unit | 3.630.000.000,00 |
| | | | | | Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU | | 65,00 % | | | | | |
| 1 | 04 | 12 | 001 | Pengelolaan Perumahan dan PSU | Jumlah Prasarana Sarana utilitas (PSU) yang berhasil dikelola dengan baik | Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 PSU | 778.230.000,00 | Block Grant | - | 7 PSU | 7.150.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 04 | 12 | 004 | Pemeliharaan Rutin Kawasan Permukiman | Jumlah titik permukiman yang terpelihara dengan baik | Kota Malang (Pemeliharaan Rutin Infrastruktur), Kota Malang; | 21,00 Titik | 2.736.920.000,00 | Block Grant | - | 15 Titik | 3.630.000.000,00 |
| | | | | | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | | 0,10 % | | | | | |
| 1 | 04 | 12 | 006 | Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh | Jumlah dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh yang berhasil diselesaikan | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 156.700.000,00 | Block Grant | - | 2 Dokumen | 340.010.000,00 |
| 1 | 04 | 12 | 007 | Penataan Kawasan Kumuh | Jumlah kawasan kumuh yang berhasil ditata sesuai dengan yang tercantum dalam SK Walikota tentang kawasan Kumuh Kota Malang | Kota Malang (Kelurahan Mergosono dan Kelurahan Ciptomulyo), Kota Malang; | 1,00 Kawasan | 2.651.890.000,00 | Block Grant | - | 3 Kawasan | 254.100.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 9.548.334.200,00 | | | | 13.355.900.000,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 9.548.334.200,00 | | | | 13.355.900.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 9.548.334.200,00 | | | | 13.355.900.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 066 | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Jl. Bingkil NO.1, Kota Malang; | 83.200,00 Liter | 962.400.000,00 | Block Grant | - | 62.600 liter pertamax, 20.000 liter solar non subsidi, 500 liter oli mesin, 100 liter oli gardan | 975.640.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 002 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 5,00 Dokumen | 156.060.000,00 | Block Grant | - | 5 dokumen | 207.250.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 001 | Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi | Jumlah sistem informasi/aplikasi | Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Aplikasi | 164.580.000,00 | Block Grant | - | 2 aplikasi | 260.190.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 248.430.000,00 | Block Grant | - | 4 dokumen | 160.620.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Bingkil no. 01 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 laporan | 400.000.000,00 | Block Grant | - | 2 laporan | 455.800.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 014 | Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI) | Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI) | Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 42.860.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 25.310.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 Dokumen | 153.081.000,00 | Block Grant | - | 3 dokumen | 93.350.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 69.760.000,00 | Block Grant | - | 4 dokumen | 45.200.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 015 | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 99.810.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 68.920.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 257.950.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 273.590.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 009 | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 49.220.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 106.120.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 16,00 Jenis | 1.301.770.000,00 | Block Grant | -- | 16 jenis | 2.500.470.000,00 |
| | | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | 100,00 % | | | | | |
| 5 | 01 | 07 | 029 | Pemeliharaan taman perkantoran | Jumlah taman yang dipelihara | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 4,00 lokasi | 490.000.000,00 | Block Grant | - | 4 lokasi | 587.850.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 23,00 kendaraan | 212.500.000,00 | Block Grant | - | 23 kendaraan | 230.860.000,00 |
| | | | | | Nilai survey kepuasan internal | | 83,69 % | | | | | |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 10.000,00 Surat | 550.000.000,00 | Block Grant | - | 10000 surat | 536.100.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 6,00 Rekening | 1.423.290.000,00 | Block Grant | - | 6 rekening | 1.794.310.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 3.880,00 m2 | 484.293.200,00 | Block Grant | - | 3880 m2 | 711.170.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 48,00 Jenis | 198.000.000,00 | Block Grant | - | 48 jenis | 506.170.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 16,00 Jenis | 117.150.000,00 | Block Grant | - | 16 jenis | 119.680.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 033 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 20,00 Jenis | 684.370.000,00 | Block Grant | - | 20 jenis | 1.946.090.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 17.000,00 Kotak | 418.400.000,00 | Block Grant | - | 17.000 kotak & 850 dos | 470.510.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 20,00 Orang | 546.260.000,00 | Block Grant | - | 20 orang 32 kali | 494.690.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 1,00 Kendaraan Hias | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 1 kendaraan hias | 27.560.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 035 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 13,00 Kali | 243.450.000,00 | Block Grant | - | 13 kendaraan | 178.210.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. Bingkil No 1, Kota Malang; | 20,00 Kali | 249.700.000,00 | Block Grant | - | 20 kali | 580.240.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 12.158.284.000,00 | | | | 12.158.284.000,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 9.127.545.000,00 | | | | 9.127.545.000,00 |
| 1 | 05 | | | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | 9.127.545.000,00 | | | | 9.127.545.000,00 |
| 1 | 05 | 21 | | Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah | Persentase penanganan pelanggaran Perda | | 100,00 % | 693.080.000,00 | | | | 693.080.000,00 |
| 1 | 05 | 21 | 003 | Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum | Jumlah penindakan pelanggaran pro justisia | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 350,00 pelanggaran | 130.320.000,00 | Block Grant | - | 350 | 130.320.000,00 |
| 1 | 05 | 21 | 004 | Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah | Jumlah orang yang diberikan pembinaan/penyuluhan/pengawasan | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 150,00 Orang | 562.760.000,00 | Block Grant | - | 1500 | 562.760.000,00 |
| 1 | 05 | 22 | | Program Perlindungan Masyarakat | Rasio Linmas Per RT | | 0,87 % | 5.165.825.000,00 | | | | 5.165.825.000,00 |
| 1 | 05 | 22 | 003 | Pengerahan Dukungan Satuan Linmas | Jumlah pengerahan satuan linmas | Jl. Simpang Majapahit No.1 Malang, Kota Malang; | 30,00 Kali | 350.000.000,00 | Block Grant | - | 30,00 Kali | 350.000.000,00 |
| 1 | 05 | 22 | 005 | Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat | Jumlah satlinmas yang dibina | Jl. Simpang Majapahit No.1 Malang, Kota Malang; | 3.100,00 Orang | 3.500.000.000,00 | Block Grant | - | 3.100,00 Orang | 3.500.000.000,00 |
| 1 | 05 | 22 | 001 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran | umlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang terpelihara | Jl. Bengkel No. 01 Malang, Kota Malang; | 9,00 Unit | 150.000.000,00 | Block Grant | - | 9,00 Unit | 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 22 | 002 | Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran | Jumlah kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran | Jl. Bengkel No. 01 Malang, Kota Malang; | 24,00 Jam | 995.825.000,00 | Block Grant | - | 24,00 Jam | 995.825.000,00 |
| 1 | 05 | 22 | 004 | Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran | Jumlahpelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat | Jl. Bengkel No. 01 Malang, Kota Malang; | 5,00 Kali | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 5,00 Kali | 50.000.000,00 |
| 1 | 05 | 22 | 005 | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran | Jl. Bengkel No. 01 Malang, Kota Malang; | 1,00 Unit | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Unit | 100.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 05 | 22 | 009 | Peningkatan keterampilan dan kemampuan petugas pemadam kebakaran | Jumlah peserta pelatihan | Jl. Simpang Majapahit No. 1 Malang, Kota Malang; | 50,00 Orang | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 50,00 Orang | 20.000.000,00 |
| 1 | 05 | 15 | | Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | | 100,00 % | 3.268.640.000,00 | | | | 3.268.640.000,00 |
| 1 | 05 | 15 | 002 | Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 3,00 Kali | 2.846.000.000,00 | Block Grant | - | 3 | 2.846.000.000,00 |
| 1 | 05 | 15 | 008 | Pengamanan Gedung dan Aset Pemerintah | Jumlah lokasi gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 8,00 lokasi | 422.640.000,00 | Block Grant | - | 8 | 422.640.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 3.030.739.000,00 | | | | 3.030.739.000,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 3.030.739.000,00 | | | | 3.030.739.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 3.030.739.000,00 | | | | 3.030.739.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Simpang Majapahit No.1 Malang, Kota Malang; | 2.400,00 Surat | 186.696.600,00 | Block Grant | - | 2.400,00 Surat | 186.696.600,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. Simpang Majapahit No.1 Malang, Kota Malang; | 12,00 Kali | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Kali | 20.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Simpang Majapahit No.1 Malang, Kota Malang; | 600,00 m2 | 35.000.000,00 | Block Grant | - | 600,00 m2 | 35.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 40,00 Jenis | 125.000.000,00 | Block Grant | - | 40 | 125.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 4,00 Jenis | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 4 | 100.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 8,00 Jenis | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 8 | 5.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 720,00 eksemplar | 8.000.000,00 | Block Grant | - | 720 | 8.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 100,00 dos | 195.000.000,00 | Block Grant | - | 1000 | 195.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 12,00 Kali | 300.000.000,00 | Block Grant | - | 12 | 300.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 2,00 Kali | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 2 | 25.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 099 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dibuat | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 5,00 Dokumen | 40.000.000,00 | Block Grant | - | 5 | 40.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Simpang Majapahit NO. 01 Malang, Kota Malang; | 12,00 Dokumen | 79.980.000,00 | Block Grant | - | 12 | 79.980.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 15,00 eksemplar | 1.500.000,00 | Block Grant | - | 15 | 1.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 10,00 eksemplar | 7.100.000,00 | Block Grant | - | 10 | 7.100.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 10,00 eksemplar | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 10 | 50.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 101 | Penyusunan Profil SKPD | Jumlah Dokumen Profil SKPD | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 10,00 eksemplar | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 10,00 eksemplar | 15.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 1,00 gedung | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 1 | 100.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 087 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 2,00 Unit | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Unit | 100.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 42,00 Unit | 900.000.000,00 | Block Grant | - | 42 | 900.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 092 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 3,00 Jenis | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 3,00 Jenis | 100.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 063 | Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus | Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 260,00 stel | 432.462.400,00 | Block Grant | - | 235 | 432.462.400,00 |
| 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 6,00 eksemplar | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 6 | 5.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. Simpang Majapahit No. 01 Malang, Kota Malang; | 220,00 Orang | 200.000.000,00 | Block Grant | - | 285 | 200.000.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 18.377.214.000,00 | | | | 18.377.213.000,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 9.402.012.800,00 | | | | 9.402.011.800,00 |
| 1 | 06 | | | Sosial | | | | 5.295.194.300,00 | | | | 5.295.194.300,00 |
| 1 | 06 | 19 | | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial | | 51,52 % | 2.906.854.400,00 | | | | 2.906.854.400,00 |
| 1 | 06 | 19 | 001 | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 50,00 Orang | 167.860.000,00 | Block Grant | - | 50 orang | 167.860.000,00 |
| 1 | 06 | 19 | 002 | Fasilitasi kegiatan Karang Werdha | Jumlah anggota Karang Werdha yang mengikuti pembinaan | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 1.000,00 Orang | 350.000.000,00 | Block Grant | - | 1000 orang | 350.000.000,00 |
| 1 | 06 | 19 | 003 | Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kota Malang | Jumlah anggota Karang Taruna yang dibina | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 125,00 Orang | 175.000.000,00 | Block Grant | - | 125 orang | 175.000.000,00 |
| 1 | 06 | 19 | 004 | Pembinaan administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang | Jumlah pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 469.764.400,00 | Block Grant | - | 100 orang | 469.764.400,00 |
| 1 | 06 | 19 | 005 | Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 880,00 Orang | 80.480.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Narkoba | 80.480.000,00 |
| 1 | 06 | 19 | 007 | Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial | Terlaksananya SLRT dan pusat kesejahteraan sosial untuk perlindungan sosial dan penganggulangan kemiskinan | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 35.206,00 KK | 1.007.930.000,00 | Block Grant | - | - | 1.007.930.000,00 |
| 1 | 06 | 19 | 009 | Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial | Jumlah peserta sarasehan dan yang menerima bingkisan/tali asih | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 250,00 Orang | 255.820.000,00 | Block Grant | - | - | 255.820.000,00 |
| 1 | 06 | 19 | 010 | Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 2,00 Bulan | 400.000.000,00 | Block Grant | - | - | 400.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 06 | 20 | | Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya | | 14,21 % | 2.388.339.900,00 | | | | 2.388.339.900,00 |
| 1 | 06 | 20 | 011 | Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah anak yang didampingi | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 20,00 Orang | 27.500.000,00 | Block Grant | - | - | 27.500.000,00 |
| 1 | 06 | 20 | 007 | Penyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun | Jumlah orang yang dtampung di TWK Sukun | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 140,00 Orang | 183.270.000,00 | Block Grant | - | - | 183.270.000,00 |
| 1 | 06 | 20 | 010 | Fasilitasi Program Desaku Menanti | Jumlah warga binaan sosial dilokasi Desaku Menanti yang dibina | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 36,00 Kartu Keluarga | 231.082.000,00 | Block Grant | - | - | 231.082.000,00 |
| 1 | 06 | 20 | 002 | Fasilitasi Terapi bagi penyandang Disabilitas | Jumlah penyandang Disabilitas Miskin yang diberi bantuan terapi | jl. ki ageng gribik mo.5 kota malang, Kota Malang; | 250,00 Orang | 450.410.000,00 | Block Grant | - | - | 450.410.000,00 |
| 1 | 06 | 20 | 012 | Pemantapan Pelatihan Untuk Pentas Seni Anak Jalanan | Jumlah peserta pemantapan pelatihan untuk pentas seni | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 10,00 Orang | 57.910.000,00 | Block Grant | - | - | 57.910.000,00 |
| 1 | 06 | 20 | 009 | Operasional LIPONSOS CAMP ASSESSMENT | Jumlah Klien yang mendapat Assesment | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 150,00 Orang | 424.230.000,00 | Block Grant | - | - | 424.230.000,00 |
| 1 | 06 | 20 | 003 | Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia | Jumlah Klien Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 10,00 Orang | 209.690.000,00 | Block Grant | - | - | 209.690.000,00 |
| 1 | 06 | 20 | 005 | Operasional Pos Rehabilitasi Sosial | Jumlah bimbingan/pemantapan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penvandang Disabilitas | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 70,00 Kali | 60.000.000,00 | Block Grant | - | - | 60.000.000,00 |
| 1 | 06 | 20 | 013 | Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS | Jumlah data kepesertaan jaminan kesejahteraan nasional melalui BPJS | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 1,00 data | 100.170.000,00 | Block Grant | - | - | 100.170.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 06 | 20 | 014 | Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | Jumlah anggota TAGANA yang mendapat pelatihan penanggulangan bencana | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 52,00 Orang | 169.010.000,00 | Block Grant | - | - | 169.010.000,00 |
| 1 | 06 | 20 | 015 | Pemulangan orang terlantar | Jumlah orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asal | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 250,00 Orang | 25.500.000,00 | Block Grant | - | - | 25.500.000,00 |
| 1 | 06 | 20 | 016 | Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 10.000,00 Orang | 350.000.000,00 | Block Grant | - | - | 350.000.000,00 |
| 1 | 06 | 20 | 008 | Bantuan pangan dan sandang Pasca Bencana | Jumlah korban bencana yang diberi bantuan | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 200,00 Orang | 99.567.900,00 | Block Grant | - | - | 99.567.900,00 |
| 1 | 08 | | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | 2.105.835.500,00 | | | | 2.105.835.500,00 |
| 1 | 08 | 15 | | Program Pemberdayaan Perempuan | Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif | | 93,00 % | 1.168.064.500,00 | | | | 1.168.064.500,00 |
| 1 | 08 | 15 | 001 | KIE Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang | Jumlah peserta seminar, sosialisasi, pelatihan dan HUT | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 750,00 | 250.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta seminar, sosialisasi, pelatihan dan Gebyar HUT | 250.000.000,00 |
| 1 | 08 | 15 | 002 | Fasilitasi Organisasi Wanita (GOW) Dikota Malang | Jumlah peserta seminar, sosialisasi, pelatihan | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 300,00 | 100.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta seminar, sosialisasi dan pelatihan | 100.000.000,00 |
| 1 | 08 | 15 | 012 | Pengembangan/Pendampingan aplikasi database perempuan | Jumlah aplikasi database perempuan dan Jumlah Peserta sosialisasi | Jl.Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Aplikasi | 55.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah 1 dokumen data perempuan | 55.000.000,00 |
| 1 | 08 | 15 | 010 | Pemilihan Perempuan Inspiratif | Jumlah Peserta Lomba Gebyar | Jl.Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 150,00 Orang | 125.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta lomba | 125.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 08 | 15 | 003 | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan di Kota Malang | Jumlah peserta pelatihan menjahit Tk. Dasar | Jl.Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 350,00 | 325.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta pelatihan menjahit tingkat dasar 50 org, peserta industri rumahan 100 org, peserta gelar produk 100 org, peserta pelatihan on;ine 100 org | 325.000.000,00 |
| 1 | 08 | 15 | 009 | Penyusunan IPG dan IDG Kota Malang | Jumlah Dokumen | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 59.850.500,00 | Block Grant | - | Jumlah dokumen analisa IPG dan IDG Kota Malang | 59.850.500,00 |
| 1 | 08 | 15 | 005 | Sekolah Kartini | Jumlh peserta sekolah ibu | Jl.Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 120,00 | 128.214.000,00 | Block Grant | - | Perempuan kota Malang yang mandiri | 128.214.000,00 |
| 1 | 08 | 15 | 006 | Kaukus Politik Perempuan di Kota Malang | Jumlah peserta sosialisasi | Jl.Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 50.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta sosialisasi | 50.000.000,00 |
| 1 | 08 | 15 | 007 | Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender | Jumlah peserta pelatihan | Jl.Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 55,00 | 75.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta pelatihan | 75.000.000,00 |
| 1 | 08 | 18 | | Program Perlindungan Perempuan dan Anak | Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | | 100,00 % | 937.771.000,00 | | | | 937.771.000,00 |
| 1 | 08 | 18 | 001 | Fasilitasi P2TP2A di Kota Malang | Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang tervalidasi serta tersusunnya data kekerasan di Kota Malang | Jl.Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 80,00 kasus | 212.760.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang tervalidasi serta tersusunnya data kekerasan di Kota Malang | 212.760.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 08 | 18 | 008 | Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak | Jumlah peserta sosialisasi tentang pengembangan sekolah ramah anak | Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 45.900.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta sosialisasi | 45.900.000,00 |
| 1 | 08 | 18 | 002 | Bimtek Penanganan KDRT bagi Pengurus Dasa Wisma di Tingkat Kelurahan | Jumlah peserta Bimtek | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 107.155.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta Bimtek | 107.155.000,00 |
| 1 | 08 | 18 | 009 | Pelatihan Penjangkauan anak berkebutuhan Khusus | Jumlah peserta pelatihan | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 54.540.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta pelatihan | 54.540.000,00 |
| 1 | 08 | 18 | 003 | Fasilitasi Forum Anak Kota Malang | Jumlah peserta temu anak dan FGD forum anak | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 300,00 Orang | 140.545.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta temu anak dan FGD forum anak | 140.545.000,00 |
| 1 | 08 | 18 | 006 | Sosialisasi Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPPO) | Jumlah peserta sosialisasi | Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 61.971.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta sosialisasi | 61.971.000,00 |
| 1 | 08 | 18 | 007 | Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan di Kota Malang | Lembaga Perempuan peduli perlindungan | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 106.470.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta Pelatihan | 106.470.000,00 |
| 1 | 08 | 18 | 021 | Fasilitasi Anak sebagai Pelopor dan pelapor kekerasan | Anak dari berbagai komunitas, Kader PKK, TOGA TOMA | Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 53.540.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta Bimtek | 53.540.000,00 |
| 1 | 08 | 18 | 022 | Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) | Kader PKK, TOGA TOMA, Pos Curhat tingkat Kelurahan | Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 53.540.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta sosialisasi | 53.540.000,00 |
| 1 | 08 | 18 | 004 | Bimtek Konvensi Hak Anak | Jumlah peserta Bimtek | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 101.350.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta Bimtek | 101.350.000,00 |
| 1 | 14 | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | 2.000.983.000,00 | | | | 2.000.982.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) | | 1,70 | 2.000.983.000,00 | | | | 2.000.982.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 14 | 19 | 001 | Pemutakhiran data base Keluarga | Jumlah dokumen data base keluarga | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 | 71.930.000,00 | Block Grant | - | jumlah dokumen data base keluarga | 71.930.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | 002 | Pembinaan dan monev SSK(Sekolah Siaga Kependudukan) | Jumlah peserta pembinaan | Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Kota Malang, Kota Malang; | 30,00 | 65.255.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta pembinaan / lomba tentang dampak pernikahan dini | 65.255.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | 030 | Penyusunan buku profil pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga | Jumlah buku profil | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 52.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah buku profil | 52.000.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | 003 | Bina Kesertaan KB | Jumlah peserta Pelayanan KB Gratis | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 300,00 Orang | 105.250.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta Pelayanan KB Gratis | 105.250.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | 004 | Pencatatan dan pelaporan Klinik | Jumlah peserta pelatihan petugas pelaporan klinik | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 75,00 Orang | 71.646.500,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta pelatihan petugas pelaporan klinik | 71.645.500,00 |
| 1 | 14 | 19 | 005 | Penguatan Pelaksana KB | Jumlah peserta pembinaan | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 960,00 Orang | 198.623.500,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta Bimtek | 198.623.500,00 |
| 1 | 14 | 19 | 036 | Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA/ TOMAS | Jumlah peserta KIE | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 65.100.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta Sosialisasi KIE | 65.100.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | 006 | Penguatan Ketahanan Keluarga | Jumlah peserta pembinaan ketahanan keluarga | Jl.Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 360,00 Orang | 118.968.400,00 | Block Grant | - | Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | 118.968.400,00 |
| 1 | 14 | 19 | 007 | Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kota Malang | Jumlah peserta pembinaan pendidikan ekonomi keluarga | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 312,00 Orang | 87.733.600,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta pembinaan pendidikan ekonomi keluarga | 87.733.600,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 14 | 19 | 008 | Pembinaan karakter keluarga di Kota Malang | Jumlah peserta pembinaan karakter keluarga | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 750,00 Orang | 92.420.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta pembinaan karakter keluarga | 92.420.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | 009 | Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah peserta penguatan kelembagaan PKK | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 500,00 Orang | 482.202.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta penguatan kelembagaan PKK | 482.202.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | 010 | Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan | Jumlah peserta pembinaan peningkatan kesehatan keluarga lingkungan | Jl. Ki Adeng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 1.055,00 Orang | 218.720.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta pembinaan peningkatan kesehatan keluarga lingkungan | 218.720.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | 012 | Pengembangan UPPKS | Jumlah peserta pembinaan | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 60.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta pembinaan | 60.000.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | 048 | Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Masyarakat Keluarga | Jumlah peserta pelatihan | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 150,11 Orang | 100.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Peserta pelatihan Patwork & Quilting | 100.000.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | 049 | Pemilihan Pusat Informasi dan Konseling - Remaja/Mahasiswa (PIK - R/M) dan Duta Remaja Unggulan Tahun 2019 | Jumlah peserta | Jl. Ki Ageng Gribig Kota Malang, Kota Malang; | 150,00 Orang | 150.000.000,00 | Block Grant | - | Kegiatan Lomba Pemilihan PIK-RM Duta Unggulan | 150.000.000,00 |
| 1 | 14 | 19 | 015 | Pengembangan Kapasitas program Saka Kencana dan BKR | Jumlah peserta pembinaan | Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 61.134.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta pembinaan | 61.134.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 8.975.201.200,00 | | | | 8.975.201.200,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 8.975.201.200,00 | | | | 8.975.201.200,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 8.975.201.200,00 | | | | 8.975.201.200,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Ki ageng Gribik no 5 Kota Malang, Kota Malang; | 3.500,00 Surat | 2.300.000,00 | Block Grant | - | 3500 surat | 2.300.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | jl. ki ageng gribik no 5 kota malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 338.040.000,00 | Block Grant | - | - | 338.040.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 047 | Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi | Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi | jl. kiageng gribik no. 5 kota malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 118.800.000,00 | Block Grant | - | - | 118.800.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 034 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | jl. ki ageng gribik no 5 kota malang, Kota Malang; | 16,40 kendaraan | 95.400.000,00 | Block Grant | - | - | 95.400.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 035 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 17,00 kendaraan | 57.150.000,00 | Block Grant | - | - | 57.150.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | jl. ki ageng gribik no.05 kota malang, Kota Malang; | 100.000,00 Orang | 542.170.000,00 | Block Grant | - | - | 542.170.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | jl ki ageng gribik no 5 kota malang, Kota Malang; | 33,00 Jenis | 193.278.700,00 | Block Grant | - | - | 193.278.700,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 10,00 Jenis | 33.215.000,00 | Block Grant | - | 7 Jenis barang cetakan | 33.215.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jl. ki ageng gribik no 5 kota malang, Kota Malang; | 41,00 Jenis | 36.510.000,00 | Block Grant | - | 13 Jenis | 36.510.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 3,00 Jenis | 8.000.000,00 | Block Grant | - | 2 jenis surat kabar (12 bulan) penggandaan peraturan perundangan | 8.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | jl. ki ageng gribik no. 5 kota malang, Kota Malang; | 1,00 Tahun | 3.727.349.500,00 | Block Grant | - | Makan dan minuman 1 tahun | 3.727.349.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 1,00 Tahun | 680.000.000,00 | Block Grant | - | Perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 tahun | 680.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 045 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 13,00 Orang | 461.890.000,00 | Block Grant | - | 13 orang | 461.890.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 051 | Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | jl. ki ageng gribik no 5 kota malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 429.100.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 429.100.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 33.000.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 33.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 250.000.000,00 | Block Grant | - | 67 asn | 250.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 053 | Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas | Jumlah pengemudi/supir dinas | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 7,00 Orang | 248.710.000,00 | Block Grant | - | 7 Orang | 248.710.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 5,00 | 99.800.000,00 | Block Grant | - | 5 jenis | 99.800.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 95,00 mobil | 835.852.000,00 | Block Grant | - | 78 motor, 14 mobil | 835.852.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | jl. kia egng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 15,00 Jenis | 70.000.000,00 | Block Grant | - | 15 jenis | 70.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 058 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 1,00 gedung | 300.000.000,00 | Block Grant | - | 1 gedung | 300.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 2,00 gedung | 186.300.000,00 | Block Grant | - | 2 gedung | 186.300.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 4.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 4.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 81.336.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 81.336.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 2,00 Kali | 3.000.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 3.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 4 dokumen | 5.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | jl. ki ageng gribik no.5 kota malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 120.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 120.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 4.725.429.000,00 | | | | 6.418.502.980,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 2.206.388.500,00 | | | | 3.399.111.300,00 |
| 1 | 07 | | | Tenaga Kerja | | | | 959.950.000,00 | | | | 1.570.810.800,00 |
| 1 | 07 | 20 | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas | Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja | | 60,00 % | 450.000.000,00 | | | | 540.000.000,00 |
| 1 | 07 | 20 | 001 | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat | Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat | ., Kota Malang; | 120,00 Orang | 450.000.000,00 | DBH CHT | - | 120 orang | 540.000.000,00 |
| 1 | 07 | 21 | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial | Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan | | 76,00 % | 259.950.000,00 | | | | 670.810.800,00 |
| 1 | 07 | 21 | 001 | Pembinaan Bursa Kerja Khusus | Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus | ., Kota Malang; | 50,00 Orang | 32.100.000,00 | Block Grant | - | 50 BKK | 71.742.000,00 |
| | | | | | Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Berjasa (PB) | | 65,00 % | | | | | |
| 1 | 07 | 21 | 004 | Pembahasan Usulan UMK Malang dan Survey Kebutuhan Hidup Layak | Jumlah rapat pembahasan rekomendasi UMK | ., Kota Malang; | 1,00 Kali | 116.400.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 272.607.500,00 |
| 1 | 07 | 21 | 005 | Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR, dan Penanganan Mayday | Jumlah rapat LKS Tripartit dan Pemantauan UMK dan THR dan Penanganan Mayday | ., Kota Malang; | 3,00 Kali | 70.650.000,00 | Block Grant | - | 3 dokumen | 243.906.300,00 |
| 1 | 07 | 21 | 006 | Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Jumlah peserta Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | ., Kota Malang; | 50,00 Orang | 40.800.000,00 | Block Grant | - | 100 orang | 82.555.000,00 |
| 1 | 07 | 19 | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase peningkatan lapangan kerja | | 7,00 % | 250.000.000,00 | | | | 360.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 07 | 19 | 001 | Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja | Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair | ., Kota Malang; | 60,00 Perusahaan | 250.000.000,00 | DBH CHT | - | 60 perusahaan | 360.000.000,00 |
| 1 | 18 | | | Penanaman Modal | | | | 1.246.438.500,00 | | | | 1.828.300.500,00 |
| 1 | 18 | 20 | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase peningkatan jumlah minat investor | | 40,00 % | 150.000.000,00 | | | | 539.522.000,00 |
| 1 | 18 | 20 | 001 | Penyusunan Bahan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | NA dan RanPerda tentang perubahan perda nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal | ., Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 110.000.000,00 |
| 1 | 18 | 20 | 003 | Fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha | Jumlah Laporan Kegiatan | ., Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 20 pelaku usaha | 220.000.000,00 |
| 1 | 18 | 20 | 006 | Promosi investasi | Keikutsertaan dalam gelar pameran investasi | ., Kota Malang; | 1,00 Jenis | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 2 kali | 209.522.000,00 |
| 1 | 18 | 21 | | Program Pengendalian, Data dan Informasi | Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat | | 20,00 % | 288.778.500,00 | | | | 288.778.500,00 |
| 1 | 18 | 21 | 001 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal | ., Kota Malang; | 126,00 Kali | 109.308.500,00 | Block Grant | - | 126 perizinan dan non perizinan | 109.308.500,00 |
| 1 | 18 | 21 | 003 | Pengolahan dan Pemuktahiran data Tenaga Kerja, Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal | Jumlah data yang dikelola | ., Kota Malang; | 1,00 data | 154.470.000,00 | Block Grant | - | 1 aplikasi | 154.470.000,00 |
| 1 | 18 | 21 | 004 | Penyuluhan Perizinan | Jumlah peserta penyuluhan | ., Kota Malang; | 2,00 Orang | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 2 rim leaflet dan buku panduan online Si Izol | 25.000.000,00 |
| 1 | 18 | 22 | | Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya | Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata Dan Sosial Budaya | | 85,00 % | 273.000.000,00 | | | | 500.000.000,00 |
| 1 | 18 | 22 | 001 | Peninjauan lapangan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya | Jumlah Berita Acara Peninjauan Lapangan | ., Kota Malang; | 85,00 Berita Acara | 273.000.000,00 | Block Grant | - | 85 jenis izin dan non izin | 500.000.000,00 |
| 1 | 18 | 23 | | Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum | Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum | | 100,00 % | 534.660.000,00 | | | | 500.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 18 | 23 | 002 | Pelayanan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum | Jumlah perizinan dan non perizinan pekerjaan umum yang terlayani | ., Kota Malang; | 41,00 Izin | 534.660.000,00 | Block Grant | - | 41 jenis izin dan non izin PU | 500.000.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 2.519.040.500,00 | | | | 3.019.391.680,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 2.519.040.500,00 | | | | 3.019.391.680,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 88,50 % | 2.519.040.500,00 | | | | 1.162.227.050,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | ., Kota Malang; | 12,00 Bulan | 171.600.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 188.760.800,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | ., Kota Malang; | 1,00 Kali | 32.720.000,00 | Block Grant | - | 1 kali | 35.992.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 052 | Pengelolaan perpustakaan dan arsip | Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | ., Kota Malang; | 3.000,00 berkas | 26.250.000,00 | Block Grant | - | 3000 berkas | 28.874.580,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | ., Kota Malang; | 40,00 Unit | 303.849.700,00 | Block Grant | - | 40 unit | 334.234.670,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | ., Kota Malang; | 8,00 Jenis | 74.000.000,00 | Block Grant | - | 8 jenis | 81.400.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | ., Kota Malang; | 500,00 m2 | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 500 m2 | 27.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 002 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | ., Kota Malang; | 3,00 laporan | 2.600.000,00 | Block Grant | - | 2 laporan | 2.860.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | ., Kota Malang; | 10,00 Dokumen | 6.500.000,00 | Block Grant | - | 10 dokumen | 7.150.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | ., Kota Malang; | 5,00 laporan | 120.000.000,00 | Block Grant | - | 5 laporan | 132.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 011 | Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan | Jumlah sertifikasi | ., Kota Malang; | 1,00 Sertifikat | 87.840.000,00 | Block Grant | - | 1 sertifikasi | 58.311.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 015 | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | ., Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 27.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | ., Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 75.430.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 118.723.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | ., Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 76.210.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 118.921.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | 80,00 % | | | | | |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | ., Kota Malang; | 7,00 Dokumen | 58.450.000,00 | Block Grant | - | 1 paket | 72.291.760,00 |
| | | | | | Nilai survey kepuasan internal | | 80,00 | | | | | |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | ., Kota Malang; | 750,00 m2 | 173.765.000,00 | Block Grant | - | 750 m2 | 212.429.490,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | ., Kota Malang; | 86,00 Jenis | 199.550.000,00 | Block Grant | - | 50 jenis | 400.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | ., Kota Malang; | 26,00 Jenis | 149.415.000,00 | Block Grant | - | 27 jenis | 300.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | ., Kota Malang; | 10,00 Jenis | 8.015.800,00 | Block Grant | - | 19 jenis | 8.817.220,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | ., Kota Malang; | 120,00 Jenis | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 24 jenis | 5.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | ., Kota Malang; | 5.368,00 Kali | 194.735.000,00 | Block Grant | - | 48 kali | 214.208.260,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | ., Kota Malang; | 26,00 Kali | 312.950.000,00 | Block Grant | - | 25 kali | 312.950.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 063 | Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus | Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus | ., Kota Malang; | 100,00 stel | 60.000.000,00 | Block Grant | - | 100 stel | 55.792.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | ., Kota Malang; | 100,00 Orang | 197.150.000,00 | Block Grant | - | 100 orang | 216.864.900,00 |
| 5 | 01 | 07 | 009 | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | ., Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 38.010.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 58.311.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 4.089.326.000,00 | | | | 5.709.805.000,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 728.438.900,00 | | | | 799.022.500,00 |
| 1 | 09 | | | Pangan | | | | 728.438.900,00 | | | | 799.022.500,00 |
| 1 | 09 | 15 | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama | | 2,00 % | 728.438.900,00 | | | | 799.022.500,00 |
| 1 | 09 | 15 | 002 | Fasilitasi Kemitraan Ketersediaan Pangan | Jumlah Kemitraan | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 2,00 Kemitraan | 26.470.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Kemitraan | 75.281.250,00 |
| 1 | 09 | 15 | 001 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pangan | Jumlah rekomendasi | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 2,00 rekomendasi | 105.240.000,00 | Block Grant | - | 2,00 rekomendasi | 109.460.000,00 |
| 1 | 09 | 15 | 003 | Fasilitasi KIE Penganekaragaman Pangan | Jumlah peserta KIE Penganekaragaman Pangan | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 140,00 peserta | 379.600.000,00 | Block Grant | - | 140,00 peserta | 169.618.750,00 |
| 1 | 09 | 15 | 004 | Fasilitasi KIE Pola Konsumsi Pangan | Jumlah peserta KIE Pola Konsumsi Pangan | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 100,00 peserta | 91.048.900,00 | Block Grant | - | 100,00 peserta | 129.562.500,00 |
| 1 | 09 | 15 | 005 | Promosi hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan | Jumlah promosi | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 1,00 promosi | 126.080.000,00 | Block Grant | - | 1,00 promosi | 315.100.000,00 |
| 2 | | | | Urusan Pilihan | | | | 1.240.262.000,00 | | | | 1.811.851.250,00 |
| 2 | 01 | | | Kelautan dan Perikanan | | | | 665.821.000,00 | | | | 766.963.750,00 |
| 2 | 01 | 19 | | Program Peningkatan Perikanan | Persentase peningkatan produksi perikanan | | 5,00 % | 665.821.000,00 | | | | 766.963.750,00 |
| 2 | 01 | 19 | 001 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan | Jumlah peserta | Jl. Sarangan Kota Malang, Kota Malang; | 110,00 peserta | 247.060.000,00 | Block Grant | - | 110,00 peserta | 179.750.000,00 |
| 2 | 01 | 19 | 002 | Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah peserta | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 140,00 peserta | 86.326.000,00 | Block Grant | - | 140,00 peserta | 162.118.750,00 |
| 2 | 01 | 19 | 003 | Peningkatan Perbenihan Ikan | Jumlah sarana dan prasarana pembenihan ikan | Jl. Sarangan Kota Malang, Kota Malang; | 15,00 Jenis | 332.435.000,00 | Block Grant | - | 15,00 Jenis | 425.095.000,00 |
| 2 | 03 | | | Pertanian | | | | 574.441.000,00 | | | | 1.044.887.500,00 |
| 2 | 03 | 20 | | Program Peningkatan Pertanian | Persentase peningkatan produksi pertanian | | 2,00 % | 290.525.000,00 | | | | 469.887.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 03 | 20 | 002 | Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / perkebunan | jumlah jenis alat mesin pertanian | Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Jenis | 79.290.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Jenis | 123.000.000,00 |
| 2 | 03 | 20 | 001 | Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi | Jumlah peserta sosialisasi | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 120,00 Orang | 7.600.000,00 | Block Grant | - | 120,00 Orang | 28.443.750,00 |
| 2 | 03 | 20 | 003 | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan/Perkebunan/Hortikultura | Jumlah jenis benih pertanian | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 1,00 Jenis | 136.185.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Jenis | 170.231.250,00 |
| 2 | 03 | 20 | 004 | Pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian | Jumlah jenis alat pasca panen dan pengolahan hasil | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 1,00 Jenis | 7.700.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Jenis | 56.025.000,00 |
| 2 | 03 | 20 | 005 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan | Jumlah Penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 29,00 Orang | 28.250.000,00 | Block Grant | - | 29,00 Orang | 35.312.500,00 |
| 2 | 03 | 20 | 006 | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani | Jumlah Poktan/Gapoktan yang mendapatkan peningkatan kemampuan | Jumlah Penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas, Kota Malang; | 60,00 poktan | 6.500.000,00 | Block Grant | - | 60,00 poktan | 8.125.000,00 |
| 2 | 03 | 20 | 007 | Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian | jumlah dokumen programa | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 6,00 Dokumen | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 6,00 Dokumen | 48.750.000,00 |
| 2 | 03 | 21 | | Program Peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan | Persentase peningkatan produksi peternakan | | 2,00 % | 283.916.000,00 | | | | 575.000.000,00 |
| 2 | 03 | 21 | 002 | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan | Jumlah peserta diseminasi | Jl. Ko. Sugiono 176, Kec. Sukun, Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 peserta | 60.921.000,00 | Block Grant | - | 100,00 peserta | 125.000.000,00 |
| 2 | 03 | 21 | 003 | Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak | Jumlah hewan yang diperiksa | Jl. Ko. Sugiono 176, Kec. Sukun, Kota Malang, Kota Malang; | 1.300,00 ekor | 96.500.000,00 | Block Grant | - | 1.300,00 ekor | 175.000.000,00 |
| 2 | 03 | 21 | 004 | Pengembangan Teknologi Peternakan | Jumlah penerapan teknologi peternakan | Jl. Ko. Sugiono 176, Kec. Sukun, Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Jenis | 68.965.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Jenis | 150.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 03 | 21 | 001 | Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan | Jumlah contoh pangan asal hewan yang diperiksa | Jl. Kol. Sugiono Kota Malang, Kota Malang; | 1.750,00 Jenis | 57.530.000,00 | Block Grant | - | 1.750,00 Jenis | 125.000.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 2.120.625.100,00 | | | | 3.098.931.250,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 2.120.625.100,00 | | | | 3.098.931.250,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 2.120.625.100,00 | | | | 3.098.931.250,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 1.750,00 Surat | 371.630.000,00 | Block Grant | - | 1.750,00 Surat | 464.537.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 269,00 hari | 264.064.400,00 | Block Grant | - | 269,00 hari | 330.080.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 047 | Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi | Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi | Jl. A. Yani Utara No. 202, Kota Malang; | 6,00 informasi | 28.900.000,00 | Block Grant | - | 6,00 informasi | 36.125.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 3,00 gedung | 85.950.000,00 | Block Grant | - | 3,00 gedung | 107.437.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 025 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | Jl. A. Yani Utara No.202, Kota Malang; | 2,00 gedung | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 gedung | 12.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. A. Yani Utara 202, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 9.550.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 11.937.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. A.Yani Utara 202, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 72.420.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 90.525.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 015 | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | Jl. A. Yani Utara 202, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 53.854.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 67.317.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 5.150.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 6.437.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. A. Yani Utara 202, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 53.550.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 66.937.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. A. Yani Utara 202 malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 53.550.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 66.937.500,00 |
| | | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | 80,00 % | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 27,00 kendaraan | 142.000.000,00 | Block Grant | - | 27,00 kendaraan | 190.250.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 6,00 Jenis | 27.270.000,00 | Block Grant | - | 6,00 Jenis | 34.087.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jl. A.Yani Utara 202, Kota Malang; | 13,00 Jenis | 58.300.000,00 | Block Grant | - | 13,00 Jenis | 274.125.000,00 |
| | | | | | Nilai survey kepuasan internal | | 80,00 % | | | - | | |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 50,00 Jenis | 152.093.600,00 | Block Grant | - | 50,00 Jenis | 188.929.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 214.299.100,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 267.875.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 8,00 Jenis | 8.667.000,00 | Block Grant | - | 8,00 Jenis | 10.833.750,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 235,00 Kali | 283.102.000,00 | Block Grant | - | 235,00 Kali | 675.682.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. A. Yani Utara 202 Malang, Kota Malang; | 8,00 bacaan | 4.800.000,00 | Block Grant | - | 8,00 bacaan | 6.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. A. Yani Utara NO.202, Kota Malang; | 5.000,00 Kotak | 176.275.000,00 | Block Grant | - | 5.000,00 Kotak | 133.875.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. A.Yani Utara 202, Kota Malang; | 78,00 Orang | 45.200.000,00 | Block Grant | - | 78,00 Orang | 56.500.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 50.576.328.000,00 | | | | 85.907.926.541,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 28.860.695.550,00 | | | | 59.956.261.501,00 |
| 1 | 11 | | | Lingkungan Hidup | | | | 28.860.695.550,00 | | | | 59.956.261.501,00 |
| 1 | 11 | 30 | | Program Penataan Lingkungan Hidup | Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun dan Sesuai Standart | | 80,00 % | 1.668.486.650,00 | | | | 3.500.000.000,00 |
| 1 | 11 | 30 | 001 | Perencanaan Lingkungan Hidup | jumlah kajian perencanaan lingkungan | -, Kota Malang; | 3,00 Dokumen | 311.540.000,00 | Block Grant | - | 11 dokumen | 700.000.000,00 |
| 1 | 11 | 30 | 002 | Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Lingkungan yang telah diverifikasi | Jl. Bingkil No. 1, Kota Malang; | 200,00 Dokumen | 140.000.000,00 | Block Grant | - | 350 dokumen | 400.000.000,00 |
| 1 | 11 | 30 | 003 | Pemeliharaan Lingkungan Hidup | Jumlah hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup | -, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 293.260.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 800.000.000,00 |
| 1 | 11 | 30 | 004 | Operasional Uji Laboratorium terhadap Kualitas Parameter LH | Jml Lembar Hasil Uji (LHU) | Jl. Mojopahit No. 1C, Kota Malang; | 75,00 LHU | 654.146.000,00 | Block Grant | - | 85 LHU | 600.000.000,00 |
| 1 | 11 | 30 | 005 | Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium | Jumlah peralatan praktek laboratorium yang tersedia | Jl. Majapahit No. 1 C Kota Malang, Kota Malang; | 28,00 Jenis | 156.170.650,00 | Block Grant | - | 7 jenis | 750.000.000,00 |
| 1 | 11 | 30 | 006 | Peningkatan Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan | Jumlah parameter pengujian | Jl. Majapahit No. 1 C Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 parameter | 113.370.000,00 | Block Grant | - | 2 parameter | 250.000.000,00 |
| 1 | 11 | 10 | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Persentase Luas RTH Publik Yang Dikelola Dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan | | 100,00 | 10.868.387.100,00 | | | | 11.645.356.498,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 11 | 10 | 002 | Perencanaan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah RTH terbangun, keg.perencanaan dan pengembangan RTH | Jl. bingkil no 1, Kota Malang; | 6,00 Dokumen | 1.824.980.000,00 | Block Grant | - | jumlah dokumen perencanaan & pengembangan Ruang Terbuka Hijau (2 kali FGD, 6 dokumen perencanaan, ± 4 - 10 lokasi pelaksanaan paket konstruksi) | 1.467.140.000,00 |
| 1 | 11 | 10 | 003 | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah lokasi RTH terpelihara | Jl. Bingkil no 1, Kota Malang; | 767,00 lokasi rth | 5.795.667.400,00 | Block Grant | - | taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota yang terjaga- 86 taman kota, 7 hutan kota dan 667 jalur hijau | 6.116.292.598,00 |
| 1 | 11 | 10 | 004 | Pengelolaan Taman Aktif Dan Kebun Pembibitan | Jumlah Lokasi kebun bibit dan taman aktif | Kota Malang (7 taman aktif dan 4 kebun pembibitan Tanaman Taman), Kota Malang; | 11,00 lokasi | 2.773.076.800,00 | Block Grant | - | 7 taman aktif dan 4 kebun pembibitan Tanaman Taman | 3.468.596.000,00 |
| 1 | 11 | 10 | 005 | Pengelolaan Pemakaman Umum | Jumlah Pemakaman Umum Yang Terkelola | 9 TPU, Kota Malang; | 9,00 TPU | 474.662.900,00 | Block Grant | - | 9 TPU | 593.327.900,00 |
| 1 | 11 | 27 | | Program Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang | | 32,00 % | 1.340.808.800,00 | | | | 1.996.605.003,00 |
| 1 | 11 | 27 | 001 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup | jumlah pengaduan yang tertangani | Kota Malang, Kota Malang; | 35,00 Pengaduan | 42.280.000,00 | Block Grant | - | 25 pengaduan | 42.280.003,00 |
| 1 | 11 | 27 | 002 | Pengawasan Pengelolaan LH | Jumlah pengawasan dan penegakan lingkungan hidup | Kota Malang, Kota Malang; | 88,00 Kali | 490.070.000,00 | Block Grant | - | 92 kali | 447.070.000,00 |
| 1 | 11 | 27 | 003 | Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lingkungan | Jumlah Pelanggaran yang ditangani | Kota Malang, Kota Malang; | 25,00 kegiatan | 149.350.000,00 | Block Grant | - | 25 kegiatan dan/ atau usaha | 150.000.000,00 |
| 1 | 11 | 27 | 004 | Peningkatan Edukasi dan Pembinaan Lingkungan Hidup | jumlah edukasi lingkungan hidup | Kota Malang, Kota Malang; | 6,00 Dokumen | 173.453.800,00 | Block Grant | - | 6 kegiatan | 480.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 11 | 27 | 005 | Pembinaan Kampung Lingkungan Hidup | Jumlah RW yang melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup | Kota Malang, Kota Malang; | 180,00 RW | 307.595.000,00 | Block Grant | - | 228 RW | 541.200.000,00 |
| 1 | 11 | 27 | 006 | Kemitraan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah kemitraan dan kerjasama yang dilakukan DLH | Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 Mitra | 178.060.000,00 | Block Grant | - | 5 Kemitraan/Kerjasama | 336.055.000,00 |
| 1 | 11 | 28 | | Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 | Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif) | | 24,00 % | 14.033.013.000,00 | | | | 41.379.300.000,00 |
| 1 | 11 | 28 | 005 | Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota | Jumlah sampah Jalan dan TPS yang terlayani | Kota Malang, Kota Malang; | 183,07 Jenis | 8.885.714.000,00 | Block Grant | - | 181.578 ton/tahun | 24.217.700.000,00 |
| 1 | 11 | 28 | 007 | Operasional Pengangkutan Sampah | Volume Sampah yang terangkut | Jl. Bingkil No. 1, Kota Malang; | 183.068,00 ton per tahun | 168.280.000,00 | Block Grant | - | 181.578 ton/tahun | 3.670.800.000,00 |
| 1 | 11 | 28 | 006 | Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan | Jumlah Sarana Prasarana Kebersihan | Kota Malang, Kota Malang; | 13,00 Jenis | 542.200.000,00 | Block Grant | - | 17 jenis | 10.118.000.000,00 |
| 1 | 11 | 28 | 011 | Pengembangan Sistem Pengelolaan Kendaraan/Peralatan Operasional Persampahan | Jumlah Kendaraan/Peralatan Operasional Persampahan yang terpantau pemeliharaannya | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 1,00 Unit | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 1 Aplikasi | 250.000.000,00 |
| 1 | 11 | 28 | 009 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan | Jumlah data wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan | Kota Malang, Kota Malang; | 165.000,00 wajib retribusi | 52.620.000,00 | Block Grant | - | 167.500 Wajib Retribusi | 275.000.000,00 |
| 1 | 11 | 28 | 014 | Pengurangan Sampah 3R | Jumlah Sampah yang berkurang | Kota Malang, Kota Malang; | 59.373,39 ton/thn | 202.017.000,00 | Block Grant | - | 64671,77 ton/tahun | 1.380.000.000,00 |
| 1 | 11 | 28 | 015 | Pelayanan Pemrosesan Sampah | Jumlah Penanganan Sampah | TPA Supiturang Kota Malang, Kota Malang; | 183.068,00 ton per tahun | 3.544.867.000,00 | Block Grant | - | 181.578 ton/tahun | 35.800.000,00 |
| 1 | 11 | 28 | 017 | Penanganan Limbah B3 | Jumlah Pelaku usaha yang sudah melakukan penanganan Limbah B3 | Jl. Bingkil No. 1, Kota Malang; | 125,00 Orang | 54.740.000,00 | Block Grant | - | 150 kegiatan/usaha | 432.000.000,00 |
| 1 | 11 | 28 | 018 | Operasional Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan PKD | Jumlah sampah tertampung | Kota Malang, Kota Malang; | 178.200,00 ton per tahun | 532.575.000,00 | Block Grant | - | 176.400 ton/tahun | 1.000.000.000,00 |
| | | | | | Persentase Penanganan Sampah | | 74,00 % | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 11 | 29 | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan | Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif) | | 24,00 % | 950.000.000,00 | | | | 1.435.000.000,00 |
| 1 | 11 | 29 | 001 | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | jumlah TPS dan atau PKD yang terbangun | Kota Malang, Kota Malang; | 7,00 Unit | 950.000.000,00 | DBH CHT | - | 7 unit | 1.435.000.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 21.715.632.450,00 | | | | 25.951.665.040,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 21.715.632.450,00 | | | | 25.951.665.040,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 80,00 % | 21.715.632.450,00 | | | | 25.951.665.040,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang 1. Jl. Bingkil no 1 Kota Malang - Kecamatan Sukun, Kota Malang; | 7.000,00 Surat | 132.790.000,00 | Block Grant | - | 8000 surat teradministrasi | 375.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang 1. Jl. Bingkil no 1 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 5.316.183.550,00 | Block Grant | - | jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik - 12 bulan | 3.170.400.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 035 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Dinas Lingkungan Hidup, Kota Malang; | 285,00 Unit | 895.700.000,00 | Block Grant | - | 300 unit | 800.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Dinas Lingkungan Hidup Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 10,00 ha/thn | 159.030.840,00 | Block Grant | - | Luasan ruangan yang dibersihkan - 10 Gedung | 251.982.840,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang - Kelurahan Sukun, Kota Malang; | 75,00 Jenis | 375.000.000,00 | Block Grant | - | Alat Tulis Kantor 75 jenis | 375.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang - Kecamatan Sukun, Kota Malang; | 11,00 Jenis | 273.675.000,00 | Block Grant | - | Tersediannya jumlah barang cetakan dan penggandaan sejumlah 11 jenis | 250.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dinas Lingkungan Hidup , Kota Malang; | 10,00 Jenis | 76.900.000,00 | Block Grant | - | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor – 10 Jenis | 55.377.600,00 |
| 5 | 01 | 07 | 041 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang., Kota Malang; | 11,00 Jenis | 15.606.000,00 | Block Grant | - | jumlah peralatan rumah tangga - 17 jenis | 24.815.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang , Kota Malang; | 200,00 buku | 27.439.600,00 | Block Grant | - | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan – 2 jenis bacaan / koran harian dan 450 buku | 27.439.600,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Kota Malang; | 47.214,00 Kotak | 1.183.889.500,00 | Block Grant | - | - 67.000 Kotak | 1.500.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Kota Malang, Kota Malang; | 90,00 Kali | 365.800.000,00 | Block Grant | - | 90 kali | 750.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 045 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang;Jl. Mojopahit No. 1 C, Kota Malang; | 4,00 Orang | 141.120.000,00 | Block Grant | - | 4 orang | 200.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 047 | Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi | Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 12,00 Kali | 103.500.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 90.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 Kali | 290.000.000,00 | Block Grant | - | 2 kali kegiatan | 200.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 053 | Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas | Jumlah pengemudi/supir dinas | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 2,00 Orang | 88.800.000,00 | Block Grant | - | 3 orang | 150.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 8,00 Jenis | 140.110.000,00 | Block Grant | - | 18 jenis | 600.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 063 | Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus | Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 1.400,00 stel | 835.382.500,00 | Block Grant | - | 1400 stel | 1.700.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 066 | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Jl. Bingkil No. 1, Kota Malang; | 116.000,00 voucher | 7.205.536.000,00 | Block Grant | - | 160.000 voucher BBM | 9.500.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 60,00 ASN | 150.000.000,00 | Block Grant | - | 65 ASN | 300.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 13.500,00 m2 | 200.000.000,00 | Block Grant | - | 13.500 m2 | 350.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 226,00 Unit | 3.108.077.800,00 | Block Grant | - | 226 unit | 4.000.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 8,00 Jenis | 67.611.660,00 | Block Grant | - | 6 jenis | 175.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 028 | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi | Jumlah jaringan telekomunikasi | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 2,00 Jaringan | 35.000.000,00 | Block Grant | - | 3 jaringan | 60.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 001 | Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi | Jumlah sistem informasi/aplikasi | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 12,00 Sistem | 38.570.000,00 | Block Grant | - | 12 Bulan | 175.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 002 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen laporan barang milik daerah | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 36.810.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 125.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. Bingkil No. 1, Kota Malang; | 9,00 Dokumen | 82.960.000,00 | Block Grant | - | 9 Dokumen | 180.400.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Bingkil No. 1, Kota Malang; | 14,00 Dokumen | 265.140.000,00 | Block Grant | - | 14 dokumen | 381.150.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 3.500.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 40.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jl. Bingkil No. 1, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 500.000,00 | Block Grant | - | 4 dokumen | 12.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Bingkil No. 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 6.000.000,00 | Block Grant | - | - | 0,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Bingkil No.1, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 95.000.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 133.100.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 5.467.605.000,00 | | | | 6.005.401.500,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 3.016.509.000,00 | | | | 3.318.159.900,00 |
| 1 | 12 | | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | 3.016.509.000,00 | | | | 3.318.159.900,00 |
| 1 | 12 | 15 | | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan | | 95,50 % | 1.114.860.000,00 | | | | 1.226.346.000,00 |
| 1 | 12 | 15 | 001 | Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk | Jumlah penduduk yang ber- KTP | Dispenduk Capil Kota Malang Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 97,95 % | 992.840.000,00 | Block Grant | - | - | 1.092.124.000,00 |
| 1 | 12 | 15 | 002 | Pendataan Dokumen Kependudukan | Jumlah pendataan dokumen kependudukan | Dispenduk Capil Kota Malang Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 60.000,00 | 122.020.000,00 | Block Grant | - | - | 134.222.000,00 |
| 1 | 12 | 17 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan. | | 91,00 % | 297.359.000,00 | | | | 327.094.900,00 |
| 1 | 12 | 17 | 001 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) | Jumlah kapasitas server pemeliharaan | Jl Mayjen Sungkono Kec. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang; | 6,00 Unit | 117.359.000,00 | Block Grant | - | - | 129.094.900,00 |
| 1 | 12 | 17 | 002 | Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah media penyebaran informasi | Jl Mayjen Sungkono Kec. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang; | 6,00 Media | 15.000.000,00 | Block Grant | - | - | 16.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 12 | 17 | 003 | Penyusunan Profil Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukan | Jumlah buku profil perkembangan penduduk | Jl Mayjen Sungkono Kec. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang; | 30,00 buku | 55.000.000,00 | Block Grant | - | - | 60.500.000,00 |
| 1 | 12 | 17 | 004 | Penyusunan arsip digital administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah data base administrasi kependudukan yang di susun | Jl Mayjen Sungkono Kec. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang; | 6.050,00 berkas | 110.000.000,00 | Block Grant | - | - | 121.000.000,00 |
| 1 | 12 | 16 | | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Prosentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil | | 91,00 % | 1.604.290.000,00 | | | | 1.764.719.000,00 |
| 1 | 12 | 16 | 001 | Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran | Jumlah kutipan akta kelahiran | Dispenduk Capil Kota Malang Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 18.568,00 Dokumen | 839.050.000,00 | Block Grant | - | - | 922.955.000,00 |
| 1 | 12 | 16 | 003 | Pelayanan Penerbitan Akta Kematian | Jumlah dan persentase yang meninggal di terbitkan kutipan akta kematian | Jl Mayjen Sungkono Kec. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang; | 3.713,00 Dokumen | 703.600.000,00 | Block Grant | - | - | 773.960.000,00 |
| 1 | 12 | 16 | 004 | Relasi penerbitan akta pencatatan sipil | Jumlah realisasi kerjasama. | Jl Mayjen Sungkono Kec. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 | 61.640.000,00 | Block Grant | - | - | 67.804.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 2.451.096.000,00 | | | | 2.687.241.600,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 2.451.096.000,00 | | | | 2.687.241.600,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 82,50 | 2.451.096.000,00 | | | | 2.687.241.600,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl.Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 6.087,00 Surat | 175.700.000,00 | Block Grant | - | - | 193.270.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl.Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 3.600.000,00 | Block Grant | - | - | 3.960.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl.Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 1.050,00 m2 | 178.545.000,00 | Block Grant | - | - | 196.399.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl.Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 85,00 Jenis | 300.000.000,00 | Block Grant | - | - | 330.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl.Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 409.750,00 eksemplar | 102.990.000,00 | Block Grant | - | - | 113.289.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl.Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 50,00 Titik | 24.000.000,00 | Block Grant | - | - | 26.400.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl.Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 47,00 eksemplar | 3.600.000,00 | Block Grant | - | - | 3.960.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Dispenduk Capil Kota Malang - Jl. Mayjen Sungkono, Kota Malang; | 4.200,00 Kotak | 90.010.000,00 | Block Grant | - | - | 90.011.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Dispenduk Capil Kota Malang - Jl. Mayjen Sungkono, Kota Malang; | 37,00 | 250.000.000,00 | Block Grant | - | - | 275.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 033 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Dispenduk Capil Kota Malang - Jl. Mayjen Sungkono, Kota Malang; | 60,00 Peralatan | 113.521.000,00 | Block Grant | - | - | 124.873.100,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl.Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 gedung | 35.000.000,00 | Block Grant | - | - | 38.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl.Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 29,00 kendaraan | 212.670.000,00 | Block Grant | - | - | 233.973.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl.Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 20,00 Unit | 440.000.000,00 | Block Grant | - | - | 484.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Dispenduk Capil Kota Malang - Jl. Mayjen Sungkono, Kota Malang; | 148,00 Orang | 238.020.000,00 | Block Grant | - | - | 261.822.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|-------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. MayjenSungkonoKel .Arjowinangun Malang, Kota Malang: | 2,00 laporan | 133.440.000,00 | Block Grant | - | - | 146.784.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 008 | Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) | Jumlah ZI | Jl. MayjenSungkonoKel .Arjowinangun Malang , Kota Malang: | 1,00 laporan | 30.000.000,00 | Block Grant | - | - | 33.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 113 | Implementasi SMM ISO 9001 : 2015 | Jumlah pemeliharaan sertifikasi ISO | Jl. MayjenSungkonoKel .Arjowinangun Malang , Kota Malang: | 1,00 Sertifikat | 40.000.000,00 | Block Grant | - | - | 44.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Dispenduk Capil Kota Malang - Jl. Mayjen Sungkono, Kota Malang; | 2,00 buku | 80.000.000,00 | Block Grant | - | - | 88.000.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 16.784.856.000,00 | | | | 20.030.668.900,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 12.292.450.000,00 | | | | 14.961.504.920,00 |
| 1 | 15 | | | Perhubungan | | | | 12.292.450.000,00 | | | | 14.961.504.920,00 |
| 1 | 15 | 28 | | Program Pengendalian Lalu Lintas | Persentase Penurunan Titik Kemacetan | | 63,00 % | 7.546.195.000,00 | | | | 7.272.729.420,00 |
| 1 | 15 | 28 | 002 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perengkapan Jalan | Jumlah Dokumen | Jl. Raden Intan No. 1, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 2.118.730.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 2.165.603.000,00 |
| 1 | 15 | 28 | 003 | Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas | Jumlah tersedianya fasilitas pengamanan lalu lintas | Jl. Raden Intan No. 1, Kota Malang; | 10,00 Jenis | 1.677.135.000,00 | Block Grant | - | 10,00 Jenis | 2.696.661.000,00 |
| 1 | 15 | 28 | 004 | Pengadaan traffic Light | Jumlah Traffic light | Jl. raden Intan No. 1, Kota Malang; | 2,00 Jenis | 2.801.930.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Jenis | 1.313.435.420,00 |
| 1 | 15 | 28 | 005 | Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalulintas | pemeliharaan fasilitas lalu lintas | Jl. Raden Intan No. 1, Kota Malang; | 1,00 Paket | 205.900.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Paket | 226.490.000,00 |
| 1 | 15 | 28 | 006 | Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day | Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 75.220.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 82.742.000,00 |
| 1 | 15 | 28 | 007 | Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas | Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 591.080.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 703.978.000,00 |
| 1 | 15 | 28 | 005 | Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus | Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 76.200.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 83.820.000,00 |
| 1 | 15 | 29 | | Program Pelayanan Angkutan Darat | Persentase Layanan Angkutan Darat (Jumlah Angkutan Darat/Jumlah Penumpang Angkutan Darat) | | 26,78 % | 2.699.985.000,00 | | | | 3.484.607.500,00 |
| 1 | 15 | 29 | 001 | Penyelenggaraan Angkutan Lebaran | Jumlah koordinasi dan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 260.592.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 286.651.200,00 |
| 1 | 15 | 29 | 002 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah program kerja Forum lalul intas | Jl. Raden Intan No. 1, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 361.260.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 397.386.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 15 | 29 | 003 | Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum | Jumlah tercapainya monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum | Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 168.880.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 347.072.000,00 |
| 1 | 15 | 29 | 004 | Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru | Jumlah laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 laporan | 107.954.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 118.749.400,00 |
| 1 | 15 | 29 | 008 | Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor | Jumlah angkutan umum yang uji kir | Jl. Myijend Sungkono , Kota Malang; | 17.000,00 kegiatan | 1.514.919.000,00 | Block Grant | - | 17.000,00 kegiatan | 2.019.730.900,00 |
| 1 | 15 | 29 | 010 | Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor | Jumlah perawatan alat uji dan kalibrasi | Jl. Mayjend Sungkono , Kota Malang; | 1,00 Paket | 200.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Paket | 220.000.000,00 |
| 1 | 15 | 29 | 018 | Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan | Jumlah peserta | Dinas Perhubungan, Kota Malang; | 200,00 Orang | 86.380.000,00 | Block Grant | - | 200,00 Orang | 95.018.000,00 |
| 1 | 15 | 30 | | Program Pengelolaan perparkiran | Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD | | 1,01 % | 2.046.270.000,00 | | | | 4.204.168.000,00 |
| 1 | 15 | 30 | 002 | Pembinaan Petugas Parkir | Jumlah petugas parkir ikut pembinaan | Jl. Raden Intan No. 1, Kota Malang; | 1.000,00 Orang | 311.680.000,00 | Block Grant | - | 1.000,00 Orang | 1.069.508.000,00 |
| 1 | 15 | 30 | 001 | Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir | Jumlah jenis karcis | Jl. Raden Intan No. 1, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 1.734.590.000,00 | Block Grant | - | 5,00 kegiatan | 3.134.660.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 4.492.406.000,00 | | | | 5.069.163.980,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 4.492.406.000,00 | | | | 5.069.163.980,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 61,00 % | 4.492.406.000,00 | | | | 5.069.163.980,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Raden Intan No. 1 , Kota Malang; | 5.000,00 Surat | 11.470.000,00 | Block Grant | - | 5.000,00 Surat | 15.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. Raden Intan No. 1, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 218.130.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 225.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 033 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Jl. Raden Intan No. 1, Kota Malang; | 8,00 | 192.120.000,00 | Block Grant | - | 8,00 | 200.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 034 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Jl. Raden Intan No. 1, Kota Malang; | 34,00 Unit | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 34,00 Unit | 55.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 035 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jl. Raden Intan No. 1, Kota Malang; | 67,00 Unit | 47.100.000,00 | Block Grant | - | 67,00 Unit | 50.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Raden Intan No. 1, Kota Malang; | 2,00 gedung | 192.915.000,00 | Block Grant | - | 2,00 gedung | 200.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jl. Raden Intan No. 1 Koata Malang, Kota Malang; | 48,00 Jenis | 135.141.000,00 | Block Grant | - | 48,00 Jenis | 148.655.100,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jl. raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 23,00 Cetakan | 226.010.000,00 | Block Grant | - | 23,00 Cetakan | 248.611.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. Raden Intan No. 1 malang, Kota Malang; | 20,00 Jenis | 68.690.000,00 | Block Grant | - | 20,00 Jenis | 75.559.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 4,00 Paket | 49.975.200,00 | Block Grant | - | 4,00 Paket | 54.972.720,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 8.458,00 Kotak | 270.575.000,00 | Block Grant | - | 8.458,00 Kotak | 297.632.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 255,00 Kali | 603.372.600,00 | Block Grant | - | 255,00 Kali | 663.709.860,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 27.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 002 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 35.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 38.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 2,00 Gedung | 326.099.200,00 | Block Grant | - | 2,00 Gedung | 452.980.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 66,00 Unit | 1.621.578.000,00 | Block Grant | - | 66,00 Unit | 1.783.735.800,00 |
| 5 | 01 | 07 | 063 | Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus | Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 213,00 stel | 59.720.000,00 | Block Grant | - | 213,00 stel | 136.532.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 34.020.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 37.422.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 13,00 buku | 13.350.000,00 | Block Grant | - | 13,00 buku | 15.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Paket | 73.820.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Paket | 81.202.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Paket | 73.820.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Paket | 81.202.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 015 | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Kali | 56.620.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Kali | 62.282.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 036 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | Jl. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang; | 12,00 Dokumen | 107.880.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Dokumen | 118.668.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi Dan Informatika

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 15.359.427.000,00 | | | | 16.214.709.996,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 12.749.407.000,00 | | | | 12.742.339.996,00 |
| 1 | 16 | | | Komunikasi dan Informatika | | | | 11.262.347.000,00 | | | | 11.275.729.996,00 |
| 1 | 16 | 18 | | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase Informasi Yang Terlayani Dan Terpublikasi | | 82,00 % | 1.465.591.500,00 | | | | 1.730.406.496,00 |
| 1 | 16 | 18 | 005 | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik | Jumlah pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang: | 3,00 Kali | 135.000.000,00 | Block Grant | - | 1 kali | 150.010.000,00 |
| 1 | 16 | 18 | 008 | Diseminasi Informasi Publik Kota Malang | Jumlah informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat | Perkantoran Terpadu Gedung A lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang, Kota Malang: | 6,00 informasi | 754.066.500,00 | Block Grant | - | 3 tema sosialisai/tahun | 489.956.500,00 |
| 1 | 16 | 18 | 009 | Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang | Jumlah dokumentasi yang diolah | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang: | 12,00 informasi | 367.990.000,00 | Block Grant | - | 12 dokumentasi | 453.279.996,00 |
| 1 | 16 | 18 | 010 | Pengolahan Konten Website Pemkot Malang | Jumlah Konten Website yang diposting dan lomba website | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang: | 1.035,00 | 167.920.000,00 | Block Grant | - | 1040 posting web | 487.160.000,00 |
| 1 | 16 | 18 | 016 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi PPID | Jumlah dokumen Penyusunan regulasi, analisis pelaksanaan fungsi PPID | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang: | 1,00 Dokumen | 40.615.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen monev | 150.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 16 | 16 | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Aplikasi Informasi Yang Terintegrasi | | 17,31 % | 9.796.755.500,00 | | | | 9.545.323.500,00 |
| 1 | 16 | 16 | 007 | Pengembangan Aplikasi Intranet | Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan | Perkantoran terpadu gedung A lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 3,00 Aplikasi | 360.210.000,00 | Block Grant | - | 3 aplikasi | 360.210.000,00 |
| 1 | 16 | 16 | 008 | Pengembangan Sistem dan Integrasi Smart City | Jumlah Aplikasi Layanan Publik | Perkantoran terpadu gedung A lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 2,00 Aplikasi | 1.390.490.000,00 | Block Grant | - | 2 aplikasi | 1.074.150.000,00 |
| 1 | 16 | 16 | 009 | Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola E- Gov | Jumlah Kebijakan yang Disusun | Perkantoran terpadu gedung A lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 1,00 | 65.540.000,00 | Block Grant | - | 1 kebijakan | 65.540.000,00 |
| 1 | 16 | 16 | 013 | Peningkatan Sarana Prasarana Layanan Berbasis TIK | Jumlah Sarana Prasarana TIK | Perkantoran terpadu gedung A lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 10,00 Unit | 536.660.000,00 | Block Grant | - | 10 jenis | 536.338.500,00 |
| 1 | 16 | 16 | 015 | Penyediaan Kapasitas Koneksi Internet | Jumlah Koneksi Akses Data | Perkantoran terpadu gedung A lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 286,00 | 6.830.250.500,00 | Block Grant | - | 286 koneksi | 6.898.900.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 16 | 16 | 017 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TIK | Jumlah OPD yang di Monitoring dan Evaluasi | Perkantoran terpadu gedung A lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 111,00 | 52.230.000,00 | Block Grant | - | 111 instansi | 52.230.000,00 |
| 1 | 16 | 16 | 018 | Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan TIK | Jumlah peserta | Perkantoran terpadu gedung A lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 120,00 | 135.370.000,00 | Block Grant | - | 120 peserta | 135.370.000,00 |
| 1 | 16 | 16 | 020 | Pembinaan Tele Center Daraganti Kota Malang | Jumlah masyarakat yang dilatih bidang TIK | Perkantoran terpadu gedung A lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 200,00 Orang | 89.585.000,00 | Block Grant | - | 200 Orang | 89.585.000,00 |
| 1 | 16 | 16 | 002 | Pemeliharaan Sarana Prasana Komunikasi Publik | Jumlah pemeliharaan sarana prasarana | Dinas KOMINFO, Perkantoran terpadu gedung A Lt. 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun , Kota Malang; | 6,00 Menara | 146.300.000,00 | Block Grant | - | 2 Jenis (4 menara dan 93 CCTV) | 146.200.000,00 |
| 1 | 16 | 16 | 003 | Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan sarana prasana komunikasi publik | Jumlah sarana prasarana komunikasi publik yang dimonitoring | Perkantoran terpadu gedung A lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 500,00 Unit | 107.620.000,00 | Block Grant | - | 2 kali monitoring | 106.500.000,00 |
| 1 | 16 | 16 | 004 | Pembinaan Penyelenggaraan Sarana Prasarana Komunikasi Publik | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Sarana Prasarana | Perkantoran terpadu gedung A lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 1,00 Kali | 82.500.000,00 | Block Grant | - | 1 kali monitoring | 80.300.000,00 |
| 1 | 20 | | | Statistik | | | | 1.138.980.000,00 | | | | 748.840.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 20 | 16 | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase keterisian e-database SIPD | | 84,00 % | 1.138.980.000,00 | | | | 748.840.000,00 |
| 1 | 20 | 16 | 002 | Pengolahan data statistik sektoral/ E-database | Prosentase Keterisian Data Statistik Sektoral | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang: | 84,00 % | 312.360.000,00 | Block Grant | - | 82 % | 66.680.000,00 |
| 1 | 20 | 16 | 003 | Pembinaan Tata Kelola Data Statistik Sektoral | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang: | 100,00 Orang | 248.040.000,00 | Block Grant | - | 100 peserta | 71.320.000,00 |
| 1 | 20 | 16 | 007 | Meta Data Statistik Jumlah Meta Data Sektoral | Jumlah Dokumen Meta Data | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang: | 1,00 Dokumen | 271.120.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 230.120.000,00 |
| 1 | 20 | 16 | 011 | Penyediaan Peralatan Infrastruktur | Jumlah tersedianya peralatan infrastruktur | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang: | 1,00 | 99.260.000,00 | Block Grant | - | 1 paket | 172.520.000,00 |
| 1 | 20 | 16 | 012 | Peningkatan Kemampuan Aparat Sumber Daya Manusia Bidang Statistik | Jumlah tersedianya SDM di bidang Statistik yg berkualitas | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang: | 100,00 Orang | 208.200.000,00 | Block Grant | - | 100 Orang | 208.200.000,00 |
| 1 | 21 | | | Persandian | | | | 348.080.000,00 | | | | 717.770.000,00 |
| 1 | 21 | 16 | | Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Persentase jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan | | 75,00 % | 348.080.000,00 | | | | 717.770.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 21 | 16 | 001 | Pengelolaan Pengendalian dan Pengamanan Dokumen Persandian | Jumlah dokumen sandi yang diamankan | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 642,00 Dokumen | 74.060.000,00 | Block Grant | - | 630 dokumen | 493.210.000,00 |
| 1 | 21 | 16 | 002 | Pengadaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Persandian | Jumlah pengadaan sarana prasarana | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 2,00 Unit | 129.300.000,00 | Block Grant | - | 2 kali | 81.920.000,00 |
| 1 | 21 | 16 | 003 | Pelaksanaan Sistem Persandian dan Materi Persandian | Jumlah Sosialisasi | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 76.860.000,00 | Block Grant | - | 100 Orang | 71.320.000,00 |
| 1 | 21 | 16 | 004 | Pengkajian Data dan Materi Persandian | Jumlah Pengkajian Data | Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 67.860.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 71.320.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 2.610.020.000,00 | | | | 3.472.370.000,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 2.610.020.000,00 | | | | 3.472.370.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 | 2.610.020.000,00 | | | | 3.472.370.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 340.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan jasa telepon, air, listrik | 240.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 14,00 lokasi | 280.275.000,00 | Block Grant | - | 14 ruangan yang dibersihkan | 350.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 30,00 Jenis | 197.500.000,00 | Block Grant | - | 30 jenis ATK | 199.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 5,00 Jenis | 117.345.000,00 | Block Grant | - | 5 jenis | 165.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 7,00 Jenis | 7.000.000,00 | Block Grant | - | 7 jenis | 7.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 5,00 Jenis | 2.256.000,00 | Block Grant | - | 5 jenis | 9.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 50,00 Kali | 369.025.000,00 | Block Grant | - | 50 kali | 295.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidental | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 1,00 Kali | 30.000.000,00 | Block Grant | - | 1 kali keikutsertaan | 60.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 14,00 Jenis | 139.259.000,00 | Block Grant | - | 14 jenis | 352.140.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 16,00 kendaraan | 323.810.000,00 | Block Grant | - | 23 kendaraan | 340.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 5,00 lokasi | 50.640.000,00 | Block Grant | - | 7 ruangan | 50.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 10,00 Jenis | 80.955.000,00 | Block Grant | - | 10 jenis | 75.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 4,00 Kali | 38.895.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 175.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 70.200.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 82.680.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 44.360.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 75.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 79.250.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 96.550.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Dinas KOMINFO Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun, Kota Malang; | 25,00 Kali | 439.250.000,00 | Block Grant | - | 25 kali | 900.000.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 32.974.779.000,00 | | | | 91.613.055.854,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 3.288.937.000,00 | | | | 3.455.202.857,00 |
| 1 | 17 | | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | 3.288.937.000,00 | | | | 3.455.202.857,00 |
| 1 | 17 | 19 | | Program Pembinaan Koperasi | Persentase koperasi aktif | | 87,10 % | 762.420.000,00 | | | | 763.665.550,00 |
| 1 | 17 | 19 | 011 | Fasilitasi Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran Koperasi | Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pembentukan, Perubahan dan Pembubarannya | Koperasi yang ada di Kota Malang, Kota Malang; | 17,00 kop | 38.669.300,00 | Block Grant | - | 20 kop | 40.675.500,00 |
| 1 | 17 | 19 | 001 | Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi | Jumlah Koperasi yang melakukan RAT setelah Bimtek | Koperasi yang ada di Kota Malang, Kota Malang; | 75,00 kop | 53.635.000,00 | Block Grant | - | 86 kop | 54.751.500,00 |
| 1 | 17 | 19 | 002 | Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perkoperasian | Salah satu Hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 70,00 Orang | 55.427.000,00 | Block Grant | - | 81 org | 56.783.550,00 |
| 1 | 17 | 19 | 003 | Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi | Jumlah Pengurus Koperasi atau masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi | Salah satu Hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 300,00 Orang | 188.170.000,00 | Block Grant | - | 345 org | 215.590.500,00 |
| 1 | 17 | 19 | 013 | Bimtek Menejemen Koperasi | Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan dan menerapkan SAKETAP | Salah satu Hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 78,00 kop | 92.350.000,00 | Block Grant | - | 90 kop | 91.827.500,00 |
| 1 | 17 | 19 | 014 | Penilaian Kesehatan bagi USP / KSP | Jumlah Unit Koperasi yang dinilai kesehatannya | Koperasi di Kota Malang, Kota Malang; | 70,00 Surat | 129.140.000,00 | Block Grant | - | 81 kop | 136.436.000,00 |
| 1 | 17 | 19 | 010 | Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi | Jumlah Koperasi yang Patuh | Koperasi di Kota Malang, Kota Malang; | 90,00 Surat | 69.948.700,00 | Block Grant | - | 104 kop | 15.985.000,00 |
| 1 | 17 | 19 | 006 | Fasilitasi Klinik Koperasi | Jumlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi | Jl. Simpang Danau Sentani no 3, Kedungkandang, Kota Malang, Kota Malang; | 380,00 Orang | 91.290.000,00 | Block Grant | - | 437 org | 104.581.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 17 | 19 | 016 | Fasilitasi Peningkatan Akses Permodalan | Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan | Salah Satu Hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 50,00 kop | 42.020.000,00 | Block Grant | - | 58 kop | 45.000.000,00 |
| 1 | 17 | 19 | 017 | Peningkatan Kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi | Jumlah Koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat | Kota Malang, Kota Malang; | 31,00 Sertifikat | 1.770.000,00 | Block Grant | - | 40 sertifikat | 2.035.000,00 |
| 1 | 17 | 17 | | Program Pengembangan Usaha Mikro | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro Yang Naik Menjadi Usaha Kecil | | 70,39 % | 1.829.395.000,00 | | | | 1.886.537.307,00 |
| 1 | 17 | 17 | 008 | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | Kota Malang, Kota Malang; | 35,00 UM | 1.125.790.000,00 | Block Grant | - | 40 um | 1.125.790.000,00 |
| 1 | 17 | 17 | 007 | Fasilitasi Perlindungan Usaha Bagi Produk Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang memiliki ijin, sertifikasi, dan mendapatkan perlindungan Usaha | Kota Malang, Kota Malang; | 40,00 | 59.855.000,00 | Block Grant | - | 52 UM | 168.567.000,00 |
| 1 | 17 | 17 | 001 | Klinik Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan Pendampingan klinik | Kota Malang, Kota Malang; | 3.888,00 Orang | 248.050.000,00 | Block Grant | - | 4471 UM | 164.818.000,00 |
| 1 | 17 | 17 | 009 | Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara On Line dan Off Line | Kota Malang, Kota Malang; | 73,00 UM | 75.000.000,00 | Block Grant | - | 84 UM | 80.293.000,00 |
| 1 | 17 | 17 | 002 | Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro | Jumlah Kerjasama atau MOU dari kegiatan Temu Bisnis | Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 UM | 43.145.000,00 | Block Grant | - | 5 MoU | 43.130.750,00 |
| 1 | 17 | 17 | 003 | Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro | Jumlah stakeholder yang mengikuti Forum komunikasi | Kota Malang, Kota Malang; | 60,00 UM | 213.500,00 | Block Grant | - | 69 UM | 1.250.507,00 |
| 1 | 17 | 17 | 004 | Penyusunan Database Usaha Mikro | Jumlah database Usaha Mikro | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Aplikasi | 174.700.000,00 | Block Grant | - | 1 aplikasi | 167.942.550,00 |
| 1 | 17 | 17 | 005 | Peningkatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | Kota Malang, Kota Malang; | 20,00 UM | 61.305.000,00 | Block Grant | - | 23 UM | 86.342.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 17 | 17 | 010 | Pelatihan Peningkatan Mutu, Desain Produk Usaha dan Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan | Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu, desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan | Kota Malang, Kota Malang; | 55,00 UM | 40.566.500,00 | Block Grant | - | 63 UM | 45.954.000,00 |
| 1 | 17 | 17 | 006 | Fasilitasi Pendampingan Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan | Kota Malang, Kota Malang; | 38,00 UM | 770.000,00 | Block Grant | - | 44 UM | 2.449.500,00 |
| 1 | 17 | 18 | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro | Persentase WUB Mikro yang tumbuh | | 48,60 % | 697.122.000,00 | | | | 805.000.000,00 |
| 1 | 17 | 18 | 001 | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga kerja dan Masyarakat (Calon Wirausaha Baru) | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | Kota Malang, Kota Malang; | 300,00 Orang | 466.157.000,00 | Block Grant | - | 345 Orang | 539.390.250,00 |
| 1 | 17 | 18 | 002 | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Usaha Mikro) | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro) | Kota Malang, Kota Malang; | 135,00 Orang | 230.965.000,00 | Block Grant | - | 155 UM | 265.609.750,00 |
| 2 | | | | Urusan Pilihan | | | | 23.410.093.000,00 | | | | 33.868.962.935,00 |
| 2 | 06 | | | Perdagangan | | | | 20.507.664.000,00 | | | | 29.009.051.435,00 |
| 2 | 06 | 25 | | Program Bina Perdagangan | Persentase Pertumbuhan UKM | | 1,00 % | 1.647.500.600,00 | | | | 2.136.082.249,00 |
| 2 | 06 | 25 | 013 | Operasional UPT. Metrologi | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | JL. Sunandar Priyo Sudarmo No. 22, Kota Malang; | 17,00 Jenis | 385.395.400,00 | Block Grant | - | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | 460.000.000,00 |
| 2 | 06 | 25 | 014 | Pelayanan Tera dan Tera Ulang | Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang | Kantor UPT. Metrologi legal, 22 pasar rakyat, Kelurahan, SPBU/SPBE, dan perusahaan yang memiliki UTTP, Kota Malang; | 13,40 | 4.125.000,00 | Block Grant | - | Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang | 34.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 06 | 25 | 015 | Penyuluhan Kemetrolgian | Jumlah peserta penyuluhan kemetrolgian | salah satu hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 250,00 Orang | 26.045.000,00 | Block Grant | - | Jumlah peserta penyuluhan kemetrolgian | 46.000.000,00 |
| 2 | 06 | 25 | 016 | Pos ukur ulang barang non BDKT | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | kota malang, Kota Malang; | 22,00 Kali | 46.000.000,00 | Block Grant | - | 25 kali | 60.000.000,00 |
| 2 | 06 | 25 | 001 | Sosialisasi Konsumen Cerdas | Jumlah peserta sosialisasi konsumen cerdas | Salah satu hotel dikota malang, Kota Malang; | 125,00 Orang | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 250 peserta | 115.000.000,00 |
| 2 | 06 | 25 | 002 | Publikasi Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya | Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media | Kota Malang, Kota Malang; | 90,00 Kali | 143.780.000,00 | Block Grant | - | 90,00 Kali | 166.175.000,00 |
| 2 | 06 | 25 | 003 | Operasi Pasar dan Pasar Murah | Jumlah pengadaan pasar murah | pasar rakyat di Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Kali | 69.305.200,00 | Block Grant | - | 1,00 Kali | 80.500.000,00 |
| 2 | 06 | 25 | 004 | Pemantauan Ketersediaan atau Distribusi Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya | Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | Distributor di Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Kali | 27.970.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Kali | 34.500.000,00 |
| 2 | 06 | 25 | 005 | Fasilitasi Temu Usaha dan Kemitraan Usaha | Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern | Salah satu hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 80,00 UKM | 45.570.000,00 | Block Grant | - | 80,00 UKM | 55.280.500,00 |
| 2 | 06 | 25 | 006 | Promosi Perdagangan Produk Kota Malang | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | Seluruh Indonesia, Kota Malang; | 10,00 UKM | 452.070.000,00 | Block Grant | - | 10,00 UKM | 672.145.000,00 |
| 2 | 06 | 25 | 007 | Sosialisasi Legalitas Usaha Perdagangan | Jumlah UKM yang mengutus legalitas usaha setelah sosialisasi | Salah satu hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 60,00 UKM | 45.345.000,00 | Block Grant | - | 60,00 UKM | 54.009.750,00 |
| 2 | 06 | 25 | 018 | Pengembangan dan Pemutakhiran Data UKM | Jumlah UKM yang di data | Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 500,00 data | 55.800.000,00 | Block Grant | - | 500,00 data | 64.687.500,00 |
| 2 | 06 | 25 | 008 | Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Gudang | Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | Semua Gudang yang ada di Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 | 39.605.000,00 | Block Grant | - | 5,00 | 47.661.750,00 |
| 2 | 06 | 25 | 009 | Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Sarana Usaha/Distribusi Perdagangan | Jumlah toko modern yang memiliki legalitas usaha dan pembinaan terhadap pengusaha toko modern | Toko modern dan swalayan di Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 | 29.560.000,00 | Block Grant | - | 5,00 | 36.167.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 06 | 25 | 010 | Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Minuman Beralkohol | Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol | Bar, restoran, hotel, dan toko yang menjual minuman beralkohol di Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 | 39.560.000,00 | Block Grant | - | 5,00 | 47.667.500,00 |
| 2 | 06 | 25 | 011 | Bimbingan Teknis Ekspor Bagi UKM Kota Malang | Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang | Salah satu hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 50,00 UKM | 37.815.000,00 | Block Grant | - | 50,00 UKM | 45.637.749,00 |
| 2 | 06 | 25 | 012 | E-Commerce bagi UKM Kota Malang | Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 200,00 UKM | 30.505.000,00 | Block Grant | - | 200,00 UKM | 35.650.000,00 |
| 2 | 06 | 25 | 017 | Pemutakhiran Data Sistem Informasi Pemantauan Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online | Jl. Simpang Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 365,00 hari | 69.050.000,00 | Block Grant | - | 365,00 hari | 80.500.000,00 |
| 2 | 06 | 26 | | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal | Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal | | 100,00 % | 100.000.000,00 | | | | 115.000.000,00 |
| 2 | 06 | 26 | 001 | Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran | Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai | Kota Malang, Kota Malang; | 8,00 Kali | 100.000.000,00 | DBH CHT | - | 8,00 Kali | 115.000.000,00 |
| 2 | 06 | 27 | | Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar | Persentase Penetapan Pasar Rakyat Sebagai Pasar Halal | | 8,00 % | 18.760.163.400,00 | | | | 26.757.969.186,00 |
| 2 | 06 | 27 | 001 | Penataan dan Penyuluhan PKL | Jumlah PKL yang menerima penyuluhan | Salah satu hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 110,00 Orang | 67.750.000,00 | Block Grant | - | 110,00 Orang | 81.650.000,00 |
| 2 | 06 | 27 | 002 | Pengawasan dan Pengendalian PKL | Jumlah papan himbauan PKL | Kota Malang, Kota Malang; | 23,00 Unit | 73.398.000,00 | Block Grant | - | 23,00 Unit | 85.100.000,00 |
| 2 | 06 | 27 | 004 | Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Pasar Rakyat | Jumlah pasar yang terpelihara | Sembilan pasar rakyat di Kota Malang, Kota Malang; | 9,00 | 1.742.909.180,00 | Block Grant | - | 9,00 | 2.006.185.556,00 |
| 2 | 06 | 27 | 005 | Penampungan Pedagang Untuk Revitalisasi Pasar | Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi | 3 pasar rakyat di Kota Malang, Kota Malang; | 427,00 Orang | 973.480.000,00 | Block Grant | - | 427,00 Orang | 1.234.810.000,00 |
| 2 | 06 | 27 | 006 | Revitalisasi Pasar | Jumlah pasar yang direvitalisasi | Lima pasar rakyat di Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 | 8.654.915.020,00 | Block Grant | - | 5,00 | 14.343.513.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 06 | 27 | 008 | Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat Sesuai Standar Nasional Indonesia | Jumlah peserta pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI | Salah satu hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 130,00 Orang | 131.430.000,00 | Block Grant | - | 130,00 Orang | 131.430.000,00 |
| 2 | 06 | 27 | 009 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pasar | Jumlah pengadaan gerobak sampah | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 80,00 Unit | 423.980.000,00 | Block Grant | - | 80,00 Unit | 0,00 |
| 2 | 06 | 27 | 010 | Operasional UPT. Pasar | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 7,00 Jenis | 6.692.301.200,00 | Block Grant | - | 7,00 Jenis | 8.875.280.630,00 |
| 2 | 07 | | | Perindustrian | | | | 2.902.429.000,00 | | | | 4.859.911.500,00 |
| 2 | 07 | 28 | | Program Pengembangan Industri | Persentase Peningkatan Jumlah IKM | | 2,00 % | 2.802.429.000,00 | | | | 4.744.911.500,00 |
| 2 | 07 | 28 | 001 | Pencitraan Produk Industri Kreatif | Jumlah jenis sub sektor industri kreatif yang di branding | Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Jenis | 200.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Jenis | 316.250.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 002 | Pengembangan Kemitraan bagi Industri | Jumlah perjanjian kerjasama | Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 Orang | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 3,00 Orang | 47.725.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 003 | Penyelenggaraan Event Industri Kreatif | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event kreatif | Kota Malang, Kota Malang; | 800,00 Orang | 500.000.000,00 | Block Grant | - | 800,00 Orang | 1.051.675.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 004 | Workshop Teknis Industri Kreatif | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti workshop | Salah satu hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 600,00 IKM | 250.000.000,00 | Block Grant | - | 600,00 IKM | 402.500.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 005 | Forum Stakeholder Industri | Jumlah dokumen perumusan rancangan arah kebijakan pengembangan industri Kota Malang | Kota Malang, Kota Malang; | 50,00 Orang | 45.000.000,00 | Block Grant | - | 50,00 Orang | 70.150.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 006 | Operasional dan aktifasi MCC | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan MCC | Kota Malang, Kota Malang; | 2.000,00 Orang | 281.449.000,00 | Block Grant | - | 2.000,00 Orang | 575.000.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 007 | Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Industri | Jumlah SDM industri yang tersertifikasi | Salah satu hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 25,00 Orang | 150.000.000,00 | Block Grant | - | 25,00 Orang | 253.609.500,00 |
| 2 | 07 | 28 | 008 | Peningkatan Desain dan Teknologi | Jumlah produk industri yang mendapatkan fasilitas peningkatan desain dan teknologi | Salah satu hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 10,00 Unit | 1.490.000,00 | Block Grant | - | 10,00 Unit | 1.713.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 07 | 28 | 009 | Pengembangan dan Pendampingan Industri Hijau | Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan sistem industri hijau | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 IKM | 3.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 IKM | 3.450.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 010 | Pembinaan Penerapan Standar Mutu Produk IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu | Kota Malang, Kota Malang; | 50,00 IKM | 75.000.000,00 | Block Grant | - | 50,00 IKM | 149.500.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 011 | Pemetaan Penyedia Bahan Baku | Jumlah dokumen data penyedia bahan baku industri | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.490.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 0,00 |
| 2 | 07 | 28 | 012 | Pengembangan/Revitalisasi Sentra IKM | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 IKM | 250.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 IKM | 287.500.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 013 | Inkubator Industri | Jumlah IKM yang telah diinkubasi | Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 IKM | 250.000.000,00 | Block Grant | - | 100,00 IKM | 460.000.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 014 | Penguatan Kelembagaan IKM | Jumlah kelembagaan IKM yang mendapatkan legalitas | Kota Malang, Kota Malang; | 300,00 IKM | 75.000.000,00 | Block Grant | - | 300,00 IKM | 0,00 |
| 2 | 07 | 28 | 015 | Fasilitasi Standarisasi Industri dan KI | Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi | Kota Malang, Kota Malang; | 20,00 IKM | 250.000.000,00 | Block Grant | - | 20,00 IKM | 454.250.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 017 | Penyuluhan Bagi IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan | Salah satu hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 300,00 IKM | 75.000.000,00 | Block Grant | - | 300,00 IKM | 1.713.500,00 |
| 2 | 07 | 28 | 018 | Penumbuhan wirusaha baru industri | Jumlah wub industri | Kota Malang, Kota Malang; | 80,00 | 150.000.000,00 | Block Grant | - | 80,00 | 201.250.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 019 | Pemantauan dan Pengawasan IKM | Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi | IKM di Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 IKM | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 100,00 IKM | 57.500.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 020 | Pengembangan produk IKM | Jumlah produk yang dikembangkan | Kota Malang, Kota Malang; | 16,00 Unit | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 16,00 Unit | 230.000.000,00 |
| 2 | 07 | 28 | 016 | Pengembangan Sistem Informasi Data Industri | Jumlah sistem informasi yang terintegrasi | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 1,00 Sistem | 120.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Sistem | 181.125.000,00 |
| 2 | 07 | 29 | | Program Pembinaan Industri | Persentase IHT yang dibina | | 30,00 % | 100.000.000,00 | | | | 115.000.000,00 |
| 2 | 07 | 29 | 001 | Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikasi/Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok | Jumlah mesin pelinting yang di awasi | Kota Malang, Kota Malang; | 40,00 Unit | 50.000.000,00 | DBH CHT | - | 46 Mesin Pelinting Rokok | 57.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 07 | 29 | 002 | Pemetaan Industri Hasil tembakau | Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT | kota malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 50.000.000,00 | DBH CHT | - | 1 dokumen | 57.500.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 6.275.749.000,00 | | | | 54.288.890.062,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 6.275.749.000,00 | | | | 54.288.890.062,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 6.275.749.000,00 | | | | 54.288.890.062,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 4.101,00 Surat | 877.500.000,00 | Block Grant | - | 4.101,00 Surat | 1.009.125.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 457.205.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 238.285.748,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 2.755,00 m2 | 180.000.000,00 | Block Grant | - | 2.755,00 m2 | 207.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 87,00 Jenis | 260.978.023,00 | Block Grant | - | 87,00 Jenis | 300.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 15,00 Jenis | 687.884.807,00 | Block Grant | - | 15,00 Jenis | 566.950.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 8,00 Jenis | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 8,00 Jenis | 23.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 3,00 Jenis | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 3,00 Jenis | 23.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 7.849,00 Kotak | 331.525.000,00 | Block Grant | - | 7.849,00 Kotak | 241.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Seluruh Indonesia, Kota Malang; | 80,00 Kali | 770.710.580,00 | Block Grant | - | 80,00 Kali | 3.028.214.730,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Kali | 60.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Kali | 69.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 066 | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Jl. Trunojoyo No 1, Kota Malang; | 83.479,00 | 950.000.000,00 | Block Grant | - | 83.479,00 | 1.092.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Seluruh Indonesia, Kota Malang; | 82,00 peserta | 300.000.000,00 | Block Grant | - | 82,00 peserta | 345.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 250,00 m2 | 110.845.590,00 | Block Grant | - | 250,00 m2 | 604.722.428,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 80,00 kendaraan | 472.000.000,00 | Block Grant | - | 80,00 kendaraan | 744.050.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 002 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 175.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 115.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 6,00 Dokumen | 1.500.000,00 | Block Grant | - | 6,00 Dokumen | 11.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 99.480.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 45.255.156.656,00 |
| 5 | 01 | 07 | 005 | Penyusunan bahan Anjab/ABK | Jumlah bahan anjab/abk skpd | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 32.280.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 57.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 500.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 6.060.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 009 | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 31.930.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 40.250.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jl. Siimpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 4,00 Dokumen | 11.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 6.325.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Salah satu hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 71.150.000,00 | Block Grant | - | 1,00 % | 86.250.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 015 | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 213.760.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 34.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Simpang Danau Sentani No.3 , Kota Malang; | 6,00 Jenis | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 6,00 Jenis | 57.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 Jenis | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 4,00 Jenis | 115.000.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 14.618.947.000,00 | | | | 15.508.974.190,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 5.001.511.080,00 | | | | 5.501.100.600,00 |
| 1 | 19 | | | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | 5.001.511.080,00 | | | | 5.501.100.600,00 |
| 1 | 19 | 20 | | Program Pembinaan Kepemudaan | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | | 1,00 % | 1.129.715.080,00 | | | | 1.242.125.000,00 |
| 1 | 19 | 20 | 003 | Pembinaan Kewirausahaan Pemuda | Jumlah pemuda peserta pembinaan | Jl. Tenes, Kota Malang; | 50,00 Orang | 61.400.000,00 | Block Grant | - | 50 orang | 67.500.000,00 |
| 1 | 19 | 20 | 005 | Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang | Jumlah paskibraka terpilih | Jl. Tenes, Kota Malang; | 78,00 Orang | 617.775.000,00 | Block Grant | - | 78 orang | 679.552.000,00 |
| 1 | 19 | 20 | 006 | Pembinaan calon pemuda pelopor | Jumlah pemuda pelopor terpilih | Jl. Tenes, Kota Malang; | 12,00 Orang | 99.780.000,00 | Block Grant | - | 12 orang | 109.758.000,00 |
| 1 | 19 | 20 | 007 | Penyelenggaraan JPD dan JPI | Jumlah pemuda terpilih | Jl. Tenes, Kota Malang; | 2,00 Orang | 36.650.000,00 | Block Grant | - | 2 orang | 40.315.000,00 |
| 1 | 19 | 20 | 008 | Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda | Jumlah Peserta Sosialisasi | Jl. Tenes, Kota Malang; | 60,00 Orang | 31.568.080,00 | Block Grant | - | 60 orang | 35.000.000,00 |
| 1 | 19 | 20 | 013 | Festival Kepemudaan | Jumlah peserta festival | Jl. Tenes, Kota Malang; | 300,00 peserta | 282.542.000,00 | Block Grant | - | 300 peserta | 310.000.000,00 |
| 1 | 19 | 21 | | Program Pembinaan Keolahragaan | Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga | | 0,14 % | 3.871.796.000,00 | | | | 4.258.975.600,00 |
| 1 | 19 | 21 | 003 | Pembinaan olahraga tradisional | Jumlah olahraga tradisional yang dibina | Jl. Tenes, Kota Malang; | 100,00 Jenis | 53.395.200,00 | Block Grant | - | 1 jenis | 58.734.720,00 |
| 1 | 19 | 21 | 004 | Invitasi Olahraga Tradisional | Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi | Jl. Tenes, Kota Malang; | 4,00 Jenis | 80.546.400,00 | Block Grant | - | 4 jenis | 88.601.040,00 |
| 1 | 19 | 21 | 005 | Pembinaan Olahraga Rekreasi | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina | Lokasi Kegiatan di GOR Ken Arok dan Stadion Luar GOR Gajayana Kota Malang. Jl. Tenes dan jl. Mayjen Sungkono, Kota Malang; | 3,00 Jenis | 215.014.500,00 | Block Grant | - | 3 jenis | 236.515.950,00 |
| 1 | 19 | 21 | 006 | Peringatan Haornas | Jumlah Kegiatan | Jl. Tenes, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 87.836.400,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 96.620.040,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 19 | 21 | 007 | Fasilitasi kegiatan keolahragaan | Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi | Jl. Tenes, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 228.140.000,00 | Block Grant | - | 2 kegiatan | 250.954.000,00 |
| 1 | 19 | 21 | 008 | Pembinaan Olahraga Paralimpyan | Jumlah Olahraga Paralympian yang di bina | Jl. Tenes, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 100.164.600,00 | Block Grant | - | 6 jenis | 110.181.060,00 |
| 1 | 19 | 21 | 017 | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya | Jl. Tenes, Kota Malang; | 5,00 Orang | 950.447.270,00 | Block Grant | - | 5 paket | 1.045.491.997,00 |
| 1 | 19 | 21 | 018 | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok | Jl. Tenes, Kota Malang; | 1,00 Orang | 177.110.000,00 | Block Grant | - | 1 paket | 194.821.000,00 |
| 1 | 19 | 21 | 019 | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana | Jl. Tenes, Kota Malang; | 6,00 Orang | 872.442.730,00 | Block Grant | - | 6 paket | 959.687.003,00 |
| 1 | 19 | 21 | 022 | Pendataan Komunitas Olahraga | Jumlah dokumen data komunitas olahraga | Jl. Tenes, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 34.902.900,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 38.393.190,00 |
| 1 | 19 | 21 | 023 | Pengiriman atlet POR SD MI | Jumlah atlet | Jawa Timur, Kota Malang; Jl. Tenes, Kota Malang; | 226,00 Orang | 777.709.200,00 | Block Grant | - | 226 orang | 855.480.120,00 |
| 1 | 19 | 21 | 024 | Seleksi atlet POR SD MI | Jumlah cabor | Universitas Negeri Malang, Kota Malang; | 12,00 | 159.926.400,00 | Block Grant | - | 12 cabang olahraga | 175.919.040,00 |
| 1 | 19 | 21 | 025 | Pemusatan latihan POR SD MI | Jumlah cabor | Jl. Tenes, Kota Malang; | 12,00 | 99.666.640,00 | Block Grant | - | 12 Cabang Olahraga | 109.633.304,00 |
| 1 | 19 | 21 | 028 | Pendataan Potensi Olahraga | Jumlah dokumen data potensi olahraga | Jl. Tenes, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 34.493.760,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 37.943.136,00 |
| 2 | | | | Urusan Pilihan | | | | 2.730.166.000,00 | | | | 3.145.213.700,00 |
| 2 | 02 | | | Pariwisata | | | | 2.730.166.000,00 | | | | 3.145.213.700,00 |
| 2 | 02 | 17 | | Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata | Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina | | 35,00 % | 1.475.289.000,00 | | | | 1.890.336.700,00 |
| 2 | 02 | 17 | 001 | Pengembangan Kelompok Sadar Wisata | Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina | Wilayah Malang Raya, Kota Malang; | 10,00 Orang | 148.289.000,00 | Block Grant | - | 10 kelompok | 155.000.000,00 |
| 2 | 02 | 17 | 036 | Kegiatan Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina | Wilayah Kota Malang, Kota Malang; | 674,00 | 69.500.000,00 | Block Grant | - | 600 orang | 75.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 02 | 17 | 004 | Event Pariwisata | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata | Wilayah Kota Malang, Kota Malang; | 15,00 Orang | 680.000.000,00 | Block Grant | - | 15 peserta | 900.982.500,00 |
| 2 | 02 | 17 | 003 | Penguatan Wisata Halal | Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar | Wilayah Kota Malang, Kota Malang; | 180,00 Orang | 297.000.000,00 | Block Grant | - | 180 orang | 391.682.500,00 |
| 2 | 02 | 17 | 037 | Kegiatan Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan | Wilayah Kota Malang, Kota Malang; | 50,00 | 80.000.000,00 | Block Grant | - | 50 peserta | 104.979.600,00 |
| | | | | | Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina | | 40,00 % | | | | | |
| 2 | 02 | 17 | 006 | Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi | Hotel di Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 | 69.500.000,00 | Block Grant | - | 100 orang | 89.469.600,00 |
| 2 | 02 | 17 | 038 | Penguatan Wisata Heritage | Jumlah pelaku wisata heritage | Wilayah Kota Malang, Kota Malang; | 10,00 | 131.000.000,00 | Block Grant | - | 10 komunitas | 173.222.500,00 |
| 2 | 02 | 18 | | Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | Persentase Pemasaran Pariwisata | | 55,00 % | 1.254.877.000,00 | | | | 1.254.877.000,00 |
| 2 | 02 | 18 | 003 | Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih | Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan | Jalan Tenes (Stadion Gajayana), Kota Malang; | 20,00 | 263.180.000,00 | Block Grant | - | jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan | 263.180.000,00 |
| 2 | 02 | 18 | 004 | Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi | Jalan Tenes (Stadion Gajayana), Kota Malang; | 28,00 | 303.327.000,00 | Block Grant | - | jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi | 303.327.000,00 |
| 2 | 02 | 18 | 007 | Festival Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival | Jalan Tenes (Stadion Gajayana), Kota Malang; | 75,00 | 276.550.000,00 | Block Grant | - | jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif (fashion) yang dibina | 276.550.000,00 |
| 2 | 02 | 18 | 008 | Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan | Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi | Jalan Tenes (Stadion Gajayana), Kota Malang; | 85,00 | 200.000.000,00 | Block Grant | - | jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi | 200.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 02 | 18 | 009 | Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi pariwisata/ | Jalan Tenes (Stadion Gajayana), Kota Malang; | 2,00 | 61.820.000,00 | Block Grant | - | jumlah paket wisata dan promosi ekraf | 61.820.000,00 |
| | | | | | Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif | | 30,00 % | | | | | |
| 2 | 02 | 18 | 005 | Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan | Jalan Tenes (Stadion Gajayana), Kota Malang; | 50,00 | 50.000.000,00 | Block Grant | - | jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina | 50.000.000,00 |
| 2 | 02 | 18 | 006 | Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina | Jalan Tenes (Stadion Gajayana), Kota Malang; | 6,00 | 100.000.000,00 | Block Grant | - | jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina | 100.000.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 6.887.269.920,00 | | | | 6.862.659.890,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 6.887.269.920,00 | | | | 6.862.659.890,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 6.887.269.920,00 | | | | 6.862.659.890,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jalan Tenes, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 954.519.220,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 954.519.220,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jalan Tenes, Kota Malang; | 19,00 Orang | 768.091.500,00 | Block Grant | - | 20 | 768.091.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jalan Tenes, Kota Malang; | 128.207,00 Jenis | 196.099.500,00 | Block Grant | - | 128207 jenis | 196.099.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jalan Tenes, Kota Malang; | 214,00 Jenis | 44.562.000,00 | Block Grant | - | 214 buah | 49.018.200,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jalan Tenes, Kota Malang; | 4,00 Jenis | 18.200.000,00 | Block Grant | - | 4 jenis | 20.020.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jalan Tenes, Kota Malang; | 81.482,00 Kotak | 1.170.615.000,00 | Block Grant | - | 2800 porsi | 1.170.615.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jalan Tenes, Kota Malang; | 1.579,00 Kali | 499.695.000,00 | Block Grant | - | 20 kali | 499.695.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 045 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | Jalan Tenes, Kota Malang; | 7,00 Orang | 310.740.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 310.740.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Lapangan Tenes, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 13.650.000,00 | Block Grant | - | 1kegiatan | 13.650.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 052 | Pengelolaan perpustakaan dan arsip | Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | Jalan Tenes, Kota Malang; | 95,00 Dokumen | 26.250.000,00 | Block Grant | - | 95 dokumen | 26.250.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 035 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jalan Tenes, Kota Malang; | 24,00 kendaraan | 52.200.000,00 | Block Grant | - | 24 kendaraan | 57.420.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jalan Tenes, Kota Malang; | 4.500,00 Surat | 174.860.000,00 | Block Grant | - | 4500 surat | 174.860.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 066 | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Jalan Tenes, Kota Malang; | 34.000,00 Liter | 144.870.300,00 | Block Grant | - | 34000 liter | 159.357.330,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jalan Tenes, Kota Malang; | 5,00 Jenis | 612.450.000,00 | Block Grant | - | 5 | 612.450.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jalan Tenes, Kota Malang; | 24,00 kendaraan | 181.260.000,00 | Block Grant | - | 28 kendaraan | 181.260.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 063 | Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus | Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus | Jalan Tenes, Kota Malang; | 21,00 Orang | 37.600.000,00 | Block Grant | - | 21 stel | 41.360.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Jalan Tenes, Kota Malang; | 1,00 | 305.000.000,00 | Block Grant | - | 1 gedung | 335.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jalan Tenes, Kota Malang; | 5,00 Jenis | 68.600.000,00 | Block Grant | - | 5 jenis | 68.600.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 002 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Jl. Tenes, Kota Malang; | 5,00 | 197.020.000,00 | Block Grant | - | 5 dokumen | 106.722.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 087 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jalan Tenes, Kota Malang; | 4,00 Jenis | 101.900.000,00 | Block Grant | - | 4 unit | 112.090.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jalan Tenes, Kota Malang; | 2,00 Orang | 193.600.000,00 | Block Grant | - | 220 orang | 212.960.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Tenes, Kota Malang; | 4,00 laporan | 96.250.000,00 | Block Grant | - | 4 laporan | 110.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jalan. Tenes., Kota Malang; | 1,00 laporan | 257.520.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen Renstra 5 Tahun. | 175.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 047 | Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi | Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi | Jalan Tenes, Kota Malang; | 305,00 Bulan | 165.597.400,00 | Block Grant | - | 305 publikasi | 182.157.140,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jalan Tenes., Kota Malang; | 6,00 laporan | 60.000.000,00 | Block Grant | - | 6 Dokumen Laporan Kinerja 2021. | 150.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jalan. Tenes., Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 139.120.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen RENJA 2022 | 150.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 109 | Penyusunan Standar Pelayanan Publik | jumlah dokumen SPP | Jl. Tenes, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 97.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 24.225.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 3.221.135.000,00 | | | | 3.972.116.390,00 |
| 1 | | | | Urusan Wajib | | | | 1.194.255.000,00 | | | | 1.486.950.300,00 |
| 1 | 23 | | | Perpustakaan | | | | 990.505.000,00 | | | | 1.207.847.300,00 |
| 1 | 23 | 18 | | Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan | Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi | | 15,00 % | 347.110.000,00 | | | | 500.112.800,00 |
| 1 | 23 | 18 | 001 | Pengembangan koleksi perpustakaan | Jumlah Tambah Judul koleksi | Jl. Ijen No. 30 A , Kota Malang; | 1.392,00 | 287.110.000,00 | Block Grant | - | 2260 Judul | 422.870.800,00 |
| 1 | 23 | 18 | 002 | Pengolahan bahan perpustakaan | Jumlah bahan perpustakaan dan terbitan berkala yang Diolah | Jl. Ijen No. 30 A, Kota Malang; | 2.000,00 eksemplar | 22.480.000,00 | Block Grant | - | 4.500 eksemplar & 30 jenis terbitan berkala | 35.970.000,00 |
| 1 | 23 | 18 | 003 | Preservasi Koleksi Perpustakaan | Jumlah koleksi perpustakaan yang dipreservasi | Jl. Ijen No. 30 A, Kota Malang; | 7.500,00 | 37.520.000,00 | Block Grant | - | 10000 eksemplar | 41.272.000,00 |
| 1 | 23 | 19 | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan | | 90,00 % | 643.395.000,00 | | | | 707.734.500,00 |
| 1 | 23 | 19 | 001 | Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpusatakaan | Jumlah acara pengembangan dan pembinaan budaya baca yang dilaksanakan | Jl. Ijen No. 30 A, Kota Malang; | 4,00 | 222.275.000,00 | Block Grant | - | 4 Kegiatan | 244.502.500,00 |
| 1 | 23 | 19 | 002 | Peningkatan Pelayanan Perpustakaan | jumlah laporan peningkatan layanan | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 12,00 laporan | 421.120.000,00 | Block Grant | - | 24 Laporan | 463.232.000,00 |
| 1 | 24 | | | Kearsipan | | | | 203.750.000,00 | | | | 279.103.000,00 |
| 1 | 24 | 15 | | Program Pengelolaan Arsip Daerah | Persentase peningkatan dokumen arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan | | 12,00 % | 203.750.000,00 | | | | 279.103.000,00 |
| 1 | 24 | 15 | 001 | Pengembangan data base informasi kearsipan | Jumlah penambahan data base online | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 100,00 | 45.000.000,00 | Block Grant | - | 100 Database | 49.500.000,00 |
| 1 | 24 | 15 | 002 | Pengolahan arsip | Jumlah arsip yang diolah | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 8.000,00 | 106.330.000,00 | Block Grant | - | 5025 Arsip | 119.603.000,00 |
| 1 | 24 | 15 | 003 | Sosialisasi perlindungan dan penyelamatan arsip sejarah | Jumlah peserta yang sadar arsip | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 100,00 Orang | 52.420.000,00 | Block Grant | - | 100 Orang | 110.000.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 2.026.880.000,00 | | | | 2.485.166.090,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 2.026.880.000,00 | | | | 2.485.166.090,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 2.026.880.000,00 | | | | 2.485.166.090,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 1.500,00 Surat | 19.250.000,00 | Block Grant | - | 1.500 surat | 21.175.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 291.416.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 344.696.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 2.877,62 m2 | 194.488.000,00 | Block Grant | - | Luas ruangan yang dibersihkan / 2.877,62 m2 | 213.937.790,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 96,00 Jenis | 107.235.000,00 | Block Grant | - | 110 jenis | 117.958.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jalan Ijen 30 A, Kota Malang; | 7,00 Jenis | 17.640.000,00 | Block Grant | - | 7 jenis | 19.404.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 8,00 Jenis | 8.250.000,00 | Block Grant | - | 8 jenis | 9.075.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 3.000,00 Orang | 157.785.000,00 | Block Grant | - | 3300 orang | 173.563.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 15,00 Kali | 174.730.000,00 | Block Grant | - | 20 kali | 302.203.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidental | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 1,00 Kali | 33.000.000,00 | Block Grant | - | 1 kali | 36.300.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 045 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 2,00 Orang | 78.910.000,00 | Block Grant | - | 2 orang | 86.801.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 053 | Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas | Jumlah pengemudi/supir dinas | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 2,00 Orang | 70.810.000,00 | Block Grant | - | 2 orang | 77.891.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 13,00 Jenis | 111.210.000,00 | Block Grant | - | 19 jenis | 243.789.700,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 1,00 Unit | 105.430.000,00 | Block Grant | - | 1 paket | 115.973.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 15,00 Unit | 250.080.000,00 | Block Grant | - | 15 unit | 275.088.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 9,00 Jenis | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 9 jenis | 110.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. Ijen No. 30A, Kota Malang; | 12,00 Dokumen | 5.500.000,00 | Block Grant | - | 10 Dokumen | 6.050.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 66.400.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 73.040.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 67.550.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen | 74.305.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 76.706.000,00 | Block Grant | - | 2 Dokumen | 84.376.600,00 |
| 5 | 01 | 07 | 058 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 1,00 | 10.490.000,00 | Block Grant | - | 1 paket | 11.539.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. Ijen 30 A, Kota Malang; | 48,00 Kali | 9.700.000,00 | Block Grant | - | 48 kali | 10.670.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 098 | Pemeliharaan rutin/berkala maubelair | Jumlah jenis meubelair yang dipelihara | Jl. Ijen 30A, Kota Malang; | 2,00 Jenis | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 2 jenis | 16.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 102 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan | Jl Ijen 30 A, Kota Malang; | 8,00 Orang | 55.300.000,00 | Block Grant | - | 8 kali | 60.830.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|----|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------|---------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | | | | Belanja Langsung Urusan Penunjang Pemerintahan | | | | 10.018.540.000,00 7.247.188.200,00 | | | | 11.786.676.000,00 8.373.255.000,00 |
| 3 | 1 | | | Perencanaan | | | | 5.052.478.200,00 | | | | 5.828.815.000,00 |
| 3 | 1 | 19 | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPDP. | | 100,00% | 1.694.877.000,00 | | | | 2.042.020.000,00 |
| 3 | 1 | 19 | 1 | Analisa Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen Analisa Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jl. Tugu No. 1, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 397.577.000,00 | Block Grant | | 2 dokumen | 290.570.000,00 |
| 3 | 1 | 19 | 2 | Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | Jumlah dokumen RKPDP | Jl. Tugu No. 1, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 165.600.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 900.000.000,00 |
| 3 | 1 | 19 | 4 | Pemantauan/Pemutakhiran Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | Jumlah tahapan pemantauan/pemutakhiran SIPD | Jl. Tugu no. 1, Kota Malang; | 4 | 573.700.000,00 | Block Grant | - | 4 tahapan | 323.950.000,00 |
| 3 | 1 | 19 | 7 | Penyusunan /Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | Jumlah dokumen RPJMD | Jl. Tugu No. 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 269.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 200.000.000,00 |
| | | | | | Persentase Capaian Program Dan Kegiatan Pada RKPDP | | 93,00% | | | | | |
| 3 | 1 | 19 | 8 | Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan | Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi | Jl. Tugu no. 1, Kota Malang; | 32,00 Dokumen | 289.000.000,00 | Block Grant | - | 116 dokumen | 327.500.000,00 |
| 3 | 1 | 20 | | Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Persentase Penyusunan Renstra & Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam Yang Sesuai Dengan Tahapan Dan Tata Cara. | | 90,00% | 841.960.000,00 | | | | 970.630.000,00 |
| 3 | 1 | 20 | 1 | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan | Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang perencanaan ekonomi dan keuangan | Jl. Tugu no. 1, Kota Malang; | 12,00 Dokumen | 42.040.000,00 | Block Grant | - | 12 dokumen | 46.620.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|----|----|--|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 1 | 20 | 2 | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam | Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang perencanaan sumberdaya alam | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 8,00 Dokumen | 85.060.000,00 | Block Grant | | 8 dokumen | 75.980.000,00 |
| 3 | 1 | 20 | 3 | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata | Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang perencanaan penanaman modal dan pariwisata | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 8,00 Dokumen | 85.060.000,00 | Block Grant | - | 8 dokumen | 100.000.000,00 |
| 3 | 1 | 20 | 5 | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Sub Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 1 | 33.360.000,00 | Block Grant | - | 1 Rakortek Sumber Daya Alam | 54.610.000,00 |
| 3 | 1 | 20 | 6 | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 1 | 122.170.000,00 | Block Grant | - | 1 musrenbang tematik (Musrenbang Pemuda) | 95.000.000,00 |
| 3 | 1 | 20 | 13 | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis subbidang perencanaan Ekonomi dan Keuangan | Jumlah pelaksanaan musrenbang/ Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 2 | 161.480.000,00 | Block Grant | - | 1 musrenbang tematik CSR dan 1 Rakortek Ekonomi | 150.000.000,00 |
| | | | | | | | 90,00% | | | | | |
| 3 | 1 | 20 | 8 | Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor sumber daya alam | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 69.880.000,00 | Block Grant | - | Money target pencapaian RAD PG RAD API dan PPRKD | 149.900.000,00 |
| 3 | 1 | 20 | 12 | Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif kota Malang | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 242.910.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen | 298.520.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|----|---|--|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 1 | 21 | | Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Penyusunan Renstra & Renja Perangkat Daerah Mitra bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Sesuai Dengan Tahapan Dan Tata Cara. | | 90,00% | 1.184.370.000,00 | | | | 1.336.700.000,00 |
| 3 | 1 | 21 | 1 | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia | Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 8,00 Dokumen | 150.540.000,00 | Block Grant | | 8 dokumen | 156.580.000,00 |
| 3 | 1 | 21 | 2 | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan | Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra Subbidang Perencanaan Pemerintahan | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 20,00 Dokumen | 147.160.000,00 | Block Grant | | 20 dokumen | 134.480.000,00 |
| 3 | 1 | 21 | 3 | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat mitra pada Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 24,00 Dokumen | 125.280.000,00 | Block Grant | | 24 dokumen | 163.030.000,00 |
| 3 | 1 | 21 | 4 | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 4 | 458.850.000,00 | Block Grant | | 4 musrenbang tematik dan 2 kali Rapat Koordinasi Teknis | 544.020.000,00 |
| 3 | 1 | 21 | 6 | Rencana Induk/ Grand Design/ Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah dokumen rencana induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan sektor Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 177.540.000,00 | Block Grant | | 2 Dokumen | 188.590.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|---|----|----|---|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 1 | 21 | 5 | Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia | Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Ditindaklanjuti. Jumlah dokumen rencana induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan Sektor Pembangunan Manusia | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 90,00% 1,00 Dokumen | 125.000.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 150.000.000,00 |
| 3 | 1 | 22 | | Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Penyusunan Renstra & Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Yang Seuai Dengan Tahapan Dan Tata Cara | | 90,00% | 1.331.271.200,00 | | | | 1.479.465.000,00 |
| 3 | 1 | 22 | 4 | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Infrastruktur | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 1 | 55.480.000,00 | Block Grant | | 1 Rakortek infrastruktur | 37.060.000,00 |
| 3 | 1 | 22 | 5 | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Subbidang Perencanaan Kewilayahan | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 1 | 41.480.000,00 | Block Grant | | 1 Rakortek kewilayahan | 42.650.000,00 |
| 3 | 1 | 22 | 6 | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 1 | 8.340.000,00 | Block Grant | | 1 Rakortek perhubungan dan komunikasi | 32.150.000,00 |
| 3 | 1 | 22 | 14 | Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perencanaan Infrastruktur | Jumlah dokumen penyusunan/ operasional dan pengembangan (pemutakhiran) data base dan sistem informasi Sektor Perencanaan Infrastruktur | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 7,00 Dokumen | 104.360.000,00 | Block Grant | | 7 dokumen | 100.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|----|---|---|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 1 | 22 | 1 | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Perkotaan | Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada Subbidang Perencanaan Infrastruktur | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 4,00 OPD | 61.030.000,00 | Block Grant | | 4 dokumen | 44.300.000,00 |
| 3 | 1 | 22 | 2 | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan | Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada Subbidang Perencanaan Kewilayahan | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 20,00 OPD | 345.200.000,00 | Block Grant | - | 20 dokumen | 332.155.000,00 |
| 3 | 1 | 22 | 3 | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 8,00 OPD | 59.280.000,00 | Block Grant | - | 8 dokumen | 46.700.000,00 |
| | | | | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | | 75,00% | | | - | | |
| 3 | 1 | 22 | 7 | Verifikasi dan monitoring usulan kegiatan perencanaan pembangunan dengan RTRW | Jumlah perangkat daerah yang diverifikasi dan dimonitoring rencana kerja pembangunan daerah (renja) | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 23 | 42.370.000,00 | Block Grant | | 23 PD | 44.450.000,00 |
| | | | | | Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Infrastruktur Dan Kewilayahan Yang Mendukung Perencanaan | | 90,00% | | | - | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|----------|-----------|----|--|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 1 | 22 | 9 | Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Wilayah | Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan Sektor Perencanaan Wilayah | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 211.130.000,00 | Block Grant | | 2 dokumen | 400.000.000,00 |
| 3 | 1 | 22 | 11 | Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Wilayah | Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Wilayah | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 402.601.200,00 | Block Grant | | 2 dokumen | 400.000.000,00 |
| 3 | 4 | | | Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan | | | | 2.194.710.000,00 | | | | 2.544.440.000,00 |
| 3 | 4 | 20 | | | Persentase implementasi rencana kelitbangan | | 60,00% | 2.194.710.000,00 | | | | 2.544.440.000,00 |
| 3 | 4 | 20 | 1 | Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan untuk percepatan pembangunan daerah | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 5,00 Dokumen | 1.776.680.000,00 | Block Grant | | 6 dokumen | 1.987.940.000,00 |
| 3 | 4 | 20 | 3 | Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan | Jumlah dokumen publikasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ pendampingan hasil penelitian dan pengembangan | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 2,00 Jurnal | 79.860.000,00 | Block Grant | | 2 jurnal penelitian | 165.000.000,00 |
| | | | | | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | | 7,14% | | | | | |
| 3 | 4 | 20 | 5 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang inovasi | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 61.870.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 62.630.000,00 |
| 3 | 4 | 20 | 6 | Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Malang | Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Malang | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 90,00 Proposal | 276.300.000,00 | Block Grant | | 182 proposal | 328.870.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 2.771.351.800,00 | | | | 3.413.421.000,00 |
| 5 | 1 | | | Umum | | | | 2.771.351.800,00 | | | | 3.413.421.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|---|----|--|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 1 | 7 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00% | 2.771.351.800,00 | | | | 3.413.421.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 43 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 7.280,00 | 377.000.000,00 | Block Grant | - | 8000 kotak | 342.130.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 10 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 50.840.000,00 | Block Grant | - | 4 Dokumen (RKA, PRKA, DPA, DPPA) | 50.600.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 12 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 60.350.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 76.400.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 13 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 91.100.000,00 | Block Grant | - | 2 Dokumen Renja | 98.400.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 3 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 6,00 Dokumen | 8.750.000,00 | Block Grant | - | 6 dokumen | 18.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 4 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 5,00 Dokumen | 4.900.000,00 | Block Grant | - | 5 dokumen | 5.420.000,00 |
| | | | | | Nilai survey kepuasan internal | | 80,00 data | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 32 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 12 | 19.200.000,00 | Block Grant | - | 12 kali | 15.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 34 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 26 | 27.000.000,00 | Block Grant | - | 20 unit | 27.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 35 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 26 | 11.000.000,00 | Block Grant | - | 20 unit | 7.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 36 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 1.250,00 SPM | 68.450.000,00 | Block Grant | - | 1250 SPM | 95.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 37 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 240 | 149.228.500,00 | Block Grant | - | 240 kali | 125.079.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 38 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 76,00 ATK | 240.623.500,00 | Block Grant | - | 75 jenis ATK | 240.817.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 39 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 7 | 65.240.000,00 | Block Grant | - | 7 jenis barang cetakan | 117.482.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|---|----|---|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 1 | 7 | 42 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 0 | 11.769.000,00 | Block Grant | | 12 kali | 11.769.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 44 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | -, Kota Malang; | 81,00 Kali | 685.500.000,00 | Block Grant | | 51 kali | 1.254.740.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 47 | Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi | Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 225,00 Kali | 207.140.000,00 | Block Grant | Jl. Tugu no. 1 | 225 kali publikasi media | 256.580.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 72 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 47,00 Orang | 112.640.000,00 | Block Grant | | 47 orang | 84.500.000,00 |
| | | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | 80,00% | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 40 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 5,00 Jenis | 10.000.000,00 | Block Grant | | 4 jenis komponen listrik | 8.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 61 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 26 | 184.960.000,00 | Block Grant | | 8 jenis 73 buah | 147.676.500,00 |
| 5 | 1 | 7 | 18 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 2,00 Ruangan | 46.160.800,00 | Block Grant | | 2 ruangan | 54.770.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 26 | 90.000.000,00 | Block Grant | | 20 unit | 95.585.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 66 | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 6.961,00 Liter | 80.000.000,00 | Block Grant | | 6.194 liter | 96.010.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 2 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 6 | 59.500.000,00 | Block Grant | | 6 dokumen | 35.574.500,00 |
| 5 | 1 | 7 | 49 | Penyediaan jasa perpindahan kantor | Jumlah perpindahan kantor | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 1,00 Kali | 70.000.000,00 | Block Grant | | 1 kali pindah | 100.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Tugu no. 1 , Kota Malang; | 57,00 Jenis | 40.000.000,00 | Block Grant | | 72 unit | 49.888.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Badan Pendapatan Daerah

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|----|---|--|--|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | | | | Belanja Langsung Urusan Penunjang Pemerintahan | | | | 14.178.530.000,00 | | | | 17.034.655.000,00 |
| 3 | 2 | | | Keuangan | | | | 6.938.433.000,00 | | | | 7.994.558.000,00 |
| 3 | 2 | 24 | | Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | | 18,96% | 1.348.230.000,00 | | | | 1.904.355.000,00 |
| 3 | 2 | 24 | 2 | Perencanaan Dan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah | BAPENDA, Kota Malang; | 22 | 290.110.000,00 | Block Grant | | 22 dokumen | 390.110.000,00 |
| 3 | 2 | 24 | 3 | Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah | Jumlah dokumen hasil analisa pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah | Kota Malang, Kota Malang; | 2 | 266.415.000,00 | Block Grant | | 2 dokumen | 316.415.000,00 |
| 3 | 2 | 24 | 1 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah | Jumlah sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang terintegrasi dan terpelihara | BAPENDA, Kota Malang; | 1,00 Sistem | 791.705.000,00 | Block Grant | | 1 sistem | 1.197.830.000,00 |
| 3 | 2 | 25 | | Program Pelayanan Pajak Daerah | Kontribusi pajak daerah terhadap PAD | | 82,97% | 3.282.030.000,00 | | | | 3.582.030.000,00 |
| 3 | 2 | 25 | 1 | Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I | Jumlah data PBB yang dimutakhirkan | Kota Malang, Kota Malang; | 25.000,00 | 755.570.000,00 | Block Grant | | 25000 Data PBB | 1.055.570.000,00 |
| 3 | 2 | 25 | 2 | Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah I | Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah I yang ditetapkan dan didistribusikan | Kota Malang, Kota Malang; | 182.000,00 | 1.906.380.000,00 | Block Grant | | - 174000 SPPT PBB; - 8000 OP | 1.906.380.000,00 |
| 3 | 2 | 25 | 3 | Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah II | Jumlah Obyek Pajak yang didata | Kota Malang, Kota Malang; | 1.000,00 | 440.380.000,00 | Block Grant | | 1000 WP | 440.380.000,00 |
| 3 | 2 | 25 | 4 | Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah II | Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah II yang ditetapkan dan didistribusikan | Kota Malang, Kota Malang; | 43.100,00 | 179.700.000,00 | Block Grant | | 43100 SKP | 179.700.000,00 |
| 3 | 2 | 26 | | Program Pengendalian Pajak Daerah | Persentase penurunan piutang pajak daerah | | 18,70% | 2.308.173.000,00 | | | | 2.508.173.000,00 |
| 3 | 2 | 26 | 1 | Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Jumlah dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah | Kota Malang, Kota Malang; | 73,00 Dokumen | 50.000.000,00 | Block Grant | | 73 Dokumen | 50.000.000,00 |

| Kode | | | | Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|----|----|--|--|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 2 | 26 | 2 | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah wajib pajak yang diperiksa | Kota Malang, Kota Malang; | 1.200,00 | 374.180.000,00 | Block Grant | - | 1200 WP | 474.180.000,00 |
| 3 | 2 | 26 | 4 | Penagihan piutang Pajak Daerah | Jumlah piutang yang tertagih | Kota Malang, Kota Malang; | 32.760.000.000 | 301.670.000,00 | Block Grant | - | 32760000000 | 401.670.000,00 |
| 3 | 2 | 26 | 3 | Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pajak Daerah | Jumlah keberatan dan sengketa pajak daerah yang terselesaikan | Kota Malang, Kota Malang; | 900 | 35.273.000,00 | Block Grant | - | 900 berkas | 35.273.000,00 |
| 3 | 2 | 26 | 5 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak | Jumlah Sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak | Kota Malang, Kota Malang; | 23,00 Media | 1.547.050.000,00 | Block Grant | - | 100000 WP | 1.547.050.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | | Usuran Umum Umum | | | | 7.240.097.000,00 | | | | 9.040.097.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100 | 7.240.097.000,00 | | | | 9.040.097.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 31 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | BAPENDA, Kota Malang; | 5.000,00 Surat | 161.789.000,00 | Block Grant | - | 5000 surat | 161.789.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 32 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | BAPENDA, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.088.020.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 1.088.020.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 34 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | BAPENDA, Kota Malang; | 78,00 Unit | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 78 unit | 100.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 35 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | BAPENDA, Kota Malang; | 90,00 Unit | 75.000.000,00 | Block Grant | - | 90 unit | 75.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 37 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | BAPENDA, Kota Malang; | 850,00 Ruangan | 139.991.900,00 | Block Grant | - | 850m2 | 139.991.900,00 |
| 5 | 1 | 7 | 38 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | BAPENDA, Kota Malang; | 125,00 Jenis | 400.000.000,00 | Block Grant | - | 125 jenis | 700.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 39 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | BAPENDA, Kota Malang; | 35,00 Jenis | 1.665.451.800,00 | Block Grant | - | 35 Jenis | 2.165.451.800,00 |
| 5 | 1 | 7 | 40 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BAPENDA, Kota Malang; | 10,00 Jenis | 4.996.500,00 | Block Grant | - | 10 jenis | 4.996.500,00 |
| 5 | 1 | 7 | 42 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | BAPENDA, Kota Malang; | 9,00 Jenis | 19.287.600,00 | Block Grant | - | 9 jenid | 19.287.600,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|---|----|--|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 1 | 7 | 43 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | BAPENDA, Kota Malang; | 25.000,00 Kali | 550.000.000,00 | Block Grant | - | 25000 mamin | 650.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 44 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | BAPENDA, Kota Malang; | 50,00 Kali | 515.726.000,00 | Block Grant | - | 50 kali | 765.726.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 50 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | BAPENDA, Kota Malang; | 1,00 Kali | 35.190.000,00 | Block Grant | - | 1 kali | 35.190.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | BAPENDA, Kota Malang; | 78,00 kendaraan | 323.313.500,00 | Block Grant | - | 78 unit | 323.313.500,00 |
| 5 | 1 | 7 | 66 | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Bapenda Kota Malang, Kota Malang; | 25,00 Liter | 317.030.000,00 | Block Grant | - | 25000 Liter | 317.030.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 72 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Bapenda, Kota Malang; | 40,00 kegiatan | 328.860.000,00 | Block Grant | - | 40 orang | 478.860.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 7 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Bapenda, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 55.000.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 55.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 8 | Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) | Jumlah ZI | Bapenda, Kota Malang; | 50 | 54.980.000,00 | Block Grant | - | 75 | 54.980.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 11 | Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan | Jumlah sertifikasi | BAPENDA, Kota Malang; | 1,00 Sertifikat | 106.630.000,00 | Block Grant | - | 1 sertifikat | 106.630.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 12 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | BAPENDA, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 55.415.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 55.415.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 13 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Bapenda, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 117.760.000,00 | Block Grant | - | 2 Dokumen | 117.760.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 4 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | BAPENDA, Kota Malang; | 161 | 235.920.000,00 | Block Grant | - | 161 dokumen | 235.920.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 94 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | BAPENDA, Kota Malang; | 9,00 Jenis | 200.000.000,00 | Block Grant | - | 9 jenis | 200.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 92 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | BAPENDA, Kota Malang; | 10,00 Jenis | 689.735.700,00 | Block Grant | - | 10 jenis | 1.189.735.700,00 |

PERANGKAT DAERAH : Badan Keuangan dan Aset Daerah

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|----|----|---|--|--|------------------------|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | | | | Belanja Langsung Urusan Penunjang Pemerintahan | | | | 11.652.428.000,00 6.895.165.400,00 | | | | 60.518.481.026,00 8.229.652.872,00 |
| 3 | 2 | | | Keuangan | | | | 6.895.165.400,00 | | | | 8.229.652.872,00 |
| 3 | 2 | 23 | | Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah | Persentase BTL APBD = 50% | | 40,00% | 2.166.015.000,00 | | | | 3.754.618.000,00 |
| 3 | 2 | 23 | 1 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Ranperwal tentang APBD TA | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 Jenis | 394.200.000,00 | Block Grant | | 2 jenis | 1.384.596.000,00 |
| 3 | 2 | 23 | 18 | Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan | Jumlah dokumen yang tersusun | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 206.350.000,00 | Block Grant | | 4 dokumen Nota Kesepakatan | 699.000.000,00 |
| 3 | 2 | 23 | 8 | Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah peserta sosialisasi yang diselenggarakan | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 150,00 Orang | 167.460.000,00 | Block Grant | | 300 orang | 211.000.000,00 |
| 3 | 2 | 23 | 6 | Asistensi Penyusunan RKA dan DPA SKPD | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi | Jl. Tugu No. 1 kota Malang, Kota Malang; | 132 | 162.720.000,00 | Block Grant | | 132 perangkat Daerah | 119.160.000,00 |
| 3 | 2 | 23 | 9 | Penatausahaan Keuangan | Jumlah Dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1.604,00 Dokumen | 859.070.000,00 | Block Grant | | 12 dokumen | 806.760.000,00 |
| 3 | 2 | 23 | 13 | Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas | Jumlah dokumen arsip Perangkat Daerah yang tertata | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 39.000,00 Dokumen | 104.615.000,00 | Block Grant | | 106 dokumen | 225.162.000,00 |
| 3 | 2 | 23 | 19 | Penyusunan Kebijakan Perencanaan Anggaran Daerah | jumlah ranperwal yang tersusun | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 ranperwal | 161.140.000,00 | Block Grant | | 3 Ranperwal | 214.596.000,00 |
| 3 | 2 | 23 | 20 | Penyusunan kebijakan pelayanan perbendaharaan daerah | jumlah ranperwal yang tersusun | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 ranperwal | 110.460.000,00 | Block Grant | | 3 Ranperwal | 94.344.000,00 |
| 3 | 2 | 17 | | Program Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | | 100,00% | 1.434.208.200,00 | | | | 2.168.926.232,00 |
| 3 | 2 | 17 | 3 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA | Jenis dokumen laporan yang tersusun | Jl. tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 7,00 Dokumen | 155.730.000,00 | Block Grant | | 7 dokumen | 301.051.200,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|----------|-----------|----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 2 | 17 | 4 | Penyelesaian Kerugian Daerah | Jumlah dokumen yang tersusun | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 kasus | 93.460.000,00 | Block Grant | - | 3 kasus | 116.000.000,00 |
| 3 | 2 | 17 | 5 | Penyusunan Ranperda dan Rapenwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 ranperwal | 88.700.000,00 | Block Grant | - | 2 jenis peraturan perundangan | 452.028.500,00 |
| 3 | 2 | 17 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang | Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Dokumen | 323.088.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 512.725.712,00 |
| 3 | 2 | 17 | 7 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 ranperwal | 161.130.000,00 | Block Grant | - | 1 ranperwal | 109.000.000,00 |
| 3 | 2 | 17 | 8 | Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah peserta Bimtek | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 132,00 Orang | 191.260.000,00 | Block Grant | - | 102 orang | 235.468.320,00 |
| 3 | 2 | 17 | 9 | Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah | Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 878 | 211.640.200,00 | Block Grant | - | 1000 obyek | 318.215.100,00 |
| 3 | 2 | 17 | 17 | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah entitas yang mendapat pembinaan | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 132 | 124.270.000,00 | Block Grant | - | 132 entitas | 53.200.400,00 |
| 3 | 2 | 17 | 19 | Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen kerjasama pemanfaatan BMD yang diawasi | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 114,00 Dokumen | 84.930.000,00 | Block Grant | - | 30 dokumen | 71.237.000,00 |
| 3 | 2 | 19 | | Program Pemanfaatan Aset Daerah | Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD | | 0,36% | 3.294.942.200,00 | | | | 2.306.108.640,00 |
| 3 | 2 | 19 | 1 | Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang | Jumlah Ijin yang diterbitkan | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 150 | 182.822.000,00 | Block Grant | - | 100 ijin | 222.000.000,00 |
| 3 | 2 | 19 | 2 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Jumlah Ranperwal tersusun | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 ranperwal | 64.640.000,00 | Block Grant | - | 5 Ranperwal | 218.800.000,00 |
| 3 | 2 | 19 | 7 | Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tanah dan Bangunan Milik Daerah | Jumlah Kasus/konflik-konflik tanah dan/atau bangunan yang terfasilitasi penyelesaiannya | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 65,00 kasus | 1.906.800.000,00 | Block Grant | - | 2 kasus | 88.874.000,00 |
| 3 | 2 | 19 | 13 | Pengembangan Sistem Pelayanan Aset Tanah Daerah | Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Aset Tanah Daerah Yang Terbangun/dikembangkan | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Aplikasi | 104.780.000,00 | Block Grant | - | 2 aplikasi | 161.817.600,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|----|----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 2 | 19 | 12 | Pengamanan Tanah dan Bangunan Aset Daerah | Jumlah titik lokasi bidang lahan aset daerah yang diamankan | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 394 | 398.720.000,00 | Block Grant | - | 200 BMD | 280.800.200,00 |
| 3 | 2 | 19 | 15 | Pemeliharaan dan Penataan Arsip Benda-benda Berharga Milik Daerah | Jumlah arsip yang tertata | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 4.723,00 | 58.362.000,00 | Block Grant | - | 4723 arsip | 133.358.840,00 |
| 3 | 2 | 19 | 8 | Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang | Jumlah dokumen hasil penafsiran BMD yang akan disewa atau dihapus | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 9,00 Dokumen | 232.200.000,00 | Block Grant | - | 5 dokumen | 137.698.000,00 |
| 3 | 2 | 19 | 9 | Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan yang tersusun | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 Dokumen | 127.348.000,00 | Block Grant | - | 10 Perangkat Daerah | 118.000.000,00 |
| 3 | 2 | 19 | 20 | Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah | jumlah objek tanah aset daerah yang terinventarisir | Jl. Tugu No.1 Kota Malang, Kota Malang; | 104,00 objek | 219.270.200,00 | Block Grant | - | 70 obyek | 944.760.000,00 |
| 5 | 1 | | | Urusan Umum | | | | 4.757.262.600,00 | | | | 52.288.828.154,00 |
| 5 | 1 | | | Umum | | | | 4.757.262.600,00 | | | | 52.288.828.154,00 |
| 5 | 1 | 7 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00% | 4.757.262.600,00 | | | | 52.288.828.154,00 |
| 5 | 1 | 7 | 31 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 39.000,00 Surat | 347.520.000,00 | Block Grant | - | 38100 surat | 339.600.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 32 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 36,00 Jenis | 34.320.000,00 | Block Grant | - | 3 jenis 12 bulan | 41.184.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 40 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Jenis | 40.094.000,00 | Block Grant | - | 14 jenis | 46.703.500,00 |
| 5 | 1 | 7 | 33 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 Jenis | 75.000.000,00 | Block Grant | - | 9 jenis | 292.800.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 34 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 8,00 Unit | 45.400.000,00 | Block Grant | - | 30 unit | 50.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 35 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 49,00 Unit | 21.450.000,00 | Block Grant | - | 55 unit | 25.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|---|----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 1 | 7 | 37 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 750 | 159.122.000,00 | Block Grant | - | 30 | 64.400.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 38 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 89,00 Jenis | 532.277.200,00 | Block Grant | - | 60 jenis | 525.013.680,00 |
| 5 | 1 | 7 | 39 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 10,00 Jenis | 110.320.000,00 | Block Grant | - | 20 jenis | 277.184.200,00 |
| 5 | 1 | 7 | 42 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 Surat | 35.400.000,00 | Block Grant | - | 4 surat | 32.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 43 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. Tugu No.1 Kota Malang, Kota Malang; | 18.000,00 | 522.060.000,00 | Block Grant | - | 6000 kotak | 576.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 44 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 120,00 Kali | 756.960.000,00 | Block Grant | - | 100 kali | 1.700.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 50 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Kali | 27.400.000,00 | Block Grant | - | 1 kali | 25.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 2 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 25.280.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 43.512.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 49 | Penyediaan jasa perpindahan kantor | Jumlah perpindahan kantor | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Kali | 50.600.000,00 | Block Grant | - | 1 kali | 130.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 28,00 Unit | 158.825.000,00 | Block Grant | - | 11 unit | 231.100.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 61 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jl. Tugu No. 1 kota Malang, Kota Malang; | 8 | 202.474.800,00 | Block Grant | - | 6 jenis | 258.860.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 72 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 490,00 Kali | 651.330.000,00 | Block Grant | - | 2 kali | 498.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 3 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. Tugu No. 1 kota Malang, Kota Malang; | 8,00 Dokumen | 70.040.000,00 | Block Grant | - | 9 dokumen | 212.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|---|----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 1 | 7 | 36 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 360,00 SPM | 86.340.000,00 | Block Grant | - | 290 SPM | 46.019.267.254,00 |
| 5 | 1 | 7 | 9 | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 56.190.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 53.200.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 12 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 75.610.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 89.000.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 13 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 73.960.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 122.800.000,00 |
| 5 | 1 | 7 | 88 | Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) | - | Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 132,00 Aplikasi | 599.289.600,00 | Block Grant | - | 132 entitas | 636.203.520,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|---|----|---|---|--|----------------------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | | | | Belanja Langsung Urusan Penunjang Pemerintahan | | | | 9.582.576.000,00 5.988.933.970,00 | | | | 20.939.704.622,00 8.022.626.206,00 |
| 3 | 3 | | | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | 5.988.933.970,00 | | | | 8.022.626.206,00 |
| 3 | 3 | 20 | | Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian | Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu | | 84,39% | 1.439.276.000,00 | | | | 1.935.864.518,00 |
| 3 | 3 | 20 | 3 | Perencanaan Kebutuhan ASN | Jumlah peserta bimtek | jl tugu no 1, Kota Malang; | 230,00 Orang | 176.694.000,00 | Block Grant | | 210 org | 237.657.850,00 |
| 3 | 3 | 20 | 4 | Penerimaan ASN | Jumlah ASN yang dteima | jl tugu no 1, Kota Malang; | 345,00 Orang | 73.681.000,00 | Block Grant | | 345 org | 99.102.343,00 |
| 3 | 3 | 20 | 8 | Fasilitasi Jabatan Fungsional | Jumlah JFT yg terfasilitasi | jl tugu no 1, Kota Malang; | 250,00 Orang | 154.738.000,00 | Block Grant | | 250 org | 208.127.000,00 |
| | | | | | Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana | | 64,00% | | | | | |
| 3 | 3 | 20 | 1 | Proses Kenaikan Pangkat | Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu | jl tugu no1, Kota Malang; | 1.100,00 Orang | 156.527.000,00 | Block Grant | | 1100 SK | 210.533.375,00 |
| 3 | 3 | 20 | 2 | Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi | Jumlah Jabatan jabatan yang terisi | jl tugu no 1, Kota Malang; | 7 | 198.608.000,00 | Block Grant | | 2 jabatan | 267.133.500,00 |
| 3 | 3 | 20 | 5 | Pengangkatan CPNS menjadi PNS | Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS | jl tugu no 1, Kota Malang; | 345,00 Orang | 205.008.000,00 | Block Grant | | 345 org | 275.741.250,00 |
| 3 | 3 | 20 | 6 | Fasilitasi Mutasi dan Promosi Jabatan | Jumlah Pelaksanaan mutasi jabatan | jl tugu no 1, Kota Malang; | 500 | 305.083.000,00 | Block Grant | | 500 SPMT | 410.345.300,00 |
| 3 | 3 | 20 | 7 | Fasilitasi Pemberhentian Pegawai | Jumlah Pensiun dan MPP | jl tugu no 1, Kota Malang; | 473,00 Orang | 168.937.000,00 | Block Grant | | 425 org | 227.223.900,00 |
| 3 | 3 | 21 | | Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | | 69,15% | 3.512.921.970,00 | | | | 4.692.325.738,00 |
| 3 | 3 | 21 | 2 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional | Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional | jl tugu no 1, Kota Malang; | 207,00 Orang | 482.776.970,00 | Block Grant | | 315 org | 616.701.300,00 |
| 3 | 3 | 21 | 5 | Pelaksanaan Assesment | Jumlah peserta assesment | jl tugu no 1, Kota Malang; | 320,00 Orang | 689.675.000,00 | Block Grant | | 545 org | 927.632.550,00 |
| 3 | 3 | 21 | 8 | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD | Jumlah CPNS | jl tugu no 1, Kota Malang; | 41,00 Orang | 333.613.000,00 | Block Grant | | 50 org | 448.718.500,00 |
| 3 | 3 | 21 | 4 | Pendidikan dan Pelatihan Budaya Kerja | Jumlah peserta diklat | jl tugu no 1, Kota Malang; | 50,00 Orang | 156.394.000,00 | Block Grant | | 50 org | 210.353.688,00 |
| 3 | 3 | 21 | 7 | Evaluasi Dampak Diklat | Evaluasi Dampak Diklat | jl tugu no 1, Kota Malang; | 100,00 Orang | 41.665.000,00 | Block Grant | | 100 org | 56.039.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|----------|-----------|----|--|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 3 | 21 | 9 | Workshop Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah peserta yang mengikuti workshop IP ASN | jl tugu no 1, Kota Malang; | 120,00 Orang | 75.249.000,00 | Block Grant | | 170 org | 101.211.500,00 |
| 3 | 3 | 21 | 10 | Manajemen Talenta ASN | jumlah asn yang dianalisa pengembangan SDM nya | jl tugu no 1, Kota Malang; | 136,00 Orang | 244.477.000,00 | Block Grant | | 136 org | 328.827.550,00 |
| 3 | 3 | 21 | 11 | Pengiriman Uji Kompetensi Untuk Calon Pejabat Fungsional | Jumlah peserta Calon JF | jl tugu no 1, Kota Malang; | 20,00 Orang | 140.479.000,00 | Block Grant | | 30 | 188.947.300,00 |
| 3 | 3 | 21 | 14 | Kegiatan Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas ASN | Jumlah Peserta Ujian KPPI dan Ujian Dinas | jl tugu no 1, Kota Malang; | 80,00 Orang | 194.126.000,00 | Block Grant | | 80 org | 261.104.050,00 |
| 3 | 3 | 21 | 12 | Pembinaan Sadar Hukum Bagi anggota ASN | Jumlah ASN yg mengikuti pembinaan sadar hukum | jl tugu no 1, Kota Malang; | 100,00 Orang | 63.188.000,00 | Block Grant | | 110 org | 84.988.450,00 |
| 3 | 3 | 21 | 13 | Pembinaan Mental Rohani dan Etos Kerja bagi anggota ASN | Jumlah ASN yg mengikuti pembinaan mental rohani dan etos kerja | jl tugu no 1, Kota Malang; | 1.680,00 Orang | 159.115.000,00 | Block Grant | | 110 org | 214.013.850,00 |
| | | | | | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | | 96,00% | | | | | |
| 3 | 3 | 21 | 3 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan | Jumlah Peserta Diklat PIM IV, PIM III, PIM II | jl tugu no 1, Kota Malang; | 35,00 Orang | 932.164.000,00 | Block Grant | | 35 org | 1.253.787.500,00 |
| 3 | 3 | 22 | | Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan | Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar | | 0,00% | 1.036.736.000,00 | | | | 1.394.435.950,00 |
| 3 | 3 | 22 | 9 | Evaluasi Tambahan Penghasilan Bagi ASN Di Lingkungan Pemkot Malang | jumlah dokumen kajian | jl tugu no 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 96.686.000,00 | Block Grant | | 1 kajian | 98.647.000,00 |
| 3 | 3 | 22 | 8 | Penerapan dan Pemahaman Tentang Kinerja ASN | Jumlah peserta bimtek e-kinerja | jl tugu no 1, Kota Malang; | 175,00 Orang | 73.342.000,00 | Block Grant | | 175 org | 130.045.450,00 |
| 3 | 3 | 22 | 10 | Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN | Jml ASN yg terverifikasi kinerjanya | jl tugu no 1, Kota Malang; | 2.520,00 Orang | 144.111.000,00 | Block Grant | | 7176 org | 193.832.500,00 |
| 3 | 3 | 22 | 5 | Penyusunan Data Informasi Kepegawaian Daerah | Jumlah Buku Informasi Pegawai di lingkungan Pemkot Malang | jl tugu no 1, Kota Malang; | 4,00 buku | 194.958.000,00 | Block Grant | | 4 buku | 262.223.000,00 |
| | | | | | Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti | | 100,00% | | | | | |
| 3 | 3 | 22 | 1 | Penyelesaian Administrasi Identitas Pegawai | Jumlah kelengkapan identitas pegawai | jl tugu no 1, Kota Malang; | 4.250,00 | 142.144.000,00 | Block Grant | | 2000 buah | 191.187.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 3 | 22 | 2 | Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang | Jumlah Pelatihan Pasukan Upacara | jl tugu no 1, Kota Malang; | 350,00 Orang | 131.029.000,00 | Block Grant | - | 350 org | 176.237.500,00 |
| 3 | 3 | 22 | 4 | Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan | Jumlah pembinaan disiplin PNS, Jml PNS yg mengikuti tes narkoba, jumlah usulan satya | jl tugu no 1, Kota Malang; | 1.500,00 | 245.232.000,00 | Block Grant | - | 2000 buah | 329.843.000,00 |
| 3 | 3 | 22 | 3 | Pelaksanaan Senam Rutin bagi ASN | Jumlah Pelaksanaan senam pagi | jl tugu no 1, Kota Malang; | 54,00 Kali | 9.234.000,00 | Block Grant | - | 54 kali | 12.420.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Urusan Umum | | | | 3.593.642.030,00 | | | | 12.917.078.416,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 3.593.642.030,00 | | | | 12.917.078.416,00 |
| 5 | 01 | 07 | 036 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | jl tugu no 1, Kota Malang; | 750,00 SPM | 80.178.000,00 | Block Grant | - | 750 SPM | 107.841.250,00 |
| 5 | 01 | 07 | 053 | Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas | Jumlah pengemudi/supir dinas | jl tugu no 1, Kota Malang; | 1,00 Orang | 32.340.000,00 | Block Grant | - | 1 org | 37.191.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | jl tugu no 1, Kota Malang; | 9,00 Dokumen | 19.922.000,00 | Block Grant | - | 9 dokumen | 26.795.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | jl tugu no 1, Kota Malang; | 3,00 buku | 950.000,00 | Block Grant | - | 3 dokumen | 8.086.916.010,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | jl tugu no 1, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 941.000,00 | Block Grant | - | 4 dokumen | 1.265.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | jl tugu no 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 77.237.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 103.885.250,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | jl tugu no 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 77.237.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 90.335.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | jl tugu no 1, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 941.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 1.100.000,00 |
| | | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | 80,00 % | | | | | |
| 5 | 01 | 07 | 033 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | jl tugu no 1, Kota Malang; | 1,00 Unit | 23.453.000,00 | Block Grant | - | 1 unit | 31.544.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 034 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | jl tugu no 1, Kota Malang; | 4,00 Unit | 25.650.000,00 | Block Grant | | 4 unit | 34.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 035 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | jl tugu no 1, Kota Malang; | 18,00 Unit | 7.952.000,00 | Block Grant | | 18 unit | 10.695.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 087 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | jl tugu no 1, Kota Malang; | 7,00 Unit | 212.330.000,00 | Block Grant | | 0 unit | 1,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | jl tugu no1, Kota Malang; | 18,00 Unit | 171.898.000,00 | Block Grant | | 18 unit | 231.207.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 002 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | jl tugu no 1, Kota Malang; | 1,00 Unit | 44.666.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 60.076.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | jl tugu no 1, Kota Malang; | 106,00 Unit | 33.452.000,00 | Block Grant | | 106 unit | 44.993.750,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | jl tugu no 1, Kota Malang; | 35,00 Unit | 219.331.000,00 | Block Grant | | 20 unit | 219.331.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Nilai survey kepuasan internal Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | jl tugu no 1, Kota Malang; | 5.000,00 Surat | 1.796.000,00 | Block Grant | | 5000 surat | 2.415.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | jl tugu no 1, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 22.470.000,00 | Block Grant | | 12 bulan | 30.222.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | jl tugu no 1, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 67.266.000,00 | Block Grant | | 12 bulan | 77.355.900,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | jl tugu no 1, Kota Malang; | 7.037,00 | 222.183.000,00 | Block Grant | | 6486 bh | 298.842.105,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | jl tugu no 1, Kota Malang; | 11.217,00 | 115.697.000,00 | Block Grant | | 656 rim,280 dos,10417 bh | 155.615.700,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | jl tugu no 1, Kota Malang; | 540,00 | 4.489.000,00 | Block Grant | | 700 buah | 6.037.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | jl tugu no 1, Kota Malang; | 11.088,00 | 265.960.000,00 | Block Grant | | 13940 bh | 357.723.025,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | jl tugu no 1, Kota Malang; | 100,00 Kali | 1.511.013.030,00 | Block Grant | | 78 kali | 2.435.456.890,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | jl tugu no 1, Kota Malang; | 1,00 Kali | 28.583.000,00 | Block Grant | - | 1 kali | 38.444.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | jl tugu no 1, Kota Malang; | 1,00 | 152.431.000,00 | Block Grant | - | 1 gedung | 205.023.035,00 |
| 5 | 01 | 07 | 015 | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | jl tugu no 1, Kota Malang; | 30,00 buku | 61.518.000,00 | Block Grant | - | 30 buku | 71.950.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | jl tugu no 1, Kota Malang; | 50,00 kegiatan | 111.758.000,00 | Block Grant | - | 50 org | 150.316.500,00 |

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | | | | Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 40.864.151.000,00 | | | | 83.660.718.122,00 |
| 4 | 01 | | | Fungsi Sekretariat Daerah | | | | 19.464.839.000,00 | | | | 25.790.950.660,00 |
| 4 | 01 | 26 | | Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA | Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti | | 100,00 % | 19.464.839.000,00 | | | | 25.790.950.660,00 |
| 4 | 01 | 26 | 003 | Pengembangan kebijakan bidang perekonomian yang difasilitasi | Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang perekonomian yang difasilitasi | Jalan Tugu Nomor 1 , Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 391.424.000,00 | Block Grant | | 2,00 Dokumen | 391.424.000,00 |
| 4 | 01 | 26 | 002 | Pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi | Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi | Jalan. Tugu Nomor 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 100.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 100.000.000,00 |
| 4 | 01 | 26 | 001 | Pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA yang difasilitasi | Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA yang difasilitasi | Jalan Tugu No 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 100.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 100.000.000,00 |
| 4 | 01 | 27 | | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka pemantauan dan evaluasi | Persentase hasil evaluasi ditindaklanjuti | | 100,00 % | 200.000.000,00 | | | | 200.000.000,00 |
| 4 | 01 | 27 | 001 | Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan | Jumlah pelaksanaan evaluasi | Jalan Tugu No.1, Kota Malang; | 4,00 Kali | 200.000.000,00 | DBH CHT | | 4,00 Kali | 200.000.000,00 |
| 4 | 01 | 28 | | Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan | | 100,00 % | 1.449.897.000,00 | | | | 1.449.897.000,00 |
| 4 | 01 | 28 | 004 | Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang | Jumlah Bimtek pengadaan Barang/Jasa | Malang, Kota Malang; | 4,00 Bimtek | 373.000.000,00 | Block Grant | | 4,00 Bimtek | 373.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 01 | 28 | 002 | Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang | Jumlah dokumen hasil proses pengadaan barang/jasa | Malang, Kota Malang; | 250,00 Dokumen | 550.000.000,00 | Block Grant | | 250,00 Dokumen | 550.000.000,00 |
| 4 | 01 | 28 | 001 | Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah waktu layanan pengadaan barang/jasa melalui sistem informasi yang terhenti dalam satu tahun | Malang, Kota Malang; | 312,00 Jam | 150.000.000,00 | Block Grant | | 312,00 Jam | 150.000.000,00 |
| 4 | 01 | 28 | 005 | Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah layanan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi | Malang, Kota Malang; | 258,00 Layanan | 376.897.000,00 | Block Grant | | 258,00 Layanan | 376.897.000,00 |
| 4 | 01 | 29 | | Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja | Nilai kapasitas organisasi | | 3,10 | 1.292.991.000,00 | | | | 1.767.860.600,00 |
| 4 | 01 | 29 | 008 | Fasilitasi Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik | Jumlah dokumen bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik | Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 130.710.000,00 | Block Grant | | 2 dokumen | 143.781.000,00 |
| 4 | 01 | 29 | 002 | Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Jumlah dokumen hasil monev peningkatan kualitas pelayanan publik | Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang; | 3,00 Dokumen | 266.686.000,00 | Block Grant | | 3 dokumen | 474.854.600,00 |
| 4 | 01 | 29 | 001 | Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik | Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik | Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang; | 5,00 ranperwal | 100.000.000,00 | Block Grant | | 5 ranperwal | 145.145.000,00 |
| 4 | 01 | 29 | 007 | Perumusan Kebijakan Bidang Kelembagaan | Jumlah dokumen kebijakan bidang kelembagaan | Jalan Tugu Nomor 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 137.100.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 150.810.000,00 |
| 4 | 01 | 29 | 004 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen hasil monev RB | Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 377.350.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 434.500.000,00 |
| 4 | 01 | 29 | 005 | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang | Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 71.260.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 99.770.000,00 |
| 4 | 01 | 29 | 006 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP Sekretariat Daerah | Jumlah dokumen monev SPIP Sekretariat Daerah | Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 66.200.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 154.000.000,00 |
| 4 | 01 | 29 | 010 | Penyusunan Renja Sekretariat Daerah | Jumlah dokumen renja | Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 72.075.000,00 | Block Grant | | 2 dokumen | 110.000.000,00 |
| 4 | 01 | 29 | 009 | Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi | Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 71.610.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 55.000.000,00 |
| 4 | 01 | 30 | | Program Pengembangan Standar Kompetensi | Persentase standar kompetensi perangkat daerah yang ditetapkan | | 80,00 % | 266.510.000,00 | | | | 293.151.100,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 01 | 30 | 002 | Penyusunan/Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | Jalan Tugu no. 1 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 166.510.000,00 | Block Grant | | 2 dokumen | 110.000.000,00 |
| 4 | 01 | 30 | 003 | Penyusunan/Reviu Evaluasi Jabatan | Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan | Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 100.000.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 183.151.100,00 |
| 4 | 01 | 31 | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga | Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga | | 100,00 % | 7.615.261.000,00 | | | | 10.250.000.000,00 |
| 4 | 01 | 31 | 004 | Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota | Jumlah dokumentasi kebijakan | Jl. Tugu 1, Kota Malang; | 3,00 Jenis | 350.000.000,00 | Block Grant | | 3,00 Jenis | 650.000.000,00 |
| 4 | 01 | 31 | 001 | Layanan Kehumasan | Jumlah layanan kehumasan | Jl. Tugu 1, Kota Malang; | 3,00 Jenis | 710.000.000,00 | Block Grant | | 3,00 Jenis | 1.100.000.000,00 |
| 4 | 01 | 31 | 002 | Layanan Keprotokolan | Jumlah layanan keprotokolan | jl. Tugu 1, Kota Malang; | 500,00 Layanan | 329.000.000,00 | Block Grant | | 500,00 Layanan | 700.000.000,00 |
| 4 | 01 | 31 | 005 | Penerbitan majalah pemerintah kota | Jumlah majalah yang diterbitkan | Jl. Tugu 1, Kota Malang; | 12.000,00 eksemplar | 396.000.000,00 | Block Grant | | 12.000,00 eksemplar | 550.000.000,00 |
| 4 | 01 | 31 | 003 | Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota | Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan | Jl. Tugu 1, Kota Malang; | 600,00 Kali | 5.830.261.000,00 | Block Grant | | 600,00 Kali | 7.250.000.000,00 |
| 4 | 01 | 32 | | Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan | Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti (ditindaklanjuti : draft rekomendasi, telaah staf, surat, laporan) | | 100,00 % | 2.591.913.000,00 | | | | 3.006.439.060,00 |
| 4 | 01 | 32 | 015 | Kegiatan Layanan Subbagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat | Jumlah dokumen hasil layanan subbagian administrasi kesejahteraan rakyat | Jalan Tugu No.1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 50.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 60.000.000,00 |
| 4 | 01 | 32 | 016 | Kegiatan Layanan Subbagian Administrasi Kemasyarakatan | Jumlah dokumen hasil layanan subbagian administrasi kemasyarakatan | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 103.375.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 125.000.000,00 |
| 4 | 01 | 32 | 017 | Kegiatan Layanan Subbagian Keagamaan | Jumlah dokumen hasil layanan subbagian keagamaan | Jl. Tugu Nomor 1, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 40.000.000,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 60.000.000,00 |
| 4 | 01 | 32 | 013 | Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | Jl. Tugu No.1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 53.631.500,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 10.724.700,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 01 | 32 | 010 | Pembinaan lembaga Zakat Infaq Shodaqoh | Jumlah dokumen pembinaan lembaga zakat infaq dan shodaqoh | Jl. Tugu No.1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 81.354.500,00 | Block Grant | | 1,00 Dokumen | 89.490.000,00 |
| 4 | 01 | 32 | 005 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah | Jumlah jamaah calon haji yang mendapatkan fasilitas transportasi daerah | Jl. Tugu No 1 Malang, Kota Malang; | 1.350,00 Orang | 681.466.000,00 | Block Grant | | 1.350,00 Orang | 690.000.000,00 |
| 4 | 01 | 32 | 011 | Fasilitasi Keikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) | Jumlah keikutsertaan pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren daerah (POSPEDA) | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Kali | 95.289.000,00 | Block Grant | | 1,00 kegiatan | 104.817.900,00 |
| 4 | 01 | 32 | 006 | Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran | Jumlah keikutsertaan pengembangan tilawatil Quran | Jl. Tugu Nomor 1 Malang, Kota Malang; | 2,00 Kali | 898.935.000,00 | Block Grant | | 2,00 Kali | 1.000.000.000,00 |
| 4 | 01 | 32 | 003 | Fasilitasi Hari Santri | Jumlah peringatan hari santri | Jl. Tugu No. 1, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 70.095.000,00 | Block Grant | | 1,00 kegiatan | 100.000.000,00 |
| 4 | 01 | 32 | 018 | Fasilitasi Pertemuan Tokoh Agama dengan Pemerintah Kota Malang | Jumlah pertemuan tokoh agama dengan pemerintah | Jl. Tugu Nomor 1 Malang, Kota Malang; | 4,00 Kali | 71.192.000,00 | Block Grant | | 4,00 Kali | 145.000.000,00 |
| 4 | 01 | 32 | 012 | Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah | Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen tempat ibadah | Jl. Tugu Nomor 1 Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 44.133.000,00 | Block Grant | | 100,00 Orang | 60.000.000,00 |
| 4 | 01 | 32 | 008 | Sosialisasi Wakaf | Jumlah peserta sosialisasi wakaf | Jl. Tugu No.1 Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 75.638.000,00 | Block Grant | | 100,00 Orang | 83.201.800,00 |
| 4 | 01 | 32 | 009 | Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah | Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan keluarga sakinah | Jl. Tugu No. 1, Kota Malang; | 100,00 Orang | 70.095.000,00 | Block Grant | | 100,00 Orang | 151.585.500,00 |
| 4 | 01 | 32 | 002 | Fasilitasi Gebyar Muharam | Jumlah peserta yang mengikuti gebyar muharam | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 400,00 Orang | 75.474.000,00 | Block Grant | | 400,00 Orang | 83.021.400,00 |
| 4 | 01 | 32 | 007 | Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri | Jumlah peserta yang mengikuti gebyar takbir idul fitri | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 100,00 Orang | 52.380.000,00 | Block Grant | | 100,00 Orang | 57.597.760,00 |
| 4 | 01 | 32 | 001 | Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan | Jumlah safari ramadhan di 5 kecamatan | Di Wilayah 5 Kecamatan, Kota Malang; | 5,00 Kali | 123.515.000,00 | Block Grant | | 5 masjid di 5 Kecamatan | 180.000.000,00 |
| 4 | 01 | 32 | 004 | Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah | Jumlah rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah | Jl. Tugu Nomor 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Draft | 5.340.000,00 | Block Grant | | 1 Draft | 6.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 01 | 33 | | Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | 100,00 % | 2.608.369.000,00 | | | | 3.447.178.900,00 |
| 4 | 01 | 33 | 006 | Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan | Jumlah buku himpunan perda yang dicetak | Jalan Tugu No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 5.000,00 buku | 257.390.500,00 | Block Grant | | 5000 buku | 316.134.500,00 |
| 4 | 01 | 33 | 016 | Fasilitasi Permasalahan Hukum | Jumlah dokumen hasil fasilitasi permasalahan hukum | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 62.939.500,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 97.163.000,00 |
| 4 | 01 | 33 | 014 | Fasilitasi Hak Asasi Manusia (HAM) | Jumlah dokumen laporan fasilitasi | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 120.000.000,00 | Block Grant | | 2 dokumen | 168.905.000,00 |
| 4 | 01 | 33 | 005 | Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 101.906.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 123.096.600,00 |
| 4 | 01 | 33 | 012 | Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara | Jumlah peserta bimbingan Teknis | Jl. Tugu no. 1 kota malang, Kota Malang; | 65,00 Orang | 110.000.000,00 | Block Grant | | 65 peserta | 127.875.000,00 |
| 4 | 01 | 33 | 001 | Bimbingan Teknis Legal Drafting | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 80,00 Orang | 186.000.000,00 | Block Grant | | 80 orang | 217.618.500,00 |
| 4 | 01 | 33 | 007 | Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) | Jumlah peserta pembinaan kadarkum | Jl. Tugu no. 1 kota Malang, Kota Malang; | 300,00 Orang | 211.206.000,00 | Block Grant | | 300 orang | 232.326.600,00 |
| 4 | 01 | 33 | 009 | Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan | Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 500,00 Orang | 154.263.000,00 | Block Grant | | 500 orang | 197.189.300,00 |
| 4 | 01 | 33 | 008 | Penyuluhan Hukum | Jumlah peserta Penyuluhan Hukum | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 250,00 Orang | 159.968.000,00 | Block Grant | | 250 orang | 175.964.800,00 |
| 4 | 01 | 33 | 013 | Digitalisasi Produk Hukum | Jumlah produk hukum yang didigitalisasi | Jl. Tugu no. 1 kota Malang, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 26.000.000,00 | Block Grant | | 4 dokumen | 50.600.000,00 |
| 4 | 01 | 33 | 015 | Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum yang disusun | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 50.000.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 55.000.000,00 |
| 4 | 01 | 33 | 003 | Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda | jumlah ranperda yang diharmonisasi | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 9,00 ranperda | 292.219.000,00 | Block Grant | | 9 ranperda | 359.940.900,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 01 | 33 | 004 | Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepksekda | Jumlah ranperwal, rankepwal dan rankepksekda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 580,00 Dokumen | 303.385.000,00 | Block Grant | | 580 dokumen | 372.223.500,00 |
| 4 | 01 | 33 | 002 | Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal | Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 Produk Hukum | 28.092.000,00 | Block Grant | | 5 produk hukum | 107.901.200,00 |
| 4 | 01 | 33 | 011 | Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah | Jumlah sidang penegakan hukum daerah | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 11,00 Sidang | 150.000.000,00 | Block Grant | | 11 sidang | 220.000.000,00 |
| 4 | 01 | 33 | 010 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan | Jl. Tugu no. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 150,00 Sidang | 395.000.000,00 | Block Grant | | 150 sidang | 625.240.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang | | 3,00 % | 2.348.474.000,00 | | | | 3.285.000.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | 004 | Penegasan Batas Daerah | Jumlah dokumen | Jl. Tugu, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 50.000.000,00 | Block Grant | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | 014 | Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah | Jumlah dokumen | Jl. Tugu, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 15.000.000,00 | Block Grant | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | 009 | Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil walikota dan anggota DPRD Kota Malang | Jumlah dokumen Administrasi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD yang difasilitasi | Jl. Tugu, Kota Malang; | 5,00 Dokumen | 45.000.000,00 | Block Grant | | 5 dokumen | 60.000.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | 007 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Jumlah dokumen kerjasama daerah (MOU/PKS) | Jl. Tugu, Kota Malang; | 20,00 Dokumen | 175.000.000,00 | Block Grant | | 20 Dokumen Kerjasama | 175.000.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | 002 | Penyusunan LKPJ Walikota | Jumlah dokumen LKPJ Walikota | Jl. Tugu, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 250.000.000,00 | Block Grant | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | 001 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) | Jumlah dokumen LPPD dan dokumen RLPPD | Jl. Tugu, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 250.000.000,00 | Block Grant | | 2 Dokumen | 400.000.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | 005 | Pembakuan dan penamaan rupabumi | Jumlah dokumen Pembakuan dan penamaan Rupabumi | Jl. Tugu, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 60.000.000,00 | Block Grant | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | 003 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM | Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM | Jl. Tugu, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 60.551.000,00 | Block Grant | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | 008 | Fasilitasi Hari Jadi Daerah | Jumlah Laporan Hari Jadi Daerah yang difasilitasi | Jl. Tugu, Kota Malang; | 2,00 laporan | 75.000.000,00 | Block Grant | | 2 Laporan | 150.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 01 | 34 | 006 | Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan | Jl. Tugu, Kota Malang; | 2,00 laporan | 250.000.000,00 | Block Grant | - | 2 Laporan | 400.000.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | 012 | Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi | jalan tugu nomor 1, malang, Kota Malang; | 57,00 Orang | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 57 Lembaga | 150.000.000,00 |
| 4 | 01 | 34 | 011 | Penguatan kelembagaan kecamatan | jumlah perangkat kecamatan dan kelurahan yg mengikuti kegiatan | jalan tugu nomor 1, malang, Kota Malang; | 5,00 Orang | 1.017.923.000,00 | Block Grant | - | 5 Kecamatan | 1.250.000.000,00 |
| 4 | 01 | 35 | | Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka penyampaian informasi melalui media | Persentase kegiatan bidang cukai yang dipublikasikan | | 100,00 % | 500.000.000,00 | | | | 1.500.000.000,00 |
| 4 | 01 | 35 | 001 | Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui media | Jumlah informasi yang disampaikan | Jl. Tugu 1, Kota Malang; | 150,00 Kali | 500.000.000,00 | DBH CHT | - | 150,00 Kali | 1.500.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Urusan Umum Umum | | | | 21.399.312.000,00 | | | | 57.869.767.462,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 21.399.312.000,00 | | | | 57.869.767.462,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.300.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 1.700.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 686,00 kegiatan | 2.850.000.000,00 | Block Grant | - | 686 kegiatan | 3.950.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 053 | Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas | Jumlah pengemudi/supir dinas | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 20,00 Orang | 556.800.000,00 | Block Grant | - | 16 orang | 525.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 041 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Jenis | 150.000.000,00 | Block Grant | - | 12 jenis | 275.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 57,00 eksemplar | 150.000.000,00 | Block Grant | - | 57 jenis | 300.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 80,00 Buah | 662.800.000,00 | Block Grant | - | 80 jenis | 850.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 055 | Fasilitasi peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur | Jumlah kegiatan fasilitasi peringatan hari jadi provinsi jawa | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 50.000.000,00 | BAN - PROV | - | 1 kegiatan | 50.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 069 | Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang | Jumlah kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Malang | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 145,00 kegiatan | 827.332.000,00 | Block Grant | - | 145 kegiatan | 900.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 085 | Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 45,00 Kali | 350.000.000,00 | Block Grant | - | 45 kali | 850.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 077 | Peningkatan fungsi Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik | Jumlah pelaksanaan fungsi staf ahli bidang ekonomi keuangan hukum dan politik | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 34,00 Kali | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 34 kali | 250.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 078 | Peningkatan fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | Jumlah pelaksanaan fungsi staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 34,00 Kali | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 34 kali | 250.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 076 | Peningkatan fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan | Jumlah pelaksanaan fungsi staf ahli bidang ekonomi keuangan | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 34,00 Kali | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 34 kali | 250.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 075 | Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi umum | Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi umum | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 40,00 Kali | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 40 kali | 250.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 073 | Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 32,00 Kali | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 32 kali | 250.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 074 | Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian | Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 40,00 Kali | 100.000.000,00 | Block Grant | | 40 kali | 250.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 150,00 Orang | 200.000.000,00 | Block Grant | | 150 orang | 200.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 174,00 Kali | 500.000.000,00 | Block Grant | | 174 kali | 1.500.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 084 | Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Wakil Kepala Daerah | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 809.170.200,00 | Block Grant | | 12 bulan | 1.050.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 083 | Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 1.632.747.300,00 | Block Grant | | 12 bulan | 2.100.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 051 | Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 500,00 kegiatan | 1.025.850.000,00 | Block Grant | | 10 kegiatan | 1.750.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 500,00 kegiatan | 800.000.000,00 | Block Grant | | 500 kegiatan | 1.100.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 14.500,00 Surat | 170.536.000,00 | Block Grant | | 14.500 surat | 250.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 048 | Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas | Jumlah tamu-tamu dinas | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 10,00 tamu | 455.230.000,00 | Block Grant | | 10 tamu dinas | 450.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 32,00 Ruangan | 446.400.000,00 | Block Grant | | 32 ruangan | 500.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 002 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 45.000.000,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 60.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 595.812.500,00 | Block Grant | | 1 dokumen | 30.833.667.462,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 23,00 Jenis | 150.000.000,00 | Block Grant | | 23 jenis | 180.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 035 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 226,00 STNK | 200.000.000,00 | Block Grant | | 226 unit | 240.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 062 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas | Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 10,00 Jenis | 390.000.000,00 | Block Grant | | 10 jenis | 550.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 17,00 Jenis | 400.000.000,00 | Block Grant | | 17 jenis | 900.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 066 | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 125.000,00 Liter | 800.000.000,00 | Block Grant | | 125.000 liter BBM | 1.300.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 025 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 gedung | 150.000.000,00 | Block Grant | | 2 gedung/bangunan | 250.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 063 | Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus | Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 1.000,00 Meter | 2.600.000.000,00 | Block Grant | | 1000 buah | 357.600.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 019 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 Unit | 100.000.000,00 | Block Grant | | 3 unit | 150.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 96,00 Unit | 581.000.000,00 | Block Grant | | 96 unit | 750.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 028 | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi | Jumlah jaringan telekomunikasi | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Jenis | 108.497.000,00 | Block Grant | | 1 jenis | 150.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 10,00 Jenis | 247.839.000,00 | Block Grant | - | 29 jenis | 425.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 029 | Pemeliharaan taman perkantoran | Jumlah taman yang dipelihara | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 309.448.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 350.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 016 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Jumlah rumah jabatan yang dipelihara | Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Rumah | 687.300.000,00 | Block Grant | - | 2 rumah jabatan | 823.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Bagian Umum Setda Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 gedung | 497.550.000,00 | Block Grant | - | 5 gedung/bangunan | 750.000.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Inspektorat

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 7.541.974.000,00 | | | | 44.864.373.175,00 |
| | | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 3.238.700.000,00 | | | | 4.286.945.500,00 |
| | | | | Pengawasan | | | | 3.238.700.000,00 | | | | 4.286.945.500,00 |
| | | | | Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Dilakukan Reviu | | 100,00 % | 1.624.950.000,00 | | | | 2.152.621.000,00 |
| 4 | 02 | 20 | 003 | Kegiatan Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran | Jumlah LHR | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 8,00 laporan | 156.500.000,00 | Block Grant | | 8 LHR | 207.350.000,00 |
| 4 | 02 | 20 | 004 | Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP | Jumlah LHE | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 63.500.000,00 | Block Grant | | 1 LHE | 84.205.000,00 |
| 4 | 02 | 20 | 005 | Kegiatan Evaluasi SPIP | Jumlah LHE | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 105.000.000,00 | Block Grant | | 1 LHE | 138.345.000,00 |
| 4 | 02 | 20 | 006 | Kegiatan Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender | Jumlah LHE | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 78.000.000,00 | Block Grant | | 1 LHE | 103.411.000,00 |
| 4 | 02 | 20 | 008 | Kegiatan Operasional Saber Pungli | Jumlah Laporan Tim Saber pungli | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 10,00 laporan | 643.500.000,00 | Block Grant | | 12 Laporan | 853.292.000,00 |
| 4 | 02 | 20 | 007 | Kegiatan Evaluasi/penilaian internal zona integritas | Jumlah LHE ZI | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 118.500.000,00 | Block Grant | | 1 LHE | 157.201.000,00 |
| | | | | | Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dilakukan Reviu | | 100,00 % | | | | | |
| 4 | 02 | 20 | 001 | Kegiatan Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Jumlah LHR | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 84.200.000,00 | Block Grant | | 1 LHR | 111.606.000,00 |
| 4 | 02 | 20 | 002 | Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) | Jumlah LHR | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 78.500.000,00 | Block Grant | | 1 LHR | 104.016.000,00 |
| 4 | 02 | 20 | 009 | Kegiatan Monev Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Jumlah LHE Yanblik | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 134.000.000,00 | Block Grant | | 1 LHE Yanblik | 177.210.000,00 |
| 4 | 02 | 20 | 010 | Kegiatan Evaluasi Benturan Kepentingan | Jumlah LHE Conflict of interest | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 48.500.000,00 | Block Grant | | 1 LHE | 63.910.000,00 |
| 4 | 02 | 20 | 011 | Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Verifikasi LHKASN | Jumlah laporan PMPRB dan Verifikasi LHKASN | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 69.500.000,00 | Block Grant | | 1 Laporan | 92.125.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 02 | 20 | 013 | Kegiatan Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah LHE Penyelenggaraan Pemerintah | Jl. Gajahmada 2a, Kota Malang; | 1,00 laporan | 45.250.000,00 | Block Grant | - | 1 Laporan | 59.950.000,00 |
| 4 | 02 | 21 | | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | 100,00 % | 433.200.000,00 | | | | 570.196.000,00 |
| 4 | 02 | 21 | 001 | Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Jumlah LHP Kinerja | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 86.900.000,00 | Block Grant | - | 1 | 111.606.000,00 |
| 4 | 02 | 21 | 002 | Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan Whistle Blower System dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang ekonomi dan sumber daya alam | Jumlah LHP | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 185.300.000,00 | Block Grant | - | 1 LHP | 245.575.000,00 |
| 4 | 02 | 21 | 003 | Kegiatan Pendampingan/pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan /probit advice pengadaan barang dan jasa Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam | Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 161.000.000,00 | Block Grant | - | 1 LHM | 213.015.000,00 |
| 4 | 02 | 22 | | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | 100,00 % | 554.450.000,00 | | | | 734.305.000,00 |
| 4 | 02 | 22 | 001 | Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah LHP Kinerja | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 387.500.000,00 | Block Grant | - | 1 LHP | 513.260.000,00 |
| 4 | 02 | 22 | 002 | Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan Whistle Blower System dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah LHP Pengaduan | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 106.500.000,00 | Block Grant | - | 1 LHP | 141.240.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 02 | 22 | 003 | Kegiatan Pendampingan/pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan /probit advice pengadaan barang dan jasa Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 51.950.000,00 | Block Grant | - | 1 LHP | 68.805.000,00 |
| 4 | 02 | 22 | 004 | Kegiatan Monitoring dana Bantuan Operasional Sekolah | Jumlah LHM | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 LHM | 8.500.000,00 | Block Grant | - | 1 LHM | 11.000.000,00 |
| 4 | 02 | 23 | | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | 100,00 % | 626.100.000,00 | | | | 829.823.500,00 |
| 4 | 02 | 23 | 001 | Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jumlah LHP Kinerja | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 256.600.000,00 | Block Grant | - | 1 LHP | 340.109.000,00 |
| 4 | 02 | 23 | 002 | Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan Whistle Blower System dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | Jumlah LHP Pengaduan | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 laporan | 216.500.000,00 | Block Grant | - | 1 LHP | 287.386.000,00 |
| 4 | 02 | 23 | 003 | Kegiatan Pendampingan/pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan /probit advice pengadaan barang dan jasa Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 153.000.000,00 | Block Grant | - | 1 LHP | 202.328.500,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 4.303.274.000,00 | | | | 40.577.427.675,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 4.303.274.000,00 | | | | 40.577.427.675,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 80,00 | 4.303.274.000,00 | | | | 40.577.427.675,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 4,00 eksemplar | 17.912.000,00 | Block Grant | - | 4 Ekslembar | 19.703.200,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 50,00 Kali | 477.250.000,00 | Block Grant | - | 50 kali | 580.305.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 4,00 laporan | 21.000.000,00 | Block Grant | - | 4 Laporan | 27.830.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Gajahmada 2a, Kota Malang; | 2,00 laporan | 80.700.000,00 | Block Grant | - | 2 Dokumen | 97.900.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 119.000.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen | 142.868.600,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 143.500.000,00 | Block Grant | - | 2 Dokumen | 184.626.200,00 |
| 5 | 01 | 07 | 080 | Penyusunan Kebijakan Bidang Pengawasan | Jumlah Ranperwal | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 3,00 ranperwal | 155.800.000,00 | Block Grant | - | 3 dokumen | 74.359.403,00 |
| | | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | 80,00 | | | | | |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 136.000.000,00 | Block Grant | - | 12 Bulan | 216.575.722,00 |
| 5 | 01 | 07 | 094 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 45,00 Unit | 31.900.000,00 | Block Grant | - | 45 unit | 52.492.000,00 |
| | | | | | Nilai survey kepuasan internal | | 80,00 | | | | | |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | -, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 59.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 88.440.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 033 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 30,00 Jenis | 336.000.000,00 | Block Grant | - | 30 Jenis | 35.890.800.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 36,00 Jenis | 137.000.000,00 | Block Grant | - | 36 Jenis | 145.884.650,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 30,00 Jenis | 120.350.000,00 | Block Grant | - | 30Jenis | 121.330.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 60,00 Kali | 311.680.500,00 | Block Grant | - | 60 Kali | 350.492.800,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 Kali | 31.581.500,00 | Block Grant | - | 1 kali | 41.855.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 13,00 Unit | 323.600.000,00 | Block Grant | - | 13 unit | 459.714.200,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 25,00 Orang | 1.250.000.000,00 | Block Grant | - | 25 Orang | 1.320.862.400,00 |
| 5 | 01 | 07 | 006 | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 8,00 laporan | 166.000.000,00 | Block Grant | - | 8 Laporan | 224.180.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 086 | Survei Penilaian Integritas | Jumlah dokumen hasil Survei Penilaian Integritas | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 167.500.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 277.486.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 081 | Penanganan Laporan Gratifikasi dan Verifikasi Laporan Aksi Pencegahan Korupsi | Jumlah laporan Gratifikasi dan Verifikasi APK | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 4,00 laporan | 72.500.000,00 | Block Grant | - | 4 Laporan | 95.316.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 082 | Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TPKD | Jumlah LHP Kerugian Daerah | Jl. Gajahmada 2A, Kota Malang; | 8,00 laporan | 145.000.000,00 | Block Grant | - | 9 Laporan | 164.406.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat DPRD

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|---|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 55.479.086.000,00 | | | | 67.475.176.000,00 |
| 4 | | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 55.479.086.000,00 | | | | 67.475.176.000,00 |
| 4 | 03 | | | Pendukung Fungsi DPRD | | | | 55.479.086.000,00 | | | | 67.475.176.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | | Program Pelayanan Kesekretariatan DPRD | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | | 100,00 % | 16.086.249.500,00 | | | | 15.185.249.500,00 |
| 4 | 03 | 21 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Tugu no 1A, Kota Malang; | 55.000,00 | 100.000,00 | Block Grant | - | 60 jenis | 100.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 002 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 60,00 Jenis | 190.997.500,00 | Block Grant | - | 65 jenis | 190.997.500,00 |
| 4 | 03 | 21 | 003 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | Jl. tugu no 1A, Kota Malang; | 17,00 % | 96.000.000,00 | Block Grant | - | 17 jenis | 96.000.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 004 | General check up anggota DPRD | Jumlah anggota DPRD yang melakukan General check up | Jl. tugu no 1A, Kota Malang; | 45,00 % | 186.550.000,00 | Block Grant | - | 45 anggota dewan | 186.550.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 005 | Rapat-rapat koordinasi dan kegiatan keluar daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan kegiatan keluar daerah | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 36,00 Kali | 488.610.000,00 | Block Grant | - | 16 keg dalam daerah, 34 keg luar daerah | 488.610.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 006 | Peningkatan kapasitas SDM Aparatur | Jumlah aparatur sekretariat DPRD yang mengikuti kegiatan SDM aparatur | jl tugu no 1a, Kota Malang; | 35,00 | 209.000.000,00 | Block Grant | - | 11 kali | 209.000.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 008 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat | jl tugu no 1a, Kota Malang; | 7.000,00 | 8.077.101.000,00 | Block Grant | - | 1290084 makan dan minum | 8.077.101.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 009 | Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 2,00 | 330.000.000,00 | Block Grant | - | 2 kali kegiatan | 330.000.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 010 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 21,00 Jenis | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 21 jenis | 100.000.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 011 | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | luas gedung kantor yang dipelihara | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 13,00 Jenis | 144.877.000,00 | Block Grant | - | 20 jenis | 144.877.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 012 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | jl tugu no 1a, Kota Malang; | 4.020,00 m2 | 765.000.000,00 | Block Grant | - | 3020m2 | 765.000.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 013 | Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD | Jumlah kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD | Jl. tugu no 1A, Kota Malang; | 32,00 Jenis | 1.001.190.000,00 | Block Grant | - | 65 jenis | 100.190.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 014 | Peringatan/Kegiatan Insidentil | Jumlah peringatan Insidentil/ pawai | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 2,00 | 150.000.000,00 | Block Grant | - | 1 unit | 150.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 03 | 21 | 015 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. tugu no 1A, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 651.000.000,00 | Block Grant | - | 3 jenis x 12 bulan | 651.000.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 016 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 10,00 Jenis | 162.125.000,00 | Block Grant | - | 12 jenis | 162.125.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 017 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 9,00 Jenis | 1.378.500.000,00 | Block Grant | - | 18 jenis | 1.378.500.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 018 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas anggota DPRD | Jl. tugu no 1A, Kota Malang; | 180,00 | 482.430.000,00 | Block Grant | - | 180 stel | 482.430.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 019 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 46,00 Unit | 486.700.000,00 | Block Grant | - | 30 kendaraan | 486.700.000,00 |
| 4 | 03 | 21 | 025 | Pengadaan mobil jabatan | Jumlah prosentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | Jl. tugu no 1A, Kota Malang; | 0,00 mobil | 1.186.069.000,00 | Block Grant | - | 4 mobil | 1.186.069.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | | Program Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | 100,00 % | 34.800.779.850,00 | | | | 34.800.779.850,00 |
| 4 | 03 | 18 | 001 | Fasilitas Sekretariat Fraksi | Besaran operasional Sekretariat Fraksi | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 8,00 Orang | 572.120.000,00 | Block Grant | - | 8 orang | 572.120.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 002 | Pendalaman Bidang Tugas DPRD | Jumlah Peningkatan kapasitas DPRD | Jl. tugu no 1 a, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 3.685.120.000,00 | Block Grant | - | 6 kegiatan | 3.685.120.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 003 | Fasilitas Koordinasi DPRD dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya | Jumlah fasilitas Koordinasi DPRD dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 3,00 Kali | 811.750.000,00 | Block Grant | - | 3 kali | 811.750.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 004 | Fasilitas Pelaksanaan Tugas Komisi A/ Pemerintahan | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas Komisi A / Pemerintahan | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 14,00 kegiatan | 1.966.750.000,00 | Block Grant | - | 5 keg dalam daerah , 12 keg dalam daerah | 1.966.750.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 005 | Fasilitas Pelaksanaan Tugas Komisi B Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Malang | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas Komisi B / Perekonomian | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 14,00 kegiatan | 1.966.750.000,00 | Block Grant | - | 5 keg dalam daerah , 12 keg luar daerah | 1.966.750.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 006 | Fasilitas Pelaksanaan Tugas Komisi C / Pembangunan | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas Komisi C / Pembangunan | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 14,00 kegiatan | 1.966.750.000,00 | Block Grant | - | 5 keg dalam daerah, 12 keg luar daerah | 1.966.750.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|---|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 03 | 18 | 007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi D / Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi D / Kesejahteraan Rakyat | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 14,00 kegiatan | 1.966.750.000,00 | Block Grant | - | 5 keg dalam daerah, 12 keg luar daerah | 1.966.750.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 009 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah fasilitasi Badan Musyawarah | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 2.356.203.200,00 | Block Grant | - | 4 keg | 2.356.203.200,00 |
| 4 | 03 | 18 | 010 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Anggaran | Jumlah fasilitasi Badan Anggaran | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 1.890.802.000,00 | Block Grant | - | 4 keg | 1.890.802.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 011 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Pembentukan Peraturan daerah | Jumlah fasilitasi Badan Pembentukan Peraturan daerah | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 1.190.490.000,00 | Block Grant | - | 1 keg dalam daerah, 4 keg luar daerah | 1.190.490.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan | Jumlah fasilitasi Badan Kehormatan | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 551.340.000,00 | Block Grant | - | 4 keg | 551.340.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 013 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah fasilitasi Pimpinan DPRD | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 1.065.721.400,00 | Block Grant | - | 8 keg dalam daerah, 12 keg luar daerah | 1.065.721.400,00 |
| 4 | 03 | 18 | 014 | Fasilitasi Pembahasan LKPJ | Jumlah pembahasan LKPJ | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 987.630.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen LKPJ | 987.630.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 016 | Fasilitasi Pelaksanaan Reses | Jumlah reses | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 2.494.734.250,00 | Block Grant | - | 3 keg | 2.494.734.250,00 |
| 4 | 03 | 18 | 017 | Fasilitasi Rapat-rapat Paripurna | Jumlah Rapat-rapat Paripurna | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 36,00 kegiatan | 993.865.000,00 | Block Grant | - | 38 kali | 993.865.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 018 | Fasilitasi Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD | Jumlah Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 45,00 Orang | 102.450.000,00 | Block Grant | - | 3 keg | 102.450.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 019 | Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah | Jl tugu no 1a, Kota Malang; | 12,00 Dokumen | 1.489.200.000,00 | Block Grant | - | 12 rancangan perda | 1.489.200.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 020 | Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD | Jumlah Rancangan Perda yang berasal dari DPRD | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 5.788.974.000,00 | Block Grant | - | 2 rancangan perda | 5.788.974.000,00 |
| 4 | 03 | 18 | 021 | Penyusunan Produk Hukum DPRD | Jumlah dan Jenis Produk Hukum DPRD | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 10,00 Dokumen | 2.953.380.000,00 | Block Grant | - | 3 jenis produk hukum | 2.953.380.000,00 |
| 4 | 03 | 19 | | Program Penyelenggaraan Kehumasan | Persentase publikasi kegiatan DPRD | | 85,00 % | 1.856.702.650,00 | | | | 1.856.702.650,00 |
| 4 | 03 | 19 | 001 | Pengelolaan Portal Elektronik DPRD | Jumlah Publikasi | Jl. Tugu no 1a, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 102.650,00 | Block Grant | - | 1 web dprd | 102.650,00 |
| 4 | 03 | 19 | 002 | Penerimaan Tamu Dinas | Jumlah tamu dinas | Jl. Tugu no 1A, Kota Malang; | 120,00 Orang | 306.550.000,00 | Block Grant | - | 5000 tamu | 306.550.000,00 |
| 4 | 03 | 19 | 003 | Pembuatan Majalah DPRD | Jumlah majalah DPRD | jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 2.250,00 buku | 100.000,00 | Block Grant | - | 19000 exp | 100.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 03 | 19 | 004 | Publikasi Kegiatan DPRD | Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 18,00 Jenis | 1.549.850.000,00 | Block Grant | - | 18 jenis | 1.549.850.000,00 |
| 4 | 03 | 19 | 005 | Penyediaan bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan | Jumlah dan jenis bahan media cetak yang dibeli | Jl. tugu no 1A, Kota Malang; | 0,00 % | 100.000,00 | Block Grant | - | 19440 exp | 100.000,00 |
| 4 | 03 | 20 | | Program Perencanaan dan keuangan | Persentase Promperda yang menjadi Perda | | 100,00 % | 2.735.354.000,00 | | | | 15.632.444.000,00 |
| 4 | 03 | 20 | 001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 30.558.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 30.558.000,00 |
| 4 | 03 | 20 | 002 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 25.950.000,00 | Block Grant | - | 4 dokumen | 25.950.000,00 |
| 4 | 03 | 20 | 003 | Penyusunan / revidenstra | Jumlah dokumen renstra / revidenstra | Jl Tugu no 1a, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 25.950.000,00 | Block Grant | - | 1dokumen | 25.950.000,00 |
| 4 | 03 | 20 | 004 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Tugu no 1a, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 25.982.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 25.982.000,00 |
| 4 | 03 | 20 | 005 | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Jumlah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Jl tugu no 1a, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 12.910.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 12.910.000.000,00 |
| 4 | 03 | 20 | 006 | Penatausahaan keuangan | Jumlah Penatausahaan keuangan | Jl. tugu no 1A, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 100.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 100.000,00 |
| 4 | 03 | 20 | 007 | Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota | Jumlah Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 3,00 Dokumen | 2.351.744.000,00 | Block Grant | - | 2 naskah akademik | 2.351.744.000,00 |
| 4 | 03 | 20 | 008 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. tugu no 1a, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 262.160.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 262.160.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | | | | Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 4.900.082.000,00 | | | | 5.344.431.302,00 |
| 4 | 04 | | | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | 2.900.082.000,00 | | | | 2.945.607.170,00 |
| 4 | 04 | 19 | | Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yg disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan | | 70,00 % | 1.900.000.000,00 | | | | 1.266.237.500,00 |
| 4 | 04 | 19 | 001 | Kewaspadaan Dini di Daerah | jumlah personil Wasdin, personil FKDM, dan personil Puskomin | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 8.670,00 Orang | 350.000.000,00 | DAU Tambahan | | 8670 orang | 440.000.000,00 |
| 4 | 04 | 19 | 003 | Penanganan Gangguan Konflik Sosial | jumlah personil tim pemantau dan jumlah peserta pertemuan | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 361,00 Orang | 1.550.000.000,00 | DAU Tambahan | | 361 orang | 826.237.500,00 |
| 4 | 04 | 20 | | Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama | Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama | | 70,00 % | 582.000.000,00 | | | | 1.171.303.470,00 |
| 4 | 04 | 20 | 004 | Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama | jumlah peserta pertemuan | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 1.440,00 Orang | 325.804.000,00 | DAU Tambahan | | 1440 orang | 403.478.350,00 |
| 4 | 04 | 20 | 005 | Pembinaan Penghayat Kepercayaan | jumlah peserta pertemuan | Jl.A.Yani No 98, Kota Malang; | 80,00 Orang | 33.070.000,00 | DAU Tambahan | | - | 36.337.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 04 | 20 | 006 | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba | jumlah peserta rakor | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 250,00 Orang | 161.444.700,00 | DAU Tambahan | - | 250 orang | 203.853.210,00 |
| | | | | | Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa | | 11,00 % | | | | | |
| 4 | 04 | 20 | 001 | Forum Pembauran Kebangsaan | jumlah peserta pertemuan | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 125,00 Orang | 37.792.300,00 | DAU Tambahan | - | 125 orang | 238.968.950,00 |
| 4 | 04 | 20 | 002 | Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan | jumlah peserta pertemuan | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 1.000,00 Orang | 23.889.000,00 | DAU Tambahan | - | 1000 orang | 288.665.960,00 |
| 4 | 04 | 21 | | Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat | | 55,00 % | 418.082.000,00 | | | | 508.066.200,00 |
| 4 | 04 | 21 | 001 | Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik | jumlah pelaku sosialisasi | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 150,00 Orang | 113.218.000,00 | DAU Tambahan | - | 150 orang | 189.500.000,00 |
| 4 | 04 | 21 | 002 | Fasilitasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Bantuan Keuangan Partai Politik | jumlah stakeholder yg terlibat | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 200,00 Orang | 164.442.000,00 | DAU Tambahan | - | 200 orang | 96.100.000,00 |
| | | | | | Persentase peran serta ormas dalam pembangunan | | 30,00 % | | | | | |
| 4 | 04 | 21 | 004 | Peningkatan Kapasitas Ormas | jumlah ormas yg terdata | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 70,00 | 140.422.000,00 | DAU Tambahan | - | 70 ormas | 222.466.200,00 |
| 5 | 01 | | | Urusan Umum Umum | | | | 2.000.000.000,00 | | | | 2.398.824.132,00 |
| 5 | 01 | | | Urusan Umum Umum | | | | 2.000.000.000,00 | | | | 2.398.824.132,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 | 2.000.000.000,00 | | | | 2.398.824.132,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 15,00 Dokumen | 106.718.100,00 | DAU Tambahan | | 15 dokumen | 74.890.860,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 1,00 Dokumen | 48.000.000,00 | DAU Tambahan | | 1 dokumen | 48.780.600,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 1,00 Dokumen | 68.070.900,00 | DAU Tambahan | | 1 dokumen | 114.612.300,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 152,00 | 250.000.000,00 | DAU Tambahan | | 200 OH | 275.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 002 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 50,00 Unit | 50.000.000,00 | DAU Tambahan | | 320 unit | 55.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 092 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 13,00 Jenis | 87.657.403,00 | DAU Tambahan | | 20 jenis | 209.616.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 80,00 13,00 | 189.128.000,00 | DAU Tambahan | | 3 roda 4 dan 7 roda 2 | 181.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 025 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 200,00 m2 | 111.007.678,00 | DAU Tambahan | - | 80 m2 | 111.007.678,00 |
| 5 | 01 | 07 | 094 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 19,00 Jenis | 89.429.000,00 | DAU Tambahan | - | 16 jenis | 73.975.000,00 |
| | | | | | Nilai survey kepuasan internal | | 80,00 | | | | | |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 1.000,00 Surat | 141.836.000,00 | DAU Tambahan | - | 2000 surat | 166.074.700,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 12,00 Bulan | 85.937.919,00 | DAU Tambahan | - | 12 bulan | 80.942.400,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 2.050,00 m2 | 266.685.000,00 | DAU Tambahan | - | 2050 m2 | 254.853.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 104,00 eksemplar | 54.500.000,00 | DAU Tambahan | - | 71 eksemplar | 26.950.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 12,00 Bulan | 441.030.000,00 | DAU Tambahan | - | 12 bulan | 630.712.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. A. Yani No.98, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang: | 28,00 Orang | 10.000.000,00 | DAU Tambahan | - | 28 orang | 94.908.594,00 |

PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | | | | Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 5.065.632.000,00 | | | | 5.572.195.200,00 |
| 4 | 05 | | | Penanggulangan Bencana Daerah | | | | 3.000.000.000,00 | | | | 3.300.000.000,00 |
| 4 | 05 | 15 | | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Persentase Kejadian Bencana Pada Titik Pantau | | 0,00 % | 1.500.000.000,00 | | | | 1.650.000.000,00 |
| 4 | 05 | 15 | 002 | Pemantauan untuk pencegahan bencana | Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 10.000,00 Kelurahan | 321.565.000,00 | Block Grant | | 10000 Orang | 353.721.500,00 |
| 4 | 05 | 15 | 003 | Penyebarluasan informasi dan potensi bencana | Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 5.000,00 Orang | 117.535.000,00 | Block Grant | | 5.000 Orang | 129.288.500,00 |
| 4 | 05 | 15 | 004 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana | Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 500,00 Orang | 73.250.000,00 | Block Grant | | 500 Orang | 80.575.000,00 |
| 4 | 05 | 15 | 005 | Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 5,00 Kelurahan | 560.250.000,00 | Block Grant | | 5 Kelurahan | 616.275.000,00 |
| 4 | 05 | 15 | 001 | Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana | Persentase Masyarakat Tangguh Bencana | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 427.400.000,00 | Block Grant | | 2 Dokumen | 470.140.000,00 |
| 4 | 05 | 16 | | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik | | 100,00 % | 1.000.000.000,00 | | | | 1.100.000.000,00 |
| 4 | 05 | 16 | 001 | Pelatihan dan simulasi darurat bencana | Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 130,00 Orang | 133.020.000,00 | Block Grant | | 130 Orang | 146.322.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 05 | 16 | 002 | Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana | Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 15,00 Orang | 591.000.000,00 | Block Grant | - | 15 Orang | 650.100.000,00 |
| 4 | 05 | 16 | 004 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana | Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 1.000,00 Orang | 102.650.000,00 | Block Grant | - | 1000 Orang | 112.915.000,00 |
| 4 | 05 | 16 | 005 | Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana | Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 250,00 Jenis | 173.330.000,00 | Block Grant | - | 250 Orang | 190.663.000,00 |
| 4 | 05 | 17 | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | Persentase pulihnya kondisi sosial ekonomi, budaya dan psikologis korban bencana | | 30,00 % | 500.000.000,00 | | | | 550.000.000,00 |
| 4 | 05 | 17 | 001 | Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana | Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 141.500.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen | 155.650.000,00 |
| 4 | 05 | 17 | 004 | Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana | Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 100,00 Dokumen | 150.000.000,00 | Block Grant | - | 100 Orang | 165.000.000,00 |
| 4 | 05 | 17 | 005 | Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat | Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar , Kota Malang; | 100,00 Kartu Keluarga | 208.500.000,00 | Block Grant | - | 100 KK | 229.350.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Urusan Umum | | | | 2.065.632.000,00 | | | | 2.272.195.200,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 2.065.632.000,00 | | | | 2.272.195.200,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Danau Ranau Raya 1A Sawojajar , Kota Malang; | 1.300,00 Surat | 159.627.000,00 | Block Grant | - | 1.300 Surat | 175.589.700,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. Danau Ranau Raya 1A Sawojajar, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 72.000.000,00 | Block Grant | - | 12 Bulan | 79.200.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 035 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jl. Danau Ranau Raya No.1A Kota Malang, Kota Malang; | 24,00 Unit | 122.800.000,00 | Block Grant | - | 24 Unit | 135.080.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Danau Ranau Raya No.1A Kota Malang, Kota Malang; | 300,00 m2 | 105.000.000,00 | Block Grant | - | 300 m2 | 115.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. Danau Ranau Raya No.1A Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 Jenis | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 5 Jenis | 5.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. Danau Ranau Raya No.1A Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Jenis | 6.000.000,00 | Block Grant | - | 2 Jenis | 6.600.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. Danau Ranau Raya No.1A Kota Malang, Kota Malang; | 12.400,00 Kotak | 307.450.000,00 | Block Grant | - | 12.400 Kotak | 338.195.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jl. Danau Ranau Raya No.1A Kota Malang, Kota Malang; | 30,00 Kali | 272.800.000,00 | Block Grant | - | 30 Kali | 300.080.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 045 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | Jl. Danau Ranau Raya No.1A Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Orang | 90.000.000,00 | Block Grant | - | 2 Orang | 99.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 064 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | Jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | Jl. Danau Ranau Raya No.1A Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 Jenis | 132.340.000,00 | Block Grant | - | 4 Jenis | 145.574.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Danau Ranau Raya No.1A kota Malang, Kota Malang; | 300,00 m2 | 81.300.000,00 | Block Grant | - | 300 m2 | 89.430.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Danau Ranau Raya No.1A Kota Malang, Kota Malang; | 24,00 Unit | 190.500.000,00 | Block Grant | - | 24 unit | 209.550.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar, Kota Malang; | 1,00 Jenis | 61.700.000,00 | Block Grant | | 1 Dokumen | 67.870.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 65.110.000,00 | Block Grant | | 1 Dokumen | 71.621.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 46.225.000,00 | Block Grant | | 1 Dokumen | 50.847.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar, Kota Malang; | 8,00 Jenis | 15.550.000,00 | Block Grant | | 8 Jenis | 17.105.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar, Kota Malang; | 57,00 Orang | 182.200.000,00 | Block Grant | | 57 Orang | 200.420.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar, Kota Malang; | 20,00 Jenis | 10.500.000,00 | Block Grant | | 20 Unit | 11.550.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 57.530.000,00 | Block Grant | | 1 Dokumen | 63.283.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 116 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Jl. Danau Ranau Raya No.1-A Sawojajar, Kota Malang; | 1,00 Kali 80,00 % | 82.000.000,00 | Block Grant | | 1 Dokumen | 90.200.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Klojen

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 17.488.897.000,00 | | | | 38.582.263.785,88 |
| 4 | | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 16.463.997.000,00 | | | | 20.011.320.143,00 |
| 4 | 06 | | | Pemerintahan Administrasi Kecamatan | | | | 16.463.997.000,00 | | | | 20.011.320.143,00 |
| 4 | 06 | 22 | | Program Pemerintahan Umum | IKM Perangkat Daerah | | 81,50 data | 8.006.198.400,00 | | | | 9.147.409.640,00 |
| 4 | 06 | 22 | 001 | Penyusunan Data Monografi Kecamatan | Jumlah dokumen monografi | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 dokumen | 900.000,00 | Block Grant | - | 2,00 dokumen | 1.063.700,00 |
| 4 | 06 | 22 | 002 | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 7.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 18.477.800,00 |
| 4 | 06 | 22 | 012 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gadingkasri | Jumlah dokumen monografi | Jalang Galunggung No. 5, Kota Malang; | 1 dokumen | 528.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 580.800,00 |
| 4 | 06 | 22 | 125 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Gadingkasri | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 12 kegiatan | 253.175.500,00 | Block Grant | - | 12 kegiatan | 374.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 009 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kauman | Jumlah dokumen monografi | Jl. KH. Hasyim Ashari No.21 A , Kota Malang; | 1 dokumen | 200.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 200.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 122 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kauman | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. KH. Hasyim Ashari No.21 A , Kota Malang; | 12 kegiatan | 216.017.000,00 | Block Grant | - | 12 kegiatan | 260.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 006 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah dokumen monografi | Jl. MGR Sugio Pranoto No. 23 A Kelurahan Kidu Dalem - Malang, Kota Malang; | 1 dokumen | 1.750.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 7.700.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 119 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. MGR Sugio Pranoto No. 23 A Kelurahan Kidu Dalem - Malang, Kota Malang; | 12 kegiatan | 280.639.500,00 | Block Grant | - | 12 kegiatan | 401.301.800,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 005 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Samaan | Jumlah dokumen monografi | Jalan Kaliurang Barat Nomor 121, Kota Malang; | 1 dokumen | 820.000,00 | DBH CHT | - | 1 dokumen | 2.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 118 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Samaan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jalan Kaliurang Barat Nomor 121, Kota Malang; | 12 kegiatan | 259.923.000,00 | DBH CHT | - | 12 kegiatan | 315.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 003 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Klojen | Jumlah dokumen monografi | Jl. Patimura nomor 51 Malang, Kota Malang; | 2 dokumen | 4.500.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 4.900.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 116 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Klojen | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jalan patimura 51 malang, Kota Malang; | 28 kegiatan | 327.000.000,00 | Block Grant | - | 28 kegiatan | 324.276.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 013 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Penanggungan | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 2 dokumen | 1.150.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 1.150.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 126 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Penanggungan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 19 kegiatan | 325.651.000,00 | Block Grant | - | 19 kegiatan | 504.766.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 010 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah dokumen monografi | Jalan Kunir No. 9A, Kota Malang; | 1 dokumen | 2.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 2.500.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 123 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jalan Kunir No. 9A, Kota Malang; | 100,00 % | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 12 kegiatan | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 008 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kasin | Jumlah dokumen monografi | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 2 dokumen | 1.000.000,00 | DBH CHT | - | 1 dokumen | 2.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 121 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kasin | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 25,00 % | 275.782.000,00 | DBH CHT | - | Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa | 429.421.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 007 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukoharjo | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 2 dokumen | 8.925.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 8.925.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 120 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukoharjo | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Sukokharjo, Kota Malang; | 30 kegiatan | 263.101.000,00 | Block Grant | - | 30 kegiatan | 435.768.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 004 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rampal Celaket | Jumlah dokumen monografi | Jl. Simpangkasembon 8B Malang, Kota Malang; | 2 dokumen | 1.940.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 2.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 117 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Rampal Celaket | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Simpangkasembon 8 B Malang, Kota Malang; | 22,00 kegiatan | 269.854.400,00 | Block Grant | - | 22,00 kegiatan | 405.785.840,00 |
| 4 | 06 | 22 | 011 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bareng | Jumlah dokumen monografi | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 2 dokumen | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 124 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bareng | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 1 kegiatan | 204.634.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 400.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 173 | Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan Kecamatan | Jumlah dokumen informasi pembangunan | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 1 dokumen | 900.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 1.067.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 069 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Gadingkasri | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 80,00 % | 344.330.000,00 | Block Grant | - | 56 (lima puluh enam) orang | 378.763.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 066 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kauman | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. KH. Hasyim Ashari No.21 A , Kota Malang; | 77,00 % | 476.601.000,00 | Block Grant | - | Terlaksana Pembinaan dan Fasilitasi RT dan RW Wilayah Kelurahan Kauman | 476.601.500,00 |
| 4 | 06 | 22 | 063 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. MGR Sugio Pranoto No. 23 A Kelurahan Kidul Dalem - Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 370.400.000,00 | Block Grant | - | Jumlah RT dan RW yang dilatin dan diberikan Honor | 408.331.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 062 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Samaan | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jalan Kaliurang Barat Nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 413.635.000,00 | DBH CHT | - | Terlaksananya 1 kali kegiatan dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi serta terfasilitasinya honorarium RT dan RW selama 12 Bulan | 413.635.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 060 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Klojen | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jalan Patimura 51 Malang, Kota Malang; | 54,00 % | 335.000.000,00 | Block Grant | - | 47 | 33.602.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 070 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Penanggungan | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 100,00 % | 349.700.000,00 | Block Grant | - | Jumlah RT/RW terfasilitasi - 8 RW, 45RT | 349.700.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 067 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jalan Kunir No. 9A, Kota Malang; | 100,00 % | 654.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah RT/RW terfasilitasi - 97 RT / 10 RW | 654.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 065 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kasin | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 12,00 % | 656.650.000,00 | DBH CHT | - | Terlaksananya kegiatan Peningkatan pelayanan Administrasi RT RW di kelurahan Kasin Tahun 2021 | 656.650.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 064 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Sukoharjo | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 392.400.000,00 | Block Grant | - | 7 RW dan 57 RT terfasilitasi | 401.075.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 061 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Rampal Celaket | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Simpangkasembon 8B Malang, Kota Malang; | 12,00 % | 257.822.000,00 | Block Grant | - | Kelurahan Rampal Celaket | 283.604.200,00 |
| 4 | 06 | 22 | 068 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bareng | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 87,00 % | 533.500.000,00 | Block Grant | - | 87 orang | 533.550.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 176 | Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | Jumlah Patroli yang dilaksanakan | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 16,00 % | 41.800.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya fasilitasi tingkat Forkompimcam | 71.830.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 200 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Kauman | Jumlah Patroli | Jl. KH. Hasyim Ashari No.21 A , Kota Malang; | 12,00 % | 21.600.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengamanan dalam Rangka Tramtibum Di Wilayah Kelurahan Kauman | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 201 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah Patroli | Jl. MGR Sugio Pranoto No. 23 A Kelurahan Kidu Dalem - Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 25.700.000,00 | Block Grant | - | Jumlah monitoring yang dilakukan | 29.260.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 202 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Samaan | Jumlah Patroli | Jalan Kaliurang Barat nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 19.810.000,00 | DBH CHT | - | Pelaksanaan patroli wilayah selama 12 bulan dan fasilitasi bagi babinsa dan babinkamtibmas di wilayah kelurahan Samaan | 35.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 204 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Penanggungan | Jumlah Patroli | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 100,00 % | 25.140.000,00 | Block Grant | - | Patroli bersama dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah | 25.140.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 205 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Oro Oro Dowo | Jumlah Patroli | Jalan Kunir No. 9A, Kota Malang; | 100,00 % | 256.820.000,00 | Block Grant | - | Jumlah jenis layanan sesuai dengan SP dan SOP yang tepat waktu - 21 jenis pelayanan | 350.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 206 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Kasin | Jumlah Patroli | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 21.600.000,00 | DBH CHT | - | Terlaksananya kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban kelurahan Kasin Tahun 2021 | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 207 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Sukoharjo | Jumlah Patroli | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 21.850.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan kegiatan patroli | 17.950.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 208 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Rampal Celaket | Jumlah Patroli | Jl. Simpangkasembon 8B Malang, Kota Malang; | 12,00 % | 14.400.000,00 | Block Grant | - | Rampal Celaket | 14.400.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 209 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Bareng | Jumlah Patroli | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 % | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 210 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Gading Kasri | Jumlah Patroli | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 12,00 Patroli | 21.850.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Patroli | 24.035.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | | Program Pemberdayaan Masyarakat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | 80,00 % | 6.152.178.800,00 | | | | 7.355.605.051,00 |
| 4 | 06 | 16 | 001 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 % | 20.000.000,00 | Block Grant | - | Terpeliharanya tramtibum di wilayah Kecamatan Klojen | 29.593.300,00 |
| 4 | 06 | 16 | 002 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 % | 13.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan | 17.160.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 003 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 % | 43.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya pembinaan perempuan di tingkat kecamatan | 56.908.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 004 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 19.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan | 21.263.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 005 | Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 % | 48.230.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya koordinasi Perangkat Daerah, Forkompimcam dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Klojen | 46.087.800,00 |
| 4 | 06 | 16 | 006 | Penyusunan Profil Kecamatan | Jumlah dokumen profil | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 2.000.000,00 | Block Grant | - | Tersusunnya dokumen profil kecamatan | 1.502.600,00 |
| 4 | 06 | 16 | 016 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Gading Kasri | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi) | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 75,00 % | 49.545.000,00 | Block Grant | - | Meningkatnya Situasi sosial masyarakat yang tertib dan aman Meningkatkan kemampuan anggota satlinmas Kelurahan Gadingkasri dalam kesiapsiagaan bencana | 54.499.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 073 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gading Kasri | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 75,00 % | 26.400.000,00 | Block Grant | - | lembaga kemasyarakatan Kelurahan Gadingkasri | 29.040.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 130 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gading Kasri | Jumlah kegiatan | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 75,00 % | 57.792.500,00 | Block Grant | - | Peserta Pelatihan serta pengurus PKK di wilayah Kelurahan Gading Kasri | 63.571.750,00 |
| 4 | 06 | 16 | 244 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gading Kasri | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 75,00 % | 13.640.000,00 | Block Grant | - | Terlibatnya peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Gadingkasri melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gadingkasri | 15.004.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 301 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri | Jumlah kegiatan | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 75,00 % | 16.430.000,00 | Block Grant | - | Unsur masyarakat dibawah garis kemiskinan dan pengangguran di Kelurahan Gading Kasri | 38.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 415 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Gading Kasri | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 75,00 % | 27.400.000,00 | Block Grant | - | Modin perawat jenazah 8 (delapan) orang | 30.140.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 472 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Gadingkasri | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 75,00 % | 90.100.000,00 | Block Grant | - | - 23 (dua puluh tiga) orang Penjaga Tempat Ibadah di wilayah Kelurahan Gadingkasri; - 4 (empat) orang Penjaga Makam di wilayah Kelurahan Gadingkasri. Total sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. | 99.110.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 529 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Gading Kasri | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 75,00 % | 258.450.000,00 | Block Grant | - | - 78 (tujuh puluh delapan) orang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu di wilayah Kelurahan Gadingkasri. | 284.295.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 358 | Penyusunan Profil Kelurahan Gading Kasri | Jumlah dokumen profil | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 75,00 % | 15.000.000,00 | Block Grant | - | Data Profil Kelurahan yang valid dan uptade | 16.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 013 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kauman | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. KH.Hasyim Ashari NO.21A , Kota Malang; | 2,00 % | 11.825.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pembinaan atau Sosialisasi | 14.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 070 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kauman | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. KH.Hasyim Ashari NO.21A, Kota Malang; | 6,00 % | 37.885.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan | 37.885.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 184 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kauman | Jumlah kegiatan | Jl. KH.Hasyim Ashari NO.21A, Kota Malang; | 1,00 % | 5.750.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan | 5.750.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 127 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kauman | Jumlah kegiatan | Jl. KH.Hasyim Ashari NO.21A, Kota Malang; | 6,00 % | 42.975.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kader PKK, Kaum Perempuan tingkat Kelurahan | 42.975.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 241 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kauman | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. KH.Hasyim Ashari NO.21A, Kota Malang; | 1,00 % | 14.645.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pra Musrenbang dan Musrenbang Tingkat Kelurahan | 16.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 298 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kauman | Jumlah kegiatan | Jl. KH.Hasyim Ashari NO.21A, Kota Malang; | 2,00 % | 20.600.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Keterampilan bagi Masyarakat | 20.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 412 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kauman | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. KH.Hasyim Ashari NO.21A, Kota Malang; | 21,00 % | 70.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kauman | 72.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 469 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kauman | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. KH.Hasyim Ashari NO.21A, Kota Malang; | 115,00 % | 165.950.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kauman | 165.950.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 526 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kauman | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. KH.Hasyim Ashari NO.21A, Kota Malang; | 112,00 % | 380.450.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kauman | 380.450.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 355 | Penyusunan Profil Kelurahan Kauman | Jumlah dokumen profil | Jl. KH.Hasyim Ashari NO.21A, Kota Malang; | 1,00 % | 1.020.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Profil kelurahan kauman | 14.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 010 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. MGR Susio Pranoto No 23 A, Kota Malang; | 100,00 % | 12.100.000,00 | Block Grant | - | Linmas yang terbina | 13.332.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 067 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl MGR Sugio Pranoto No 23 A, Kota Malang; | 100,00 % | 43.800.000,00 | Block Grant | - | Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya | 79.805.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 181 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah kegiatan | Jl MGR Suugio Pranoto 23A, Kota Malang; | 100,00 % | 8.250.000,00 | Block Grant | - | Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan | 38.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 124 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah kegiatan | Jl MGR Sugio Pranoto 23A, Kota Malang; | 100,00 % | 63.250.000,00 | Block Grant | - | Kegiatan TP PKK Kidul Dalem yang terlaksana | 110.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 238 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl MGR Sugio Pranoto No. 23 A, Kota Malang; | 100,00 % | 27.170.500,00 | Block Grant | - | Dokumen musrenbang | 34.534.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 295 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah kegiatan | Jl. MGR Sugio Pranoto 23 A Kelurahan Kidul Dalem - Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 21.100.000,00 | Block Grant | - | Peningkatan skill eserta pelatihan | 33.429.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 409 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. MGR Sugio Pranoto 23 A Kelurahan Kidul Dalem - Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 51.700.000,00 | Block Grant | - | jumlah Modin dan perawat jenazah yang dapat diandalkan | 60.164.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 466 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. MGR Sugio Pranoto 23 A Kelurahan Kidul Dalem - Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 124.860.000,00 | Block Grant | - | jumlah Penjaga tempat ibadah dan makam yang dibina dan diberi honor | 138.237.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 523 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. MGR Sugio Pranoto 23 A Kelurahan Kidul Dalem - Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 116.975.000,00 | Block Grant | - | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | 116.975.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 352 | Penyusunan Profil Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah dokumen profil | Jl. MGR Sugio Pranoto 23 A Kelurahan Kidul Dalem - Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 7.575.000,00 | Block Grant | - | Data Potensi, Tingkat perkembangan dan Data Dasar Keluarga | 14.416.600,00 |
| 4 | 06 | 16 | 009 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Samaan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jalan Kaliurang Barat No 121, Kota Malang; | 100,00 % | 6.535.000,00 | DBH CHT | - | Terlaksananya 1 kali sosialisasi dan 1 kali pelatihan anggota satlinmas | 8.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 066 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Samaan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jalan Kaliurang Barat Nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 81.480.000,00 | DBH CHT | - | Pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam bentuk sosialisasi dan forum grup diskusi (FGD) | 95.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 180 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Samaan | Jumlah kegiatan | Jalan Kaliurang Barat Nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 7.990.000,00 | DBH CHT | - | Pelaksanaan 1 kali kegiatan lomba atau aktivitas sosial lain yang mengandung unsur potensi dan kreatifitas. | 11.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 123 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Samaan | Jumlah kegiatan | Jalan Kaliurang Barat Nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 44.020.000,00 | DBH CHT | - | Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk sosialisasi peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi seluruh anggota PKK di Kelurahan Samaan | 93.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 237 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Samaan | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jalan Kaliurang Barat nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 10.070.000,00 | DBH CHT | - | Pelaksanaan kegiatan 1 kali kegiatan pra musrenbang dan pelaksanaan 1 kali kegiatan musrenbang di tingkat kelurahan dengan hasil dokumen usulan musrenbang | 16.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 294 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Samaan | Jumlah kegiatan | Jalan Kaliurang Barat Nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 17.870.000,00 | DBH CHT | - | Pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan ketrampilan masyarakat | 45.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 408 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Samaan | Jumlah modin dan perawat jenasah | Jalan Kaliurang Barat Nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 54.910.000,00 | DBH CHT | - | Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sosialisasi bagi modin dan perawat jenazah serta pemberian insentif kepada modin dan perawat jenazah di Kelurahan Samaan | 60.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 465 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Samaan | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jalan Kaliurang Barat Nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 44.785.000,00 | DBH CHT | - | Pelaksanaan 1 kali kegiatan pembinaan dan sosialisasi serta pemberian insentif bagi penjaga makam dan penjaga tempat ibadah di Kelurahan Samaan | 50.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 522 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Samaan | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jalan Kaliurang Barat Nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 146.035.000,00 | DBH CHT | - | Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan serta pemberian insentif bagi guru ngaji dan guru sekolah minggu di Kelurahan Samaan | 150.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 351 | Penyusunan Profil Kelurahan Samaan | Jumlah dokumen profil | Jalan Kaliurang Barat nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 820.000,00 | DBH CHT | - | Pelaksanaan pengumpulan data dari tingkat RT sampai ke tingkat RW | 2.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 007 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Klojen | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi) | Jl. Patimura nomor 51 Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 30.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pembinaan | 9.240.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 064 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Klojen | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Patimura 51 Malang, Kota Malang; | 3,00 % | 20.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan Klojen | 93.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 178 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Klojen | Jumlah kegiatan | Jln. Patimura 51 Malang, Kota Malang; | 2,00 % | 20.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Klojen | 76.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 121 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Klojen | Jumlah kegiatan | Jln. Patimura 51, Kota Malang; | 8,00 % | 50.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Klojen | 82.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 235 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Klojen | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jln. Patimura 51 Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 14.860.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pramusrenbangkel dan Musrenbang. | 20.350.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 292 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Klojen | Jumlah kegiatan | Jln. Patimura Nomor 51 Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 30.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Klojen | 95.200.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 406 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Klojen | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jln. Patimura Nomor 51 Malang, Kota Malang; | 21,00 % | 71.500.000,00 | Block Grant | - | terlaksananya Pembinaan Modin di Kelurahan Klojen | 78.650.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 463 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Klojen | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jln. Patimura 51 Malang, Kota Malang; | 8,00 % | 30.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Makam dan Tempat Ibadah | 30.800.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 520 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Klojen | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jln. Patimura 51 Malang, Kota Malang; | 46,00 % | 155.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penjaga Makam dan Tempat Ibadah | 170.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 017 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Penanggungan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 21.275.000,00 | Block Grant | - | Jumlah kegiatan (1 Sosialisasi dan 1 Pembinaan Linmas Kelurahan Penanggungan) | 21.275.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 074 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Penanggungan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 100,00 % | 35.150.000,00 | Block Grant | - | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi - 3 lembaga | 40.100.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 188 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Penanggungan | Jumlah kegiatan | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 100,00 % | 34.370.000,00 | Block Grant | - | Jumlah kegiatan - 4 | 37.620.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 131 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Penanggungan | Jumlah kegiatan | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 100,00 % | 35.300.000,00 | Block Grant | - | Jumlah kegiatan - 5 | 46.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 245 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Penanggungan | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 100,00 % | 17.365.000,00 | Block Grant | - | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel - 1 dokumen | 17.365.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 416 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Penanggungan | Jumlah modin dan perawat jenazah | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 100,00 % | 75.550.000,00 | Block Grant | - | Jumlah modin dan perawat jenazah - 22 | 75.550.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 473 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Penanggungan | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 100,00 % | 68.950.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam - 20 | 68.950.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 530 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Penanggungan | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 100,00 % | 220.870.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam - 65 | 220.870.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 359 | Penyusunan Profil Kelurahan Penanggungan | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 100,00 % | 8.115.000,00 | Block Grant | - | Jumlah dokumen profil - 1 dokumen | 8.115.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 014 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | jalan kunir no. 9A , Kota Malang; | 2,00 % | 11.800.000,00 | Block Grant | - | terlaksananya keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Oro oro Dowo | 16.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 071 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | jalan kunir no. 9A, Kota Malang; | 10,00 % | 12.175.000,00 | Block Grant | - | terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan kelurahan oro oro dowo | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 185 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah kegiatan | jalan kunir no. 9A, Kota Malang; | 3,00 % | 8.665.000,00 | Block Grant | - | terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan oro oro dowo | 12.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 128 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah kegiatan | jalan kunir no. 9A, Kota Malang; | 5,00 % | 52.933.000,00 | Block Grant | - | terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga | 70.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 242 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jalan Kunir No. 9A , Kota Malang; | 100,00 % | 17.151.000,00 | Block Grant | - | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel - 1 dokumen | 17.210.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 299 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah kegiatan | Jalan Kunir No. 9A, Kota Malang; | 100,00 % | 13.155.000,00 | Block Grant | - | Jumlah kegiatan 2 kali kegiatan/pelatihan ketrampilan | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 413 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jalan Kunir No. 9A, Kota Malang; | 100,00 % | 62.700.000,00 | Block Grant | - | Jumlah modin dan perawat jenazah - 19 orang | 62.700.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 470 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jalan Kunir No. 9A, Kota Malang; | 100,00 % | 72.600.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam - 22 orang | 72.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 527 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jalan Kunir No. 9A, Kota Malang; | 100,00 % | 148.500.000,00 | Block Grant | - | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu - 45 orang (37 guru ngaji dan 8 guru sekolah minggu) | 148.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 356 | Penyusunan Profil Kelurahan Oro-oro Dowo | Jumlah dokumen profil | Jalan Kunie No. 9A, Kota Malang; | 100,00 % | 2.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah dokumen profil - 1 dokumen | 2.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 012 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kasin | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 10.650.000,00 | Block Grant | - | 2 kali sosialisasi | 11.650.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 069 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kasin | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 4,00 % | 53.075.000,00 | Block Grant | - | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan | 141.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 183 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kasin | Jumlah kegiatan | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 13.800.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan sosialisasi | 15.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 126 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kasin | Jumlah kegiatan | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 4,00 % | 40.000.000,00 | Block Grant | - | 7 kegiatan sosialisasi dan pembinaan | 71.650.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 240 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kasin | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 21.000.000,00 | Block Grant | - | Dokumen Musrenbang | 24.210.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 411 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kasin | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Nusakambangan No.1 Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 109.900.000,00 | Block Grant | - | Honorarium Modin dan perawat jenazah | 109.900.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 468 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kasin | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 63.550.000,00 | Block Grant | - | Honorarium 19 orang penjaga tempat ibadah dan makam | 63.550.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 525 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kasin | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 321.850.000,00 | Block Grant | - | Honorarium 12 bulan 97 orang Guru Ngaji dan Sekolah Minggu | 321.850.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 354 | Penyusunan Profil Kelurahan Kasin | Jumlah dokumen profil | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 750.000,00 | Block Grant | - | Buku Profil Kelurahan | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 011 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukoharjo | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 5.550.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 7.320.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 068 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukoharjo | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 20.850.000,00 | Block Grant | - | 5 kegiatan | 75.975.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 182 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sukoharjo | Jumlah kegiatan | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 12.780.000,00 | Block Grant | - | 2 kegiatan | 15.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 125 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukoharjo | Jumlah kegiatan | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 74.025.000,00 | Block Grant | - | 4 kegiatan | 80.150.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 239 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukoharjo | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 13.250.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 15.550.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 296 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Sukoharjo | Jumlah kegiatan | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 0,00 | Block Grant | - | 3 kegiatan | 39.890.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 410 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Sukoharjo | Jumlah modin dan perawat jenazah | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 47.420.000,00 | Block Grant | - | 14 orang modin & perawat jenazah | 47.420.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 467 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Sukoharjo | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 87.380.000,00 | Block Grant | - | 26 penjaga tempat ibadah | 87.380.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 524 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Sukoharjo | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 373.760.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Guru Ngaji : 90 orang x 12 bulan; Jumlah Guru Sekolah Minggu: 22 orang x 12 bulan | 373.760.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 353 | Penyusunan Profil Kelurahan Sukoharjo | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 8.925.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen profil | 9.825.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 008 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Simpang Kasembon 8B Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 14.045.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya sosialisasi Linmas | 30.833.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 065 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Rampal Celaket | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Simpang Kasembon 8 B Malang, Kota Malang; | 5,00 % | 26.704.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya kegiatan Lembaga Kemasyarakatan | 53.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 179 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Rampal Celaket | Jumlah kegiatan | Jl. Simpang Kasembon Nomor 8 B Malang, Kota Malang; | 2,00 % | 31.912.500,00 | Block Grant | - | Terlaksananya fasilitasi kegiatan sosial | 53.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 122 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Rampil Celaket | Jumlah kegiatan | Jl. Simpangkasembon 8B Malang, Kota Malang; | 5,00 % | 63.354.300,00 | Block Grant | - | Rampil Celaket | 64.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 236 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Rampil Celaket | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Simpangkasembon 8 B Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 17.080.000,00 | Block Grant | - | Kelurahan Rampil Celaket | 17.700.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 293 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Rampil Celaket | Jumlah kegiatan | Jl. Simpangkasembon 8B Malang, Kota Malang; | 4,00 % | 27.950.000,00 | Block Grant | - | Rampil Celaket | 60.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 407 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Rampil Celaket | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Simpangkasembon 8B Malang, Kota Malang; | 14,00 % | 46.526.000,00 | Block Grant | - | Rampil Celaket | 52.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 464 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Rampil Celaket | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Simpangkasembon 8B Malang, Kota Malang; | 14,00 % | 46.542.000,00 | Block Grant | - | Rampil Celaket | 52.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 521 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Rampil Celaket | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Simpangkasembon 8B Malang, Kota Malang; | 40,00 % | 136.620.000,00 | Block Grant | - | Rampil elaket | 145.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 350 | Penyusunan Profil Kelurahan Rampil Celaket | Jumlah dokumen profil | Jl. Simpangkasembon 8B Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 1.235.000,00 | Block Grant | - | Rampil Celaket | 2.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 015 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bareng | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 % | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 2 kegiatan | 16.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 072 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bareng | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 % | 84.000.000,00 | Block Grant | - | 5 lembaga kemasyarakatan dan Pokja Kelembagaan | 90.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 186 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bareng | Jumlah kegiatan | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 25.588.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 30.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 129 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bareng | Jumlah kegiatan | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 20,00 % | 75.000.000,00 | Block Grant | - | 21 kegiatan | 100.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 243 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bareng | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 45.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 300 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bareng | Jumlah kegiatan | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 4 kegiatan | 40.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 414 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bareng | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 19,00 % | 63.400.000,00 | Block Grant | - | 19 orang | 63.400.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 471 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bareng | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 20,00 % | 70.000.000,00 | Block Grant | - | 20 orang | 70.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 528 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bareng | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 106,00 % | 350.500.000,00 | Block Grant | - | 116 orang | 382.800.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 357 | Penyusunan Profil Kelurahan Bareng | Jumlah dokumen profil | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 634 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Penanggungan | Jumlah Kegiatan | Kelurahan Penanggungan, Kota Malang; | 2,00 % | 21.300.000,00 | Block Grant | - | Jumlah kegiatan - 2 kegiatan | 41.650.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 635 | Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat Kelurahan Kasin | Jumlah Kegiatan | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 12.450.000,00 | Block Grant | - | 3 kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat | 46.369.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 636 | Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Gading Kasri | Jumlah kegiatan | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 75,00 % | 16.090.000,00 | Block Grant | - | Belanja Alat Kerja Bakti Rutin dan Sarasehan Sejarah Kelurahan sebanyak 25 peserta | 17.699.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 349 | Penyusunan Profil Kelurahan Klojen | Jumlah dokumen profil | Jalan Patimura 51 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 20.000.000,00 | Block Grant | - | kegiatan | 1,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 17 | | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik | Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kewilayahan | | 35,00 % | 2.305.619.800,00 | | | | 3.508.305.452,00 |
| 4 | 06 | 17 | 001 | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 24.100.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya monitoring dan evaluasi peningkatan serta pembangunan prasarana dan sarana publik di wilayah Kecamatan Klojen | 33.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 002 | Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpras) | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 1.200.000,00 | Block Grant | - | Tersusunnya data prasana dan sarana publik yang ada di wilayah Kecamatan Klojen | 1.473.450,00 |
| 4 | 06 | 17 | 012 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Gading Kasri | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jalan Galunggung No. 5, Kota Malang; | 80,00 % | 161.000.000,00 | Block Grant | - | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Gadingkasri | 365.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 009 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kauman | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. KH.Hasyim Ashari N0.21A, Kota Malang; | 10,00 % | 255.750.000,00 | Block Grant | - | Terlaksana Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kauman | 396.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 17 | 006 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. MGR Sugiyo Pranoto 23 a - Kelurahan Kidul Dalem, Kota Malang; | 100,00 % | 129.350.000,00 | Block Grant | - | Pembangunan dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang terbangun | 199.012.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 005 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Samaan | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jalan Kaliurang Barat Nomor 121, Kota Malang; | 100,00 % | 140.000.000,00 | DBH CHT | - | Pelaksanaan pembangunan melalui pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik | 280.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 003 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Klojen | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jln. Patimura 51 Malang, Kota Malang; | 8,00 % | 198.430.000,00 | Block Grant | - | Terlaksanannya Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Klojen | 303.853.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 013 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Penanggungan | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | RW. I s.d VIII Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen, Kota Malang; | 100,00 % | 157.750.000,00 | Block Grant | - | 10 kegiatan | 220.425.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 010 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Oro-Oro Dowo | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jalan Kunir No. 9A, Kota Malang; | 100,00 % | 305.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan oro oro dowo | 400.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 008 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kasin | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Nusakambangan No. 1 Malang, Kota Malang; | 9,00 % | 250.000.000,00 | Block Grant | - | 11 paket pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana | 308.685.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 17 | 007 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukoharjo | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang; | 100,00 % | 223.410.000,00 | Block Grant | - | 7 kegiatan | 250.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 004 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Simpangkasembon 8B Malang, Kota Malang; | 19,00 % | 234.229.800,00 | Block Grant | - | Rampal Celaket | 287.097.002,00 |
| 4 | 06 | 17 | 011 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bareng | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Kawi 15 B Kota Malang, Kota Malang; | 14,00 % | 225.400.000,00 | Block Grant | - | 8 kegiatan | 463.760.000,00 |
| | | | | Urusan Umum | | | | 1.024.900.000,00 | | - | | 18.570.943.642,88 |
| | | | | Umum | | | | 1.024.900.000,00 | | - | | 18.570.943.642,88 |
| | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 1.024.900.000,00 | | - | | 18.570.943.642,88 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Surabaya No. 3 Kotra Malang, Kota Malang; | 1.075,00 % | 4.161.500,00 | Block Grant | - | Terlaksananya pengadministrasian yang baik surat kedinasan | 5.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 % | 57.900.000,00 | Block Grant | - | Terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon, air dan internet dengan lancar | 76.560.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 2.000,00 % | 73.000.000,00 | Block Grant | - | Terpeliharanya kebersihan kantor kecamatan | 80.071.200,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 46,00 % | 42.000.000,00 | Block Grant | - | Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor kecamatan | 51.526.200,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 % | 11.000.000,00 | Block Grant | - | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan kebutuhan penggandaan kantor | 14.162.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 7,00 % | 2.400.000,00 | Block Grant | - | Terpenuhinya kebutuhan komponen dan alat listrik kantor kecamatan | 3.295.600,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 % | 7.400.000,00 | Block Grant | - | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan Kantor Kecamatan Klojen | 9.820.800,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 4.600,00 % | 222.100.000,00 | Block Grant | - | Terpenuhinya kebutuhan makanan serta minuman untuk rapat dan tamu | 241.670.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 10,00 % | 59.000.000,00 | Block Grant | - | Terpenuhinya koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah | 78.210.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 045 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 % | 104.900.000,00 | Block Grant | - | Terpeliharanya keamanan gedung kantor kecamatan | 77.440.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 15.000.000,00 | Block Grant | - | Terpenuhinya keikutsertaan dalam kegiatan insidentil | 21.725.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 % | 43.538.500,00 | Block Grant | - | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 28.237.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 86.100.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya pemeliharaan terhadap gedung kantor kecamatan | 110.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 11,00 % | 100.000.000,00 | Block Grant | - | Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas operasional | 121.187.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 100,00 % | 15.000.000,00 | Block Grant | - | Meningkatnya kapasitas dan kemampuan ASN | 103.400.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 % | 74.000.000,00 | Block Grant | - | Tersusunnya dokumen laporan keuangan kecamatan | 17.303.539.242,88 |
| 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 % | 900.000,00 | Block Grant | - | Tersusunnya dokumen pengukuran kepuasan masyarakat | 1.700.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 008 | Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) | Jumlah ZI | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 80,00 % | 2.200.000,00 | Block Grant | - | meningkatnya kualitas dan jumlah Zona Integritas | 2.924.900,00 |
| 5 | 01 | 07 | 009 | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 % | 2.500.000,00 | Block Grant | - | Tersusunnya dokumen SP dan SOP | 7.698.900,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 % | 900.000,00 | Block Grant | - | Tersusunnya dokumen perencanaan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 1.592.800,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 2.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya penyusunan/reviu dokumen Renstra Perangkat Daerah | 9.445.700,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 % | 31.000.000,00 | Block Grant | - | Tersusunnya dokumen Renja/Rkt Perangkat Daerah | 29.136.800,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 025 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 % | 50.000.000,00 | Block Grant | - | Terlaksananya rehab gedung kantor | 173.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 099 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dibuat | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 7,00 % | 900.000,00 | Block Grant | - | Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja Perangkat Daerah | 1.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 094 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Surabaya No. 3 Kota Malang, Kota Malang; | 30,00 Unit | 17.000.000,00 | Block Grant | - | 30,00 Unit | 17.600.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Blimbing

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 21.602.666.000,00 | | | | 25.674.740.616,00 |
| 4 | | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 20.602.102.000,00 | | | | 24.565.933.898,00 |
| 4 | 06 | | | Pemerintahan Administrasi Kecamatan | | | | 20.602.102.000,00 | | | | 24.565.933.898,00 |
| 4 | 06 | 22 | | Program Pemerintahan Umum | IKM Perangkat Daerah | | 80,20 % | 10.009.227.400,00 | | | | 10.807.345.550,00 |
| 4 | 06 | 22 | 001 | Penyusunan Data Monografi Kecamatan | Jumlah dokumen monografi | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 754.000,00 | Block Grant | - | 2 laporan | 829.400,00 |
| 4 | 06 | 22 | 024 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Balearjosari | Jumlah dokumen monografi | Jalan Raya Balearjosari No.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.500.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 2.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 016 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Arjosari | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Arjosari Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No. 378 Arjosari Blimbing, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 100.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 100.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 015 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polowijen | Jumlah dokumen monografi | Jalan A Yani Utara No.2a Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 200.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 1.100.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 017 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Purwodadi | Jumlah dokumen monografi | jln A.Yani 148 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.003.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 1.001.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 018 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pandanwangi | Jumlah dokumen monografi | jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6A Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 014 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Blimbing | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Blimbing, Jl. Tenaga Utara No 1 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 2 DOKUMEN | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 019 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Purwantoro | Jumlah dokumen monografi | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 360.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 360.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 020 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bunulrejo | Jumlah dokumen monografi | Jl. Hamid Rusdi no.91 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 760.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Data Monografi Kelurahan Bunulrejo - 100% | 760.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 021 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kesatrian | Jumlah dokumen monografi | Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 0,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 5.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 022 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polehan | Jumlah dokumen monografi | Jl. Raya Puntodewo 29 , Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 700.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 770.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 023 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Jodipan | Jumlah dokumen monografi | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 676.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 676.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 081 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Balarjosari | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jalan Rya Balarjosari No.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 52,00 | 320.650.000,00 | Block Grant | - | 52,00 | 325.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 073 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Arjosari | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Arjosari Jl. Teluk Pelabuhan Ratu 378 Arjosari Blimbing, Kota Malang; | 34,00 | 242.950.000,00 | Block Grant | - | 54 RT dan 5 RW | 242.950.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 072 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Polowijen | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jalan A Yani Utara No.2a Malang, Kota Malang; | 38,00 | 272.700.000,00 | Block Grant | - | 38,00 | 302.500.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 074 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Purwodadi | Jumlah RT/RW terfasilitasi | JLN. A . Yani 148 Malang, Kota Malang; | 108,00 | 663.600.000,00 | Block Grant | - | 108,00 | 663.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 075 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Pandanwangi | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6A Malang, Kota Malang; | 137,00 | 934.800.000,00 | Block Grant | - | 139 RT dan 14 RW | 934.800.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 071 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Blimbing | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Blimbing, Jl Tenaga Utara No 1 Malang, Kota Malang; | 780,00 | 411.275.000,00 | Block Grant | - | 55 RT DAN 10 RW | 409.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 076 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Purwantoro | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 157,00 | 1.114.800.000,00 | Block Grant | - | 157 RT dan 24 RW | 1.114.800.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 077 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bunulrejo | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 147,00 | 1.038.000.000,00 | Block Grant | - | 157 RT dan 24 RW | 1.038.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 002 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 15.400.000,00 | Block Grant | - | 3 kegiatan | 11.495.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 078 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kesatrian | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 82,00 | 507.400.000,00 | Block Grant | - | 82 RT/RW | 510.046.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 079 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Polehan | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 74,00 | 508.920.000,00 | Block Grant | - | 74,00 | 559.812.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 080 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Jodipan | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 93,00 | 575.828.500,00 | Block Grant | - | 93 Orang | 575.828.500,00 |
| 4 | 06 | 22 | 137 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Balearjosari | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jalan Raya Balearjosari No.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 kali | 310.550.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kali | 400.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 129 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Arjosari | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kantor Kelurahan Arjosari Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No. 378, Kota Malang; | 12,00 kali | 233.490.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kali | 303.215.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 173 | Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan Kecamatan | Jumlah dokumen informasi pembangunan | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 35.300.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 38.830.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 176 | Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | Jumlah Patroli yang dilaksanakan | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 48,00 Kali | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 2 kegiatan | 65.560.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 128 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Polowijen | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jalan A Yani Utara No.2a Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 333.884.000,00 | Block Grant | - | Nilai SAKIP Kecamatan Blimbing - 80 | 376.400.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 130 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Purwodadi | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | JLN .A. Yani 148 Malang, Kota Malang; | 12,00 kali | 255.378.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kali | 300.545.500,00 |
| 4 | 06 | 22 | 131 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Pandanwangi | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6A Malang, Kota Malang; | 12,00 kali | 280.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kali | 360.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 127 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Blimbing | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Tenaga Utara No 1 Kelurahan Blimbing , Kota Malang; | 12,00 kali | 316.559.000,00 | Block Grant | - | 22 Kegiatan | 400.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 132 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Purwanto | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | kota malang, Kota Malang; | 12,00 kali | 345.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kali | 345.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 133 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bunulrejo | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 12,00 kali | 284.687.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kali | 370.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 134 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kesatrian | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 kali | 234.527.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kali | 370.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 135 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Polehan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 12,00 kali | 235.412.500,00 | Block Grant | - | 12,00 kali | 258.953.750,00 |
| 4 | 06 | 22 | 136 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Jodipan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 254.748.500,00 | Block Grant | - | 12,00 kali | 254.748.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 177 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Balearjosari | Jumlah patroli | Jlan Raya balearjosari No.9Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 144,00 Patroli | 21.300.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 23.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 178 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Arjosari | Jumlah patroli | Kelurahan Arjosari Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No. 378 Arjosari Blimbing, Kota Malang; | 114,00 patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 179 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Polowijen | Jumlah patroli | Jalan A Yani Utara No.2a Malang, Kota Malang; | 144,00 patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 29.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 180 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Purwodadi | Jumlah patroli | jln . A. Yani 148 Malang, Kota Malang; | 114,00 patroli | 30.064.900,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 30.064.900,00 |
| 4 | 06 | 22 | 181 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Pandanwangi | Jumlah patroli | Jl. Simpang Teluk Grajakan No.6 A Malang, Kota Malang; | 114,00 patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 182 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Blimbing | Jumlah patroli | Jl Tenaga Utara no 1 Malang , Kota Malang; | 114,00 patroli | 22.100.000,00 | Block Grant | - | 144 kali | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 183 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Purwantoro | Jumlah patroli | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 114,00 patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 184 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Bunulrejo | Jumlah patroli | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 114,00 patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 185 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Kesatrian | Jumlah patroli | Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 114,00 patroli | 0,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 186 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Polehan | Jumlah patroli | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 114,00 patroli | 22.250.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 187 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Jodipan | Jumlah patroli | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 144,00 patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | | Program Pemberdayaan Masyarakat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | 4,26 | 7.853.956.350,00 | | - | | 9.538.354.848,00 |
| 4 | 06 | 16 | 002 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 12,00 lembaga | 14.200.000,00 | Block Grant | - | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 18.810.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 003 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 41.300.000,00 | Block Grant | - | 6 Kegiatan | 45.430.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 004 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang | Jalan Raden Intan Kav. 14, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 26.475.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen | 28.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 006 | Penyusunan Profil Kecamatan | Jumlah dokumen profil | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 2.450.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen | 2.694.998,00 |
| 4 | 06 | 16 | 001 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 24,00 Patroli | 27.300.000,00 | Block Grant | - | 24 Patroli | 81.840.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 028 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Balearjosari | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jalan Raya Balearjosari No.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 20,00 kegiatan | 6.615.000,00 | Block Grant | - | 20,00 kegiatan | 10.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 020 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Arjosari | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Kelurahan Arjosari Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No. 378 Arjosari Blimbing, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 18.250.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 18.250.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 019 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Polowijen | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jalan A. Yani Utara 2a Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 10.400.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 29.700.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 021 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Purwodadi | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | JLN.A. Yani 148 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 9.370.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 9.370.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 022 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Pandanwangi | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6 A Malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 24.500.000,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 28.400.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 018 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Blimbing | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Tenaga Utara No 1 Malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 22.550.000,00 | Block Grant | - | 4 kegiatan | 350.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 023 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Purwantoro | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 9.157.500,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 9.157.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 024 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bunulrejo | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 2.250.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 9.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 025 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kesatrian | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | JL. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 80,00 kegiatan | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 80,00 kegiatan | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 026 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Polehan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 14.455.000,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 16.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 027 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Jodipan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 3.850.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 3.850.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 085 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Balarjosari | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jalan Raya Balarjosari NO.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 lembaga | 12.800.000,00 | Block Grant | - | 4,00 lembaga | 30.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 077 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ariosari | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kelurahan Arjosari, Kota Malang; | 2,00 lembaga | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 lembaga | 43.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 076 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polowijen | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jalan A. Yani Utara 2a Malang, Kota Malang; | 1,00 lembaga | 14.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 lembaga | 74.800.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 078 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Purwodadi | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | JLN. A. Yani 148 Malang, Kota Malang; | 4,00 lembaga | 12.000.500,00 | Block Grant | - | 4,00 lembaga | 32.579.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 079 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pandanwangi | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6 A Malang, Kota Malang; | 3,00 lembaga | 36.000.000,00 | Block Grant | - | 3,00 lembaga | 50.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 075 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Blimbing | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kelurahan Blimbing Jl. Tenaga Baru No 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 lembaga | 24.400.000,00 | Block Grant | - | 10 lembaga | 53.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 080 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Purwantoro | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 3,00 lembaga | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 2 kegiatan | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 081 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bunulrejo | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 3,00 lembaga | 3.650.000,00 | Block Grant | - | 3,00 lembaga | 65.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 082 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kesatrian | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 8,00 lembaga | 0,00 | Block Grant | - | 8,00 lembaga | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 083 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polehan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 4,00 lembaga | 5.452.500,00 | Block Grant | - | 4,00 lembaga | 5.997.750,00 |
| 4 | 06 | 16 | 084 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Jodipan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 1,00 lembaga | 2.400.000,00 | Block Grant | - | 1,00 lembaga | 2.400.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 199 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Balearjosari | Jumlah kegiatan | Jalan Raya Balearjosari No.9Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 23.340.000,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 50.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 191 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Arjosari | Jumlah kegiatan | Kelurahan Arjosari, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 57.750.000,00 | Block Grant | - | 4,00 kegiatan | 57.750.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 190 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Polowijen | Jumlah kegiatan | Jalan A. Yani Utara 2a Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 8.500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 88.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 193 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Pandanwangi | Jumlah kegiatan | Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6A Malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 50.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 189 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Blimbing | Jumlah kegiatan | Kelurahan Blimbing Jl. Tenaga Utara No 1 malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 4.680.000,00 | Block Grant | - | 3 Kegiatan | 44.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 194 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Purwantoro | Jumlah kegiatan | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 8.000.000,00 | Block Grant | - | 6,00 kegiatan | 8.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 195 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bunulrejo | Jumlah kegiatan | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 23.350.000,00 | Block Grant | - | 5,00 kegiatan | 60.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 142 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Balarjosari | Jumlah kegiatan | Jalan Raya Balarjosari No.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 38.495.000,00 | Block Grant | - | 5,00 kegiatan | 60.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 134 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ariosari | Jumlah kegiatan | Kelurahan Arjosari, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 40.000.000,00 | Block Grant | - | 5,00 kegiatan | 79.120.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 133 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polowijen | Jumlah kegiatan | Jalan A. Yani Utara 2a Malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 58.600.000,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 88.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 135 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Purwodadi | Jumlah kegiatan | jln. A. Yani 148 Malang, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 10.363.000,00 | Block Grant | - | 6,00 kegiatan | 70.363.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 136 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pandanwangi | Jumlah kegiatan | Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6 A Malang, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 60.000.000,00 | Block Grant | - | 4,00 kegiatan | 60.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 132 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Blimbing | Jumlah kegiatan | Kelurahan Blimbing Jl. Tenaga Utara No 1 Malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 35.322.250,00 | Block Grant | - | 7 Kegiatan | 50.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 137 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Purwantoro | Jumlah kegiatan | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 38.500.000,00 | Block Grant | - | 4 kegiatan | 38.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 138 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bunulreio | Jumlah kegiatan | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 22.650.000,00 | Block Grant | - | 5,00 kegiatan | 65.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 139 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kesatrian | Jumlah kegiatan | JL. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 44.680.000,00 | Block Grant | - | 6,00 kegiatan | 75.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 140 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polehan | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 21.400.000,00 | Block Grant | - | 4,00 kegiatan | 72.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 141 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Jodipan | Jumlah kegiatan | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 36.500.000,00 | Block Grant | - | 4,00 kegiatan | 36.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 256 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Balarjosari | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jalan Raya Balarjosari No.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 9.030.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 248 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Arjosari | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Arjosari, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 14.950.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 14.950.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 247 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Polowijen | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jalan A. Yani Utara 2a Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 18.700.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 249 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Purwodadi | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | JLN. A.Yani 148 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 27.865.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 27.865.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 250 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Pandanwangi | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Simpang Teluk grajakan Nomor 6 A Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 246 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Blimbing | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Blimbing, Jl. Tenaga Utara No 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 12.450.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 251 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Purwantoro | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 25.527.500,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 25.527.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 252 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bunulrejo | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 6.500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 14.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 253 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kesatrian | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 15.300.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 254 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Polehan | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 14.500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 15.950.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 255 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Jodipan | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 15.810.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 15.810.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 313 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Balearjosari | Jumlah kegiatan | Jalan Raya Balearjosari No.9 Kcamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 7.795.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 10.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 305 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Arjosari | Jumlah kegiatan | Kelurahan Arjosari, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 69.350.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 304 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Polowijen | Jumlah kegiatan | Jalan A. Yani Utara 2a Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 12.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 62.450.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 306 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Purwodadi | Jumlah kegiatan | JLN. A .Yani 148 Malang, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 13.220.000,00 | Block Grant | - | 4,00 kegiatan | 43.520.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 307 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Pandanwangi | Jumlah kegiatan | Jl. Simpang Teluk Grajakan Nomor 6 A Malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 3,00 kegiatan | 75.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 303 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Blimbing | Jumlah kegiatan | Kelurahan Blimbing, Jl. Tenaga Utara No 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 8.350.000,00 | Block Grant | - | 6 kegiatan | 41.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 308 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Purwantoro | Jumlah kegiatan | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 23.000.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 23.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 309 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Bunulrejo | Jumlah kegiatan | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 14.700.000,00 | Block Grant | - | 4,00 kegiatan | 50.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 310 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kesatrian | Jumlah kegiatan | Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 28.800.000,00 | Block Grant | - | 3,00 kegiatan | 60.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 311 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Polehan | Jumlah kegiatan | Jl. raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 3.600.000,00 | Block Grant | - | 4,00 kegiatan | 3.960.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 312 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Jodipan | Jumlah kegiatan | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 11.480.000,00 | Block Grant | - | 3,00 kegiatan | 11.480.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 370 | Penyusunan Profil Kelurahan Balarjosari | Jumlah dokumen profil | Jalan Raya Balarjosari No.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 6.375.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 10.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 362 | Penyusunan Profil Kelurahan Arjosari | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Arjosari, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 250.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 14.250.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 361 | Penyusunan Profil Kelurahan Polowijen | Jumlah dokumen profil | Jalan A. Yani Utara 2a Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 7.500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 16.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 363 | Penyusunan Profil Kelurahan Purwodadi | Jumlah dokumen profil | JLN. A. Yani 148 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 5.500.100,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 12.500.100,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 364 | Penyusunan Profil Kelurahan Pandanwangi | Jumlah dokumen profil | Jl. Simpang Teluk Grajakan Nomor 6 A Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 360 | Penyusunan Profil Kelurahan Blimbing | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Blimbing, Jl. Tenaga Utara No 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 7.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 10.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 365 | Penyusunan Profil Kelurahan Purwantoro | Jumlah dokumen profil | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 10.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 366 | Penyusunan Profil Kelurahan Bunulrejo | Jumlah dokumen profil | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 11.050.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 35.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 367 | Penyusunan Profil Kelurahan Kesatrian | Jumlah dokumen profil | JL. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 0,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 30.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 368 | Penyusunan Profil Kelurahan Polehan | Jumlah dokumen profil | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 500.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 550.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 369 | Penyusunan Profil Kelurahan Jodipan | Jumlah dokumen profil | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.900.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 1.900.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 427 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Balarjosari | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jalan Raya Balarjosari No.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 13,00 Orang | 43.150.000,00 | Block Grant | - | 13,00 Orang | 45.035.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 419 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Arjosari | Jumlah modin dan perawat jenazah | Kelurahan Arjosari, Kota Malang; | 9,00 Orang | 32.150.000,00 | Block Grant | - | 9,00 Orang | 32.150.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 418 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Polowijen | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jalan A. Yani Utara 2a Malang, Kota Malang; | 15,00 Orang | 50.900.000,00 | Block Grant | - | 15,00 Orang | 56.100.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 420 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Purwodadi | Jumlah modin dan perawat jenazah | JLN. A. Yani 148 Malang, Kota Malang; | 30,00 Orang | 99.000.000,00 | Block Grant | - | 30,00 Orang | 99.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 421 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Pandanwangi | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Simpang Teluk Grajakan Nomor 6 A Malang, Kota Malang; | 28,00 Orang | 99.000.000,00 | Block Grant | - | 28,00 Orang | 99.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 417 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Blimbing | Jumlah modin dan perawat jenazah | Kelurahan Blimbing, Jl Tenaga Utara No 1 Malang, Kota Malang; | 19,00 Orang | 64.775.000,00 | Block Grant | - | 19 ORANG | 64.775.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 422 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Purwantoro | Jumlah modin dan perawat jenazah | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 62,00 Orang | 217.800.000,00 | Block Grant | - | 66 orang | 217.800.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 423 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bunulrejo | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 41,00 Orang | 138.300.000,00 | Block Grant | - | 41,00 Orang | 138.300.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 424 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kesatrian | Jumlah modin dan perawat jenazah | JL. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 26,00 Orang | 88.150.000,00 | Block Grant | - | 26,00 Orang | 90.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 425 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Polehan | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 14,00 Orang | 46.200.000,00 | Block Grant | - | 14,00 Orang | 50.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 484 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Balarjosari | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jalann Raya Balarjosari N.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 38,00 Orang | 125.650.000,00 | Block Grant | - | 38,00 Orang | 130.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 476 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Arjosari | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kelurahan Arjosari, Kota Malang; | 27,00 Orang | 98.570.000,00 | Block Grant | - | 27,00 Orang | 98.570.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 475 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Polowijen | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jalan A. Yani Utara 2a Malang, Kota Malang; | 25,00 Orang | 87.200.000,00 | Block Grant | - | 25,00 Orang | 103.400.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 477 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Purwodadi | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | jln.A Yani . 148 Malang, Kota Malang; | 54,00 Orang | 178.200.000,00 | Block Grant | - | 54,00 Orang | 178.200.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 478 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Pandanwangi | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Simpang Teluk Grajakan Nomor 6 A Malang, Kota Malang; | 46,00 Orang | 188.100.000,00 | Block Grant | - | 46,00 Orang | 188.100.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 474 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Blimbing | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kelurahan Blimbing, Jl Tenaga Utara No 1 Malang, Kota Malang; | 53,00 Orang | 176.150.000,00 | Block Grant | - | 47 ORANG | 160.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 479 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Purwantoro | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 68,00 Orang | 231.000.000,00 | Block Grant | - | 61 Penjaga Tempat Ibadah dan 9 Penjaga Makam | 231.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 480 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bunulrejo | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 51,00 Orang | 168.000.000,00 | Block Grant | - | 51,00 Orang | 168.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 481 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kesatrian | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | JL. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 21,00 Orang | 71.600.000,00 | Block Grant | - | 21,00 Orang | 75.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 482 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Polehan | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 23,00 Orang | 135.300.000,00 | Block Grant | - | 23,00 Orang | 140.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 483 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Jodipan | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 43,00 Orang | 146.403.500,00 | Block Grant | - | 43,00 Orang | 146.403.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 541 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Balarjosari | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jalan Raya Balarjosari No.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 77,00 Orang | 254.350.000,00 | Block Grant | - | 77,00 Orang | 260.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 533 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Arjosari | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Arjosari, Kota Malang; | 99,00 Orang | 352.710.000,00 | Block Grant | - | 99,00 Orang | 352.710.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 426 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Jodipan | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 24,00 Orang | 82.288.000,00 | Block Grant | - | 24,00 Orang | 82.288.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 532 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Polowijen | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jalan A. Yani Utara 2a Malang, Kota Malang; | 53,00 Orang | 179.600.000,00 | Block Grant | - | 53,00 Orang | 212.300.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 534 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Purwodadi | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | jl. A Yani 148 Malang, Kota Malang; | 103,00 Orang | 339.900.000,00 | Block Grant | - | 103,00 Orang | 339.900.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 535 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Pandanwangi | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Simpang Teluk Grajakan Nomor 6 A Malang, Kota Malang; | 155,00 Orang | 584.100.000,00 | Block Grant | - | 155,00 Orang | 584.100.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 531 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Blimbing | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Blimbing, Jl Tenaga Utara No 1 malang, Kota Malang; | 61,00 Orang | 179.525.000,00 | Block Grant | - | 53 ORANG | 180.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 536 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Purwantoro | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 180,00 Orang | 534.600.000,00 | Block Grant | - | 162 Guru Ngaji | 534.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 537 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bunulrejo | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 118,00 Orang | 392.400.000,00 | Block Grant | - | 118,00 Orang | 392.400.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 538 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kesatrian | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | JL. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 84,00 Orang | 280.800.000,00 | Block Grant | - | 84,00 Orang | 290.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 539 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Polehan | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 81,00 Orang | 489.720.000,00 | Block Grant | - | 81,00 Orang | 538.692.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 540 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Jodipan | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 97,00 Orang | 327.656.500,00 | Block Grant | - | 97,00 Orang | 327.656.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 198 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Jodipan | Jumlah kegiatan | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 1.200.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 1.200.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 197 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Polehan | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 2.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 2.200.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik | Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kewilayahan | | 400,00 % | 2.738.918.250,00 | | - | | 4.220.233.500,00 |
| 4 | 06 | 17 | 001 | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 23.600.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen, 11 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi | 25.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 17 | 024 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Balearjosari | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jalan Raa Balearjosari No.9 Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang; | 14,00 kegiatan | 190.460.000,00 | Block Grant | - | 14,00 kegiatan | 400.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 015 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polowijen | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jalan A Yani Utara No.2a Malang, Kota Malang; | 11,00 kegiatan | 215.000.000,00 | Block Grant | - | 11,00 kegiatan | 280.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 016 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Arjosari | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Arjosari, Kota Malang; | 10,00 kegiatan | 150.000.000,00 | Block Grant | - | 10,00 kegiatan | 217.235.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 017 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Purwodadi | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | JLN. A.Yani 148 Malang, Kota Malang; | 15,00 kegiatan | 249.668.500,00 | Block Grant | - | 15,00 kegiatan | 468.377.500,00 |
| 4 | 06 | 17 | 018 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Pandanwangi | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Simpang Teluk Grajakan Nomor 6 A Malang, Kota Malang; | 25,00 kegiatan | 217.881.000,00 | Block Grant | - | 25,00 kegiatan | 565.023.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 014 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Blimbing | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | RW 01 - RW 10 KELURAHAN BLIMBING, Kota Malang; | 11,00 kegiatan | 231.155.750,00 | Block Grant | - | 16 Paket | 350.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 019 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Purwantoro | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Pemerintah kota malang, Kota Malang; | 22,00 kegiatan | 238.436.000,00 | Block Grant | - | 24 kegiatan | 238.436.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 020 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bunulrejo | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Hamid Rusdi No.91 Malang, Kota Malang; | 21,00 kegiatan | 346.550.000,00 | Block Grant | - | 21,00 kegiatan | 570.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 021 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kesatrian | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 395.700.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 420.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 022 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polehan | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Raya Puntodewo 29, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 313.330.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 510.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 17 | 023 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Jodipan | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Jodipan Wetan No. 11 Malang, Kota Malang; | 14,00 kegiatan | 162.137.000,00 | Block Grant | - | 14,00 kegiatan | 162.137.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 002 | Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpas) | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 1 | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 1 Buku, 12 Peta | 14.025.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 1.000.564.000,00 | | - | | 1.108.806.718,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 1.000.564.000,00 | | - | | 1.108.806.718,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 1.000.564.000,00 | | - | | 1.108.806.718,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Kecamatan Blimbing, Kota Malang; | 1.700,00 Surat | 3.050.000,00 | Block Grant | - | 9 Kendaraan Dinas Roda 2 dan 2 Kendaraan Dinas Roda 4 | 3.355.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | | 6,00 gedung | 84.000.000,00 | Block Grant | - | 6 Gedung, 12 Bulan | 114.323.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 3,00 Jenis | 57.717.000,00 | Block Grant | - | 3 Jenis | 63.851.700,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jalan Rafen Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 63,00 Jenis | 60.958.000,00 | Block Grant | - | 63 Jenis | 60.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 2,00 Jenis | 4.800.000,00 | Block Grant | - | 2 Jenis | 5.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 4,00 Jenis | 5.480.000,00 | Block Grant | - | 4 Jenis | 6.028.003,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 5,00 Kali | 54.900.000,00 | Block Grant | - | 12 Kali Dalam Daerah, 3 Kali Luar Daerah | 60.000.009,00 |
| 5 | 01 | 07 | 045 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 2,00 Orang | 57.600.000,00 | Block Grant | - | 2 Orang, 12 Bulan | 77.660.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 2,00 Jenis | 30.650.000,00 | Block Grant | - | 2 Jenis | 33.440.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 9,00 Unit | 69.400.000,00 | Block Grant | - | 2 unit mobil, 9 unit Sepeda Motor | 109.340.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Jalan Raden Intan Kav. 14, Kota Malang; | 5,00 Jenis | 74.000.000,00 | Block Grant | - | 624 M2 | 13.959.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 71.150.000,00 | Block Grant | - | 25 ASN Kecamatan Blimbing | 78.265.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 1,00 eksemplar | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen | 2.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 76.920.000,00 | Block Grant | - | 2 laporan | 80.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 500.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 810.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 009 | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 500.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen | 1.248.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.224.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 1.224.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 16.900.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 18.590.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 37.475.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen | 40.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 5,00 Jenis | 150.800.000,00 | Block Grant | - | 2300 Nasi Kotak, 2300 Kotak Snack, 900 Paket Prasmanan, 100 Galon Air Mineral, 12 Nampan Kue, 50 Permen, 60 Toples Kue Kering | 218.125.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jalan Raden Intan Kav 14, Kota Malang; | 5,00 Jenis | 6.050.000,00 | Block Grant | - | 5 jenis | 6.050.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 095 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jalan Raden Intan Kav, 14 Malang, Kota Malang; | 9,00 Jenis | 93.990.000,00 | Block Grant | - | 4 Jenis | 74.038.006,00 |
| | | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | 80,00 % | | | - | | |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 41.500.000,00 | Block Grant | - | 12 Bulan | 41.500.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Kedungkandang

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 25.474.338.000,00 | | | | 55.792.858.793,37 |
| 4 | | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 24.224.391.150,00 | | | | 28.931.309.610,00 |
| 4 | 06 | | | Pemerintahan Administrasi Kecamatan | | | | 24.224.391.150,00 | | | | 28.931.309.610,00 |
| 4 | 06 | 22 | | Program Pemerintahan Umum | IKM Perangkat Daerah | | 80,20 % | 10.206.918.050,00 | | | | 12.545.826.600,00 |
| 4 | 06 | 22 | 001 | Penyusunan Data Monografi Kecamatan | Jumlah dokumen monografi | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 1,00 Jenis | 942.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 1.036.200,00 |
| 4 | 06 | 22 | 002 | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 45.654.750,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 50.655.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 035 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Arjowinangun | Jumlah dokumen monografi | Jl. Raya Arjowinangun No.1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 5.550.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 5.550.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 092 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Arjowinangun | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 456.000.000,00 | Block Grant | - | 74 Orang | 456.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 148 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Arjowinangun | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 344.195.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 344.195.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 028 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bumiayu | Jumlah dokumen monografi | Jl. Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 5.500.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 141 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bumiayu | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl.Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 10,00 kegiatan | 201.466.000,00 | Block Grant | - | 10,00 kegiatan | 380.606.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 085 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bumiayu | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl.Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 70,00 Orang | 428.360.000,00 | Block Grant | - | 70,00 Orang | 449.778.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 087 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Buring | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Puncak Buring Indah No. 1 Malang, Kota Malang; | 58,00 | 359.450.000,00 | Block Grant | - | 58,00 | 365.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 143 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Buring | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Puncak Buring Indah No. 1 Malang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 240.712.500,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 400.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 034 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Cemorokandang | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Cemorokandang - Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 buku | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 buku | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 091 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Cemorokandang | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 76,00 | 457.200.000,00 | Block Grant | - | 76,00 | 457.200.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 147 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Cemorokandang | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Cemorokandang - Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 20,00 kegiatan | 326.893.700,00 | Block Grant | - | 20,00 kegiatan | 326.893.700,00 |
| 4 | 06 | 22 | 082 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kedungkandang | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Ki Ageng Gribig 12 Malang, Kota Malang; | 60,00 | 368.400.000,00 | Block Grant | Jumlah RW 7 orang dan RT 53 orang | 64 orang | 420.895.200,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 138 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kedungkandang | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Ki Ageng Gribig No. 12 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 179.714.600,00 | Block Grant | Operasional kantor kelurahan selama 12 bulan dengan konsolidasi pengadaan ATK dan Mamin | 12 bulan | 330.691.800,00 |
| 4 | 06 | 22 | 139 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kotalama | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl.Kebalen Wetan No.5 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 350.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 350.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 026 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kotalama | Jumlah dokumen monografi | Jl.Kebalen Wetan no.5 Malang, Kota Malang; | 4,00 Dokumen | 2.000.000,00 | Block Grant | - | 4,00 Dokumen | 2.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 083 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kotalama | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl.Kebalen Wetan no.5 Malang, Kota Malang; | 152,00 | 926.200.000,00 | Block Grant | - | 152,00 | 926.200.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 031 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lesanpuro | Jumlah dokumen monografi | Jl. Ki Ageng Gribig No 3 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 2.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 Dokumen | 3.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 088 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Lesanpuro | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Ki Ageng gribig no.3 Malang, Kota Malang; | 105,00 | 644.200.000,00 | Block Grant | - | 105,00 | 655.200.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 144 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Lesanpuro | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Ki Ageng Gribig no 3 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 284.071.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 450.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 033 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Madyopuro | Jumlah dokumen monografi | Jl. Raya Madyopuro no. 40 Malang, Kota Malang; | 1,00 buku | 8.602.000,00 | Block Grant | - | 1,00 buku | 8.602.500,00 |
| 4 | 06 | 22 | 090 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Madyopuro | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Raya Madyopuro no. 40 Malang, Kota Malang; | 80 | 933.600.000,00 | Block Grant | - | 80 | 933.600.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 146 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Madyopuro | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Raya Madyopuro no. 40 Malang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 325.983.500,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 325.983.500,00 |
| 4 | 06 | 22 | 027 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mergosono | Jumlah dokumen monografi | KELURAHAN MERGOSONO- JL. KOL. SUGIONO V/ 732, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 3 DOKUMEN | 550.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 084 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Mergosono | Jumlah RT/RW terfasilitasi | KELURAHAN MERGOSONO- JL. KOL. SUGIONO V/ 372, Kota Malang; | 83,00 | 507.000.000,00 | Block Grant | - | 83 ORANG | 550.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 140 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mergosono | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | KELURAHAN MERGOSONO- JL. KOL. SUGIONO V/ 372, Kota Malang; | 1,00 Tahun | 206.687.000,00 | Block Grant | - | 12 BULAN | 450.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 032 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sawojajar | Jumlah dokumen monografi | Jl. Raya Sawojajar 45 Malang, Kota Malang; | 1,00 buku | 500.000,00 | Block Grant | Dilaksanakan secara swakelola | 1,00 buku | 5.500.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 089 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Sawojajar | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Sawojajar Jl. Raya Sawojajar No 45, Kota Malang; | 140,00 Orang | 847.200.000,00 | Block Grant | Dilaksanakan Swakelola | 120 RT dan 16 RW | 859.250.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 145 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sawojajar | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Sawojajar Jl. Raya Sawojajar 45, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 246.422.000,00 | Block Grant | Dilaksanakan secara swakelola | 12 Bulan | 426.175.200,00 |
| 4 | 06 | 22 | 036 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogowaru | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Tlogowaru - Jl. Raya Tlogowaru 119 Malang, Kota Malang; | 3,00 Dokumen | 500.000,00 | Block Grant | - | 3 dokumen | 5.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 093 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tlogowaru | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Tlogowaru - Jl. Raya Tlogowaru 119 Malang, Kota Malang; | 36,00 Orang | 281.100.000,00 | Block Grant | - | 36 orang | 279.600.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 149 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tlogowaru | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Tlogowaru - Jl. Raya Tlogowaru 119 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 287.702.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 475.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 029 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Wonokoyo | Jumlah dokumen monografi | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 2.500.000,00 | Block Grant | - | Data yang akurat | 300.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 086 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Wonokoyo | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 42 orang | 260.400.000,00 | Block Grant | - | 42 orang | 260.400.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 142 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Wonokoyo | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 282.247.000,00 | Block Grant | -- | 12,00 kegiatan | 300.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 212 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Kedungkandang | Jumlah Patroli | Jl. Ki Ageng Gribig No. 12 Malang, Kota Malang; | 12,00 Patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | 3 orang petugas x 4 kegiatan/bulan x 12 bulan | 144 kali | 25.920.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 213 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Kotalama | Jumlah Patroli | Jl. Kebalen Wetan No.5 Malang, Kota Malang; | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 214 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Mergosono | Jumlah Patroli | Jalan Kolonel Sugiono Gg.V No. 372 , Kota Malang; | 12,00 Patroli | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 217 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Buring | Jumlah Patroli | Jl. Puncak Buring Indah No. 1 Malang, Kota Malang; | 144,00 Patroli | 22.270.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 218 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Lesanpuro | Jumlah Patroli | Jl. Ki Ageng Gribig No.3 Malang, Kota Malang; | 12,00 Patroli | 22.400.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 22.400.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 219 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Sawojajar | Jumlah Patroli | Kelurahan Sawojajar, Kota Malang; | 36,00 Patroli | 16.200.000,00 | Block Grant | Kegiatan monitoring dan patroli wilayah | 36 kali monitoring | 16.200.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 221 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Cemorokandang | Jumlah Patroli | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 48,00 Patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 48,00 Patroli | 21.600.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 222 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Arjowinangun | Jumlah Patroli | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 48,00 Patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 48,00 Patroli | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 223 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Tlogowaru | Jumlah Patroli | Kelurahan Tlogowaru Jl.Raya Tlogowaru No 119, Kota Malang; | 36,00 Patroli | 16.200.000,00 | Block Grant | - | 36,00 Patroli | 16.200.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 173 | Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan Kecamatan | Jumlah dokumen informasi pembangunan | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 1,00 buku | 19.850.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 21.835.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 176 | Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | Jumlah Patroli yang dilaksanakan | Kecamatan Kedungkandang - Jl.Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 198.145.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 217.959.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | | Program Pemberdayaan Masyarakat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | 0,00 | 10.366.291.600,00 | | | | 11.373.065.265,00 |
| 4 | 06 | 16 | 032 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bumiayu | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl.Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 70,00 Orang | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 70,00 Orang | 22.680.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 146 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bumiayu | Jumlah kegiatan | Jl. Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 1,00 Tahun | 25.200.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Tahun | 87.780.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 260 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bumiayu | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 12.600.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 13.230.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 374 | Penyusunan Profil Kelurahan Bumiayu | Jumlah dokumen profil | Jl. Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 12.600.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 23.625.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 317 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Bumiayu | Jumlah kegiatan | Jl. Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 1 kali | 12.600.000,00 | Block Grant | - | 1 kali | 18.099.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 431 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bumiayu | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 17,00 Orang | 57.950.000,00 | Block Grant | - | 17,00 Orang | 67.777.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 488 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bumiayu | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 94,00 Orang | 315.560.000,00 | Block Grant | - | 94,00 Orang | 338.268.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 545 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bumiayu | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 185,00 Orang | 611.820.000,00 | Block Grant | - | 185,00 Orang | 649.341.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 087 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kotalama | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl.KebalenWetan No.5 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 144 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kotalama | Jumlah kegiatan | Jl.Kebalen Wetan no.5 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 30.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 30.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 258 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kotalama | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl.Kebalen Wetan Nomor 5 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 10.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 372 | Penyusunan Profil Kelurahan Kotalama | Jumlah dokumen profil | Jl.Kebalen Wetan No.5 Malang, Kota Malang; | 1,00 dokumen | 500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 dokumen | 500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 030 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kotalama | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl.Kebalen wetan No.5 Malang, Kota Malang; | 1,00 Bulan | 3.400.000,00 | Block Grant | - | 1 giat | 3.400.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 429 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kotalama | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl.Kebalen Wetan No.5 Malang, Kota Malang; | 21,00 | 70.300.000,00 | Block Grant | - | 21 Orang | 70.300.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 486 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kotalama | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl.Kebalen Wetan No.5 Malang, Kota Malang; | 50,00 | 166.000.000,00 | Block Grant | - | 50 Orang | 166.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 543 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kotalama | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl.Kebalen Wetan No.5 Malang, Kota Malang; | 249,00 | 822.700.000,00 | Block Grant | - | 249 Orang | 822.700.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 035 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Lesanpuro | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Ki Ageng Gribig No3 Malang, Kota Malang; | 48,00 | 4.500.000,00 | Block Grant | - | 48,00 | 30.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 092 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Lesanpuro | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Ki Ageng Gribig No 3 Malang, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 8.000.000,00 | Block Grant | - | 6,00 kegiatan | 60.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 149 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Lesanpuro | Jumlah kegiatan | Jl. Ki Ageng Giribig No.3 Malang, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 30.000.000,00 | Block Grant | - | 6,00 kegiatan | 30.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 206 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Lesanpuro | Jumlah kegiatan | Jl. Ki Ageng Gribig No. 3 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 7.500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 10.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 263 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Lesanpuro | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Ki ageng Gribig No.3 Malang, Kota Malang; | 1,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 320 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Lesanpuro | Jumlah kegiatan | Jl. Ki ageng Gribig No.3 Malang, Kota Malang; | 2,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 | 20.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 377 | Penyusunan Profil Kelurahan Lesanpuro | Jumlah dokumen profil | Jl. Ki ageng Gribig No.3 Malang, Kota Malang; | 1,00 buku | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 buku | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 434 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Lesanpuro | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Ki Ageng Gribig NO.3 Malang, Kota Malang; | 24,00 | 79.200.000,00 | Block Grant | - | 24,00 | 84.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 491 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Lesanpuro | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Ki Ageng Gribig No.3 Malang, Kota Malang; | 40,00 | 132.000.000,00 | Block Grant | - | 40,00 | 136.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 548 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Lesanpuro | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Ki Ageng Gribig No,3 Malang, Kota Malang; | 126,00 | 416.800.000,00 | Block Grant | - | 126,00 | 432.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 037 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Madyopuro | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Raya Madyopuro no. 40 Malang, Kota Malang; | 2,00 | 30.300.000,00 | Block Grant | - | 2,00 | 46.140.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 094 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Madyopuro | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Raya Madyopuro no. 40 Malang, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 18.600.000,00 | Block Grant | - | 5,00 kegiatan | 72.250.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 151 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Madyopuro | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Madyopuro No. 40 Malang, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 14.900.000,00 | Block Grant | - | 5,00 kegiatan | 54.091.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 208 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Madyopuro | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Madyopuro no. 40 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 19.375.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 265 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Madyopuro | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Raya Madyopuro no. 40 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 28.645.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 28.645.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 379 | Penyusunan Profil Kelurahan Madyopuro | Jumlah dokumen profil | Jl. Raya Madyopuro no. 40 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 45.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 436 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Madyopuro | Jumlah modin dan perawat jenasah | Jl. Raya Madyopurono. 40 Malang, Kota Malang; | 39,00 Orang | 128.700.000,00 | Block Grant | - | 39,00 Orang | 128.700.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 493 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Madyopuro | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Raya Madyopuro no. 40 Malang, Kota Malang; | 40,00 Orang | 178.200.000,00 | Block Grant | - | 40,00 Orang | 178.200.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 550 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Madyopuro | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Raya Madyopuro No. 40 Malang, Kota Malang; | 154,00 Orang | 468.600.000,00 | Block Grant | - | 154,00 Orang | 508.200.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 088 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mergosono | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | KELURAHAN MERGOSONO - JL.KOL.SUGIONO V /372, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 3 LEMBAGA | 55.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 202 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mergosono | Jumlah kegiatan | KELURAHAN MERGOSONO-JL. KOL.SUGIONO V /372, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 3 KEGIATAN | 55.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 145 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mergosono | Jumlah kegiatan | KEL.MERGOSONO-JL.OL.SUGIONO V/372, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 5 KEGIATAN | 100.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 259 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mergosono | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Mergosono-Jl. Kolonel Sugiono Gg.V / 372, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 4 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 373 | Penyusunan Profil Kelurahan Mergosono | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Mergosono-Jl. Kol.Sugiono Gg.V /372, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 4.000.000,00 | Block Grant | - | 2 Dokumen | 5.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 430 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Mergosono | Jumlah modin dan perawat jenasah | Jl.Kol Sugiono Gg V No.372 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 40.800.000,00 | Block Grant | - | 12 Orang | 50.600.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 487 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Mergosono | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kelurahan Mergosono - Jl.Kol.Sugiono Gg.V / 372, Kota Malang; | 12,00 | 120.000.000,00 | Block Grant | - | 32 Tempat Ibadah 6 Penjaga Makam | 166.200.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 544 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Mergosono | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Mergosono - Jl. Kolo.Sugiono Gg.V /372, Kota Malang; | 12,00 | 467.925.000,00 | Block Grant | - | 151 Guru Ngaji | 549.475.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 036 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sawojajar | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Kel Sawojajar Jl. Raya Sawojajar No 45, Kota Malang; | 6,00 | 16.900.000,00 | Block Grant | Dilaksanakan secara swakelolaa | 6 Kegiatan | 16.900.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 093 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sawojajar | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kel Sawojajar Jl. Raya Sawojajar No 45, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 17.500.000,00 | Block Grant | Dilaksanakan secara Swakelola | 4 Kegiatan | 54.433.800,00 |
| 4 | 06 | 16 | 150 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sawojajar | Jumlah kegiatan | Kel. Sawojajar Jl. Raya Sawojajar NO 45, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 30.000.000,00 | Block Grant | Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi | 6 Kegiatan | 57.793.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 207 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sawojajar | Jumlah kegiatan | Kel. Sawojajar Jl. Raya Sawojajar No 45, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 10.000.000,00 | Block Grant | Kegiatan bercorak budaya dan gotong rovonng | 1 Kegiatan | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 264 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sawojajar | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kel Sawojajar Jl. Raya Sawojajar No 45, Kota Malang; | 1,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | Pra Musren dan Musren | 1 Dokumen | 10.200.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 378 | Penyusunan Profil Kelurahan Sawojajar | Jumlah dokumen profil | Kel Sawojajar Jl Raya Sawojajar No 45, Kota Malang; | 1,00 buku | 800.000,00 | Block Grant | Pendataan dan Inputing Data | 1 Buku | 5.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 435 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Sawojajar | Jumlah modin dan perawat jenasah | Kel Sawojajar Jl. Raya Sawojajar No 45, Kota Malang; | 42,00 Orang | 138.600.000,00 | Block Grant | Pemberian Honorarium dan Pembinaan | 42 Orang | 143.300.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 492 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Sawojajar | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kel Sawojajar Jl. Raya Sawojajar No 45, Kota Malang; | 62,00 Orang | 208.450.000,00 | Block Grant | Pemberian Honor dan Pembinaan | 62 Orang | 217.400.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 549 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Sawojajar | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kel Sawojajar Jl. Raya Sawojajar No 45, Kota Malang; | 186,00 Orang | 623.900.000,00 | Block Grant | Pemberian Honorarium dan Pembinaan | 186 Orang | 623.900.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 040 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tlogowaru | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Kelurahan Tlogowaru - Jl. Raya Tlogowaru 119 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 20.640.000,00 | Block Grant | - | 1 kali | 8.800.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 097 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogowaru | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kelurahan Tlogowaru - Jl. Raya Tlogowaru 119 Malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 18.640.000,00 | Block Grant | - | 3 kelembagaan | 30.260.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 154 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogowaru | Jumlah kegiatan | Kelurahan Tlogowaru Jl.Raya Tlogowaru No 119, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 27.100.000,00 | Block Grant | - | 4 keg | 60.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 211 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tlogowaru | Jumlah kegiatan | Kelurahan Tlogowaru Jl.Raya Tlogowaru No 119, Kota Malang; | 2,00 buku | 11.620.000,00 | Block Grant | - | 2 keg | 39.550.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 268 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tlogowaru | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | kelurahan tlogowaru, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 8.280.000,00 | Block Grant | - | 4 dok | 15.680.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 325 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tlogowaru | Jumlah kegiatan | kel., Kota Malang; | 30,00 Titik | 12.510.000,00 | Block Grant | - | 1 keg | 12.510.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 382 | Penyusunan Profil Kelurahan Tlogowaru | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Tlogowaru Jl.Raya Tlogowaru No 119, Kota Malang; | 2,00 buku | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 439 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tlogowaru | Jumlah modin dan perawat jenazah | Kelurahan Tlogowaru Jl.Raya Tlogowaru No 119, Kota Malang; | 18,00 Orang | 62.906.000,00 | Block Grant | - | 18 orang | 62.906.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 496 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tlogowaru | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kelurahan Tlogowaru Jl.Raya Tlogowaru No 119, Kota Malang; | 46,00 Orang | 155.976.000,00 | Block Grant | - | 46 orang | 161.300.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 553 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tlogowaru | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Tlogowaru Jl.Raya Tlogowaru No 119, Kota Malang; | 18,00 Orang | 326.966.000,00 | Block Grant | - | 18,00 Orang | 62.906.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 033 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Wonokoyo | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 33.600.000,00 | Block Grant | - | 12 kegiatan | 33.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 090 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Wonokoyo | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 6,00 lembaga | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 6,00 lembaga | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 147 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Wonokoyo | Jumlah kegiatan | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 8,00 kegiatan | 75.000.000,00 | Block Grant | - | 8 kegiatan | 75.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 204 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Wonokoyo | Jumlah kegiatan | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 30.000.000,00 | Block Grant | - | 5,00 kegiatan | 30.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 261 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Wonokoyo | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Kaliari No.1 Malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 318 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Wonokoyo | Jumlah kegiatan | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 375 | Penyusunan Profil Kelurahan Wonokoyo | Jumlah dokumen profil | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 432 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Wonokoyo | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 13 orang | 47.900.000,00 | Block Grant | - | 13 orang | 47.900.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 489 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Wonokoyo | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 39 orang | 128.700.000,00 | Block Grant | - | 39 orang | 128.700.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 546 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Wonokoyo | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Kalisari No. Malang, Kota Malang; | 103 orang | 344.900.000,00 | Block Grant | - | 103 orang | 344.900.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 038 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Cemorokandang | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Kali | 12.950.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Kali | 12.950.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 095 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Cemorokandang | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 lembaga | 4.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 lembaga | 4.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 152 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Cemorokandang | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 36.162.500,00 | Block Grant | - | 3,00 kegiatan | 36.162.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 209 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Cemorokandang | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 9,00 kegiatan | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 9,00 kegiatan | 5.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 551 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Cemorokandang | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 93,00 Orang | 307.200.000,00 | Block Grant | - | 93,00 Orang | 307.200.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 266 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Cemorokandang | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 18.512.500,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 18.512.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 323 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Cemorokandang | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 72.880.300,00 | Block Grant | - | 6,00 kegiatan | 72.880.300,00 |
| 4 | 06 | 16 | 380 | Penyusunan Profil Kelurahan Cemorokandang | Jumlah dokumen profil | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.009.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 1.009.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 437 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Cemorokandang | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 22,00 Orang | 72.900.000,00 | Block Grant | - | 22,00 Orang | 72.900.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 494 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Cemorokandang | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 62,00 Orang | 204.900.000,00 | Block Grant | - | 62,00 Orang | 204.900.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 031 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mergosono | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Kelurahan Mergosono - Jl. Kol.Sugiono Gg.V /372, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 1 kali Sosialisasi | 40.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 034 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Buring | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Puncak Buring Indah No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 14.030.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 039 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Arjowinangun | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 10.250.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 10.250.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 091 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Buring | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Puncak Buring Indah No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 9.050.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 38.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 096 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Arjowinangun | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 9.120.000,00 | Block Grant | - | 6,00 kegiatan | 9.120.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 148 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Buring | Jumlah kegiatan | Jl. Puncak Buring Indah No. 1 Malang, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 100.000.000,00 | Block Grant | - | 4,00 kegiatan | 100.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 153 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Arjowinangun | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 5,00 kegiatan | 50.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 143 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kedungkandang | Jumlah kegiatan | Jl. Ki Ageng Gribig No. 12 Malang , Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 28.800.000,00 | Block Grant | 2 Kegiatan | 5 kegiatan | 91.250.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 086 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kedungkandang | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Ki Ageng Gribig 12 Malang, Kota Malang; | 0,00 lembaga | 0,00 | Block Grant | 2 Kegiatan | 2 kegiatan | 40.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 200 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kedungkandang | Jumlah kegiatan | Jl. Ki Ageng Gribig 12 Malang, Kota Malang; | 0,00 kegiatan | 0,00 | Block Grant | 1 Kegiatan | 1 kegiatan | 40.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 201 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kotalama | Jumlah kegiatan | Jl,Kebalen Wetan No.5 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 203 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bumiayu | Jumlah kegiatan | Jl. Kyai Parseh Jaya No.35 Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 50.400.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 132.300.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 210 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Arjowinangun | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Arjowinangun Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 2.300.000,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 2.300.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 257 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kedungkandang | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Ki Ageng gribig No. 12 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 11.862.000,00 | Block Grant | Musrenbangkel Tahun 2021 | 1 dokumen | 16.938.125,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 262 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Buring | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Puncak Buring Malang - Kelurahan Buring, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 14.806.500,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 16.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 267 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Arjowinangun | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Raya Arjowinangun NO. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 9.660.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 9.660.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 324 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Arjowinangun | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang , Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 5.750.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 5.750.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 371 | Penyusunan Profil Kelurahan Kedungkandang | Jumlah dokumen profil | Jl. Ki Ageng Gribig No. 12 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 8.800.000,00 | Block Grant | Entry Potensi dan Perkembangan wilayah serta update DDK | 1 dokumen | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 381 | Penyusunan Profil Kelurahan Arjowinangun | Jumlah dokumen profil | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 1.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 428 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kedungkandang | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Ki Ageng Gribig 12 Malang , Kota Malang; | 16,00 Orang | 55.526.000,00 | Block Grant | Jumlah Modin dan Perawat Jenazah 16 orang | 18 orang | 68.406.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 433 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Buring | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Puncak Buring Malang - Kelurahan Buring, Kota Malang; | 22,00 Orang | 73.100.000,00 | Block Grant | - | 22 Orang | 80.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 438 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Arjowinangun | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 24,00 Orang | 69.300.000,00 | Block Grant | - | 21 orang | 69.300.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 485 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kedungkandang | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Ki Ageng Gribig No. 12 Malang, Kota Malang; | 28,00 Orang | 96.336.000,00 | Block Grant | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam 28 orang | 30 orang | 113.326.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 490 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Buring | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Puncak Buring Malang - Kelurahan Buring, Kota Malang; | 79,00 Orang | 261.200.000,00 | Block Grant | - | 79 Orang | 265.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 495 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Arjowinangun | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 54,00 Orang | 165.000.000,00 | Block Grant | - | 50 orang | 165.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 542 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kedungkandang | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. KI Ageng Gribig No. 12 Malang, Kota Malang; | 154,00 Orang | 525.717.400,00 | Block Grant | Jumlah Guru Ngaji dan sekolah minggu 154 orang | 158 orang | 563.668.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 547 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Buring | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Puncak Buring Malang - Kelurahan Buring, Kota Malang; | 152,00 Orang | 502.300.000,00 | Block Grant | - | 152 Orang | 510.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 552 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Arjowinangun | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang; | 125,00 Orang | 402.600.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Guru Ngaji 122 | 402.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 002 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 8,00 lembaga | 7.136.400,00 | Block Grant | - | 8 lembaga | 7.850.040,00 |
| 4 | 06 | 16 | 003 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 33.800.000,00 | Block Grant | - | 3 kegiatan | 37.180.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 004 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 1 laporan | 32.175.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 001 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patroli/koordinasi) | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 53.670.000,00 | Block Grant | - | 24 kali | 59.037.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 006 | Penyusunan Profil Kecamatan | Jumlah dokumen profil | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 1.100.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 17 | | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik | Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kewilayahan | | 0,40 % | 3.651.181.500,00 | | | | 5.012.417.745,00 |
| 4 | 06 | 17 | 001 | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No. 59 Malang, Kota Malang; | 12,00 Tahun | 9.068.000,00 | Block Grant | - | 12 kelurahan | 9.974.800,00 |
| 4 | 06 | 17 | 002 | Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpras) | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No. 59 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 11.500.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 13.199.945,00 |
| 4 | 06 | 17 | 028 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bumiayu | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Bumiayu, Kota Malang; | 6,00 lokasi | 325.000.000,00 | Block Grant | - | 6,00 lokasi | 500.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 030 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Buring | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Puncak Buring Indah No. 1 Malang, Kota Malang; | 8,00 lokasi | 317.470.000,00 | Block Grant | - | 8,00 lokasi | 460.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 034 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Cemorokandang | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Cemorokandang, Jl. Raya Cemorokandang No. 1 Malang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 379.500.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 379.500.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 026 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kotalama | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Kebalen Wetan No.5 Malang, Kota Malang; | 11,00 lokasi | 247.549.000,00 | Block Grant | - | 5 lokasi | 247.549.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 031 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Lesanpuro | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Ki Ageng Gribig No. 3 Malang, Kota Malang; | 11,00 Paket | 297.000.000,00 | Block Grant | - | 11,00 Paket | 440.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 17 | 027 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mergosono | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Mergosono - Jl. kol. Sugiono Gg.V / 372, Kota Malang; | 7,00 lokasi | 300.000.000,00 | Block Grant | - | 7 Lokasi | 500.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 032 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sawojajar | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kel Sawojajar Jl. Raya Sawojajar No 45, Kota Malang; | 16,00 lokasi | 455.758.000,00 | Block Grant | Pelaksanaan Swakelola tipe 4 | 16 Lokasi | 693.900.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 036 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tlogowaru | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | kel, Kota Malang; | 8,00 lokasi | 264.600.000,00 | Block Grant | - | 327000000 | 327.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 029 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Wonokoyo | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Kalisari No.1 Malang, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 200.000.000,00 | Block Grant | - | 5 lokasi | 200.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 025 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kedungkandang | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Ki Ageng Gribig No. 12 Malang, Kota Malang; | 9,00 kegiatan | 320.450.000,00 | Block Grant | 9 kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan | 12 kegiatan | 496.742.500,00 |
| 4 | 06 | 17 | 033 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Madyopuro | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Raya Madyopuro no. 40 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 325.986.500,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 547.251.500,00 |
| 4 | 06 | 17 | 035 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Arjowinangun | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Raya Arjowinangun No. 1 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 197.300.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 197.300.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 1.249.946.850,00 | | | | 26.861.549.183,37 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 1.249.946.850,00 | | | | 26.861.549.183,37 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 % | 1.249.946.850,00 | | | | 26.861.549.183,37 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono NO.59 Malang, Kota Malang; | 650,00 Surat | 16.400.000,00 | Block Grant | - | 650 surat | 18.040.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 45.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 46.200.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No. 59 Malang , Kota Malang; | 3.400,00 Bulan | 113.000.000,00 | Block Grant | - | 3400 m2 | 124.300.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 50,00 Jenis | 35.386.000,00 | Block Grant | - | 30 jenis | 55.270.600,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Kecamatan Keungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 5,00 Jenis | 10.975.000,00 | Block Grant | - | 5 jenis | 12.072.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 9,00 Jenis | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 5 jenis | 11.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 2,00 Jenis | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 2 jenis | 5.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 185.824.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 229.869.200,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 12,00 % | 30.000.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 30.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 045 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 2,00 Orang | 70.880.000,00 | Block Grant | - | 2 orang | 77.968.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 2,00 Kali | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 110.343.255,00 |
| 5 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 3,00 Jenis | 45.000.000,00 | Block Grant | - | 3 jenis | 56.118.810,00 |
| 5 | 01 | 07 | 087 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 1,00 Jenis | 300.000.000,00 | Block Grant | - | 1 unit | 330.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 3.400,00 kegiatan | 54.549.850,00 | Block Grant | - | 3400 M2 | 82.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 025 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | Kecamatan Kedungkandang – Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 1,00 Paket | 101.900.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 112.090.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Kecamatan Kedungkandang – Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 5,00 Unit | 76.030.000,00 | Block Grant | - | 5 unit | 83.633.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Kecamatan Kedungkandang – Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 8,00 kegiatan | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 2 kegiatan | 22.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Kecamatan Kedungkandang – Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 4,00 Kali | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 99.687.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Kecamatan Kedungkandang – Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 4,00 Jenis | 2.000.000,00 | Block Grant | - | 4 dokumen | 2.200.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Kecamatan Kedungkandang – Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 2,00 buku | 77.752.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 25.278.924.648,37 |
| 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Kecamatan Kedungkandang – Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 2,00 buku | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 1.100.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 009 | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 1,00 buku | 750.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 825.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 4,00 buku | 1.500.000,00 | Block Grant | - | 4 dokumen | 4.729.890,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Kecamatan Kedungkandang -Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 2,00 buku | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 11.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Kecamatan Kedungkandang - Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang, Kota Malang; | 2,00 buku | 27.000.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 56.176.780,00 |

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Lowokwaru

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 21.651.478.000,00 | | | | 25.834.961.354,00 |
| | | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 20.752.813.000,00 | | | | 24.895.929.854,00 |
| | | | | Pemerintahan Administrasi Kecamatan | | | | 20.752.813.000,00 | | | | 24.895.929.854,00 |
| | | | | Program Pemerintahan Umum | IKM Perangkat Daerah | | 81,45 | 9.769.834.000,00 | | | | 10.721.045.350,00 |
| 4 | 06 | 22 | 001 | Penyusunan Data Monografi Kecamatan | Jumlah dokumen monografi | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.500.000,00 | Block Grant | - | - | 1.650.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 002 | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 500.000,00 | Block Grant | - | - | 550.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 037 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lowokwaru | Jumlah dokumen monografi | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 6,00 Dokumen | 57.000,00 | Block Grant | - | 2 Dokumen | 150.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 038 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Dinoyo | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Dinoyo Jl. MT. HARYONO XIII/413, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.140.000,00 | Block Grant | - | ? Terwujudnya pelaporan Sakip pada SKPD | 1.254.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 039 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sumbersari | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigurgura 31 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Data Monografi kelurahan Sumbersari - 2 buku | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 040 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ketawanggede | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 3.000.000,00 | Block Grant | - | Nilai SKM Kecamatan 75 | 3.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 041 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Jatimulyo | Jumlah dokumen monografi | Jalan Simbar Menjangan 37 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.149.000,00 | Block Grant | - | Entry dan Update Data Monografi Kelurahan Jatimulyo sebanyak 2 dokumen | 1.321.350,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 042 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah dokumen monografi | Jl. Ikan Piranha atas nomor 206 - Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.305.000,00 | Block Grant | - | Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan - 100 % | 2.500.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 043 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mojolangu | Jumlah dokumen monografi | Jl.Sudimoro No.17 , Kota Malang; | 6,00 Dokumen | 2.250.000,00 | Block Grant | '- | Data Monografi Kelurahan Mojolangu sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan . | 3.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 044 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tulusrejo | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 2.600.000,00 | Block Grant | - | 2 Dokumen | 3.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 045 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tasikmadu | Jumlah dokumen monografi | Wilayah Kelurahan Tasikmadu RW.01 s/d 06, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.500.000,00 | Block Grant | - | 2 dukumen | 1.500.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 046 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah dokumen monografi | Jalan Arumba No.06, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.000.000,00 | Block Grant | - | Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan - 2 dokumen | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 047 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogomas | Jumlah dokumen monografi | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 500.000,00 | Block Grant | - | Buku Monografi Kelurahan Tlogomas Semester II Tahun 2020 dan I Tahun 2021 | 1.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 048 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Merjosari | Jumlah dokumen monografi | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 0,00 Dokumen | 0,00 | Block Grant | - | Jumlah Dokumen Monografi sebanyak 2 dokumen. | 13.500.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 094 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Lowokwaru | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 12,00 Orang | 733.785.000,00 | Block Grant | - | 1 Kegiatan | 733.785.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 095 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Dinoyo | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Dinoyo Jl. MT. HARYONO XIII/413, Kota Malang; | 1,00 Orang | 356.400.000,00 | Block Grant | - | ? Terwujudnya Fasilitas Penyampaian Honorarium RT dan RW yang berjalan dengan baik. | 405.900.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 096 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Sumbersari | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigurgura 31 Malang, Kota Malang; | 1,00 Orang | 292.975.000,00 | Block Grant | - | Peningkatan Pelayanan 40 RT dan 7 RW | 292.975.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 097 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Ketawanggede | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang; | 37,00 Orang | 228.000.000,00 | Block Grant | - | Optimalisasi Pelayanan RT dan RW kepada Masyarakat Kelurahan Ketawanggede | 232.100.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 098 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Jatimulyo | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jalan Simbar Menjangan No. 37 Malang, Kota Malang; | 1,00 Orang | 559.200.000,00 | Block Grant | - | Fasilitasi 80 RT dan 11 RW | 644.517.500,00 |
| 4 | 06 | 22 | 099 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 12,00 Orang | 495.900.000,00 | Block Grant | - | Pembinaan RT/RW Kelurahan Tunjungsekar Jumlah RT= 73 Orang Jumlah RW = 8 Orang | 501.450.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 100 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Mojolangu | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl.Sudimoro no.17 , Kota Malang; | 143,00 Orang | 882.000.000,00 | Block Grant | '- | Di Kelurahan Mojolangu jumlah RT : 123 dan RW.20 | 900.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 101 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tulusrejo | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 91,00 Orang | 565.200.000,00 | Block Grant | - | 91 Orang (75 RT/ 16 RW) | 700.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 102 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tasikmadu | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang; | 1,00 Orang | 241.200.000,00 | Block Grant | Hasil kegiatan diharapkan dapat memperlancar, memudahkan, dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi RT RW | 33 RT dan 6 RW | 241.200.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 103 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jalan Arumba 06, Kota Malang; | 1,00 Orang | 397.200.000,00 | Block Grant | - | Jumlah RT.59 Orang dan RW.6 Orang | 397.200.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 104 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tlogomas | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 Orang | 369.750.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Ketua RW dan RT - 59 orang | 388.950.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 150 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Lowokwaru | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Tretes No. 10 Malang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 202.689.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 222.958.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 151 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Dinoyo | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Dinoyo Jl. MT. HARYONO XIII/413, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 294.215.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 436.850.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 152 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sumbersari | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigurgura 31 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 250.000.000,00 | Block Grant | - | Nilai SKM Kelurahan - 14 jenis kegiatan | 250.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 153 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Ketawanggede | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 325.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 325.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 154 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Jatimulyo | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jalan Simbar Menjangan No. 37 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 406.808.000,00 | Block Grant | 800 Surat Dinas | 800 Surat Dinas | 644.517.500,00 |
| 4 | 06 | 22 | 155 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 284.079.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 460.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 156 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mojolangu | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl.Sudimoro no.17, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 395.000.000,00 | Block Grant | '- | 12,00 kegiatan | 395.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 157 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tulusrejo | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan, Kota Malang; | 1.400,00 kegiatan | 497.310.000,00 | Block Grant | - | 1500 surat dinas | 700.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 158 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tasikmadu | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Atletik 125 Malang Kantor Kelurahan TYasikmadu, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 222.485.000,00 | Block Grant | - | 100 % | 222.485.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 159 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jalan Arumba No.06, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 300.794.000,00 | Block Grant | - | 14 Jenis | 3.794.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 160 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tlogomas | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 241.283.000,00 | Block Grant | - | Nilai SKM Kelurahan - 77 | 310.460.500,00 |
| 4 | 06 | 22 | 161 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Merjosari | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 322.735.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 370.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 224 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Lowokwaru | Jumlah Patroli | -, Kota Malang; | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 226 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Sumber Sari | Jumlah Patroli | Jl. Bendungan sigura gura 31 Malang, Kota Malang; | 12,00 Patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 227 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Ketawanggede | Jumlah Patroli | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang; | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 228 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Jatimulyo | Jumlah Patroli | Jalan Simbar Menjangan No. 37 Malang, Kota Malang; | 12,00 Patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | Jumlah Patroli wilayah sebanyak 144 kali | 144,00 Patroli | 24.840.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 229 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah Patroli | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 231 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Tulusrejo | Jumlah Patroli | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 144,00 Patroli | 32.400.000,00 | Block Grant | - | 144 Kali Patroli | 35.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 233 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah Patroli | Jalan Arumba No.06, Kota Malang; | 12,00 Patroli | 14.400.000,00 | Block Grant | - | 96 Kali | 14.400.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 234 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Tlogomas | Jumlah Patroli | Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Patroli | 22.000.000,00 | Block Grant | - | 144 kali patroli | 22.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 235 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan Merjosari | Jumlah Patroli | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 144,00 Patroli | 22.000.000,00 | Block Grant | - | 144,00 Patroli | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 174 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Merjosari | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 99,00 Orang | 608.400.000,00 | Block Grant | - | 98 orang. | 610.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 188 | Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | Jumlah Patroli | wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jl. Cengger Ayam I/12 Malang , Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 80.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 88.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 173 | Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan Kecamatan | Jumlah dokumen informasi pembangunan | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.125.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 1.237.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | | Program Pemberdayaan Masyarakat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | 80,00 % | 7.848.668.000,00 | | | | 9.312.267.501,00 |
| 4 | 06 | 16 | 001 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patrol/koordinasi) | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang, Kota Malang; | 12,00 kegiatan | 18.750.000,00 | Block Grant | - | 12,00 kegiatan | 20.625.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 002 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang, Kota Malang; | 7,00 lembaga | 22.750.000,00 | Block Grant | - | 7,00 lembaga | 25.025.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 003 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 42.250.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 46.475.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 004 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 laporan | 30.450.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 33.495.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 005 | Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 50.700.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 55.770.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 006 | Penyusunan Profil Kecamatan | Jumlah dokumen profil | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 laporan | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 5.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 049 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tasikmadu | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi) | Wilayah Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang; | 12,00 | 21.600.000,00 | Block Grant | Memberikan manfaat kenyamanan bagi warga Kelurahan Tasikmadu | 12,00 | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 106 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tasikmadu | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Wilayah Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowowkaru Kota Malang, Kota Malang; | 3,00 lembaga | 12.500.000,00 | Block Grant | Masyarakat harmonis dan semakin berdaya | 3,00 lembaga | 12.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 163 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tasikmadu | Jumlah kegiatan | Wilayah Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowowkaru Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 50.000.000,00 | Block Grant | Untuk memberikan dan meningkatkan kesejahteraan Keluarga serta pemberdayaan perempuan | 15 Kegiatan | 50.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 277 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tasikmadu | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowowkaru Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 laporan | 11.500.000,00 | Block Grant | meningkatkan perencanaan pembangunan di wilayah Kelurahan | 1,00 laporan | 11.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 220 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tasikmadu | Jumlah kegiatan | Kelurahan tasikmadu, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 8.500.000,00 | Block Grant | Hasil kegiatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perkonomian masyarakat Kelurahan Tasikmadu | 1,00 kegiatan | 8.500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 334 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tasikmadu | Jumlah kegiatan | Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 9.500.000,00 | Block Grant | Hasil kegiatan dapan meningkatkan pengetahuan dan perekonomian masyarakat Kelurahan Tasikmadu | 1 kegiatan | 9.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 391 | Penyusunan Profil Kelurahan Tasikmadu | Jumlah dokumen profil | Wilayah Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang; | 1,00 laporan | 3.000.000,00 | Block Grant | Dengan adanya data profil maka kelurahan dapat dengan mudah untuk merencanakan dan mengambangkan wilayahnya dari berbagai sektor | 4 dokumen | 3.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 448 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tasikmadu | Jumlah modin dan perawat jenasah | Wilayah kelurahan Tasikmadu, Kota Malang; | 12,00 | 42.900.000,00 | Block Grant | Perlu diadakan pembinaan modin dan perawat jenasah agar menambah pengetahuan | 13 orang | 42.900.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 505 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tasikmadu | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Wilayah Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang; | 12,00 | 92.042.000,00 | Block Grant | Dengan adanya kegiatan pembinaan penjaga tempat ibadah dan penjaga makam diharapkan hasilnya dapat menambah sumber daya manusia di wilayah kelurahan taskmadu | 27 orang | 92.042.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 562 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tasikmadu | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Wilayah Kelurahan tasikmadu, Kota Malang; | 12,00 | 211.200.000,00 | Block Grant | Untuk mengetahui pelaksanaan guru ngaji dan guru sekolah minggu diharapkan sesuai dengan standart. | 68 orang | 21.200.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 050 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jalan Arumba 6, Kota Malang; | 12,00 | 9.950.000,00 | Block Grant | - | 1 kegiatan | 9.950.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 107 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jalan Arumba no.6 , Kota Malang; | 8,00 lembaga PAUD | 16.000.000,00 | Block Grant | - | 3 kegiatan | 16.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 164 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah kegiatan | Jalan Arumba No.06, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 65.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 65.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 278 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jalan Arumba 06, Kota Malang; | 1,00 laporan | 11.000.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 11.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 221 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah kegiatan | Jalan Arumba No.06, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 6.750.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 6.750.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 335 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah kegiatan | Jalan Arumba No.06, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 2 (dua) kegiatan | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 392 | Penyusunan Profil Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah dokumen profil | Jalan Arumba No.06, Kota Malang; | 1,00 laporan | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 449 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jalan Arumba No.06, Kota Malang; | 12,00 | 19.800.000,00 | Block Grant | - | 6 Modin/ Perawat Jenazah | 19.800.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 506 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jalan Arumba No.06, Kota Malang; | 12,00 | 62.700.000,00 | Block Grant | - | 17 Orang Marbot dan 2 Orang Penjaga Makam. | 62.700.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 563 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jalan Arumba No.06, Kota Malang; | 12,00 | 145.200.000,00 | Block Grant | - | 53 Orang Guru Ngaji di Kelurahan Tunggulwulung. | 145.200.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 051 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tlogomas | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 | 4.025.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 9.200.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 108 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogomas | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kota Malang, Kota Malang; | 8,00 lembaga | 17.000.000,00 | Block Grant | - | 8 lembaga | 31.350.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 165 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogomas | Jumlah kegiatan | Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 43.800.000,00 | Block Grant | - | 4 kegiatan | 72.100.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 279 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tlogomas | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 laporan | 12.000.000,00 | Block Grant | - | 1 buah | 13.700.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 166 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Merjosari | Jumlah kegiatan | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 6,00 kegiatan | 26.250.000,00 | Block Grant | - | 6,00 kegiatan | 35.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 336 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tlogomas | Jumlah kegiatan | Kota Malang, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 13.400.000,00 | Block Grant | - | 4,00 kegiatan | 28.775.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 393 | Penyusunan Profil Kelurahan Tlogomas | Jumlah dokumen profil | Kota Malang, Kota Malang; | 1,00 laporan | 20.750.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 25.750.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 450 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tlogomas | Jumlah modin dan perawat jenazah | Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 | 72.600.000,00 | Block Grant | - | 16 Modin/ Perawat Jenazah | 74.050.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 507 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tlogomas | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 | 89.100.000,00 | Block Grant | - | 26 orang | 91.150.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 564 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tlogomas | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kota Malang, Kota Malang; | 12,00 | 343.200.000,00 | Block Grant | - | 102 Orang Guru Ngaji di Kelurahan Tlogomas. | 349.475.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 052 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Merjosari | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Mertojoyo No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 60,00 | 4.700.000,00 | Block Grant | - | 60 orang | 11.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 109 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Merjosari | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Mertojoyo No. 1 Kota Malang, Kota Malang; | 7,00 lembaga | 2.650.000,00 | Block Grant | - | 7,00 lembaga | 5.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 280 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Merjosari | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 1,00 laporan | 10.260.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 12.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 223 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Merjosari | Jumlah kegiatan | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 30.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 337 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Merjosari | Jumlah kegiatan | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 19.350.000,00 | Block Grant | - | 3,00 kegiatan | 30.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 394 | Penyusunan Profil Kelurahan Merjosari | Jumlah dokumen profil | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 1 laporan | 0,00 | Block Grant | - | 1 laporan | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 451 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Merjosari | Jumlah modin dan perawat jenasah | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 29,00 | 95.700.000,00 | Block Grant | - | 29 orang. | 105.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 508 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Merjosari | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 44,00 | 145.200.000,00 | Block Grant | - | 43 orang | 155.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 565 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Merjosari | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 143,00 | 471.900.000,00 | Block Grant | - | 143 orang. | 500.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 042 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Dinoyo | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi) | kelurahan Dinoyo. MT. Haryono XIII/413 A, Kota Malang; | 12,00 | 35.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 13.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 099 | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Dinoyo | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kelurahan Dinoyo Jl. MT. Haryono XIII/413 a, Kota Malang; | 8,00 lembaga PAUD | 47.800.000,00 | Block Grant | - | 8,00 lembaga PAUD | 77.352.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 156 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Dinoyo | Jumlah kegiatan | Kelurahan Dinoyo Jl. MT> haryono XIII/413, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 65.850.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 85.140.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 270 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Dinoyo | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Dinoyo Jl. MT. haryono XIII/413, Kota Malang; | 1,00 laporan | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 28.325.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 213 | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Dinoyo | Jumlah kegiatan | Kelurahan Dinoyo Jl. MT. Haryono XIII/413, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 32.945.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 384 | Penyusunan Profil Kelurahan Dinoyo | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Dinoyo Jl. MT. haryono XIII/413, Kota Malang; | 1,00 laporan | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 22.550.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 441 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Dinoyo | Jumlah modin dan perawat jenazah | Kelurahan Dinoyo Jl. MT. Haryono XIII/413, Kota Malang; | 12,00 | 49.500.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 57.695.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 498 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Dinoyo | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kelurahan Dinoyo Jl. MT. Haryono XIII/413, Kota Malang; | 12,00 | 145.200.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 152.405.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 555 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Dinoyo | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Dinoyo Jl. MT. Haryono XIII/413, Kota Malang; | 12,00 | 481.800.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 517.220.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 043 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sumbersari | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi) | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigura gura 31 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 11.105.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 11.105.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 100 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sumbersari | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan sigura gura 31 Malang, Kota Malang; | 8,00 lembaga | 62.500.000,00 | Block Grant | - | 8,00 lembaga | 62.500.001,00 |
| 4 | 06 | 16 | 157 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sumbersari | Jumlah kegiatan | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigura gura 31 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 75.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 75.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 271 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sumbersari | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigura-gura 31 Malang, Kota Malang; | 1,00 laporan | 20.300.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 20.300.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 214 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sumbersari | Jumlah kegiatan | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigura gura 31 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 22.750.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 22.750.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 328 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Sumbersari | Jumlah kegiatan | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigurgura 31 Malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 21.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 21.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 385 | Penyusunan Profil Kelurahan Sumbersari | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigura Gura 31 Malang, Kota Malang; | 1,00 laporan | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 442 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Sumbersari | Jumlah modin dan perawat jenazah | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigurgura 31 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 47.100.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 47.100.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 499 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Sumbersari | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigurgura 31 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 67.225.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 67.225.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 556 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Sumbersari | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan Sigurgura 31 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 127.525.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 127.525.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 044 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Ketawanggede | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang; | 12,00 | 4.425.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 3.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 101 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ketawanggede | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang; | 2,00 lembaga | 5.825.000,00 | Block Grant | - | 2,00 lembaga | 16.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 158 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ketawanggede | Jumlah kegiatan | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang: | 12,00 Bulan | 15.260.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 65.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 272 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Ketawanggede | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang: | 1,00 laporan | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 215 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Ketawanggede | Jumlah kegiatan | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang: | 2,00 kegiatan | 3.000.000,00 | Block Grant | - | 2 lembaga yaitu PAUD dan Posyandu | 6.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 329 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Ketawanggede | Jumlah kegiatan | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang: | 3,00 kegiatan | 7.380.000,00 | Block Grant | - | 3,00 kegiatan | 31.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 386 | Penyusunan Profil Kelurahan Ketawanggede | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang: | 1,00 laporan | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 18.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 443 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Ketawanggede | Jumlah modin dan perawat jenasah | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang: | 12,00 | 33.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 34.290.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 500 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Ketawanggede | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang: | 12,00 | 52.800.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 51.795.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 557 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Ketawanggede | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang: | 12,00 | 135.300.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 146.420.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 045 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Jatimulyo | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jalan Simbar Menjangan No. 37 malang, Kota Malang; | 12,00 | 8.600.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 9.890.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 102 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Jatimulyo | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | jalan Simbar Menjangan 37 Malang, Kota Malang; | 7,00 lembaga | 24.972.000,00 | Block Grant | - | 7,00 lembaga | 27.469.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 159 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Jatimulyo | Jumlah kegiatan | Jalan Simbar Menjangan 37 Malang, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 74.700.000,00 | Block Grant | - | 2 kegiatan PKK yang dilaksanakan | 123.280.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 273 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Jatimulyo | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | jalan Simbar Menjangan 37 Malang, Kota Malang; | 1,00 laporan | 6.240.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen Musrenbang | 7.176.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 216 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Jatimulyo | Jumlah kegiatan | Jalan Simbar Menjangan 37 Malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 4.400.000,00 | Block Grant | - | 2 Kegiatan Sosial yang dilaksanakan | 9.545.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 330 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Jatimulyo | Jumlah kegiatan | Jalan Simbar Menjangan 37 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 4.070.000,00 | Block Grant | - | 1 Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan masy. yang dilaksanakan | 4.680.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 444 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Jatimulyo | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jalan Simbar Menjangan 37 Malang, Kota Malang; | 1,00 laporan | 99.000.000,00 | Block Grant | - | 30 Modin dan Perawat Jenazah | 115.287.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 558 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Jatimulyo | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jalan Simbar Menjangan 37 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 277.200.000,00 | Block Grant | - | 84 orang Guru Ngaji dan Sekolah Minggu | 320.217.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 046 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 2,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 2,00 | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 501 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Jatimulyo | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jalang Simbar Menjangan No. 37 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 122.100.000,00 | Block Grant | - | 37 orang Penjaga Tempat Ibadah dan Jumlah Penjaga Makam | 141.852.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 103 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 8,00 lembaga | 15.975.000,00 | Block Grant | - | 8,00 lembaga | 65.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 160 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah kegiatan | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 12,00 Bulan | 45.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 65.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 274 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 1,00 laporan | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 217 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah kegiatan | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 6,00 | 35.000.000,00 | Block Grant | - | 6,00 | 55.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 331 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah kegiatan | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 30.000.000,00 | Block Grant | - | 5,00 kegiatan | 50.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 388 | Penyusunan Profil Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 1,00 laporan | 0,00 | Block Grant | - | 1,00 laporan | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 387 | Penyusunan Profil Kelurahan Jatimulyo | Jumlah dokumen profil | Jalan Simbar Menjangan No. 37 Malang, Kota Malang; | 1,00 laporan | 19.750.000,00 | Block Grant | 1 dokumen Data Informasi yang disajikan | 1,00 laporan | 22.712.500,00 |
| 4 | 06 | 16 | 445 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah modin dan perawat jenazah | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 12,00 | 56.100.000,00 | Block Grant | - | 17 Modin/Perawat Jenazah | 58.050.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 502 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 12,00 | 52.500.000,00 | Block Grant | - | 23 Orang Marbot dan 2 Orang Penjaga Makam. | 84.750.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 559 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 12,00 | 260.700.000,00 | Block Grant | - | 17 Orang dan Guru Ngaji 62 Orang | 265.650.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 047 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mojolangu | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl.Sudimoro no.17, Kota Malang; | 144,00 | 27.100.000,00 | Block Grant | '- | 144 kali | 27.100.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 104 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mojolangu | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl.Sudimoro No.17 , Kota Malang; | 6,00 lembaga | 20.000.000,00 | Block Grant | '- | 6 lembaga | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 161 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mojolangu | Jumlah kegiatan | Jl.Sudimoro No.17 , Kota Malang; | 12,00 Bulan | 55.020.000,00 | Block Grant | '- | 12 bulan | 75.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 275 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mojolangu | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl.Sudimoro No.17 , Kota Malang; | 5,00 laporan | 10.000.000,00 | Block Grant | '- | 5 buku | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 218 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mojolangu | Jumlah kegiatan | Jl.Sudimoro No.17 , Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 2.000.000,00 | Block Grant | '- | 1,00 kegiatan | 3.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 332 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Mojolangu | Jumlah kegiatan | Jl.Sudimoro No.17, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 5.000.000,00 | Block Grant | '- | 1,00 kegiatan | 10.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 389 | Penyusunan Profil Kelurahan Mojolangu | Jumlah dokumen profil | Jl.Sudimoro no.17, Kota Malang; | 6,00 laporan | 5.000.000,00 | Block Grant | '- | 6 dokumen | 10.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 446 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Mojolangu | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl.Sudimoro no.17 , Kota Malang; | 55,00 | 181.500.000,00 | Block Grant | '- | 55 orang | 185.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 503 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Mojolangu | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl.Sudimoro no.17, Kota Malang; | 39,00 | 128.700.000,00 | Block Grant | '- | 39 orang | 130.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 560 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Mojolangu | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl.Sudimoro no.17, Kota Malang; | 115,00 | 379.500.000,00 | Block Grant | - | 115 orang | 429.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 048 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tulusrejo | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi) | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 1,00 | 2.400.000,00 | Block Grant | - | 16 Wilayah | 450.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 105 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tulusrejo | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 8,00 lembaga | 80.500.000,00 | Block Grant | - | 8 Lembaga | 90.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 162 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tulusrejo | Jumlah kegiatan | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 5,00 Bulan | 62.503.500,00 | Block Grant | - | 5 Kegiatan | 60.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 276 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tulusrejo | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 1,00 laporan | 12.300.000,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen | 17.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 219 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tulusrejo | Jumlah kegiatan | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 10.100.000,00 | Block Grant | - | 2 Kegiatan | 17.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 333 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tulusrejo | Jumlah kegiatan | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 80.254.500,00 | Block Grant | - | 5 Kegiatan | 90.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 390 | Penyusunan Profil Kelurahan Tulusrejo | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 1,00 laporan | 0,00 | Block Grant | - | 1 Dokumen | 30.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 447 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tulusrejo | Jumlah modin dan perawat jenazah | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 39,00 | 128.700.000,00 | Block Grant | - | 42 Orang | 170.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 504 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tulusrejo | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 40,00 | 132.000.000,00 | Block Grant | - | 42 Orang | 170.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 561 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tulusrejo | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 130,00 | 429.000.000,00 | Block Grant | - | 140 Orang | 575.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 222 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tlogomas | Jumlah kegiatan | Kota Malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 15.500.000,00 | Block Grant | - | 2,00 kegiatan | 27.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 098 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Lowokwaru | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Tugu No. 1, Kota Malang; | 3,00 Bulan | 7.000.000,00 | Block Grant | - | 3,00 Bulan | 7.700.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 155 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Lowokwaru | Jumlah kegiatan | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 7,00 Bulan | 75.000.000,00 | Block Grant | - | 7,00 Bulan | 82.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 269 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Lowokwaru | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 6,00 laporan | 10.131.000,00 | Block Grant | - | 6,00 laporan | 11.145.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 212 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Lowokwaru | Jumlah kegiatan | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 10.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 11.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 326 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Lowokwaru | Jumlah kegiatan | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 12.370.000,00 | Block Grant | - | 1,00 kegiatan | 13.607.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 383 | Penyusunan Profil Kelurahan Lowokwaru | Jumlah dokumen profil | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 laporan | 1.500.000,00 | Block Grant | - | 2 laporan | 1.650.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 440 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Lowokwaru | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 119.340.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 131.274.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 497 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Lowokwaru | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 152.490.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 167.739.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 554 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Lowokwaru | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 503.880.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 554.268.000,00 |
| | | | | | Rasio Linmas per RT | | 0,75 data | | | | | |
| 4 | 06 | 16 | 041 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Lowokwaru | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Kel.Lowokwaru Jl. Tretes No. 10 Malang, Kota Malang; | 15,00 | 9.000.000,00 | Block Grant | - | 15,00 | 9.900.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 17 | | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik | Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kewilayahan | | 30.000,00 % | 3.134.311.000,00 | | | | 4.862.617.003,00 |
| 4 | 06 | 17 | 001 | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 3,00 lokasi | 44.500.000,00 | Block Grant | - | - | 48.950.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 002 | Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpras) | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 laporan | 7.000.000,00 | Block Grant | - | - | 7.700.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 045 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tasikmadu | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Wilayah Kelurahan tasikmadu, Kota Malang; | 10,00 | 440.000.000,00 | Block Grant | Untuk meningkatkan roda perekonomian Masyarakat kelurahan Tasikmadu | 6 kegiatan | 440.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 046 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jalan Arumba No. 06, Kota Malang; | 10,00 | 205.000.000,00 | Block Grant | - | 10,00 | 205.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 047 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tlogomas | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Tlogomas, Kota Malang; | 16,00 | 355.500.000,00 | Block Grant | - | Pemeliharaan infrastruktur - 12 titik lokasi; barang yang diserahkan kepada masyarakat - 2 sound system dan 2 gerobak sampah | 500.662.500,00 |
| 4 | 06 | 17 | 048 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Merjosari | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang; | 12,00 | 258.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 | 600.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 17 | 038 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Dinoyo | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Dinoyo Jl.MT. HAryono XIII/413, Kota Malang; | 16,00 | 136.700.000,00 | Block Grant | - | 16,00 | 385.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 039 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sumbersari | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Sumbersari, Jl. Bendungan sigura gura 31 Malang, Kota Malang; | 11,00 | 252.000.000,00 | Block Grant | - | 11,00 | 252.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 040 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ketawanggede | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana No. 17 B Malang, Kota Malang; | 30,00 | 284.561.000,00 | Block Grant | - | 30,00 | 428.005.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 037 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Lowokwaru | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jalan Simbar Menjangan No. 37 Malang, Kota Malang; | 10,00 | 269.280.000,00 | Block Grant | 10 Jumlah lokasi Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan | 10,00 | 499.299.500,00 |
| 4 | 06 | 17 | 042 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang; | 13,00 | 333.250.000,00 | Block Grant | - | 13,00 | 400.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 043 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mojolangu | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl.Sudimoro no.17 , Kota Malang; | 62,00 | 188.520.000,00 | Block Grant | '- | 62,00 | 200.000.003,00 |
| 4 | 06 | 17 | 044 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tulusrejo | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang; | 10,00 | 0,00 | Block Grant | - | 10,00 | 500.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 094 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lowokwaru (DAU Tambahan) | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang; | 3,00 | 360.000.000,00 | Block Grant | - | 15 Wilayah | 396.000.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 898.665.000,00 | | | | 939.031.500,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 898.665.000,00 | | | | 939.031.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 100,00 | 898.665.000,00 | | | | 939.031.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 berkas | 2.750.000,00 | Block Grant | - | 1,00 berkas | 3.025.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 12,00 Bulan | 41.000.000,00 | Block Grant | - | 12,00 Bulan | 45.100.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 100,00 m2 | 85.200.000,00 | Block Grant | - | 100,00 m2 | 93.720.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 Unit | 45.539.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Unit | 50.092.900,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 berkas | 11.750.000,00 | Block Grant | - | 1,00 berkas | 12.925.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 berkas | 7.500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 berkas | 8.250.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 berkas | 5.280.000,00 | Block Grant | - | 1,00 berkas | 5.808.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 Buah | 180.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Buah | 198.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 Kali | 40.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Kali | 44.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 045 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 Orang | 73.060.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Orang | 80.366.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Jl. Cengger ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 Kali | 15.950.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Kali | 17.545.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 051 | Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 Kali | 20.260.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Kali | 22.286.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 095 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 Jenis | 12.555.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Jenis | 13.810.500,00 |
| 5 | 01 | 07 | 092 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Kecamatan Lowokwaru Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 Unit | 58.326.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Unit | 64.158.600,00 |
| 5 | 01 | 07 | 091 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 m2 | 50.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 m2 | 5.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jl. Cengger Ayam I/12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; | 1,00 Unit | 42.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Unit | 46.200.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 094 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Kecamatan Lowokwaru Jl. Cengger Ayam I/12 Malang., Kota Malang: | 1,00 Unit | 5.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Unit | 5.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 025 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 Unit | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Unit | 27.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | di Kecamatan Lowokwaru Jl.Cengger Ayam I/12 Kota Malang, Kota Malang: | 1,00 Orang | 50.100.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Orang | 55.110.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 Dokumen | 3.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 3.300.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 Dokumen | 72.600.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 79.860.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 Dokumen | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 1.100.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 009 | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 Dokumen | 8.300.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 9.130.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 Dokumen | 2.645.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 2.909.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 Dokumen | 2.500.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 2.750.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | Jl. Cengger Ayam I / 12 Malang - Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: | 1,00 Dokumen | 37.350.000,00 | Block Grant | - | 1,00 Dokumen | 41.085.000,00 |

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Sukun

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Belanja Langsung | | | | 22.272.538.000,00 | | | | 28.501.130.948,00 |
| 4 | | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 21.271.538.000,00 | | | | 27.176.505.948,00 |
| 4 | 06 | | | Pemerintahan Administrasi Kecamatan | | | | 21.271.538.000,00 | | | | 27.176.505.948,00 |
| 4 | 06 | 22 | | Program Pemerintahan Umum | IKM Perangkat Daerah | | 82,00 data | 9.551.067.400,00 | | | | 11.192.684.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 001 | Penyusunan Data Monografi Kecamatan | Jumlah dokumen monografi | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 3.500.000,00 | Block Grant | - | Jumlah dokumen monografi-2 Dokumen | 4.720.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 002 | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 21,00 kegiatan | 10.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN | 31.443.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 050 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah dokumen monografi | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 500.000,00 | Block Grant | Mengacu pada Pedoman Data Monografi Kelurahan | Jumlah dokumen monografi 2 Dokumen | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 106 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 73,00 Fasilitasi | 409.000.000,00 | Block Grant | Spesifikasi teknis yang diperlukan Mengacu pada Perda No. 1 tahun 2013 tentang RT dan RW | Jumlah RT/RW terfasilitasi | 524.700.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 163 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 2.000,00 Pelayanan | 326.946.000,00 | Block Grant | Pelayanan Administrasi Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | 363.245.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 051 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gadang | Jumlah dokumen monografi | Jl.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.500.000,00 | Block Grant | - | 2 Dokumen | 3.500.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 107 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Gadang | Jumlah RT/RW terfasilitasi | JL.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 912,00 Fasilitasi | 499.200.000,00 | Block Grant | - | 924 | 510.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 164 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Gadang | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 2.000,00 Pelayanan | 310.222.000,00 | Block Grant | - | 2000 | 400.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 053 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Bandungrejosari Jl. S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.000.000,00 | Block Grant | belanja habis pakai | tersedianya data monografi kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 109 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kel Bandungrejosari Jl S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 1.704,00 Fasilitasi | 885.600.000,00 | Block Grant | belanja pakai habis | Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi RT/RW | 885.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 052 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kebonsari | Jumlah dokumen monografi | Jl.S.Supriadi No.15 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.000.000,00 | Block Grant | Ketersediaan data monografi tiap 6 bulan sekali | Penyusunan dokumen monografi Kelurahan Kebonsari | 500.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 108 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kebonsari | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 2.000,00 Fasilitasi | 326.000.000,00 | Block Grant | Spesifikasi teknis yang diperlukan, meliputi: Mengacu pada Perda No.1 Tahun 2013 tentang RT dan RW | Pembayaran Honorarium RT /RW | 349.800.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 049 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukun | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Sukun- Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai , Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 200.000,00 | Block Grant | mengacu pada Pedoman Data Monografi Kelurahan | Jumlah Data Monografi Kelurahan Sukun - 2 Dokumen | 1.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 105 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Sukun | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Sukun- Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai , Kota Malang; | 12,00 Fasilitasi | 743.800.000,00 | Block Grant | Spesifikasi teknis yang diperlukan, meliputi: Mengacu pada Perda No.1 Tahun 2013 tentang RT dan RW | Terlaksananya pelayanan administrasi RT/RW | 771.200.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 162 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukun | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Sukun - Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai , Kota Malang; | 2.200,00 Pelayanan | 205.121.000,00 | Block Grant | Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukun | Jumlah pelayanan yang terlayani | 400.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 165 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kebonsari | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 2.000,00 Pelayanan | 350.000.000,00 | Block Grant | Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Pelayanan administrasi Kelurahan | 404.400.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 054 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tanjungrejo | Jumlah dokumen monografi | Jl. Terusan Mergan Raya No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 1.700.000,00 | Block Grant | - | 1700000 | 1.700.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 110 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tanjungrejo | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Terusan Mergan Raya Nomor 1 Malang, Kota Malang; | 151,00 Fasilitasi | 930.200.000,00 | Block Grant | - | 930550000 | 930.550.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 167 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tanjungrejo | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Terusan Mergan Raya No. 1 Malang, Kota Malang; | 30,00 Pelayanan | 294.118.900,00 | Block Grant | - | 320000000 | 320.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 166 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kel Bandungrejosari JL S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 2.000,00 Pelayanan | 284.788.000,00 | Block Grant | belanja pakai habis | Peningkatan Kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan | 284.788.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 055 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pisangcandi | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Pisangcandi Jl. Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.500.000,00 | Block Grant | Tersedianya data monografi Kelurahan yang terupdate | Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan | 2.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 111 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Pisangcandi | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Pisangcandi Jl. Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 1.176,00 Fasilitasi | 631.000.000,00 | Block Grant | Pembayaran Insentif RT/RW yang tepat waktu | Terlaksananya pembayaran insentif RT/RW di Kelurahan Pisang Candi yang tepat waktu | 635.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 168 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Pisangcandi | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Pisangcandi Jl. Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 2.000,00 Pelayanan | 206.267.000,00 | Block Grant | Terlaksananya peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi di Kelurahan Pisangcandi | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan - 12 bulan | 375.500.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 056 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Karangbesuki | Jumlah dokumen monografi | Kelurahan Karangbesuki Jl. Terusan Sigura Gura Blok D No.174 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 662.500,00 | Block Grant | - | Jumlah dokumen monografi | 800.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 112 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Karangbesuki | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Kelurahan Karangbesuki Jl.Terusan Sigura gura Blok D no.174 Malang, Kota Malang; | 92,00 Fasilitasi | 566.550.000,00 | Block Grant | - | Jumlah RT dan RW yang terfasilitasi | 600.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 169 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Karangbesuki | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Kelurahan Karangbesuki Jl. Terusan Sigura gura Blok D No.174 Malang, Kota Malang; | 2.500,00 Pelayanan | 327.419.000,00 | Block Grant | ' | Jumlah surat pelayanan | 450.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 057 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandulan | Jumlah dokumen monografi | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 1.000.000,00 | Block Grant | - | 2200000 | 2.200.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 113 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bandulan | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 900,00 Fasilitasi | 461.100.000,00 | Block Grant | - | 473280000 | 473.280.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 170 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bandulan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 2.100,00 Pelayanan | 300.076.000,00 | Block Grant | - | 450000000 | 450.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 058 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mulyorejo | Jumlah dokumen monografi | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 450.000,00 | Block Grant | SAKIP | 2 | 1.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 114 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Mulyorejo | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo , Kota Malang; | 804,00 Fasilitasi | 411.400.000,00 | Block Grant | SAKIP - | 804 | 450.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 171 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mulyorejo | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jalan Budi utomo No. 1 Mulyorejo , Kota Malang; | 100,00 | 251.117.000,00 | Block Grant | SAKIP - | 2600 | 500.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 059 | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah dokumen monografi | Jl. pelabuhan ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 2,00 Dokumen | 500.000,00 | Block Grant | Meningkatkan perkembangan wilayah | Jumlah dokumen monografi yang disusun | 500.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 115 | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah RT/RW terfasilitasi | Jl. pelabuhan ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 56,00 Fasilitasi | 344.400.000,00 | Block Grant | Dalam kebutuhan pelayanan masyarakat maka perlu ditingkatkan kinerja RT/RW dan administrasi yang baik untuk meningkatkan kualitas kinerja perlu ditunjang sarana | Jumlah RT RW yang terfasilitasi | 378.840.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 172 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Jl. pelabuhan ketapang NO. 01 Malang, Kota Malang; | 12,00 Pelayanan | 215.230.000,00 | Block Grant | Peningkatan pelayanan masyarakat | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | 365.618.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 188 | Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | Jumlah Patroli | Kecamatan Sukun, Kota Malang; | 12,00 | 30.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | 60.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 189 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kelurahan Ciptomulyo | Jumlah Patroli | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 22.850.000,00 | Block Grant | Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum di tingkat Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah kegiatan mendukung | 22.850.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 190 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kelurahan Gadang | Jumlah Patroli | Jl.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 12,00 | 21.600.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 25.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 191 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kelurahan Kebonsari | Jumlah Patroli | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 12,00 | 21.600.000,00 | Block Grant | Penyelenggaraan Pemerintahan umum di tingkat Kelurahan | Jumlah Kegiatan | 22.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 192 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kelurahan Bandungrejosari | Jumlah Patroli | Kel Bandungrejosari JL S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 12,00 | 21.600.000,00 | Block Grant | honorarium | jumlah bulan kegiatan | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 193 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kelurahan Sukun | Jumlah Patroli | Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai - Kelurahan Sukun, Kota Malang; | 12,00 | 22.600.000,00 | Block Grant | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di tingkat Kelurahan Sukun | Jumlah Kegiatan | 22.850.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 194 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kelurahan Tanjungrejo | Jumlah Patroli | Jl. Terusan Mergan Raya No. 1 Malang, Kota Malang; | 48,00 | 21.950.000,00 | Block Grant | - | 22300000 | 22.300.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 196 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kelurahan Karangbesuki | Jumlah Patroli | Kelurahan Karangbesuki Jl.Terusan Sigura Gura Blok D Nomor 174 Malang, Kota Malang; | 3,00 | 22.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah jajaran samping yang terfasilitasi | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 197 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kelurahan Bandulan | Jumlah Patroli | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 23.100.000,00 | Block Grant | - | 21600000 | 21.600.000,00 |
| 4 | 06 | 22 | 198 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kelurahan Mulyorejo | Jumlah Patroli | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo , Kota Malang; | 12,00 | 15.000.000,00 | Block Grant | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan - | 15 | 50.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 22 | 199 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kelurahan Bakalankrajan | Jumlah Patroli | Jl. Pelabuhan Ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 1,00 | 25.700.000,00 | Block Grant | Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di Kelurahan Bakalankrajan diperlukan kegiatan fasilitasi | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | | Program Pemberdayaan Masyarakat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | 87,00 % | 9.048.776.750,00 | | | | 10.970.646.948,00 |
| 4 | 06 | 16 | 001 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patroli/koordinasi) | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 12,00 | 25.000.000,00 | Block Grant | Jumlah Patroli dan pelaksanaan sosialisasi | Jumlah Patroli dan pelaksanaan sosialisasi | 32.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 002 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 8,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | Jumlah Lembaga pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat Kecamatan | 10.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 003 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 12,00 | 45.500.000,00 | Block Grant | Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | 60.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 004 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 1,00 | 16.500.000,00 | Block Grant | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | Usulan Musrenbang yang diakomodir | 22.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 005 | Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 1,00 | 38.287.000,00 | Block Grant | Jumlah pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan | Jumlah pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan | 100.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 006 | Penyusunan Profil Kecamatan | Jumlah dokumen profil | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 1,00 | 3.000.000,00 | Block Grant | Jumlah Data Profil Kecamatan | Jumlah Data Profil Kecamatan | 6.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 054 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 144,00 | 13.230.000,00 | Block Grant | Jumlah monitoring Bhabinsa, Babinkamtibmas dan Satlinmas yang terlibat | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | 45.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 111 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 6,00 | 16.000.000,00 | Block Grant | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/tingkat Kelurahan Ciptomulyo (6 Kegiatan) | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/tingkat Kelurahan Ciptomulyo (6 Kegiatan) | 40.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 168 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah kegiatan | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 70.000.000,00 | Block Grant | Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ciptomulyo | 100.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 225 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah kegiatan | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 3,00 | 15.000.000,00 | Block Grant | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Ciptomulyo | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Ciptomulyo | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 282 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 1,00 | 16.000.000,00 | Block Grant | Jumlah peserta yang terlibat dalam musyawarah | Jumlah peserta yang terlibat dalam musyawarah | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 339 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah kegiatan | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 3,00 | 15.000.000,00 | Block Grant | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo | 36.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 396 | Penyusunan Profil Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah dokumen profil | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 1,00 | 6.000.000,00 | Block Grant | Jumlah Data Penyusunan Profil Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah dokumen profil Kelurahan Ciptomulyo | 15.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 453 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 11,00 | 50.500.000,00 | Block Grant | Jumlah Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Ciptomulyo terfasilitasi selama 1 tahun 132 orang | Jumlah Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Ciptomulyo terfasilitasi selama 1 tahun 132 orang | 63.625.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 510 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 35,00 | 103.300.000,00 | Block Grant | Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Ciptomulyo Terfasilitasi selama 1 tahun 422 orang | Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Ciptomulyo Terfasilitasi selama 1 tahun 422 orang | 138.750.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 567 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 115,00 | 344.200.000,00 | Block Grant | Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Ciptomulyo Terfasilitasi selama 1 Tahun 1373 orang | Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Ciptomulyo Terfasilitasi selama 1 Tahun 1373 orang | 472.450.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 055 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Gadang | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 1,00 | 7.650.000,00 | Block Grant | - | 1 Kegiatan | 45.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 112 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gadang | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl.Ko.Sugiono No.190, Kota Malang; | 5,00 | 5.850.000,00 | Block Grant | - | 2 Kegiatan | 60.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 063 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Pelabuhan Ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 3.765.000,00 | Block Grant | Kegiatan ini dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Bakalankrajan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | 3.764.998,00 |
| 4 | 06 | 16 | 120 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl pelabuhan ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 3,00 lembaga | 13.548.000,00 | Block Grant | Kegiatan ini perlu dalam rangka pemberian pembinaan dan fasilitasi peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang ada Di Bakalankrajan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi | 17.708.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 169 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gadang | Jumlah kegiatan | Jl.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 12,00 | 32.800.000,00 | Block Grant | - | 12 bulan | 75.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 177 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah kegiatan | Jl. Pelabuhan Ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 55.000.000,00 | Block Grant | kegiatan ini diperlukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga | Jumlah kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan perempuan dan kesejahteraan keluarga | 55.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 234 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah kegiatan | Jl. pelabuhan Ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 11.450.000,00 | Block Grant | Memberikan pemahaman kepada ketua RT / RW dan masyarakat setempat tentang kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan | 11.450.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 226 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Gadang | Jumlah kegiatan | JL.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 1,00 | 13.000.000,00 | Block Grant | - | 1 Kegiatan | 30.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 291 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Pelabuhan ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | -3,00 | 10.517.000,00 | Block Grant | Musyawarah pembangunan wilayah Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | 12.187.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 283 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gadang | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | JL.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 1,00 | 15.650.000,00 | Block Grant | - | 1 dokumen | 30.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 348 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah kegiatan | Jl. Pelabuhan Ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 14.550.000,00 | Block Grant | Pembinaan dan peningkatan kemampuan ketrampilan masyarakat Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat | 32.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 340 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Gadang | Jumlah kegiatan | Jl.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 3,00 | 9.950.000,00 | Block Grant | - | 3 Kegiatan | 80.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 397 | Penyusunan Profil Kelurahan Gadang | Jumlah dokumen profil | jL.Sugiono No.190, Kota Malang; | 1,00 | 5.500.000,00 | Block Grant | - | 2 dokumen | 15.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 405 | Penyusunan Profil Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah dokumen profil | Jl. Pelabuhan Ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 1,00 | 5.200.000,00 | Block Grant | Penyusunan profil Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah dokumen profil | 7.900.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 511 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Gadang | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl.Kol.Sugionoo No.190, Kota Malang; | 600,00 | 167.600.000,00 | Block Grant | - | 600 | 165.025.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 568 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Gadang | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 194,00 | 596.400.000,00 | Block Grant | - | 2160 | 65.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 462 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah modin dan perawat jenasah | Jl. Pelabuhan Ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 17,00 | 56.100.000,00 | Block Grant | Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketrampilan bagi modin dan perawat jenazah maka dibutuhkan insentif bulanan dan kegiatan peningkatan ketrampilan modin dan perawat jenazah | Jumlah modin dan perawat jenazah yang dibina | 58.350.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 519 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. pelabuhan ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 33,00 | 109.900.000,00 | Block Grant | Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penjaga tempat ibadah dan penjaga makam perlu diberikan insentif setiap bulannya | Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya | 112.950.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 113 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kebonsari | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 8,00 | 5.000.000,00 | Block Grant | Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat Kelurahan Kebonsari- 1 Kegiatan | Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi | 40.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 170 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kebonsari | Jumlah kegiatan | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 5,00 | 40.000.000,00 | Block Grant | Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kebonsari | Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun | 100.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 576 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Pelabuhan Ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 79,00 | 261.700.000,00 | Block Grant | Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan guru ngaji dan guru sekolah minggu di Kelurahan Bakalankrajan perlu dilakukan kegiatan pembinaan guru ngaji dan guru sekolah minggu | Jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu yang ditingkatkan kesejahteraan dan ketrampilannya | 267.050.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 062 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mulyorejo | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/patrol/koordinasi) | Jalan Budi Utomo No. 1, Kota Malang; | 100,00 | 23.725.000,00 | Block Grant | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan | 144 | 35.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 119 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mulyorejo | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo , Kota Malang; | 100,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan | 1 | 60.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 227 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kebonsari | Jumlah kegiatan | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 6,00 | 20.000.000,00 | Block Grant | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 284 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kebonsari | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 1,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | Harapan prosentase usulan hasil Musrenbang kelurahan yang menjadi prioritas dalam musrenbang kecamatan yang terakomodir - 100 % | Jumlah masyarakat /peserta yang terlibat musyawarah - 75 Peserta | 20.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 341 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kebonsari | Jumlah kegiatan | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 2,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | Prosentase Jumlah Kegiatan dan Kedahiran Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kebonsari | Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kebonsari | 36.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 176 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mulyorejo | Jumlah kegiatan | jalan Budi Utomo No.1 Mulyorejo, Kota Malang; | 4,00 kegiatan | 40.000.000,00 | Block Grant | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan | 12 | 100.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 233 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mulyorejo | Jumlah kegiatan | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo, Kota Malang; | 1,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan | 2 | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 290 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mulyorejo | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo , Kota Malang; | 1,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan | 150 | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 398 | Penyusunan Profil Kelurahan Kebonsari | Jumlah dokumen profil | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 1,00 | 5.000.000,00 | Block Grant | Pemutahiran Data Profil Kelurahan | Pengumpulan Data Profil Kelurahan Kebonsari | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 347 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo | Jumlah kegiatan | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo , Kota Malang; | 100,00 kegiatan | 15.000.000,00 | Block Grant | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan | 3 | 80.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 455 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kebonsari | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 19,00 | 60.100.000,00 | Block Grant | Jumlah Modin dan Perawat Jenazah Terfasilitasi - 17 orang selama 1 Tahun | Pembayaran honorarium modin dan perawat jenazah | 57.100.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 404 | Penyusunan Profil Kelurahan Mulyorejo | Jumlah dokumen profil | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 5.000.000,00 | Block Grant | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan | 2 | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 512 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kebonsari | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 45,00 | 148.700.000,00 | Block Grant | Jumlah Penjaga tempat ibadah dan penjaga makam Terfasilitasi - 1 Tahun, 36 Orang penjaga Tempat ibadah dan 2 Orang Penjaga Makam | Pembayaran honorarium penjaga tempat ibadah dan penjaga makam | 142.900.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 518 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Mulyorejo | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo , Kota Malang; | 100,00 | 105.325.000,00 | Block Grant | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan | 389 | 150.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 569 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kebonsari | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 201,00 | 631.500.000,00 | Block Grant | Jumlah Guru Ngaji yang terfasilitasi selama 1 Tahun | Pembayaran honorarium Guru Ngaji dan Guru Sekolah | 830.362.500,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 461 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Mulyorejo | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo , Kota Malang; | 100,00 | 50.500.000,00 | Block Grant | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan | 180 | 65.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 057 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Kel Bandungrejosari JL S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 48,00 | 6.454.000,00 | Block Grant | belanja pakai habis | Jumlah Kegiatan Pengamanan | 6.454.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 58 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tanjungrejo | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | 1. Jl. Terusan Mergan Raya No. 1 Malang - Kota Malang | 1,00 | 4.750.000,00 | Block Grant | - | 5500000 | 5.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 114 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Kel Bandungrejosari JL S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 8,00 | 35.000.000,00 | Block Grant | belanja habis Pakai | terfasilitasi Kegiatan Kelembagaan | 35.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 575 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Mulyorejo | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo , Kota Malang; | 100,00 | 378.200.000,00 | Block Grant | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan | 1368 | 550.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 171 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah kegiatan | Kel Bandungrejosari JL S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 12,00 | 45.000.000,00 | Block Grant | belanja habis pakai | Fasilitasi Kegiatan pemberdayaan perempuan dan Kegiatan Kesejahteraan Keluarga | 45.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 228 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah kegiatan | Kel Bandungrejosari JL S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 1,00 | 20.000.000,00 | Block Grant | belanja habis pakai | fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan | 20.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 285 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kel Bandungrejosari JL S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 1,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | belanja habis pakai | 1 dokument | 10.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 061 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bandulan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Raya Bandulan 103, Kota Malang; | 144,00 | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 45000000 | 45.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 118 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandulan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 8,00 | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 40000000 | 40.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 232 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bandulan | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 14,00 kegiatan | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 20000000 | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 289 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bandulan | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 1,00 | 15.000.000,00 | Block Grant | - | 20000000 | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 346 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Bandulan | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 0,00 kegiatan | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 36000000 | 36.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 399 | Penyusunan Profil Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah dokumen profil | Kel Bandungrejosari JL S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 1,00 | 21.000.000,00 | Block Grant | belanja habis pakai | Profil Kelurahan Bandungrejosari | 21.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 403 | Penyusunan Profil Kelurahan Bandulan | Jumlah dokumen profil | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 20.000.000,00 | Block Grant | - | 15000000 | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 456 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah modin dan perawat jenazah | Kel Bandungrejosari JL S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 29,00 | 87.700.000,00 | Block Grant | honorarium | honorarium | 87.700.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 460 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bandulan | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 41.100.000,00 | Block Grant | - | 61875000 | 61.875.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 517 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bandulan | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 46,00 | 143.400.000,00 | Block Grant | - | 180100000 | 180.100.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 513 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Kel Bandungrejosari JL S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 87,00 | 262.600.000,00 | Block Grant | Honorarium | Jumlah 67 penjaga tempat ibadah dan 12 penjaga makam Terfasilitasi - 1 Tahun | 262.600.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 574 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bandulan | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 130,00 | 397.500.000,00 | Block Grant | - | 512975000 | 512.975.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 117 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Karang Besuki | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl.Terusan Sigura gura blok D No. 174 Malang, Kota Malang; | 8,00 | 10.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah kegiatan | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 570 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kel Bandungrejosari JL S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 230,00 | 701.500.000,00 | Block Grant | Honorarium | meningkatnya jumlah anak didik membaca Alquran dan 212 Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu terfasilitasi | 701.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 060 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Karang Besuki | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi) | Jl.Terusan Sigura gura Blok D no 174 Malang, Kota Malang; | 48,00 Orang | 15.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah kegiatan | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 053 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukun | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi) | Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai - Kelurahan Sukun, Kota Malang; | 1,00 | 3.850.000,00 | Block Grant | Jumlah Anggota Linmas yang terlibat | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukun kepada Anggota LINMAS Kelurahan Sukun | 45.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 110 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukun | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | KELURAHAN SUKUN, Kota Malang; | 1,00 | 6.350.000,00 | Block Grant | Jumlah peserta Kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat Kelurahan Sukun | Jumlah peserta Kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat Kelurahan Sukun | 45.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 175 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandulan | Jumlah kegiatan | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 14,00 | 25.000.000,00 | Block Grant | - | 100000000 | 100.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 167 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun | Jumlah kegiatan | KELURAHAN SUKUN, Kota Malang; | 2,00 | 13.100.000,00 | Block Grant | Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun | Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun - 4 Kegiatan | 100.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 174 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Karang Besuki | Jumlah kegiatan | Jl.Terusan Sigura Gura Blok D Nomor 174 Malang, Kota Malang; | 3,00 kegiatan | 25.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah kegiatan dalam kurun waktu | 60.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 231 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Karang Besuki | Jumlah kegiatan | Jl.Terusan Sigura gura Blok D Nomor 174 Malang, Kota Malang; | 2,00 kegiatan | 20.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah kegiatan | 75.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 224 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sukun | Jumlah kegiatan | KELURAHAN SUKUN, Kota Malang; | 1,00 | 7.000.000,00 | Block Grant | Jumlah Lembaga Masyarakat yang terfasilitasi dalam Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang terfasilitasi dalam Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan | 30.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 288 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Karang Besuki | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl.Terusan Sigurgura blok D nomor 174 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 21.475.000,00 | Block Grant | - | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam musyawarah | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 281 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukun | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | KELURAHAN SUKUN, Kota Malang; | 80,00 | 9.870.000,00 | Block Grant | Jumlah masyarakat /peserta yang terlibat musvawarah | Jumlah masyarakat /peserta yang terlibat musvawarah | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 345 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Karang Besuki | Jumlah kegiatan | Jl.Terusan Sigurgura Blok D Nomor 174 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 15.000.000,00 | Block Grant | - | jumlah kegiatan | 50.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 338 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Sukun | Jumlah kegiatan | KELURAHAN SUKUN, Kota Malang; | 1,00 | 15.200.000,00 | Block Grant | Jumlah Kegiatan dan Kehadahiran Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukun | Jumlah Kegiatan dan Kehadahiran Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukun | 75.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 402 | Penyusunan Profil Kelurahan Karang Besuki | Jumlah dokumen profil | Jl.Terusan Sigura Gura Blok D No.174 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 790.500,00 | Block Grant | - | Jumlah DDK | 15.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 459 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Karang Besuki | Jumlah modin dan perawat jenasah | Jl.Terusan Sigura gura Blok D Nomor 174 Malang, Kota Malang; | 10,00 | 34.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah modin dan perawat jenasah yang terfasilitasi | 35.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 516 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Karang Besuki | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl.Terusan Sigura Gura Blok D No.174 Malang, Kota Malang; | 18,00 | 60.520.000,00 | Block Grant | - | Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang terfasilitasi | 66.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 452 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Sukun | Jumlah modin dan perawat jenasah | KELURAHAN SUKUN, Kota Malang; | 12,00 | 79.700.000,00 | Block Grant | Jumlah Modin dan Perawat Jenazah Terfasilitasi - 24 orang selama 1 Tahun | Jumlah Modin dan Perawat Jenazah Terfasilitasi - 24 orang selama 1 Tahun | 83.640.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 573 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Karangbesuki | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Kelurahan Karangbesuki Jl.Terusan Sigura gura Blok D no.174 Malang, Kota Malang; | 122,00 Orang | 420.100.000,00 | Block Grant | - | Jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu yg terfasilitasi | 426.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 509 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Sukun | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | KELURAHAN SUKUN, Kota Malang; | 46,00 | 152.300.000,00 | Block Grant | Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Terfasilitasi - 1 Tahun, 41 Orang Penjaga Tempat ibadah dan 5 Orang Penjaga Makam | Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Terfasilitasi - 1 Tahun, 41 Orang Penjaga Tempat ibadah dan 5 Orang Penjaga Makam | 158.740.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 059 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Pisangcandi | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi) | Jl. Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 48,00 | 22.500.000,00 | Block Grant | kegiatan monitoring keamanan lingkungan dilakukan di Kelurahan Pisangcandi | 36 kali monitoring | 35.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 116 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pisangcandi | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Anggur No 1 Malang, Kota Malang; | 8,00 lembaga | 40.500.000,00 | Block Grant | Terlaksananya kegiatan pembinaan kelembagaan sosial kemasyarakatan sesuai dengan target | 90 | 65.500.450,00 |
| 4 | 06 | 16 | 566 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Sukun | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | KELURAHAN SUKUN, Kota Malang; | 12,00 | 650.600.000,00 | Block Grant | Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Sukun yang terfasilitasi - Guru Ngaji 152 Orang dan Guru Sekolah Minggu 45 Orang | Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Sukun yang terfasilitasi - Guru Ngaji 152 Orang dan Guru Sekolah Minggu 45 Orang | 664.590.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 173 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pisangcandi | Jumlah kegiatan | Jl. Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 5,00 kegiatan | 45.056.500,00 | Block Grant | Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan | Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan | 55.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 230 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Pisangcandi | Jumlah kegiatan | Kelurahan Pisangcandi Jl. Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 20.000.000,00 | Block Grant | Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan | terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan | 25.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 115 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Taniungrejo | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Jl. Terusan Mergan Raya No. 1 Malang, Kota Malang; | 2,00 | 4.585.000,00 | Block Grant | - | 20000000 | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 287 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Pisangcandi | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Kelurahan Pisangcandi. Jalan Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 | 20.000.000,00 | Block Grant | Terakomodirnya usulan warga | Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku - 4 buku perencanaan pembangunan | 34.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 344 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Pisangcandi | Jumlah kegiatan | Kelurahan Pisangcandi. Jalan Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 kegiatan | 15.000.000,00 | Block Grant | Meningkatnya ketrampilan masyarakat | Terlaksananya pelatihan peningkatan ketrampilan bagi masyarakat | 28.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 172 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Taniungrejo | Jumlah kegiatan | Jl. Ters. Mergan Raya No.1 Malang, Kota Malang; | 3,00 | 30.978.750,00 | Block Grant | - | 75000000 | 75.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 401 | Penyusunan Profil Kelurahan Pisangcandi | Jumlah dokumen profil | Jl. Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 20.000.000,00 | Block Grant | Tersusunnya data profil kelurahan Pisangcandi yang ter update | Tersedianya profil kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan - 12 buku | 35.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 229 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tanjungrejo | Jumlah kegiatan | Jl. Ters. Mergan Raya No.1 Malang, Kota Malang; | 7,00 | 35.790.000,00 | Block Grant | - | 52000000 | 52.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 458 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Pisangcandi | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 17,00 | 50.500.000,00 | Block Grant | Terbinanya Modin dan Perawat Jenazah di Kelurahan Pisangcandi | Jumlah Modin dan Perawat Jenazah | 55.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 286 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tanjungrejo | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | Jl. Ters. Mergan Raya No.1 Malang, Kota Malang; | 1,00 | 9.200.000,00 | Block Grant | Sebelum pelaksanaan musrenbangkel, diselenggarakan kegiatan pra-musrenbangkel sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan kelurahan | 11000000 | 11.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 515 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Pisangcandi | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 39,00 | 123.460.000,00 | Block Grant | Terbinanya penjaga makam dan tempat ibadah | Jumlah penjaga makam dan tempat ibadah | 135.250.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 572 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Pisangcandi | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 128,00 Orang | 407.425.000,00 | Block Grant | Terbinanya Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu | Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu | 435.250.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 343 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo | Jumlah kegiatan | Jl. Terusan Mergan Raya No.1 Malang, Kota Malang; | 7,00 | 22.525.000,00 | Block Grant | - | 26000000 | 26.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 400 | Penyusunan Profil Kelurahan Tanjungrejo | Jumlah dokumen profil | Jl. Terusan Mergan Raya No. 1 Malang, Kota Malang; | 100,00 | 6.700.000,00 | Block Grant | - | 7500000 | 7.500.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 457 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tanjungrejo | Jumlah modin dan perawat jenazah | Jl. Ters. Mergan Raya No.1 Malang, Kota Malang; | 35,00 | 118.650.000,00 | Block Grant | - | 120000000 | 120.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 16 | 514 | Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tanjungrejo | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jl. Ters. Mergan Raya No.1 Malang, Kota Malang; | 45,00 | 152.150.000,00 | Block Grant | - | 160000000 | 160.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 571 | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tanjungrejo | Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu | Jl. Ters. Mergan Raya No.1 Malang, Kota Malang; | 170,00 | 570.900.000,00 | Block Grant | - | 579300000 | 579.300.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 454 | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Gadang | Jumlah modin dan perawat jenasah | Jl.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 21,00 | 65.100.000,00 | Block Grant | - | 240 | 70.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 342 | Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah kegiatan | jl S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 1,00 Orang | 20.000.000,00 | Block Grant | belanja pakai habis | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukun - 2KEgiatan | 20.000.000,00 |
| 4 | 06 | 16 | 395 | Penyusunan Profil Kelurahan Sukun | Jumlah dokumen profil | Kelurahan Sukun, Kota Malang; | 1,00 Dokumen | 200.000,00 | Block Grant | Jumlah formulir profil yang telah diisi dan dimutakhirkan | Jumlah formulir profil yang telah diisi dan dimutakhirkan | 9.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik | Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kewilayahan | | 30,00 % | 2.671.693.850,00 | | | | 5.013.175.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 001 | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 11,00 | 16.500.000,00 | Block Grant | Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | 20.625.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 17 | 002 | Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpas) | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 1,00 | 6.000.000,00 | Block Grant | Data base kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpas) | Data base kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpas) | 7.500.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 050 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Kolonel Sugiono Gg.8 No.1 Malang, Kota Malang; | 14,00 | 226.500.000,00 | Block Grant | Swakelola Tipe IV - POKMAS | Jumlah infrastruktur yang diperbaiki | 500.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 051 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Gadang | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl.Kol.Sugiono No.190, Kota Malang; | 10,00 | 233.700.000,00 | Block Grant | - | 10 Paket | 400.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 052 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kebonsari | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl.S.Supriadi No 15, Kota Malang; | 12,00 | 120.447.000,00 | Block Grant | Sarana dan Prasarana umum di lingkungan Pemukiman /perumahan terpelihara dengan baik | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan Kelurahan | 515.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 053 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bandungrejosari | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kel Bandungrejosari Jl S Supriadi 30 Malang , Kota Malang; | 15,00 | 300.000.000,00 | Block Grant | Swakelola Tipe 4 | infrastruktur yang baik | 300.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 049 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukun | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Sukun, Kota Malang; | 9,00 | 280.000.000,00 | Block Grant | Swakelola Tipe IV - POKMAS | Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki | 500.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 054 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tanjung Rejo | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Terusan Mergan Raya Nomor 1 Malang, Kota Malang; | 2,00 | 185.236.350,00 | Block Grant | Pelaksanaan swakelola kelompok masyarakat (pokmas) / swakelola type 4 | 420000000 | 420.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 06 | 17 | 055 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Pisangcandi | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Anggur No. 1 Malang, Kota Malang; | 12,00 | 330.110.500,00 | Block Grant | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Umum di Kelurahan Pisangcandi | Jumlah Kegiatan Peningkatan Prasarana dan sarana Publik Lingkungan Kelurahan | 400.050.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 056 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Karang Besuki | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Kelurahan Karangbesuki Jl.Terusan Sigurga Blok D no.174 Malang, Kota Malang; | 4,00 | 200.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah infrastruktur yang di pelihara | 500.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 057 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bandulan | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl. Raya Bandulan 103 Malang, Kota Malang; | 7,00 | 250.000.000,00 | Block Grant | Usulan melalui Musrenbangkel. | 500000000 | 500.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 058 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mulyorejo | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jalan Budi Utomo No. 1 Mulyorejo , Kota Malang; | 100,00 | 250.000.000,00 | Block Grant | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | 10 | 500.000.000,00 |
| 4 | 06 | 17 | 059 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | Jl Pelabuhan Ketapang No. 01 Malang, Kota Malang; | 8,00 | 273.200.000,00 | Block Grant | Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana di kelurahan Bakalankrajan | peningkatan kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Bakalankrajan | 450.000.000,00 |
| 5 | | | | Urusan Umum | | | | 1.001.000.000,00 | | | | 1.324.625.000,00 |
| 5 | 01 | | | Umum | | | | 1.001.000.000,00 | | | | 1.324.625.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 85,00 | 1.001.000.000,00 | | | | 1.324.625.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Kecamatan Sukun, Kota Malang; | 935,00 Surat | 55.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah surat keluar terkirim | 100.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | |
|------|----|----|-----|--|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 12,00 | 62.000.000,00 | Block Grant | - | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 72.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 1.368,00 m2 | 65.000.000,00 | Block Grant | - | Luasan ruangan yang dibersihkan, terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor dan kebutuhan bahan pembersih | 82.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 33,00 Peralatan | 50.000.000,00 | Block Grant | Jumlah alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kanto | 70.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 8,00 | 16.000.000,00 | Block Grant | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 11.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 6,00 | 5.000.000,00 | Block Grant | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 6.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 3,00 | 6.000.000,00 | Block Grant | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 6.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 2.500,00 Orang | 225.000.000,00 | Block Grant | Jumlah makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 337.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 11,00 | 65.000.000,00 | Block Grant | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 70.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 045 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 3,00 | 85.000.000,00 | Block Grant | Terbayarnya honor petugas pengamanan kantor | Terbayarnya honor petugas pengamanan kantor | 120.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 050 | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 1,00 | 20.000.000,00 | Block Grant | Jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidentil yang diikuti | Jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidentil yang diikuti | 25.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 380,00 m2 | 25.000.000,00 | Block Grant | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 18.500.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 025 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 1,00 | 140.000.000,00 | Block Grant | jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi | jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi | 200.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 9,00 | 44.000.000,00 | Block Grant | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 55.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 53,00 | 7.500.000,00 | Block Grant | jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 9.375.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 17,00 | 98.000.000,00 | Block Grant | Jumlah laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | 100.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 2,00 | 3.000.000,00 | Block Grant | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | 3.750.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 009 | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 1,00 | 2.500.000,00 | Block Grant | Jumlah dokumen standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | 3.000.000,00 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2022 | | |
|------|----|----|-----|---|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 4,00 | 3.500.000,00 | Block Grant | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 5.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Kecamatan Sukun, Kota Malang; | 1,00 | 3.500.000,00 | Block Grant | - | dokumen reviu Renstra | 5.000.000,00 |
| 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | KECAMATAN SUKUN, Kota Malang; | 3,00 % | 20.000.000,00 | Block Grant | Jumlah rencana kerja yang tersusun sesuai ketentuan | Jumlah rencana kerja yang tersusun sesuai ketentuan | 25.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

Tabel 5.3
Hasil Pemetaan Program dan Kegiatan

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------|---|---|--|-----------|---------------|---|--|---|--|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|--------|---------------|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Dinas Pendidikan | 4 | | Urusan Pemerintah an Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | |
| | 4 | 403 | | | | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1 | 01 |
| | | | | | | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | 1 | 01 02 |
| | | | | | | | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | 1 | 01 02 2.01 |
| | 4 | 403 1 18 | | Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal | APM PAUD | 81,4 | % | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | APK PAUD | | | | | | | | |
| | | | | | APK PAUD | 90,88 | % | | APM PAUD | | | | | | | | |
| | | | | | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD | 20 | % | | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD | | | | | | | | |
| | | | | | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF | 20 | % | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF | | | | | | | | |
| | 4 | 403 1 18 [4.0] | | Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian PAUD PNF menuju SNP | Jumlah Lembaga yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD | 605 | lembaga | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Lembaga yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF yang ditetapkan | Program Pengembangan Kurikulum | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 03 2.02 02 |
| | 4 | 403 1 18 [4.0] | | Pemetaan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF | Jumlah dokumen hasil Kajian Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF | 1 | Dokumen | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah dokumen hasil Kajian Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 03 2.02 01 |
| | | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah dokumen hasil Kajian Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana PNF | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | |
| | | | | Fasilitasi kegiatan satuan pendidikan SKB | Jumlah warga belajar yang memperoleh fasilitasi pendidikan | 711 | peserta didik | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah warga belajar yang memperoleh fasilitasi pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 02 2.04 10 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---|--|-----------|------------------|---|--|--|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | Fasilitasi kegiatan PLA | Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi | 57 | peserta didik | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 12 |
| | | | | Pembinaan peningkatan mutu kelembagaan PAUD PNF | Jumlah lembaga yang memperoleh pembinaan | 60 | peserta | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah lembaga PAUD yang memperoleh pembinaan | Pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 17 |
| | | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah lembaga Nonformal/Kesetaraan yang memperoleh pembinaan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF sesuai SPM menuju SNP | Jumlah pengajuan sarana prasarana PAUD dan PNF | 161 | lembaga | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah pengajuan sarana prasarana PAUD dan PNF | Pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 02 |
| | | | | | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah pengajuan sarana prasarana Sekolah Non Formal/Kesetaraan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 02 |
| | | | | Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan PAUD dan PNF sesuai SPM Menuju SNP | Jumlah unit bangunan PAUD dan PNF yang dibangun/ direhabilitasi | 9 | lembaga | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah unit bangunan PAUD dan PNF yang dibangun/ direhabilitasi | Pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 03 |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah unit bangunan PAUD dan PNF yang dibangun/ direhabilitasi | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 03 |
| | | | | Penguatan Ekosistem Pendidikan bagi Pembangunan Karakter PAUD dan PNF | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terhadap ekosistem pendidikan | 175 | lembaga PAUD PNF | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terhadap ekosistem pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 16 |
| | | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terhadap ekosistem pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---|--|---------------|---------------|--|--|--|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------|------|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | penyusunan bahan perumusan, kordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan bakat dan minat prestasi dan pembangunan karakter | Jumlah dokumen bahan perumusan yang dihasilkan | 1 | Dokumen | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah dokumen bahan perumusan yang dihasilkan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah dokumen bahan perumusan yang dihasilkan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | | | | | | |
| | | | | Fasilitasi BOP PAUD dan PNF | Jumlah peserta didik PAUD dan Warga belajar PNF yang mendapatkan BOP | 580 | lembaga | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah peserta didik PAUD dan Warga belajar PNF yang mendapatkan BOP | Pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 11 | |
| | | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah peserta didik PAUD dan Warga belajar PNF yang mendapatkan BOP | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 10 | |
| | | | | Penyediaan Operasional TK Pembina 1 | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | 214 | peserta didik | Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar PAUD | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 10 | |
| | | | | Penyediaan Operasional TK Pembina 2 | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | 151 | peserta didik | Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar PAUD | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 10 | |
| | | | | Penyediaan Operasional TK Pembinaan 3 | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | 74 | peserta didik | Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar PAUD | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 10 | |
| | | | | Penyediaan Operasional TK Pembinaan 5 | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | 81 | peserta didik | Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar PAUD | Jumlah lembaga yang mendapat BOP | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD, APM PAUD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 10 | |
| | | | | | APK SD | 110,11 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | APM SD | 106,15 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SD | 20 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | APK SMP | 105,25 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | APM SMP | 85,67 | % | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---|---|-----------|-------------------|---|---|---|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP | 20 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar menuju SNP | Jumlah Pembinaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian | 425 | Satuan pendidikan | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Pembinaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian SD | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan | Program Pengembangan Kurikulum | APK SD, APM SD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 04 |
| | | | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian | 1 | Dokumen | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 24 |
| | | | | | | | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 37 |
| | | | | Pemetaan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar | Jumlah Kajian Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar | 1 | Dokumen Kajian | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Kajian Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan SD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 28 |
| | | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Kajian Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 |
| | | | | Pembinaan peningkatan mutu kelembagaan | Jumlah pembinaan peningkatan mutu kelembagaan | 245 | lembaga | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah pembinaan peningkatan mutu kelembagaan SD dan SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SD dan SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 28 |
| | | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah pembinaan peningkatan mutu kelembagaan SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitasi pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------------|---|---|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|------|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP | Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP | 222 | Satuan pendidikan | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD dan SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 06 |
| | | | | | | | | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 14 | |
| | | | | | | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 22 | |
| | | | | | | | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 27 | |
| | | | | | | | | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 25 | |
| | | | | | | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 35 | |
| | | | | | | | | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 28 | |
| | | | | | Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Pendidikan Dasar sesuai SPM Menuju SNP | Jumlah unit bangunan Pendidikan Dasar yang dibangun/ direhabilitasi | 80 | lembaga | Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas | Jumlah unit bangunan Pendidikan SD yang dibangun/ direhabilitasi | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 08 |
| | | | | | | | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah unit bangunan Pendidikan Dasar yang dibangun/ direhabilitasi | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|--|-------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|------|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah unit bangunan Pendidikan SMP yang dibangun/direhabilitasi | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | |
| | | | | | Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera Pendidikan Dasar | Jumlah siswa prasejahtera Pendidikan Dasar yang mendapatkan bantuan sarana sekolah | 1180 | peserta didik | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah siswa prasejahtera Pendidikan Dasar yang mendapatkan bantuan sarana sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD dan SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 16 |
| | | | | | | | | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah siswa prasejahtera Pendidikan SD yang mendapatkan bantuan sarana sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 17 | |
| | | | | | Penguatan Ekosistem Pendidikan bagi Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terhadap ekosistem pendidikan | 425 | lembaga | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan penguatan Ekosistem Pendidikan bagi Pembangunan Pendidikan Karakter | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SD dan SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 28 |
| | | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan penguatan Ekosistem Pendidikan bagi Pembangunan Pendidikan Karakter | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | |
| | | | | | Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan bakat dan minat prestasi dan pembangunan karakter | Jumlah dokumen bahan perumusan yang dihasilkan | 1 | Dokumen | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Dokumen pembinaan bakat dan minat prestasi dan pembangunan karakter SD dan SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SD dan SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 |
| | | | | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Dokumen pembinaan bakat dan minat prestasi dan pembangunan karakter SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | |
| | | | | | Peningkatan Mutu Pendidikan Inklusif Pendidikan Dasar | Jumlah pembinaan dalam meningkatkan mutu pendidikan Inklusi | 75 | lembaga | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah pembinaan dalam meningkatkan mutu pendidikan Inklusi di SD dan SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 23 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|------|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah pembinaan dalam meningkatkan mutu pendidikan Inklusi di SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 36 | |
| | | | | | Pembinaan minat, bakat, prestasi akademis dan non akademis dan pembangunan pendidikan karakter Pendidikan Dasar | Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional | 102 | Prestasi | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah prestasi siswa SD dan SMP tingkat provinsi dan nasional | Pengelolaan Pendidikan Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SD dan SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 |
| | | | | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP | Jumlah prestasi siswa SMP tingkat provinsi dan nasional | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | |
| | | | | | Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Pendidikan Dasar | Jumlah Siswa Baru SD dan SMP | 29150 | Peserta Didik Pendidikan Dasar | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Ujian SD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 23 |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Ujian SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 36 | |
| | | | | | Fasilitasi BOS | Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitasi | 425 | lembaga | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitasi | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD dan SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 21 |
| | | | | | | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitasi | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK fasilitasi, APM fasilitasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 32 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan | Jumlah Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan | 1 | Inovasi | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan SD dan SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 28 |
| | | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------------|-------------------|--|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Jenjang Pendidikan Dasar | Jumlah siswa yang menerima bantuan | 195 | Satuan pendidikan | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah siswa yang menerima bantuan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD dan SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 21 | |
| | | | | | | | 27 | Satuan pendidikan | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah siswa yang menerima bantuan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SMP, APM SMP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 32 | |
| | | | | | Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar | Jumlah siswa yang menerima bantuan | 195 | Satuan pendidikan | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah siswa yang menerima bantuan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 21 | |
| | | | | | | | 27 | Satuan pendidikan | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah siswa yang menerima bantuan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 36 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Apresiasi Pendidikan Malang Berkarakter dan Berbudaya | Jumlah Penerima Apresiasi Pendidikan yang diberikan | | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Penerima Apresiasi Pendidikan yang diberikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| | | | | | | | | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Penerima Apresiasi Pendidikan yang diberikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD, APM SD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| | | | | | Program Pembinaan Ketenagaan | Persentase Guru tersertifikasi | 91,55 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase profesionalitas dan keahlian Teknis Tenaga Pendidikan | 42 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi pengembangan keprofesian Guru berbasis Komunitas (PKG) | Jumlah Komunitas PKG yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) | 5 | Komunitas | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Komunitas PKG yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru tersertifikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------------|-----------|---|---|--|--|--|---|---------------------------------------|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pembinaan dan fasilitasi pengembangan Karakter Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD PNF yang memperoleh peningkatan kompetensi dan profesionalitas | 250 | peserta | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Komunitas yang memperoleh fasilitasi pengembangan keprofesian guru | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 |
| | | | | | Pembinaan lomba Penilik, tutor dan tenaga kependidikan berprestasi PAUD PNF | Jumlah penilik, tutor, dan Tenaga Kependidikan berprestasi yang mendapatkan pembinaan | 40 | peserta | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Komunitas yang memperoleh fasilitasi pengembangan keprofesian guru | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 16 |
| | | | | | Fasilitasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD PNF | Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional | 940 | peserta | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Komunitas yang memperoleh fasilitasi pengembangan keprofesian guru | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 17 |
| | | | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga Madin | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 16 |
| | | | | | Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi | 1 | Dokumen | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Pemetaan | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai kualitas sesuai SPM | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 |
| | | | | | | | | | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Distribusi hasil Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai kualitas sesuai SPM | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Fasilitasi pengembangan keprofesian Guru berbasis Komunitas (KKG dan MGMP) | Jumlah kajian yang dilakukan (kajian sebagai dasar penentuan rotasi) | 15 | Komunitas | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah kajian yang dilakukan (kajian sebagai dasar penentuan rotasi) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru tersertifikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|---|--|-------------|---|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah kajian yang dilakukan (kajian sebagai dasar penentuan rotasi) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru tersertifikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar | Jumlah Komunitas yang memperoleh fasilitasi pengembangan keprofesian guru | 192 | peserta | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Komunitas yang memperoleh fasilitasi pengembangan keprofesian guru | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru tersertifikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 |
| | | | | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Komunitas yang memperoleh fasilitasi pengembangan keprofesian guru | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru tersertifikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar memperoleh peningkatan kompetensi dan profesionalitas | 230 | peserta | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar memperoleh peningkatan kompetensi dan profesionalitas | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru tersertifikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 |
| | | | | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar memperoleh peningkatan kompetensi dan profesionalitas | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru tersertifikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| | | | | | Pembinaan Lomba Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis | 6 | Prestasi | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru tersertifikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 |
| | | | | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru tersertifikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| | | | | | Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pendidikan dasar | Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional | 420 | peserta | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru tersertifikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|------|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Guru tersertifikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| | | | | | Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | 51 % | 51 % | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | 2 | 22 | 02 | |
| | | | | | Pengelolaan Sejarah dan Nilai Tradisi | Jumlah Kegiatan Sejarah dan Nilai Tradisi yang dikelola | 14 | Sejarah dan Nilai Tradisi | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah Kegiatan Sejarah dan Nilai Tradisi yang dikelola | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pembinaan sejarah lokal yang dilakukan | Program Pembinaan Sejarah | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pembinaan dan pemberdayaan pelaku sejarah dan nilai tradisi | Jumlah Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dibina dan diberdayakan | 50 | Sejarah dan Nilai Tradisi | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dibina dan diberdayakan | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pembinaan sejarah lokal yang dilakukan | Program Pembinaan Sejarah | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola | 35 | BCB | Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah cagar budaya yang ditetapkan | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 05 | 2.01 | 02 |
| | | | | | | | | Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah cagar budaya yang ditetapkan | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 05 | 2.01 | 01 | |
| | | | | | Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan museum | Jumlah pengunjung yang memanfaatkan museum | 3800 | Pengunjung | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Museum | Jumlah pengunjung yang memanfaatkan museum | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Jumlah museum yang dikelola | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | | | Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah pengunjung yang memanfaatkan museum | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Jumlah museum yang dikelola | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 04 | |
| | | | | | Pengembangan Industri Budaya | Jumlah Komunitas yang mengikuti pengembangan Budaya | 25 | Komunitas | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Komunitas yang mengikuti pengembangan Budaya | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas yang diberikan kepada masyarakat pelaku budaya | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 02 | 2.03 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|---|---------------|------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Penyediaan Sarana Prasarana Kebudayaan | Jumlah sarana prasarana yang difasilitasi/disediakan | 10 | Komunitas Budaya | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | Jumlah sarana prasarana yang difasilitasi/disediakan | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga adat yang dibina | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 02 | 2.03 | 03 |
| | | | | | Diplomasi dan Promosi Budaya | Jumlah Seniman yang mengikuti diplomasi dan promosi budaya | 150 | Seniman | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Seniman yang mengikuti diplomasi dan promosi budaya | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 05 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Fasilitasi partisipasi masyarakat, seniman dan budayawan | Jumlah kegiatan masyarakat, seniman dan budayawan yang difasilitasi | 10 | Fasilitasi | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah kegiatan masyarakat, seniman dan budayawan yang difasilitasi | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas yang diberikan kepada masyarakat pelaku budaya | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pembinaan, Pemberdayaan dan Apresiasi Pelaku Seni Budaya | Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dibina, diberdayakan dan diapresiasi | 50 | Seniman | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dibina, diberdayakan dan diapresiasi | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas yang diberikan kepada masyarakat pelaku budaya | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pergelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru | Jumlah Pergelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru | 3 | Pergelaran | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Pergelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan | Jumlah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga dan Pranata Kebudayaan | | | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga dan Pranata Kebudayaan | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pembinaan kesenian yang diberikan kepada masyarakat pelakunya | Program Pengembangan Tradisional | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| | | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Prosentase dokumen perencanaan, keuangan, pelaporan yang disusun tepat waktu | 86,41% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi | Jumlah sistem informasi | 4 | Aplikasi | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah sistem informasi/aplikasi | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Aplikasi yang ditetapkan dari Domain yang Telah Ditetapkan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|----------|--|--|---|---|--|---|--|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah | 30 | Dokumen | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah untuk Administrasi laporan Keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | | Penyusunan LAKIP SKPD | LAKIP 2019 Dinas Pendidikan | 1 | dokumen | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja untuk Administrasi laporan Keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.02 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 1 | dokumen | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah barang milik daerah yang dihapus | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk Administrasi laporan Keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | | Penyusunan bahan anjab/ABK SKPD | Jumlah dokumen ANJAB ABK | 1 | Dokumen | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah bahan anjab/abk skpd | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk Administrasi laporan Keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Temuan Pengawasan | 3 | Kegiatan | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan untuk Administrasi laporan Keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.02 | 05 |
| | | | | | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Dokumen | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) | jumlah Dokumen Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi 2018 Dinas Pendidikan | 1 | Dokumen | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peserta Bimtek yang mengikuti Impelementasi Peraturan Undang-undang | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah peserta bimtek yang mengikuti Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.04 | 11 |
| | | | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 1 | Dokumen | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA untuk perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--------------|--|--|---|---|--|---|--|---|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan | Jumlah dokumen ISO | 1 | Dokumen | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah sertifikasi | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.01 | 05 | |
| | | | | | Penyusunan Review Renstra | Jumlah dokumen renstra | 1 | Dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.01 | 01 | |
| | | | | | Penyusunan Renja/RKT | jumlah dokumen Renja/RKT | 1 | Dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renja/RKT | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.01 | 01 | |
| | | | | | Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI) | jumlah Dokumen Sistem Pengawasan Internal (SPI) | 1 | Dokumen | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI) | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah peserta bimtek yang mengikuti Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Profil Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah | 1 | Dokumen | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | 1 | Dokumen | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen standar pelayanan | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.01 | 05 | |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | jumlah mobil jabatan yang dipelihara | 2 | Unit | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi pemeliharaan mobil jabatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 29 | |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan yang layak pakai | 67 | Unit | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi pemeliharaan kendaraan dinas | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 30 | |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 11 | Perlengkapan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi pemeliharaan gedungkantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 28 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|--|-------------|--------|--|--|-------------------|---|--|--|--|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung yang terpelihara | 4 | Unit | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi pemeliharaan peralatan gedung kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi | Jumlah sarana telekomunikasi | 12 | Bulan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah jaringan telekomunikasi | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi pemeliharaan peralatan gedung kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |
| | | | | | Pemeliharaan Taman Perkantoran | Jumlah Luas Taman yang Dipelihara | 1 | Taman | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah taman yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi pemeliharaan gedungkantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 32 |
| | | | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat | 175668 | Surat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi jasa surat menyurat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | | | | | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik | 19 | Aset | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi jasa komunikasi SDA dan Listrik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 69 | Unit | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi jasa Jaminan Barang Milik Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 05 |
| | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak jalan | 69 | Unit | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |
| | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah luas pelaksanaan pembersihan setiap hari | 5 | Lokasi | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Jasa Kebersihan Kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah pengadaan alat tulis kantor | 111 | ATK | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Penyediaan Alat Tulis Kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|---|-------------|------------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------------|--|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 57845 | Cetakan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi pemeliharaan mobil jabatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik | 12 | Komponen | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |
| | | | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | 10 | Peralatan | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Penyediaan Jasa Peralatan Kantor dan perlengkapan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 03 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan peraturan perundangan | 300 | eksemplar | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 95883 | Kotak | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Penyediaan Makanan dan Minuman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah perjalanan dinas yang terpenuhi | 795 | perjalanan Dinas | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jumlah pengaman kantor yang tersedia | 12 | Orang | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Gedung Kantor | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |
| | | | | | penyedia jasa informasi, publikasi dan komunikasi | Jumlah informasi yang dipublikasikan | 74 | Publikasi | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |
| | | | | | Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas | Jumlah tamu-tamu kedinasan | 1250 | Tamu | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah tamu-tamu dinas | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Penyediaan Makanan dan Minuman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|---|-------------|-----------|--|---|---|--|--|--|--|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Kegiatan Insidentil | Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi | 1 | Kegiatan | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah fasilitasi kegiatan insidentil yang diselenggarakan | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Penyediaan Makanan dan Minuman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu | 3 | Kegiatan | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah kegiatan fasilitasi peringatan hari jadi provinsi jawa | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Penyediaan Makanan dan Minuman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Administrasi Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.04 | 05 |
| | | | | | Penyedia jasa Pengemudi/supir Dinas | jumlah pengemudi/supir dinas | 22 | Pengemudi | Pengadaan Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pengadaan Mobil Jabatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 19 |
| | | | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 20 |
| | | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 29 |
| | | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 1 | Gedung | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Gedung Kantor | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Perlengkapan Gedung Kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|------|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Gedung Kantor | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 24 | |
| | | | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah mebelair yang diadakan | 45 | Unit | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |
| | | | | | Pengadaan Mebelair | Jumlah Pakaian yang diadakan | 45 | Unit | Pengadaan Mebeleur | Jumlah mebeleur | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pengadaan Mebeleur | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 25 |
| | | | | | Pengadaan BBM dan Pelunas | Jumlah peserta peningkatan/peimbangan sumber daya aparatur | 94662 | Liter | Pengadaan Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pengadaan Mobil Jabatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 19 |
| | | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 20 | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 29 | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah Administrasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.03 | 30 | |
| | | | | | Peningkatan/peimbangan sumber daya aparatur | Jumlah | 109 | Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikeimbangan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Formal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|-----------|---------------|---|---|-------------|---------------------------|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| Dinas Kesehatan | | | Kesehatan | | | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 02 | | | |
| | | | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | 100 | % | | | | | | | | | 1 | 02 | 02 | | |
| | | | | | | Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat | 100 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penguatan manajemen Puskesmas | Jumlah puskesmas yang mengikuti kegiatan penguatan manajemen puskesmas | 16 | Puskesmas | Peningkatan Tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten/ kota | Jumlah puskesmas yang mengikuti kegiatan penguatan manajemen puskesmas | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah puskesmas yang mengikuti kegiatan penguatan manajemen puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 02 |
| | | | | | Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan primer | Jumlah Klinik swasta yang mengikuti pembinaan fasilitas kesehatan primer | 80 | klinik | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Klinik swasta yang mengikuti pembinaan fasilitas kesehatan primer | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota | Jumlah Klinik swasta yang mengikuti pembinaan fasilitas kesehatan primer | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 03 |
| | | | | | Reakreditasi puskesmas | Jumlah puskesmas yang mengikuti reaktreditasi puskesmas | 1 | Puskesmas | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota | Jumlah puskesmas yang mengikuti reaktreditasi puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah puskesmas yang mengikuti reaktreditasi puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 35 |
| | | | | | Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin | Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (SPM) | 200 | orang | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (SPM) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (SPM) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 |
| | | | | | Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Kota Malang (Pajak Rokok) | Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN | 30,064 | orang | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 |
| | | | | | Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Kota Malang | Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN | 218,499 | orang | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--|--------|---------------|---|---|-------------|---------------------------|--|---|---|---|---|--|---------------|--------|------|----|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan | Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan primer kepada peserta jaminan kesehatan nasional | 16 | FKTP | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan primer kepada peserta jaminan kesehatan nasional | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan primer kepada peserta jaminan kesehatan nasional | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 |
| | | | | | | Pengelolaan dana non kapitasi pada fasilitas kesehatan | Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan nasional | 16 | FKTP | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan nasional | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan nasional | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 |
| | | | | | | Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Krisis Kesehatan | Jumlah masyarakat yang memahami penanggulangan bencana / krisis kesehatan yang cepat dan tepat sasaran | 140 | orang | Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah masyarakat yang memahami penanggulangan bencana / krisis kesehatan yang cepat dan tepat sasaran | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang memahami penanggulangan bencana / krisis kesehatan yang cepat dan tepat sasaran | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 24 |
| | | | | | | Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan | Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus kredensialing | 20 | RS | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota | Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus kredensialing | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus kredensialing | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 35 |
| | | | | | | Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional | 26 | RS | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 01 |
| | | | | | | Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Kecelakaan | Jumlah tenaga kesehatan yang memahami pencegahan dan penanggulangan gangguan kecelakaan | 240 | orang | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan yang memahami pencegahan dan penanggulangan gangguan kecelakaan | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga kesehatan yang memahami pencegahan dan penanggulangan gangguan kecelakaan | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | | 1 | 02 | 03 | 2.04 | 01 |
| | | | | | | Penguatan dan Operasional Publik Safety Center | Jumlah pelayanan PSC yang diberikan pada masyarakat | 192 | pelayanan | Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah pelayanan PSC yang diberikan pada masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelayanan PSC yang diberikan pada masyarakat | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 34 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--|--------|---------------|--|--|-------------|---------------------------|--|--|--|--|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | | | Pembinaan dan Penilaian Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Ketrampilan | Jumlah peserta pemanfaatan tanaman obat keluarga dan ketrampilan | 48 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah peserta pemanfaatan tanaman obat keluarga dan ketrampilan | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pemanfaatan tanaman obat keluarga dan ketrampilan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 05 | 2.02 | 19 |
| | | | | | | Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional | Jumlah penyehat tradisional yang dibina, diawasi dan dievaluasi. | 210 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah penyehat tradisional yang dibina, diawasi dan dievaluasi. | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penyehat tradisional yang dibina, diawasi dan dievaluasi. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 19 |
| | | | | | | Operasional Puskesmas Kedungkandang | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | | Operasional Puskesmas Kendalsari | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | | Operasional Puskesmas Arjuno | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | | Operasional Puskesmas Bareng | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | | Operasional Puskesmas Pandanwangi | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | | Operasional Puskesmas Cisadea | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|------------------------------------|--|-------------|--------|---------------------------------|--|--|--|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Operasional Puskesmas Kendalkerep | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Operasional Puskesmas Mojolangu | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Operasional Puskesmas Dinoyo | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Operasional Puskesmas Janti | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Operasional Puskesmas Ciptomulyo | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Operasional Puskesmas Mulyorejo | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Operasional Puskesmas Arjowinangun | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Operasional Puskesmas Gribig | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|---|-------------|---------------------|---|---|---|---|---|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Operasional Puskesmas Polowijen | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | |
| | | | | | Operasional Puskesmas Rampal Celaket | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | |
| | | | | | Rehab Rumah Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Malang | Jumlah gedung UPT/ fasilitas pelayanan kesehatan yang direhab | 8 | puskesmas dan pustu | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah gedung Puskesmas/ Pustu yang direhab/ dipelihara | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah gedung Puskesmas/ Pustu yang direhab/ dipelihara | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rumah Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Malang | Jumlah gedung UPT/ fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara | 10 | puskesmas dan pustu | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah gedung Puskesmas/ Pustu yang direhab/ dipelihara | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah gedung Puskesmas/ Pustu yang direhab/ dipelihara | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | |
| | | | | | Pengadaan lahan | Jumlah lahan yang diadakan | 1 | lahan | Pembangunan Puskesmas | Jumlah lahan yang diadakan untuk Pembangunan Puskesmas Bareng | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Lahan yang diadakan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM | | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | |
| | | | | | Program BLUD Puskesmas | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | 100 | % | | | | | | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | | | | | | |
| | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kendal Kerep | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | |
| | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Pandanwangi | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------------|--------|---------------------------------|---|--|---|---|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kedung kandang | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Gribig | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Arjowinangun | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Janti | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Ciptomulyo | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Mulyorejo | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Dinoyo | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Mojolangu | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--|--------|---------------|--|---|-------------|---------------------------|--|---|--|---|---|--|---------------|--------|------|----|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Arjuno | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Bareng | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Rampal Celaket | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Cisadea | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kendalsari | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Polowijen | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 |
| | | | | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Jumlah puskesmas yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD | 16 | Puskesmas | Peningkatan Tata kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah puskesmas yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah puskesmas yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | | | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 02 |
| | | | | | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan | Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab | 100 | % | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|--|-------------|----------------------|---|--|---|--|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pengawasan, Pembinaan Keamanan Pangan | Jumlah sarana pangan yang dibina dan diawasi | 300 | sarana pangan | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah sarana pangan yang dibina dan diawasi | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar | | | 1 | 02 | 04 | 2.03 | 01 |
| | | | | | Pengadaan obat-obatan, reagen dan Bahan Medis Pakai (BMHP) Puskesmas | Jumlah Obat-obatan, reagen, dan bahan medis habis pakai (BMHP) Puskesmas | 120; 15 | item obat, item BMHP | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat-obatan dan Reagen Puskesmas | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Obat-obatan, reagen, dan bahan medis habis pakai (BMHP) Puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 16 |
| | | | | | | | | | Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai | Jumlah Bahan medis habis pakai Puskesmas | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Obat-obatan, reagen, dan bahan medis habis pakai (BMHP) Puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 2 | 02 | 02 | 2.01 | 17 |
| | | | | | Perijinan, Pendataan dan Pembinaan Tenaga Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan yang berijin | 6000 | orang | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan yang berijin | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga kesehatan yang berijin | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Tenaga Medis yang berkompeten | | | 1 | 02 | 03 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang yang ditingkatkan kemampuannya | 450 | orang | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang yang ditingkatkan kemampuannya | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang yang ditingkatkan kemampuannya | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Tenaga Medis yang berkompeten | | | 1 | 02 | 03 | 2.04 | 01 |
| | | | | | Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Kota Malang | Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang memenuhi syarat dalam mengikuti pemilihan tenaga kesehatan teladan | 50 | orang | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang memenuhi syarat dalam mengikuti pemilihan tenaga kesehatan teladan | Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten/Kota | Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang memenuhi syarat dalam mengikuti pemilihan tenaga kesehatan teladan | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Tenaga Medis yang berkompeten | | | 1 | 02 | 03 | 2.05 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--------------------------|--|--|---|--|---|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|--|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
| | | | | | Pembinaan Kelompok Budaya Kerja | Jumlah tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Malang dalam pembinaan Kelompok Budaya kerja | 30 | orang | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Malang dalam pembinaan Kelompok Budaya kerja | Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten/Kota | Jumlah tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Malang dalam pembinaan Kelompok Budaya kerja | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Tenaga Medis yang berkompeten | | | 1 | 02 | 03 | 2.05 | 01 | | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Petugas Alkes Puskesmas dan Tenaga Aspak | Jumlah petugas pengelola alkes dan petugas ASPAK yang dilatih | 180 | orang | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah petugas pengelola alkes dan petugas ASPAK yang dilatih | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah petugas pengelola alkes dan petugas ASPAK yang dilatih | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Tenaga Medis yang berkompeten | | | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 03 | | |
| | | | | | Pengadaan Mobil Ambulan Transport | Jumlah mobil ambulance roda 4 yang diadakan untuk puskesmas | 10 | unit Ambulance transport | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah mobil ambulance roda 4 yang diadakan untuk puskesmas | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah mobil ambulance roda 4 yang diadakan untuk puskesmas | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 19 | | |
| | | | | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan | Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar | 100 | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan di puskesmas | Jumlah alat kesehatan dan alat laboratorium yang diadakan untuk pelayanan kesehatan | 3 | paket | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan dan alat laboratorium yang diadakan untuk pelayanan kesehatan | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah alat kesehatan dan alat laboratorium yang diadakan untuk pelayanan kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah alat kesehatan dan alat laboratorium yang diadakan untuk pelayanan kesehatan | | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | | |
| | | | | | Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan serta kalibrasi alat kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu | Pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu ; kalibrasi alat kesehatan | 2 | paket | Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu ; kalibrasi alat kesehatan | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu ; kalibrasi alat kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu ; kalibrasi alat kesehatan | | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 20 | | |
| | | | | | Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah | NDR (Net Death rate) | 2 | % | | | | | | NDR (Net Death rate) | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|--|-------------|--------|---|--|---|--|---|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan | Jumlah pengadaan pelayanan kesehatan | 30 | unit | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah pengadaan pelayanan kesehatan | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengadaan pelayanan kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah pengadaan pelayanan kesehatan | | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 |
| | | | | | | akreditasi rumah sakit | 1 | paket | peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota | akreditasi rumah sakit | Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota | akreditasi rumah sakit | | akreditasi rumah sakit | | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 02 |
| | | | | | Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan | Jumlah pengadaan sarana penunjang pelayanan kesehatan | 8 | paket | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah pengadaan sarana penunjang pelayanan kesehatan | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah pengadaan sarana penunjang pelayanan kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah pengadaan sarana penunjang pelayanan kesehatan | | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 13 |
| | | | | | | jumlah pengadaan obat, vaksin | 1 | paket | Pengadaan Obat, Vaksin | jumlah pengadaan obat, vaksin | Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota | jumlah pengadaan obat, vaksin | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | jumlah pengadaan obat, vaksin | | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 16 |
| | | | | | | jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai | 1 | paket | Pengadaan Bahan Habis Pakai | jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai | | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 17 |
| | | | | | Operasional Rumah Sakit | Operasional RSUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Operasional RSUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional RSUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Operasional RSUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 32 |
| | | | | | | jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | paket | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum | jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | X | XX | 01 | 1.03 | 03 |
| | | | | | | jumlah Pakaian Kerja Lapangan | 1 | paket | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | jumlah Pakaian Kerja Lapangan | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | jumlah Pakaian Kerja Lapangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | jumlah Pakaian Kerja Lapangan | | | X | XX | 01 | 1.04 | 03 |
| | | | | | | jumlah gedung kantor yang terpelihara | 1 | paket | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | jumlah gedung kantor yang terpelihara | Administrasi Umum | jumlah gedung kantor yang terpelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | jumlah gedung kantor yang terpelihara | | | X | XX | 01 | 1.03 | 29 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|---|--------|---|--|-----------|-------------|--|--|---|--|---|--|-------------------|---------------|--------|------|----|------|----|---|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | 1 | paket | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | Administrasi Umum | jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | | | X | XX | 01 | 1.03 | 35 | |
| | | | | | | jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | 1 | paket | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | | | X | XX | 01 | 1.03 | 25 | |
| | | | | | | jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | 1 | paket | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | | | X | XX | 01 | 1.03 | 23 | |
| | | | | | | jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | 1 | paket | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | Administrasi Umum | jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | | | X | XX | 01 | 1.03 | 12 | |
| | | | | | Rehabilitasi sedang/berat rumah sakit | Jumlah gedung yang terehabilitasi | 1 | paket | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah gedung yang terehabilitasi | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah gedung yang terehabilitasi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah gedung yang terehabilitasi | | | 1 | 02 | 02 | 1,01 | 09 | |
| | | | | | Pembangunan Gedung Rumah sakit | Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun | 1 | paket | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun | | | 1 | 02 | 02 | 1,01 | 04 | |
| | | | | | Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah | BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD | 35 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD RSUD | Operasional RSUD BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD | 12 | bulan | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Operasional RSUD BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional RSUD BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Operasional RSUD BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 32 | |
| | | | | | Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Angka Kematian Ibu | 51,61 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Angka Kematian Bayi | 6,02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase balita stunting | <24 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu hamil yang dilayani | 13209 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu hamil yang dilayani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu hamil yang dilayani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Ibu | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|--|-------------|-----------|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Bersalin yang dilayani | 12608 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Bersalin yang dilayani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bersalin yang dilayani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Ibu | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi baru lahir yang dilayani | 12008 | bayi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi baru lahir yang dilayani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang dilayani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Bayi | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang dilayani | 59322 | balita | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang dilayani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang dilayani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Bayi | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 04 |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah anak usia pendidikan dasar | 149484 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah anak usia pendidikan dasar | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anak usia pendidikan dasar | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah anak usia pendidikan dasar | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 05 |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Usia lanjut yang dilayani | 85904 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Usia lanjut yang dilayani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usia lanjut yang dilayani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 07 |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan dan Gizi | Jumlah Pengadaan PMT | 63100 | kotak PMT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Pengadaan PMT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan PMT | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase balita stunting | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 15 |
| | | | | | Fasilitasi pelaksanaan program kota sehat | Jumlah peserta pertemuan pokja kecamatan dan kelurahan sehat | 690 | orang | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah peserta pertemuan pokja kecamatan dan kelurahan sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pertemuan pokja kecamatan dan kelurahan sehat | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 29 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|------------------|---|--|--|--|--|---|-------------------|---------------|--------|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Pengembangan lingkungan sehat | Jumlah penjamah makanan pada tempat pengelolaan makanan (TPM) ; Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat ; | 250 ; 132 | penjamah makanan ; peserta Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat | Pengelolaan Kesehatan Lingkungan | Jumlah penjamah makanan pada tempat pengelolaan makanan (TPM) ; Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat ; | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penjamah makanan pada tempat pengelolaan makanan (TPM) ; Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat ; | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 17 |
| | | | | | Pembentukan, pemantapan dan fasilitasi tim K3 puskesmas | Jumlah peserta pembinaan Tim K3 puskesmas dan bimtek kelompok industri RT | 78 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah peserta pembinaan Tim K3 puskesmas dan bimtek kelompok industri RT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pembinaan Tim K3 puskesmas dan bimtek kelompok industri RT | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 16 |
| | | | | | Promosi kesehatan | Jumlah promosi kesehatan melalui media untuk pemberdayaan masyarakat | 40 | media | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah promosi kesehatan melalui media untuk pemberdayaan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah promosi kesehatan melalui media untuk pemberdayaan masyarakat | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 |
| | | | | | Pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan siaga | Jumlah kelurahan siaga aktif | 57 | kelurahan | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan , Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah kelurahan siaga aktif | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota | Jumlah kelurahan siaga aktif | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 1 | 02 | 05 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pemberdayaan masyarakat dengan Posyandu | Jumlah Posyandu strata purnama mandiri | 378 | posyandu | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Posyandu strata purnama mandiri | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Posyandu strata purnama mandiri | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 01 |
| | | | | | Pemberdayaan masyarakat dengan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya | Jumlah Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Posyandu Lansia dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) mandiri | 1 , 15 , 57 , 16 | SBH, poskestr en, posyandu lansia, pos UKK | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Posyandu Lansia dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) mandiri | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Posyandu Lansia dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) mandiri | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------------|--------|--|--|--|--|---|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Pengukuran kebugaran jasmani | Jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani | 2000 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 16 | |
| | | | | | Operasional Laboratorium Kesehatan | Operasional Laboratorium Kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat | 12 | orang | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Operasional Laboratorium Kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Laboratorium Kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | |
| | | | | | Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 100 | % | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 100 | % | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | 100 | % | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | 100 | % | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) | 100 | % | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 100 | % | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | |
| | | | | | | Prosentase Kelurahan UCI | 93,5 | % | | | | | | Prosentase Kelurahan UCI | | | | | | | | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah usia produktif yang dilayani | 478 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah usia produktif yang dilayani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah usia produktif yang dilayani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah penderita hipertensi yang dilayani | 311 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah penderita hipertensi yang dilayani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penderita hipertensi yang dilayani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|------------|--|---|---|---|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) yang dilayani | 197 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) yang dilayani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) yang dilayani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Jumlah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat yang dilayani | 382 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat yang dilayani | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat yang dilayani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) | Jumlah Orang dengan Tuberkulosis (TB) yang dilayani | 2660 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang dengan Tuberkulosis (TB) yang dilayani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang dengan Tuberkulosis (TB) yang dilayani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang dilayani | 1833 | orang | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang dilayani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang dilayani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 12 | |
| | | | | | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | Jumlah orang dengan resiko penyakit menular | 15168 | orang | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah orang dengan resiko penyakit menular | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan resiko penyakit menular | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | |
| | | | | | Pelayanan imunisasi | Jumlah sasaran vaksinasi balita dan anak sekolah | 70213 | bayi/ anak | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah sasaran vaksinasi balita dan anak sekolah | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sasaran vaksinasi balita dan anak sekolah | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | |
| | | | | | Pelayanan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah | Jumlah KLB yang ditangani | 24 | kasus | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah KLB yang ditangani | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah KLB yang ditangani | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 37 | |
| | | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 | % | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|--|--|-----------|------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | | | 100 | % | 0 | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | | |
| | | | | | | 80 | | 0 | Nilai survey kepuasan internal | | Nilai survey kepuasan internal | | | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja Telepon, Air dan Listrik | 12 | bulan | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja Telepon, Air dan Listrik | Administrasi Umum | Jumlah bulan pembayaran belanja Telepon, Air dan Listrik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah bulan pembayaran belanja Telepon, Air dan Listrik | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 1,1 | m2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | Luasan ruangan yang dibersihkan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Luasan ruangan yang dibersihkan | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 29 | item | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | Jumlah alat tulis kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah alat tulis kantor | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 10 |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 120 | jenis | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 11 |
| | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 40 | jenis | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 12 |
| | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 | surat kabar | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 15 |
| | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 34,136 | nasi kotak/air mineral/snack | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | Jumlah makanan dan minuman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah makanan dan minuman | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluaran daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluaran daerah | 142 | kali | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluaran daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluaran daerah | Administrasi Umum | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluaran daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluaran daerah | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 18 |
| | | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 36 | item | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | Jumlah perlengkapan gedung kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah perlengkapan gedung kantor | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 22 |
| | | | | Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan / dikembangkan | 167 | orang | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan / dikembangkan | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan / dikembangkan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan / dikembangkan | | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 09 |
| | | | | Penyusunan dan pengembangan sistem informasi / aplikasi | Jumlah sistem informasi / aplikasi | 1 | dokumen | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah sistem informasi / aplikasi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi | Jumlah sistem informasi / aplikasi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah sistem informasi / aplikasi | | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------------|--|--|--|---|---|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah sistem informasi /aplikasi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi | Jumlah sistem informasi /aplikasi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah sistem informasi /aplikasi | | | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 02 |
| | | | | | | | | Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah sistem informasi /aplikasi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi | Jumlah sistem informasi /aplikasi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah sistem informasi /aplikasi | | | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 03 |
| | | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 1 | dokumen | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 06 |
| | | | | | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | 5 | dokumen | Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | Jumlah laporan keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah laporan keuangan | | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | | Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | 2 | dokumen | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat dan standart pelayanan | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat dan standart pelayanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 | dokumen | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Penyusunan Renja / RKT | Jumlah dokumen Renja / RKT | 2 | dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja / RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja / RKT | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah dokumen Renja / RKT | | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Penyusunan Profil Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah | 2 | dokumen | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah | | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 51 | jenis | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 32 |
| | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah | 1 | dokumen | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 500 | m2 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Luasan gedung kantor yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Luasan gedung kantor yang dipelihara | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 28 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|-----------|--|--|-------------------|--|--|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 28 | kendaraan | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | | | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 2 | kendaraan | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Administrasi Umum | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 05 |
| | | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan jasa perizinan | 94 | kendaraan | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan jasa perizinan | Administrasi Umum | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan jasa perizinan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan jasa perizinan | | | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 06 |
| | | | | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | 21 | jenis | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | Administrasi Umum | Jumlah peralatan rumah tangga | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah peralatan rumah tangga | | | X | XX | 01 | 2.03 | 14 |
| | | | | | | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | 1 | gedung | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | Administrasi Umum | Jumlah gedung kantor yang dibangun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah gedung kantor yang dibangun | | | X | XX | 01 | 2.03 | 40 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|---------------|--|--|-------------|-----------|---|--|---|---|--|--|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | BIDANG CIPTA KARYA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Program Cipta Karya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pembangunan instalasi Air Limbah | Jumlah Saluran Rumah (SR) yang dibangun | 700 | SR | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Saluran Rumah (SR) yang dibangun | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penyediaan akses layak air limbah domestik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Air Limbah | Jumlah Saluran Rumah (SR) yang direhabilitasi/dikembangkan | 700 | SR | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Saluran Rumah (SR) yang direhabilitasi/dikembangkan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penyediaan akses layak air limbah domestik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah | Jumlah Saluran Rumah (SR) yang dipelihara | 1000 | SR | Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Saluran Rumah (SR) yang dipelihara | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penyediaan akses layak air limbah domestik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Perencanaan Infrastruktur Air Limbah | Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur air limbah | 5 | Dokumen | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur air limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penyediaan akses layak air limbah domestik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Monitoring dan peningkatan kapasitas, kinerja serta pelaporan pengelola IPAL Komunal | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan peningkatan kinerja pengolahan air Minum | 2 | Kali | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan peningkatan kinerja Pengolahan air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penyediaan akses layak air limbah domestik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 09 |
| | | | | | Sosialisasi air limbah domestik | Jumlah lokasi sosialisasi air limbah domestik | 5 | Kecamatan | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah lokasi sosialisasi air limbah domestik | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penyediaan akses layak air limbah domestik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 08 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|---|--|-------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Fasilitasi SPAL Skala Kota | Jumlah SPAL skala kota yang terfasilitasi | 1 | Lokasi | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah SPAL skala kota yang terfasilitasi | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penyediaan akses layak air limbah domestik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 05 |
| | | | | Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS) | Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara | 2 | Lokasi | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah akses aman air limbah domestik pada fasilitas BAB | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 10 |
| | | | | Fasilitasi Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT | 3250 | Kali | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah akses aman air limbah domestik pada fasilitas BAB | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 10 |
| | | | | Fasilitasi Operasional Layanan Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah layanan penyedotan lumpur tinja | 390 | Kali | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah layanan penyedotan lumpur tinja | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah akses aman air limbah domestik pada fasilitas BAB | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 10 |
| | | | | Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja | Jumlah rumah tinggal yang melakukan pembuangan air limbah domestik ke IPLT | 3250 | Rumah Tinggal | Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah rumah tinggal yang melakukan pembuangan air limbah domestik ke IPLT | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penyediaan akses layak air limbah domestik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 06 |
| | | | | Perencanaan Infrastruktur Air Minum | Jumlah Dokumen Perencanaan | 5 | dokumen | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah Dokumen Perencanaan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | jumlah akses pemenuhan air bersih | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tinggal berakses air minum | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 01 |
| | | | | Pembangunan, Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Pengolahan Air Minum | Jumlah SR yang di bangun, dikembangkan dan direhabilitasi | 700 | SR | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah SR yang di bangun, dikembangkan dan direhabilitasi | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | jumlah akses pemenuhan air bersih | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tinggal berakses air minum | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 03 |
| | | | | | | | | Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah SR yang di bangun, dikembangkan dan direhabilitasi | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | jumlah akses pemenuhan air bersih | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tinggal berakses air minum | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 05 |
| | | | | Pembinaan rutin Hippam | Jumlah peserta pada pelaksanaan pembinaan rutin | 2 | kali | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | Jumlah peserta pada pelaksanaan pembinaan rutin | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | jumlah akses pemenuhan air bersih | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tinggal berakses air minum | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 14 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|---|--|-------------|---------|--|--|---|---|--|---|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum | Jumlah SR yang dipelihara secara rutin | 1000 | SR | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah SR yang dipelihara secara rutin | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | jumlah akses pemenuhan air bersih | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tinggal berakses air minum | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 15 |
| | | | | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum | Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi | 9 | gedung | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | jumlah gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas dalam kondisi baik | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 02 |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum | Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara rutin | 7 | gedung | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara rutin | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | jumlah gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas dalam kondisi baik | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 02 |
| | | | | Pemeliharaan Insidental Gedung /Bangunan Kantor | Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara insidental | 10 | gedung | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara insidental | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | jumlah gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas dalam kondisi baik | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 02 |
| | | | | Perencanaan Infrastruktur gedung/bangunan kantor dan fasilitas Umum | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum | 1 | dokumen | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | jumlah gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas dalam kondisi baik | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|---|--|-------------|---------------------------|--|--|---|--|----------------------------------|--|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Sosialisasi SLF | Jumlah peserta kegiatan sosialisasi SLF | 150 | orang | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah peserta kegiatan sosialisasi SLF | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | jumlah pelaksanaan pengendalian terhadap kesesuaian konstruksi bangunan gedung | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Proses Sertifikasi Laik Kungsi Bangunan Gedung | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Kegiatan Pelaksanaan SLF | Jumlah lokasi pelaksanaan SLF di Kota Malang | 12 | lokasi | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah lokasi pelaksanaan SLF di Kota Malang | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | jumlah pelaksanaan pengendalian terhadap kesesuaian konstruksi bangunan gedung | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Proses Sertifikasi Laik Kungsi Bangunan Gedung | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Rekomendasi IMB | Jumlah pelaksanaan fasilitasi TABG | 6 | Kali | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah pelaksanaan fasilitasi TABG | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | jumlah pelaksanaan pengendalian terhadap kesesuaian konstruksi bangunan gedung | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Proses Sertifikasi Laik Kungsi Bangunan Gedung | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pendataan Bangunan Gedung | Jumlah Data Bangunan Gedung | 4000 | data | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Bangunan Gedung | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | jumlah pelaksanaan pengendalian terhadap kesesuaian konstruksi bangunan gedung | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Proses Sertifikasi Laik Kungsi Bangunan Gedung | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 05 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|--|---|----------------|--------|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------|------|----|----|------|---|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Pemberdayaan Bina Jasa Konstruksi | Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | 200 orang | | Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | jumlah peserta yang memahami peraturan jasa konstruksi | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan Informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 11 | 2.03 | 2 |
| | | | | Penyusunan/ Pengembangan Data Base Jasa Konstruksi | Jumlah aplikasi databe jasa konstruksi | 1 aplikasi | | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah aplikasi databe jasa konstruksi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa Konstruksi | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan Informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 11 | 2.02 | 2 |
| | | | | Penyusunan HSPK Dinas | Jumlah Dokumen HSPK | 1 dokumen | | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen HSPK | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa Konstruksi | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan Informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 11 | 2.02 | 2 |
| | | | | Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota | Jumlah data Badan Usaha Yang terfasilitasi | 50 badan usaha | | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah data Badan Usaha Yang terfasilitasi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa Konstruksi | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan Informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 11 | 2.02 | 1 |
| | | | | Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi | 60 orang | | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa Konstruksi | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan Informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 4 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--------|---------------|------------------|-----------|---------------------------|--------|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------|------|---|----|----|------|---|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa Konstruksi | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan Informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 6 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|---|---|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Dokumen Perencanaan PBL | 5 | dokumen | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan PBL | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Luasan Penataan Bangunan | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada kawasan prioritas di kota malang | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 01 |
| | | | | Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Prioritas | Luasan kawasan penataan bangunan | 2 | Ha | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Luasan kawasan penataan bangunan | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Luasan Penataan Bangunan | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada kawasan prioritas di kota malang | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 03 |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Luasan kawasan penataan bangunan | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Luasan Penataan Bangunan | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada kawasan prioritas di kota malang | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 04 |
| | | | | BIDANG BINA MARGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Bina Marga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya | 8 | lokasi | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 01 |
| | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.02 | 21 |
| | | | | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun | | | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah titik pembangunan/rehabilitasi penampungan air | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 06 | 2.02 | 21 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|---|--|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | | | Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku | Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang dibangun | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah titik pembangunan sumur resapan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 06 | 2.02 | 22 | |
| | | | | | Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase di Kota Malang | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | 5 dokumen | dokumen | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | panjang drainase kota dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | | | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | panjang drainase kota dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 02 | |
| | | | | | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Jumlah Titik Genangan air yang tertangani | 6 | titik (3 km) | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Jumlah Titik Genangan air yang tertangani | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | panjang drainase kota dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kota Malang | Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang direhabilitasi/ dikembangkan | 6 km | km | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang direhabilitasi/ dikembangkan | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | panjang drainase kota dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 06 |
| | | | | | Rehabilitasi/ Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang | Jumlah Titik Rehabilitasi/ Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong | 3 | titik | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Jumlah Titik Rehabilitasi/ Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | panjang drainase kota dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 07 |
| | | | | | Pemeliharaan Insidental Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang | Jumlah titik Pemeliharaan Insidental Turap/Talud/ Bronjong | 3 | titik | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Jumlah titik Pemeliharaan Insidental Turap/Talud/ Bronjong | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | panjang drainase kota dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 06 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|---|---|-------------|------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Drainase | Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang di lakukan Pemeliharaan Rutin | 3 | km | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang di lakukan Pemeliharaan Rutin | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | panjang drainase kota dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 07 |
| | | | | Pemeliharaan Insidental Drainase | Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang di lakukan Pemeliharaan Insidental | 5 | km | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang di lakukan Pemeliharaan Insidental | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | panjang drainase kota dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase Kota dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 07 |
| | | | | Perencanaan Infrastruktur Jalan dan Pedestrian di Kota Malang | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jalan dan pedestrian | 39 | dokumen | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jalan dan pedestrian | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | | | Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jalan dan pedestrian | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 02 |
| | | | | | | | | Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jalan dan pedestrian | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 03 |
| | | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jalan di Kota Malang | Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | 15 | km | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 09 |
| | | | | Rehabilitasi/Pengembangan Pedestrian di Kota Malang | Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | 2% | Persentase | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 09 |
| | | | | Pembangunan/Rehabilitasi jalan Paving Kota Malang | Panjang Jalan Paving yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | 10 | km | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan Paving yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 09 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|---|--|-------------|---------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Insidentil Jalan | Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Insidentil | 28 | km | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Insidentil | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 11 |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin | 20 | km | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 11 |
| | | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jembatan di Kota Malang | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pengembangan jembatan | 2 | lokasi | Pembangunan Jembatan | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pengembangan jembatan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | jumlah jembatan dalam kondisi baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 12 |
| | | | | | | | | Penggantian Jembatan | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pengembangan jembatan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | jumlah jembatan dalam kondisi baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 16 |
| | | | | | | | | Pelebaran Jembatan | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pengembangan jembatan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | jumlah jembatan dalam kondisi baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 17 |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pengembangan jembatan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | jumlah jembatan dalam kondisi baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 18 |
| | | | | Perencanaan Infrastruktur Jembatan di Kota Malang | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jembatan | 4 | dokumen | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan | Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jembatan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | jumlah jembatan dalam kondisi baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 01 |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan | 10 | lokasi | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | jumlah jembatan dalam kondisi baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 19 |
| | | | | Pemeliharaan Insidentil jembatan | Jumlah Lokasi Pemeliharaan Insidentil jembatan | 5 | lokasi | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Jumlah Lokasi Pemeliharaan Insidentil jembatan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | jumlah jembatan dalam kondisi baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 20 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|---|--|-------------|---------|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Pembangunan Pedestrian di Kota Malang | Jumlah lokasi pembangunan pedestrian | 2 | lokasi | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 |
| | | | | Peningkatan Pelayanan Persewaan Alat Berat | Jumlah Pelayanan Persewaan Alat Berat | 20 | kali | Pemeliharaan Berkala Jalan | Jumlah Pelayanan Persewaan Alat Berat | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 |
| | | | | Peningkatan Pelayanan Laboratorium Uji Mutu Bahan | Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi | 80 | kali | Pemeliharaan Berkala Jalan | Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 |
| | | | | Perencanaan Penerangan jalan | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | 5 | Dokumen | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan | Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 01 |
| | | | | Pembangunan Penerangan Jalan | Jumlah titik penerangan jalan Kota Malang yang terbangun | 7.240 | titik | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 |
| | | | | Pemeliharaan Penerangan Jalan | Jumlah Titik Penerangan Jalan yang terpelihara | 1.808 | titik | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 11 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|------------------|--|---|--------|--------------|--|---|--|--|--|--|--|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Program Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang | Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang | 2 | dokumen | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang telah dan ditetapkan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Penelitian dan Kajian Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Penelitian dan Kajian Penataan ruang | 3 | dokumen | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penelitian dan Kajian Penataan ruang | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersinkronisasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Sosialisasi Rencana Tata Ruang | Jumlah sosialisasi Rencana Tata Ruang | 4 | sosialisasi | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah sosialisasi Rencana Tata Ruang | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersinkronisasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 03 |
| | | | | | | | | | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan (hapus) Bidang Penataan Ruang | Jumlah sosialisasi Rencana Tata Ruang | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang telah dan ditetapkan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang | Jumlah Dokumen Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang | 2 | dokumen | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersinkronisasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang | Jumlah Aplikasi Sistem Informasi tata ruang | 1 | Aplikasi | Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Aplikasi Sistem Informasi tata ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang disinkronisasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 02 |
| | | | | | Koordinasi Penataan Ruang Daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen TKPRD | 1 | dokumen | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen TKPRD | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang disinkronisasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 01 |
| | | | | | Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengendalian Tata Ruang | Jumlah Dokumen Pengawasan dan pengendalian tata ruang | 1800 | berkas | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Pengawasan dan pengendalian tata ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian yang tertangani | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|---|--|-------------|----------|---|---|--|---|---|--|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang / Bangunan | Jumlah lokasi Identifikasi | 4 | lokasi | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah lokasi Identifikasi | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | luas bidang pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 04 |
| | | | | Peningkatan Pelayanan Penerbitan Keterangan Rencana Kota | Jumlah keterangan rencana kota yang diproses sesuai SOP | 1800 | berkas | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah keterangan rencana kota yang diproses sesuai SOP | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | luas bidang pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 01 |
| | | | | Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | Jumlah Aplikasi Informasi pertanahan | 1 | Aplikasi | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | Jumlah Aplikasi Informasi pertanahan | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kasus sengketa tanah garapan yang tertangani | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 04 | 12 | 2.01 | 01 |
| | | | | Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah | 10 | kali | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kasus sengketa tanah garapan yang tertangani | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 04 | 12 | 2.01 | 02 |
| | | | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DBHCHT) | | 5 | KM | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah (DBHCHT) | | 150 | SR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|--|-------------|---------------------------|--|---|--|--|---|--|---|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Perumahan dan PSU | Jumlah Prasarana Sarana utilitas (PSU) yang berhasil dikelola dengan baik | 4 | PSU | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Prasarana Sarana utilitas (PSU) yang berhasil dikelola dengan baik | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah PSU yang di serah terimakan | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 04 | 4 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Perencanaan Kawasan Permukiman | Jumlah Permukiman yang berhasil direncanakan sesuai peraturan yang berlaku | 2 | dokumen | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah Permukiman yang berhasil direncanakan sesuai peraturan yang berlaku | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Penataan Permukiman | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Penataan Kawasan Permukiman | Jumlah Kawasan Permukiman yang berhasil ditata secara layak dan nyaman | 1 | Kawasan | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah Kawasan Permukiman yang berhasil ditata secara layak dan nyaman | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Penataan Permukiman | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | | | | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah rumah korban bencana | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah rumah korban bencana yang di rehabilitasi | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 04 | 7 | 2.03 | 01 |
| | | | | | | | | | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen DED yang dihasilkan | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 04 | 7 | 2.03 | 02 |
| | | | | | | | | | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Luas pengadaan lahan untuk rumah korban bencana | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah lahan yang tersedia | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 04 | 7 | 2.03 | 03 |
| | | | | | | | | | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah rumah korban bencana | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah rumah korban bencana yang di bangun | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 04 | 7 | 2.03 | 04 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin Kawasan Permukiman | Jumlah titik permukiman yang terpelihara dengan baik | 11 | titik | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah titik permukiman yang terpelihara dengan baik | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi permukiman yang terpelihara | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Pemeliharaan Insidentil Kawasan Permukiman | Jumlah titik permukiman yang terpelihara dengan baik | 12 | titik | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah titik permukiman yang terpelihara dengan baik | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi permukiman yang terpelihara | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|--------------------------------------|--|-----------|---------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|--|---|---------------|--------|------|----|---|------|----|
| | Kode Program/Kegiata | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh | Jumlah dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh yang berhasil diselesaikan | 1 | dokumen | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh yang berhasil diselesaikan | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Luas penanganan kawasan kumuh | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | Persentase penurunan luasan permukiman kumuh | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | 1 | 04 | 3 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Penataan Kawasan Kumuh | Jumlah kawasan kumuh yang berhasil ditata sesuai dengan yang tercantum dalam SK Walikota tentang kawasan Kumuh Kota Malang | 2 | kawasan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah kawasan kumuh yang berhasil ditata sesuai dengan yang tercantum dalam SK Walikota tentang kawasan Kumuh Kota Malang | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Luas penanganan kawasan kumuh | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | Persentase penurunan luasan permukiman kumuh | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | 1 | 04 | 3 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|--------------------|--|--|---------------------|------------|---|--|--|---|--|---|---|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Pengelolaan RUSUNAWA | Jumlah Unit Hunian yang dihuni | 294 | unit | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Jumlah Unit Hunian yang dihuni | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | jumlah penyediaan pemukiman yang layak bagi MBR dan disabilitas | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 04 | 2 | 2.05 | 02 |
| | | | | | | | | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Unit Hunian yang dihuni | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | jumlah penyediaan pemukiman yang layak bagi MBR dan disabilitas | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 1 | 04 | 2 | 2.05 | 02 |
| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM) | | | URUSAN UMUM | Program Pelayanan Kesekretariatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 10000 | surat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 01 |
| | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 6 | rekening | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan Ruangan yang dibersihkan | 3880 | m2 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah jenis Alat tulis kantor | 48 | jenis | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 10 |
| | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 16 | jenis | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 12 |
| | | | | Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 20 | jenis | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 03 |
| | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 17.000 dan 850 kali | dos kali | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 20 orang 32 kali | orang kali | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 18 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|---|--|---|---------------------|--|---|---|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Peringatan/Kegiatan Insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 1 | unit kendaraan hias | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 20 | Kali | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 06 |
| | | | | Pengadaan bbm dan pelumas | Jumlah bbm dan pelumas yang disediakan selama 1 tahun | 62.600 liter pertama x, 20.000 liter solar non subsidi, 500 liter oli mesin, 100 liter oli gardan | bbm | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | Peningkatan/peimbangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur | 20 | kali | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | x | xx | 01 | 2.04 | 10 |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala | 23 | kendaraan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 16 | jenis | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 32 |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 34 |
| | | | | Pemeliharaan Taman Perkantoran | Jumlah taman yang dipelihara | 4 | lokasi | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 32 |
| | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | 5 | dokumen | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | x | xx | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi | Jumlah sistem informasi/aplikasi | 2 | aplikasi | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI) | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | x | xx | 01 | 2.01 | 05 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|--|---|-------------|---------|--|---|---|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 4 | dokumen | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | x | xx | 01 | 2.02 | 06 |
| | | | | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan | 2 | laporan | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | x | xx | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI) | Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI) | 1 | dokumen | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI) | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | x | xx | 01 | 2.01 | 05 |
| | | | | Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | 3 | dokumen | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | x | xx | 01 | 2.01 | 05 |
| | | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 | dokumen | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | x | xx | 01 | 2.01 | 02 |
| | | | | Penyusunan Profil Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | 1 | dokumen | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | x | xx | 01 | 2.01 | 03 |
| | | | | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/ RKT | 1 | dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | x | xx | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | 2 | dokumen | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen standar pelayanan | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | x | xx | 01 | 2.01 | 05 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|---|---|------------------|--|---|---|---------------------------|------------------------|--|---|--|---|---|---|---|----|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | | | |
| POLISI PAMONG PRAJA | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | 1 | 05 | | | |
| | 1 | 05 | | | 15 | Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 05 | 02 | | |
| | 1 | 05 | | | 15 | 006 | Pembongkaran Reklame dan Bangunan | Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan | 3 | kali | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 03 |
| | 1 | 05 | | | 15 | 001 | Pemetaan Lokasi Rawan Trantib | Jumlah dokumen lokasi rawan trantib | 1 | dokumen | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota | Jumlah dokumen lokasi rawan trantib | Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen lokasi rawan trantib | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 03 |
| | 1 | 05 | | | 15 | 008 | Pengamanan Gedung dan Aset Pemerintah | Jumlah lokasi gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan | 8 | lokasi | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah lokasi gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 04 |
| | 1 | 05 | | | 15 | 007 | Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah | Jumlah operasi penegakan trantib | 3 | kali | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Jumlah operasi penegakan trantib | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah operasi penegakan trantib | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 02 |
| | 1 | 05 | | | 15 | 002 | Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan | 3 | kali | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 01 |
| | 1 | 05 | | | 15 | 005 | Peningkatan Trantibum secara Terpadu | Jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya | 24 | kali | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 04 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|-----|--------|---------------|--|---|---------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 05 | 15 | 004 | | | Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama/Nasional serta Pengamanan Pejabat Negara dan Tamu Negara | Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat | 80 | kali | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangana Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum | Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat | Penanganan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 07 | |
| | 1 | 05 | 21 | | | | Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah | Persentase penanganan pelanggaran Perda | 100 | % | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan pelanggaran Perda | | | | | | | 02 | |
| | 1 | 05 | 21 | 003 | | | Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum | Jumlah penindakan pelanggaran pro justisia | 200 | Pelanggaran | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah penindakan pelanggaran pro justisia | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah penindakan pelanggaran pro justisia | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan pelanggaran Perda | | | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 03 | |
| | 1 | 05 | 21 | 004 | | | Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah | Jumlah orang yang diberikan pembinaan/penyuluhan/pengawasan | 2000 | orang | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah orang yang diberikan pembinaan/penyuluhan/pengawasan | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah orang yang diberikan pembinaan/penyuluhan/pengawasan | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan pelanggaran Perda | | | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 01 | |
| | 1 | 05 | 21 | 002 | | | Operasi Penegakan Perda | Jumlah pelanggaran yang ditindak | 1600 | kegiatan | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah pelanggaran yang ditindak | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah pelanggaran yang ditindak | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan pelanggaran Perda | | | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 03 | |
| | 1 | 05 | 21 | 005 | | | Peningkatan Koordinasi Pengawasan dengan PPNS | Jumlah rapat koordinasi pengawasan dengan PPNS | 12 | kali | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah rapat koordinasi pengawasan dengan PPNS | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah rapat koordinasi pengawasan dengan PPNS | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan pelanggaran Perda | | | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 03 | |
| | 1 | 05 | 21 | 001 | | | Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran | Jumlah rapat koordinasi penindakan pelanggaran | 12 | kali | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah rapat koordinasi penindakan pelanggaran | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Penegakan Perda | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan pelanggaran Perda | | | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 03 | |
| | 1 | 05 | 22 | | | | Program Perlindungan Masyarakat | Persentase Pos Kamling yang digunakan | 1449 | pos | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rasio Linmas per RT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 05 | 22 | 001 | | | Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan | Jumlah data pos kamling | 1449 | pos | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenraman dan Ketertiban Umum | Jumlah data pos kamling | Penanganan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data pos kamling | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pos Kamling yang digunakan | | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 04 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|-----|--------|---------------|--|--|---------------------------|--------|--|--|---|--|---|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 05 | 22 | 002 | | | Pelatihan Kesiap siagaan dan Tanggap darurat Bagi anggota Linmas | Jumlah peserta pelatihan | 285 | orang | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Azazi Manusia | Jumlah peserta pelatihan | Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pelatihan | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas per RT | | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 05 | |
| | 1 | 05 | 22 | 003 | | | Penggerakan Dukungan Satuan Linmas | Jumlah penggerakan satuan Linmas | 25 | kali | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum | Jumlah penggerakan satuan Linmas | Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penggerakan satuan Linmas | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas per RT | | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 04 | |
| | 1 | 05 | 22 | 004 | | | Sosialisasi peranan anggota Linmas | Jumlah peserta sosialisasi | 570 | orang | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Azazi Manusia | Jumlah peserta sosialisasi | Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas per RT | | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 05 | |
| | 1 | 05 | 22 | 005 | | | Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat | Jumlah Satlinmas yang dibina | 3100 | orang | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Azazi Manusia | Jumlah Satlinmas yang dibina | Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Satlinmas yang dibina | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas per RT | | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 05 | |
| | 1 | 05 | 19 | | | | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Persentase Kejadian Kebakaran yang ditangani | | | | | | | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | Persentase Kejadian Kebakaran yang ditangani | | | | | | | | |
| | 1 | 05 | 19 | 001 | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran | Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang terpelihara | 9 | unit | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang terpelihara | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang terpelihara | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | Persentase Kejadian Kebakaran yang ditangani | | | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 01 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|-----|--------|---------------|--|---|---------------------------|-----------|---|--|---|---|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 05 | 19 | 002 | | | Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran | Jumlah kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran | 24 | jam | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | Persentase Kejadian Kebakaran yang ditangani | | | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 02 |
| | 1 | 05 | 19 | 004 | | | Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran | Jumlah kegiatan penyuluhan dan peserta penyuluhan kepada masyarakat | 15 kali, | 150 orang | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah kegiatan penyuluhan dan peserta penyuluhan kepada masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah kegiatan penyuluhan dan peserta penyuluhan kepada masyarakat | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | Persentase Kejadian Kebakaran yang ditangani | | | 1 | 05 | 04 | 2.04 | 01 |
| | 1 | 5 | 19 | 005 | | | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran | 1 | unit | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | Persentase Kejadian Kebakaran yang ditangani | | | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 01 |
| | 1 | 5 | 19 | 9 | | | Peningkatan Ketrampilan dan kemampuan petugas pemadam Kebakaran | Jumlah Peserta Pelatihan | 50 | orang | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dike mbangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | 5 | | | | | | Urusan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | | | | | Umum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100,00 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80,00 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Nilai survey kepuasan internal | 80,00 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | 037 | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 600,00 | m2 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | 5 | 01 | 07 | 004 | | | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | 12,00 | Dokumen | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|----|--------|---------------|--|---|---------------------------|--------|--|---|---|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 1 | 2.02 | 1 |
| | 5 | 01 | 07 | 04 | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8,00 Jenis | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |
| | 5 | 01 | 07 | 00 | | | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei masyarakat | 6,00 eksemplar | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei masyarakat | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | 5 | 01 | 07 | 03 | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 2.400,00 Surat | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | 5 | 01 | 07 | 01 | | | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | 10,00 eksemplar | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | 5 | 01 | 07 | 08 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 2,00 Unit | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 20 |
| | 5 | 01 | 07 | 07 | | | Peningkatan/peimbangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 220,00 Orang | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | 5 | 01 | 07 | 01 | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 15,00 eksemplar | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 02 |
| | 5 | 01 | 07 | 04 | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12,00 Kali | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | 5 | 01 | 07 | ## | | | Penyusunan Profil SKPD | Jumlah Dokumen Profil SKPD | 10,00 eksemplar | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|----|--------|---------------|--|--|---------------------------|--------|--|---|---|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | 02 | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 42,00 Unit | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | 5 | 01 | 07 | 05 | | | Peringatan/kegiatan insidental | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | 2,00 Kali | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | 5 | 01 | 07 | 03 | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 40,00 Jenis | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | 5 | 01 | 07 | 06 | | | Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus | Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus | 260,00 stel | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 02 |
| | | | | | | | | | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 03 |
| | | | | | | | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 05 |
| | 5 | 01 | 07 | 04 | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 720,00 eksemplar | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | 5 | 01 | 07 | 01 | | | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | 10,00 eksemplar | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | 5 | 01 | 07 | 01 | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 1,00 gedung | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | 5 | 01 | 07 | 04 | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 100,00 dos | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | 5 | 01 | 07 | 03 | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 12,00 Kali | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | 5 | 01 | 07 | 09 | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dibuat | 5,00 Dokumen | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|----|--------|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------|--------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | 09 | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | 3,00 Jenis | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 24 |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 09 |
| | 5 | 01 | 07 | 03 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 4,00 Jenis | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----|---|-----------------------------------|--|---|-------------|--------|--|--|---|--|-----------------------------|---|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | | | | | |
| | 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1 | 06 | | | | |
| | | | | | Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya | 14,21 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | 100 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | Jumlah anggota TAGANA yang mendapat pelatihan penanggulangan bencana | | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah anggota TAGANA yang mendapat pelatihan penanggulangan bencana | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah anggota TAGANA yang mendapat pelatihan penanggulangan bencana | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 06 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Pemberian Bantuan Sandang dan Pangan Pasca Bencana | Jumlah korban bencana yang diberi bantuan | | | Penyediaan Makanan | Jumlah korban bencana yang diberi bantuan | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah anak yang didampingi | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah anak yang didampingi | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah anak yang didampingi | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 07 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------------|--------|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Operasional Pos Rehabilitasi Sosial | Jumlah bimbingan/pemantapan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah bimbingan/pemantapan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah bimbingan/pemantapan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 07 |
| | | | | | Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS | Jumlah data kepesertaan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS | | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data kepesertaan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data kepesertaan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 14 |
| | | | | | Operasional kegiatan razia PMKS jalanan | Jumlah kali razia dan penghalauan | | | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah kali razia dan penghalauan | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah kali razia dan penghalauan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 09 |
| | | | | | Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia | Jumlah Klien Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Klien Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Klien Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--------|--|--|--|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Operasional LIPONSOS CAMP ASSESMENT | Jumlah Klien yang mendapat Assesment | | | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Klien yang mendapat Assesment | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Klien yang mendapat Assesment | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2,02 | 02 |
| | | | | | Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlanter/tidak potensial | Jumlah lanjut usia terlanter/tidak potensial yang diberi bantuan sembako | | | Penyediaan Permakanan | Jumlah lanjut usia terlanter/tidak potensial yang diberi bantuan sembako | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah lanjut usia terlanter/tidak potensial yang diberi bantuan sembako | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2,02 | 03 |
| | | | | | Pemulangan orang terlanter | Jumlah orang terlanter yang dipulangkan kedaerah asal | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah orang terlanter yang dipulangkan kedaerah asal | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah orang terlanter yang dipulangkan kedaerah asal | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2,02 | 12 |
| | | | | | Penyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun | Jumlah orang yang dtampung di TWK Sukun | | | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah orang yang dtampung di TWK Sukun | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah orang yang dtampung di TWK Sukun | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2,02 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|---|-------------|--------|---|---|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Terapi bagi penyandang Disabilitas | Jumlah penyandang Disabilitas yang diberi bantuan terapi | | | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah penyandang Disabilitas yang diberi bantuan terapi | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah penyandang Disabilitas yang diberi bantuan terapi | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 08 |
| | | | | | Bantuan Sosial penunjang kebutuhan pokok bagi penyandang disabilitas | Jumlah penyandang disabilitas yang diberi bantuan sembako | | | Penyediaan Perumahan | Jumlah penyandang disabilitas yang diberi bantuan sembako | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah penyandang disabilitas yang diberi bantuan sembako | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pemantapan Pelatihan Untuk Pentas Seni Anak Jalanan | Jumlah peserta pemantapan pelatihan untuk pentas seni | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah peserta pemantapan pelatihan untuk pentas seni | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah peserta pemantapan pelatihan untuk pentas seni | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Fasilitasi Program Desaku Menanti | Jumlah KK warga binaan sosial dilokasi Desaku Menanti yang dibina | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah KK warga binaan sosial dilokasi Desaku Menanti yang dibina | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah KK warga binaan sosial dilokasi Desaku Menanti yang dibina | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--------|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 51,52 | % | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| | | | | | Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) | jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan | | | Penyediaan Permakanan | jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2,02 | 03 |
| | | | | | Sosialisasi Bantuan Sosial bagi PSKS dan Masyarakat | Jumlah peserta sosialisasi bantuan sosial | | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi bantuan sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi bantuan sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 05 | 2,02 | 01 |
| | | | | | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan | | | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 04 | 2,02 | 01 |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial | Jumlah KK hasil verifikasi dan validasi data keluarga miskin | | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah KK hasil verifikasi dan validasi data keluarga miskin | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah KK hasil verifikasi dan validasi data keluarga miskin | PROGRAM DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 05 | 2,02 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kota Malang | Jumlah anggota Karang Taruna yang dibina | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah anggota Karang Taruna yang dibina | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anggota Karang Taruna yang dibina | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 | 02 | 2,03 | 04 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|---|-------------|--------|--|--|---|--|--|---|---|---|------|---------------|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | Fasilitasi kegiatan Karang Werdha | Jumlah anggota Karang Werdha yang mengikuti pembinaan | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah anggota Karang Werdha yang mengikuti pembinaan | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anggota Karang Werdha yang mengikuti pembinaan | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 02 2.03 04 |
| | | | | | Pembinaan administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tertib administrasi | | | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tertib administrasi | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tertib administrasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 02 2.03 05 |
| | | | | | Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba | | | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 04 2.02 14 |
| | | | | | Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial | Jumlah peserta sarasehan dan yang menerima bingkisan/tali asih | | | Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sarasehan dan yang menerima bingkisan/tali asih | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sarasehan dan yang menerima bingkisan/tali asih | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 07 2.01 01 |
| | | | | | Pemeliharaan dan penataan TMP Surapati dan Monumen TRIP | Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1 | 06 07 2.01 02 |
| | | | | | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) | 1,7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pencatatan dan pelaporan Klinik | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Jumlah peserta pelatihan petugas pelaporan klinik | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah peserta pelatihan petugas pelaporan klinik | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 02 2.02 14 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|------------------------------------|-------------|--------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Bina Kesertaan KB | Jumlah peserta Pelayanan KB Gratis | | | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah peserta Pelayanan KB Gratis | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah peserta Pelayanan KB Gratis | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 01 |
| | | | | | Penguatan Pelaksana KB | Jumlah peserta pembinaan | | | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah peserta pembinaan | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah peserta pembinaan | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 |
| | | | | | Peningkatan pelayanan KIE KB bagi TOGA/TOMAS | Jumlah peserta KIE | | | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Pusyongatra | Jumlah peserta pembinaan | | | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah peserta pembinaan | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah peserta pembinaan | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Keluarga di Kota Malang | Jumlah peserta pelatihan | | | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah peserta pelatihan | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah peserta pelatihan | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|---|-------------|--------|--|---|--|---|--|---------------------------------|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pembinaan karakter keluarga di Kota Malang | Terlaksananya pembinaan karakter bagi keluarga di Kota Malang | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah peserta pembinaan | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya pembinaan karakter bagi keluarga di Kota Malang | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Penguatan Ketahanan Keluarga | Jumlah peserta pembinaan Ketahanan keluarga di Kota Malang | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah peserta pembinaan Ketahanan keluarga di Kota Malang | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah peserta pembinaan Ketahanan keluarga di Kota Malang | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kota Malang | Jumlah Peserta pembinaan bidang pendidikan dan ekonomi bagi keluarga di Kota Malang | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Peserta pembinaan bidang pendidikan dan ekonomi bagi keluarga di Kota Malang | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Peserta pembinaan bidang pendidikan dan ekonomi bagi keluarga di Kota Malang | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan | Terlaksananya pembinaan kesehatan keluarga dan lingkungan keluarga di Kota Malang | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya pembinaan kesehatan keluarga dan lingkungan keluarga di Kota Malang | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya pembinaan kesehatan keluarga dan lingkungan keluarga di Kota Malang | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--------|---|--|--|--|--|---------------------------------|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya pembinaan SDM bagi kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Malang | | | Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya pembinaan SDM bagi kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Malang | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya pembinaan SDM bagi kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Malang | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Pelatihan Peningkatan SDM Kader BKB Holistik Integratif (HI) | Jumlah peserta pelatihan | | | Orientasi/Pelatihan Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah peserta pelatihan | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah peserta pelatihan | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Pelatihan peningkatan SDM Kader BKL | Jumlah peserta pelatihan | | | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah peserta pelatihan | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah peserta pelatihan | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Pengembangan UPPKS | Jumlah kel. UPKS peserta pelatihan | | | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah kel. UPKS peserta pelatihan | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kel. UPKS peserta pelatihan | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Pengembangan Kapasitas program Saka Kencana dan BKR | | | | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah peserta pembinaan | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah peserta pembinaan | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 08 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--------|--|--|---|--|--|---------------------------------|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | pemilihan pusat informasi dan konseling/remaja/ma hasiswa (PIK-R/M) dan duta genre unggulan | Jumlah peserta lomba duta genre | | | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah peserta lomba duta genre | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah peserta lomba duta genre | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 08 |
| | | | | | Penyusunan Buku Profil Pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga | Jumlah peserta koalisi kependudukan,OPD terkait,Perguruan Tinggi | | | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Jumlah peserta koalisi kependudukan,OPD terkait,Perguruan Tinggi | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah peserta koalisi kependudukan,OPD terkait,Perguruan Tinggi | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase kelompok UPPKS aktif | 78 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kompetensi /Kapasitas Kader Tribina , PIK R dan UPPKS | Jumlah kelompok UPPKS Aktif | | | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah kelompok UPPKS Aktif | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok UPPKS Aktif | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase kelompok UPPKS aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Pemutakhiran data base Keluarga | Jumlah dokumen database keluarga | | | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah dokumen database keluarga | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah dokumen database keluarga | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Pembinaan dan monev SSK(Sekolah Siaga Kependudukan) | Jumlah peserta pembinaan SSK/sekolah Siaga Kependudukan | | | Perumusan Parameter Kependudukan | Jumlah peserta pembinaan SSK/sekolah Siaga Kependudukan | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah peserta pembinaan SSK/sekolah Siaga Kependudukan | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Prosentase organisasi perempuan yang aktif | 93 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan IPG dan IDG Kota Malang | Jumah dokumen IPG dan IDG | | | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumah dokumen IPG dan IDG | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Jumah dokumen IPG dan IDG | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 05 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--------|---|--|--|--|---|-------------------|--|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Updating Database Perempuan | Persentase OPD yang ikut dalam updating | | | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase OPD yang ikut dalam updating | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Persentase OPD yang ikut dalam updating | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan di Kota Malang | Jumlah peserta pelatihan membuat Aneka Mie, Decoupage, menjahit tingkat terampil | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pelatihan membuat Aneka Mie, Decoupage, menjahit tingkat terampil | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pelatihan membuat Aneka Mie, Decoupage, menjahit tingkat terampil | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pengembangan industri rumahan untuk menguatkan perempuan pelaku usaha | Jumlah peserta sosialisasi | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pelatihan pemasaran online | Jumlah peserta pelatihan pemasaran online | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pelatihan pemasaran online | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pelatihan pemasaran online | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Gelar produk hasil karya perempuan di Kota Malang | Jumlah peserta sosialisasi,seminar, pelatihan dan HUT DWP | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi,seminar, pelatihan dan HUT DWP | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi,seminar, pelatihan dan HUT DWP | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------------|--------|---|---|---|---|--|--|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Organisasi Wanita (GOW) Dikota Malang | Jumlah peserta sosialisasi, seminar, pelatihan | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi, seminar, pelatihan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi, seminar, pelatihan | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase organisasi perempuan yang aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 02 | 2.03 | 02 |
| | | | | | KIE Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang | Jumlah peserta Sosialisasi, Seminar, Pelatihan dan HUT DWP | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Sosialisasi, Seminar, Pelatihan dan HUT DWP | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Sosialisasi, Seminar, Pelatihan dan HUT DWP | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase organisasi perempuan yang aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 |
| | | | | | Kaukus Politik Perempuan di Kota Malang | Jumlah peserta sosialisasi | | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah peserta sosialisasi | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase organisasi perempuan yang aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Sekolah Kartini | Jumlah peserta sekolah kartini | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sekolah kartini | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sekolah kartini | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase organisasi perempuan yang aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 |
| | | | | | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) | Terlaksanannya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Malang | | | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksanannya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Malang | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Terlaksanannya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Malang | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 05 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender | Jumlah peserta pelatihan ARG | | | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah peserta pelatihan ARG | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pelatihan ARG | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase organisasi perempuan yang aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Pemilihan perempuan inspiratif di kota malang | Jumlah peserta lomba dan gebyar | | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah peserta lomba dan gebyar | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta lomba dan gebyar | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase organisasi perempuan yang aktif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|---|-------------|---------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|---|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Program Perlindungan Perempuan dan Anak | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 100 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi P2TP2A di Kota Malang | Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang tervalidasi serta tersusunnya data kekerasan di Kota Malang | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang tervalidasi serta tersusunnya data kekerasan di Kota Malang | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang tervalidasi serta tersusunnya data kekerasan di Kota Malang | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Advokasi pengasuhan anak di era milenial | OPD, Guru BK, Forum Anak, Pemerhati Perlindungan Anak | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | OPD, Guru BK, Forum Anak, Pemerhati Perlindungan Anak | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | OPD, Guru BK, Forum Anak, Pemerhati Perlindungan Anak | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Bimtek Penanganan KDRT bagi Pengurus Dasa Wisma di Tingkat Kelurahan | Jumlah peserta Bimtek | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Bimtek | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Bimtek | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Bimtek Konvensi Hak Anak | Jumlah peserta Bimtek | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Bimtek | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Bimtek | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Sosialisasi Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPPO) | Kader PKK, TOGA TOMA | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kader PKK, TOGA TOMA | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kader PKK, TOGA TOMA | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 03 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|---------------|---|---|-------------|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Forum Anak Kota Malang | Jumlah peserta temu anak dalam rangka Hari Anak Nasional dan FGD forum anak | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta temu anak dalam rangka Hari Anak Nasional dan FGD forum anak | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta temu anak dalam rangka Hari Anak Nasional dan FGD forum anak | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan di Kota Malang | Lembaga Perempuan peduli perlindungan | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga Perempuan peduli perlindungan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Lembaga Perempuan peduli perlindungan | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 07 | 2.03 | 03 |
| | | | | | Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak | Jumlah sekolah dan stakeholder yang terkait di kota malang | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sekolah dan stakeholder yang terkait di kota malang | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sekolah dan stakeholder yang terkait di kota malang | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 07 | 2.03 | 03 |
| | | | | | Fasilitasi Anak sebagai Pelopor dan Pelapor kekerasan | Jumlah peserta forum anak kota malang | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta forum anak kota malang | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta forum anak kota malang | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 07 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Pelatihan Penjangkauan anak berkebutuhan khusus | Jumlah pemerhati anak dan lembaga pemerhati anak di kota malang | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemerhati anak dan lembaga pemerhati anak di kota malang | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemerhati anak dan lembaga pemerhati anak di kota malang | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) | Jumlah pemerhati anak dan lembaga perlindungan anak di Kota malang | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemerhati anak dan lembaga perlindungan anak di Kota malang | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemerhati anak dan lembaga perlindungan anak di Kota malang | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 04 |
| | 5 | | | Urusan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | | Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|---------------|---|---|---------------|--------|--|---|---|--|---|-------------------|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100,00 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | 051 | Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | 1,00 kegiatan | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | 5 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | 2,00 Kali | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | 5 | 01 | 07 | 053 | Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas | Jumlah pengemudi/supir dinas | 7,00 Orang | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengemudi/supir dinas | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |
| | 5 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 1,00 Tahun | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | 5 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 10,00 Jenis | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | 5 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | 1,00 Dokumen | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | 5 | 01 | 07 | 044 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 1,00 Tahun | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | 5 | 01 | 07 | 047 | Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi | Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi | 12,00 Bulan | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | 5 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 1,00 Dokumen | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
| | 5 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 41,00 Jenis | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|-----|--------|---------------|--|--|---------------------------|--------|--|--|---|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | 050 | | | Peringatan/kegiatan insidental | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | 1,00 kegiatan | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | 5 | 01 | 07 | 037 | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 100.000,00 Orang | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | 5 | 01 | 07 | 010 | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4,00 Dokumen | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 02 |
| | 5 | 01 | 07 | 061 | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 5,00 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 13 |
| | 5 | 01 | 07 | 031 | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 3.500,00 Surat | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | 5 | 01 | 07 | 038 | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 33,00 Jenis | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | 5 | 01 | 07 | 020 | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 95,00 mobil | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | 5 | 01 | 07 | 034 | | | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 16,40 kendaraan | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 05 |
| | 5 | 01 | 07 | 004 | | | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | 1,00 Dokumen | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 1 | 2.02 | 01 |
| | 5 | 01 | 07 | 042 | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3,00 Jenis | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|-----|--------|---------------|---|---|---------------------------|--------|--|---|---|------------------------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | 058 | | | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | 1,00 gedung | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | Administrasi Umum | Jumlah gedung kantor yang dibangun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | 5 | 01 | 07 | 072 | | | Peningkatan/pe- mbangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 1,00 kegiatan | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | 5 | 01 | 07 | 035 | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 17,00 kendaraan | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |
| | 5 | 01 | 07 | 012 | | | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | 1,00 Dokumen | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | 5 | 01 | 07 | 018 | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 2,00 gedung | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | 5 | 01 | 07 | 045 | | | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | 13,00 Orang | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah petugas pengamanan kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 05 |
| | 5 | 01 | 07 | 032 | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 12,00 Bulan | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah jaringan telekomunikasi | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |
| | 5 | 01 | 07 | 022 | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 15,00 Jenis | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 09 |
| | 5 | 01 | 07 | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80,00 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Nilai survey kepuasan internal | 80,10 data | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----|----|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PTSP | 2 | 07 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 50 | % | | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 03 | | |
| | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas | 100 | orang | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 02 | Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah LPK yang mengikuti Bimtek | 30 | LPK/BL KLN | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah LPK yang mengikuti Bimtek | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 03 | 2.02 | 01 |
| | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 02 | Pemagangan Berbasis Pengguna di Perusahaan | Jumlah Masyarakat Pencari Kerja yang mengikuti pemagangan | 30 | LPK/BL KLN | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Masyarakat Pencari Kerja yang mengikuti pemagangan | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 02 |
| | 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL DIBIDANG KETENAGAKERJAN SEKTOR PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS | Persentase tenaga kerja pelatihan ketrampilan kerja | 60 | % | | | | | | | 2 | 07 | | | |
| | 2 | 07 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat | Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat | 120 | orang | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi | Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|---|---|---|--|--------|---------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|---|---|---|----|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | 2 | 07 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | 76 | % | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 04 | | | |
| | 2 | 07 | 05 | | | Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 65 | % | | | | | | | | | 2 | 07 | 05 | | | |
| | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 02 | Pembinaan Bursa Kerja Khusus | Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus | 50 | orang | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus | Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan antar kerja | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 03 |
| | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 03 | Pembahasan Usulan UMK Malang dan Survey Kebutuhan Hidup Layak | Jumlah rapat pembahasan rekomendasi UMK | 14 | kali | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Usulan UMK | Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bentuk Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten/Kota | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 01 |
| | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 04 | Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR, dan Penanganan Mayday | Jumlah rapat LKS Tripartit dan Pemantauan UMK dan THR dan Penanganan Mayday | 6 | Kali | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Pemantauan UMK, THR, dan Penanganan Mayday | Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bentuk Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten/Kota | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 04 |
| | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 02 | Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Jumlah peserta Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 100 | orang | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Pembinaan | Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bentuk Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten/Kota | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 2 | 07 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL DIBIDANG KETENAGAKERJAN SEKTOR PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERT | Persentase peningkatan lapangan kerja | 7 | % | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 04 | | |
| | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 03 | Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja | Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair | 60 | Perusahaan | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah informasi pasar kerja | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase peningkatan lapangan kerja | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 03 |
| | 2 | 18 | 04 | 2.03 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan jumlah minat investor | 40 | % | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 02 | |
| | 2 | 18 | 02 | 2.01 | 02 | Fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha | Jumlah Laporan kegiatan | 1 | dokumen | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase pelaksanaan kemudahan penanaman modal | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 02 | 2.01 | 02 |
| | 2 | 18 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal | Jumlah ranperwal | 1 | dokumen | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Ranperwal yang tersusun | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase pelaksanaan kemudahan penanaman modal | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 02 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Promosi investasi | Jumlah jenis promosi investasi | 1 | kali | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Keikutsertaan dalam gelar pameran investasi | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah penyelenggaraan promosi investasi | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan jumlah minat investor | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|---|--|---|---|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PENGENDALIAN, DATA DAN INFORMASI | Prosentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat | 20 | % | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 06 | | | |
| | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 01 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal | 10 | kali | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah jenis perizinan, non perizinan, dan perusahaan yang dimonitoring | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis pengendalian pelaksanaan penanaman modal | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase pemantauan pelaksanaan penanaman modal | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 |
| | 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan pengembangan SIM Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP | Jumlah aplikasi SIM | 1 | aplikai | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah data yang dikelola | Pengelolaan Data dan Informasi Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data yang dikelola | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Jumlah data yang dikelola | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Pengolahan dan Pemuktahiran data Tenaga Kerja, Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal | Jumlah data yang dikelola | 20000 | data | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah database Naker, PM dan PTSP yang dikelola | Pengelolaan Data dan Informasi Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data dan informasi yang tersedia | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Prosentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 03 | Penyuluhan Perizinan | Jumlah peserta penyuluhan | 500 | orang | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah peserta Sosialisasi/ Penyuluhan Naker, PM dan PTSP | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis pengendalian pelaksanaan penanaman modal | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase pemantauan pelaksanaan penanaman modal | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 02 |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan | Jumlah Pengaduan yang ditangani | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|---|--|--|---|-------------|--------------|---|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 2 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN EKONOMI PARIWISATA DAN SOSIAL BUDAYA | Persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi pariwisata dan sosial budaya | 85 | % | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | | | |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | Peninjauan lapangan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya | 100 | Berita Acara | Peninjauan lapangan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya | Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosbud yang diterbitkan | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota | Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEKERJAAN UMUM | Persentase penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum | 85 | % | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | | | |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Pelayanan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum | 1600 | Izin | Pelayanan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum | Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum yang diterbitkan | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota | Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | Peninjauan lokasi permohonan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum | 6000 | Berita Acara | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Jumlah Berita Acara Peninjauan Lapangan | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota | Jumlah Berita Acara Peninjauan Lapangan | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|------|----|--------|---------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|--|---|--|---|------|----|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | | | Persiapan mall pelayanan eks. Ramayana | Persiapan mall pelaya | 1 | dokumen | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik | Persiapan mall pelayanan eks. Ramayana | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota | Persiapan mall pelayanan eks. Ramayana | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KERJA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | |
| | | | | | | | | Program Kesekretariatan | Nilai SAKIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penatausahaan barang milik daerah | jumlah barang yang dihapuskan | 3 | laporan | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan dan laporan kinerja yang disusun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | jumlah dokumen LAKIP, PK dan SAKIP | 10 | dokumen | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan dan laporan kinerja yang disusun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
| | | | | | | | | Penyusunan laporan keuangan | jumlah laporan keuangan | 5 | laporan | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan dan laporan kinerja yang disusun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | | | Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan | jumlah dokumen standar pelayanan | 2 | dokumen | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen standar pelayanan | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | | | | | | | | Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan | jumlah sertifikasi | 1 | sertifikasi | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah sertifikasi | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | | | | | | | | Penyusunan Renja/RKT | jumlah dokumen Renja / RKT | 2 | dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | | | Penyusunan/Reviu Renstra | jumlah dokumen Renstra | 1 | dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------------|--------------|--|--|-------------------|--|--|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pemeliharaan berkala gedung kantor | luas gedung kantor yang dipelihara | 500 | m2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luas gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 40 | kendaraan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 8 | perlengkapan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 32 |
| | | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |
| | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jumlah bulan pembayaran belanja Telpn, Air dan Listrik | 12 | bulan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpn, air dan listrik | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 750 | m2 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah alat tulis kantor | 77 | jenis | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 27 | jenis | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 15 | jenis | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12 | jenis | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | jumlah makanan dan minuman | 5368 | kotak | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 43 | kali | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | | | | | Peringatan/Kegiatan Insidentil | jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 1 | kali | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|---|-------------|-----------|--|---|---|--|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip | jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | 3000 | berkas | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | | | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | jumlah peralatan gedung kantor | 8 | peralatan | Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |
| | | | | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 24 |
| | | | | | Pengadaan pakaian dinas / pakaian khusus | jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu | 100 | pakaian | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur yang disiplin | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 05 |
| | | | | | Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 100 | orang | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur yang disiplin | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | | | | | Penyusunan Profil Perangkat Daerah | jumlah dokumen profil perangkat daerah | 1 | dokumen | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----|---|----|--------|---|---|-----------|---------------------------|---|----------------|--|----------------|---|---|-----------------------------------|---|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 15 | | | | | | 38% | % | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Persentase Ketersediaan pangan utama | 2% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | Jumlah promosi | 2 | promosi | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah promosi | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah promosi | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan pangan utama | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 03 |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | [4.0] | Fasilitasi perumusan kebijakan pangan | Jumlah rekomendasi | 1 | dokumen | Penyusunan dan Penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun | jumlah dokumen | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah dokumen | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan pangan utama | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 01 |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | [4.0] | Analisa Stabilitas Harga dan Pasokan | Jumlah dokumen | 1 | dokumen | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah dokumen | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah dokumen | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan pangan utama | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 04 |
| | | | | | | Analisa Pola Distribusi Pangan | Jumlah dokumen | 1 | dokumen | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah dokumen | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah dokumen | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan pangan utama | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 03 |
| | | | | | | Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Jumlah dokumen | 1 | dokumen | Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan | Jumlah dokumen | Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan | Jumlah dokumen | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Ketersediaan pangan utama | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 09 | 04 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---------------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|----------------------------|--|--|---|---|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | Analisa Neraca Bahan Makanan | Jumlah dokumen | 1 | dokumen | Penyediaan Informasi harga Pangan dan neraca Bahan makanan | Jumlah dokumen | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah dokumen | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan pangan utama | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | Fasilitasi kemitraan ketersediaan pangan | Jumlah Kemitraan | 2 | MoU | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah peserta pelatihan | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah peserta pelatihan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan pangan utama | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 05 |
| | | | | | | Fasilitasi KIE penganekekaragamn pangan | Jumlah Kelompok | 10 | kelompok | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal | jumlah kelompok masyarakat | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | jumlah kelompok masyarakat | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan pangan utama | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 02 |
| | | | | | | Fasilitasi KIE pola konsumsi pangan | | 100 | peserta | Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Ketersediaan pangan utama | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 09 | 04 | 2.02 | 01 |
| | | | | | | | | 10 | sampel | Peyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten kota | Jumlah sampel | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sampel | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Ketersediaan pangan utama | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 03 |
| | | | | | | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan | jumlah peserta | 110 | peserta | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah peserta pelatihan | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | Jumlah pembudidaya ikan yang ditingkatkan kapasitasnya | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | prosentase peningkatan produksi perikanan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 04 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|---|----|--------|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------|---|---|--|--|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|----|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 9 | | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan | jumlah peserta | 100 | peserta | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah peserta | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah peserta | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Peningkatan Pemeriksaan Contoh Pangan Asal Hewan (PAH) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 27 | 04 | 2.04 | 01 | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Produksi Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan/Perkebunan/Hortikultura | Jumlah jenis bantuan | | 2 | jenis bantuan | Pendampingan sarana pendukung pertanian | Jumlah jenis bantuan | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah jenis bantuan | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | prosentase peningkatan produksi pertanian | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 12 | | Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / perkebunan | Jumlah jenis alat pertanian | | 2 | alat perta | Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas ,tehnologi dan specifik lokasi | Jumlah jenis alat pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah jenis alat pertanian | PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | prosentase peningkatan produksi pertanian | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | | Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi | Jumlah peserta | 120 | peserta | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah peserta | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah peserta | PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | prosentase peningkatan produksi pertanian | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 19 | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan | Jumlah penyuluh | 30 | penyuluh | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah penyuluh | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah penyuluh | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | peningkatan skor kelompok tani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 20 | | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani | Jumlah Poktan | 45 | poktan | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Poktan | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah Poktan | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | peningkatan skor kelompok tani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 02 | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 21 | | Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian | Jumlah dokumen | 6 | dokumen | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah dokumen | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah dokumen | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | peningkatan skor kelompok tani | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | |
| | | | | | | | Pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian | Jumlah alat | | 2 | alat | Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | Jumlah alat | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah alat | PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | prosentase peningkatan produksi pertanian | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 22 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bagian Hubungan Masyarakat | 4 | 403 | 1 | 19 | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat | 7800 | surat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----|---|----|--------|---------------|--|------------------------|---------------------------|-----------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 19 | 1 | | Penyediaan ATK | Jumlah jenis | 255 | jenis | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | 4 | 403 | 1 | 19 | 2 | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan | 60 | bulan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | 4 | 403 | 1 | 19 | 3 | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah hari | 1345 | hari | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | 4 | 403 | 1 | 19 | 5 | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis peralatan | 50 | jenis peralatan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |
| Bagian Perencanaan dan Keuangan | 4 | 403 | 1 | 20 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah jenis | 35 | jenis | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah mamin | | mamin | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat | 1228 | rapat | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | | | | | | | Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi | Jumlah informasi | 20 | informasi | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah informasi | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | | | | | | | Peringatan/Kegiatan Insidentil | Jumlah kegiatan | 6 | kegiatan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | | | | | | | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah jenis | 60 | jenis | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 24 |
| | 4 | 403 | 1 | 20 | [4.0] | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung | 14 | gedung | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | 4 | 403 | 1 | 20 | [4.0] | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan | 133 | kendaraan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------|----------|-----------|--------|---------------|---|-----------------|---------------------------|----------|--|--|---|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |
| | 4 | 403 | 1 | 20 | [4.0] | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah jenis | 28 | jenis | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah jaringan telekomunikasi | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |
| | 4 | 403 | 1 | 20 | 3 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah gedung | 8 | gedung | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 38 |
| | 4 | 403 | 1 | 20 | 5 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen | 3 | dokumen | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | 4 | 403 | 1 | 20 | 7 | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 20 | 8 | | Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur | jumlah peserta | 69 | peserta | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dike mbangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| Bagian Umum | 4 | 403 | 1 | 21 | | | Pelaksanaan Pertimbangan Penetapan Angka Kredit | Jumlah penyuluh | 79 | penyuluh | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah penyuluh | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | 4 | 403 | 1 | 21 | [4.0] | | Peningkatan/pe mbangan kapasitas sumberdaya apartur | | 240 | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dike mbangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | 4 | 403 | 1 | 21 | [4.0] | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 21 | [4.0] | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jumlah dokumen | 5 | dokumen | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
| | 4 | 403 | 1 | 21 | [4.0] | | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah dokumen | 5 | dokumen | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 07 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-----|---|----|--------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|---------|--|-------------------------|---|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 08 |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Administrasi Keuangan | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | X | XX | 01 | 2,02 | 01 |
| | 4 | 403 | 1 | 21 | [4.0 | | Survey Kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen | 3 | dokumen | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2,01 | 05 |
| | | | | | | | Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan | Jumlah dokumen | 5 | dokumen | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 03 |
| | | | | | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen | 6 | dokumen | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 02 |
| | | | | | | | Penyusunan/Reviu Renstra | Jumlah dokumen | 4 | dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen | 4 | dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | | Penyusunan Profil SKPD | Jumlah dokumen | 4 | dokumen | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | jumlah dokumen | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|----------------|---|----------------|--|---|-------------------|---------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | | | | | | Pengumpulan data informasi pembangunan daerah | Jumlah dokumen | 3 | dokumen | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | jumlah dokumen | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|------|--------|------------------|---|---|-------------|---------|--|--|--|---|---|---|---|---|------|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Program Penataan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prosentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standart | 85% | % | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1102 | 2.002 | | Perencanaan Lingkungan Hidup | Jumlah Kajian Perencanaan Lingkungan | 10 dokumen | dokumen | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah kajian perencanaan lingkungan | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan lingkungan | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standart | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1102 | 2.02 | 02 |
| | 2 | 1106 | 2.001 | | Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen lingkungan yang telah di verifikasi | 350 dokumen | dokumen | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah dokumen lingkungan yang telah diverifikasi (dokumen yang masuk) | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai izin lingkungan izin PPLH | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase kegiatan usaha yang mempunyai izin lingkungan izin PPLH | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1106 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 1103 | 2.001 | | Pemeliharaan Lingkungan Hidup | Jumlah hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup | 1 dokumen | dokumen | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1103 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 1103 | 2.001 | | Operasional Uji Laboratorium terhadap Kualitas Parameter LH | Jml Lembar Hasil Uji (LHU) | 75 LHU | LHU | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah Laporan Hasil Uji (LHU) | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1103 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 1103 | 2.001 | | Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium | Jumlah Sarana Prasarana lab | 7 Jenis | jenis | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1103 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|---------------|------------------|-----------|-------------|--|--|------------------------|-----------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | | |
| | 2 | 11 | 05 | 2.0 | 01 | | | Penanganan Limbah B3 | Jumlah Pelaku usaha yang sudah melakukan penanganan Limbah B3 | 125 keg/usaha | keg/usaha | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang sudah melakukan penanganan Limbah B3 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah pelaku usaha yang mempunyai izin penyimpanan sementara limbah B3 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase pelaku usaha yang mempunyai izin penyimpanan sementara limbah B3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 11 | 05 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 11 | # | 2.0 | 03 | | | Operasional Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan PKD | Jumlah sampah tertampung | 178.200 ton/tahun | ton/tahun | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah sampah tertampung | Pengelolaan Sampah | Jumlah volume sampah yang dikelola | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | prosentase sampah yang dikelola | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 |
| | 2 | 11 | # | 2.0 | 01 | | | Pengembangan Sistem Pengelolaan Kendaraan/ Peralatan Operasional Persampahan | Jumlah Kendaraan/ Peralatan Operasional yang terpantau pemeliharaannya | 35 unit | unit | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Jumlah Kendaraan/ Peralatan Operasional Persampahan yang terpantau pemeliharaannya | Pengelolaan Sampah | Jumlah volume sampah yang dikelola | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | prosentase sampah yang dikelola | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 11 | # | 2.0 | 03 | | | Pelayanan Pemrosesan Sampah | Jumlah Penanganan Sampah | 183068 ton/tahun | ton/tahun | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Penanganan Sampah | Pengelolaan Sampah | Jumlah volume sampah yang dikelola | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | prosentase sampah yang dikelola | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 |
| | | | | | | | | Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 11 | # | 2.0 | 01 | | | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup | jumlah pengaduan yang tertangani | 30 pengaduan | pengaduan | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | jumlah pengaduan yang tertangani | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan yang terselesaikan | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pengaduan yang terselesaikan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 11 | 10 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 11 | 06 | 2.0 | 03 | | | Pengawasan Pengelolaan LH | Jumlah pengawasan dan penegakan lingkungan hidup | 90 kali | kali | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengawasan dan penegakan lingkungan hidup | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai izin lingkungan izin PPLH | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | prosentase kegiatan usaha yang mempunyai izin lingkungan izin PPLH | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------|--------|---------------|--|--|------------------------|---------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|------|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 2 | 1106104 | | | Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lingkungan | Jumlah Pelanggaran yang ditangani | 25 keg dan/ atau usaha | keg dan/atau usaha | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah Pelanggaran yang ditangani | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai izin lingkungan izin PPLH | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | prosentase kegiatan usaha yang mempunyai izin lingkungan izin PPLH | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1106 | 2.01 | 04 |
| | 2 | 1108102 | | | Peningkatan Edukasi dan Pembinaan Lingkungan Hidup | jumlah edukasi lingkungan hidup | 2 Dokumen | Dokumen | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah masyarakat/ lembaga kemasyarakatan dan sekolah yang sudah dilakukan pendampingan di bidang lingkungan hidup | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1108 | 2.01 | 02 |
| | 2 | 1109101 | | | | | | | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | jumlah edukasi lingkungan hidup | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penghargaan lingkungan Hidup yang diterima | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1109 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 1108101 | | | Pembinaan Kampung Lingkungan Hidup | Jumlah RW yang melaksanakan pengelolaan lingkungan Hidup | 228 RW | RW | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah tenaga kemasyarakatan dan peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1108 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 1109101 | | | | | | | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah RW yang melaksanakan pengelolaan lingkungan Hidup | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penghargaan lingkungan Hidup yang diterima | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1109 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 1108102 | | | Kemitraan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah kemitraan dan kerjasama yang dilakukan DLH | 5 Mitra | mitra | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah kemitraan dan kerjasama yang dilakukan DLH | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1108 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|---|---|---------------|--|--|--------------|---------------------------|--|---|-------------------|---|--|-------------------|---------------|--------|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 01 | 2.03 | 02 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik | 12 bulan | bulan | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air, listrik, dan publikasi | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 02 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional | 285 Unit | unit | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan yang memenuhi perizinan operasi | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 03 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 162 Ha/tahun | Ha/tahun | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 08 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah alat tulis kantor | 75 jenis | jenis | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor ang tersedia | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 10 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 11 jenis | jenis | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 11 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10 jenis | jenis | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 12 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan peralatan rumah tangga | jumlah peralatan rumah tangga | 17 jenis | jenis | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 14 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 450 buku | buku | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 15 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan makanan dan minuman | jumlah makanan dan minuman | 67000 Kotak | kotak | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 17 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 90 Kali | kali | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 18 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | jumlah petugas pengamanan kantor | 3 orang | orang | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terasuransikan | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 05 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|---|--------|---------------|--|---|-----------------|---------------------------|--|---|---|---|--|-------------------|---------------|--------|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi | jumlah informasi, publikasi dan komunikasi | 100 kali | kali | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air, listrik, dan publikasi | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 02 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Peringatan/Kegiatan Insidentil | jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 2 kali kegiatan | kali kegiatan | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 17 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas | Jumlah pengemudi/supir dinas | 3 orang | orang | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan yang memenuhi perijinan operasi | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 06 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | jumlah kendaraan dinas/ operasional | 113 Unit | unit | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 20 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Pembangunan gedung kantor | Luasan gedung kantor yang terbangun | 10000 m2 | m ² | - | | | | | | | | 01 | 2.03 | |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor | 18 jenis | jenis | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 13 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu | 1400 stel | stel | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.04 | 03 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Pengadaan bbm dan pelumas | jumlah/volume bbm dan pelumas | 3000 Voucher | voucher | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 16 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 65 ASN | ASN | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.04 | 09 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 13500 m2 | m ² | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor terpelihara | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 28 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 16 unit | unit | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 30 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung kantor | jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 6 jenis | jenis | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | 01 | 2.03 | 32 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|------------------|--|--|---|---|--|-------------------|---------------|--------|------|--|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 | 2.03 | 34 | |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi | jumlah jaringan telekomunikasi | 3 jaringan | jaringan | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan Peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 01 | 2.03 | 32 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | | Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi/ Aplikasi | jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi | 1 sistem informasi | sistem informasi | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 01 | 2.03 | 01 |
| | 5 | xx | vv | 7 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | 1 dokumen | dokumen | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terasuransikan | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 01 | 2.03 | 05 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 9 dokumen | dokumen | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 01 | 2.02 | 06 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | | Penyusunan laporan keuangan | jumlah laporan keuangan | 14 dokumen | dokumen | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 01 | 2.02 | 01 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | | Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat | jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat | 2 dokumen | dokumen | Penyediaan Jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 01 | 2.03 | 01 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | | Penyusunan/ Reviu Standar Pelayanan | jumlah dokumen standar pelayanan | 1 dokumen | dokumen | Penyediaan Jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | Persentase capaian kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 01 | 2.03 | 01 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | dokumen | Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan | Jumlah dokumen anggaran perangkat daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 01 | 2.01 | 02 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | | Penyusunan/ Reviu Renstra | jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen | dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Restra dan Renja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 01 | 2.01 | 01 |
| | 5 | xx | 1 | 7 | | | Penyusunan Renja/RKT | jumlah dokumen Renja/RKT | 2 dokumen | dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Restra dan Renja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSA NPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 01 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----|--------------|--|--|---|---|--------|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | | | | | |
| | 1 | 12 | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2 | 12 | | | | | |
| | 1 | 12 | 1 | 1 | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | Implementasi Wajib E-KTP dan Kartu Keluarga | Jumlah E-KTP dan KK yang diterbitkan | | | Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah E-KTP dan KK yang diterbitkan | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah E-KTP dan KK yang diterbitkan | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan | | | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 07 |
| | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | Pendataan Dokumen Kependudukan | Jumlah pendataan dokumen kependudukan | | | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah pendataan dokumen kependudukan | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah pendataan dokumen kependudukan | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan | | | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 01 |
| | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk | Jumlah penduduk yang ber- KTP | | | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah penduduk yang ber- KTP | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah penduduk yang ber- KTP | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan | | | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 04 |
| | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | Sosialisasi SKPLN dan SKDLN | Jumlah Sosialisasi | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Sosialisasi | Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan | Jumlah Sosialisasi | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan. | | | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 05 |
| | 1 | 12 | 1 | 2 | | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | Relasi Penerbitan Akta Pencatatan Sipil | | | | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | Pelayanan Pencatatan Sipil | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil | | | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 02 |
| | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran | Jumlah kutipan Akta Kelahiran | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah kutipan Akta Kelahiran | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah kutipan Akta Kelahiran | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil | | | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|------------------|--|---|--------|--|---|---|---|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | Jumlah laporan keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) | Jumlah ZI | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah ZI | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah sertifikasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan | Jumlah sertifikasi | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah sertifikasi | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah sertifikasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Luasan gedung kantor yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|------------------|-----------|-------------|--|---|------------------------|----------|--|---|---|---|--|--------------------------------|--|--|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 31 | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 32 | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Administrasi Umum | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 03 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 37 | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | Luasan ruangan yang dibersihkan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 38 | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | Jumlah alat tulis kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 39 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 40 | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 42 | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 43 | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | Jumlah makanan dan minuman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 44 | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 50 | | | Peringatan/kegiatan insidental | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | Administrasi Umum | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 72 | | | Peningkatan/peimbangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|---|---|----|--------|---------------|--|-----------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 61 | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 24 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|---------------------------|---------------|------------------|--|---|---|---------------------------|--|---|--------------------|--|--|---|---|-----------------|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Dinas Perhubungan | 1 | | Urusan Pemerintahan Wajib | | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | |
| | 1 | 15 | | Perhubungan | | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 01 | Program Pelayanan Kesekretariatan | Presentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 80 | % | | | | | | | | |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 011 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat teradministrasi dengan baik | 5000 | surat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | Jumlah surat teradministrasi dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Presentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | 1 15 01 2.03 01 |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 012 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air, dan listrik | 12 | bulan | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air, dan listrik | Administrasi Umum | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 15 01 2.03 02 |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 013 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 8 | paket | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Administrasi Umum | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 15 01 2.03 03 |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 014 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan (asuransi) | 5 kendaraan empat dan 20 kendaraan Roda dua | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan (asuransi) | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 15 01 2.03 05 |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 015 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Belanja Surat Tanda Kendaraan bermotor | 17 kendaraan Roda empat dan 50 kendaraan Roda dua | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Belanja Surat Tanda Kendaraan bermotor | Administrasi Umum | Belanja Surat Tanda Kendaraan bermotor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 15 01 2.03 06 |
| | 1 | 15 | 1.15 | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah bulan | 12 | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah bulan | Administrasi Umum | Jumlah bulan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 15 01 2.03 07 |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 017 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | luasannya yang dibersihkan | Gedung Kantor Dinas, Gedung Bengkel | 2 gedung | Penyediaan jasa kebersihan kantor | luasannya yang dibersihkan | Administrasi Umum | luasannya yang dibersihkan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 15 01 2.03 08 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|----|-----|--------|---------------|--|--|---|----------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------------|---------------|--------|------|---|----|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 018 | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK dan Materai | 47 jenis ATK dan 700 Materai | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK dan Materai | Administrasi Umum | Jumlah ATK dan Materai | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 1 | 15 | 01 | 2.03 | 10 | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 019 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 20 jenis cetakan 1 paket penjilidan dan 152100 lembar foto copy | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 1 | 15 | 01 | 2.03 | 11 | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 010 | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 20 jenis | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 1 | 15 | 01 | 2.03 | 12 | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 012 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4 jenis | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Administrasi Umum | Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 1 | 15 | 01 | 2.03 | 15 | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 014 | | | Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan minuman | 3700 nasi kotak, 2580 snack, 35 nampan kue tamu, 200 gelas kopi & 100 dos air mineral | | Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan minuman | Administrasi Umum | Makanan dan minuman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 1 | 15 | 01 | 2.03 | 17 | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 015 | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | perkiraan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah | 100 kali dalam daerah, 110 kali luar daerah dan 1 kali luar negeri | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | perkiraan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah | Administrasi Umum | perkiraan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 1 | 15 | 01 | 2.03 | 18 | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 023 | | | Peringatan/Kegiatan Insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 1 | kegiatan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 029 | | | Fasilitasi Kegiatan Insidentil | jumlah fasilitas kegiatan insidentil yang diselenggarakan | 1 paket | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|----|--------|---------------|--|--|---|----------------|--|---|---|---|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | | | Pemeliharaan taman perkantoran | Pemeliharaan taman kantor dinas | 1 kegiatan | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah taman yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | | | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Kendaraan dinas | 1 unit Kendaraan Derek, 1 unit Truck, 3 unit sepeda motor, dan 5 unit sepeda angin | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 20 |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 029 | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Peralatan kantor | 5 unit AC, 3 unit komputer, 3 unit laptop, 5 unit printer, 1 set LCD proyektor, mebel | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Administrasi Umum | Jumlah perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1 | 15 | 01 | 2.03 | 13 |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 013 | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 2 | Gedung | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1 | 15 | 01 | 2.03 | 28 |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | | | Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor | Tempat Parkir Sepeda Motor bertingkat | 1 bangunan | | Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor | | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1 | 15 | 01 | 2.03 | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 015 | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | kebutuhan bahan bakar, minyak suku cadang dan jasa service | 14 kendaraan roda empat dan 50 unit kendaraan roda dua dan 2 Genset | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | kebutuhan bahan bakar, minyak suku cadang dan jasa service | Administrasi Umum | kebutuhan bahan bakar, minyak suku cadang dan jasa service | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1 | 15 | 01 | 2.03 | 30 |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 027 | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | 100 PDH & 74 PDL | stel PDL & PDH | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1 | 15 | 01 | 2.04 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|---------------|------------------|---|--|------------|---|--|--|---|--|---|---|--------|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 061 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD | 3 dokumen | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 | 15 | 01 | 2.02 | 06 | |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 062 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | 2 | dokumen laporan keuangan semesteran & akhir tahun | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | Jumlah laporan keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 | 15 | 01 | 2.02 | 07 | |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 063 | Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD | Jumlah bahan ANJAB/ABK/SKPD | 1 Dokumen | dokumen | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah bahan anjab/abk skpd | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | X | XX | 01 | 2.02 | 02 | |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 067 | Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) | Jumlah dokumen ZI | 1 Kegiatan | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah ZI | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 | |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 069 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 | 15 | 01 | 2.01 | 02 | |
| | 1 | 15 | 1 | 6 | 12 | Penyusunan Renja | Dokumen Renja. | 1 | dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 | 15 | 01 | 2.01 | 01 | |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 011 | Penyusunan/Reviu Renstra | Dokumen Renstra | 1 | dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 | 15 | 01 | 2.01 | 01 | |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 015 | Penyusunan Profil Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Profil SKPD | 1 | dokumen | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Profil SKPD | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Profil SKPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 1 | 15 | 01 | 2.01 | 03 | |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | 15 | Program Pengendalian Lalu Lintas | % penurunan titik kemacetan | 68 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 15 | 1.1 | 01 | | Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Jumlah perawatan | 1 kegiatan | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah perawatan | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perawatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | % penurunan titik kemacetan | | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 04 | |
| | | | | | | | | 1 kegiatan | | Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Dokumen perencanaan | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Dokumen perencanaan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 01 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|---------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|-----------------------------|---------------|--------|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Kegiatan Penunjang Operasional Terminal/ | Jumlah perawatan | 1 kegiatan | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 04 | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 151 | Monitoring evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan | Jumlah dokumen | 12 laporan, listrik 12 bln, 2 paket penelitian | dokumen | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Jumlah dokumen | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | % penurunan titik kemacetan | | | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 01 | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 152 | Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas | Jumlah tersedianya fasilitas pengamanan lalu lintas | 10 | jenis | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah tersedianya fasilitas pengamanan lalu lintas | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | % penurunan titik kemacetan | | | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | | Pengadaan traffic Light | Jumlah Traffic light | 1 | paket | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Traffic light | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | % penurunan titik kemacetan | | | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 01 | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 161 | Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalulintas | pemeliharaan fasilitas lalu lintas | 1 | paket | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | pemeliharaan fasilitas lalu lintas | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | % penurunan titik kemacetan | | | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 02 | |
| | 1 | 15 | 1 | 25 | 001 | Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day | Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas | 1 | kegiatan | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi | Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | % penurunan titik kemacetan | | | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 04 | |
| | 1 | 15 | 1 | 25 | 003 | Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas | Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas | 1 | kegiatan | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi | Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | % penurunan titik kemacetan | | | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 04 | |
| | 1 | 15 | 1 | 25 | | Penyusunan Ranperwal penyelenggaraan Lalu Lintas | Dokumen Rancangan Perwal Lalu Lintas | 1 | dokumen | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Dokumen Rancangan Perwal Lalu Lintas | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | % penurunan titik kemacetan | | | | | | | | |
| | 1 | 15 | .1 | 01 | 17 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | 26,78 | persen | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|---|----|--------|---------------|--|---|---------------------------|----------|--|---|---|---|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 1 | 15 | 1 | 01 | 171 | | Penyelenggaraan Angkutan Lebaran | Jumlah koordinasi dan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran | 1 | kegiatan | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 01 |
| | 1 | 15 | 1 | 01 | 174 | | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah program kerja Forum lalu lintas | 1 | kegiatan | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah program kerja Forum lalu lintas | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah program kerja Forum lalu lintas | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 02 |
| | 1 | 15 | 1 | 01 | 175 | | Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum | Jumlah tercapainya monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum | 1 | kegiatan | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah tercapainya monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Jumlah tercapainya monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 05 |
| | 1 | 15 | 1 | 01 | 176 | | Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru | Jumlah laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru | 1 | kegiatan | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.10 | 02 |
| | 1 | 15 | 1 | 25 | 002 | | Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus | Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas | 1 | kegiatan | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 04 |
| | | | | | | | Studi/analisis/kajian penyelenggaraan pelayanan angkutan jalan (Revitalisasi Terminal) | Jumlah dokumen | | | Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah dokumen | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah dokumen | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|---|--------|--|---|-----------------------------------|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 1 | 15 | 1 | | Kegiatan Penunjang Operasional Terminal | jumlah pemeliharaan | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | jumlah pemeliharaan | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | jumlah pemeliharaan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 04 |
| | 1 | 15 | 1 | 25 | Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur | Jumlah laporan hasil Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur | 1 | kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 15 | 1 | 25 | Penyusunan Perwal penyelenggaraan Angkutan Jalan | Dokumen Perwal penyelenggaraan Angkutan Jalan | 1 | kegiatan | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Perwal penyelenggaraan Angkutan Jalan | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Perwal penyelenggaraan Angkutan Jalan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | | 2 | 15 | 02 | 2.01 | 02 |
| | 1 | 15 | 1 | 29 | 18 | Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan | | | | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.11 | 02 |
| | 1 | 15 | 1 | 29 | 19 | Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang | Jumlah peserta | 400 | | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.14 | 02 |
| | 1 | 15 | 1 | 09 | 001 | Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor | Jumlah angkutan umum yang uji kir | 1 | paket | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah angkutan umum yang uji kir | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah angkutan umum yang uji kir | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 03 |
| | 1 | 15 | 1 | 09 | 002 | Insidental Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor | Jumlah perawatan | 1 | paket | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah perawatan | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah perawatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|---|--------|---------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|---|--|--|--|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah lembar Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah lembar Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 04 | |
| | 1 | 15 | 1 | 09 | 003 | Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor | Jumlah perawatan alat uji dan kalibrasi | 1 | paket | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah perawatan alat uji dan kalibrasi | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah perawatan alat uji dan kalibrasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 07 | |
| | 1 | 15 | 1 | 09 | 003 | Pengadaan alat keamanan dan keselamatan kerja | Jumlah alat keselamatan | 6 Jenis alat keselamatan kerja | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah alat keselamatan | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah alat keselamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 01 | |
| | 1 | 15 | 1 | | | Program Pelayanan Perpajakan | Kontribusi retribusi pelayanan terhadap PAD | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 15 | 1 | 01 | 191 | Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir | Jumlah jenis karcis | Rp. 10.1 milyar | | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah jenis karcis | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah jenis karcis | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Kontribusi retribusi pelayanan terhadap PAD | | | 2 | 15 | 02 | 2.04 | 01 | |
| | 1 | 15 | 1 | 01 | 192 | Pembinaan Petugas Parkir | Jumlah petugas parkir ikut pembinaan | 1000 orang | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah petugas parkir ikut pembinaan | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah petugas parkir ikut pembinaan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Kontribusi retribusi pelayanan terhadap PAD | | | 2 | 15 | 02 | 2.04 | 02 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----|------|----|-----|---------------------------|---|--|--|-------------|---------------------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------------|---|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | | |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | | | | | Urusan Pemerintahan Wajib | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | |
| | 1 | 15 | | | | | URUSAN PEMERINTAH TAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 01 | | | Program pelayanan kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | % | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 013 | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 12 | bulan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Nilai survey kepuasan internal | | | x | xx | 01 | 2.03 | 02 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 014 | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah luasan ruangan yang di bersihkan | 14 | ruangan | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah luasan ruangan yang di bersihkan | Administrasi Umum | Jumlah luasan ruangan yang di bersihkan | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Nilai survey kepuasan internal | | | x | xx | 01 | 2.03 | 07 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 015 | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK kantor | 30 | jenis | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK kantor | Administrasi Umum | Jumlah ATK kantor | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Nilai survey kepuasan internal | | | x | xx | 01 | 2.03 | 10 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 017 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan | 5 | jenis | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan | Administrasi Umum | Jumlah barang cetak dan penggandaan | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Nilai survey kepuasan internal | | | x | xx | 01 | 2.03 | 11 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 018 | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 7 | jenis | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Nilai survey kepuasan internal | | | x | xx | 01 | 2.03 | 12 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 019 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5 | jenis | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Nilai survey kepuasan internal | | | x | xx | 01 | 2.03 | 15 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 010 | | | Penyediaan makanan dan minuman | jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu | 50 | kali | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu | Administrasi Umum | jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Nilai survey kepuasan internal | | | x | xx | 01 | 2.03 | 17 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 012 | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | jumlah rakor dan konsultasi ke luar daerah | 25 | kali | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah rakor dan konsultasi ke luar daerah | Administrasi Umum | jumlah rakor dan konsultasi ke luar daerah | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Nilai survey kepuasan internal | | | x | xx | 01 | 2.03 | 15 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|------|----|-----|--------|---------------|---|---|----------------------|---------------------------|--|--|---|--|--|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 014 | | | Peringatan/Kegiatan Insidentil | jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 2 kali keikutsertaan | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Administrasi Umum | jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Nilai survey kepuasan internal | | | x | xx | 01 | | |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 023 | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | 14 Jenis | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | Jumlah peralatan gedung kantor | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 24 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 029 | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang direhabilitasi | 16 Kendaraan | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang direhabilitasi | Administrasi Umum | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang direhabilitasi | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 30 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | | | | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara | 7 ruangan | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara | Administrasi Umum | Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 28 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara | 10 jenis | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara | Administrasi Umum | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | x | xx | 01 | 2.03 | 32 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 029 | | | peningkatan / Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah pelaksanaan | 1 kali pelaksanaan | | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pelaksanaan | Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah pelaksanaan | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | | | | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | 1 dokumen | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | Jumlah laporan keuangan | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | X | XX | 01 | 2.02 | 01 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 062 | | | Penyusunan/Reviu Renstra | Jumlah dokumen renstra | 1 dokumen | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen renstra | Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen renstra | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 063 | | | Renja / RKT kominfo | Jumlah dokumen renja / RKT | 1 dokumen | | penyusunan renstra dan renja perangkat daerah | Jumlah dokumen renja / RKT | Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen renja / RKT | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 069 | | | Meningkatnya integrasi teknologi informasi | Indeks Kematangan SPBE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 15 | 1,2 | 6 | 12 | | | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | 81% | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|------|----|-----|--------|---|---|---------------------------------|-------------|--|---|--|---|---|--|---|---|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 011 | | Teknologi Digital Bagi Lembaga Penyiaran | jumlah pelaksanaan pemberdayaan lembaga penyiaran | 1 kali | | Layanan Hubungan Media | jumlah pelaksanaan pemberdayaan lembaga penyiaran | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | jumlah pelaksanaan pemberdayaan lembaga penyiaran | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2,01 | 07 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 015 | | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan | 1 kali | | Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2,01 | 10 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 151 | | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik | Jumlah pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | 3 kali | | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2,01 | 03 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 161 | | Diseminasi Informasi Publik Kota Malang | Jumlah informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat | 3 tema sosialisasi/ tahun | | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2,01 | 06 |
| | 1 | 15 | 1,2 | 25 | 001 | | Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang | Jumlah dokumentasi yang diolah | 12 Dokumentasi/ tahun | | Monitoring opini dan aspirasi publik | Jumlah dokumentasi yang diolah | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi publik yang dipublikasikan | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2,01 | 02 |
| | 1 | 15 | 1,2 | 25 | 003 | | Pengolahan Konten Website Pemkot Malang | Jumlah Konten Website yang diposting dan lomba website | 1035 posting web/ tahun | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Konten Website yang diposting dan lomba website | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi publik yang dipublikasikan | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2,01 | 04 |
| | 1 | 15 | 1,2 | 25 | | | Publikasi Melalui Media Konvensional | Leaflet, brosur, stiker, poster, baliho, billboard/videotron | 6 tema Publikasi / tahun | | Pengelolaan media komunikasi publik | Leaflet, brosur, stiker, poster, baliho, billboard/videotron | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi publik yang dipublikasikan | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2,01 | 05 |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 171 | | Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Melalui Media Baru | Pengelolaan media jejaring sosial dalam mengelola aspirasi masyarakat | 12 topik yang dianalisis/ tahun | | Monitoring opini dan aspirasi publik | Pengelolaan media jejaring sosial dalam mengelola aspirasi masyarakat | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi publik yang dipublikasikan | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2,01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|------|----|-----|--------|---------------|--|---|------------------------|--------|--|---|--|---|---|--|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 176 | | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi PPID | Penyusunan regulasi, analisis pelaksanaan fungsi PPID | 1 Dokumen Monev/tahun | | Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik | Penyusunan regulasi, analisis pelaksanaan fungsi PPID | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi publik yang dipublikasikan | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 10 |
| | 1 | 15 | 1,2 | 25 | | | | Penyebarluasan Informasi melalui Seni Pertunjukan Rakyat (Pertura) | Menyebarluaskan Informasi melalui Seni Pertura | 1 pertura/tahun | | Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas | Menyebarluaskan Informasi melalui Seni Pertura | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi publik yang dipublikasikan | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 |
| | 1 | 15 | 1,2 | 25 | | | | Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Jumlah KIM di Kota Malang | Penambahan 1 KIM/tahun | | Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas | Jumlah KIM di Kota Malang | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi publik yang dipublikasikan | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 |
| | 1 | 15 | 1,2 | 09 | 003 | | | Pemberdayaan Lembaga Penyiaran | Bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi. | 4 diskusi/tahun | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan kemitraan dan komunitas | Bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi. | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi publik yang dipublikasikan | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 |
| | 1 | 15 | 1,2 | | | | | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | | 55,56% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 15 | 1.15 | 01 | 191 | | | Pelayanan & Fasilitasi Pengaduan Publik | Pelayanan Pengaduan Masyarakat | 1085 pengaduan | | Monitoring opini dan aspirasi publik | Pelayanan Pengaduan Masyarakat | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi publik yang dipublikasikan | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 02 |
| | | | | | | | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 77,50% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pengembangan dan pemeliharaan sistem command center | Jumlah konten Dashboard Command center | 3 konten | | Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah | Jumlah konten Dashboard Command center | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah konten Dashboard Command center | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 08 |
| | | | | | | | | Pengembangan sistem dan integrasi Smart City | jumlah aplikasi penunjang smart city | 2 aplikasi | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | jumlah aplikasi penunjang smart city | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | jumlah aplikasi penunjang smart city | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 09 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|---|-------------------|--------|--|---|--|---|------------------------------|--|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Pengembangan ekosistem dan Tata Kelola e-Government | Jumlah kebijakan tata kelola | 1 kebijakan | | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah kebijakan tata kelola | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kebijakan tata kelola | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2,02 | 01 |
| | | | | | Pemeliharaan sarana prasana komunikasi publik | jumlah pemeliharaan sarana prasarana | 4 menara, 93 cctv | | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | jumlah pemeliharaan sarana prasarana | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | jumlah pemeliharaan sarana prasarana | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2,02 | 08 |
| | | | | | Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan sarana prasana komunikasi publik | Jumlah sarana prasarana komunikasi publik yang dimonitoring | 2 kali Monitoring | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah sarana prasarana komunikasi publik yang dimonitoring | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana komunikasi publik yang dimonitoring | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2,02 | 10 |
| | | | | | Pembinaan Penyelenggaraan sarana prasana komunikasi publik | pelaksanaan pembinaan sapras | 1 kali pembinaan | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | pelaksanaan pembinaan sapras | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | pelaksanaan pembinaan sapras | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2,02 | 10 |
| | | | | | peningkatan sarana prasarana layanan berbasis TIK | jumlah sarana prasarana TIK dan Pemeliharaan | 10 perangkat | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | jumlah sarana prasarana TIK dan Pemeliharaan | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | jumlah sarana prasarana TIK dan Pemeliharaan | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2,01 | 03 |
| | | | | | penyediaan kapasitas koneksi internet | Jumlah koneksi akses data | 286 koneksi | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah koneksi akses data | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koneksi akses data | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2,01 | 03 |
| | | | | | monitoring, evaluasi dan pelaporan TIK | jumlah monitoring | 111 instansi | | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | jumlah monitoring | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | jumlah monitoring | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2,02 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|--|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|---|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan TIK | Jumlah peserta | 120 peserta | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah peserta | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2,02 | 10 |
| | | | | | Pembinaan Tele Center Daraganti Kota Malang | Jumlah masyarakat yang dilatih bidang TIK | 200 orang | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah masyarakat yang dilatih bidang TIK | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang dilatih bidang TIK | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2,02 | 10 |
| | | | | | Pengembangan Aplikasi Intranet | jumlah aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan | 3 aplikasi | | Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik | jumlah aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 16 | 03 | 2,02 | 07 |
| | | | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | prosentase keterisian E Database SIPD | 82% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan dan pengumpulan data statistik sektoral | jumlah data statistik sektoral yg valid dan reliabel. | 1 dokumen | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | jumlah data statistik sektoral yg valid dan reliabel. | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan dan pengumpulan data statistik sektoral | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 2 | 2,01 | 01 |
| | | | | | Pengolahan data statistik sektoral/ E-database | prosentase keterisian data statistik sektoral | 82% | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | prosentase keterisian data statistik sektoral | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Pengolahan data statistik sektoral/ E-database | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 2 | 2,01 | 01 |
| | | | | | Pembinaan Tata Kelola data statistik sektoral | Jumlah pelaksanaan pembinaan | 90 orang | | Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pelaksanaan pembinaan | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Tata Kelola data statistik sektoral | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 02 | 2,01 | 04 |
| | | | | | Monitoring dan Evaluasi data statistik sektoral | jumlah data statistik sektoral yang di monitoring dan dievaluasi | 2270 | | Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | jumlah data statistik sektoral yang di monitoring dan dievaluasi | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evaluasi data statistik sektoral | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 02 | 2,01 | 04 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|---|---|---|--------|--|---|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | validasi data statistik sektoral | jumlah data statistik sektoral yg valid dan reliabel. | 2772 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | jumlah data statistik sektoral yg valid dan reliabel. | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | validasi data statistik sektoral | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 2 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pengembangan konten data dan informasi statistik | berkembangnya konten data dan informasi statistik | 1 aplikasi | | Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral daerah | berkembangnya konten data dan informasi statistik | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan konten data dan informasi statistik | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 06 |
| | | | | | Meta Data Statistik sektoral | Jumlah Meta Data | 1 dokumen | | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Meta Data | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Meta Data Statistik sektoral | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 2 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Analisis data dan informasi statistik sektoral | teranalisisnya data dan informasi statistik sektoral | 1 dokumen | | Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral daerah | teranalisisnya data dan informasi statistik sektoral | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Analisis data dan informasi statistik sektoral | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 06 |
| | | | | | Survey dan kompilasi Produk Administrasi | terlaksananya survei dan Produk Administrasi | 2 survey: 1. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet; 2 proporsi rumah tangga yg memiliki komputer pribadi | | Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral daerah | terlaksananya survei dan Produk Administrasi | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Survey dan kompilasi Produk Administrasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 06 |
| | | | | | Penyediaan peralatan infrastruktur | tersedianya peralatan infrastruktur | 1 paket | | Pengembangan Infrastruktur | tersedianya peralatan infrastruktur | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan peralatan infrastruktur | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 2 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Peningkatan kemampuan Aparat sumber daya manusia bidang statistik | tersedianya SDM di bidang Statistik yg berkualitas | 2 orang | | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | tersedianya SDM di bidang Statistik yg berkualitas | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kemampuan Aparat sumber daya manusia bidang statistik | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 2 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|------------------|---------------------|-------------|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|---|--------|------|---|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | | | | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | jumlah produsen data statistik sektoral yang di monitoring dan dievaluasi | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 2 | 2.01 | 04 |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan data statistik sektoral | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | prosentase keterisian E Database SIPD | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 20 | 2 | 2.01 | 06 |
| | | | | | | 74% | | Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Persentase jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 630 Dokumen | | Pengelolaan pengendalian dan pengamanan dokumen persandian | Jumlah dokumen sandi yang diamankan | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 21 | 2 | 2.01 | 03 |
| | | | | | | 2 kali pengembangan | | Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana persandian | jumlah pengadaan sarana prasarana | Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 21 | 2 | 2.02 | 01 |
| | | | | | | 100 orang | | Pelaksanaan sistem persandian dan materi persandian | Sosialisasi | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 21 | 2 | 2.01 | 04 |
| | | | | | | 1 dokumen | | pengkajian data dan materi persandian | jumlah pengkajian data | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 21 | 2 | 2.01 | 02 |
| | | | | | | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kebijakan yang disusun | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 21 | 2 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|---|---|---------------|--------|--|---|--|--|--|--|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan | | | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Bidang Koperasi | Program Pembinaan Koperasi | Persentase Koperasi Aktif | 87,10 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran Koperasi | Jumlah Unit Koperasi yang difasilitasi pembentukan, perubahan dan pembubarannya | 17 kop | | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang difasilitasi pembubarannya | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi | Jumlah Koperasi yang melakukan RAT setelah Bimtek | 75 org | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Koperasi yang melakukan RAT setelah Bimtek | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perkoperasian | 70 org | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perkoperasian | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi | Jumlah Pengurus Koperasi / masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi | 408 org | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Pengurus Koperasi / masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi | Jumlah Koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat | 31 sertifikat | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--------|--|---|--|--|--|---|--|--------|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Sosialisasi pembentukan koperasi sariah | Jumlah Koperasi yang menerapkan Koperasi Syariah | 58 kop | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Koperasi yang memperoleh informasi tentang prinsip ekonomi syariah | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Bimtek Manajemen Koperasi | Jumlah koperai yang difasilitasi akses permodalan dan SAKETAP | 46 kop | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Koperasi yang berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Peningkatan Akses Permodalan | Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan | 35 kop | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Permasalahan Permodalan | Jumlah Fasilitasi Permasalahan permodalan | 45 kasus | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Fasilitasi Permasalahan permodalan | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--------------------------------------|--|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Klinik Koperasi | Jumlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi | 380 org | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Monitoring dan Evaluasi | Jumlah Koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi | 46 kop | | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Penilaian Kesehatan bagi USP / KSP | Jumlah Unit Koperasi yang dinilai sehat dan Jumlah Unit Koperasi yang mengikuti Sosialisasi E-Penkes | 353 kop | | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Koperasi yang dinilai sehat dan Jumlah Unit Koperasi yang mengikuti Sosialisasi E-Penkes | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dan pemberian Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi | Jumlah koperasi yang patuh | 117 kop | | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang patuh | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pemeriksaan dan penguatan administrasi Koperasi | Jumlah unit Koperasi yang diperiksa | 78 kop | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah unit Koperasi yang diperiksa | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Bimbingan Teknis manajemen pengawas koperasi | Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek | 78 kop | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Monitoring dan evaluasi pengawasan | Jumlah Unit Koperasi dimonitoring | 20 kop | | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Koperasi dimonitoring | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi | Jumlah Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi | 75 kop | | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|--------------------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|---|------|---|----|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
| | | | | | Bimbingan Usaha Koperasi dan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Koperasi | Jumlah koperasi yang difasilitasi pameran produk unggulan | 81 kop | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah koperasi yang difasilitasi pameran produk unggulan | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 | |
| | | | | Bidang Usaha Mikro | Program Pengembangan Usaha Mikro | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | 70,39% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | 35 UM | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi, dan mendapatkan perlindungan usaha | 39 surat izin, 23 sertifikat, 8 hak merek | | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi, dan mendapatkan perlindungan usaha | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi, dan mendapatkan perlindungan usaha | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | 2 | 17 | 07 | 2,01 | 03 |
| | | | | | Klinik Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik | 3.888 org | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 04 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara online dan offline | 73 UM | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara online dan offline | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara online dan offline | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro | Jumlah kerjasama atau MOU dari kegiatan temu bisnis | 4 MOU | | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah kerjasama atau MOU dari kegiatan temu bisnis | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah kerjasama atau MOU dari kegiatan temu bisnis | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | 78 UM | | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Penyusunan Database Usaha Mikro | Jumlah database usaha mikro | 1 aplikasi | | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 1 Aplikasi Database Usaha Mikro | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Penyusunan 1 Aplikasi Database Usaha Mikro | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Terselesainya 1 Aplikasi Database Usulan Mikro | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|--|-------------|--------|---|---|--|---|--|--|--|---|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | 78 UM | | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2,01 | 02 | |
| | | | | | Sosialisasi peningkatan mutu, desain produk usaha dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan | Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan | 156 UM | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 55 Usaha Mikro yang mengikuti Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 55 Usaha Mikro yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan. | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Pelaksanaan Fasilitasi 55 Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 08 | 2,01 | 01 | |
| | | | | | Fasilitasi Pendampingan pemberdayaan UM | Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan | 38 UM | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2,01 | 04 | |
| | | | | | Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Pemasaran bagi Usaha Mikro bidang Kuliner, Home Decoration dan Muslim Fashion | Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti Pelatihan peningkatan Kualitas dan Pemasaran bagi Usaha Mikro bidang Kuliner, Home Decoration dan Muslim Fashion | 340 UM | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti Pelatihan peningkatan Kualitas dan Pemasaran bagi Usaha Mikro bidang Kuliner, Home Decoration dan Muslim Fashion | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 340 Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Pemasaran bagi Usaha Mikro bidang Kuliner, Home Decoration dan Muslim Fashion | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Pelaksanaan Fasilitasi 340 Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 08 | 2,01 | 01 | |
| | | | | | Program pembinaan lingkungan sosial dibidang Usaha Mikro | Prosentase pertumbuhan WUB mikro yang tumbuh | 48,60% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | 450 org | | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------|--|---|---|--|--|--|--|--------|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (usaha mikro) | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro) | 88 org | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perindustrian | Bidang Perindustrian | Program Pengembangan Industri | Persentase peningkatan jumlah IKM | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perindustrian | Bidang Perindustrian | Program Pengembangan Industri | Persentase peningkatan jumlah IKM | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pencitraan Produk Industri Kreatif | Jumlah jenis produk yang di branding | 2 jenis | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Pengembangan Kemitraan bagi Industri | Jumlah perjanjian kerjasama | 3 perjanjian kerjasama | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Penyelenggaraan event Industri Kreatif | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event kreatif | 800 pelaku industri kreatif/tahun | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Workshop Teknis Industri Kreatif | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti workshop | 600 IKM kreatif | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Forum stakeholder industri | Jumlah dokumen perumusan rancangan arah kebijakan pengembangan pembangunan industri Kota Malang | 50 orang | | Evaluasi Terhadap Rencana Pembangunan Industri | Jumlah dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kota Malang | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 06 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|---|----------------------|--------|--|---|---|--|--|--|--|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Operasional dan aktifitas MCC | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan MCC | 2.000 pelaku kreatif | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM industri | Jumlah SDM industri yang tersertifikasi | 50 orang | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Peningkatan desain dan teknologi | Jumlah produk industri yang mendapatkan fasilitasi peningkatan desain dan teknologi | 100 produk | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Pengembangan dan pendampingan industri hijau | Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan sistem industri hijau | 5 IKM | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Pembinaan penerapan standar mutu produk IKM | Jumlah ikm yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu | 50 IKM | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Pemetaan penyedia bahan baku | Jumlah dokumen data penyedia bahan baku industri | 1 dokumen | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|--|--------|---|---|---|---|--|--|--|--------|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Pengembangan/ Revitalisasi Sentra IKM | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi | 1 sentra IKM | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Inkubator industri | Jumlah IKM yang mengikuti inkubasi | 20 IKM | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Penguatan Kelembagaan IKM | Jumlah kelembagaan IKM yang mendapatkan legalitas | 4 lembaga IKM | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Fasilitasi standarisasi industri dan KI | Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi | 20 IKM | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Pengembangan Sistem Informasi Data Industri | Jumlah sistem informasi yang terintegrasi | 1 sistem informasi data yang dimutakhirkan | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | jumlah data yang dimutakhirkan | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sistem informasi industri yang dimutakhirkan | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase peningkatan data industri | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Penyuluhan bagi IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan | 150 IKM | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|--|---|--|--|--------|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Penumbuhan wirusaha baru industri | Jumlah wub | 10 wub industri | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Pemantauan dan Pengawasan IKM | Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi | 100 IKM | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan | Jumlah industri yang menjadi sasaran pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha industri dan kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan perizinan Kawasan industri | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | Jumlah IUI yang diterbitkan | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase peningkatan ijin usaha industri yang diterbitkan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 03 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Pengembangan produk IKM | Jumlah produk yang dikembangkan | 5 produk | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Program Pembinaan Industri (Cukai) | Persentase IHT yang dibina | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pendataan Dan Pengawasan Kepemilikan Atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok Dan Pemberian Sertifikat/Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok | Jumlah mesin pelinting yang diawasi | 40 Mesin Pelinting Rokok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pemetaan Industri Hasil tembakau | Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT | 1 dok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Program Bina Perdagangan | Persentase Peningkatan UTTP Bertanda Terra Sah | 2% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasional UPT. Metrologi | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | 23 jenis | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 06 | 2,01 | 01 |
| | | | | | Pelayanan tera dan tera ulang | Jumlah alat UTTP yang diter/tera ulang | 13.400 UTTP | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah alat UTTP yang diter/tera ulang | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah alat UTTP yang diter/tera ulang | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Jumlah alat UTTP yang diter/tera ulang | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 06 | 2,01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|--|--------|--|---|--|---|---|--|--|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | | Penyuluhan kemetrolagian | Jumlah peserta penyuluhan kemetrolagian | 150 peserta | | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah peserta penyuluhan kemetrolagian | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah peserta penyuluhan kemetrolagian | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Jumlah peserta penyuluhan kemetrolagian | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 06 | 2,01 | 02 |
| | | | | | Pos ukur ulang barang non BDKT | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | 22 kali | | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 06 | 2,01 | 02 |
| | | | | | Sosialisasi konsumen cerdas | Jumlah peserta sosialisasi konsumen cerdas | 250 peserta | | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah peserta penyuluhan | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase UTTP yang ditera/ Tera ulang | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 06 | 2,01 | 02 |
| | | | | | Publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya | Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media | 90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (running text) dan 1 kali di radio | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah harga bahan pokok yang dipantau | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah penayangan di media cetak | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Prosentase jumlah penayangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 04 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Operasi pasar dan pasar murah | Jumlah pengadaan pasar murah | 1 kali | | Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah harga bahan pokok yang dijual berdasarkan HET | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase bahan pokok yang mengalami kenaikan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 04 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online | | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 04 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Pemutakhiran data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online | 365 Hari | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah aplikasi yang memfasilitasi harga sembako di pasar (setiap hari) | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi yang memfasilitasi harga sembako di pasar (setiap hari) | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase harga bahan pokok yang mengalami kenaikan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 04 | 2.02 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|---|--|--------|---|---|--|--|---|---|--|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | | Pemantauan ketersediaan/ distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | Jumlah pemantauan ketersediaan/ distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | 2 Kali | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah distributor yang dipantau | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah distributor yang dipantau | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase distributor yang dipantau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 04 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha | Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern | 110 UKM | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri | Peningkatan jumlah penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Prosentase perizinan dan pendaftaran perusahaan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 02 | 2.03 | 02 |
| | | | | | Promosi perdagangan produk Kota Malang | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | 20 UKM | | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota, Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam Negeri di tingkat Kabupaten/ kota | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Peningkatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 07 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Sosialisasi legalitas usaha perdagangan | Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi | 19 UKM | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri | Peningkatan jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Prosentase peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 02 | 2.03 | 02 |
| | | | | | Pengembangan dan pemutakhiran data UKM | Jumlah UKM yang di data | 600 data | | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah UKM yang di data | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Peningkatan pendataan UKM dan penggunaan produk dalam Negeri | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Prosentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 07 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan gudang | Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | 1 kali pembinaan dan 4 kali pengawasan | | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Peningkatan penerbitan Tanda Daftar Gudang | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Prosentase peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sarana usaha/ distribusi perdagangan | Jumlah toko modern yang memiliki legalitas usaha dan pembinaan terhadap pengusaha toko modern | 50 toko modern dan 1 kali pembinaan | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah toko modern yang memiliki legalitas usaha dan pembinaan terhadap pengusaha toko modern | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Peningkatan pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase peningkatan pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 03 | 2.02 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--------|------|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | | Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan minuman beralkohol | Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol | 1 kali pembinaan dan 4 kali pengawasan | | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat | Peningkatan pembinaan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Prosentase peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 02 | 2.05 | 01 |
| | | | | | Bimbingan teknis ekspor bagi UKM Kota Malang | Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang | 80 UKM | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota, Pembinaan pelaku usaha ekspor | Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan pembinaan dan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Prosentase peningkatan pengembangan ekspor | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 05 | 2.01 | 01 | |
| | | | | | E-Commerce bagi UKM Kota Malang | Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce | 125 UKM | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota, Peningkatan citra produk ekspor | Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan pembinaan dan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Prosentase peningkatan pengembangan ekspor | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 05 | 2.01 | 01 | |
| | | | | | Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar | Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal | 0,1154 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Rehabilitasi ringan/ sedang/ berat gedung dan bangunan pasar rakyat | Jumlah pasar yang terpelihara | 4 pasar | Penyediaan sarana distribusi perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar yang terpelihara | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar dan sarana distribusi perdagangan yang sudah direhabilitasi dan peningkatan fasilitas perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan dan fasilitas perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 03 | 2,01 | 02 | |
| | | | | | Penampungan pedagang untuk revitalisasi pasar | Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi | 150 pedagang | Penyediaan sarana distribusi perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pedagang yang di tampung saat revitalisasi | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pedagang yang ditampung pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase jumlah pedagang yang ditampung pada pembangunan sarana distribusi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 03 | 2,01 | 01 | |
| | | | | | Revitalisasi pasar | Jumlah pasar yang direvitalisasi | 2 pasar | Penyediaan sarana distribusi perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar yang di revitalisasi | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar yang direvitalisasi pada pembangunan sarana distribusi perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase pasar yang direvitalisasi pada pembangunan sarana distribusi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 03 | 2,01 | 01 | |
| | | | | | Pengadaan dan pemeliharaan sarana pasar | Jumlah pengadaan dan perbaikan sarana pasar | 20 unit | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pengadaan dan perbaikan sarana pasar | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah peningkatan sarana fasilitas perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase peningkatan sarana fasilitas perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 03 | 2,01 | 02 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---|---|--|-------------|--|--|---|--|---|---|--|---------------|--------|------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | Sosialisasi peningkatan ketertiban pasar rakyat | Jumlah peserta sosialisasi peningkatan ketertiban pasar rakyat | 100 peserta | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan | Jumlah peserta Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Jumlah peserta Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase Jumlah peserta Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 03 | 2.02 | 01 | | |
| | | | | Extensifikasi dan Intensifikasi retribusi pasar | Jumlah pelaksanaan monitoring terhadap target retribusi daerah | 44 kali | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pelaksanaan monitoring Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Peningkatan pelaksanaan monitoring Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase pelaksanaan monitoring Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 03 | 2.02 | 01 | | |
| | | | | Pendataan pedagang pasar rakyat | Jumlah pedagang yang akan di data | 250 pedagang | | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Peningkatan pendataan pedagang dalam pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Peningkatan prosentase pendataan jumlah pedagang Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Peningkatan prosentase pendataan sarana distribusi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 03 | 2.02 | 02 | | |
| | | | | Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pasar dengan pihak ketiga | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi | 2 kali | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Peningkatan pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Peningkatan prosentase sarana distribusi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 03 | 2.02 | 01 | | |
| | | | | Operasional UPT. Pasar | Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar | 11 jenis | | Penyediaan sarana distribusi perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Peningkatan penyediaan sarana distribusi perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Peningkatan prosentase penyediaan sarana distribusi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | 03 | 2.01 | 01 | | |
| | | | | Program Pemberantasan barang kena cukai ilegal (cukai) | Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran | Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai | 1 kali pembinaan dan 8 kali pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 101 surat | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|--|---|-------------|-------------|---|---|---|----------|--|--|-------------------|---------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik | 12 bulan | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 2755 m2 | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | jenis ATK | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penagandaan | 15 jenis | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | rat kabar | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 349 kotak | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 80 kali | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | | | | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 1 kali | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 4 jenis | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 24 |
| | | | | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/ volume BBM dan pelumas | 83479 liter | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti pelatihan, peningkatan kompetensi, sertifikasi, dll | 82 orang | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------------|--------|--|---|---|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 250 m2 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 80 unit | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 6 jenis | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 32 |
| | | | | | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | dokumen | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | dokumen | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
| | | | | | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | dokumen | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | | Penyusunan bahan anjab/ABK | Jumlah bahan anjab/ABK PD | dokumen | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah bahan anjab/abk skpd | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | dokumen | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | dokumen | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen standar pelayanan | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | dokumen | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|------------------------------------|--|-------------|--------|---|--|---|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Penyusunan/ reuiu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | dokumen | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen renja/RKT | dokumen | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | dokumen | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|---|--|--|--|-------------|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|--------|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2 | 1902 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Program Pembinaan Kepemudaan | Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | 1 | % | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | | | | | | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 | % | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2 | 1902 | 2.0 | 03 | Pelatihan Keterampilan Pemuda | Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan | 80 | pemuda | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota | Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1902 | 2.01 | 03 |
| | 2 | 1902 | 2.0 | 02 | Pembinaan Kewirausahaan Pemuda | Jumlah pemuda peserta pembinaan | 80 | pemuda | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah pemuda peserta pembinaan | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1902 | 2.01 | 02 |
| | 2 | 1902 | 2.0 | 08 | Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang | Jumlah paskibraka terpilih | 78/2 | tingkat kota / tingkat propinsi | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah paskibraka terpilih | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1902 | 2.01 | 08 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------|--------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|---------|--|--------------------------------------|---|--|--|-------------------|--|---|------|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 2 | 1902 | 02 | 01 | Pembinaan calon pemuda pelopor | Jumlah pemuda pelopor terpilih | 15 | pemuda | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah pemuda pelopor terpilih | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 1902 | 2.01 | 01 |
| | 2 | 1902 | 02 | 08 | Penyelenggaraan JPD dan JPI | Jumlah pemuda terpilih | 2 | pemuda | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah pemuda terpilih | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 1902 | 2.01 | 08 |
| | 2 | 1902 | 02 | 04 | Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda | Jumlah peserta sosialisasi | 100 | peserta | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah peserta sosialisasi | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 1902 | 2.01 | 04 |
| | 2 | 1902 | 02 | 07 | Festival Kepemudaan | Jumlah peserta festival dan workshop | 300 | pemuda | Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Jumlah peserta festival dan workshop | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 1902 | 2.01 | 07 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------|--------|---------------|--|---|-------------|-----------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|---|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 2 | 1903203 | | | Pembinaan Olahraga Paralimpyan | Jumlah cabang olahraga paralimpyan yang dibina | 6 | cabang olahraga | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah cabang olahraga paralimpyan yang dibina | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keolahraan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 01 |
| | 2 | 1903203 | | | Pengiriman atlet POR SD MI | Jumlah atlet | 12 | peserta | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah atlet | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keolahraan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 03 |
| | 2 | 1903303 | | | Seleksi atlet POR SD MI | Jumlah atlet | 11 | cabang olahraga | Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/Kota | Jumlah atlet | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 01 |
| | 2 | 1903303 | | | Pemusatan latihan POR SD MI | Jumlah cabor | 12 | cabang olahraga | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah cabor | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 02 |
| | 2 | 1903305 | | | Pendataan Potensi Olahraga | Jumlah dokumen data potensi olahraga | 1 | dokumen | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah dokumen data potensi olahraga | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 05 |
| | 2 | 1903305 | | | Pendataan Komunitas Olahraga | Jumlah dokumen data komunitas olahraga | 1 | dokumen | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah dokumen data komunitas olahraga | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 05 |
| | 2 | 1903503 | | | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya | 5 | paket | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 03 |
| | 2 | 1903503 | | | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga gor ken arok | 1 | paket | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga gor ken arok | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAAAN DASAR | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------|--------|-----------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|--|---|---|------|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 2 | 1903503 | | | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR gajayana | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana | 6 | paket | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2 | 1903 | 2.05 | 03 |
| | 3 | 2602 | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata | Persentase destinasi wisata yang dibina | 35 | % | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase destinasi wisata yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 2602 | | |
| | | | | | | Persentase industri pariwisata yang dibina | 40 | % | | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase industri pariwisata yang dibina | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 2602 | | |
| | 3 | 2602306 | | | Pengembangan Kelompok Sadar Wisata | Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina | 10 | pokdarwis | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah destinasi pariwisata Kota Malang yang dikelola | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 2602 | 2.03 | 06 |
| | 3 | 2602303 | | | Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata Belanja Tugu dan night market | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina | 674 | pedagang WBT dan night market | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah destinasi pariwisata Kota Malang yang dikelola | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 2602 | 2.03 | 03 |
| | 3 | 2603102 | | | Event Pariwisata | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata | 15 | kampung | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah destinasi pariwisata Kota Malang yang dikelola | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 2602 | 2.03 | 06 |
| | 3 | 2602403 | | | Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi | 100 | pelaku usaha | Pengelolaan Investasi Industri Pariwisata. | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah sertifikasi TDUP Industri Pariwisata yang terdaftar di Kota Malang | PROGRAM PENINGKATAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 2602 | 2.04 | 03 |
| | 3 | 2602303 | | | Penguatan Wisata Halal | Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar | 180 | peserta | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah destinasi pariwisata Kota Malang yang dikelola | PROGRAM PENINGKATAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 2602 | 2.03 | 07 |
| | 3 | 2602306 | | | Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan | 50 | peserta | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah destinasi pariwisata Kota Malang yang dikelola | PROGRAM PENINGKATAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 2602 | 2.03 | 06 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|---------------|------------------|-----------|-------------|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | | | |
| | 3 | 26 | 0 | 2 | 07 | | | Penguatan Wisata Heritage | Jumlah pelaku wisata heritage yang mengikuti event | 10 | komunitas | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah pelaku wisata heritage yang mengikuti event | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah destinasi pariwisata Kota Malang yang dikelola | PROGRAM PENINGKATAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 07 | |
| | 3 | 26 | 0 | 5 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | Persentase pemasaran Pariwisata | 55 | % | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase pemasaran Pariwisata | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 26 | 05 | | |
| | | | | | | | | | Persentase pengembangan ekonomi kreatif | 30 | % | | | | | | Persentase pengembangan ekonomi kreatif | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | |
| | 3 | 26 | 0 | 5 | 1 | 2.0 | 02 | | Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih | Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan | 20 | orang | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 02 |
| | 3 | 26 | 0 | 5 | 1 | 2.0 | 01 | | Pembinaan dan Pengembangan TIC | Jumlah paket wisata yang dipromosikan | 5 | | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah paket wisata yang dipromosikan | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 01 |
| | 3 | 26 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 02 | | Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi | 20 | peserta | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Pameran Pariwisata dan Rkonomi kreatif yang diikuti | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 |
| | 3 | 26 | 0 | 5 | 1 | 2.0 | 02 | | Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi pariwisata | 10 | peserta | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi pariwisata | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 02 |
| | 3 | 26 | 0 | 5 | 1 | 2.0 | 06 | | Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan | 10 | | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 06 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|------------------|-----------|-------------|--------|--|--|----------|----------------------------|---|--|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | | | |
| | 3 | 26 | 05 | 2.0 | 05 | | | Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina | 10 | orang | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 05 | |
| | 3 | 26 | 05 | 2.0 | 02 | | | Festival Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival | 200 | peserta | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 02 | |
| | 3 | 26 | 05 | 2.0 | 05 | | | Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan | Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi | 85 | orang | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 05 | |
| | | | | | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 012.02 | | 04 | | | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | 5 | dokumen | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | | |
| | | | 012.03 | | 02 | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja Telpn, Air dan Listrik | 12 | bulan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpn, air dan listrik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | | |
| | | | 012.03 | | 08 | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah bulan jasa kebersihan kantor | 12 | bulan | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | | |
| | | | 012.03 | | 11 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 14244 | barang cetakan penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | | |
| | | | 012.03 | | 12 | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 214 | komponen listrik | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | | |
| | | | 012.03 | | 15 | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 4 | macam bahan bacaan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | | |
| | | | 012.03 | | 17 | | | Penyediaan makanan dan minuman | jumlah makanan dan minuman | 44632 | makanan dan minuman | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|--------|---------------|---|---|-------------|----------------------------------|--|---|-------------------|--|--|-------------------|---------------|--------|------|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | |
| | | 012.03 | 18 | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 127 | kali | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | |
| | | | | | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah bulan pelaksanaan pengamanan kantor | 12 | bulan | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | |
| | | 012.03 | 06 | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan pajak tepat waktu | 24 | kendaraan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | |
| | | 012.03 | 01 | | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 4500 | surat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | |
| | | 012.04 | 02 | | Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus | Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus | 21 | stel | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | |
| | | 012.03 | 30 | | Pengadaan BBM dan pelumas | jumlah/volume bbm dan pelumas | 34000 | liter | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | |
| | | 012.03 | 22 | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor | 47 | sarana prasarana | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | |
| | | | | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | |
| | | 012.03 | 30 | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 24 | kendaraan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | |
| | | 012.03 | 28 | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 | gedung | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | |
| | | 012.03 | 32 | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 | jenis perlengkapan dan peralatan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | |
| | | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | |
| | | 012.03 | 20 | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia | 4 | unit | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|--------|---------------|--|--|---------------------------|---|--|---|--|--------------------|--|---|---------------|--------|------|--|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | |
| | | | | 012.04 | 09 | | Peningkatan/pe mbangan kapasitas sumber daya aparatur | jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikem bangkan kapasitasnya | 2 | sub kegiatan | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dike mbangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | |
| | | | | 012.02 | 06 | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2 | dokume n | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | |
| | | | | 012.02 | 07 | | Penyusunan laporan keuangan | jumlah laporan keuangan | 3 | laporan | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semeste ran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | |
| | | | | 012.01 | 01 | | Penyusunan/reviu Renstra | jumlah dokumen renstra / review renstra | 1 | dokume n | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | |
| | | | | 012.01 | 01 | | Penyusunan Renja/RKT | jumlah dokumen renja | 1 | dokume n | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Standar Pelayanan Publik | jumlah dokumen SPP | 1 | dokume n | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen standar pelayanan | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Kajian dan NA Ijin Pengelolaan Kekayaan Daerah | jumlah dokumen | 1 | dokume n | | | | | | | | | | | |
| | | | | 012.03 | 17 | | Peringatan/kegiata n insidentil | Jumlah peringatan/ kegiatan insidentil | 1 | peringat an/ kegiatan insidenti l | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiat an insidentil | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Internal | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi | Jumlah informasi, Publikasi dan komunikasi | 305 | informas i, publikas i dan komunik asi | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan perpustakaan dan arsip | Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | 95 | arsip | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|----------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|---|------|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | | | | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan | Program Pembinaan Perpustakaan | Prosentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 Kelurahan | | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 04 | |
| | | | | | | | | | Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik | Jumlah pengembangan perangkat lunak yang dilakukan | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengembangan perangkat lunak yang dilakukan | Program Pembinaan Perpustakaan | Prosentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 Kelurahan | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 01 | |
| | | | | | Peningkatan Layanan Perpustakaan | Jumlah laporan peningkatan layanan | | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah titik kunjungan yang dilayani | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah titik kunjungan yang dilayani | Program Pembinaan Perpustakaan | Prosentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 Kelurahan | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 02 | |
| | | | | | | | | | Pengembangan Layanan Perpustakaan di Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengunjung perpustakaan umum | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengunjung perpustakaan umum | Program Pembinaan Perpustakaan | Prosentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 Kelurahan | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 07 | |
| | | | | | Urusan Wajib Kearsipan | Kearsipan | Program Pengelolaan Arsip Daerah | Prosentase peningkatan dokumen arsip yang terkelola sesuai dengan kaidah kearsipan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pengolahan arsip | Jumlah arsip mampu telusur | | | Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis | Jumlah arsip mampu telusur | Pengelolaan arsip dinamis Daerah kabupaten/Kota | Jumlah arsip dinamis | Program Pengelolaan arsip | Prosentase peningkatan dokumen arsip yang terkelola sesuai dengan kaidah kearsipan | Urusan pemerintahan bidang kearsipan | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | Penyelamatan arsip vital | Jumlah OPD yang melaksanakan penyelamatan arsip | | | Pemeliharaan dan penyelamatan arsip dinamis | Jumlah OPD yang melaksanakan penyelamatan arsip | Pengelolaan arsip dinamis Daerah kabupaten/Kota | Jumlah arsip dinamis | Program Pengelolaan arsip | Prosentase peningkatan dokumen arsip yang terkelola sesuai dengan kaidah kearsipan | Urusan pemerintahan bidang kearsipan | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | Pengembangan database informasi kearsipan | Jumlah penambahan database online | | | Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah/kabupaten/kota melalui JIKN | Jumlah penambahan database online | Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota | Jumlah informasi kearsipan yang dikelola | Program Pengelolaan arsip | Prosentase peningkatan dokumen arsip yang terkelola sesuai dengan kaidah kearsipan | Urusan pemerintahan bidang kearsipan | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 01 |
| | | | | | | Sosialisasi perlindungan dan penyelamatan arsip sejarah | Jumlah peserta sosialisasi | | | Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | Jumlah arsip yang terselamatkan | Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota | Jumlah arsip statis | Program Pengelolaan arsip | Prosentase peningkatan dokumen arsip yang terkelola sesuai dengan kaidah kearsipan | Urusan pemerintahan bidang kearsipan | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | 2 | 24 | 02 | 2.02 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---------------|---|---|-------------|---------------------------|--|---|---|---|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | | | Penghapusan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang dihapus | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah barang milik daerah yang dihapus | Administrasi Keuangan | Jumlah barang milik daerah yang dihapus | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
| | | | | | | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | Jumlah laporan keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | | | | | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | Administrasi Keuangan | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 01 |
| | | | | | | Penyusunan bahan Anjab/ABK | Jumlah bahan anjab/abk skpd | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah bahan anjab/abk skpd | Administrasi Keuangan | Jumlah bahan anjab/abk skpd | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 02 |
| | | | | | | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Administrasi Keuangan | Jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 05 |
| | | | | | | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---|---|-----------|-------------|--|---|---|---|--|---|-------------------|---------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | | | | | Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen standar pelayanan | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen standar pelayanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan | Jumlah sertifikasi | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah sertifikasi | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah sertifikasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Luasan gedung kantor yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 29 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---------------|---|--|-------------|---------------------------|---|--|-------------------|--|--|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 32 |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Jumlah mebeleur yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah mebeleur yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah mebeleur yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 35 |
| | | | | | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | Administrasi Umum | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 38 |
| | | | | | | Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan | Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi | Administrasi Umum | Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 39 |
| | | | | | | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi | Administrasi Umum | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 40 |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi | Jumlah jaringan telekomunikasi | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah jaringan telekomunikasi | Administrasi Umum | Jumlah jaringan telekomunikasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |
| | | | | | | Pemeliharaan taman perkantoran | Jumlah taman yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah taman yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah taman yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | | | | | | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | Administrasi Umum | Jumlah gedung kantor yang dibangun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 38 |
| | | | | | | Pengadaan mobil jabatan | Jumlah mobil jabatan | | | Pengadaan Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan | Administrasi Umum | Jumlah mobil jabatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 19 |
| | | | | | | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | Jumlah kendaraan dinas/operasional | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 20 |
| | | | | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | Jumlah perlengkapan gedung kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |
| | | | | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | Jumlah peralatan gedung kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 24 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---------------|--|--|-------------|---------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah mebeleur | Administrasi Umum | Jumlah mebeleur | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 25 |
| | | | | | | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Administrasi Umum | Jumlah/volume BBM dan pelumas | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Administrasi Umum | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 03 |
| | | | | | | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Administrasi Umum | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 05 |
| | | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | Jumlah kendaraan dinas/operasional | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |
| | | | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | Administrasi Umum | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 07 |
| | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | Luasan ruangan yang dibersihkan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | Jumlah alat tulis kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---------------|--|---|-------------|---------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | Administrasi Umum | Jumlah peralatan rumah tangga | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 14 |
| | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | | | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bahan logistik kantor | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor | Administrasi Umum | Jumlah bahan logistik kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | Jumlah makanan dan minuman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | | | | | | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | Administrasi Umum | Jumlah petugas pengamanan kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | | | Peringatan/kegiatan insidental | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | Administrasi Umum | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | | Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas | Jumlah pengemudi/supir dinas | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengemudi/supir dinas | Administrasi Umum | Jumlah pengemudi/supir dinas | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |
| | | | | | | Pengadaan mesin/kartu absensi | Jumlah mesin/kartu absensi | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah mesin/kartu absensi | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah mesin/kartu absensi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 01 |
| | | | | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 02 |
| | | | | | | Peningkatan/peimbangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | Kode | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|---|---|---|------------|--|---|---|---|---|---|---------------|-------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | PERENCANAAN | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Analisa Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen Analisa Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 dokumen (Analisa Pagu Indikatif) | dokumen | Analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah | Jumlah dokumen | Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen Analisa Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | PERENCANAAN | UNSUBJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 02 2.02 03 | | | | |
| | | | | | Penyusunan /Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | Jumlah dokumen RPJMD | 1 dokumen | dokumen | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen RPJMD | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen RPJMD | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | PERENCANAAN | UNSUBJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 02 2.01 01 | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | Jumlah dokumen RKPD | 2 dokumen (RKPD 2022 dan RKPD Perubahan 2021) | dokumen | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen RKPD | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | PERENCANAAN | UNSUBJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 02 2.01 01 | | | | |
| | | | | | Pembangunan/ Pengembangan/ Operasional Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah Sistem Informasi/aplikasi perencanaan pembangunan daerah | 1 aplikasi | aplikasi | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah Sistem Informasi/aplikasi perencanaan pembangunan daerah | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Sistem Informasi/aplikasi perencanaan pembangunan daerah | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | PERENCANAAN | UNSUBJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 02 2.01 07 | | | | |
| | | | | | Pemantauan/pemutakhiran data dan informasi perencanaan | Jumlah tahapan pemantauan/pemutakhiran data dan informasi perencanaan | 4 tahapan (perencanaan, pengumpulan, | tahap | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah tahapan pemantauan/pemutakhiran data dan informasi perencanaan | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah tahapan pemantauan/pemutakhiran data dan informasi perencanaan | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | PERENCANAAN | UNSUBJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 02 2.01 07 | | | | |
| | | | | | Penyusunan /Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | Jumlah dokumen RPJMD | 1 dokumen RPJMD | usulan | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen RPJMD | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | PERENCANAAN | UNSUBJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 02 2.01 01 | | | | |
| | | | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Persentase Capaian program dan kegiatan pada | 93% | Persentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan | Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi | 116 dokumen | dokumen | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi capaian program/kegiatan | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | pengendalian dan evaluasi Jumlah dokumen | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | PERENCANAAN | UNSUBJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 02 2.03 03 | | | | |
| | | | | | Program Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan | 90% | Persentase | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | Kode | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---|--|-------------------------------------|-------------|--|--|---|--|---|--|-------------------|-------------------------------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | |
| | | | | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan | Jumlah dokumen perangkat daerah subbidang perencanaan ekonomi dan keuangan yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | 12 dokumen | dokumen | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen perangkat daerah subbidang perencanaan ekonomi dan keuangan yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen perangkat daerah subbidang perencanaan ekonomi dan keuangan yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara. | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 04 | 2.01 | 02 |
| | | | | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Subbidang perencanaan Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen perangkat daerah subbidang perencanaan sumberdaya alam yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | 8 dokumen | dokumen | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen perangkat daerah subbidang perencanaan sumberdaya alam yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen perangkat daerah subbidang perencanaan sumberdaya alam yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara. | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 04 | 2.03 | 02 |
| | | | | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah mitra dan koordinasi pada subbidang Perencanaan penanaman modal dan pariwisata | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada subbidang Perencanaan penanaman modal dan pariwisata yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | 8 dokumen | dokumen | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada subbidang Perencanaan penanaman modal dan pariwisata yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada subbidang Perencanaan penanaman modal dan pariwisata yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara. | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 04 | 2.02 | 02 |
| | | | | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis subbidang perencanaan Ekonomi dan Keuangan | Jumlah pelaksanaan musrenbang/ Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 1 musrenbang dan 1 Rakortek Ekonomi | Musrenbang | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan tahapan | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 04 | 2.01 | 01 |
| | | | | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Sub Bidang perencanaan Sumber Daya Alam | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 1 Rakortek Sumber Daya Alam | Rakortek | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan tahapan | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 04 | 2.03 | 02 |
| | | | | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Sub Bidang perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | (Musrenbang Pemuda) | Musrenbang | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan tahapan | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 04 | 2.02 | 02 |
| | | | | Program Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Persentase Jumlah kajian/analisa/studi/rencana induk/grand design Sektor Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang mendukung | 90% | Persentase | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | Kode | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan Ekonomi dan Keuangan | Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor perencanaan ekonomi dan keuangan | | dokumen | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan Ekonomi dan Keuangan | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan Ekonomi dan Keuangan | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 01 |
| | | | | Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan sumber daya alam | Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan Sektor perencanaan sumber daya alam | 2 dokumen (Monev target pencapaian RAD PG RAD API dan PPRKD) | dokumen | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan Sektor perencanaan sumber daya alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan Sektor perencanaan sumber daya alam | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Persentase Jumlah kajian/analisa/studi /rencana induk/ grand design Sektor Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang mendukung perencanaan | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 04 | 2.01 | 03 |
| | | | | Rencana Induk/ Grand Design/ Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata | Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata | | | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 05 | 02 | 2.02 | 05 |
| | | | | Rencana Induk/ Grand Design/ Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan sumber daya alam | Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan sumber daya alam | | dokumen | | Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan sumber daya alam | | Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan sumber daya alam | | | | | | | | | |
| | | | | Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif kota Malang | 1 Dokumen (Pelaksanaan Monev Pembangunan Ekonomi Kreatif) | dokumen | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perencanaan ekonomi kreatif | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perencanaan ekonomi kreatif | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara. | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 04 | 2.02 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | Kode | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---|---|---|----------------|--|---|--|---|---|---|--------------------|--|-----------------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang | 90% | dokumen | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra dan koordinasi pada Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | 8 dokumen | dokumen | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 03 2.02 02 | | |
| | | | | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra dan koordinasi pada Subbidang Perencanaan Pemerintahan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra Subbidang Perencanaan Pemerintahan yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | 20 dokumen | dokumen | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra Subbidang Perencanaan Pemerintahan yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra Subbidang Perencanaan Pemerintahan yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 03 2.01 02 | | |
| | | | | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra dan koordinasi pada Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah dokumen perangkat mitra pada Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | 24 dokumen | dokumen | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah dokumen perangkat mitra pada Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah dokumen perangkat mitra pada Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 03 2.03 02 | | |
| | | | | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 4 musrenbang tematik (perempuan, lansia, difabel, anak) dan 2 | musrenbang | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 03 2.03 01 | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | Kode | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|--|---|---|-------------------|---|---|--|---|---|---|--------------------|--|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Jumlah kajian/analisa/studi/rencana induk/grand design Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendukung | 90% | dokumen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan Pembangunan Manusia | 1 dokumen (Monitoring dan evaluasi capaian Kota, Kecamatan, dan Kelurahan Layak | dokumen | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi sektor perencanaan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi sektor perencanaan Pembangunan Manusia | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 03 |
| | | | | Rencana Induk/ Grand Design/ Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah dokumen rencana induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan Sektor Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | 2 Dokumen (monev capaian SPKD, capaian RAD SDGs | dokumen | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi sektor Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen monitoring sektor Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 03 |
| | | | | Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang | 90% | Persentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra dan koordinasi pada subbidang perencanaan Infrastruktur Perkotaan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang perencanaan Infrastruktur yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | 4 dokumen | dokumen | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang perencanaan Infrastruktur yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang perencanaan Infrastruktur yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 05 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | Kode | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---|--|---------------------------------------|-------------|--|---|--|---|--|--|--------------------|--|--------|------|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra dan koordinasi pada sub. Bidang perencanaan kewilayahan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang Perencanaan kewilayahan yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | 20 dokumen | dokumen | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Perhubungan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang perencanaan Infrastruktur yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang perencanaan Infrastruktur yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 05 | 2.02 | 02 | |
| | | | | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra dan koordinasi pada sub. Bidang perencanaan perhubungan dan komunikasi | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang perencanaan perhubungan dan komunikasi yang dilakukan pendampingan penyusunan | 8 dokumen | dokumen | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang Perencanaan kewilayahan yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang Perencanaan kewilayahan yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 02 | |
| | | | | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Infrastruktur | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 1 Rakortek infrastruktur | Rakortek | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | |
| | | | | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Subbidang Perencanaan Kewilayahan | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 1 Rakortek kewilayahan | Rakortek | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 01 | |
| | | | | Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 1 Rakortek perhubungan dan komunikasi | Rakortek | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 05 | 2.02 | 01 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | Kode | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|--|---|---|-------------|---|---|---|---|--|--|------------------------------------|--|-----------------|------|--|--|--|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | Program Perencanaan Bidang | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | 75% | Persentase | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Verifikasi dan monitoring usulan kegiatan perencanaan pembangunan dengan RTRW | Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring rencana pembangunan daerah | 23 PD | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan | Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring rencana pembangunan daerah | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring rencana pembangunan daerah | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 05 2.03 03 | | | | | |
| | | | | Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Jumlah kajian/analisa/studi / rencana induk/grand design sektor Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan | 90% | dokumen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan | Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan | 1 Dokumen (monev hirarki dan status jalan) | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perencanaan kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perencanaan kewilayahan | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 05 2.03 03 | | | | | |
| | | | | Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan Perhubungan dan Komunikasi Informatika | Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor perencanaan perhubungan dan komunikasi informatika | 1 dokumen (kajian pengembangan Malang BIG DATA) | dokumen | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor perencanaan perhubungan dan komunikasi informatika | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor perencanaan perhubungan dan komunikasi informatika | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 05 02 2.03 13 | | | | | |
| | | | | Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan | Jumlah dokumen rencana induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan | 1 Dokumen (monev rencana kewilayahan) | dokumen | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perencanaan kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perencanaan kewilayahan | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 01 05 2.03 03 | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | Kode | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|--|---|---|-------------|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|------|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | | | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor perencanaan perhubungan dan komunikasi informatika | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor perencanaan perhubungan dan komunikasi informatika | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 13 | |
| | | | | Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perencanaan Infrastruktur | Jumlah penyusunan/operasional dan pengembangan (pemutakhiran) data base dan sistem informasi sektor perencanaan infrastruktur perkotaan | 7 dokumen (monev pembangunan infrastruktur) | dokumen | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perencanaan infrastruktur (sumberdaya air dan lingkungan hidup) | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perencanaan infrastruktur (sumberdaya air dan lingkungan hidup) | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | PERENCANAAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | |
| | | | | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase implementasi rencana | 60% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan untuk percepatan pembangunan daerah | 6 1. Review target dan capaian 2. Review target dan capaian 3. Review target dan capaian 4. Review target dan capaian 5. Review target dan capaian 6. Review target dan capaian | dokumen | Fasilitasi, pelaksanaan, evaluasi Penelitian dan pengembangan bidang otonomi daerah | 6 dokumen : 1. Review target dan capaian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah 2. Review target dan capaian Pengukuran Indeks Program Pembangunan Bidang Ekonomi 3. Review target dan capaian Pengukuran Indeks Program Pembangunan Bidang Sosial 4. Review target dan capaian Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 5. Review target dan capaian Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 6. Review target dan capaian Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 6 dokumen : 1. Review target dan capaian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah 2. Review target dan capaian Pengukuran Indeks Program Pembangunan Bidang Ekonomi 3. Review target dan capaian Pengukuran Indeks Program Pembangunan Bidang Sosial 4. Review target dan capaian Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 5. Review target dan capaian Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 6. Review target dan capaian Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase implementasi rencana kelitbang | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 01 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | Kode | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---|---|---|---------------|--|---|---|---|---|--|------------------------------------|--|-----------------|------|--|--|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan untuk peningkatan daya saing daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan | Jumlah dokumen publikasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ pendampingan hasil penelitian dan pengembangan | 2 jurnal penelitian | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah dokumen publikasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ pendampingan hasil penelitian dan pengembangan | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah dokumen publikasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ pendampingan hasil penelitian dan pengembangan | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 05 02 1.04 03 | | | | |
| | | | | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan | 7,14% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang inovasi | 1 dokumen (monev implementasi Sistem Inovasi) | dokumen | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang inovasi | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang inovasi | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 05 02 1.04 04 | | | | |
| | | | | Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Malang | Jumlah peserta lomba inovasi | 182 proposal | proposal | Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi | Jumlah peserta lomba inovasi | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah peserta lomba inovasi | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 05 02 1.04 01 | | | | |
| | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Survey kepuasan internal | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik | 12 kali | bulan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik | Administrasi Umum | jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X XX 01 2.03 02 | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 20 unit | Jumlah Barang | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Administrasi Umum | jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X XX 01 2.03 05 | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | jumlah kendaraan dinas/ operasional | 20 unit | unit | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/ operasional | Administrasi Umum | jumlah kendaraan dinas/ operasional | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X XX 01 2.03 06 | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | 1250 SPM | dokumen | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | Administrasi Umum | jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X XX 01 2.03 07 | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 240 kali | Luasan | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | Luasan ruangan yang dibersihkan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X XX 01 2.03 08 | | | | |
| | | | | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah alat tulis kantor | 75 jenis ATK | Jenis ATK | Penyediaan Alat Tulis Kantor | jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | jumlah alat tulis kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X XX 01 2.03 10 | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | Kode | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---|--|--------------------------|------------------------|--|--|------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|------|----|--------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | | | Urusan | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 | |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 7 jenis barang cetakan | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | jumlah barang cetakan dan penggandaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4 jenis komponen listrik | jenis komponen listrik | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12 kali | Kali | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Administrasi Umum | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | | | | Penyediaan makanan dan minuman | jumlah makanan dan minuman | 8000 kotak | Kotak | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | jumlah makanan dan minuman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 51 kali | Kali | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | | | | Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip | jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | 20 buku | Buku | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | Administrasi Umum | jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | | | | Publikasi dan Informasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah publikasi dan informasi perencanaan pembangunan | 225 kali publikasi media | Publikasi | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah publikasi dan informasi perencanaan pembangunan | Administrasi Umum | Jumlah publikasi dan informasi perencanaan pembangunan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | jumlah kegiatan peningkatan/ pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 47 orang | orang | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | jumlah kegiatan peningkatan/ pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Administrasi Umum | jumlah kegiatan peningkatan/ pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 11 |
| | | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | jumlah peralatan gedung kantor | 8 jenis | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | jumlah peralatan gedung kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |
| | | | | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | jumlah gedung kantor yang dipelihara | 2 ruangan | Ruangan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | jumlah gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | jumlah gedung kantor yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | | | | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | 20 unit | kendaraan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 72 buah | kendaraan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 31 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | Kode | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|--|--|-----------------|--------------|--|--|---|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | Pengadaan bbm dan pelumas | jumlah/ volume bbm dan pelumas | 6.194 liter | liter | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah/ volume bbm dan pelumas | Administrasi Umum | jumlah/ volume bbm dan pelumas | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah | 6 dokumen | dokumen | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | Administrasi Umum | jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 07 |
| | | | | Penyediaan jasa perpindahan kantor | Jumlah perpindahan kantor | 1 kali pindah | luas ruangan | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | jumlah gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | jumlah gedung kantor yang dipelihara | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6 dokumen | jumlah | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Administrasi Keuangan | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
| | | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 Dokumen | jumlah | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.02 | 02 |
| | | | | Penyusunan/Reviu Renstra | jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen | jumlah | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen Renstra | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | Penyusunan Renja/RKT | jumlah rankepekda tentang rencana kerja | 2 Dokumen Renja | jumlah | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | jumlah rankepekda tentang rencana kerja | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah rankepekda tentang rencana kerja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | Penyusunan laporan keuangan | jumlah laporan keuangan | 5 dokumen | dokumen | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | jumlah laporan keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | Penyusunan/ Reviu Standar Pelayanan | jumlah dokumen standar pelayanan | | jumlah | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------|--|--|--|---|---------------------------|---|--|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------------|--|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah | % Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 18,96 | | | | | | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH | Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah | Jumlah dokumen hasil analisa pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah | 34 dokumen | | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | Jumlah dokumen hasil analisa pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | % Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 01 |
| | | | | | | Perencanaan Dan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah | 28 dokumen | | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | % Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 01 |
| | | | | | | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah | Jumlah sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang terintegrasi dan terpelihara | 1 sistem | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang terintegrasi dan terpelihara | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | % Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 06 |
| | | | | | Program Pelayanan Pajak Daerah | Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah | 82,97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Pendaftaran dan pendaftaran Pajak Daerah I | Jumlah data PBB yang dimutakhirkan | Pemukta hiran seluruh data PBB kota malang | | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah data PBB yang dimutakhirkan | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 09 |
| | | | | | | Pendaftaran dan pendaftaran Pajak Daerah II | Jumlah Obyek Pajak yang didata | Terdatan ya seluruh obyek Pajak daerah kota malang | | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Obyek Pajak yang didata | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 09 |
| | | | | | | Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah I | Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah I yang ditetapkan dan didistribusikan | Ditetak anyya dan didistrib usikannya seluruh kota malang target pajak daerah | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah I yang ditetapkan dan didistribusikan | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 08 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|--|--------|----------------------------------|---|--|---|--------|--|--|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------------|--------|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | | | | | | | Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah II | Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah II yang ditetapkan dan didistribusikan | Ditetapkan dan didistribusikannya seluruh kota malang target pajak daerah | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah II yang ditetapkan dan didistribusikan | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 08 |
| | | | | | | | Program Pengendalian Pajak Daerah | Prosentase Penurunan Piutang Pajak Daerah | 18,70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Jumlah dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah | 73 Dokumen | | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Prosentase Penurunan Piutang Pajak Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 11 |
| | | | | | | | Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pajak Daerah | Jumlah keberatan dan sengketa pajak daerah yang terselesaikan | 900 berkas | | Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi | Jumlah keberatan dan sengketa pajak daerah yang terselesaikan | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Prosentase Penurunan Piutang Pajak Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | Bidang Pengendalian Pajak Daerah | Penagihan piutang Pajak Daerah | Jumlah piutang yang tertagih | 2085 surat | | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah piutang yang tertagih | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Prosentase Penurunan Piutang Pajak Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 10 |
| | | | | | | | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak | Jumlah Sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak | 14 kali | | Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi | Jumlah Sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Prosentase Penurunan Piutang Pajak Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah wajib pajak yang diperiksa | 1200 WP diperiksa | | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah wajib pajak yang diperiksa | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Prosentase Penurunan Piutang Pajak Daerah | KEUANGAN | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 10 |
| | 5 | | | | | | Urusan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | | | | | Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|-----|--------|---------------|--|--|---------------------------|--------|--|--|---|--------------------|--|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | 066 | | | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | 25,00 Liter | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | 5 | 01 | 07 | 011 | | | Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan | Jumlah sertifikasi | 1,00 Sertifikat | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah sertifikasi | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | 5 | 01 | 07 | 039 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 35,00 Jenis | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | 5 | 01 | 07 | 042 | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 9,00 Jenis | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | 5 | 01 | 07 | 031 | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 5.000,00 Surat | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | 5 | 01 | 07 | 040 | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10,00 Jenis | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |
| | 5 | 01 | 07 | 008 | | | Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) | Jumlah ZI | 50,00 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah ZI | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | 5 | 01 | 07 | 034 | | | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 78,00 Unit | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 05 |
| | 5 | 01 | 07 | 035 | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 90,00 Unit | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |
| | 5 | 01 | 07 | 032 | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 12,00 Bulan | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|-----|--------|---------------|--|--|--------------|--------|--|--|-----------------------|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 5 | 01 | 07 | 050 | | | Peringatan/kegiatan insidental | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | 1,00 Kali | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | 5 | 01 | 07 | 004 | | | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | 161,00 | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 1 | 2.02 | 1 |
| | 5 | 01 | 07 | 038 | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 125,00 Jenis | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | 5 | 01 | 07 | 094 | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 9,00 Jenis | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|--|---|--|--------|--|---|--|--------------------|---|--|---|--------|-------------------------------------|---------------------------|----|------|----|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | Program Penyusunan Anggaran dan Pembendaharaan Daerah | Persentase BTL APBD ≤ 50% | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal tentang APBD TA. | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal tentang P-APBD TA. | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun | | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | | | | |
| | | | | | Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan | Jumlah dokumen yang tersusun | 4 dokumen Nota Kesepakatan | | Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | | | | |
| | | | | | | | | | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | | | | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan Perencanaan Anggaran Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | 3 Ranperwal | | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | Jumlah Ranperwal yang tersusun | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | | | | |
| | | | | | Anggaran dan Pembendahaaraan Daerah | | | | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD | Jumlah Ranperwal yang tersusun | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | | | | |
| | | | | | | | | | Asistensi Penyusunan RKA dan DPA SKPD | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi | 132 SKPD | | Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | | | | | Penatausahaan Keuangan | Jumlah Dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan | 12 dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran PPKD | | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan pembiayaan daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Pembendaharaan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|--|--|--|-------------|--|--|--|----------|-------------------------------------|---|-------------------|---------------|--------|------|----|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | 3 Ranperwal | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | Jumlah Ranperwal yang tersusun | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | |
| | | | | | | | | | Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | Jumlah SP2D yang terbit | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | |
| | | | | | Peningkatan Pelayanan Gaji PNS | Jumlah Rekap gaji PNS pada SKPD yang tercetak | 500 | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jenis dokumen laporan yang tersusun | Koordinasi dan Pengelolaan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase BTL APBD ≤ 50% | | | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | |
| | | | | | Program Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase L/K SKPD Yang berkualitas mendukung opini BPK RI | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Dokumen laporan pembukuan penerimaan pendapatan dan Pembukuan belanja yang tersusun | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase L/K SKPD Yang berkualitas mendukung opini BPK RI | | | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | |
| | | | | | | | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase L/K SKPD Yang berkualitas mendukung opini BPK RI | | | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 09 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA | Jenis dokumen laporan yang tersusun | 2 Ranperwal | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda | Jenis dokumen laporan yang tersusun | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase L/K SKPD Yang berkualitas mendukung opini BPK RI | | | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | |
| | | | | | Penyusunan Ranperda dan Raperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase L/K SKPD Yang berkualitas mendukung opini BPK RI | | | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---------------|--|--|--|---------------------------|---|--|--|--------------------|---|---|---------------|--------|------|--|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase L/K SKPD Yang berkualitas mendukung opini BPK RI | | | | | 5 | 02 | 03 | 2.04 | 12 |
| | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang | Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah | 1 dokumen | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 05 |
| | | | | | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | 2 Ranperwal | | Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 13 |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 02 |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 03 |
| | | | | | | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 11 |
| | | | | | | | | | | Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD | Jumlah dokumen laporan yang tersusun | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 |
| | | | | | | Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah | Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi | 1000 obyek | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 06 |
| | | | | | | Penilaian Ulang/Revaluasi Barang Milik Daerah | Jumlah sistem informasi pelayanan aset tanah daerah yang terbangun atau dikembangkan | 10.567 item | | Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Hasil Penilaian BMD | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 08 |
| | | | | | | Pemanfaatan Aset Daerah | Program Pemanfaatan Aset Daerah | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | 0.69% | | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|---|--------|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--------------------------------|---------------|--------|------|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang | Jumlah Ijin yang diterbitkan | 100 ijin | | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan yang tersusun | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | |
| | | | | | Pengamanan Tanah dan Bangunan Aset Daerah | Jumlah titik lokasi bidang lahan aset daerah yang diamankan | 300 titik lokasi obyektif | | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Yang Diamankan | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | |
| | | | | | Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan yang tersusun | 2 dokumen | | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan yang tersusun | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 10 | |
| | 5 | 01 | 0 | 7 | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | 7 | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 38.000,00 Surat | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | 7 | 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 3,00 Jenis | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | 5 | 01 | 0 | 04 | 7 | 0 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10,00 Jenis | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | 7 | 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 10,00 Jenis | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 03 |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | 7 | 4 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 36,00 Unit | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 05 |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | 7 | 5 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 55,00 Unit | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|---------------|------------------|-----------|-------------|--------|--|--|--------------|--------------------|--|--|-----------------------|--------|--|---|--|--|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | 07 | 03 | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 30,00 | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | 07 | 08 | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 70,00 Jenis | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | 07 | 09 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 15,00 Jenis | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | 5 | 01 | 0 | 04 | 07 | 02 | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 4,00 Surat | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | 5 | 01 | 0 | 04 | 07 | 03 | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 6.000,00 | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | 5 | 01 | 0 | 04 | 07 | 04 | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 120,00 Kali | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | 5 | 01 | 0 | 05 | 07 | 00 | | | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 1,00 Kali | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | 5 | 01 | 0 | 00 | 07 | 02 | | | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | 2,00 Dokumen | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | 5 | 01 | 0 | 04 | 07 | 09 | | | Penyediaan jasa perpindahan kantor | Jumlah perpindahan kantor | 1,00 Kali | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah perpindahan kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 03 |
| | 5 | 01 | 0 | 02 | 07 | 00 | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 8,00 Unit | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | 5 | 01 | 0 | 06 | 07 | 01 | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 10,00 | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |
| | | | | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 24 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|---------------|------------------|-----------|-------------|--------|---|---|--------------|--------------------|--|---|---|--------|--|---|--|--|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 0 | 07 | 2 | | | | Peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 3,00 Kali | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | | | | | | | | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peserta Sosialisasi | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 11 |
| | 5 | 01 | 0 | 00 | 3 | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 9,00 Dokumen | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | 6 | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | 360,00 SPM | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 07 |
| | 5 | 01 | 0 | 00 | 9 | | | | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | 2,00 Dokumen | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen standar pelayanan | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | 5 | 01 | 0 | 01 | 2 | | | | Penyusunan/reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | 1,00 Dokumen | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | 5 | 01 | 0 | 01 | 3 | | | | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | 1,00 Dokumen | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------|--|--|---|-------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------|------|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | Urusan Penunjang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | | | | |
| | | | | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | KEPEGAWAIAN | 5 | 03 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 5 | 04 | | | |
| | | | | | Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian | Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu | 84,39 | % | | | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu | KEPEGAWAIAN | 5 | 03 | 02 | | |
| | | | | | | Persentase terisinya jabatan struktural dan pelaksana | 64 | % | | | | | | Persentase terisinya jabatan struktural dan pelaksana | | | | | | |
| | | | | | Proses Kenaikan Pangkat | Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu | 1100 org | orang | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu | Administrasi Kepegawaian | Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu | KEPEGAWAIAN | 5 | 03 | 02 | | |
| | | | | | Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi | Jumlah Jabatan jabatan yang terisi | 7 jabatan | jabatan | Penataan dan Mutasi Jabatan | Jumlah Jabatan jabatan yang terisi | Administrasi Kepegawaian | Jumlah Jabatan jabatan yang terisi | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase terisinya jabatan struktural dan pelaksana | KEPEGAWAIAN | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 02 |
| | | | | | Perencanaan Kebutuhan ASN | Jumlah peserta bimtek | 230 org | orang | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah dokumen | Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase terisinya jabatan struktural dan pelaksana | KEPEGAWAIAN | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 01 |
| | | | | | Penerimaan ASN | Jumlah ASN yang diterima | 345 org | orang | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah ASN yang diterima | Administrasi Kepegawaian | Jumlah ASN yang diterima | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase terisinya jabatan struktural dan pelaksana | KEPEGAWAIAN | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 01 |
| | | | | | Pengangkatan CPNS menjadi PNS | Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS | 345 org | orang | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS | Administrasi Kepegawaian | Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase terisinya jabatan struktural dan pelaksana | KEPEGAWAIAN | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 01 |
| | | | | Fasilitasi Mutasi dan Promosi Jabatan | Jumlah Pelaksanaan mutasi jabatan | 500 kali | kali | Penataan dan Mutasi Jabatan | Jumlah Pelaksanaan mutasi jabatan | Administrasi Kepegawaian | Jumlah Pelaksanaan mutasi jabatan | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase terisinya jabatan struktural dan pelaksana | KEPEGAWAIAN | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 02 | |
| | | | | Fasilitasi Pemberhentian Pegawai | Jumlah Pensiun dan MPP | 473 org | orang | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | Jumlah Pensiun dan MPP | Administrasi Kepegawaian | Jumlah Pensiun dan MPP | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase terisinya jabatan struktural dan pelaksana | KEPEGAWAIAN | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 04 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---|---|--------------------------------------|-------------|---|---|---|---|--|---|---|--------------------------|-------------------------------------|------|----|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Jabatan Fungsional | Jumlah peserta bimtek | 250 org | orang | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah ASN yang terfasilitasi | Peningkatan Kapasitas ASN | Jumlah ASN yang terfasilitasi | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu | KEPEGAWAIAN | | | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 09 | |
| | | | | | Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 69,15 | % | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 5 | 04 | 02 | | | |
| | | | | | | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 96 | % | | | | | | | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | | | | | | | | |
| | | | | | Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas ASN | Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi | 80 org | orang | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi | | Pengembangan Kompetensi Teknis | Jumlah ASN yang lulus kompetensi | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | 5 | 04 | 02 | 1.01 | 04 |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional | Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional | 207 org | orang | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional | Pengembangan Kompetensi Teknis | Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | 5 | 04 | 02 | 1.01 | 03 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan | Jumlah Peserta Diklat PIM IV, PIM III, PIM II | PIM IV : 30, PIM III : 1, PIM II : 4 | orang | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Peserta Diklat PIM IV, PIM III, PIM II | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Peserta Diklat PIM IV, PIM III, PIM II | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | KEPEGAWAIAN | | | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 07 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|--|--------------------------|-----------|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|--|---|--------------------------|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Budaya Kerja | Jumlah peserta diklat | 50 org | orang | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah peserta diklat | Pengembangan Kompetensi Teknis | Jumlah peserta diklat | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | KEPEGAWAIAN | | | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 03 |
| | | | | | Pelaksanaan Assesment | Jumlah peserta assesment | 320 org | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah peserta assesment | Pengembangan Kompetensi Teknis | Jumlah peserta assesment | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | KEPEGAWAIAN | | | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 04 |
| | | | | | Evaluasi Dampak Diklat | Jumlah ASN yg dievaluasi | 150 org | orang | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yg dievaluasi | Pengembangan Kompetensi Teknis | Jumlah ASN yg dievaluasi | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | KEPEGAWAIAN | | | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 03 |
| | | | | | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD | Jumlah CPNS | 30 org | orang | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah CPNS | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah CPNS | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 07 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|--|-------------|--------|--|--|--------------------------------|--|--|---|--------------------------|--------|----------|-----------|-----------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Workshop Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah peserta yang mengikuti workshop IP ASN | 120 org | orang | Peningkatan Kapasitas ASN | Jumlah peserta yang mengikuti workshop IP ASN | Peningkatan Kapasitas ASN | Jumlah peserta yang mengikuti workshop IP ASN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | KEPEGAWAIAN | | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 01 |
| | | | | | Manajemen Talenta ASN | jumlah asn yang dianalisa pengembangan SDM nya | 136 org | orang | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | jumlah asn yang dianalisa pengembangan SDM nya | Pengembangan Kompetensi Teknis | jumlah asn yang dianalisa pengembangan SDM nya | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | KEPEGAWAIAN | | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 04 |
| | | | | | Pengiriman Uji Kompetensi Untuk Calon Pejabat Fungsional | Jumlah peserta Calon JF | 20 org | orang | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah peserta Calon JF | Pengembangan Kompetensi Teknis | Jumlah peserta Calon JF | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | 5 | 04 | 02 | 1.01 | 04 |
| | | | | | Pembinaan Sadar Hukum Bagi anggota ASN | Jumlah ASN yg mengikuti pembinaan sadar hukum | 100 org | orang | Fasilitasi Profesi ASN | Jumlah ASN yg mengikuti pembinaan sadar hukum | Peningkatan Kapasitas ASN | Jumlah ASN yg mengikuti pembinaan sadar hukum | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | KEPEGAWAIAN | | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 05 |
| | | | | | Pembinaan Mental Rohani dan Etos Kerja bagi anggota ASN | Jumlah ASN yg mengikuti pembinaan mental rohani dan etos kerja | 1680 orang | orang | Fasilitasi Profesi ASN | Jumlah ASN yg mengikuti pembinaan mental rohani dan etos kerja | Peningkatan Kapasitas ASN | Jumlah ASN yg mengikuti pembinaan mental rohani dan etos kerja | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | KEPEGAWAIAN | | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 05 |
| | | | | | Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan | Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar | 0% | | | | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN | Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar | KEPEGAWAIAN | | 5 | 03 | 02 | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|--|--|--------------------------|--------|--|--|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah surat keluar selama 1 tahun | 5000 surat | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik | 12 bulan | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 4 unit | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 05 |
| | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional | 18 unit | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |
| | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah bulan pelaksanaan kebersihan | 12 bulan | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 1 unit | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 03 |
| | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | 750 bh | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 07 |
| | | | | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah alat tulis kantor | 1555 bh | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 509 rim,280 dos,10417 bh | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 700 bh | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | | | | Penyediaan makanan dan minuman | jumlah makanan dan minuman | 610 bh | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 78 kali | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|---|--|-------------|--------|--|---|---|--|---|-------------------|---------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | | | | | Peringatan/Kegiatan Insidentil | jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 1 kali | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas | jumlah pengemudi/supir dinas | 1 org | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengemudi/supir dinas | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |
| | | | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 20 unit | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 24 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | jumlah Gedung kantor yang dipelihara | 25 M2 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 18 unit | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas | 5 unit | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 20 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 106 bh | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |
| | | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah mebeleur yang dipelihara | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 35 |
| | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah | 1 bh | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Administrasi Keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | | Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 50 org | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2 dokumen | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|--|---|-----------|---------------------------|--|---|---|----------|--|---|-------------------|---------------|--------|------|----|-------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | | | | | Penyusunan laporan keuangan | jumlah laporan keuangan | 3 dokumen | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 1 | 43863 | 1 |
| | | | | | Penyusunan/Reviu Renstra | jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dok | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Penyusunan Profil SKPD | Jumlah Dokumen Profil SKPD | 30 dok | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat | jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | 2 dok | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
| | | | | | Penyusunan Renja/RKT | jumlah Renja | 1 dokumen | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|---|--|-------------|--------|--|---|---|--|--|--|-------------------------------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah | 4 | 01 | | | | |
| Bagian Kesra | | | | | Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | 100% | | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | | | |
| | | | | | Kegiatan Layanan Subbagian Administrasi Kemasyarakatan | Jumlah dokumen hasil layanan subbagian administrasi kemasyarakatan | 1 dokumen | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil layanan administrasi kemasyarakatan | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Kegiatan Layanan Subbagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat | Jumlah dokumen hasil layanan subbagian administrasi kesejahteraan rakyat | 1 dokumen | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah dokumen hasil layanan administrasi kesejahteraan rakyat | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Kegiatan Layanan Subbagian Keagamaan | Jumlah dokumen hasil layanan subbagian keagamaan | 1 dokumen | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah dokumen hasil layanan subbagian keagamaan | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Rapat Kerja Tim Pembina UKS | Jumlah dokumen hasil rapat kerja Tim Pembina | 1 dokumen | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah dokumen hasil rapat kerja Tim Pembina | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | 1 dokumen | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Pembinaan lembaga Zakat Infaq Shodaqoh | Jumlah dokumen pembinaan lembaga zakat infaq dan shodaqoh | 1 dokumen | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah dokumen pembinaan lembaga zakat infaq dan shodaqoh | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|---|-------------|---------------------------|--|---|---|--|---|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah | Jumlah jamaah calon haji yang mendapatkan fasilitasi transportasi daerah | 1350 CJH | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Keikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) | Jumlah keikutsertaan pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren daerah (POSPEDA) | 1 kali | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah keikutsertaan pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren daerah (POSPEDA) | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran | Jumlah keikutsertaan pengembangan tilawatil Quran | 2 kali | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah keikutsertaan pengembangan tilawatil Qur | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Hari Santri | Jumlah peringatan hari santri | 1 kegiatan | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah peringatan hari santri | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Pertemuan Tokoh Agama dengan Pemerintah Kota Malang | Jumlah pertemuan tokoh agama dengan pemerintah | 4 kali | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah pertemuan tokoh agama dengan pemerintah | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah | Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen tempat ibadah | 100 orang | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen tempat ibadah | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Sosialisasi Wakaf | Jumlah peserta sosialisasi wakaf | 100 orang | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah peserta sosialisasi wakaf | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah | Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan keluarga sakinah | 100 orang | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan keluarga sakinah | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--------|---------------|--|---|---------------------|---------------------------|--|---|---|---|---|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Gebyar Muharam | Jumlah peserta yang mengikuti gebyar muharam | 400 orang | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah peserta yang mengikuti gebyar muharam | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri | Jumlah peserta yang mengikuti gebyar takbir idul fitri | 100 orang | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah peserta yang mengikuti gebyar takbir idul fitri | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah | Jumlah rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah | 2 draft rekomendasi | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan | Jumlah safari ramadhan di 5 kecamatan | 10 kali | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah safari ramadhan di 5 kecamatan | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 |
| Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA | | | | | Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA | Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti | 100% | | | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 03 | | |
| | | | | | Pengembangan kebijakan bidang perekonomian yang difasilitasi | Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang perekonomian yang difasilitasi | 2 Dokumen | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang perekonomian yang difasilitasi | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Perekonomian | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) | Jumlah dokumen Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) | Jumlah dokumen fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi | Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi | 1 dokumen | | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi | Administrasi Pembangunan | Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|--|---------------------|--------|--|--|---|--|---|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|--|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | |
| | | | | | Pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA yang difasilitasi | Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA yang difasilitasi | 1 dokumen | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA yang difasilitasi | Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA yang difasilitasi | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 02 | | |
| | | | | | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi | Persentase hasil evaluasi ditindaklanjuti | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan | Jumlah pelaksanaan evaluasi | 4 kali | | Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan | Jumlah pelaksanaan evaluasi | | | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi | Persentase hasil evaluasi ditindaklanjuti | | | | | | | | | |
| Bagian Humas | | | | | Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokolanan dan Hubungan Antar Lembaga | Persentase penyelenggaraan hubungan masyarakat, keprotokolanan dan hubungan antar lembaga | 100% | | | | | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Persentase penyelenggaraan kegiatan pimpinan | | | 0 | 01 | 04 | | | | |
| | | | | | Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota | Jumlah dokumentasi kebijakan | 3 jenis dokumentasi | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah dokumentasi kebijakan | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah layanan informasi dan komunikasi pimpinan | | | | | 0 | 01 | 04 | 2.03 | 03 | | |
| | | | | | Layanan Kehumasan | Jumlah layanan kehumasan | 4 jenis layanan | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah layanan kehumasan | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah layanan informasi dan komunikasi pimpinan | | | | | 0 | 01 | 04 | 2.03 | 02 | | |
| | | | | | Layanan Keprotokolanan | Jumlah layanan keprotokolanan | 1000 layanan | | Fasilitasi Keprotokolanan | Jumlah layanan keprotokolanan | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah layanan informasi dan komunikasi pimpinan | | | | | 0 | 01 | 04 | 2.03 | 01 | | |
| | | | | | Penerbitan majalah pemerintah kota | Jumlah majalah yang diterbitkan | 18.000 eksemplar | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah majalah yang diterbitkan | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah layanan informasi dan komunikasi pimpinan | | | | | 0 | 01 | 04 | 2.03 | 03 | | |
| | | | | | Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota | Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan | 650 kali tayang | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah layanan informasi dan komunikasi pimpinan | | | | | 0 | 01 | 04 | 2.03 | 02 | | |
| | | | | | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam Rangka Penyampaian Informasi | Persentase kegiatan bidang cukai yang dipublikasikan | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|--|-----------------|--------|--|---|-------------------|--|---|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui media | Jumlah informasi yang disampaikan | 450 kali tayang | | Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui media | Jumlah informasi yang disampaikan | | | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam Rangka Penyampaian Informasi | Persentase kegiatan bidang cukai yang dipublikasikan | | | | | | | |
| Bagian Umum | | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Nilai survey kepuasan internal | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas | Jumlah pengemudi/supir dinas | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengemudi/supir dinas | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |
| | | | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 14 |
| | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|--|--------------|--------|---|--|-------------------------------|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | | | | | Fasilitasi peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur | Jumlah kegiatan fasilitasi peringatan hari jadi provinsi jawa | 1 kegiatan | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah kegiatan fasilitasi peringatan hari jadi provinsi jawa | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | 4 | 01 | 04 | 2.03 | 3 |
| | | | | | Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang | Jumlah kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Malang | 145 kegiatan | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Malang | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | 4 | 01 | 04 | 2.03 | 17 |
| | | | | | Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | 50 kali | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah | Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah kegiatan pejabat dan pimpinan yang difasilitasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Setda | | | 4 | 01 | 04 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Peningkatan fungsi Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik | Jumlah pelaksanaan fungsi staf ahli bidang ekonomi keuangan hukum dan politik | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah pelaksanaan fungsi staf ahli bidang ekonomi keuangan hukum dan politik | Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah kegiatan pejabat dan pimpinan yang difasilitasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Setda | SEKRETARIAT DAERAH | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 04 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Peningkatan fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | Jumlah pelaksanaan fungsi staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah pelaksanaan fungsi staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia | Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah kegiatan pejabat dan pimpinan yang difasilitasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Setda | SEKRETARIAT DAERAH | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 04 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Peningkatan fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan | Jumlah pelaksanaan fungsi staf ahli bidang ekonomi keuangan | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah pelaksanaan fungsi staf ahli bidang ekonomi keuangan | Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah kegiatan pejabat dan pimpinan yang difasilitasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Setda | SEKRETARIAT DAERAH | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 04 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi umum | Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi umum | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi umum | Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah kegiatan pejabat dan pimpinan yang difasilitasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Setda | SEKRETARIAT DAERAH | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 04 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | 35 kali | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah kegiatan pejabat dan pimpinan yang difasilitasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Setda | | | 4 | 01 | 04 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian | Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian | Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah kegiatan pejabat dan pimpinan yang difasilitasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Setda | SEKRETARIAT DAERAH | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 04 | 2.01 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|--------|--|---|---|---|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | Peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang telah mengikuti pengembangan kapasitas | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sumber daya aparatur yang telah mengikuti pengembangan kapasitas | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | | | | | | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | | | | | | Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah | 12 bulan | | Pengelolaan Rumah Tangga | Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah | Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah kegiatan pejabat dan pimpinan yang difasilitasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Setda | | | 4 | 01 | 04 | 2.01 | 03 |
| | | | | | | Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Wakil Kepala Daerah | 12 bulan | | Pengelolaan Rumah Tangga | Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Wakil Kepala Daerah | Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah kegiatan pejabat dan pimpinan yang difasilitasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Setda | | | 4 | 01 | 04 | 2.01 | 03 |
| | | | | | | Peringatan hari-hari besar/khusus/ tertentu | Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/ tertentu | 10 kegiatan | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/ tertentu | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 03 |
| | | | | | | Peringatan/kegiatan insidental | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 03 |
| | | | | | | Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas | Jumlah tamu-tamu dinas | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah tamu-tamu dinas | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | | | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan dan kinerja yang disusun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | | | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan dan kinerja yang disusun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|--|--------------|--------|--|--|---|---|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |
| | | | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas | | | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 21 |
| | | | | | | Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas | | | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 23 |
| | | | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 14 jenis | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |
| | | | | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 24 |
| | | | | | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah/volume BBM dan pelumas | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | | Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus | Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus | 24.000 meter | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang telah mengikuti pengembangan kapasitas | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sumber daya aparatur yang telah mengikuti pengembangan kapasitas | | | X | XX | 01 | 2.04 | 02 |
| | | | | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 38 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 29 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi | Jumlah jaringan telekomunikasi | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah jaringan telekomunikasi | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKB | | | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|------------|----------|--------|---------------|--|--|---------------------------|--------|---|--|---------------------------|--|--|--|---------------|----------|-----------|-----------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 10 jenis | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 32 |
| | | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah rumah dinas yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 27 |
| | | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Jumlah rumah jabatan yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Jumlah rumah jabatan yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 26 |
| | | | | | | | Pemeliharaan taman perkantoran | Jumlah taman yang dipelihara | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah taman yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 1 | 304 | 8 | | | Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan | | | | | | | | | | 4 | 01 | 03 | | | |
| | 4 | 1 | 304 | 8 | 4 | | Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang | Jumlah Bimtek pengadaan Barang/Jasa | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Bimtek pengadaan Barang/Jasa | Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah layanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik | | | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 |
| | 4 | 1 | 304 | 8 | 2 | | Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang | Jumlah dokumen hasil proses pengadaan barang/jasa | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen hasil proses pengadaan barang/jasa | Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah layanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik | | | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 |
| | 4 | 1 | 304 | 8 | 3 | | Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang | Jumlah dokumen laporan monev pengadaan barang/jasa | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen laporan monev pengadaan barang/jasa | Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah layanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik | | | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 |
| | 4 | 1 | 304 | 8 | 5 | | Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah layanan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah layanan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi | Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah layanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik | | | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 |
| | 4 | 1 | 304 | 8 | 1 | | Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah waktu layanan pengadaan barang/jasa melalui sistem informasi yang terhenti dalam satu tahun | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah waktu layanan pengadaan barang/jasa melalui sistem informasi yang terhenti dalam satu tahun | Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah layanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik | | | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|-----|----|--------|---------------|---|--|---------------------------|--------|---|--|---|---|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| Bagian Organisasi | 4 | 1 | 303 | 9 | | | Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja | Nilai kapasitas organisasi | 3,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 303 | 9 | 1 | | Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik | Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik | 5 kebijakan | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik | Penataan Organisasi | Jumlah dokumen kebijakan penataan organisasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Nilai kapasitas organisasi | | | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 02 |
| | 4 | 1 | 303 | 9 | 2 | | Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Jumlah dokumen hasil monev peningkatan kualitas pelayanan publik | 3 dokumen | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen hasil monev peningkatan kualitas pelayanan publik | Penataan Organisasi | Jumlah dokumen kebijakan penataan organisasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Nilai kapasitas organisasi | | | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 02 |
| | 4 | 1 | 303 | 9 | 4 | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen hasil monev RB | 1 dokumen | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen hasil monev RB | Penataan Organisasi | Jumlah dokumen kebijakan penataan organisasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Nilai kapasitas organisasi | | | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 03 |
| | 4 | 1 | 303 | 9 | 5 | | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang | 1 dokumen | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang | Penataan Organisasi | Jumlah dokumen kebijakan penataan organisasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Nilai kapasitas organisasi | | | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 03 |
| | 4 | 1 | 303 | 9 | 6 | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP Sekretariat Daerah | Jumlah dokumen monev SPIP Sekretariat Daerah | 1 dokumen | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen monev SPIP Sekretariat Daerah | Penataan Organisasi | Jumlah dokumen kebijakan penataan organisasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Nilai kapasitas organisasi | | | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 03 |
| | 4 | 1 | 303 | 9 | 7 | | Perumusan Kebijakan Bidang Kelembagaan | Jumlah dokumen kebijakan bidang kelembagaan | 1 dokumen | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen kebijakan bidang kelembagaan | Penataan Organisasi | Jumlah dokumen kebijakan penataan organisasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Nilai kapasitas organisasi | | | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 01 |
| | 4 | 1 | 303 | 9 | 8 | | Fasilitasi Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik | Jumlah dokumen bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik | 1 dokumen | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik | Penataan Organisasi | Jumlah dokumen kebijakan penataan organisasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Nilai kapasitas organisasi | | | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 02 |
| | 4 | 1 | 303 | 9 | 9 | | Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi | 1 dokumen | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi | Penataan Organisasi | Jumlah dokumen kebijakan penataan organisasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Nilai kapasitas organisasi | | | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 03 |
| | 4 | 1 | 303 | 9 | 10 | | Penyusunan Renja Sekretariat Daerah | Jumlah dokumen renja | 1 dokumen | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen renja | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Setda | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | 4 | 1 | 303 | 10 | | | Program Pengembangan Standar Kompetensi | Persentase standar kompetensi perangkat daerah yang ditetapkan | 70% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 303 | 10 | 1 | | Penyusunan/Reviu Standar Kompetensi Jabatan | Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan | 1 dokumen | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan | Penataan Organisasi | Jumlah dokumen kebijakan penataan organisasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Nilai kapasitas organisasi | | | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 01 |
| | | | | | | | Penyusunan/Reviu Evaluasi Jabatan | Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan | | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan | Penataan Organisasi | Jumlah dokumen kebijakan penataan organisasi | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Nilai kapasitas organisasi | | | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 01 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|-----|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|--------|---|---|--|---------------------------------|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| Bagian Hukum | 4 | 1 | 302 | 3 | | | Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | 100% | | | | | | | | | | 4 | 01 | 02 | | |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 1 | | Bimbingan Teknis Legal Drafting | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting | 70 orang | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 2 | | Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal | Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal | 10 produk hukum | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 3 | | Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda | jumlah ranperda yang diharmonisasi | 10 ranperda | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | jumlah ranperda yang diharmonisasi | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 4 | | Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepsekda | Jumlah ranperwal, rankepwal dan rankepsekda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi | 580 dokumen | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah ranperwal, rankepwal dan rankepsekda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 5 | | Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang | 1 dokumen | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 6 | | Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan | Jumlah buku himpunan perda yang dicetak | 5000 buku | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah buku himpunan perda yang dicetak | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 7 | | Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) | Jumlah peserta pembinaan kadarkum | 300 orang | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah peserta pembinaan kadarkum | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 8 | | Penyuluhan Hukum | Jumlah peserta Penyuluhan Hukum | 250 orang | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah peserta Penyuluhan Hukum | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 9 | | Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan | Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah | 500 orang | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 10 | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan | 140 Sidang | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 11 | | Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah | Jumlah sidang penegakan hukum daerah | 11 sidang | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah sidang penegakan hukum daerah | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|-----|--------|---------------|------------------|---|---|-----------|--------------|--|---|---|--|---|---|--------|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 12 | | Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara | Jumlah peserta bimbingan Teknis | 65 orang | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah peserta bimbingan Teknis | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 13 | | Digitalisasi Produk Hukum | Jumlah produk hukum yang didigitalisasi | 4 dokumen | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum yang didigitalisasi | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 14 | | Fasilitasi Hak Asasi Manusia (HAM) | Jumlah dokumen laporan fasilitasi | 2 dokumen | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah dokumen laporan fasilitasi | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 15 | | Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum yang disusun | 3 dokumen | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum yang disusun | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 |
| | 4 | 1 | 302 | 3 | 16 | | Fasilitasi Permasalahan Hukum | Jumlah dokumen hasil fasilitasi permasalahan hukum | 1 dokumen | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah dokumen hasil fasilitasi permasalahan hukum | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti | | | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 |
| Bagian Pemerintahan | 4 | 1 | 301 | 4 | | | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 4 | | Penegasan Batas Daerah | Jumlah dokumen | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah dokumen | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 14 | | Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah | Jumlah dokumen | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan kinerja | Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan dan kinerja yang disusun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 9 | | Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil walikota dan anggota DPRD Kota Malang | Jumlah dokumen Administrasi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD yang difasilitasi | | | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah dokumen Administrasi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD yang difasilitasi | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 7 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Jumlah dokumen kerjasama daerah (MOU/PKS) | | | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah dokumen kerjasama daerah (MOU/PKS) | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Jumlah dokumen kerja sama daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 01 |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 2 | | Penyusunan LKPJ Walikota | Jumlah dokumen LKPJ Walikota | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah dokumen LKPJ Walikota | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 1 | | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) | Jumlah dokumen LPPD dan dokumen RLPPD | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah dokumen LPPD dan dokumen RLPPD | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 5 | | Pembakuan dan penamaan rupabumi | Jumlah dokumen Pembakuan dan penamaan Rupabumi | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah dokumen Pembakuan dan penamaan Rupabumi | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|-----|--------|---------------|------------------|-----------|-------------|---------------------------|--------------|--|---|--------------------------------|---|---|---|--------|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 3 | | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penerapan SPM | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 13 | | | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 8 | | | | | | Fasilitasi Hari Jadi Daerah | Jumlah Laporan Hari Jadi Daerah yang difasilitasi | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 6 | | | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 12 | | | | | | Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 |
| | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan | pemenang otonomi award dengan kriteria pemberdayaan masyarakat, inovasi kelurahan bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 |
| | 4 | 1 | 301 | 4 | 11 | | | | | | Penguatan kelembagaan kecamatan | jumlah perangkat kecamatan dan kelurahan yg mengikuti kegiatan | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | | | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|---|---|---------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------|------|---------|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Inspektorat | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | | | | | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 6 | | |
| | | | | Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | INSPEKTORAT DAERAH | | 6 01 | | |
| INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH I | | | | | Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan reviu | 100 (10 dari 10 dokumen) | % | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan reviu | | 6 01 | 02 | |
| | | | | | | Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan reviu | 100 (2 dari 2 dokumen) | % | | | | | | Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan reviu | | | | |
| | | | | | Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) | 1 Laporan Hasil Reviu (LHR) | dokumen | Review Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan reviu | | 6 01 | 02 | 2.01 02 |
| | | | | | Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIp) | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) | 1 Laporan Hasil Reviu (LHR) 4 LKj Trw | dokumen | Review Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan reviu | | 6 01 | 02 | 2.01 02 |
| | | | | | Kegiatan Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) | 10 Laporan Hasil Reviu (LHR) | dokumen | Review Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan reviu | | 6 01 | 02 | 2.01 02 |
| | | | | | Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | 28 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | dokumen | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan reviu | | 6 01 | 02 | 2.01 04 |
| | | | | | Kegiatan Evaluasi SPIP | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | 28 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | dokumen | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan reviu | | 6 01 | 02 | 2.01 04 |
| | | | | | Kegiatan Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | 28 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | dokumen | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan reviu | | 6 01 | 02 | 2.02 04 |
| | | | | | Kegiatan Evaluasi/penilaian internal zona integritas dan Operasional Saber Pungli | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) ZI | 7 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | dokumen | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan reviu | | 6 01 | 02 | 2.02 04 |
| | | | | | Kegiatan Monev Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Yanblik | 28 LHM | dokumen | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan reviu | | 6 01 | 02 | 2.02 04 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|---------------|--|--|-----------------------------------|----------|---------------------------------|--|---|-------------------------------|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Kegiatan Evaluasi Benturan Kepentingan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Conflict of interest | 2 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | dokumen | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan reviu | | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 04 |
| | | | | Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Verifikasi LHKASN | Jumlah laporan PMPRB dan Verifikasi LHKASN | 1 lap PMPRB 200 LHKASN | dokumen | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan reviu | | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 04 |
| | | | | Kegiatan Operasional Saber Pungli | Jumlah Laporan Tim Saber pungli | 12 Laporan | dokumen | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Tim Saber pungli | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan reviu | | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 03 |
| | | | | Kegiatan Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah laporan reviu DAK Fisik, | 3 Laporan Hasil Reviu (LHR) | dokumen | Review Kinerja dan Keuangan | Jumlah laporan reviu DAK Fisik, | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan reviu | | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 |
| INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH II | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ekonomi dan sumber daya alam | % Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam yang menindaklanjuti temuan pengawasan | 100 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja | 7 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | dokumen | Audit Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | % Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 |
| | | | | Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan Whistle Blower System dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang ekonomi dan sumber daya alam | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | 4 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | dokumen | Audit Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengaduan | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | % Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 |
| | | | | Kegiatan Pendampingan/pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan /probit advice pengadaan barang dan jasa Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam | Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice | 21 kegiatan | kali | Asistensi dan Pendampingan | Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice | Asistensi dan Pendampingan | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terealisasi | | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|--|---|------------------------------------|---------|---------------------------------|--|---|-------------------------|---|---|---------------|--------|------|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH III | | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menindaklanjuti temuan pengawasan | 100 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja | 12 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | dokumen | Audit Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | % Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan Whistle Blower System dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengaduan | 7 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | dokumen | Audit Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengaduan | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | % Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Kegiatan Pendampingan/pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan /probit advice pengadaan barang dan jasa Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice | 21 kegiatan | kali | Asistensi dan Pendampingan | Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice | Asistensi dan Pendampingan | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terealisasi | | | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 |
| | | | | | Kegiatan Monitoring dana Bantuan Operasional Sekolah | Jumlah LHM | 2 LHM | dokumen | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Jumlah LHM | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | % Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 03 |
| INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH IV | | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | % Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang menindaklanjuti temuan pengawasan | 100 | % | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|--|--|-----------------------------------|---------|--|---|---|-------------------------|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja | 8 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | dokumen | Audit Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | % Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 |
| | | | | Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan Whistle Blower System dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengaduan | 5 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | dokumen | Audit Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengaduan | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | % Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan | | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 |
| | | | | Kegiatan Pendampingan/pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan /probit advice pengadaan barang dan jasa Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice | 21 kegiatan | kali | Asistensi dan Pendampingan | Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice | Asistensi dan Pendampingan | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terealisasi | | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 |
| | | | | Program Pelayanan Kesekretariatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEKRETARIAT | | | | Penyusunan Renja/RKT | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | Penyusunan/Reviu Renstra | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
| | | | | Penyusunan laporan keuangan | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---|------------------|-----------|-------------|--|--|---|----------|--|--------------------------------|-------------------|---------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 03 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 06 |
| | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 09 |
| | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | | | | | Peringatan/kegiatan insidental | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | | | | | Peningkatan/peimbangan kapasitas sumber daya aparatur | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikeembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|--|--|-----------|---------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|---|---|-------------------|---------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | | | | | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pengawasan | Jumlah Ranperwal | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Laporan Kegiatan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terealisasi | | | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 01 |
| | | | | | Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Laporan kegiatan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terealisasi | | | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Kegiatan Penanganan laporan Gratifikasi dan Verifikasi Laporan Aksi Pencegahan Korupsi | Jumlah laporan Gratifikasi dan Verifikasi APK | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Laporan kegiatan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terealisasi | | | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Survei Penilaian Integritas | Jumlah Dokumen hasil Survei Penilaian Integritas | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Laporan kegiatan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terealisasi | | | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 02 |
| | | | | | Kegiatan Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TPKD | Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Laporan kegiatan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Laporan Kegiatan | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terealisasi | | | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | Kode Program/Kegiatan | | | | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-----------|----------------------------------|--------|--------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Sekretariat DPRD | 4 | | | | | | | | | | | | | | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | |
| | 4 | 403 | | | | | | | | | | | | Sekretariat DPRD | | |
| Bagian Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD | 4 | 403 | 1 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | [4.0] | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 21 | [4.0] | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 4 | | | | | | | | | | | 0 2.0 01 |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 5 | | | | | | | | | | | 0 2.0 04 |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 6 | | | | | | | | | | | 02 |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 7 | | | | | | | | | | | 0 2.0 03 |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 14 | | | | | | | | | | | 0 2.0 01 |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 10 | | | | | | | | | | | 0 2.0 01 |

| Struktur Organisasi | Kode Program/Kegiatan | | | | | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | Kode | | |
|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------|-------------|----------------------------------|--------------|---|---|---|---|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|
| | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | | | | |
| | | | | | | | | pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | jumlah pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | Pembahasan Kebijakan Anggaran | jumlah pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | | | 02 | |
| | | | | | | | | Pembahasan APBD | jumlah pembahasan APBD | Pembahasan Kebijakan Anggaran | jumlah pembahasan APBD | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | | | 03 | |
| | | | | | | | | Pembahasan APBD Perubahan | jumlah pembahasan APBD Perubahan | Pembahasan Kebijakan Anggaran | jumlah pembahasan APBD Perubahan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | | | 04 | |
| | | | | | | | | Pembahasan Laporan semesteran | jumlah Pembahasan Laporan semesteran | Pembahasan Kebijakan Anggaran | jumlah Pembahasan Laporan semesteran | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | | | | |
| | | | | | | | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan Kebijakan Anggaran | jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 12 | | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan | Jumlah fasilitasi Badan Kehormatan | 4 | kali | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah fasilitasi Badan Kehormatan | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah fasilitasi Badan Kehormatan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | |
| | | | | | | | | Pengawasan Kode Etik DPRD | jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penyusunan Tata Tertib DPRD | jumlah Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | 05 | |
| | | | | | | | | Kunjungan kerja dalam daerah | Jumlah kunjungan kerja | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah kunjungan kerja | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | | | | |
| | | | | | | | | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | jumlah pokok pikiran DPRD | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | jumlah pokok pikiran DPRD | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | | | | |
| | | | | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Reses | Jumlah pelaksanaan reses | Pelaksanaan Reses | Jumlah reses | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | | | | |
| | | | | | | | | Kunjungan kerja dalam daerah | Jumlah fasilitasi | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah fasilitasi | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | | | | |
| | | | | | | | | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | Jumlah fasilitasi | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah fasilitasi | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | | | | |

| Struktur Organisasi | Kode Program/Kegiatan | | | | | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------|-------------|----------------------------------|--------------|--|--|--------------------|---------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|--|------|---|-----|----|
| | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | | | | Kode | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 19 | | | Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah | 11 | Dokumen | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah | Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 20 | | | Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD | Jumlah Rancangan Perda yang berasal dari DPRD | 4 | Dokumen | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Rancangan Perda yang berasal dari DPRD | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Rancangan Perda yang berasal dari DPRD | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | | | |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan | Jumlah Kajian Perundang-undangan | | | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan | Jumlah Kajian Perundang-undangan | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Kajian Perundang-undangan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 20 | 7 | | | Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota | Jumlah Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota | 2 | Dokumen | Fasilitasi Penyusunan Naskah akademik | Jumlah Naskah akademik | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Naskah akademik | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 11 | | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Pembentukan Peraturan daerah | Jumlah fasilitasi Badan Pembentukan Peraturan daerah | 4 | kali | Penyusunan tatatertib DPRD | Jumlah Fasilitasi pembahasan | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Fasilitasi pembahasan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 18 | | | Fasilitasi Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD | Jumlah Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD | 45 | orang | Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD | Jumlah Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD | Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | 0 | 2.0 | 01 |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 21 | | | Penyusunan Produk Hukum DPRD | Jumlah dan Jenis Produk Hukum DPRD | 10 | Dokumen | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah dan Jenis Produk Hukum DPRD | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah dan Jenis Produk Hukum DPRD | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | 0 | 2.0 | 03 |
| | | | | | | | | Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik | | | | Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik | | | | | | | | 04 | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | 22 | | | Fasilitasi Koordinasi terbatas DPRD | Jumlah koordinasi terbatas DPRD | 4 | kali | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah koordinasi terbatas DPRD | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah koordinasi terbatas DPRD | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | 0 | 2.0 | 01 |
| Bagian Hubungan Masyarakat | 4 | 403 | 1 | 19 | | | | Program Penyelenggaraan Kehumasan | Persentase publikasi kegiatan DPRD | 75 | % | | | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 18 | [4.0] | | | Pendalaman Bidang Tugas DPRD | Jumlah Peningkatan kapasitas DPRD | 6 | kali | Bimbingan Teknis DPRD | Jumlah Peningkatan kapasitas DPRD | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Peningkatan kapasitas DPRD | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda | | 0 | 2.0 | 03 |
| | 4 | 403 | 1 | 19 | 4 | | | Publikasi Kegiatan DPRD | Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD | 12 | jenis | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase publikasi kegiatan DPRD | | 0 | 2.0 | 03 |

| Struktur Organisasi | Kode Program/Kegiatan | | | | | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------|-------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---|--|---|---------------|--------|------|--|--|--|--|--|
| | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan perengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan perengkapan kantor | Administrasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 21 | 10 | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | Administrasi Umum | Penyediaan peralatan rumah tangga | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan bahan pustaka dan Peraturan perundang-undangan | jumlah bahan pustaka | Administrasi umum | Jumlah dan jenis media cetak yang dibeli | Program penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | jumlah penyediaan bahan logistik kantor | Administrasi umum | Penyediaan bahan logistik kantor | Program penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 21 | 8 | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat | Administrasi umum | Penyediaan makanan dan minuman | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 21 | 5 | | Rapat-rapat koordinasi dan kegiatan keluar daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan kegiatan keluar daerah | Administrasi umum | Rapat-rapat koordinasi dan kegiatan keluar daerah | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Mobil Jabatan | Jumlah pengadaan Mobil jabatan | Administrasi umum | | Program penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan perlengkapan Rumah jabatan/dinas | Pengadaan perlengkapan Rumah jabatan/dinas | Administrasi umum | | Program penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 21 | 4.0 | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | jumlah perlengkapan gedung kantor | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | jumlah peralatan rumah jabatan/dinas | Administrasi Umum | jumlah peralatan rumah jabatan/dinas | Program penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | jumlah peralatan gedung kantor | Program penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Mebeleur | jumlah Mebeleur | Administrasi Umum | jumlah Mebeleur | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Administrasi Umum | jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Program penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | |
| | 4 | 403 | 1 | 21 | 4.0 | | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | luas gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | Program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------|--------------------|--|--|-------------------|---|--|--|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Bakesbang pol | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Program Pelayanan Kesekretariatan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 80 | Nilai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun | 1000 surat | Jumlah surat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun | Administrasi Umum | Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
| | | | | | | | | | Penyediaan Alat Tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | Administrasi Umum | Jumlah alat tulis kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
| | | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan yg digandakan yg tersedia | Administrasi Umum | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet | 12 bulan | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet | Administrasi Umum | jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah luasan bangunan dan lahan yg dibersihkan | 2050 m2 | Jumlah luas | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah luasan bangunan dan lahan yg dibersihkan serta yg di jaga keamanannya | Administrasi Umum | jumlah luasan bangunan dan lahan yg dibersihkan serta yg di jaga | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah surat kabar dan jumlah buku peraturan perundang - undangan | 84 exp dan 20 exp | Jumlah surat | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah surat kabar dan jumlah buku peraturan perundang - undangan | Administrasi Umum | jumlah surat kabar dan jumlah buku peraturan perundang - undangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah mamin yg tersedia | 70 kali | Jumlah makan | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah mamin yg tersedia | Administrasi Umum | jumlah mamin yg tersedia | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah | 152 OH | Jumlah pelaksanaan | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah | Administrasi Umum | jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | jumlah peralatan yg diadakan | 12 jenis | Jumlah peralat | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | jumlah peralatan yg diadakan | Administrasi Umum | jumlah peralatan yg diadakan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |
| | | | | | Pengadaan kendaraan dinas / operasional | jumlah kendaraan yg diadakan | 4 jenis | Jenis kendaraan | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas / operasional yg diadakan | Administrasi Umum | jumlah kendaraan dinas / operasional yg diadakan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 20 |
| | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | jumlah barang milik daerah yg akan dinilai | 50 unit | Jumlah barang | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | jumlah barang milik daerah yg akan dinilai | Administrasi Umum | jumlah barang milik daerah yg akan dinilai | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|---|--|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|---|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | jumlah peserta peningkatan kapasitas SD Aparatur | 28 org | mlah Peserta | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | jumlah peserta bimtek peraturan perundangan | Administrasi Umum | jumlah peserta peningkatan kapasitas SD Aparatur | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | X | XX | 01 | 2.04 | 11 |
| | | | | | Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan yg dipelihara | 10 unit roda dua, 3 unit roda 4 | Jumlah dan jenis Kendaraan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas / operasional yg dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | jumlah item servis / perbaikan peralatan kerja yg rutin | 19 jenis peralatan | h jenis per | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | jumlah item servis / perbaikan peralatan kerja yg rutin | Administrasi Umum | jumlah item servis / perbaikan peralatan kerja yg rutin | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |
| | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | jumlah luasan gedung kantor yg dipelihara | 200 m2 | mlah luas | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | jumlah luasan gedung kantor yg dipelihara | Administrasi Umum | Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 38 |
| | | | | | Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah dok capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 15 dok | mlah doku | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah dok capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | jumlah dok capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
| | | | | Penyusunan Laporan Keuangan | jumlah dok laporan keuangan | 1 dokumen | mlah doku | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | jumlah dok laporan keuangan | Administrasi Keuangan | jumlah dok laporan keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
| | | | | Penyusunan/Reviu Renstra | jumlah dok renstra | 1 dokumen | mlah doku | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | jumlah dok renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dok renstra | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | Program Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama | Prosentase Peningkatan Pemahaman Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | 10% | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|--|--------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Kader Bela Negara | jumlah kader bela negara | 300 org | Jumlah | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | jumlah kader bela negara | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | jumlah kader bela negara | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Prosentase Peningkatan Pemahaman Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan | jumlah peserta pertemuan | 1000 orang | Jumlah | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | jumlah peserta pertemuan | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | jumlah peserta pertemuan | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Prosentase Peningkatan Pemahaman Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Forum Pembauran Kebangsaan | jumlah peserta pertemuan | 125 orang | Jumlah | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | jumlah peserta pertemuan | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | jumlah peserta pertemuan | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Prosentase Peningkatan Pemahaman Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 03 |
| | | | | | Prosentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yang Disebabkan Kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama | | 67,5% | Prosentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama | jumlah peserta pertemuan | 1440 org | Jumlah | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | jumlah peserta pertemuan | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | jumlah peserta pertemuan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Prosentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yang Disebabkan Kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|--|---|-----------|---------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|--------|------|----|------|----|--|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | Pembinaan Penghayat Kepercayaan | jumlah peserta pertemuan | 75 orang | Jumlah | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | jumlah peserta pertemuan | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | jumlah peserta pertemuan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Prosentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yang Disebabkan Kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | |
| | | | | | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba | jumlah peserta rakor | 250 orang | Jumlah | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | jumlah peserta rakor | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | jumlah peserta rakor | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Prosentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yang Disebabkan Kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | |
| | | | | | Fasilitasi Sinergitas Pelaku Ketahanan Ekonomi | jumlah pelaku ekonomi | 50 orang | Jumlah | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | jumlah pelaku ekonomi | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | jumlah pelaku ekonomi | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Prosentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yang Disebabkan Kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | |
| | | | | | Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Prosentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yg disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan | 67,5% | Prosentase | | | | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---------------|--|--|--|-----------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | FORKOPIMDA | Terlaksananya kegiatan fasilitasi forum pimpinan daerah di Kota Malang | 22 kali rakor, 650 org | rlaksanan | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya kegiatan fasilitasi forum pimpinan daerah di Kota Malang | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terlaksananya kegiatan fasilitasi forum pimpinan daerah di Kota Malang | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Prosentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yg disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 04 |
| | | | | | | Kewaspadaan Dini di Daerah | Terlaksananya kegiatan deteksi dini di Kota Malang | Laporan IPOLEKS OSBUD 240 hari, 4 rekom, sosialisasi 200 org | Laporan | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya kegiatan deteksi dini di Kota Malang | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terlaksananya kegiatan deteksi dini di Kota Malang | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Prosentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yg disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 04 |
| | | | | | | Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing | Terlaksananya pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kegiatan orang asing | 1 kali sosialisasi dgn 100 org peserta, 2 kali pemantauan | Kali | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kegiatan orang asing | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terlaksananya pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kegiatan orang asing | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Prosentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yg disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 04 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---|--|----------------|---------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | | | | | Penanganan Gangguan Konflik Sosial | Terlaksananya kegiatan penanganan gangguan konflik sosial di Kota Malang | 4 giat (1 tim) | Kegiatan | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya kegiatan penanganan gangguan konflik sosial di Kota Malang | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terlaksananya kegiatan penanganan gangguan konflik sosial di Kota Malang | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Prosentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yg disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Prosentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat | 52,50% | Prosentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik | jumlah pelaku sosialisasi | 150 org | Jumlah | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | jumlah pelaku sosialisasi | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | jumlah pelaku sosialisasi | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Prosentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 04 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|---|---|--------------------|---------------------------|---|---|---|---|--|---|-----------------------------|-------------------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | | | | | Fasilitasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Bantuan Keuangan Partai Politik | jumlah proposal parpol yg terverifikasi | 16 parpol | Jumlah | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | jumlah proposal parpol yg terverifikasi | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | jumlah proposal parpol yg terverifikasi | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Prosentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | jumlah personil pemantauan dan jumlah peserta pertemuan | 510 org dan 2 kali | Jumlah | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | jumlah personil pemantauan dan jumlah peserta pertemuan | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | jumlah personil pemantauan dan jumlah peserta pertemuan | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Prosentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 04 |
| | | | | | Prosentase Peran Serta Ormas dalam Pembangunan | | | Prosentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Ormas | jumlah ormas yg terdata | 70 ormas | Jumlah | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | jumlah ormas yg terdata | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | jumlah ormas yg terdata | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Prosentase Peran Serta Ormas dalam Pembangunan | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------|------------------|--|------------------------------|---------------------------|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|-------------------------|--------|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | |
| | | | | | Pengawasan Ormas | jumlah kegiatan pemantauan, jumlah ormas yang dipantau | 50 kali pemantauan, 50 ormas | Jumlah | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | jumlah kegiatan pemantauan, jumlah ormas yang dipantau | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | jumlah kegiatan pemantauan, jumlah ormas yang dipantau | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Prosentase Peran Serta Ormas dalam Pembangunan | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 03 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|--------|----------------------------------|------------------|-----------|-------------|---|--|--|--|---|--|--|--------------------------------|----------------------------|------|----|----|------|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| Penanganan Bencana Daerah | | 4 | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | | | | | | | Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | Urusan Wajib | | | | | | | |
| | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 5 | 1 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Persentase masyarakat tangguh bencana | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | | Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana | Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kajian risiko bencana yang disusun | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Rawan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana Bencana yang disusun | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 01 |
| | | | | | | | | | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan tentang kebencanaan yang disusun | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan tentang kebencanaan yang disusun | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Skor Indeks Ketahanan Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 01 |
| | | | | | | | | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Skor Indeks Ketahanan Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 02 | |
| | | 4 | 5 | 1 | 15 | 5 | | Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 02 | |
| | | | | | | | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Skor Indeks Kapasitas Daerah | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Skor Indeks Kapasitas Daerah | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 06 | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|---|--------|---------------|------------------|---|---|---------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | | | | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 08 |
| | | 4 | 5 | 1 | 15 | 3 | Penyebarluasan informasi dan potensi bencana | Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi untuk pengurangan risiko bencana | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Rawan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 02 |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 04 |
| | | 4 | 5 | 1 | 15 | 2 | Pemantauan untuk pencegahan bencana | Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana | | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah analisis yang dihasilkan untuk stakeholder terkait | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 05 |
| | | | | | | | | | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 03 |
| | | 4 | 5 | 1 | 15 | 4 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana | Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana | | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Skor Indeks Ketahanan Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 03 |
| | | 4 | 5 | 1 | 16 | | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 5 | 1 | 16 | 5 | Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana | Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 04 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------|--------|---------------|---|--|-------------|--------|---|--|---|--|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------|-----------------|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode |
| | | 4 5 1 | 16 | 6 | Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana | Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya | | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Rata-rata <i>respond time</i> bencana = < 1 Jam | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 05 03 2.03 02 |
| | | | | | | Rata - rata waktu tanggap (respond time) bencana | | | | | | | | | | | |
| | | 4 5 1 | 16 | 4 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana | Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana | | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Rata-rata <i>respond time</i> bencana = < 1 Jam | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 05 03 2.03 02 |
| | | 4 5 1 | 16 | 2 | Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana | Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana | | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 05 03 2.03 03 |
| | | | | | | | | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Rata-rata <i>respond time</i> bencana = < 1 Jam | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 05 03 2.03 02 |
| | | 4 5 1 | 16 | 1 | Pelatihan dan simulasi darurat bencana | Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/Relawan yang dilaksanakan | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 05 03 2.02 02 |
| | | 4 5 1 | 16 | 3 | Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana | Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan | | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Rata-rata <i>respond time</i> bencana = < 1 Jam | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 05 03 2.03 02 |
| | | 4 5 1 | 17 | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana | | | | | | | | | | | 1 05 03 2.03 04 |
| | | 4 5 1 | 17 | 4 | Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana | Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun | | | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 05 03 2.02 07 |
| | | 4 5 1 | 17 | 5 | Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat | Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan | | | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 05 03 2.02 07 |
| | | | | | | Persentase tertanganinya infrastrukturnya rusak pasca bencana | | | | | | | | | | | |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|---------------|------------------|-----------|-------------|--------|--|--|----------|--------------------|--|--|-------------------|-------------|--|----------|--|--|---|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 40 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 42 | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 43 | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | | | | | | | | | Penyediaan bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor | | | Penyediaan bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 14 |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 44 | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 45 | | | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 61 | | | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |
| | | | | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 24 |
| | | | | | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 25 |
| | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 13 |
| | | | | | | | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 03 |
| | | | | | | | | | penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | | | penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 09 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|---|--------|---------------|------------------|---|---|---------------------------|--|---|---|--|--|----------------------------|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | | | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Mesin/Kartu Absensi | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.04 | 01 |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapat penjaminan | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 05 |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 64 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | Jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Skor Indeks Risiko Bencana | | | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 04 |
| | | | | | | | | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.04 | 03 |
| | | | | | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.04 | 02 |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 72 | Peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | | | | | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan | Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.04 | 10 |
| | | | | | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.04 | 11 |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns | Jumlah PNS yang dipelihara kesehatannya | Administrasi Umum | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 04 |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|------------------|-----------|-------------|--------|--|--|----------|--------------------|---|---|---|-------------|--|----------|---|----|----|------|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 4 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan Bulanan/semesteran yang disusun | Administrasi Keuangan | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
| | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan | | | Administrasi Keuangan | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.02 | 01 | | |
| | | | | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun | | | Administrasi Keuangan | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.02 | 02 | | |
| | | | | | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan | | | Administrasi Keuangan | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.02 | 04 | | |
| | | | | | | | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | | | Administrasi Keuangan | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.02 | 08 | | |
| | | | | | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun | | | Administrasi Keuangan | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.02 | 09 | | |
| | | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 13 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen RKA/DPA dan PRKA/DPPA | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.01 | 02 | | |
| | | | | | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen LKjIP | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.01 | 03 | | |
| | | | | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.01 | 04 | | |
| | | | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 | | |
| | | | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 18 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | Persentase | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |

| Struktur Organisasi | RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|---|--------|---------------|------------------|---|---|---------------------------|--|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| | Kode Program/Kegiatan | | | Urusan | Bidang Urusan | Program/Kegiatan | Indikator | Target 2021 | Satuan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| | | | | | | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 38 |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 29 |
| | | | | | | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Jumlah Mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 39 |
| | | | | | | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 40 |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 32 |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 34 |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Skor IKM | | | X | XX | 01 | 2.03 | 35 |

| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|---|-------------------|------|----|----|------|------|----|--|--|--|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 7 | | | | | | | | |
| KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN | | 7 | 01 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Program Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Penyusunan Data Monografi Kecamatan | Jumlah Dokumen Data Monografi Kecamatan | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Data Monografi Kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | | | 7 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | | | |
| | | | | | | | | | | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | | | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | | | | |
| | | | | | | | | | | Penyusunan Data Monografi Kelurahan | Jumlah Dokumen Data Monografi Kelurahan sebagai arah pembangunan | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Kelurahan sebagai arah pembangunan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | | | 7 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | | | |
| | | | | | | | | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan | Jumlah RT/RW terfasilitas | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | | 7 | 01 | 03 | 2,02 | 03 | | | | |
| | | | | | | | | | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | | | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | | | | |
| | | | | | | | | | | Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan Umum | Jumlah Patroli | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | | | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | | | | |
| | | | | | | | | | | Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan | Jumlah Dokumen | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | | | 7 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | | | | |

| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--------------------|---|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kelurahan yang terfasilitasi | | | | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kelurahan yang terfasilitasi | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan PKK Kelurahan | | | | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan PKK Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Sosial Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan | Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi | | | | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan | Jumlah yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat kelurahan | Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat | | | | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Penyusunan Profil Kelurahan | Jumlah dokumen pemutakhiran Profil Kelurahan | | | | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen pemutakhiran Profil Kelurahan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 01 |
| | | | | | Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah | Jumlah Modin dan Perawat Jenazah terfasilitas | | | | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Modin dan Perawat Jenazah terfasilitas | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pembinaan Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam terfasilitas | | | | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam terfasilitas | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu | Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu terfasilitas | | | | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu terfasilitas | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | | | | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 |

| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|---|----|---|---|---|--|---|--|---|---|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | | | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 04 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana Kewilayahan | Dokumen Data base kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpas) | | | Evaluasi Kelurahan | Dokumen Data base kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpas) | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 04 |
| | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan | Jumlah kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 |
| | | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU TAMBAHAN) | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU TAMBAHAN) | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 |
| | 5 | 01 | 0 | 7 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 0 | 7 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 0 | 7 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 0 | 01 | 7 | 3 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | 5 | 01 | 0 | 04 | 7 | 2 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 15 |
| | 5 | 01 | 0 | 09 | 7 | 5 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 22 |
| | 5 | 01 | 0 | 04 | 7 | 5 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah petugas pengamanan kantor | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah petugas pengamanan kantor | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 05 |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | 7 | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |

| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
| | 5 | 01 | 0 | 01 | | | | | | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 02 |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
| | 5 | 01 | 0 | 01 | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
| | 5 | 01 | 0 | 02 | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 09 |
| | 5 | 01 | 0 | 07 | | | | | | Peningkatan/peimbangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
| | 5 | 01 | 0 | 05 | | | | | | Peringatan/kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
| | 5 | 01 | 0 | 04 | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Administrasi Umum | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
| | 5 | 01 | 0 | 01 | | | | | | Penyusunan/ reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
| | 5 | 01 | 0 | 00 | | | | | | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |

| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--------|----|----|----|------|------|----|--|--|
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 1 | 2.02 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) | Jumlah ZI | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah ZI | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pengadaan Perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor (dan Sumur Injeksi) | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor (dan Sumur Injeksi) | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | | | | |
| | 5 | 01 | 0 | 04 | | | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 18 | | |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 11 | | |
| | 5 | 01 | 0 | 04 | | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 12 | | |
| | 5 | 01 | 0 | 00 | | | | | | | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 | | |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | | | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 02 | | |
| | 5 | 01 | 0 | 02 | | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | X | XX | 01 | 2.03 | 30 | | |
| | 5 | 01 | 0 | 00 | | | | | | | Penyusunan/reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen standar pelayanan | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.01 | 05 | | |
| | 5 | 01 | 0 | 03 | | | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Nilai survey kepuasan internal | | | X | XX | 01 | 2.03 | 10 | | |

| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|---|----|---|---|---|---|----|--|---|-----------------------|--------------------|--|---|---------------|--------|------|----|----|------|----|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Program | Indikator Program | Bidang Urusan | Urusan | Kode | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
| | 5 | 01 | 0 | 00 | | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Administrasi Keuangan | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan Sasaran pembangunan daerah dan berorientasi *outcome*, meliputi :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. Pertumbuhan Ekonomi;
3. Gini Ratio (Indeks Gini);
4. Angka Kemiskinan;
5. Indeks Modal Sosial (IMS);
6. Indeks Reformasi Birokrasi;
7. Indeks Pendidikan;
8. Indeks Kesehatan;
9. Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity (PPP)*;
10. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif;
11. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI);
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD);
13. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
14. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas);
15. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
16. Persentase Peraturan Daerah yang Ditegakkan;
17. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
18. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
19. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
20. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD);
21. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN);
22. Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun relevansi antara indikator kinerja pembangunan dengan sasaran pembangunan daerah beserta target pencapaian sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023, untuk tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama

| No | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2021 | TARGET TAHUN 2022 |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya | Indeks pembangunan Manusia | 81,32 | 83,80 |
| 2. | Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan | Pertumbuhan Ekonomi | 4,5% | 5,9% |
| | | Gini Ratio | 0,377 | 0,37 |
| 3. | Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender | Angka Kemiskinan | 4,07 | 3,43 |
| | | Indeks Modal Sosial | 85,68 | 87,84 |
| 4. | Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi | 76 | 78 |
| 5. | Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter | Indeks Pendidikan | 0,82 | 0,84 |
| 6. | Meningkatnya kualitas layanan kesehatan | Indeks Kesehatan | 0,818 | 0,828 |
| 7. | Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan | Indeks Daya Beli / Purchasing Power Parity | 0,848 | 0,851 |
| 8. | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif | Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif | 6,2% | 6,3% |
| 9. | Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | 4,20 | 4,35 |
| 10. | Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) | 84,46 | 85,23 |
| 11. | Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial | Persentase penurunan PMKS | 2% | 5% |
| 12. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | 0,868 | 0,884 |
| | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 91,28 | 97,10 |
| 13. | Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum | Persentase Peraturan Daerah yang ditegakkan | 60% | 82% |
| 14. | Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif | Nilai SAKIP | 82,05 | 83,5 |
| | | Opini BPK | WTP | WTP |
| | | Nilai Maturitas SPIP | 4,1 | 4,2 |
| | | Rasio PAD | 0,28 | 0,30 |
| 15. | Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN | Indeks Profesionalisme ASN | 74,38 | 75,84 |
| 16. | Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi | Indeks Kematangan SPBE | 4,21 | 4,45 |

Sedangkan indikator kinerja pembangunan yang harus dicapai oleh pemerintah daerah, beserta target pencapaian tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Pembangunan

| No | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2021 |
|----|--|------------------------------|
| 1 | Pertumbuhan ekonomi | 4,5% |
| 2 | PDRB per kapita (ADHK) | 52.341.295,3 (dalam juta) |
| 3 | PDRB per kapita (ADHB) | 72.772.705,4 (dalam juta) |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,5% |
| 5 | Persentase penduduk miskin | 4,07% |
| 6 | Indeks Kedalaman Kemiskinan | 0,55 |
| 7 | Jumlah Penduduk miskin | 35.390 |
| 8 | Pertumbuhan Jumlah Penduduk miskin | 0% |
| 9 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 81,32 |
| 10 | Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 0% |
| 11 | Angka Harapan Hidup (AHH) | 73,15 |
| 12 | Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) | 0% |
| 13 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 10,18 |
| 14 | Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 0,1% |
| 15 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 16,28 |
| 16 | Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) | 1,9% |
| 17 | Pengeluaran Perkapita | 1.608.906 (per bulan) |
| 18 | Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita | - |
| 19 | Indeks Gini Ratio | 0,377 |
| 20 | Perubahan Indeks Gini Ratio | 0% |

BAB VII PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

RKPD Tahun 2021 menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2018–2023 pada tahun kedua. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2021, mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. RKPD Tahun 2021 merupakan landasan penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021;
- b. Terhadap program/kegiatan yang tidak tercantum dalam Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan sepanjang merupakan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat *specific grant* atau dengan peruntukan khusus atau merupakan instruksi/permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat/Provinsi, yang peruntukannya memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang, merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, dapat diproses dalam penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD;
- c. Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Tahun 2021 merupakan perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun berkenaan sebagai pedoman penentuan plafon anggaran;
- d. Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2021 merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan berdasarkan perkiraan/asumsi;
- e. Kepastian sumber dana tiap-tiap usulan program/kegiatan yang bersifat *block grant* mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- f. Usulan lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah merupakan perkiraan, sedangkan kepastian lokasi

mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;

- g. Dalam Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021, Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan di Kota Malang wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergitas;
- h. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong.

7.2. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RKPD Tahun 2021, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun 2021 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang hasilnya dibahas lebih lanjut bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kota Malang guna mendapatkan kesepakatan bersama;
2. RKPD Tahun 2021 ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dijadikan pedoman perumusan dan penetapan Renja Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019